NUSANTARA
Sejarah Indonesia
Bernard H. M. Vlekke

NUSANTARA

SEJARAH INDONESIA

NUSANTARA

SEJARAH INDONESIA

Bernard H. M. Vlekke

Jakarta:
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
bekerjasama dengan Freedom Institute dan Balai Pustaka

Nusantara: Sejarah Indonesia

Judul Asli
Nusantara: A History of Indonesia

Diterjemahkan dari edisi tahun 1961

KPG 202-2008-93-S

Penerjemah
Samsudin Berlian

Penyunting
Zaim Rofiqi
Mardi Siswoko Bakti

Perancang Sampul
Rully Susanto

Penataletak
Sijo Sudarsono
Iedham Fitrianjaya Nugroho

Cetakan Pertama, April 2008

VLEKKE, Bernard H.M.
Nusantara: Sejarah Indonesia
Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2008
xxiv + 528 hlm.; 14 cm x 21 cm
ISBN-13: 978-979-91-0107-5

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.
Isi di luar tanggungjawab percetakan.

DAFTAR ISI

DAFTAR PETA

SINGKATAN

BKI	Bijdragen van het Koninklijk Instituut
CD	"Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum"
ENI	*Encyclopedie van Nederlandsch-Indië*
ENI Aanv.	*Encyclopedie van Nederlandsch-Indië: Aanvullingen*
IC	*Indische Gids*
Ind.	*Indonesië*
KS	*Koloniale Studiën*
Krom, HJG	Krom, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis*
Krom, IHJK	Krom, *Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst*
Linsch. V.	Linschoten Vereeniging
Stapel, Gesch.	Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch-Indië*
TBG	*Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*
VBG	*Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*
VKAW	*Verhandelingen Koninklijke Akademie van Wetenschappen*
VKI	*Verhandelingen Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde*
TG	*Tijdschrift voor Geschiedenis*

PRAKATA

EDISI pertama buku ini diterbitkan pada 1943. Saya mulai menulis sekitar 1941, hanya beberapa bulan sebelum serangan atas Pearl Harbor. Pada waktu itu saya tinggal di Cambridge, Massachusetts, dan perhatian publik Amerika semakin terarah pada Asia Tenggara, suatu wilayah yang tiba-tiba disadari memiliki kepentingan strategis dan ekonomis yang besar bagi pertahanan Amerika Serikat. Tapi bahkan sebelum karya itu selesai, seluruh Asia Tenggara telah diduduki Jepang. Akibat pendudukan atas Belanda dan Hindia Belanda, saya harus bergantung pada koleksi buku dan majalah yang sangat besar jumlahnya di Harvard sebagai bahan sumber saya. Untung koleksi ini ternyata mengandung hampir semua buku dan majalah yang saya butuhkan. Saya berterimakasih kepada Harvard University dan, khususnya, kepada Direktur dan Staf Perpustakaan Widener, untuk fasilitas berlimpah yang telah mereka sediakan.

Dalam mempersiapkan edisi baru *Nusantara* yang sepenuhnya direvisi ini, saya memanfaatkan buku dan artikel yang ditulis antara 1945 dan 1958. Teks ini direvisi dan diperbaiki menurut hasil riset historis terbaru. Tapi yang jauh lebih penting ialah bantuan yang saya terima dari kolega saya di Universitas Leiden, Profesor C. C. Berg, yang membantu saya dengan pengetahuannya yang mendalam tentang berbagai bahasa dan budaya di Indonesia.

Profesor Berg dengan suka hati membaca dan mendiskusikan naskah dengan saya. Tiada habis rasa terimakasih saya kepadanya. Bantuan ini memungkinkan saya menulis ulang empat bab pertama buku saya. Bab-bab yang praktis baru dan kini, saya harap, lebih tepat mencerminkan riset terbaru dalam bidang sastra dan budaya Jawa kuno yang sangat sulit itu. Pada butir-butir tertentu, para spesialis dalam bidang ini punya pendapat yang sangat berbeda. Bila begitu, saya mencoba meringkaskan pro-kontra pandangan yang saya anggap paling mendekati kebenaran historis.

Ada bab-bab yang praktis tidak berubah, kecuali beberapa acuan terhadap publikasi baru dan penghilangan rincian yang secara historis kurang penting. Untuk seluruh periode sampai 1800, teks ini disusun ulang untuk menonjolkan sejarah negara-negara dan pranata-pranata di Indonesia; dan akibatnya mungkin, saya menjadi kurang memaparkan sejarah kolonial Belanda. Tapi toh, sekarang, seperti halnya pada 1943, buku ini dirancang sebagai sejarah Indonesia dan bukan perluasan perusahaan dan koloni Belanda di luar negeri. Saya yakin bahwa maksud ini lebih sepenuhnya terwujud dalam edisi ini daripada dalam edisi pertama.

Tampaknya wajar untuk menutup buku ini dengan keruntuhan negara kolonial Belanda pada 1941. Pendudukan Jepang dan revolusi yang terjadi kemudian lebih merupakan bagian dari awal sejarah Republik Indonesia, ketimbang akhir kekuasaan Belanda.

Saya sangat berutang budi kepada Mr Bruce Burton, di Cambridge, Inggris, untuk sarannya mengenai gaya penulisan, dan kepada Miss Louise Klumpers untuk kesabarannya yang tak habis-habis dalam mengetik dan mengetik ulang naskah saya.

Den Haag/Leiden, Juli 1958
B. H. M. Vlekke

PENGANTAR

LUTHFI ASSYAUKANIE

SALAH satu guna ilmu sejarah adalah menjelaskan latarbelakang dan sebab-musabab terjadinya suatu peristiwa. Tidak ada kejadian sosial-politik yang berdiri sendiri. Ia selalu terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Para pengamat politik cenderung menggunakan ingatan pendek ketika menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Mereka lebih suka merujuk periode Orde Baru (1966-1998) sebagai sumber persoalan yang terjadi kini. Masa-masa sebelum Soeharto berkuasa biasanya absen dari penjelasan, padahal banyak persoalan yang terjadi sekarang ini berakar jauh ke belakang.

Sebagai contoh, meruyaknya kekerasan atas nama Islam dan meningginya semangat keberagamaan di Indonesia akhir-akhir ini kerap dijelaskan dengan merujuk pada era Soeharto dan bagaimana penguasa Orde Baru ini memperlakukan Islam. Sikap antagonis Soeharto terhadap Islam, khususnya pada masa-masa awal kekuasaannya, kerap diklaim telah mendorong tumbuhnya kelompok atau gerakan radikal. Tekanan Soeharto yang berlebihan terhadap gerakan Islam politik membuat artikulasi keislaman mereka tersumbat. Karena itu, ketika kekuasaan Soeharto tumbang dan ada ruang kebebasan yang cukup besar, berbagai kelompok Islam politik itu bermunculan.

Tidak ada yang salah dalam penjelasan seperti itu. Suatu fenomena sosial tentu saja tidak terjadi karena satu faktor saja. Namun mengabaikan faktor sejarah yang lebih panjang akan menghalangi kita dalam melihat persoalan secara lebih komprehensif dan adil. Di tengah dominasi kerangka berpikir pertarungan Islam dan Barat, atau prasangka-prasangka berlebihan terhadap imperialisme Amerika, perspektif historis menjadi penting agar kita terhindar dari rabun jauh dalam melihat sejarah kita sendiri.

Para sejarawan umumnya memiliki pandangan yang lebih utuh dalam melihat suatu fenomena atau peristiwa sosial-politik. Berbeda dari para pengamat umumnya, para sejarawan selalu mengaitkan setiap masalah dengan peristiwa jauh di belakang. Merle Ricklefs, sejarawan Australia, misalnya, membuktikan hal itu dalam buku terbarunya, *Polarising Javanese Society*.[1] Buku ini merupakan karya yang sangat baik dalam melihat gejala kebangkitan Islam di Indonesia. Ricklefs memang tidak membahas gerakan Islam kontemporer, melainkan tentang masa-masa pembentukan kesadaran Islam, yakni pada paruh pertama abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Menurut gurubesar Universitas Melbourne itu, rentang masa satu abad ini (1830-1930) menjadi masa-masa krusial pembentukan karakter Islam Indonesia.

Perkembangan Islam Indonesia kontemporer tidak terlepas dari latarbelakang masa silamnya yang jauh itu. Bangkitnya semangat keagamaan yang muncul belakangan ini tidak muncul begitu saja, tapi merupakan rangkaian dari perjalanan panjang Islamisasi di Indonesia. Ricklefs meyakini bahwa proses penguatan karakter Islam bermula sejak 1830, setelah berakhirnya Perang Jawa dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Pada rentang masa inilah terjadi gelombang pasang kaum "putihan" yang tak ada presedennya dalam sejarah Indonesia.

---

1 M. C. Ricklefs, *Polarising Javanese Society: Islamic, and Other Visions, 1830-1930* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2007).

Ricklefs menggunakan istilah "putihan" untuk merujuk kelompok "santri". Istilah terakhir ini digunakan oleh Clifford Geertz untuk membedakannya dari Islam "priyayi" dan "abangan".[2] Menurut Ricklefs, istilah putihan lebih populer dan lebih pas sebagai lawan kata "abangan". Abangan sendiri adalah istilah yang baru muncul pada abad ke-19. Bagi Ricklefs, sejarah kemunculan istilah itu penting untuk menyimak awal mula munculnya polarisasi dalam masyarakat Islam di Jawa dan sekaligus sebagai awal mula lahirnya kesadaran baru masyarakat santri Muslim.

Abad ke-19 adalah masa yang sangat menentukan bagi budaya dan peradaban di Eropa. Bagi Ricklefs, masa ini juga merupakan periode yang sangat krusial bagi sejarah dan masa depan kehidupan beragama di Indonesia. Berbagai polarisasi dan ketegangan sosial yang terjadi pada masa ini memiliki implikasi jauh ke depan. Istilah abangan muncul pada awal mula polarisasi itu. Kaum putihan adalah kelompok yang pertama kali memperkenalkan istilah itu. Bagi mereka, mayoritas Muslim Indonesia adalah abangan yang menjalankan Islam tidak sempurna. Hanya merekalah, kaum putihan, yang menjalankan Islam secara benar.

Sebelum abad ke-19, kehidupan keagamaan di Indonesia lebih diwarnai dengan sintesa mistik (*mystic synthesis*) yang diambil dari berbagai tradisi dan khazanah budaya Indonesia pra-Islam.[3] Islam sendiri disikapi sebagai salah satu khazanah budaya yang kaya. Mayoritas Muslim di Indonesia pada rentang abad ke-14 hingga awal abad ke-19, menurut Ricklefs, menjalankan agama mereka dengan semangat sintesa semacam itu. Kaum putihan yang muncul pada awal abad ke-19 menamai fenomena keberagamaan yang "kurang Islami" itu sebagai abangan. Menurut mereka, kaum abangan adalah "orang-orang yang tak saleh, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama".[4]

---

2 Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

3 M. C. Ricklefs, *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries* (Norwalk: EastBridge, 2006).

4 Ricklefs, *Polarizing Javanese Society*, hlm. 86.

Para haji dan pelajar yang pulang dari Mekah memainkan peran cukup besar dalam menyemai tumbuhnya kaum putihan di Indonesia. Mereka inilah yang secara gencar dan terus-menerus melakukan pemurnian Islam di Nusantara. Tentu saja, yang menjadi model bagi mereka adalah praktik-praktik Islam yang dijalankan di Timur Tengah, di Arab Saudi khususnya. Bagi mereka, praktik-praktik Islam lokal, Islam abangan, adalah praktik-praktik yang keliru yang harus diluruskan.

Sejarah modern Indonesia, seperti dinyatakan oleh Harry J. Benda, adalah sejarah perluasan kaum santri, kaum putihan.[5] Proses santrinisasi ini tak hanya terjadi pada masa Orde Baru, atau apalagi pada masa setelahnya, ketika kelompok-kelompok keagamaan muncul dengan derasnya. Fenomena munculnya berbagai gerakan Islam belakangan ini tak bisa dipisahkan dari akar sejarahnya yang panjang itu, yakni pergulatan kaum putihan dalam melawan sintesa-sintesa mistik yang menjadi ciri khas Islam Nusantara.

* * *

Buku sejarah menjadi sumber yang baik untuk membantu memperkaya analisis kita tentang persoalan-persoalan kontemporer. Buku *Nusantara* yang ada di tangan Anda ini juga merupakan mataair yang tak gampang kering. Meskipun telah berusia lebih daripada 60 tahun (pertama kali diterbitkan pada 1943), informasi yang dikandungnya tetap penting dan relevan untuk melihat berbagai peristiwa sejarah di masa silam.

Nusantara memberikan informasi yang sangat baik tentang masa-masa pembentukan Nusantara. Ketika buku ini diterbitkan pertama kali, istilah 'nusantara' belum digunakan secara luas. Orang yang memperkenalkan kata ini adalah Ki Hadjar Dewantara (1889-1959), tokoh nasional pendiri Taman Siswa. Secara sengaja Vlekke menggunakan kata itu untuk menghormati Dewantara dan para tokoh pergerakan lainnya yang mengagungkan budaya dan khazanah Indonesia.

---

5 Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation* (The Hague & Bandung: van Hoeve, 1958), hlm. 14.

Tidak ada istilah yang lebih tepat untuk merujuk masa silam Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kecuali kata itu. Kata 'nusantara' sendiri merujuk pada periode khusus ketika Indonesia dikuasai oleh Majapahit, khususnya ketika kerajaan ini berada di bawah kendali patih besarnya, Gajah Mada. Majapahit adalah model negara kesatuan Indonesia di masa silam. Meskipun kejayaan kerajaan ini cukup singkat (1293-1389), sebagai simbol kesatuan Indonesia Majapahit sangatlah penting, terlebih bagi pergerakan nasional Indonesia yang membayangkan adanya model kesatuan politik di masa silam.

Pada masa-masa menjelang kemerdekaan, para pendiri republik ini cukup gencar mendiskusikan akar-akar kesatuan Indonesia. Muhammad Yamin barangkali merupakan tokoh nasional yang paling rajin mempromosikan Majapahit sebagai model bagi negara kesatuan Indonesia modern. Bagi Yamin, bukan Singasari dan bukan pula kerajaan-kerajaan Islam yang mempersatukan Nusantara, tapi Majapahit. Dalam rapat-rapat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), secara tegas Yamin mengakui peran penting Majapahit dalam menyatukan Nusantara.

Pilihan Vlekke terhadap istilah nusantara ketika Indonesia belum lagi merdeka merupakan keberanian tersendiri. Bagi Belanda, istilah ini adalah sesuatu yang subversif karena ia menyiratkan kesatuan Indonesia di masa silam sebelum datangnya koloni Belanda. Bagi Belanda, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tak pernah ada kecuali setelah mereka datang, yakni dengan terciptanya Hindia Belanda. Saya tidak tahu apakah Vlekke menggunakan istilah ini secara sengaja untuk mendiskreditkan pemerintahan Belanda, yang ketika buku ini diterbitkan mulai kehilangan kontrolnya atas Indonesia.

Nusantara merupakan karya pertama tentang sejarah Indonesia dengan perspektif komprehensif.[6] Selama ini, sejarah

6 Sebetulnya ada satu buku cukup lengkap tentang sejarah Hindia Timur yang ditulis oleh Eduard Servaas de Klerck, *History of the Netherlands East Indies*

Indonesia selalu ditulis secara sepotong-sepotong, baik dengan pendekatan geografis (seperti sejarah Sumatra, sejarah Jawa, sejarah Selebes, dll.) maupun pendekatan tematis (seperti flora di Kalimantan, pemberontakan Banten, topografi Sumatra, dll.). Saya menduga bahwa absennya pendekatan komprehensif ini bukan karena keengganan para sejarawan, tapi karena gagasan Indonesia sebagai negara kesatuan sebelum datangnya Belanda merupakan sesuatu yang absurd.

Dengan *Nusantara* Vlekke mencoba menjelaskan sesuatu yang absurd itu. Indonesia disatukan bukan oleh kolonialisme Belanda, tapi oleh masa silamnya yang gemilang yang bernama Nusantara. Bagi para perintis kemerdekaan, semangat seperti ini sangat penting untuk menegaskan bahwa mereka memiliki akar-akar sejarah kesatuan yang lebih kokoh—dan tentu saja lebih terhormat—daripada kolonialisme.

Sebagai karya sejarah, *Nusantara* memberikan potret besar Indonesia. Uraiannya tentang sejarah Indonesia pra-kolonial sangat mengagumkan dan kaya ilustrasi. Dua bab pertama berbicara tentang sejarah pembentukan Indonesia dimulai dari topografi wilayah, munculnya manusia Indonesia, dan kemudian terbentuknya masyarakat politik. Beberapa kerajaan besar seperti Sailendra, Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit mendapat uraian khusus dalam bab tiga.

Sebagai imperium, nafas Majapahit sebetulnya tidaklah terlalu panjang. Menurut catatan Vlekke, kejayaan Majapahit hanya berlangsung selama empat generasi, yakni generasi Kertarajasa, yang mendirikan kerajaan itu pada 1293, Jayanegara (1309-1328), Tribhuwana (1329-1350), dan Ayam Wuruk (1350-1389). Ayam Wuruk adalah raja Majapahit yang paling berhasil. Dia meninggal pada 1389, dan setelah kematiannya Majapahit mengalami kemunduran serius.

(Rotterdam: W.L. & J. Brusse n.v., 1938). Namun, seperti dikeluhkan banyak sarjana, buku ini sangat buruk penulisannya dan lebih banyak menekankan aspek-aspek kolonial ketimbang sejarah masa silam Indonesia.

* * *

Analisis Vlekke tentang kejatuhan Majapahit sangat penting. Pada 1920-an, ketika gerakan nasionalisme Indonesia mulai bangkit, keruntuhan Majapahit menjadi salah satu isu panas yang memantik ketegangan antara kelompok santri dan kelompok abangan. Kaum abangan, yang banyak berafiliasi ke Budi Utomo, menganggap Islam sebagai penyebab keruntuhan Majapahit. Islamlah yang menyebabkan peradaban Jawa mundur. Satu suratkabar Jawa, *Bramartani*, bahkan memuat kisah penyerbuan Demak ke kerajaan Majapahit, yang menjadi akhir sejarah imperium Jawa yang diagung-agungkan kaum abangan itu.[7]

Bahwa Demak melakukan serangan ke (sisa-sisa) kerajaan Majapahit mungkin benar. Tapi kejayaan Majapahit runtuh sudah pasti bukan disebabkan oleh kerajaan Islam. Ketika Ayam Wuruk mangkat, belum ada kerajaan Islam di Jawa. Yang sesungguhnya terjadi adalah selama periode kemunduran Majapahit, armada asing dari Cina mulai menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Dan memasuki abad ke-15, para pelaut Eropa (Spanyol dan Portugis) mulai berdatangan, merapat ke pantai-pantai Jawa. Dua kekuatan besar ini memainkan peran sangat penting atas semakin terpinggirnya kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa pada satu sisi, dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada sisi lain.

Jangan lupa bahwa selain Demak, ada kerajaan Mataram yang lebih daripada separuh periodenya dikuasai oleh raja-raja Muslim Jawa. Sultan Agung adalah pendiri kerajaan Mataram Islam (1613). Sebagai penerus langsung kerajaan Mataram Hindu, Sultan Agung tidak pernah merasa bahwa kerajaannya berdiri di atas kehancuran Majapahit; bahkan sebaliknya dia justru menganggap dirinya sebagai penerus Ayam Wuruk. Dalam hal gaya hidup, Sultan Agung bahkan sangat mengagumi moyangnya itu. Pujangga-pujangga istana bahkan terinspirasi *Nagarakertagama* karya Prapança dalam menulis *Babad Tanah Jawi*, yang

---

7 Tentang klaim-klaim kaum abangan dan ketidaksukaan mereka terhadap Islam, lihat Ricklefs, *Polarising Javanese Society*, khususnya bab 6 dan 7.

dipersembahkan untuk Sultan. Menurut Vlekke, *Babad Tanah Jawi* secara antusias menggambarkan Agung sebagai pewaris sah Ayam Wuruk. Vlekke menulis:

> *Babad Tanah Jawi* merangkum sejarah Jawa yang lebih kuno dengan cara sedemikian rupa sehingga mengarahkan perhatian pembaca kepada kedudukan Mataram yang unggul, yang dikatakan adalah negara penerus yang sah semua kerajaan pendahulunya dan khususnya Majapahit. Ia berusaha membuktikan bahwa bahwa Mataram bukan hanya penerus kerajaan Hindu Jawa terakhir, tapi juga bahwa keluarga penguasa adalah keturunan langsung penguasa Majapahit. Demikianlah, Agung dijadikan keturunan Ayam Wuruk dan kebijakannya melanjutkan kebijakan patih Majapahit yang agung, Gajah Mada. Perang-perangnya yang tak habis-habis mungkin saja diilhami oleh keyakinan bahwa dia ditakdirkan dan bahkan punya tugas memulihkan imperium Majapahit yang bahkan lebih jaya lagi dilihat ke belakang daripada dalam kenyataan.[8]

Bagi Sultan Agung dan raja-raja Muslim Jawa setelah dia, Majapahit bukanlah musuh seperti digambarkan berbagai literatur anti-Islam yang muncul pada paruh pertama abad ke-20, melainkan akar keberadaan mereka. Raja-raja Muslim Jawa umumnya sangat mengagumi Majapahit, dan mereka berusaha meniru kejayaan imperium besar itu ketimbang mendiskreditkannya.

Raja-raja Islam Jawa jelas lebih dekat ke tradisi Majapahit ketimbang ke tradisi Islam di semenanjung Arabia atau bahkan di pesisir Sumatra. Transisi dari kerajaan Hindu-Buddha ke Islam tampak tidak mengubah banyak tradisi yang ada. Raja-raja Muslim Jawa masih meneruskan tradisi-tradisi moyang mereka, termasuk dalam melakukan ritual-ritual kerajaan yang sangat kental bernuansa Hindu-Buddha.

Vlekke mempunyai penjelasan menarik mengapa masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam, tapi pada saat yang sama memiliki pemahaman dan praktik keagamaan yang begitu

---

8 Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara*, hlm. 163.

bersahabat dengan tradisi lokal (sinkretis). Para raja Jawa, menurut Vlekke, memilih Islam bukan karena mereka suka dengan agama itu, tapi karena situasi politik mendorong mereka untuk bertindak demikian. Pada abad ke-16, para pelaut Portugis mulai menjejakkan kakinya di pantai-pantai Jawa. Para raja Jawa dihadapkan pilihan sulit antara memilih bersekutu dengan Portugis atau bekerjasama dengan Johor dan Demak, yang berarti harus memilih antara Kristen dan Islam.

Melihat perilaku Portugis dan catatan kecurangan-kecurangan mereka, raja-raja Jawa kemudian lebih memilih Islam. Agaknya bukan hanya rasa kedekatan budaya dan sejarah masa silam yang membuat mereka lebih menerima bersekutu dengan kerajaan-kerajaan Islam, tapi juga karena agama ini memberikan fleksibilitas yang tinggi ketimbang Kristen. Jika mereka masuk agama Kristen, bukan hanya mereka harus tunduk pada kekuasaan Portugis, tapi juga harus mengganti tradisi mereka dengan budaya baru yang dibawa oleh orang-orang kulit putih itu. Selama beberapa abad, sebelum muncul kaum putihan (yang sangat dipengaruhi budaya Timur Tengah), raja-raja dan masyarakat Jawa menganggap Islam sebagai agama yang damai penuh dengan toleransi.

* * *

Ketegangan dan konflik yang terjadi antara kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan Jawa, dan juga antara kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya dan para pelaut Eropa yang berusaha mengoloni kawasan itu berpuncak pada "runtuhnya negara-negara Indonesia". Vlekke menjelaskan masalah ini pada bab 8, di mana ia menyimpulkan bahwa suksesnya Belanda menjajah Indonesia (Nusantara) bukan karena negeri kincir angin itu lebih perkasa dan memiliki kekuatan militer yang besar, tapi karena selama lebih daripada 60 tahun kerajaan-kerajaan Nusantara saling berperang dan saling berusaha menguasai. Belanda masuk pada saat yang tepat, kadangkala sebagai "penonton", kadang sebagai "wasit" yang memihak satu kelompok yang menang untuk kemudian dikuasai.

Satu-persatu kerajaan Nusantara jatuh ke tangan Belanda. VOC mengontrol sebagian besar jalur perdagangan di kawasan ini. Pada 1680, hampir seluruh perairan yang pernah dikuasai Majapahit direstorasi oleh Belanda, dan jadilah kekuatan kolonial ini sebagai penguasa kedua yang berhasil menyatukan Nusantara setelah Gajah Mada. Hanya beberapa pulau kecil yang lepas dari kontrol Belanda. Salah satunya adalah Bali, karena sifat rakyatnya yang suka perang. Belanda juga tampak tidak bernafsu menguasai Bali, karena pulau itu tak memiliki sumber alam yang berharga. "Satu-satunya barang dagangan yang ditawarkan Bali," tulis Vlekke, "ialah budak. Raja-raja kecil di situ saling menangkapi dan menjuali rakyat lawan mereka."[9]

Kontrol Belanda atas Nusantara samasekali tidaklah mudah. Selama tiga setengah abad keberadaannya, Belanda menghadapi ratusan pemberontakan dan puluhan lusin konflik sosial dan perang. Resistensi terhadap pemerintahan kolonial datang dari beragam etnis, suku, dan agama. Namun perlawanan yang paling gigih dan paling ditakuti Belanda adalah pemberontakan yang mengatasnamakan Islam. Ketakutan Belanda akan pemberontakan Islam tentu bukan karena kaum Muslim memiliki persenjataan canggih atau memiliki organisasi paramiliter yang kuat, tapi karena solidaritas keagamaan yang mereka galang. Solidaritas ini bisa melibatkan banyak sekali orang yang sukar dibendung.

Salah satu ikatan solidaritas yang mampu mengetuk setiap hati kaum Muslim untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial adalah jihad. Konsep ini pertama kali didengungkan pada akhir abad ke-17, ketika kerajaan Mataram dan Banten jatuh ke tangan Belanda. Sudah pasti, kaum Muslim Nusantara telah mengenal konsep ini sejak lama, lewat buku-buku tentang Islam atau lewat pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah di masjid. Tapi sebelum itu tidak begitu jelas apa makna jihad dan bagaimana menerapkannya. Baru setelah mereka berhadapan

9 Vlekke, *Nusantara*, hlm. 221.

secara nyata dengan "kaum kafir londo" arti jihad menjadi jelas, seperti kata Vlekke:

> Kejatuhan Mataram, lebih-lebih Banten, telah menyebabkan reaksi besar dalam dunia Muslim Indonesia. Orang mulai bicara tentang "jihad" melawan "kafir". Laut Jawa dibuat tidak aman oleh armada seorang perompak Melayu Minangkabau yang menyebut diri Ibnu Iskander ("keturunan Alexander Agung") dan seorang nabi Islam.[10]

Dengan segera wacana jihad mengobarkan semangat juang. Kaum Muslim yang selama itu merasa tidak puas dengan keadaan dengan cepat terpancing untuk terlibat dalam gerakan-gerakan jihad. Belanda harus bekerja keras membasmi gerakan jihad ini dan berusaha menangkap para pemimpinnya. Salah satu tokoh agama yang dituduh Belanda sebagai pengobar semangat jihad adalah Syeikh Yusuf, seorang ulama asal Makasar yang memiliki banyak pengikut di Banten. Ulama ini ditangkap dan kemudian diasingkan Belanda ke Afrika Selatan.

Di Mataram, benih-benih jihad sudah disemai sejak awal abad ke-18, ketika kontrol Belanda terhadap keraton semakin kuat, namun buah jihad baru bisa dipanen pada 1825, ketika seorang pangeran Jawa yang taat, Diponegoro, menyerukan konsep ini dan mengobarkan semangat perang melawan Belanda. Jihad yang dikomandoi Diponegoro merupakan gerakan yang paling berbahaya dan paling massif yang pernah dihadapi Belanda di Jawa, dan mungkin juga di seluruh Nusantara. Diponegoro melakukan jihad selama lima tahun dengan cara terang-terangan dan bergerilya. Peristiwa yang dikenal sebagai Perang Jawa ini berakhir pada 1830 dengan ditangkapnya sang pengobar jihad, yang kemudian dibuang ke Minahasa. Vlekke mencatat, "...hampir 15.000 serdadu pemerintah gugur, di antaranya 8.000 orang Eropa. Jumlah orang Jawa yang mati akibat perang, oleh penyakit

---

10 Vlekke, *Nusantara*, hlm. 201.

dan kelaparan selain oleh pedang, diperkirakan 200.000."[11]

Perang Jawa menciptakan trauma yang begitu besar bagi Belanda. Jihad menjadi kata yang sangat menakutkan. Orang-orang Jawa yang dianggap sinkretis dan toleran tiba-tiba menjadi pemberang dan mudah membunuh. Kegelisahan ini kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Islam, agama orang Arab yang telah membuat orang Jawa memberontak. Belanda mulai mengeluarkan kebijakan yang terkait langsung dengan Islam, seperti perjalanan haji dan kiprah pelajar Indonesia di Mekah. Pada awal 1880-an, pemerintah kolonial mengundang Christian Snouck Hurgronje, profesor studi Islam di Universitas Leiden, untuk mengadakan studi menyeluruh tentang Nusantara, khususnya pemeluk Islamnya. Snouck Hurgronje melakukan kajian yang sangat intensif. Ia berkunjung ke Mekah dengan menyamar sebagai Muslim dan mengunjungi Aceh untuk menulis karya monumentalnya tentang kerajaan Islam di wilayah paling ujung Nusantara itu.

Snouck Hurgronje membuat satu laporan kepada pemerintah kolonial tentang mengapa kaum Muslim Nusantara dan khususnya orang-orang Jawa yang toleran itu menjadi mudah marah dan bersedia mati demi agama mereka. Salah satu faktor penting yang membuat pola keberagamaan orang-orang Indonesia berubah, menurut Snouck Hurgronje, adalah para haji dan pelajar *Jawi* yang pulang dari Mekah. Para haji dan pelajar itu bukan hanya membawa pulang kurma dan air zamzam ke tanah *Jawi*, tapi juga ideologi dan pemahaman keislaman yang kaku dan intoleran. Dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang mereka anggap tak adil, para haji dan pelajar *Jawi* itu menemukan perpaduan yang cocok antara kekecewaan dan keinginan untuk menjadi lebih saleh. Jihad melawan "kafir londo" adalah jawaban yang tepat.

* * *

11 Vlekke, *Nusantara*, hlm. 318.

Lebih daripada satu abad setelah Snouck Hurgronje menjelaskan hasil temuannya tentang mengapa orang-orang Jawa mudah marah dan bersedia mati demi agamanya, berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama bermunculan di tanah *Jawi*. Meskipun "kafir londo" sudah pergi dan Nusantara sudah merdeka, semangat jihad dan api Perang Jawa masih terus berkobar. Kali ini musuhnya bukanlah pemerintah kolonial, tapi pemerintah Muslim keturunan Jawa yang dianggap kurang Islami. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah para tokoh Jawa yang menjadi presiden. Mereka adalah orang-orang yang sangat saleh untuk ukuran Islam Jawa abad ke-18. Tapi bagi "para pelajar yang terpengaruhi ideologi Mekah" seperti Imam Samudra, Amrozi, dan berbagai kelompok radikal lainnya, mereka adalah antek-antek "londo baru" bernama Barat.

Berbagai kelompok Islam radikal dan konservatif yang banyak muncul belakangan ini, baik yang menggunakan cara-cara kekerasan maupun yang diam-diam mendukungnya, adalah pewaris kaum putihan yang menganggap dunia di sekeliling mereka telah menjadi abangan. Meskipun masyarakat Indonesia secara umum telah jauh lebih Islami dibandingkan satu atau dua abad sebelumnya, kaum putihan selalu merasa bahwa "yang lain" adalah abangan dan hanya diri mereka sendiri yang putih, suci, dan bersih.

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG GEOGRAFIS

KEPULAUAN Indonesia, dengan wilayah darat dua juta kilometer persegi, hampir tiga kali lebih besar dibanding negara bagian Texas. Tapi kalau kita menghitung luasnya lautan di antara pulau-pulau itu, wilayah itu jauh lebih besar lagi. Dari barat ke timur, yakni dari titik barat Sumatra ke perbatasan Australia di Papua, jaraknya hampir 5.000 km.[1] Dalam geografi Amerika, ini sama dengan jarak dari San Francisco ke Kepulauan Bermuda. Dari utara keselatan, lebar permukaan darat-dan-laut ini sekitar 2.000 km, atau, sekali lagi dibandingkan dengan dunia belahan barat, jarak yang sama dari Buffalo, New York, ke Key West, Florida. Jadi total wilayah darat dan laut Kepulauan Indonesia mencapai 10 juta kilometer persegi. Ini dua setengah juta kilometer persegi lebih luas dibanding tanah yang membentuk Amerika Serikat kontinental tanpa Alaska.

Di ujung barat Kepulauan ini terletak Sumatra, memanjang dari barat laut ke tenggara, dan luasnya kira-kira sama dengan gabungan negara bagian Virginia, Carolina Utara dan Selatan, dan Georgia. Pantai barat Sumatra berbukit-bukit. Bagian timur terdiri atas dataran yang, mendekati laut, berubah jadi tanah basah dan rawa-rawa. Di sebelah tenggara Sumatra, terpisah oleh Selat Sunda

yang sempit, yang di beberapa titik hanya selebar 30 kilometer, terletak Pulau Jawa, yang luasnya sama dengan negara bagian New York dan memanjang hampir 1.200 kilometer dari barat ke timur. Di sebelah utara Jawa dan sebelah timur Sumatra terletak Kalimantan, sedikit lebih besar daripada Texas. Sementara Jawa sepenuhnya terbudidayakan, sembilan per sepuluh Kalimantan tertutup hutan. Di ujung timur Kepulauan ini, Papua menjadi wilayah transisi ke dunia Australia. Pulau ini adalah pulau terbesar kedua di dunia—peringkat pertama dipegang Greenland—tapi juga adalah salah satu wilayah paling kurang terbangun di bumi. Antara Kalimantan dan Papua tersebar gugusan pulau-pulau, yang terbesar ialah Sulawesi, dan pulau-pulau kecil Maluku yang terkenal sebagai kepulauan rempah-rempah.

Di sebelah selatan gugus pulau ini terletak Kepulauan Sunda Kecil yang tersebar antara Jawa dan benua Australia. Jadi, Kepulauan Indonesia adalah jembatan antara dua benua besar Asia dan Australia, dan kesimpulan logisnya tampaknya ialah bahwa: pertama, pulau-pulau di belahan barat pastilah menyerupai Asia dalam hal kehidupan flora dan fauna sementara gugus pulau di timur berhubungan dengan Australia, dan kedua, pulau-pulau yang ada di tengah tersebut akan mencerminkan transisi antara kedua benua itu, yang fitrahnya begitu berbeda.

Kalau kita lihat lebih cermat di peta, akan tampak bahwa lautan di antara benua Asia dan pulau-pulau Sumatra, Kalimantan, dan Jawa sangat dangkal, tidak ada yang lebih dalam dari 60 meter, sementara lebih jauh ke timur kita temukan kedalaman yang luarbiasa sampai 6.000 meter. Kesimpulannya jelas. Pulau-pulau yang disebut terdahulu pastilah terpisah dari daratan utama belum lama ini, atau paling tidak belum lama menurut para ahli geografi, yaitu setelah periode glasial terakhir, beberapa ribu tahun yang lalu. Ketika massa es yang besar yang menutupi sebagian permukaan bumi pada periode itu meleleh, level laut meningkat sekitar 60 meter dan tanah rendah di Asia tenggara tenggelam. Pulau-pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali pun terbentuk. Geografi modern menjelaskan perkembangan

geologis ini, tapi kisah sebenarnya tampaknya telah terpelihara baik dalam tradisi penduduk asli. Jan Huyghen van Linschoten, orang Belanda pertama yang menggambarkan keadaan Timur Jauh, mengisahkan cerita yang beredar pada abad ke-16, bahwa Semenanjung Malaya dan Sumatra membentuk satu benua luas berabad-abad lalu.[2] Baik sains maupun legenda memperjelas bahwa pulau-pulau di bagian barat ini pastilah punya ciri lebih mirip dengan Asia daripada Australia dalam kehidupan botani dan hewani. Tapi flora dan fauna Jawa ternyata agak berbeda dari Sumatra dan Kalimantan.

Ganjilnya bentuk rantai pegunungan di Hindia Timur[3] semakin membenarkan tesis sains dan cerita legenda mengenai asal-usul pulau-pulau Indonesia. Dari Asia, pegunungan itu turun dalam beberapa barisan yang sejajar. Barisan pertama yang membentuk bagian selatan Semenanjung Malaya dapat ditelusuri melewati Laut Jawa, di mana pulau-pulau Bangka dan Belitung merupakan sisa-sisa puncak pegunungan yang pernah megah itu, dan tampaknya terus berjajar sampai rantai pegunungan di Kalimantan bagian barat daya. Barisan kedua turun dari Burma, membentuk bagian utara Semenanjung Malaya, kemudian berderet membentuk dinding kokoh melewati Sumatra, menjadi tulang punggungnya. Di selatan Sumatra barisan itu membelok ketimur, di mana titik beloknya membentuk pulau gunung berapi yang sangat terkenal itu, Krakatau.

Dari Jawa rantai pegunungan itu berbaris ke timur dan membentuk Kepulauan Sunda Kecil, yang terpotong-potong oleh palung-palung dalam, dan mendekati benua Australia. Dari gunung-gunung itu hujan dan sungai membawa turun tanah yang menimbun sebagian laut yang dangkal dan membentuk dataran rendah di pantai-pantai ketiga pulau itu.

Di bagian timur Kepulauan Hindia Timur, Laut Arafura serupa dengan Laut Jawa di barat. Dangkal dan ditebari banyak pulau. Juga di sini kita temui sisa-sisa suatu benua yang pernah menghubungkan Australia dan Papua. Tidak mengherankan bahwa kedua daratan itu sangat serupa di zaman kita ini, khususnya

dalam kehidupan hewan. Misalnya, keduanya merupakan tempat tinggal marsupial, yang hanya ditemukan di bagian dunia itu. Tapi tampaknya seolah-olah benua Australia yang luas telah menjadi benteng yang tak tertembus, yang menghadang barisan pegunungan dari Asia yang menusuk seperti belati lewat Jawa dan Kepulauan Sunda. Belati itu menusuk batu karang dan bengkok, mula-mula ke arah utara melalui pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur dan kemudian membalik ke barat lewat Kepulauan Maluku bagian selatan. Seolah-olah dua massa daratan raksasa berbenturan di situ, dan guncangan itu menimbulkan deformasi yang sangat aneh. Selanjutnya letusan gunung berapi memperparah deformasi itu. Maka kita temui gunung-gunung tinggi menjulang langsung dari laut, dan di dekatnya kedalaman laut berbeda 6.000 sampai 9.000 meter hanya dalam jarak seratusan kilometer. Yang paling aneh adalah dua pulau Sulawesi dan Halmahera. Yang satu tampak seperti raksasa, yang lain seperti laba-laba pigmi merayap menuju laut. Yang lebih aneh lagi adalah flora dan fauna di situ. Dalam banyak hal, keduanya membentuk dunia tersendiri, yang berbeda dari tipe Asia dan Australia.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu wilayah paling vulkanik di dunia. Dari Sumatra bagian barat laut sampai Jawa dan Kepulauan Sunda lalu naik lewat Maluku ke arah Filipina, gunung-gunung berapi sambung-menyambung membentuk garis tak terputus. Letusan gunung dan gempa bumi begitu sering terjadi sehingga di beberapa daerah menjadi unsur penentu gaya arsitektur. Institut Seismografi Jakarta biasanya mencatat dua tiga gempa kecil sehari. Di wilayah ini permukaan bumi masih dalam periode formasi. Pulau-pulau timbul tenggelam. Gunung berapi yang paling terkenal ialah Krakatau, yang sebelum 1883 merupakan pulau setinggi 600 meter dan kemudian hancur oleh letusan yang menyemburkan air dan uap yang tak terkira. Letusan 1883 begitu dahsyat sehingga debu yang disemburkan mengelilingi dunia dua tiga kali sebelum mendarat.

Jadi, dari sisi geografi Kepulauan Indonesia tidak berupa

kesatuan. Hanya ada satu ciri umum pada bagian-bagian Kepulauan Indonesia: lokasi dekat khatulistiwa menjamin curah hujan berlimpah. Di beberapa daerah, khususnya yang dekat khatulistiwa seperti Sumatra bagian barat, Kalimantan bagian tengah, dan Papua bagian tengah, jumlah curah hujan per tahun lebih daripada 400 cm. Di pulau-pulau bagian barat hampir tiada hari tanpa hujan, sementara Bogor, dekat Jakarta, bisa menyombong mengalami badai guntur terbanyak di dunia, 322 kali setahun. Hampir tidak ada perbedaan musim. "Musim dingin" dan "musim panas" adalah kata-kata tanpa arti di Indonesia. Tapi, bahkan di dataran rendah suhu tidak pernah lebih panasdaripada musim panas di Middle West Amerika Serikat. Sejak 1866 suhu dicatat di Jakarta, stasiun meteorologis tertua di daerah tropika. Tidak pernah selama 75 tahun itu suhu naik di atas 35 derajat, yang berarti 13 derajat lebih rendah daripada suhu tertinggi yang tercatat di Idaho. Di sisi lain suhu tidak pernah turun di bawah 18 derajat, yang samadengan suhu musim panasrata-ratadi Portland, Oregon, dan Portland, Maine. Tapi kelembaban, khususnya pada malam hari, ditambah dengan keadaan tanpaangin, menimbulkan rasa panas yang tak tertahankan. Kemonotonan iklim, khususnya di bagian barat, dan rasa panasyangtak hilang-hilangpada malam hari tersebut, sangat memberatkan.

Di mana-mana di bumi tempat hujan turun terus-menerus dan berlimpah sepanjang tahun, dan ada suhu tinggi, tanah akan diselimuti hutan tropis yang lebat. Hutan seperti itu adalah salah satu musuh terbesar bagi kegiatan manusia. Lahan terbuka, dibersihkan dengan usaha berat, akan tertutup kembali dalam dua tiga tahun. Karena tumbuhan tropis, bagian Kepulauan yang paling layak dihuni manusia harus bercurah hujan tidak terlalu banyak tapi cukup memadai untuk mencegah kekeringan, dan tanah hasil erosi bahan vulkanik telah cukup memadai untuk dipakai dalam pertanian intensif. Keadaan ini ada di Jawa bagian tengah. Bukanlah sama sekali kebetulan bahwa pulau ini menjadi salah satu pusat terbesar peradaban Indonesia. Di sini peradaban

Hindu menciptakan monumen-monumennya yang paling indah, di sinilah tempat kedudukan raja-raja Jawa yang paling kuat, dan di sini Belanda memutuskan untuk menempatkan pusat pemerintahan. Kepadatan penduduk, hampir 620 orang per kilometer persegi, tidak ada di tempat selain Jawa, tempat berdiam 70 persen penduduk Indonesia.

Secara politis, pulau-pulau itu membentuk bagian dari Republik Indonesia kecuali bagian utara Kalimantan yang merupakan koloni Britania dan bagian timur pulau Timor yang tidak pernah berhenti sebagai milik Portugis sejak abad ke-16. Papua bagian barat tetap di tangan pemerintah Belanda di bawah perjanjian 1949, tapi diklaim Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari bekas Hindia Belanda.[2] Klaim itu ditentang oleh Belanda berdasarkan berbagai alasan legal dan politis.

Jadi sebagian besar sejarah Kepulauan Indonesia, walaupun tentu tidak semuanya, adalah sejarah Jawa. Sumatra juga punya peran penting dalam sejarah, khususnya bagian timur dan utaranya. Namun pedalaman Kalimantan dan Sulawesi dapat dibilang tidak punya sejarah sama sekali, karena hanya wilayah pantai yang terpengaruh Jawa dan Sumatra.[4] Maluku menarik perhatian seluruh dunia selama beberapa abad tapi sekarang berperan pasif.

Dalam buku ini istilah Indonesia atau Hindia (Timur) akan dipakai untuk menyebut seluruh kompleks wilayah yang kini membentuk Republik Indonesia. Nama "Indonesia", yang berarti, tentu saja, "Pulau-Pulau India" diberikan kepada kepulauan itu oleh seorang etnolog Jerman, dan telah dipakai sejak 1884. Awalnya, Indonesia adalah nama geografis untuk menyebut semua pulau antara Australia dan Asia, termasuk Filipina. Gerakan nasionalis Indonesia mengambilnya dan membuatnya menjadi nama resmi untuk republik mereka pada 1945 dan 1949, dengan menyisihkan istilah yang lebih tidak terkenal "Nusantara", yang dipilih menjadi judul buku ini dan yang sekali-sekali dipakai pada masa-masa terdahulu.[5]

BAB 1

FAJAR SEJARAH INDONESIA

KEPULAUAN Indonesia terletak di jalur laut utama antara Asia bagian timur dan selatan. Dalam wilayah antara seperti ini, dengan sendirinya bisa diperkirakan akan terdapat populasi yang terdiri atas beragam ras. Campuran rasial di Hindia sangat menarik karena kebetulan tiga ras utama umat manusia berdiam di benua-benua sekitarnya.

Penemuan antropologis menambahkan banyak kerumitan pada studi mengenai problem rasial dalam gugusan pulau itu. Tidak diragukan bahwa Jawa harus dianggap tempat tinggal salah satu ras manusia yang paling awal. Pada 1890 Dr. Eugene Dubois menemukan sisa-sisa sebuah kerangka yang tampaknya tidak dapat diklasifikasikan entah sebagai kera atau manusia.[1] Diskusi-diskusi ilmiah mengenai sisa-sisa "*Pithecanthropus erectus*" (nama yang disarankan Dubois) menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti. Untuk waktu lama, hanya sedikit penemuan baru yang bisa menjelaskan masalah sulit ini. Tapi 40 tahun kemudian, gambaran ini tiba-tiba berubah. Antara 1931 dan 1941, antropolog Oppenoorth dan Von Koenigswald menemukan fosil sisa-sisa beberapa jenis manusia purba yang berasal dari Kala

Pleistosen awal atau pertengahan. Semua penemuan itu terjadi di sekitar Surakarta di Jawa Tengah. Penemuan itu ternyata sangat penting bagi antropologi dan biologi pada umumnya.[2] Tapi tidak berarti bagi sejarah Indonesia. Orang-orang Indonesia zaman purba adalah keturunan imigran dari benua Asia. Antara zaman *Pithecanthropus* dan tibanya para imigran mungkin ada senjang waktu ribuan abad.

Ada beberapa teori mengenai perkembangan etnologis Indonesia. Keadaan linguistik dan rasialnya sangat kompleks. Beberapa ratus bahasa dipercakapkan di Kepulauan Indonesia, dan sering kali beberapa bahasa dipakai di satu pulau kecil. Penduduk satu wilayah kecil bisa terdiri atas tipe rasial yang sangat berbeda. Tidak ada satu pulau, betapapun kecilnya, yang penduduknya tidak campur-baur secara rasial, dan di semua pulau besar (kecuali Jawa) kita temukan suku-suku bangsa primitif hidup berdampingan dengan orang-orang dengan derajat peradaban tinggi. Salah satu aspek paling mencolok dari masalah ini ialah bahwa di setiap pulau besar ada perbedaan besar antara penduduk wilayah pantai dan pedalaman.

P. dan F. Sarasin bersaudara, penjelajah terkenal pedalaman Sulawesi, adalah ilmuwan-ilmuwan pertama yang merumuskan suatu teori yang masuk akal tentang perbedaan antara suku-suku bangsa pedalaman dengan penduduk pantai ini. Teori itu kemudian dikembangkan lagi oleh antropolog-antropolog lain.[3] Teori Sarasin bersaudara itu adalah bahwa populasi asli Kepulauan Indonesia adalah suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil, dan bahwa ras ini awalnya mendiami seluruh Asia bagian tenggara. Pada waktu itu wilayah itu adalah satu daratan yang solid. Tentu saja, es dari periode glasial tidak pernah menutupi pulau-pulau Hindia Timur itu, tapi pada penghujung periode glasial yang terakhir level laut naik begitu tinggi sehingga Laut Cina Selatan dan Laut Jawa terbentuk dan memisahkan wilayah pegunungan vulkanik Indonesia dari daratan utama. Sisa-sisa penduduk asli yang terpisah-pisah dianggap masih tinggal di daerah-daerah

pedalaman, sementara daerah-daerah pantai yang baru terbentuk dihuni oleh pendatang-pendatang baru. Sarasin bersaudara menyebut keturunan rasasli itu orang Vedda, menurut nama salah satu suku bangsa paling terkenal yang masuk kelompok ini, suku bangsa Vedda di Ceylon (Sri Lanka). Termasuk dalam kelompok ini ialah suku Hieng di Kamboja, Miao-tse dan Yao-jen di Cina, serta Senoi di Semenanjung Malaya. Di Kepulauan Indonesia terdapat orang-orang liar yang tinggal di hutan Sumatra (Kubu, Lubu, dan Mamak) serta Toala di Sulawesi. Riset di kemudian hari memungkinkan penguraian lebih jauh terhadap benang ruwet yang membentuk pola rasial Indonesia. Kumpulan bukti antropologis dan arkeologis tampaknya menunjukkan bahwa populasi tertua Kepulauan Indonesia berhubungan erat dengan nenek moyang orang Melanesia masa kini dan bahwa "orang Vedda" yang disebut Sarasin tersebut termasuk ras negrito yang, walaupun jarang, masih terdapat di seluruh Afrika, Asia Selatan, dan Oceania. Jadi Vedda adalah "imigran" pertama yang masuk ke dunia pulau yang sudah berpenghuni dan masih dapat dibedakan dari pendahulu mereka berkat model perkakas batu yang mereka tinggalkan. Kedua ras itu pastilah hidup di tahap "mesolitik" budaya primitif.[4]

Lama setelah tibanya orang Negrito dua gelombang baru imigran tersebar di Indonesia. Budaya mereka jelas tipe neolitik dan permukiman awal mereka mudah dikenali melalui bentuk gerabah mereka yang menyerupai gerabah Cina kuno. Para pendatang baru ini pastilah jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk asli dan kedatangan mereka memaksa penduduk asli itu serta imigran yang datang terdahulu mencari perlindungan di hutan-hutan. Bahkan hari ini orang dari suku-suku bangsa ini pemalu dan jarang terlihat kecuali didatangi di tempat tinggal mereka di pedalaman yang masih liar. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melebur atau musnah.

Sarasin bersaudara menyebut pendatang baru itu "Proto- dan Deutero-Melayu", karena kedatangan mereka dalam dua

gelombang migrasi, terpisah dalam waktu tenggang yang menurut perkiraan lebih daripada 2.000 tahun. Proto-Melayu diyakini adalah nenek moyang mungkin dari semua orang yang kini dianggap masuk kelompok Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik, mereka diperkirakan berimigrasi ke Kepulauan Indonesia dari Cina bagian selatan. Di Cina tempat tinggal asli mereka diperkirakan berada di wilayah yang secara kasar termasuk dalam provinsi Yunnan sekarang. Dari situ mereka bermigrasi ke Indocina dan Siam dan kemudian ke Kepulauan Indonesia. Kedatangan mereka tampaknya bersamaan dengan munculnya perkakas neolitik pertama di Indonesia dan dengan demikian dapat ditentukan pada sekitar 3.000 SM.

Menurut teori Sarasin, keturunan Proto-Melayu pada gilirannya terdesak ke pedalaman oleh datangnya imigran baru, Deutero-Melayu, yang juga berasal dari Indocina bagian utara dan wilayah sekitarnya. Deutero-Melayu diidentifikasikan dengan orang yang memperkenalkan perkakas dan senjata besi ke dunia Kepulauan Indonesia. Studi mengenai perkembangan peradaban di Indocina tampaknya menunjukkan suatu tanggal bagi peristiwa itu: imigrasi itu terjadi antara 300 dan 200 SM.[5]

Dengan sendirinya Proto- dan Deutero-Melayu berbaur dengan bebas, yang menjelaskan kesulitan membedakan kedua kelompok rasial itu di antara orang Indonesia. Proto-Melayu dianggap mencakup Gayo dan Alas di Sumatra bagian utara dan Toraja di Sulawesi. Hampir semua orang lain di Indonesia, kecuali orang Papua dan pulau-pulau di sekitarnya, dimasukkan dalam kelas Deutero-Melayu.

Pada waktu dirumuskan, teori Sarasin bersaudara itu memberikan pemahaman baru tentang komposisi rasial orang Indonesia. Tapi agak meragukan apakah pemisahan tajam di antara dua gelombang invasi itu, yang terpisah oleh waktu yang jauh, dapat dipertahankan. Periode imigrasi berlangsung selama berabad-abad sebelum era kita dan mungkin terjadi dalam dua

atau lebih gelombang tapi tidaklah mungkin membagi imigran tersebut ke dalam dua atau lebih kelompok yang bisa dibedakan dengan jelas. Mereka mungkin termasuk satu kelompok rasial-kultural yang sama dan mungkin cocok disebut "orang Indonesia", karena tidak ada keraguan bahwa mereka adalah nenek moyang orang Indonesia masa kini. Budaya mereka adalah tipe neolitik maju. Perkakas dan senjata perunggu tampaknya tidak mereka kenal dan besi baru muncul setelah pergerakan imigrasi itu hampir mendekati akhir, yakni persis sebelum awal tarikh Masehi.

Ada dua argumen berbobot yang menyokong modifikasi teori Sarasin ini. Sekitar 170 bahasa yang dipakai di Kepulauan Indonesia termasuk, dengan sedikit pengecualian, kelompok bahasa Austronesia (Melayu-Polinesia). Seksi Indonesianya bisa dibagi lagi ke dalam dua kelompok: pertama kelompok bahasa Aceh dan beberapa bahasa lain di pedalaman Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi; yang kedua bahasa Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua saling berkait erat dan juga dengan Malagasi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua kelompok bahasa itu menunjukkan bahwa bahasa-bahasa kelompok kedua masuk ke Kepulauan Indonesia lama sesudah kelompok pertama. Kedekatannya dengan Malagasi dan Tagalog menunjukkan bahwa orang-orang yang memakainya adalah pelaut-pelaut besar pada zaman dahulu dan mungkin telah naik jauh di atas level peradaban yang biasanya dihubungkan dengan epitet "neolitik", suatu kesimpulan yang juga didukung oleh etnologi sosial.

Selain kelompok-kelompok linguistik ini, terdapat bahasa-bahasa Halmahera Utara dan Papua yang dipakai di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera.

Survei ini jelas menunjukkan bahwa pembagian linguistik di Indonesia tidak serupa dengan pembagian rasial. Riset ciri-ciri rasial dan linguistik orang-orang Papua masih harus dilakukan untuk jangka waktu lama sebelum kita bisa mengambil kesimpulan yang memadai dari perbandingan sosial-etnologis. Tapi untuk

karya saat ini, kita tidak perlu menyelidiki masalah itu; kita tertarik pada *sejarah* Indonesia, di mana orang-orang di wilayah ini, yang sampai akhir-akhir ini masih hidup dalam periode "prasejarah" atau "neolitik", tidak punya peran.

Bahasa Melayu, yang menjadi nama seluruh kelompok bahasa Asia Tenggara, sebetulnya hanya dipercakapkan di sebagian Sumatra dan Semenanjung Malaya yang berdekatan. Ia adalah bahasa ibu dari sebagian dari 80 juta orang di Hindia.[3] Tapi bahasa ini menerima rangsangan yang luarbiasa ketika, dengan intensifikasi perdagangan, pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung dan bagian timur Sumatra menjadi tempat pertemuan orang dari segala pulau. Bahasa Melayu lantas menjadi *lingua franca* di perairan Indonesia.[6] Sejak itu penguasaan dan pemakaian bahasa Melayu menyebar ke segenap Kepulauan Indonesia dan memberikan wilayah heterogen itu kesan kebersatuan pada pihak luar. Tapi ada juga kesatuan yang lebih dalam yang mengikat bersama sebagian besar suku bangsa dan orang Indonesia. Kesatuan ini muncul dari unsur-unsur dasar yang umum dari peradaban mereka.

Riset-riset arkeologis telah menjelaskan beberapa aspek peradaban Indonesia awal. Lebih banyak hasil diperoleh lewat studi etnologi dan filologi perbandingan. Berkat upaya almarhum Prof. J. H. Kern,[7] sejarah periode awal Indonesia berhasil diterangkan melalui riset filologisnya. Dalam bukunya *Linguistic Materials for the Determination of the Country of Origin of the Malay Peoples* ("Bahan-Bahan Linguistik untuk Penentuan Negeri Asal Bangsa-Bangsa Melayu") (1889) dia berusaha menentukan perbendaharaan kata asli bahasa Melayu dengan menghapus semua istilah yang diimpor kemudian. Lewat proses ini dia berharap mampu menemukan obyek, pekerjaan, dan adat istiadat yang dikenal orang Melayu asli.

Risetnya menunjukkan bahwa mata pencarian utama orang Melayu pada tahap awal ialah pertanian, dan tipe pertanian yang sangat maju, karena termasuk pembudidayaan padi di *sawah*

beririgasi. Ini tidak berarti bahwa semua kelompok Melayu di mana pun mereka berdiam mengusahakan tipe pertanian ini, tapi bahwa ia dikenal di antara mereka dan diterapkan di mana saja keadaan memungkinkan. Inilah yang terjadi antara lain di Jawa bagian tengah. Kondisi iklim dan kesuburan tanah yang luarbiasa menolong orang Jawa kuno, keturunan dari kelompok Indonesia yang umum, memelihara dan mengembangkan warisan budaya mereka. Di bagian lain Kepulauan Indonesia, penduduk dipaksa keadaan untuk kembali ke sistem pembudidayaan padi di *ladang* (di Jawa disebut *gaga*, lahan kering yang dipersiapkan dengan membakar hutan). Di mana pun hal ini terjadi, kemajuan peradaban berlangsung lambat, karena dengan sistem ini lahan hanya bisa dipakai beberapa tahun, dan para petani itu lalu terpaksa bermigrasi dari satu bagian bukit berhutan ke bagian lain. Tapi di mana saja pembudidayaan di sawah beririgasi terjadi, suatu tata sosial yang jelas pun muncul karena bentuk pertanian ini menuntut kerjasama erat semua penduduk desa yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan bersama. Faktor ini mungkin telah menentukan organisasi sosial orang Jawa dan bagian-bagian lain Kepulauan Indonesia sampai hari ini.

Riset-riset Kern membuktikan bahwa orang-orang Indonesia yang sangat beragam itu sebetulnya punya organisasi sosial yang pada dasarnya seragam yang mencapai puncak perkembangannya di Jawa. Dari titik ini sosiologi dan etnologi komparatif dapat meneruskan penelitian mereka sendiri tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa desa asli Indonesia itu pernah dan masih ada di banyak tempat di Kepulauan Indonesia, dalam bentuk komunitas dengan tanggungjawab bersama para anggotanya demi kesejahteraan bersama dan ketertiban umum. Bentuk organisasi sosial kuno ini masih banyak terlihat jejaknya dalam bentuk *desa* masa kini di Jawa.[8]

Desa terdiri atas sekelompok rumah pertanian dan lumbung dengan halamannya. Dalam arti luas *desa* mencakup juga ladang, kolam ikan, hutan sekitar, dan tanah yang tidak dibudi-

dayakan. Sawah pada awalnya hak milik komunitas atau suku. Anggota-anggota komunitas yang dengan usaha sendiri berhasil membudidayakan lahan yang tadinya liar memperoleh hak pribadi atas lahan itu, namun hak mereka tetap di bawah hak komunitas secara keseluruhan, yang memanfaatkan tanah itu demi kepentingan bersama. Seiring perjalanan waktu dan kemajuan organisasi sosial, hak milik yang terbatas ini berkembang menjadi hak milik penuh atau sebaliknya lenyap sama sekali. Yang terakhir ini terjadi apabila sejumlah komunitas bergabung menjadi satu unit lebih besar di bawah pemerintahan raja turun-temurun, misalnya seperti terjadi di sebagian Jawa. Raja itu lalu menjadi pemilik tunggal dan mutlak atas semua tanah, suatu sistem yang juga diadopsi, lalu ditolak, oleh penguasa-penguasa Eropa kemudian.[9]

Di mana-mana masih tampak jejak-jejak organisasi sosial yang asli itu. Yang paling mencolok tentu saja adalah tanggungjawab bersama dari semua anggota komunitas demi kesejahteraan umum. Ini termasuk kewajiban menolong satu sama lain di masa susah, dan bersama-sama memikul tanggungjawab atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah desa kalau pelaku yang sebenarnya tidak diketahui. Pemerintahan kolonial Belanda mencoba memperkenalkan prinsip tanggungjawab individu yang, menurut konsep Barat, lebih rasional, tapi sistem lama tidak pernah lenyap sepenuhnya. Jabatan kepala desa selalu sangat berpengaruh. Tanpa kerjasamanya, hanya sedikit yang bisa dicapai oleh pejabat yang lebih tinggi. Campur tangannya dibutuhkan dalam semua urusan dengan penduduk desa.

Tak diragukan lagi, adat istiadat asli adalah "memilih" kepala desa menurut hukum adat. Ini tidak berarti pemilihan dengan pemungutan suara individual, suatu sistem Barat yang hampir tidak dimengerti dan kemungkinan besar tidak diinginkan oleh orang Jawa, melainkan pengakuan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap sang pemimpin dan apa yang bisa kita sebut "pemelihara tradisi dan adat istiadat".[10] Barulah selama dan

sesudah pendudukan Jepang mulai terjadi perubahan mendasar dalam struktur sosial Jawa.

Semua bentuk organisasi sosial itu sama saja di seluruh Kepulauan Indonesia dan di antara sebagian besar suku bangsa dan beragam jenis orang yang mendiaminya. Tapi dari riset filologis Kern maupun riset etnologis Wilken serta riset-riset lain kita tahu bahwa dalam banyak hal lain juga, orang Indonesia pada dasarnya membentuk satu kelompok sosial yang pada waktunya akan memungkinkan mereka berkembang menjadi suatu bangsa yang besar dan bersatu.[11]

Pada masa kita ini, hampir 72 juta dari 80 juta penduduk Kepulauan Nusantara dikelompokkan sebagai Muslim, dan sekitar dua juta adalah Kristen. Sisanya terbagi antara penganut kultus Cina dan beragam kultus lokal. Tapi banyak unsur keyakinan pribumi asli masih hidup di kalangan Muslim dan Kristen. "Animisme" ada di dasar semua konsepsi religius orang Indonesia. Menurut keyakinan asli ini, semua perwujudan alam adalah konsekuensi karya kekuatan supranatural, biasanya roh jahat yang harus dilayani dengan persembahan dan yang murka-nya harus dihindari. Unsur-unsur utama agama Indonesia primitif ini adalah sebagai berikut:

Pertama, keyakinan panteistik bahwa segala sesuatu dan segala makhluk hidup punya "jiwa", "energi kehidupan", yang sama untuk semua tapi mungkin lebih kuat pada seseorang daripada orang lain dan lebih terkonsentrasi di bagian tertentu tubuh manusia daripada di bagian lain. Kebiasaan kanibalisme dan pengayauan yang kini sudah punah bertujuan untuk mengambil-alih "energi kehidupan" dari musuh yang terbunuh tersebut. Barang dengan bentuk tertentu sering kali dianggap punya khasiat luarbiasa dan karena itu dihargai dengan khusus.

Kedua, keyakinan pada keberadaan jiwa personal yang mendiami seorang manusia seumur hidup. Jiwa ini tetap hidup sesudah tubuh mati dan kemudian tetap tinggal di sekitar tempat di mana tubuh itu pernah hidup. Jiwa itu tidak mengundurkan

diri dari komunitas orang hidup tapi terus melibatkan diri dalam kehidupan komunal. Akibatnya, jiwa-jiwa orang mati mungkin akan marah apabila keturunan mereka mengabaikan tradisi lama atau tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap roh-roh itu. Pemujaan nenek moyang selalu merupakan salah satu kekuatan terkokoh dalam pemeliharaan adat istiadat dan tradisi.[12]

Jadi, suku-suku bangsa di Indonesia, kecuali beberapa minoritas suku asli, punya banyak hal serupa. Bahkan minoritas-minoritas tersebut tidak berbeda jauh dalam hal agama dan adat istiadat. Selain itu, banyak keyakinan dan kebiasaan kuno terus memengaruhi kehidupan sehari-hari umat Muslim Indonesia, khususnya di Jawa. Kata Jawa-Melayu *agama* dipakai dalam arti yang mencakup keyakinan, kebiasaan, dan adat istiadat, suatu konsep agama yang sangat berbeda dari konsep Kekristenan.

Dari mula, lingkungan orang Jawa, yakni penduduk Jawa bagian tengah dan timur, lebih menguntungkan dan karena itu mengembangkan peradaban ke tingkat yang lebih tinggi. Penduduk Jawa Barat, orang Sunda,[13] yang berasal dari kelompok yang sama dengan orang Jawa, tetap terbelakang untuk jangka waktu lama. Di timur, penduduk Bali tertarik ke dalam lingkup pengaruh Jawa, dan memanglah sejarah Bali selalu terkait dengan sejarah pulau yang lebih besar di bagian baratnya itu. Madura, di timur laut Jawa, juga mengalami semua perubahan sejarah Jawa, tapi tanahnya yang lebih tandus menghambat perkembangan komunitas pertanian dan kemajuan dalam peradaban. Tingkat peradaban yang dicapai di Sumatra hampir sama dengan di Jawa Barat. Fakta bahwa peradaban sebagian besar Sulawesi, Kalimantan, dan Kepulauan Sunda Kecil tetap terbelakang tidak dengan sendirinya berarti di sana ada kemandekan mutlak perkembangan kultural selama ribuan tahun. Kemajuan dalam peradaban mungkin saja terjadi, demikian juga kemunduran. Adalah salah satu mitos sejarah populer bahwa kecenderungan peradaban pasti selalu progresif, tidak pernah retrogresif. Akan kita lihat bahwa di Indonesia ada bukti sejarah yang membuktikan

mitos itu salah.

Pada awal tarikh Masehi peradaban Indonesia primitif yang digambarkan di alinea-alinea di atas masih belum tersentuh pengaruh asing. Ada banyak suku bangsa dan bahkan ras, tapi peradaban mereka pada umumnya sama, walaupun Jawa Timur, Bali, dan Sumatra Selatan mungkin lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain di Kepulauan Indonesia. Orang Indonesia terdiri atas petani padi dan nelayan, terhimpun dalam komunitas kecil semidemokratik. Keyakinan agama orang Indonesia bersifat primitif dan tidak membutuhkan tempat pemujaan bersama kecuali di bawah langit terbuka, tempat kekuatan-kekuatan ilahi dari alam langsung hadir.

Monumen yang mirip menhir Prancis dan Inggris terdapat di Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil (Sumba). Monumen-monumen ini jelas dibangun sebagai kuburan bagi kepala suku dan orang penting. Di seluruh Jawa konstruksi-konstruksi primitif lain dalam bentuk dinding bukit berteras telah ditemukan. Di teras-teras ini terdapat piramida-piramida batu kecil dan di Jawa Barat bahkan dihiasi pahatan-pahatan. Konstruksi-konstruksi serupa masih terdapat di Sumatra bagian selatan. Di luar Kepulauan Indonesia, konstruksi-konstruksi tersebut ditemukan di Malaya dan Laos. Makna yang pasti dari monumen-monumen ini tentu saja masih belum jelas. Teori-teori menarik walau agak fantastik telah dirumuskan mengenai pembangunnya, antara lain oleh arkeolog Britania William J. Perry, yang menafsirkan konstruksi-konstruksi batu itu sebagai peninggalan para migran hipotetis, "Anak-Anak Matahari". Orang-orang yang sama juga dianggapnya membangun monumen batu di Prancis, Inggris, dan Amerika. Sebagian besar arkeolog modern setuju bahwa monumen-monumen itu berfungsi dalam kultus bagi orang mati dan berhubungan dengan pemujaan nenek moyang. Tanggal konstruksinya tampaknya bersamaan dengan masuknya perkakas dan senjata besi.[14]

Bagi kita cukuplah untuk mengetahui bahwa tempat-tempat pemujaan pada periode primitif sering kali berfungsi

sama, walaupun untuk ilah-ilah berbeda, pada tahap-tahap peradaban di kemudian hari, dan sering kali masih tetap menjadi tempat pemujaan sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa ada kesinambungan peradaban, setidaknya di Jawa dan Sumatra.

Orang Indonesia pada awal tarikh Masehi pasti tidak banyak tahu tentang dunia luar, tapi sebaliknya juga demikian. Namun, pastilah para saudagar sudah bolak-balik antara pantai timur India dan Indonesia, serta antara Kepulauan Indonesia dan pelabuhan-pelabuhan di tempat yang pada zaman modern bernama Vietnam. Tapi bukti sangat jarang ada. *Jataka*, kitab suci agama Buddha yang ditulis sebelum 300 SM, mengacu pada penjelajahan di laut lepas tapi hanya dengan memakai istilah-istilah yang kabur. Suatu laporan dalam tawarikh Kaisar Wang Mang di Cina[15] mengisahkan bahwa sang kaisar Dinasti Han itu mengirim duta ke suatu negeri yang disebut "Huang-Tche", yang diidentifikasi sebagai Aceh[16] atau setidaknya satu bagian Sumatra. Duta Cina itu dikirim untuk mendapatkan seekor badak bagi Taman Satwa Kekaisaran, dan tentu saja makhluk menarik itu memang benar dapat diperoleh di Sumatra. Bukti lebih jauh tentang hubungan yang kerap antara Cina dan Kepulauan Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai spesimen keramik Cina dari periode Han yang digali di Sumatra bagian selatan, Jawa bagian barat, dan Kalimantan bagian timur.

Laporan lain, kali ini dari 132 M, juga dari sumber Cina, memberikan informasi lebih menarik.[17] Laporan ini mengatakan bahwa seorang raja dari "Ye-tiao" mengirim duta kepada kaisar Cina untuk menyerahkan upeti. Kita tidak perlu menaruh perhatian terlalu besar pada ungkapan "menyerahkan upeti", karena orang Cina terbiasa menganggap setiap hadiah yang dikirimkan kepada Paduka Yang Mulia sebagai pertanda takluk. Nama "Ye-tiao" dijelaskan sebagai transkripsi Cina untuk "Jawadwipa", dan nama rajanya, disebut dalam teks Cina sebagai "Tiao-pien", sebagai transkripsi nama Sanskerta "Dewawarman". Yang terakhir ini agak meragukan, tapi transkripsi pertama pada umumnya diterima.

Nama ini memberi kita kunci untuk informasi lebih jauh ten-

tangsejarah awal Hindia. "Jawadwipa" adalah nama Sanskerta yang berarti "Pulau Padi" dan disebut dalam epik Hindu *Ramayana*. Epik itu mengatakan "Jawadwipa, dihiasi tujuh kerajaan, Pulau Emas dan Perak, kaya dengan tambang emas", sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Lebih jauh lagi epik itu hanya tahu ada gunung "Çiçira, dikunjungi Dewa dan raksasa".[18]

Versi Prakrit nama Jawadwipa adalah "Iabadiu". Dalam versi inilah nama itu dikenal oleh ahli geografi Yunani, Ptolemeus (dari Alexandria, 160 M), yang mungkin bisa diingat sebagai penulis Barat pertama yang pernah menulis tentang Indonesia. Patut dicatat bahwa kutipan khusus dari Ramayana di mana Indonesia disebut termasuk dalam interpolasi zaman kemudian dan berasal dari periode yang sama dengan buku Ptolemeus itu. Ptolemeus bukan satu-satunya dan bukan pula penulis Yunani atau Romawi pertama yang punya informasi tentang Asia Tenggara. Plinius membuat beberapa catatan yang agak membingungkan tentang Timur Jauh dalam Buku VI dari karyanya *Naturalis Historiae*. Penulis *Periplous* tentang Samudra Hindia itu jelas telah mengunjungi sebagian Asia Selatan dan belajar banyak dari pedagang India tentang negeri-negeri jauh di balik Ceylon. Laporannya dipakai Ptolemeus yang memperoleh informasi tambahan dari seorang pelaut bernama Alexander, yang telah menjelajahi negeri-negeri di sebelah timur Malaya.[19] Ahli geografi Yunani itu membedakan antara "Negeri Emas" dan "Negeri Perak" yang keduanya dia katakan terletak di benua Asia bagian tenggara. Di dekat negeri-negeri ini ada "Semenanjung Emas" dan, di dekatnya lagi, "lima Pulau Barousai, tiga Pulau Sabadeibai, tempat para kanibal tinggal, dan pulau Iabadiu, yang berarti Pulau Padi". Di Pulau Iabadiu ada kota bernama "Kota Perak".

Tidak sulit mengenali Semenanjung Emas sebagai Semenanjung Malaya dan pulau-pulau itu sebagai bagian dari Kepulauan Indonesia. Gambaran itu, walaupun kabur, cukup akurat untuk meyakinkan kita bahwa ia memang dikisahkan oleh pelaut yang memang betul-betul pernah mengunjungi Kepulauan Indonesia.
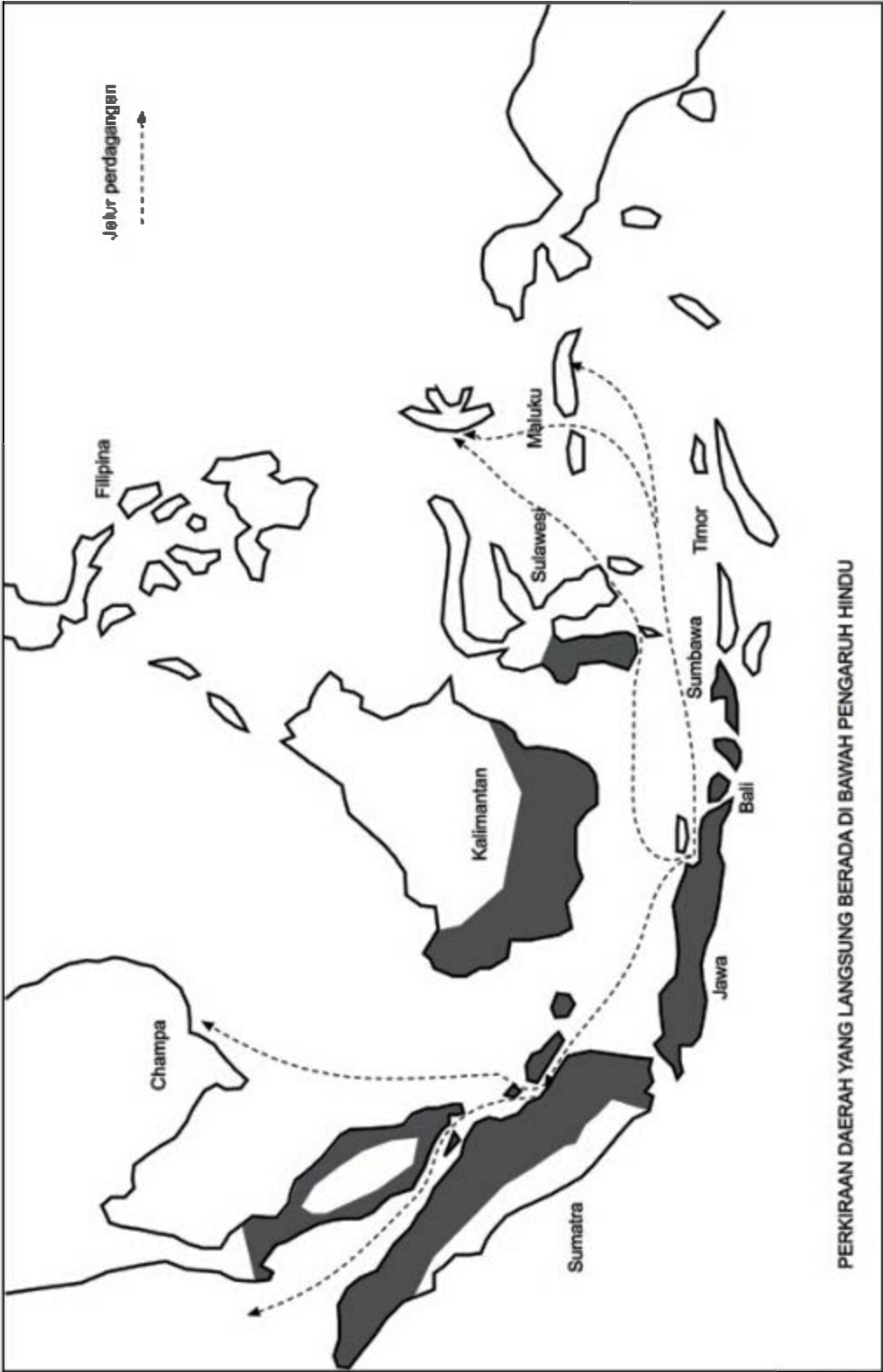
PERKIRAAN DAERAH YANG LANGSUNG BERADA DI BAWAH PENGARUH HINDU

Hal ini, dan kesaksian informan Ptolemeus, Alexander, jelas membuktikan bahwa ada hubungan dagang antara India dan Indonesia paling tidak sejak abad pertama tarikh Masehi.

Ramayana menyebut tujuh kerajaan di Jawadwipa. Apakah kerajaan-kerajaan ini kerajaan Indonesia asli? Bukan mustahil. Ada gelar pembesar tinggi di kerajaan-kerajaan Hindu-Jawa abad kedelapan yang murni Indonesia. Artinya, pastilah gelar itu sudah dipakai sebelum pengaruh Hindu mulai menguasai Kepulauan Indonesia, yang menunjukkan adanya komunitas Indonesia tertata dari masa yang awal sekali.

Ini menimbulkan masalah yang cukup penting. Istilah "negara", bila digunakan untuk menggambarkan sejarah Indonesia kuno, tidak bisa dianggap punya arti seperti makna modern. Ia hanya mengacu pada keberadaan penguasa yang punya semacam kekuasaan pribadi atas suatu wilayah dengan batas yang kurang jelas dan sejumlah lokasi berpenduduk. Jika kerajaan-kerajaan seperti itu ada sebelum pengaruh Hindu menjadi kuat, kita bisa dengan yakin mengandaikan bahwa peradaban Hindu-Indonesia punya sifat campuran yang kuat sejak awal.

Masalah yang sama juga muncul di seluruh Asia Tenggara, khususnya di Kamboja dan Vietnam bagian selatan, ketika itu kerajaan Champa. Sederet data yang diperoleh riset arkeologis menunjukkan keserupaan besar dalam perkembangan kultural di seluruh wilayah itu.[20]

Buah karya seni Hindu paling tua yang sejauh ini ditemukan berasal dari abad ketiga tarikh Masehi. Dalam kelompok ini termasuk beberapa patung Buddha bergaya Amarawati, ditemukan di Indonesia. Salah satu ditemukan di Sempaga (Sulawesi), yang lain di Seguntang dekat Palembang (Sumatra). Laporan tertulis tertua mengenai kerajaan-kerajaan Asia tenggara berasal dari Cina dan berkisah tentang kerajaan Fu-nan, terletak di sungai-sungai Mekong dan Menam (Chao Phraya) di Indocina dan kira-kira mencakup wilayah yang sekarang adalah Kamboja. Kerajaan ini dikatakan didirikan pada abad pertama tarikh Masehi dan

mencapai puncak kekuasaannya pada abad ketiga. Informasi yang ada sampai 400 M kabur dan tidak jelas, dan kurang memuaskan selama 400 tahun berikutnya.

Prasasti tertua di Indonesia berasal dari awal abad kelima. Ditemukan di Kalimantan Timur di tempat bernama Muara Kaman, 150 km kehulu Sungai Mahakam. Muara Kaman kini suatu desa yang agak terbengkalai di tengah rawa dan hutan. Daerah itu berpenduduk jarang. Hanya pada beberapa dekade terakhir, sejak penemuan deposit batubara dan minyak dekat pantai, bagian Kalimantan ini mulai menarik perhatian. Prasasti-prasasti itu tampaknya sisa-sisa suatu kerajaan, yang penguasanya menerima budaya Hindu pada masa awal tapi kemudian lenyap kembali.

Karena keempat prasasti Muara Kaman tersebut adalah monumen sastra tertua di Indonesia, terjemahan salah satunya mungkin menarik:

> Raja Kudungga Yang Mulia yang terkenal itu punya seorang putra, Açwawarman yang masyhur itu, pendiri dinasti, yang sebanding dengan Amçuman. Dia punya tiga putra yang seperti tiga api korban persembahan. Yang paling sakti, yang masyhur karena kekuatan berpantangnya dan karena penguasaan dirinya, adalah Yang Mulia Mulawarman, Tuan dan Raja yang memberikan persembahan berupa banyak emas. Sebagai peringatan akan persembahan-persembahan itu, pilar korban persembahan ini didirikan oleh para penggawa dari mereka yang telah lahir dua kali.[21]

Prasasti ini mungkin hasil karya seorang India, tapi mungkin juga karya seorang Indonesia yang sangat menguasai bahasa Sanskerta dan menganut peradaban Hindu. Beberapa bukti yang mendukung kemungkinan kedua dapat dilihat dalam nama-nama yang disebutkan dalam prasasti itu. Mulawarman adalah nama Sanskerta; tapi Kudungga mungkin sekali nama Indonesia. Açwawarman jelas Sanskerta, dan raja ini, walaupun nomor dua dalam suksesi, disebut pendiri dinasti. Dari fakta-fakta ini, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa ada asimilasi gradual ke dalam budaya Hindu dari suatu kerajaan Indonesia yang sudah

ada sebelumnya.

Bukti mengenai agama orang Indonesia kuno yang diberikan prasasti-prasasti ini jauh lebih menarik daripada silsilah raja-raja mereka. Penyebutan pilar korban persembahan menunjukkan adanya kebiasaan mengorbankan hewan kepada dewa. Tapi pilar korban persembahan sangat jarang di India, dan biasa ada sebagai bagian dari kultus-kultus Indonesia kuno. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada sekitar 400 M ada satu kerajaan Indonesia yang kurang lebih terasimilasi ke dalam budaya Hindu di Kalimantan Timur.

Pastilah ada kerajaan-kerajaan lain dengan kondisi seperti ini di Kepulauan Indonesia pada waktu itu. Sebuah batu di kaki pegunungan di selatan Jakarta memperlihatkan pada kita satu prasasti indah yang jelas ditulis dengan huruf-huruf yang terdesain. Prasasti itu dipahatkan pada batu itu di samping cetakan dua kaki manusia, yang dikatakan adalah jejak kaki "penguasa besar Purnawarman yang ternama, raja Taruma, yang telapak kakinya seperti milik Wishnu".[22] Tidak jauh dari tempat ini gajah raja itu juga meninggalkan jejak kakinya. Cetakan kedua kaki raja ini disertai bahasa yang agak mengancam:

> Kaki Pelindung Ternama yang setia pada tanggungjawabnya ini, raja tiada banding, Yang Mulia Purnawarman, yang sebelumnya memerintah atas Taruma, bisa menginjak-injak kota-kota musuh-musuhnya dan memberikan bantuan kepada sekutu-sekutunya yang setia."

Jadi, raja Purnawarman mungkin adalah salah satu raja di pulau itu yang saling berperang dan bersekutu. Nama raja yang sama ditemukan pada teks dari periode yang sama. Dipahami secara harfiah, teks itu menyatakan Purnawarman sebagai pembangun karya irigasi publik tertua yang kita kenal di Jawa. Prasasti itu mengatakan bahwa dengan perintah raja, satu kanal dibangun dan diselesaikan dalam 21 hari, walaupun panjangnya lebih daripada 10 km. Tapi, mungkin saja yang dibangun bukan

benar-benar kanal. Air memainkan peran penting dalam mitologi Jawa, dan dalam hal ini maknanya mungkin adalah "pemisahan". Kita akan lihat bahwa penafsiran naskah-naskah Jawa memuat banyak teka-teki seperti ini.

Jadi, bukti paling tua pada sejarah Indonesia yang kita miliki jelas menunjuk pada keberadaan ciri-ciri asli yang kuat dalam budaya Hindu-Indonesia. Ketika orang India pertama menetap di Kepulauan Indonesia mereka tidak berjumpa dengan orang-orang yang tidak beradab, yang bisa dengan seenaknya mereka cekoki dengan budaya mereka sendiri. Ini menimbulkan masalah tentang asal-usul dan evolusi kontak budaya India-Indonesia pada awalnya, yang mungkin bisa dianggap masalah penting dalam sejarah Indonesia.

Berbagai kemungkinan penjelasan muncul dengan sendirinya. Pengaruh Hindu di Indonesia mungkin berasal dari imigrasi sejumlah orang dari beberapa tempat di India. Tapi bagaimana fitrah dan sebab emigrasi India ini? Dapat diasumsikan bahwa pada abad-abad pertama tarikh Masehi ini terjadi ledakan ekspansionisme India yang tiba-tiba. Kalau begitu, armada besar, dari satu atau lebih negara di India, dan dikemudikan oleh pelaut, prajurit, pendeta, dan tukang ahli, pasti berlayar ke Kepulauan di timur ini untuk menaklukkan penduduk asli, mendirikan negara baru, dan membangun kota-kota baru. Tapi susah membayangkan bahwa India melakukan hal ini pada masa yang begitu awal, mirip dengan ekspedisi-ekspedisi Spanyol pada abad ke-16. Dapat disimpulkan bahwa raja-raja India, yang disingkirkan dari tanah leluhur mereka oleh musuh, melarikan diri menyeberang laut dengan pengikut-pengikut mereka untuk berlindung di negeri jauh. Di wilayah ini mereka membangun kembali lingkungan tempat asal mereka, negara dan kota mereka, dengan candi-candi, praktik dan ajaran keagamaan yang dianut kultus mereka.

Teori-teori ini tampaknya terlalu jauh dari kenyataan. Tidak ada raja India yang mencatat kemenangan seperti itu, atau rencananya untuk melakukan penaklukan, meskipun jika dia

berhasil melakukannya, dia mungkin akan mencatatnya, karena pastilah dia tidak akan lalai mempersembahkan korban kepada dewa-dewa untuk memperoleh bantuan mereka sebelum berlayar keKepulauan di timur. Tesispenaklukan dengan kekuatan senjata tidak menjelaskan keberadaan unsur-unsur Indonesia yang penting dalam komunitas budaya Hindu-Indonesia tertua.

Hipotesis lain menolak konsep transfer budaya dengan penaklukan dan menyatakan bahwa penyebaran budaya Hindu dilakukan oleh pelaut dan pedagang India yang berkunjung. Salah satu penolakan yang paling berbobot terhadap hipotesis ini ialah bahwa pusat-pusat peradaban Hindu-Indonesia yang lebih penting berada di daerah-daerah pedalaman yang tidak mudah dicapai dari pantai. Kita dapat berasumsi dengan kuat bahwa pedagang dari India bagian selatan—dan mereka sangat terkenal di antara pendatang-pendatang pertama ke dunia Kepulauan Indonesia—berbahasa Tamil dan walaupun mungkin mereka kenal sedikit Sanskerta (yang waktu itu telah menjadi bahasa suci bahkan di India bagian utara) pengetahuan yang terbatas ini sulit menghasilkan masuknya begitu banyak kata Sanskerta ke dalam bahasa Jawa. Tapi harus diakui bahwa selain Sanskerta, bahasa Tamil juga memengaruhi bahasa-bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa. Lebih menarik ialah teori yang menyatakan bahwa praktik keagamaan Hindu adalah medium yang membuat budaya Hindu menyebar di kalangan orang-orang Asia bagian tenggara. Dengan demikian, teori-teori yang lebih baru menyebutkan evolusi budaya orang-orang ini mengikuti garis-garis berikut.

Penyebaran peradaban Hindu pasti merupakan suatu proses yang sangat lambat. Relik-relik Hindu paling tua yang ditemukan di Asia Tenggara diperoleh di antara sisa-sisa permukiman neolitik. Ini menunjukkan bahwa kunjungan dari waktu ke waktu ke wilayah itu dilakukan oleh pedagang dari India yang membawa hadiah kepada penguasa-penguasa setempat dengan harapan memperoleh balasan dalam bentuk barang yang langka dan berharga. Kunjungan-kunjungan ini mungkin terjadi dalam

tenggang waktu lama, mungkin hanya sekali tiap beberapa tahun. Orang Indonesia mungkin juga berperan *aktif* dan berlayar ke India dengan inisiatif sendiri. Orang-orang ini, yang pada zaman tersebut atau setelah itu berlayar ke Madagaskar yang jauh dan yang tetap terkenal sebagai pelaut ulung sepanjang sejarah mereka, pastilah tidak mengalami kesulitan besar dalam melayarkan kapal mereka dari Sumatra ke Benggala atau pantai Coromandel.

Kontak dengan India membuat orang Indonesia menyadari pencapaian budaya Hindu. Pemahaman yang meningkat akan status raja-raja India yang lebih berkuasa mungkin membangkitkan keinginan untuk menyamainya. Dalam konsep, pemahaman mereka akan benda, kepemimpinan manusia, dan kekuatan gaib berkaitan erat. Kalau mereka menginginkan status superior raja-raja India, mereka harus memperoleh ilmu gaib yang menjadi sumber kekuatan gaib para raja itu. Jadi, mereka meminta para pedagang India untuk membawa bukan hanya barang materi tapi, terutama, juga pemimpin-pemimpin spiritual. Akibatnya, para Brahmana datang berkunjung ke kepala suku lokal atau regional di sepanjang pantai Asia Tenggara, dan merekalah yang mendirikan monumen-monumen pertama dengan gaya India dan mengarang prasasti-prasasti pertama dalam bahasa Sanskerta yang awalnya asing, yang ditempatkan di pantai Sulawesi atau Kalimantan, tak kalah asingnya dengan prasasti Latin kontemporer di pantai-pantai bersapu angin di Laut Utara.

Demikianlah, dunia Indonesia kuno mungkin bukan dibentuk oleh kedatangan kelompok-kelompok imigran besar, atau oleh pengaruh pelaut dan pedagang yang agak kurang pengetahuan. Ia bukan ditaklukkan oleh raja nyasar atau pengungsi politik, *tapi oleh budaya India itu sendiri*, mungkin diwakili oleh sekelompok kecil Brahmana. "Negara-Negara" Indonesia sudah ada sebelum mereka mengadopsi peradaban asing, tapi pengaruh asing itulah yang membuat mereka jadi "vokal", dan dengan demikian memungkinkan arkeologi modern mengetahui keberadaan mereka.[23] Legenda-legenda dari masa berikut mempersonifikasikan

ekspansi budaya India tersebut. Mereka menganggap organisasi sosial dan politik pertama di Jawa disebabkan oleh seorang raja, Aji Saka, yang dikatakan datang dari luar, dan membawa peradaban kepada rakyatnya yang baru. Tentu saja tidak mungkin untuk memastikan sekarang apakah ada inti kebenaran sejarah dalam mitos ini atau tidak, dan, sudah sewajarnya, usaha untuk melakukan ini mungkin harus dianggap mustahil.

Kita tidak tahu siapakah orang-orang India yang datang membawa bentuk-bentuk peradaban yang lebih tinggi ke Kepulauan di timur ini, tapi kita punya sedikit informasi yang menunjukkan dari bagian India mana mereka datang. Prasasti yang mereka tinggalkan sebagian besar tertulis dalam gaya tulis Pallawa. Pada masa-masa awal ada kerajaan Pallawa yang terkenal di pantai Coromandel. Ada indikasi lain yang menunjuk pada titik yang sama, tapi tanpa dengan tegas menyisihkan tempat-tempat lain di India. Kesimpulan paling aman tampaknya adalah bahwa semua daerah pantai di India berkontribusi pada ekspansi budaya ke timur itu tapi India bagian selatan lebih daripada bagian lain.[24] Tidak ada yang diketahui tentang penerus Mulawarman dan Purnawarman yang tercatat pada prasasti yang paling kuno, atau mengenai nasib kerajaan-kerajaan mereka di Indonesia. Sebaliknya, daerah-daerah itu lenyap kembali selama berabad-abad, suatu fakta yang pada dirinya sendiri menarik.

Selama periode berikut, sampai 700 M, sumber-sumber untuk sejarah Indonesia terutama berasal dari Cina. Ada sedikit acuan dalam tawarikh Cina mengenai duta-duta dari "raja-raja Kepulauan di selatan" yang mempersembahkan upeti kepada para kaisar. Satu sumber tambahan diberikan oleh laporan para pemuka agama Buddha Cina yang melewati pelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perjalanan mereka ke India. Dibutuhkan sedikit kreativitas untuk mengidentifikasikan pelabuhan-pelabuhan ini dan kerajaan-kerajaan yang memilikinya. Peziarah Buddhis, Fah-Hsien, mengunjungi pulau Ye-p'o-t'i (mungkin Jawadwipa, yaitu Jawa) pada 414, dan mencatat dengan sedih bahwa hanya sedikit

dari penduduknya yang tahu tentang, atau ingin mengikuti, ajaran Buddha. Kita diberitahu bahwa seorang raja Kashmir, Gunawarman, yangdengan mengikuti Buddha telah menjadi biksu dan pergi mengajar jalan keselamatan sejati, tibadi negeri Chö-p'o segera setelah 420. Sepuluh tahun kemudian negeri yang sama ini mengirim duta kepada kaisar Cina. Chö-p'o dianggap berarti Jawa atau Sumatra. Mungkin pelaut-pelaut Cina dan India tidak sadar bahwa pelabuhan-pelabuhan yang mereka singgahi terletak bukan di satu tapi dua pulau, karena mereka biasanya mengikuti pantai-pantai di sebelah utara dan timur dan tidak tahu akan Selat Sunda yang memisahkan keduanya. Penulis-penulis tawarikh Cina tahu akan adanya satu kerajaan lain di pulau yang sama, pulau mana pun itu, yang namanya ditulis Ho-lo-tan. Penguasa-penguasa Kan-t'o-li dilaporkan sering kali mengirim duta selama paruh kedua abad kelima.[25] Kerajaan P'o-li disebut di abad keenam. Penerjemahan kembali secara sederhana atas nama ini mungkin adalah kerajaan Bali tapi terjemahan sederhana atas transkripsi Cina yang sulit tidak dengan sendirinya yang terbaik. Sebaiknya kita puasdengan sedikit hal yang kita tahu pasti, daripada berkutat dengan dugaan-dugaan spekulatif. Yang memang kita *tahu* pasti hanyalah bahwa sejumlah kerajaan Indonesia yang sulit dikenali ada pada abad-abad kelima, keenam, dan ketujuh, dan bahwa sebagian di antaranya mungkin sudah ada sejak abad kedua, dan bahwa mereka mungkin berkedudukan di mana saja di Kepulauan Indonesia kecuali Maluku dan pulau-pulau di sebelah timur Kepulauan Sunda Kecil. Penguasa-penguasa mereka tampaknya menjunjung India sebagai pembimbing budaya, tapi mengadakan perdagangan yang perlahan meningkat dengan Cina maupun India. Tapi jumlah perdagangan ini pastilah sangat kecil.

Kisah misionaris istana itu, Gunawarman, yang datang untuk mengajak raja-raja dan orang Indonesia beragama Buddhis, dapat dengan mudah menyesatkan sejarawan modern. Mudahlah tergoda untuk melihatnya sebagai seorang rasul yang bersedia mengorbankan semua miliknya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa

orang kafir tersesat. Penafsiran seperti ini sama sekali salah, menganggap konsep barat modern sudah ada di pikiran seorang India yang hidup lebih daripada 15 abad lalu. Seiring perjalanan waktu, banyak penguasa Indonesia menganut Buddhisme tapi ini tidak dengan sendirinya berarti Buddhisme menjadi agama "resmi" dengan menyingkirkan semua keyakinan dan praktik agama lain. Walaupun hal ini mungkin terjadi di suatu tempat, dan di bawah pemerintahan raja tertentu, kebiasaan umum adalah menerima kultus baru tanpa menolak yang lama.

Selama dua abad dan lebih setelah perjalanan Fah Hsien, teolog-teolog Buddhis Cina tetap terinspirasi oleh keinginan besar melihat tempat-tempat di mana Buddha pernah hidup. Perjalanan ke India perlu beberapa tahun, dan, dengan sendirinya, para peziarah berhenti di tengah jalan di Sumatra atau Jawa, tempat mereka sering kali singgah selama berbulan-bulan. Yang paling terkenal dari para peziarah itu ialah I-tsing, yang menempuh perjalanan itu pada seperempat terakhir abad ketujuh. Ketika dia memutuskan untuk mengunjungi "pohon pencerahan" di India, dia mencari teman seperjalanan, tapi sahabat-sahabatnya mengundurkan diri karena takut bahaya-bahaya dalam perjalanan itu. Ini mendorong dia menulis sajak berikut:

> Selama perjalananku kulewati seribu satu tahapan,
> Benang halus kesedihan menjerat pikiranku beratus kali.
> O mengapa kaubiarkan hanya bayangan tubuhku sendirian,
> Berjalan di perbatasan kelima wilayah India?

Dalam perjalanan pulang dia tinggal selama empat tahun di suatu tempat, yang dia gambarkan sebagai berikut:

> Banyak raja dan kepala suku di pulau-pulau Laut Selatan memuja dan percaya (pada Buddhisme), dan hati mereka penuh tekad menghimpun perbuatan baik. Di kota berbenteng Bhoga, biksu-biksu Buddhis berjumlah lebih daripada seribu dan pikiran mereka terarah pada pengetahuan dan karya baik. Mereka meneliti dan mempelajari segala perkara yang ada

> sama seperti di Kerajaan Tengah (Tiongkok); peraturan dan upacara tidak jauh berbeda. Kalau seorang biksu Cina ingin pergi ke barat untuk mendengarkan (ajaran) dan membaca (teks asli) sebaiknya dia tinggal di sini satu dua tahun dan berlatih menjalankan peraturan yang tepat lalu meneruskan perjalanan ke India Tengah.[26]

Tempat teologi dan filsafat berkembang ini mungkin berlokasi di Sumatra. I-tsing mengoleksi begitu banyak manuskrip untuk transkripsi sehingga dia harus pulang ke Cina untuk memperoleh lebih banyak kertas dan tinta– buku-buku di Indonesia mungkin tertulis pada daun lontar. Setelah kembali dia menyelesaikan transkripsinya, dan akhirnya dia berhasil membawa hampir 400 teks Buddhis yang berbeda ke Cina.

Ziarah I-tsing terjadi antara 671 dan 692 M. Studi terhadap perjalanannya memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa pada zamannya pastilah ada banyak komunikasi dengan kapal antara India dan Cina lewat Malaya. Tawarikh Cina mencatat jumlah duta-duta Indonesia yang datang ke Istana Kekaisaran makin lama makin meningkat.

Menurut sumber-sumber ini, situasi politik Kepulauan Indonesia kira-kira sebagai berikut:

Di Sumatra ada dua kerajaan. Yang di utara adalah kerajaan Malayu. Ibukotanya terletak di situs yang sekarang adalah kota Jambi di sungai Batang. Kerajaan di selatan yang lebih penting adalah Sriwijaya, dengan Palembang sebagai ibukotanya. Jelas dari laporan di Cina bahwa Sriwijaya berhasil menguasai Malayu dan sejumlah pelabuhan lain serta wilayah di Sumatra dan Semenanjung Malaya. Kemudian ia menjadi kekuatan kelautan yang besar di Indonesia bagian barat.[27]

Di Jawa pasti ada dua, mungkin bahkan tiga kerajaan. Tidak ada keraguan tentang keberadaan kerajaan di Jawa Tengah pada zaman I-tsing. Orang Cina mengenalnya dengan nama "Ho-ling", yang, ditranskripsikan dalam bentuk Indonesia, adalah "Kaling". "Kaling", atau "Kalinga", adalah juga nama negara Hindu di pantai

timur India. "Kling" adalah kata yang dipakai dalam sastra Jawa untuk "orang asing". Kerajaan di Jawa Tengah yang dicatat oleh orang Cina pada abad ketujuh itu jelas adalah kerajaan Jawa yang sudah terhindukan. Legenda Jawa abad-abad kemudian dan silsilah raja-raja Mataram di Jawa yang bersifat legenda menempatkan raja Sanjaya di takhta pada awal sejarah Jawa. Karya sastra Sunda di zaman kemudian (*Çaritha-parahyanan*) memuliakan Sanjaya sebagai penakluk besar yang menundukkan Bali, Sumatra, Kamboja, dan bahkan India dan Cina di bawah kekuasaannya. Walaupun sangat tidak mungkin, kita bisa berasumsi dengan kuat bahwa Sanjaya bukanlah sekadar tokoh mitis. Prasasti yang ditemukan dekat Canggal di daerah Kedu memberitahu kita bahwa Raja Sanjaya mendirikan tugu di tempat itu pada 732. Dari bukti ini dan serpihan bukti lain, beberapa arkeolog bahkan mencoba menggambarkan hubungan Sanjaya dengan penguasa lain pada masanya, tapi semua ini hanya dugaan.

Sumber-sumber Cina tampaknya menunjukkan adanya kerajaan ketiga di Jawa, terletak di bagian timur, di selatan kota Surabaya sekarang. Tapi bukti terbaik tentang adanya kerajaan ini berasal dari perkembangan lebih jauh peradaban Hindu-Indonesia di Jawa.

Di samping kedua negara Jawa ini, kerajaan Taruma yang lebih tua di Jawa Barat mungkin terus ada dalam satu atau lain bentuk, walaupun tidak pernah disebut. Sumber-sumber yang muncul kemudian menempatkan kerajaan Pajajaran di wilayah yang sama tapi bukti arkeologis sangat terbatas. Juga ada kekurangan bukti arkeologis di Kalimantan . Walaupun sama sekali tanpa prasasti, tampaknya kerajaan Mulawarman terus ada, karena pada zaman jauh kemudian ada kerajaan, kemudian kesultanan, Kutai dekat muara sungai Mahakam dan tawarikh kesultanan itu mencatat wilayah Muara Kaman yang ada sebelumnya. Sangat mungkin bahwa penguasa-penguasa wilayah ini dan wilayah-wilayah sekitarnya tidak mampu memelihara kontak dengan India setelah inisiasi pertama mereka ke dalam pengetahuan para Brahmana.

Dengan demikian, mereka mungkin menjadi "bisu" lagi dan kita tidak bisa belajar tentang nasib mereka.

Abad ke-8 terjadi perkembangan budaya yang cepat di Jawa dan evolusi yang agak berbeda tapi sama menariknya di Sumatra, tapi dalam satu hal ada perbedaan yang sangat mencolok. Di Jawa sejumlah besar bangunan periode ini terpelihara, di antaranya ada satu monumen yang paling terkenal di seluruh dunia. Monumen semacam itu tidak ditemukan di Sumatra. Kalau pernah ada, pastilah dibuat dari bahan yang kurang awet, tapi bahkan hal ini pun sulit menjelaskan ketiadaan yang hampir sempurna.

Di antara bangunan di Jawa yang paling tua adalah candi-candi yang reruntuhannya masih berdiri di dataran tinggi Dieng di bagian tengah pulau itu.[28]

Dataran tinggi Dieng terletak di atas gunung Prahu. Tingginya 1.800 meter tapi panjangnya tidak lebih daripada 2.400 meter dan lebarnya 750 meter. Karena ketinggiannya, keadaan alam sangat berbeda dari jenis ekuatorial pada umumnya. Inilah salah satu dari sedikit tempat di Jawa di mana suhu bisa turun sampai di bawah titik beku. Dataran tinggi itu dibentuk oleh gunung berapi yang kawahnya pelan-pelan terisi. Dulu mungkin itu danau, karena bahkan sekarangpun hujan akan menenggelamkan seluruh dataran kalau bukan karena ada sistem pembuangan air yang dibangun belum lama ini. Bahwa masalah yang sama dipecahkan oleh orang Jawa, mungkin di bawah bimbingan orang India pada abad kedelapan, terbukti dari penemuan suatu kanal pembuangan air yang dibangun dari batu dan berasal dari periode konstruksi candi itu. Anak tangga batu memudahkan akses pada dataran tinggi itu. Di lingkungan yang menakjubkan inilah orang Jawa kuno menyembah dewa-dewa mereka, dan sangat mungkin bahwa Dieng sudah menjadi tempat pemujaan jauh sebelum keyakinan Hindu diperkenalkan.

Model-model untuk arsitektur Hindu-Indonesia harus dicari di India, karena seni dataran tinggi Dieng terutama bersifat Hindu. Candi-candi itu sendiri adalah struktur sederhana dengan

keindahan klasik. Di sekitar candi-candi itu fondasi-fondasi rumah telah ditemukan, dan rumah-rumah itu, bertolak belakang dengan candi-candi itu, pastilah dari tipe Indonesia asli. Rumah-rumah dengan tipe serupa ditemukan dan masih dibangun di kerajaan-kerajaan Jawa pada masa sekarang. Candi-candi itu dipersembahkan untuk Shiwa dan satu patung tunggal, mewakili *Bhatara Guru*, "Dewa Guru", membuktikan ciri Shiwaistik candi-candi itu.[29] Menurut sebagian besar arkeolog, candi-candi itu dibangun pada akhir abad ketujuh atau awal abad kedelapan. Prasasti dari 732 yang sudah kita sebutkan menunjukkan bahwa Raja Sanjaya adalah pengikut Shiwaisme. Dalam hal-hal lain kita tidak tahu apa-apa tentang siapa dia sebenarnya dan apa yang telah dilakukannya. Tapi pada tahun-tahun sesudah pemerintahannya satu perubahan besar pasti telah terjadi di Jawa bagian tengah. Nama penerus Sanjaya disebut dalam kaitannya dengan iman kepercayaan lain dan prasastinya ditulis dengan gaya penulisan lain, pra-Nagari. Untuk waktu singkat gaya Benggala menggantikan Pallawi yang berasal dari India selatan. Kemudian, kita punya bukti bahwa hubungan dekat terjadi antara paling tidak satu raja Jawa periode ini dan Nalanda, pusat pengetahuan Benggala yang terkenal dengan studi Buddhisme Mahayana.[30] Juga kita dengar hubungan antara penguasa-penguasa Jawa dan raja-raja Kamboja tempat kerajaan kuno Fu-nan pernah makmur. Akhirnya, pastilah ada semacam hubungan khusus dengan kerajaan yang berlokasi di Sumatra dan digambarkan oleh I-tsing yang, mulai sekarang, dikenal sebagai Sriwijaya. Gelar "Shailendra (sering diterjemahkan sebagai "Raja pegunungan", walaupun mungkin ada penafsiran lain) pertama kali dipegang oleh penguasa-penguasa Jawa, kemudian Sriwijaya. Usaha untuk menjahit semua serpihan kecil informasi ini dan untuk menelusuri hubungannya menghasilkan kesimpulan berbeda. Seluruh masalah dapat disingkirkan sebagai kurang penting kalau pemerintahan Shailendra tidak bersamaan waktu dengan periode singkat tapi dahsyat seni Buddhis yang agung di Jawa (antara 760 dan 820) serta pembangunan monumen

Indonesia kuno yang teragung, *Borobudur*. Monumen ini, terletak tidak jauh dari kota Yogyakarta sekarang, menutupi bagian atas sebuah bukit yang telah dibentuk menjadi serangkaian teras. Lantai dan dinding penahannya ditutup dengan batu. Puncak bukit diratakan dan dengan demikian dibuat terlihat seperti atap rata sebuah bangunan besar. Di pusat "atap" ini berdiri sebuah "stupa" yang berisi, atau dikira berisi, satu patung Buddha. Di sekeliling stupa inti ini ada banyak stupa batu kecil berhias yang di dalamnya berisi patung-patung Dhyani-Buddha. Dinding-dinding teras tertutup dengan pahatan.[31]

Bangunan itu begitu besar sehingga konstruksinya pastilah mengambil waktu paling tidak 10 tahun. Para senimannya tentu saja tanpa nama tapi, dari karya mereka, sangat jelas bahwa mereka mengikuti model tertentu yang dibawa dari India. Setiap set relief menggambarkan cerita yang berkaitan dengan tradisi Buddha, dan sumber-sumber literer untuk ini juga datang dari India. Tidak kurang dari 400 patung dan 1.400 pahatan relief menghiasi dinding-dinding teras.

Pahatan-pahatan itu adalah buku teks mengenai ajaran Mahayana yang tertulis di batu. Dinding terbawah candi itu menggambarkan cerita-cerita mengerikan tentang neraka dan penderitaan hidup di luar keselamatan. Lalu Buddha datang sebagai juru selamat dan dalam bentuk seekor gajah putih mendekati calon ibunya. Dia dilahirkan sebagai pangeran Siddharta, yang juga disebut Gautama. Dia adalah anak Ratu Maya dan sejak lahir sudah punya kemampuan seperti orang dewasa. Dia dengan rendah hati pergi ke sekolah dengan anak-anak lain, walaupun dia tahu lebih banyak dibanding guru-gurunya. Sebagai orang muda dia melampaui semua teman sebayanya dalam kekuatan. Satu gambar di Borobudur menggambarkan dia mencekal ekor gajah mati dan melemparkan badan raksasa itu melewati tujuh tembok. Putri anggun Gopa, satu-satunya di antara para gadis yang sanggup menentang cahaya pandangan matanya, menjadi istrinya. Pangeran Gautama menikmati hidup tapi dengan ajaib terlindung

dari segala kejahatan karena dia adalah Bodhisatwa, yang akan menjadi Buddha. Melihat usia tua, orang sakit, dan kematian membuat dia berpikir tentang keselamatan. Seorang pendeta menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya tapi ayahnya, sang raja, yang memperhatikan obsesinya, mengelilinginya siang dan malam dengan kegembiraan dan musik. Namun, sang pangeran telah memahami kebobrokan sensualitas, yang dihamparkan kepadanya di dalam haremnya yang berisi 84.000 perempuan. Dia pun mengambil keputusan, dan dengan bantuan dewa-dewa dia lari untuk memulai hidup baru. Dengan hidup berpantang dan bertapa, sangBodhisatwaakhirnyamencapai *bodhi,* kebijaksanaan satu-satunya yang nyata, dan menjadi seorang Buddha. Dia pergi ke Benares dan di sana mulai "memutar roda hukum", yakni mengembangkan ajarannya.

Kisah hidup Buddha mempersiapkan peziarah menyadari kemayaan hidup duniawi. Diperkuat dengan contoh dari sang guru agung dia mempelajari cerita kehidupan awal Gautama di mana Bodhisatwa itu bersiap menjadi seorang Buddha, karena, menurut kepercayaan Buddhis pada waktu itu, jiwa terus-menerus dilahirkan kembali sampai mencapai kesempurnaan. Jadi Borobudur menggambarkan keutamaan yang dipraktikkan Bodhisatwa dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya dan yang akan dipraktikkan oleh Bodhisatwa-Bodhisatwa di masa depan.

Selama peziarah berjalan dari teras ke teras di level lebih rendah, dia dikelilingi oleh beragam pahatan dan dekorasi yang menunjukkan kenikmatan hidup dunia. Begitu dia menginjak ke lingkaran teras di atas–tiga teras melingkar membentuk bagian atas bangunan itu sementara empat teras bawah berbentuk persegi empat–dia tiba-tiba menemukan dunia lain. Di sini ada kesederhanaan berkah kosmik yang menenangkan; di sini tidak ada ornamen dan pahatan. Dalam barisan berderet-deret para Dhyani-Buddha bersamadi. Setiap patung dilindungi oleh stupa terbuka sederhana. Di teras tertinggi berdiri satu stupa raksasa, menutupi–tak terlihat oleh mata manusia–apa yang mewakili

Buddha sendiri–ruang kosong–karena Buddha adalah awal, pusat, dan akhir segala kehidupan.[32]

Shailendra dari Jawa pastilah penguasa yang sangat kaya dan kuat sehingga mereka bisa membangun monumen sebesar dan sesempurna Borobudur. Perkembangan budaya dan khususnya seni yang mendadak itu menunjukkan bahwa mereka tidak dibatasi oleh sumber daya kerajaan mereka sendiri di Jawa. Banyak penjelasan telah dikemukakan untuk fenomena tersebut. Di bawah ini digambarkan salah satu rekonstruksi terakhir dan jelas yang paling kreatif, namun sayang sekali berdasarkan bukti-bukti yang sedikit.[33]

Raja Sanjaya, penguasa Shiwa di Jawa, punya anak bernama Wishnu, yang juga bernama Panangkarana, yang kawin dengan putri penguasa Fu-nan di Kamboja. Di sini gelar "Raja gunung" pastilah sudah dipakai lama sebelum diperkenalkan di Jawa. Raja Fu-nan mungkin penyembah Shiwa atau Wishnu. Buddhisme bukan tidak dikenal di negeri mereka, tapi hanya aliran Hinayana. Karena perkawinan Panangkarana itu raja-raja Jawa kemudian mengklaim penguasaan atas sebagian Kamboja. Lebih daripada sekali mereka menyerbu wilayah itu dan kemenangan serta kekalahan mereka dicatat oleh penulis tawarikh Cina.

Putra Sanjaya, Wishnu punya dua anak yang keduanya menjadi raja. Anak tertua menerima gelar Maharaja tapi kalah pamor dari adiknya "Shri Maharaja Shailendravamça Sarvarimadamathana", "Tuan Pembasmi musuh-musuhnya", dan dialah yang mengambil gelar Shailendra. Setelah menjadi raja paling berkuasa di Asia Tenggara dia memperoleh putri-pewaris Sriwijaya untuk dikawinkan dengan putranya Samaragrawira. Kekayaan gabungan Jawa dan Sumatra memampukan dia untuk mendirikan Borobudur yang agung, begitu dia masuk agama Buddha Mahayana. Setelah wafat Samaragrawira (sekitar 812?) cucu yang lebih tua dari "pembasmi musuh-musuhnya" itu menjadi "Shailendra" dan raja Sriwijaya, sementara cucu perempuannya dikawinkan dengan keturunan keluarga Maharaja yang lantas berhasil menjadi

penguasa tunggal di Jawa bagian tengah. Begitulah periode Buddhis berakhir dan Shiwaisme kembali memperoleh tempat pertama.[34]

Apakah hipotesis tentang bangkit dan lenyapnya dinasti Shailendra di Jawa ini, dan bersamanya seni murni Buddhisme, benar atau tidak, satu hal jelasterlihat. Kondisi monumen itu dan indikasi-indikasi lain menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin perubahan dari satu agama ke agama lain disertai perang dan kekerasan. Dinasti Shailendra tidak digulingkan. Ia mungkin digantikan oleh penguasa yang, kurang lebih, punya klaim "sah" atas takhta.[35] Tapi kejayaan Shailendra terus hidup dalam tradisi Jawa. Secara ideologis semua penguasa Jawa kemudian mengklaim diri sebagai penerus sah dinasti Shailendra yang besar.

Patut disayangkan bahwa kita hanya punya informasi tepat yang sangat sedikit tentang periode paling gemilang dalam sejarah Jawa ini. Pastilah ada orang dalam istana Shailendra yang ahli dalam sastra Buddhis. Sayang, tidak ada tulisan dari abad itu yang diturunkan sampai masa-masa kemudian. Teori J. H. Kern, ahli Sanskerta yang hebat itu, bahwa salah satu penguasa Shailendra memerintahkan penerjemahan syair Sanskerta *Amaramala* ke dalam bahasa Jawa tidak bisa dipertahankan lagi.[36]

Antara abad kelima dan kesembilan, dua pusat budaya Hindu-Indonesia menjadi menonjol, Palembang, ibukota Sriwijaya, dan Jawa bagian tengah. Pada periode berikutnya, Jawa tengah mundur ke kekelaman dan digantikan oleh Jawa Timur.

BAB 2

KERAJAAN-KERAJAAN JAWA DAN SUMATRA

DEKAT Prambanan, di perbatasan antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta modern serta tidak jauh dari reruntuhan candi-candi Buddha dari periode Shailendra, satu kompleks reruntuhan candi dari masa yang lebih muda ditemukan. Seluruh kompleks bangunan itu secara populer dikenal dengan nama "Lara Jonggrang". Lara Jonggrang berarti "gadis semampai", dan adalah nama yang diberikan oleh orang-orang di sekitar itu bagi patung dewi Hindu, Durga, yang masih berdiri di salah satu candi. Durga, "yang tak terdekati", adalah salah satu perwujudan Dewi, istri Shiwa, yang diagungkan dalam berbagai sebutan yang mencerminkan berbagai bentuk kekuatan suprainsani yang dimilikinya. Bahkan, petani Jawa dari daerah sekitar kadang-kadang masih membawa persembahan kepada Durga sampai akhir-akhir ini. Profesor Krom, ahli besar sejarah Hindu-Jawa, pernah mencatat bahwa dua kambing dibawa ke candi itu oleh seorang petani. Kambing adalah hewan korban favorit untuk pengorbanan terhadap Durga dari zaman-zaman awal dan cerita Krom adalah gambaran nyata tentang kesinambungan peribadatan—dan karena itu tradisi

budaya yang tidak terputus—di pulau itu.

Seluruh kompleks bangunan itu dikelilingi oleh dinding luar dengan konstruksi yang tidak beraturan melingkupi area sekitar 365 meter setiap sisi. Di dalam dinding luar ini ada dinding berbentuk persegi yang masing-masing sisinya berukuran 210 meter. Empat gapura yang persis menghadap utara, barat, timur, dan selatan menjadi jalan masuk ketiga teras yang masing-masing kira-kira satu meter di atas teras sebelumnya. Di atas tiga teras ini, yang mengelilingi satu lapangan persegi lagi, tiga baris candi kecil dibangun. Masing-masing dari 156 bangunan ini terdiri atas satu ruangan seluas kira-kira empat setengah meter persegi. Di dalam lapangan terdalam berdiri tiga candi besar di sisi timur dan persis di seberangnya tiga candi lebih kecil. Ruang terbuka yang tersisa di sisi utara dan selatan di antara dua baris candi ini ditempati konstruksi dua candi kecil.

Tiga candi yang lebih besar adalah tempat pemujaan trimurti—Wishnu, Shiwa, dan Brahma. Tiga bangunan lebih kecil di sisi barat mungkin berisi patung-patung binatang suci yang dikendarai dewa-dewa itu. Candi dewa-dewa itu dihias dengan karya pahatan berupa paparan dari cerita *Ramayana*, salah satu dari dua epik besar Hindu.[1]

Apa tujuan dari begitu banyak candi kecil di sekeliling lapangan dalam ini? Di dalam setiap candi itu ada satu lubang kecil di tengah-tengah lantai dan pada beberapa lubang ditemukan abu dan sisa-sisa persembahan korban. Rijklof van Goens, salah seorang Belanda pertama yang menjelajahi Jawa pedalaman, mencatat pada paruhan pertama abad ke-17 bahwa kuburan-kuburan itu dijarah karena ada emas di dalamnya.[2] Seluruh kompleks candi itu pastilah satu musoleum besar dan candi besar itu mungkin adalah kuburan untuk raja, sementara candi-candi kecil adalah tempat abu jenazah pejabat-pejabat tinggi kerajaan dan menjadi tempat pemujaan dewa-dewa khusus yang melindungi masing-masing daerah dari negara itu.

Kini pertanyaan muncul: untuk negara manakah dan raja

siapakah mausoleum ini? Lara Jonggrang begitu dekat masanya dengan candi-candi periode Shailendra sehingga semua bangunan itu, baik dari periode yang lebih tua maupun muda, pastilah dibangun di dalam bagian-bagian dari satu area pembangunan yang sama. Tapi ada indikasi bahwa ketika candi-candi yang lebih muda dibangun, bagian yang lebih tua dari area itu sudah mulai dianggap kurang penting. Satu istana kerajaan telah ditemukan di antara reruntuhan kompleks yang lebih tua, tapi sangat dekat dengannya terdapat galian tempat bahan bangunan diambil untuk membangun mausoleum itu. Dari fakta ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada waktu mausoleum itu dibangun, istana itu sudah ditinggalkan. Nama raja yang membangun Lara Jonggrang dikenal, dan dia menyebut diri sendiri raja Mataram. Kita juga tahu bahwa dinastinya mengklaim sebagai keturunan raja Sanjaya, pendahulu para Shailendra, dan bahwa mereka pernah menyandang gelar "raja-raja Mataram", yang dulu dipakai oleh raja itu. Sanjaya adalah Shiwais, dan dinasti baru itu juga Shiwais. Mausoleum Lara Jonggrang yang Shiwais ini dibangun dekat istana Buddhis Shailendra yang sudah ditinggalkan. Ia mungkin dibangun pada awal abad ke-10, artinya, tidak lebih daripada 40 tahun sesudah lenyapnya dinasti Shailendra.

Apa yang sesungguhnya terjadi ketika pembangun Lara Jonggrang yang Shiwais menggantikan Shailendra, pembangun Borobudur yang Buddhis? Pertanyaan ini telah didiskusikan para arkeolog dan sejarawan untuk jangka waktu lama. Ada pakar yang menggambarkan suatu "kontrarevolusi" para Shiwais yang menyebabkan runtuhnya keunggulan Buddhis.

Para Shiwais, yang tidak tenang di bawah pemerintahan raja-raja yang sangat bersemangat sebagai Buddhis sehingga membaktikan sebagian besar sumber daya mereka untuk membangun monumen-monumen yang begitu besar dan mahal, dianggap bermigrasi ke bagian lebih timur negeri itu dan kembali pulang setelah para penerus "Pembasmi musuh-musuhnya" mulai kehilangan kekuasaan. Para Shiwais, katanya, mengabaikan

pemeliharaan candi-candi Buddhis dan membangun monumen mereka sendiri di antara reruntuhan itu. Kalau konflik Buddhis-Shiwais ini betul-betul terjadi, ini tidak ada padanannya dalam sejarah Jawa. Perang agama jarang terjadi dalam sejarah pulau yang beruntung ini, bahkan ketika Islam mulai masuk. Penjelasan yang lebih masuk akal atas peristiwa-peristiwa yang sedang kita bahas ini muncul dengan sendirinya kalau kita berasumsi bahwa keputusan menganut Buddhisme atau Shiwaisme adalah urusan yang ditentukan para raja dan bahwa masuknya satu agama baru tidak menimbulkan perubahan mendasar dalam praktik pemujaan populer, walaupun mungkin ada tambahan unsur-unsur baru. Juga tidak ada tuntutan terhadap rakyat banyak untuk menganut ajaran Buddha atau secara eksklusif menyembah dewa-dewa Shiwais. Penghormatan kepada keduanya pada waktu yang sama dianggap bukan hanya diperbolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan. Pencapaian-pencapaian besar dianggap bukti kekuatan batin yang besar, sehingga keberhasilan penguasa-penguasa asing dianggap berasal dari kekuatan gaib yang mereka peroleh dari dewa-dewa mereka. Apa lagi yang lebih bijaksana daripada menambahkan kekuasaan dewa-dewa asing itu kepada dewa-dewa yang sudah diwarisi dari nenek moyang? Akan kita lihat bahwa sejarah Indonesia kuno bisa dimengerti hanya bila kita merekonstruksinya berdasarkan konsep ini.

Setelah 900 M, pusat kehidupan budaya dan politik Jawa beralih ke timur. Mungkin terjadi bahwa, bersama raja mereka, sebagian penduduk pindah ke daerah-daerah yang lebih ketimur. Jawa masih berpenduduk jarang dan pastilah ada banyak tanah subur. Tapi, fakta bahwa Jawa tengah secara historis menghilang tidak dengan sendirinya berarti ia kehilangan penduduknya atau organisasi politiknya. Sedikit catatan yang masih terdapat dari periode awal ini terutama berisi keadaan istana raja serta hidup dan karya para pejabat tinggi. Karena itu catatan-catatan ini akan ditemukan di wilayah tempat raja-raja itu tinggal. Studi sejarah abad pertengahan di Eropa menyediakan banyak bukti bahwa

ketiadaan dokumen atau informasi tentang suatu tempat atau institusi selama beberapa waktu tidak berarti kesimpulannya adalah bahwa tempat atau institusi itu lenyap atau mati. Hal yang sama kemungkinan benar untuk Jawa.

Raja pertama setelah perpindahan istana ke Jawa bagian timur dikenal dengan nama Sindok.[3] Dia disebut-sebut dalam beberapa prasasti, pertama sebagai seorang pejabat utama kerajaan, kemudian sebagai penguasa. Teks paling awal berasal dari 919, yang paling akhir dari 947. Sindok menyandang gelar raja antara 927 dan 929, dan mengklaim diri sebagai keturunan dinasti Mataram. Dia terus memakai gelar raja Mataram, walaupun kekuasaannya mungkin tidak sampai mencakup Jawa bagian tengah. Jelas, suksesi sah dianggap sangat penting. Ukuran penghormatan populer untuk kekuasaan seorang raja tentu saja berkaitan erat dengan ukuran kekuatan gaib yang dianggap dimilikinya, dan tidaklah bagus bagi seorang raja baru untuk menyatakan dirinya kepada rakyatnya sebagai *homo novus* (*orang baru – pen.*), bahkan kalaupun dia memang baru. Kalau raja baru itu sungguh-sungguh *homo novus* yang memperoleh kekuasaannya dengan mengalahkan pendahulunya, dia mungkin sekali mengklaim sebagai keturunan, atau paling tidak pewaris sah, dinasti yang ada persis sebelum pendahulunya itu. Dengan demikian, naiknya ke takhta bisa diklaim sebagai pemulihan pemerintahan yang sah. Begitulah, penguasa Muslim besar pertama, *Sultan Agung* dari abad ke-17 mengklaim sebagai pewaris sah dari raja-raja Majapahit sementara Girindrawardhana (yang memerintah pada interval antara Majapahit dan Mataram yang Islam) diabaikan. Hubungan keluarga dapat selalu diciptakan, tentu saja, kalau raja pertama suatu dinasti baru memutuskan untuk mengawini putri dari keluarga istana sebelumnya. Kesediaan sang putri tidak sangat dibutuhkan dan, bila kebutuhan mendesak, hubungan darah pun tidak selalu diperlukan. Suatu ikatan spiritual antara pasangan kerajaan yang baru dan raja "sah" yang terakhir dapat saja dibuat.[4]

Kita tidak tahu banyak tentang raja Sindok. Tapi yang patut dicatat adalah fakta bahwa informasi pertama yang dapat diandalkan mengenai pulau Bali berasal dari masa pemerintahannya. Raja Ugrasena yang memerintah sebagian pulau itu pastilah sezaman dengannya. Mulai sekarang, banyak nama penguasa Bali muncul dalam prasasti. Apakah lebih daripada sekadar kebetulan bahwa catatan tentang keberadaan mereka mulai muncul pada periode yang sama ketika pusat kekuasaan di Jawa pindah ke wilayah yang lebih mudah menjangkau Bali? Tampaknya sangat mungkin bahwa ada semacam kaitan antara kedua peristiwa itu, karena acuan pertama yang tidak bisa dibantah tentang Bali oleh sumber-sumber Cina berasal dari 977, ketika perkawinan antara keluarga penguasa Jawa dan Bali dicatat untuk pertama kali.[5]

Sumber-sumber kita untuk sejarah Jawa pada abad ke-10 jarang. Kesulitan kita lebih besar lagi bila berpaling ke Sumatra dan kerajaannya yang terkenal, Sriwijaya. Di sini, kita harus menoleh ke Cina dan, sesudahnya, India dan Arabia, untuk memperoleh informasi. Sudah kita katakan bahwa setelah pemisahan yang kita anggap terjadi atas kerajaan "Pembasmi musuh-musuhnya" (sebelum 900), dinasti Shailendra terus memerintah di Sriwijaya. Salah satu raja Sumatra pertama dari keluarga kerajaan mendirikan suatu institusi di "universitas" Buddhis di Nalanda di Benggala (sekitar 850-860). Jelas, Sriwijaya tetap setia pada Buddhisme Mahayana, yang mungkin menjadi salah satu sebab ia punya hubungan lebih sering dengan dunia luar. Bukti yang lebih nyata akan pentingnya "hubungan internasional" dalam sejarah Sumatra adalah lokasi geografis pulau itu yang membuat penguasa-penguasanya lebih mudah menarik pajak dari arus kecil perdagangan yang mengalir antara India dan Cina. Perdagangan ini menuntut banyak pelabuhan-antara dan bukan tidak biasa bagi penguasa yang kuat di masa awal "perdagangan internasional", entah di Eropa atau Asia, untuk memonopoli sendiri profesi makelar yang menguntungkan itu. Shailendra di Sumatra adalah raja-raja pelaut dan mereka berhasil menaklukkan pantai-pantai

Semenanjung Malaya ke bawah kekuasaan mereka, tapi jarangnya informasi yang dapat diandalkan tentang kegiatan ekonomi dan militer mereka membuat fitrah dan cakupan "kerajaan kelautan" dari masa awal Indonesia ini kabur. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk memeras sebanyak mungkin hal dari sedikit informasi yang kita punya, tapi tidak banyak hasil konkret. Kita bisa membayangkan suatu kebijakan luar negeri ekonomi yang secara ajek diterapkan oleh raja-raja yang jarang kita kenal namanya dan yang kegiatan politiknya tidak kita ketahui; kita bisa membayangkan kontak politik bersinambung antara raja-raja ini dan kaisar-kaisar Cina serta beberapa penguasa yang kuat di India, tapi apa yang kita tahu–dan kita harus puas dengan itu–adalah bahwa ada sedikit acuan terhadap Sriwijaya dalam tawarikh imperial Cina dan bahwa beberapa rajanya telah mencatatkan nama mereka dengan bahasa berbunga-bunga di atas batu. Bahkan prasasti-prasasti ini jarang jumlahnya, jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan di Jawa.

Referensi dari Cina sebagian besar berasal dari 960 atau lebih kemudian. Ini tidak lantas berarti bahwa kerajaan Sumatra tidak berkunjung ke Cina sebelum tahun itu, karena ketiadaan data mungkin disebabkan kekacauan besar yang terjadi di Cina pada paruhan pertama abad itu akibat invasi Mongol. Kita tahu bahwa kaisar pertama dinasti Sung (960-1279) memulihkan ketertiban di seluruh negerinya, dan bahwa dia membuka kembali pelabuhan di Kanton untuk perdagangan luar negeri. Segera sesudahnya tawarikh mencatat "duta-duta" Indonesia, sembilan di antaranya datang dari Sriwijaya, sementara dua lagi dari Jawa dan Bali. Tampaknya kecil kemungkinan para duta ini menempuh perjalanan panjang ke utara ke Istana Kekaisaran; mungkin mereka diterima gubernur Kanton, yang lalu melaporkannya kepada Kaisar Yang Mulia. Mereka mungkin membawa kabar bersifat politis tapi, sekali lagi, mengenai ini kita hanya tahu sedikit. Kita cukup yakin bahwa mereka membawa barang dagangan untuk dipertukarkan dengan produk Cina, dan di antara barang dagangan Sumatra cula

badak, disukai di Cina karena dianggap punya kualitas pengobatan, mungkin adalah yang paling berharga. Selain catatan di Cina, ada beberapa referensi mengenai Sumatra dalam cerita dari saudagar dan ahli geografi Arab serta Persia. Referensi-referensi ini, paling tidak, jelas dibuat karena minat terhadap perdagangan dan perniagaan. Produk-produk Sriwijaya didaftarkan: timah, emas, gading, rempah-rempah, kayu berharga, dan kamper. Bahkan beo dari Sumatra punya reputasi sebagai burung sangat cerdas. Seorang penulis Arabia dari abad ke-10 mencatat dengan serius bahwa burung-burung itu sanggup bicara bahasa Arab, Persia, Yunani, dan Hindustani.[6]

Tahun 992 muncul unsur baru dalam catatan Cina. Duta-duta datang baik dari Jawa maupun Sriwijaya. Duta dari Sumatra yang telah meninggalkan Kanton pada musim semi tahun itu tiba-tiba kembali lagi: ketika tiba di pantai Champa (Vietnam bagian selatan) dia diberitahu bahwa negerinya sedang diserbu oleh Jawa, kalau kita bisa mengandaikan bahwa karakter Cina yang dibaca "Chö-po", *memang* berarti Jawa dan bukan suatu negeri lain, misalnya, Malaya, atau mungkin Jawa serta negeri lain. Basis filologis untuk rekonstruksi spekulatif kita akan "politik internasional" di Asia Tenggara memang agak lemah! Namun biar bagaimanapun, duta yang kembali lagi ke Kanton meminta agar suatu "Perintah Kekaisaran" dikeluarkan untuk menyatakan bahwa Sriwijaya ada di bawah perlindungan Kekaisaran itu. Duta Jawa memberikan kisah berbeda: dia protes bahwa di antara raja mereka dan penguasa Sriwijaya memang selalu ada perang yang terus-menerus.[7] Pernyataannya terdengar seperti alasan saja, tapi agak meragukan bahwa alasan ini dikatakan karena takut kepada Cina, karena sampai saat itu tidak pernah ada intervensi bersenjata oleh Cina dalam perkara Kepulauan di selatan dan baru terjadi pada akhir abad ke-13, itu pun seorang kaisar Mongol yang memerintahkannya.

Catatan Cina ini tampaknya menimbulkan banyak kebingungan dalam rekonstruksi peristiwa yang terjadi di Indonesia pada

sekitar 1000. Menurut Krom dan pakar-pakar sejarah Jawa yang lebih tua, seorang raja yang berani dari Jawa Timur, bernama Dharmawangsa, memulai suatu program penaklukan yang ambisius. Dia menaklukkan Bali dan, sebagai seorang "imperialis" sejati bahkan sebelum istilah itu diciptakan (*avant la lettre*), merencanakan penghancuran Sriwijaya serta mengangkat diri menjadi penguasa seluruh Kepulauan Indonesia.[8] Dia mengalahkan kekuatan kelautan Sumatra dan menyerbu negeri mereka. Selama beberapa tahun–menurut rekonstruksi historis ini– serbuan dilakukan di wilayah Sumatra sampai serangan Jawa itu dipatahkan. Pembalasan Sriwijaya tidak tanggung-tanggung. Dikatakan bahwa Sumatra mengejar musuh-musuh mereka sampai ke Jawa bagian timur, di mana mereka menghancurkan *keraton*, tempat tinggal keluarga istana, dan membunuh rajanya. "Seluruh pulau Jawa (menurut suatu teks kuno) ketika itu seperti 'lautan' (bencana) atau, menurut terjemahan lain, 'seperti laut purba'."[9]

Berbagai keberatan telah dikemukakan menyangkut rekonstruksi akhir riwayat kerajaan Jawa Timur pertama ini. Rekonstruksi ini sepenuhnya didasarkan pada catatan Cina, yang dikutip di atas, tentang suatu perang Jawa-Sumatra. Jelas ada perang, tapi di antara siapa dan apa hasilnya? Satu-satunya sumber Indonesia adalah suatu prasasti dari tahun 1041 yang akan dibahas nanti, dan sudah kita lihat bahwa terjemahannya sangat sulit. Hampir tidak ada keraguan bahwa salah seorang pelaku dalam konflik itu adalah seorang raja yang memerintah suatu wilayah tidak jauh dari kampung halaman Sanjaya dan yang dengan bangga menyatakan hubungannya dengan raja-raja terkenal itu. Nama wilayah itu adalah Wurawari, yang juga nama bunga "nasional" Jawa.[10] Penguasaan atas wilayah Wurawari tampaknya dianggap sangat penting oleh penguasa-penguasa Jawa di kemudian hari, agaknya karena ada hubungan tradisional yang sangat khusus. Kalau pada semua ini kita tambahkan adanya raja-raja yang menyandang gelar *Girindrawardhana*–yang,

katanya, berarti "penerus Shailendra"—yang disebut-sebut bahkan sampai abad ke-16, dapat kita simpulkan bahwa Mataram yang asli terus ada dalam bentuk tertentu. Konotasi itu memperkuat teori bahwa raja Sindok memang adalah pendiri satu kerajaan baru dan beberapa dinasti yang lebih bersinar daripada kerajaan Jawa bagian tengah yang lebih tua. Perang Jawa-Sumatra dan bencana besar yang terjadi sekitar tahun 1000 mungkin ada hubungannya dengan persaingan antara kedua dinasti tersebut. Tentu saja, sedikit saja dari hal-hal ini yang dapat dibuktikan dengan pasti dari berbagai sumber. Dari sumber Cina kita tahu bahwa ada perang, dan dari prasasti panjang yang ditinggalkan raja Airlangga pada 1041 kita tahu ada guncangan politik pada umumnya di seluruh Jawa bagian tengah dan timur. Ada pun mengenai raja Dharmavamça, kita bahkan tidak yakin orangnya memang ada. Teks-teks Sanskerta dan Jawa kuno sulit diterjemahkan dan kata yang mula-mula dianggap menyebutkan seorang penguasa yang sebelumnya tidak dikenal mungkin saja ternyata hanyalah bagian dari gelar raja yang memerintahkan prasasti itu dibuat.

Yang pasti kita ketahui ialah bahwa Jawa mengalami satu periode kekacauan di seputar pergantian abad, dan bahwa, pada saat yang sama, kerajaan Sriwijaya di Sumatra menjadi makmur. Sumber-sumber Tibet dan Nepal menunjang kepopuleran candi-candi suci Buddhis di Sumatra. Satu sumber Tibet menyebutkan bahwa Atisha, reformator besar Buddhisme di Tibet, pergi belajar selama 12 tahun (1011-1023) di ibukota Sriwijaya di tepi sungai Musi. Duta-Duta Sriwijaya secara teratur mengunjungi Kanton tempat mereka meminta lonceng-lonceng untuk candi yang dibangun raja mereka di negeri mereka dan, kata mereka, di situ rakyat mereka berdoa agar kaisar Cina diberi umur panjang.[11] Tentu saja permintaan mereka dikabulkan. Pada 1005, seorang raja Sriwijaya menyuruh bangun sebuah candi di Negapatnam di wilayah penguasa Chola yang kuat di India.[12]

Namun, sekalipun kejatuhan kerajaan Jawa Timur pertama benar-benar disebabkan serangan balasan oleh Sumatra, raja-raja

Sriwijaya tidak lama menikmati kemenangan mereka. Seorang raja India, dengan tekad menjarah dan menaklukkan, tiba-tiba muncul dengan armada kuat di sungai Musi, merebut kota itu, menangkap rajanya dan membawa pergi harta bendanya. Dengan gerak cepat ke utara, para penyerbu menaklukkan Malayu, dan dari sana berlayar ke Semenanjung, di mana rasa takut luarbiasa membuat negara-negara bawahan Sriwijaya langsung bertekuk lutut tanpa memberikan perlawanan berarti.[13] Pendudukan singkat atas Aceh menyempurnakan kerja raja penjarah yang berani ini. Raja yang pada 1025 melancarkan pukulan dahsyat ini tiada lain adalah Rajindracola, penguasa kerajaan di pantai Coramandel, yang hubungannya dengan Sriwijaya sangat bersahabat sampai sesaat sebelum serbuan itu.

Lagi-lagi, makna peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan itu tetap meragukan. Kita mudah tergoda untuk membangun di atas cerita-cerita ini suatu kisah besar pergumulan untuk memperoleh keunggulan di laut dan untuk mengontrol jalur-jalur laut antara Asia Selatan dan Timur, tapi berdasarkan sedikit referensi yang kita punyai tidak ada yang bisa membenarkan penafsiran dengan mengikuti pola politik kekuasaan zaman modern ini.[14] Sumber-sumber Cinadan lain-lain membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya sama sekali tidak hancur. Ia terus menjadi pusat Buddhis yang penting. Duta-dutanya mengunjungi Cina pada 1028. Duta-duta yang di hari kemudian berkunjung kepada Kaisar dicatat pada tahun-tahun antara 1078 dan 1097. Hubungan baik Sriwijaya dengan Coromandel pasti telah pulih kembali. Tapi bahwa negara Sumatra itu pelan-pelan melemah dapat disimpulkan dari makin jarangnya prasasti dan tawarikh Cina.[15]

Kita punya bukti sejarah yang lebih kuat dengan naiknya raja Airlangga di takhta Jawa Timur. Raja ini meninggalkan suatu prasasti panjang tentang kisahnya. Ketika dia datang dari Bali, tempat ayahnya, menurut prasasti itu, adalah seorang raja lokal, dan mencoba menguasai takhta Jawa, dia ditentang oleh penguasa-penguasa lokal, yang lebih suka kekacauan berkelanjutan daripada

menjadi bawahan seorang raja yang kuat. Airlangga, seperti raja Alfred di Inggris, terpaksa hidup dalam pengasingan di hutan-hutan. Tahun-tahun panjang yang dihabiskannya dalam kesendirian di antara petapa-petapa di hutan dan gunung bukanlah waktu yang terbuang sia-sia, karena selama itu ia menghimpun kekuatan fisik dan moral untuk mencapai tujuannya. Dia menyatakan bahwa masa-masa penyangkalan dan penguasaan diri itulah yang pada akhirnya memberikan keberhasilan kepadanya. Penguasaan diri yang dijalankan menurut pengajaran Brahmanistik dengan sendirinya memperkuat tekad Airlangga, tapi bagi para teolog yang seiman dengannya pada zaman itu, pengalamannya punya arti lebih. Mereka memandangnya sebagai periode penghimpunan ilmu gaib dan kekuasaan yang mereka yakini ada dalam segala sesuatu di bumi dan yang mencapai perwujudan paling tinggi lewat pemakaiannya secara sadar oleh mereka yang ahli dalam kekuatan gaib. Pemakaian yang ceroboh atas kekuatan yang lebih tinggi ini bukanlah sesuatu yang jahat karena kekuatan gaib dipercaya hanya dimiliki oleh orang-orang yang sebetulnya merupakan dewa-dewa yang dilahirkan sebagai manusia. Seni pemakaiannya dapat dipelajari lewat studi dan kekuatannya dapat diperbesar dengan berpantang. Pelaksanaan ajaran gaib yang dilakukan sendiri dapat membuat orang jadi manusia super, dan kepemilikan atas kekuatan itu dengan demikian terlihat oleh semua orang lewat keberhasilan yang dicapai seorang individu dalam hidupnya sendiri. Kadang-kadang kekuatan gaib itu begitu sakti sehingga tidak bisa dikontrol dan dibatasi dalam aturan-aturan sempit kehidupan normal, tapi mendorong orang yang memilikinya untuk menantang semua hukum dan peraturan yang berlaku. Orang seperti itu tidak dianggap kriminal; sebaliknya, penyelewengannya diterima sebagai tanda bahwa dia perlu ruang lebih luas untuk kekuatannya, dan bahwa mungkin memang sudah takdirnya menjadi pemimpin.

Pada awalnya kekuasaan Airlangga terbatas. Dia hanya memerintah satu wilayah di dekat Surabaya, dan banyak raja

lokal menolak klaimnya untuk berkuasa atas semua wilayah. Tapi lama-lama Airlangga berhasil menaklukkan semua musuhnya dan mempersatukan Jawa bagian timur di bawah pemerintahannya. Ambisinya tidak lebih daripada itu. Walaupun kekuasaan Airlangga tidak sangat luas, reputasinya sangat besar sehingga raja-raja lebih kecil mencoba meniru kejayaan pemerintahannya.

Jawa Barat tetap negeri terbelakang sejak masa-masa awal imigrasi Hindu. Ia tidak terpengaruh peradaban tetangganya di sebelah timur. Pada masa Airlangga, seorang raja Sunda (nama lain Jawa Barat) menyatakan diri dalam sebuah prasasti dengan gelar yang sangat mulia tapi agak berat yang dituliskan di sini untuk pencerahan pembaca: *Shri* (raja) *Jayabhupati Jayamanahen Wishnumurti Samarawidawa Çakalabhuwanamandaleçwaranindita Haro Gowardhana Wikranottunggadewa.*[16] Para pakar lama membahas makna persis dari semua gelar indah ini. Masalahnya belum sepenuhnya terpecahkan tapi tidak terbantahkan bahwa nama Yang Mulia itu sangat sok, karena mencakup klaim atas wilayah-wilayah yang jelas-jelas dikuasai orang lain. Gelar itu sebetulnya adalah tiruan—dengan selera yang agak murahan—dari gelar tetangganya yang lebih berkuasa di timur, dan justru karena itu gelar itu dituliskan dalam bahasa Jawa, bukan Sunda. Lucu juga menemukan nama raja besar Sunda ini terdaftar di dokumen lain di antara nama raja-raja bawahan yang tunduk pada Sumatra.

Daerah lain tempat keunggulan budaya Jawa tampaknya sudah mantap pada masa ini adalah Bali. Sejak saat itu raja-raja Bali mulai menoleh ke Jawa bagian timur, seperti raja-raja kecil Jerman pada abad ke-18 menoleh ke Paris. Mereka mulai meniru tetangga mereka yang lebih berkuasa dan bahkan menggantikan bahasa Bali dengan Jawa dalam arsip istana mereka.[17]

Nama Airlangga dihubungkan dengan penulisan salah satu sastra Jawa paling tua dan indah, *Arjunawiwaha*, suatu cerita yang diambil dari epik India kuno *Mahabharata*. Bagian dari epik ini dipilih untuk ditulis ulang ke dalam bahasa Jawa karena ia

bisa diartikan sebagai cerita raja Airlangga sendiri dalam bentuk alegori kehidupan Arjuna.[18]

Arjuna adalah seorang pangeran yang, melalui hidup pertapaan yang panjang, memperoleh kekuatan spiritual yang begitu tinggi sehingga para dewa sendiri meminta bantuannya dalam pergumulan mereka melawan raksasa yang tak terkalahkan. Sebelum mereka menyerahkan tugas berat ini kepadanya, para dewa menguji penguasaan diri dan daya pantangnya. Arjuna mengatasi semua pencobaan mereka dan kemudian menantang raksasa itu dan menghancurkannya. Kesejajaran dengan kehidupan masa muda Airlangga sendiri jelas terlihat. Penerapan yang tepat atas teks suci cerita itu dipercaya punya kekuatan untuk memberikan kebahagiaan kepada sang raja. Keyakinan ini kemungkinan besar menjadi alasan penulisan epik itu oleh pujangga-pujangga Jawa, karena begitu dibandingkan dengan petapa besar itu, Arjuna, sang raja lantas akan memperoleh kualitas-kualitas sang pahlawan legendaris itu.

Ada yang khusus pada versi Jawa dari syair Hindu itu yang mengarahkan perhatian kita pada satu aspek lain yang menarik dalam kehidupan orang Jawa. Jelas dari beberapa bagian teks itu bahwa pada masa Airlangga ada versi lain dari cerita yang sama yang tampaknya telah dipakai untuk pertunjukan dalam teater Jawa, khususnya untuk *Wayang*, pagelaran teater bayang-bayang.[19] Untuk teater itu, cerita-cerita yang diambil dari epik Hindu tidak hanya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa tapi juga diadaptasi dengan kehidupan dan mentalitas Jawa. Dalam teater itu, para pahlawan ditemani oleh para punakawan khas Jawa, yang perannya dalam cerita hanya ditetapkan dengan kabur dalam teks sehingga ada banyak kesempatan bagi dalang untuk mempertunjukkan kehebatannya sendiri. Kemudian, para punakawan ini juga muncul dalam pahatan-pahatan di dinding candi-candi di mana cerita-cerita dari para pahlawan India kuno ini dikisahkan.

Pendukung besar sastra Jawa, Raja Airlangga, tidak pernah

melepaskan gagasan untuk kembali ke kehidupan pertapaan. Setelah melepaskan diri dari banyak tanggungjawabnya sebagai raja, dia sekali lagi memasuki hidup pertapaan sambil tetap mempertahankan jabatan rajanya. Gelar baru yang ditemukan dalam prasasti-prasasti periode ini, "His Majesty the Most Reverend", mengacu pada kombinasi kekuatan spiritual dan duniawi yang dimilikinya dan yang membuatnya mampu mengontrol urusan-urusan kerajaannya dengan segala cara yang mungkin.

Di Belahan, sekitar 50 km selatan Surabaya, telah ditemukan reruntuhan suatu mausoleum yang berisi satu patung indah dewa Wishnu yang sedang mengendarai Garuda. Mausoleum itu pernah menjadi tempat peristirahatan abu Airlangga dan patung itu mungkin saja adalah potret tokoh luarbiasa tersebut. Kekaguman yang dirasakan rakyatnya kepada raja Airlangga terbukti dari fakta bahwa patung itu menghadirkan sosoknya dengan ciri-ciri Wishnu, Dewa Kehidupan dan Terang.

Raja Airlangga menghidupkan kembali negara Jawa Timur tapi generasi berikut menuduhnya menghancurkan hasil karyanya sendiri dengan membagi kerajaannya di antara dua putranya. Cerita ini dikisahkan dalam tawarikh dan cerita legenda, ditulis paling tidak tiga abad kemudian. Ceritanya sebagai berikut.

Airlangga punya dua anak. Ia ingin membagi kerajaannya kepada keduanya, karena dia mencintai mereka sama besarnya dan tidak ada di antara mereka yang dapat mengklaim hak atas takhta di atas yang lain. Dia memutuskan untuk meminta nasihat seorang suci yang punya kebijaksanaan dan kekuatan gaib yang besar, Mpu Bharada. Kepadanya Airlangga membuka rencananya untuk memberikan Bali kepada yang seorang dan Jawa kepada yang lain, tapi Bharada memperingatkannya untuk tidak membangkitkan amarah Kuturan yang suci dan berkuasa, yang kekuatan gaibnya melindungi pulau Bali. Lalu raja itu minta Bharada membagi wilayah Jawanya ke dalam dua bagian. Orang suci itu menandai perbatasan dengan menuangkan air

JAWA PADA PERIODE HINDU-JAWA
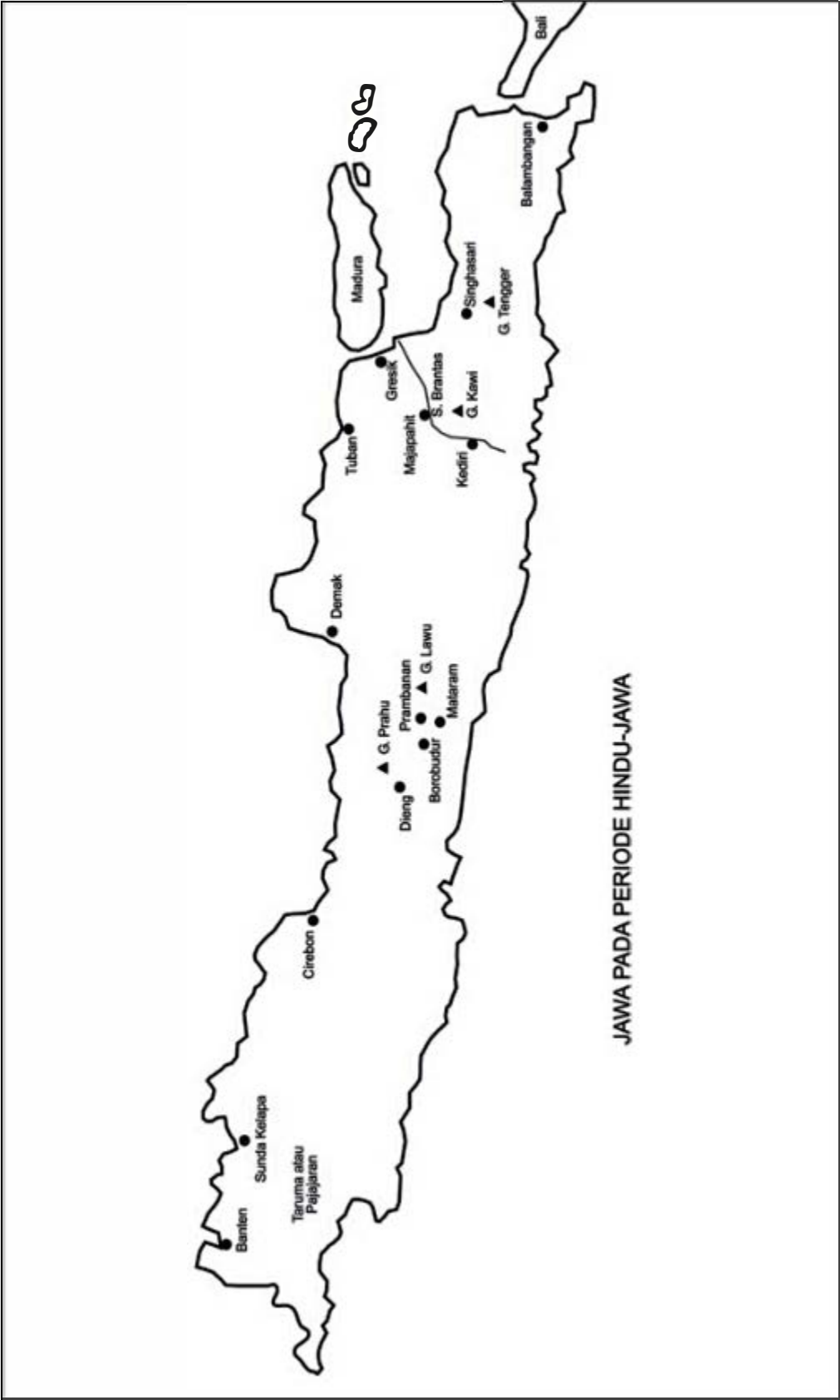
dari sebuah kendi, sambil terbang di udara. Sayang, dia tidak dapat menyelesaikan usahanya, karena jubahnya yang panjang tersangkut di sebuah pohon. Akibatnya, perbatasan itu sebagian tidak jelas sehingga mengakibatkan perang dan perseteruan.

Pembagian kerajaan itu dikatakan terjadi segera setelah 1041 dan kedua negara penerus itu dikenal dalam tradisi Jawa sebagai kerajaan Kediri (atau Daha) dan Janggala. Wilayah Kediri terletak di sebelah barat gunung Kawi, Janggala di timur, di lembah yang terbentuk oleh sungai Brantas. Sungai ini mulanya mengalir lurus ke selatan di antara gunung Tengger yang besar di sebelah timur dan pegunungan Kawi yang menjulang di barat. Mendekati pantai selatan, tiba-tiba ia berbelok ke barat lalu ke utara, mengelilingi Kawi, dan dengan demikian membentuk lembah kedua yang lebih besar di barat gunung itu di mana terletak Kediri. Sungai itu akhirnya mengalir ke laut melalui delta besar di seberang pulau Madura. Lembah subur sungai Brantas sekarang adalah salah satu daerah berpenduduk terpadat di dunia, dan Surabaya di muara sungai merupakan pelabuhan dagang penting di Indonesia. Kedua lembah ini pastilah merupakan pusat kedua negara penerus itu, Kediri dan Janggala, kalau kita percaya tentang pembagian Airlangga atas kerajaannya. Antara pegunungan Kawi dan pantai selatan, sisa-sisa tembok-tembok kuno telah ditemukan, dianggap bagian dari penentuan perbatasan itu.

Mengenai sejarah Kediri kita hanya tahu sedikit dan mengenai Janggala sama sekali tidak. "Janggala" adalah kata yang akarnya (dari bahasa-bahasa India) juga membentuk kata "*jungle*" (hutan) dalam bahasa Inggris. Dapatkah kita simpulkan bahwa kerajaan Janggala hanyalah negeri liar yang tidak dibudidayakan? Mungkin tidak, tapi yang membuat urusan tambah runyam, tidak ada monumen penting yang berasal dari periode panjang yang kabur antara wafat Airlangga dan kebangkitan kerajaan Singasari pada 1222. Penguasa Kediri meninggalkan sedikit prasasti. Prasasti yang dikatakan berasal dari raja-raja Janggala diragukan keasliannya. Tawarikh Cina dari periode itu tidak banyak membicarakan Jawa.

Hanya satu dari banyak raja yang pasti memerintah pada abad ke-12 diingat pada abad-abad kemudian: Raja Jayabhaya dari Kediri. Kita tahu pasti bahwa Jayabhaya memerintah antara 1135 dan 1157 dan bahwa dia dipuji sebagai raja besar yang kekuasaannya tidak bisa ditentang pulau-pulau lain. Kita juga tahu pasti bahwa atas perintahnya sebagian dari *Mahabharata*, dikenal sebagai *Bharatayuddha*, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Sang pujangga menulis ulang epik itu, menempatkan ceritanya dalam lingkungan Jawa dan menyesuaikannya dengan adat istiadat dan mentalitas Jawa. Sebagai *Brata-Yuda*, ia masih salah satu epik populer di Jawa.

Tapi bukan pencapaian-pencapaian ini yang membuat Jayabhaya kemudian menjadi terkenal. Tradisi populer yang berasal dari abad ke-18 mengatakan dia telah meramalkan kejatuhan Jawa serta, pada akhirnya, pemulihan kebesarannya setelah periode panjang kerja keras dan kehinaan.[20] Keyakinan mesianik seperti ini dianut banyak orang dan asal-usulnya sulit ditelusuri. Dalam kasus ini, kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa asal-usul dan penyebaran yang cepat dari ramalan-ramalan ini diakibatkan kehinaan kerajaan Mataram di tangan Belanda pada sekitar 1750. Dari semua Raja-Raja Jawa abad pertengahan, nama Jayabhaya sendirilah yang diingat karena *Brata-Yuda*. Karena itulah ramalan "kuno" itu diatasnamakan padanya. Jayabhaya dalam sejarah sama sekali tidak berhubungan dengan ramalan itu, sama seperti Charlemagne tidak berkaitan dengan segala macam perbuatan hebat yang dikatakan dilakukannya pada Abad Pertengahan.

Ketiadaan bukti mengenai kerajaan Janggala telah menimbulkan banyak spekulasi sejarah. Apa yang terjadi padanya? Apakah ia ditaklukkan atau dilemahkan oleh Kediri, segera setelah pembelahan kerajaan Airlangga? Ataukah yang terjadi ialah pembagian kekuasaan raja dan bukan pemisahan kerajaan? Kerajaan Jawa pada 1040 tidak bisa dibilang *negara* dalam arti modern, seperti halnya kerajaan Frank di bawah

dinasti Carolingian. Karena itulah kita harus menyingkirkan kemungkinan bahwa tembok-tembok di selatan pegunungan Kawi dibangun untuk menentukan perbatasan antara Kediri dan Janggala. Di Jawa tidak diperlukan suatu *Limes germanicus*, atau suatu *Vallum Hadriani* yang memisahkan negeri suku Briton dengan suku Pict yang ganas. Lagi pula, terjemahan baru hasil revisi atas teks-teks Jawa kuno membuat perbatasan itu, jika pernah ada, lebih mungkin bergaris dari barat ke timur daripada dari utara ke selatan.

Pertanyaan yang bisa dikemukakan: apakah kerajaan Airlangga benar-benar dipecah? Suatu teori bahwa pembagian itu tidak pernah terjadi telah dengan serius dikemukakan dan didukung dengan argumen-argumen berbobot yang ditarik dari ciri mitologis kisah Bharada, sang Pembagi. Tampaknya, cerita ini baru ditulis sesudah abad ke-14, 300 tahun sesudah peristiwa itu dikatakan terjadi. Ia jelas berdasarkan konsep mitologis, lebih tua daripada negara Jawa mana pun. Dengan kata lain, cerita Bharada adalah tambahan kemudian terhadap sejarah raja Airlangga dan tanpa dasar kenyataan. Teori ini tentu saja butuh penjelasan: *mengapa* legenda itu ditambahkan kepada cerita yang digambarkan oleh prasasti 1041 dan, mungkin, catatan-catatan lain. Penjelasan seperti itu telah diajukan,[21] tapi untuk tujuan kita cukuplah dikatakan bahwa sejarah hanya mengenal satu kerajaan di Jawa pada abad ke-12: yaitu Kediri. Tapi cerita pemecahan suatu kerajaan kuat muncul lagi dan lagi dalam sastra Jawa. Cerita seperti itu selalu menjadi pengantar sastrawi terhadap gambaran dramatik kejatuhan suatu dinasti dan kemunculan keluarga penguasa yang baru.

Bukan tidak mungkin bahwa raja-raja Kediri adalah penguasa-penguasa Jawa pertama yang mencoba memperluas kekuasaan mereka atas wilayah-wilayah non-Jawa. Kalau benar begitu, pemerintahan mereka tidak mungkin lebih jauh dari beberapa wilayah pantai di Kalimantan, pulau Bali, dan mungkin beberapa pulau kecil di timur. Di bagian barat Kepulauan Indonesia, kerajaan

tua Sriwijaya masih tetap unggul, walaupun kekuatannya pelan-pelan memudar. Ia masih terus mengirimkan duta ke Kanton, dan Cina dengan sepantasnya terus memujinya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan yang besar. Seorang penulis Cina pada 1225 menjabarkan dalam daftar panjang tempat-tempat yang dia yakini berada di bawah pemerintahan entah Sriwijaya atau Kediri, tapi fakta sederhana bahwa dia memasukkan dalam daftar pertama pulau Ceylon membuat kesaksiannya patut diragukan.[22] Tapi daftar itu menarik karena menunjukkan pengetahuan Cina yang pelan-pelan meluas tentang dunia Kepulauan Indonesia. Tidak semua transkripsi Cina bisa dikenali. Ada yang tampaknya mengacu pada Tanjung Pura (mungkin Tanjung Pura di Kalimantan), Timor, dan Banggai di pantai timur Sulawesi, serta Maluku. Penyebutan Banggai dan Timor mungkin bisa dijelaskan oleh lokasi tempat-tempat ini yang berada atau dekat jalur dari Jawa ke Maluku, Kepulauan Rempah-Rempah yang terkenal itu.

Ini bisa dilihat sebagai bagian dari perkembangan yang berkaitan dengan perubahan keadaan umum Kepulauan Indonesia pada abad ke-12. Perdagangan meningkat pesat. Makin banyak pedagang datang dari barat dan mengunjungi kepulauan itu, entah untuk membeli lada, rempah, dan kayu berharga atau untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan dari Kepulauan Indonesia ke Cina. Banyak pedagang ini adalah Muslim, dan, bagi orang Cina, semua Muslim adalah Arab. Demikianlah ada banyak catatan tentang pelayaran dan perdagangan Arab di seluruh Asia bagian selatan dan timur. Dalam kenyataan, sangat sedikit, kalau ada, orang Arab asli di antara pedagang-pedagang itu. Suatu batu nisan yang berdiri sendiri ditemukan di Leran, tidak jauh dari Surabaya, menyatakan dalam prasasti bertuliskan huruf Arab bahwa ada seorang perempuan muda Muslim yang dikuburkan di sana pada 1102, tapi ini bukan bukti bahwa dia lahir sebagai orang Arab atau bahkan keturunan Arab.[23] Bahasa Arab adalah bahasa ritual untuk semua pengikut Islam, sama seperti Latin bagi anggota Gereja Katolik Roma. Jadi, pemakaian huruf Arab pada batu nisan

itu hanya menunjukkan bahwa di sana seorang pengikut Nabi dikuburkan; lain tidak. Muslim yang datang ke Hindia dan Cina pada abad ke-12 berasal dari Hindustan, di mana kota Cambay di Gujarat adalah pusat pelayaran yang besar. Dari abad kesembilan dan seterusnya, perdagangan membuat sejumlah orang Persia datang ke Gujarat. Dengan cara itu Islam diperkenalkan, dan pada abad ke-13 telah unggul di bagian India itu. Orang-orang Gujarat makin sering datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Rempah-rempah dari Maluku dengan demikian menemukan pasar yang makin meluas, karena dibawa dalam jumlah besar ke Eropa lewat Mesir dan Venisia.

Karena Maluku hampir merupakan satu-satunya produsen rempah, ia segera menjadi tempat yang secara politis penting. Sampai abad ke-12 orang Maluku dapat dianggap tidak ambil bagian dalam urusan Indonesia, karena penduduk asli Maluku tidak tahu banyak tentang nilai pasar cengkeh dan pala yang tumbuh berlimpah di bukit-bukit terjal pulau-pulau vulkanik itu. Orang Cina dan Arab tahu sedikit tentang pulau-pulau itu tapi tidak pernah mengunjunginya sebelum abad ke-15. Akhirnya, pelaut dan pedagang datang dari pulau-pulau lain untuk mengumpulkan cengkeh dan pala. Ada di antara mereka yang tinggal di sepanjang pantai dan penduduk primitif mundur ke pedalaman setelah beberapa perjumpaan yang tidak menyenangkan dengan pendatang baru yang licik dan kejam.[24] Di permukiman baru itu, pedagang terkaya otomatis menjadi pemimpin, dan, setelah beberapa lama, pemimpin semacam ini menyandang gelar raja. Sebelum abad ke-12 tidak ada organisasi politik yang layak dilirik di Maluku, dan mungkin sekali kebangkitan pemerintah lokal pertama berhubungan erat dengan perluasan pelayaran Jawa ke pulau-pulau itu, karena dari awal sejarah Maluku, penguasa Ternate, kerajaan pertama yang tercatat di wilayah ini, tampaknya tunduk kepada kekuasaan raja-raja Jawa, kalau pun cuma dalam nama dan demi bisnis.

Pada paruh pertama abad ke-13 keunggulan Kediri berakhir.

Tempatnya diambil-alih oleh Singasari. Tempat itu, kini satu desa kecil, terletak di utara Malang di bagian pulau Jawa yang sangat menyempit hingga membentuk semenanjung di ujung timurnya. Pada akhir abad tempat Singasari diambil oleh Majapahit, sedikit lebih ke utara dan lebih dekat dengan delta Brantas. Peralihan pusat utama kekuatan politik ini menunjukkan keberadaan sejumlah kerajaan kecil yang saling berdampingan dengan banyak keterkaitan, kurang lebih saling bersaing secara permanen untuk menduduki tempat pertama, mirip persaingan di antara tuan-tuan tanah Jerman untuk menjadi yang utama pada abad pertengahan, ketika tuan-tuan Saxony, Franconia, dan lain-lain, ribut tentang mahkota raja. Di Jawa, tidak ada perasaan kebersamaan sebagai rekan dalam suatu negara feodal, tapi ada kecenderungan jelas untuk mengesahkan kekuasaan yang baru diperoleh dengan mengklaim suatu hubungan darah dengan dinasti pendahulunya dan melalui itu dengan penguasa-penguasa Jawa kuno. Setiap kali pusat kekuasaan beralih ke tempat baru, klaim pengesahan didukung oleh *pujangga* raja yang baru, penyair istana, yang menulis kisah ajaib silsilah raja yang turun dari penguasa-penguasa sakti yang terkenal dengan kekuatan gaib mereka. Fakta-fakta sejarah, kepercayaan populer, dan tema tradisional yang punya makna gaib, dijalin bersama menjadi cerita yang, biasanya, hanyalah versi baru dari cerita lama. Tiga entitas memainkan peran utama dalam pola tradisional ini: kekuasaan lama, kekuasaan baru, dan kekuasaan penentang. Kediri selalu memainkan peran terakhir. Dinasti baru selalu mewakili Majapahit. Bahkan pada abad ke-17 dan ke-18, pemimpin pemberontak dikatakan telah mendirikan pusat pemerintahannya di Kediri dan mengklaim "takhta Majapahit". Banyak dari cerita ini berisi intisari kebenaran tapi—telah dikatakan sebelumnya dan harus dikatakan lagi—mengupasnya sungguh hampir mustahil.

Tradisi Singasari dimulai dengan cerita Arok yang katanya adalah raja pertamanya. Begini ceritanya: Suatu ketika, seorang penjahat yang tinggal dekat Singasari mempersembahkan

dirinya sendiri sebagai korban kepada para dewa, dengan harapan mereka akan memberkatinya sehingga dia akan lahir kembali dengan kedudukan yang lebih baik dalam hidup. Para dewa mengabulkan permintaannya. Brahma menjadi ayahnya melalui seorang perempuan petani, Shiwa mengangkatnya sebagai putra, dan Wishnu menitis dalam tubuhnya. Namanya Arok, yang kata sebagian orang berarti "dia yang membuat kacau segala sesuatu". Arok muda memulai karirnya sebagai penjahat, melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan segala macam kekerasan, bukan karena pikirannya jahat, melainkan karena kekuatan gaib yang diterimanya dari para dewa mengalir terlalu kuat di dalam dirinya sehingga tidak bisa dikendalikan. Dia harus menemukan penyaluran untuk kekuatan suprainsaninya itu; hukum manusia tidak berlaku untuknya. Seorang Brahman yang memahami fitrah sejatinya mengajarinya bagaimana memanfaatkan kekuatan supernaturalnya, sehingga dia menjadi ahli. Ketika dia jatuh cinta pada ratu Singasari, jelas dia berhak membasmi sang raja. Ratu Dedes sendiri adalah perempuan yang punya kekuatan spiritual begitu sakti sehingga hanya laki-laki seperti Arok saja yang cocok menjadi pasangannya. Biarpun begitu, Arok meminta nasihat Brahman itu, yang memberikan jawaban yang hebat, tidak kalah dengan orakel Delfi. "Arok, anakku," katanya, "seorang Brahman tidak boleh merestui rencanamu untuk membunuh laki-laki lain dan mengambil istrinya, tapi lakukanlah apa yang kau anggap paling baik. Berhati-hatilah karena raja itu kuat. Pilihlah keris yang baik. Carilah temanku Gandring, seorang empu. Dengan keris buatannya, kau tidak perlu menusuk dua kali." Nasihat itu cukup jelas. Arok pergi ke empu itu, memesan sebilah keris dan, kesal karena empu itu agak lambat, mencoba kesaktian senjata barunya itu pada pembuatnya. Dengan nafas terakhirnya, Gandring mengutuk keris itu. "Dengan keris ini anak-anak dan cucu-cucumu akan mati. Tujuh raja akan mati oleh keris ini."

Takut akan ramalan ini, Arok memutuskan bahwa dia akan melimpahkan berkat dan kekayaan atas keluarga empu itu begitu

dia menjadi raja. Dengan begitu dia harap dapat meluruhkan amarah roh orang yang dibunuhnya itu dan memelihara kelanjutan dinastinya, tapi dia tidak berhasil.

Dia terbukti seorang pembunuh yang pintar, karena dia meminjamkan senjata barunya kepada seorang teman, yang sangat bangga akan keris itu dan mempertontonkannya di mana-mana. Kemudian diam-diam dia mengambilnya, membunuh sang raja, dan meninggalkan senjata itu di tubuhnya. Si teman dihukum mati sebagai pembunuh, sementara Arok mengawini sang ratu dan naik takhta.

Keberhasilan persekongkolan Arok membuat kekuasaannya terunggul di timur pegunungan Kawi. Di sebelah barat, raja Dangdang Gedis memerintah Kediri. Banyak sejarawan mengidentifikasikan Dangdang Gedis dengan raja Kertajaya yang kita ketahui lewat sebuah prasasti dari 1216. Sejarawan lain menolak identifikasi ini sebagai tidak mungkin karena mereka menyangkal bahwa kisah Arok, sebagaimana diceritakan oleh tawarikh Jawa, punya nilai sejarah apapun. Bagaimanapun keadaannya, tampaknya cukup jelas bahwa kebangkitan Singasari mempersatukan sejumlah daerah yang dulu pernah atau dianggap pernah menjadi wilayah kerajaan Airlangga. Penulis tawarikh itu jelas berpihak pada Arok dan mencoba membuktikan bahwa Kediri memang sudah ditakdirkan akan musnah. Raja Dangdang Gedis (atau Kertajaya) ingin meniru Arok dalam perwujudan kekuatan suprainsaninya. Sayang, dia tidak sanggup menghimpun cukup kekuatan gaib dan diceritakan bahwa dalam usahanya yang nekat, dia ribut dengan para Brahmananya dan ahli-ahli ilmu gaib. Begitu dia cukup terlatih dalam seni gaib itu, dia menuntut pemimpin-pemimpin agama di kerajaannya menghaturkan sembah, yang hanya dilakukan oleh bawahan kepada junjungan. Dengan kata lain, raja Kertajaya dikatakan telah membangkitkan perseteruan antara agama dan negara. Para pemimpin agama dari kedua sekte mempertahankan hak-hak kuno mereka dan menolak tuntutan itu. Kertajaya lalu mencoba membuat mereka takut dengan

mempertunjukkan kekuatan gaibnya, seperti muncul dengan empat tangan dan tiga mata seperti Shiwa, atau duduk di mata tombak yang tajam. Tapi para pendeta itu sendiri tahu banyak tentang hal-hal itu dan tidak terkesan. Mereka lari kepada Raja Arok, yang sangat sopan dalam sikapnya kepada para pemimpin agama yang sedang meminta tolong kepadanya itu, yang tentu saja cocok sekali dengan keinginan orang yang ambisius ini. Arok pun memulai suatu "perang suci". Sebagai pembela hak-hak para pendeta, dia memperoleh dukungan luas. Demikianlah, kata cerita, terjadi pertempuran sangat sengit. Bahkan kata-kata dalam tawarikh yang kalem menggambarkan kedahsyatan pertempuran itu. Kediri dikalahkan (1222). Rajanya menghilang. Tradisi Jawa mengatakan bahwa dia dan hulubalangnya, istri-istrinya, dan kuda-kudanya, naik ke surga. Sejarawan modern menafsirkan cerita ini dengan cara rasional dan menyimpulkan bahwa Kertajaya membunuh diri. Tapi, pernyataan itu mungkin punya makna lebih dalam. Dia yang naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya, bisa saja datang kembali. Jadi kenaikan Kertajaya ke surga bisa memberikan harapan besar bagi pemulihan kekuasaan Kediri. Tapi *Nagarakertagama*, epik kejayaan Majapahit, menyatakan bahwa Kertajaya masuk ke pertapaan, yang bisa berarti bahwa dia membunuh diri (secara politis). Versi cerita ini, yang beredar di kalangan musuh Kediri, tidak memberikan harapan sedikit pun untuk pemulihan kerajaan itu. Tapi, dalam kedua kasus itu, hasil akhir dari peristiwa-peristiwa itu ialah bahwa raja Arok menjadi penguasa kedua negara, dan kesatuan wilayah itu dipulihkan. Kekuatan gaib Bharada, sang Pemisah, ditaklukkan oleh kekuasaan yang lebih besar dari Arok, sang Pemulih. Setelah itu, namanya sebagai raja ialah Ranggha Rajasa, sang "Penakluk", atau "Amurwa-bhumi", "Dia yang memberikan bentuk kepada dunia".

Namun, kejayaan dan kekuasaan tidak dapat menyelamatkan Rajasa dari takdirnya. Anak tirinya, anak Ratu Dedesdan raja yang terbunuh, menemukan siapa pembunuh ayahnya. Dia mengambil

keris yang sudah dikutuk Gandring dan memberikannya kepada seorang teman yang membunuh raja dengan keris itu. Pangeran yang tidak tahu terimakasih itu kemudian memakai keris itu untuk membunuh kawannya.

Raja yang baru tahu bahwa kematian dengan kekerasan sudah menunggunya. Tentu saja tiada guna mencoba menghancurkan senjata berkekuatan gaib itu, yang hanya akan mempercepat kematiannya. Pertama, dia menantang nasib; setelah itu dia menyerah, mengabaikan segala kewaspadaan, dan dia sendiri menyerahkan keris itu kepada orang yang ditakdirkan akan menjadi pembunuh dan penerusnya. Sekarang tiga raja sudah gugur oleh senjata yang sama, sementara kematian dengan kekerasan dari empat lagi raja Singasari sudah diramalkan. Dengan darah dan api kerajaan itu didirikan, dan dalam darah dan api ia dihancurkan.

Begitulah cerita dramatik kerajaan ini, seperti dikisahkan sejarawan Jawa kuno. Catatan-catatan menunjukkan bahwa Singasari pastilah kaya dan bahwa sebagian dari kekayaan yang dihasilkan arus perdagangan barat-timur di Asia bagian selatan dari Kepulauan Rempah-Rempah ke pelabuhan-pelabuhan Malaya pastilah mengalir ke dalam perbendaharaan istana. Sebuah patung, mewakili dewi Prajnaparamita, dewi kebijaksanaan yang paling tinggi, dipercaya adalah potret Ratu Dedes, istri Raja Arok. Garis wajah ratu yang kuat dan garis-garis berkarakter pada mulutnya—terlihat berkesan agak merendahkan—membuat kita sulit percaya bahwa dia memainkan peran pasif dan agak tunduk dalam kehidupan Arok, seperti yang digambarkan oleh *Pararaton, Kitab Raja-Raja,* yang memuat cerita ini.[25]

Sisa-sisa dua candi dekat ibukota Arok masih menarik perhatian pengunjung sebagai contoh hebat seni Hindu-Jawa. Salah satunya dibangun dengan luarbiasa. Bentuknya candi menara, tingginya beberapa tingkat. Dekorasi hiasan baru saja mulai dikerjakan, ketika untuk alasan yang tidak diketahui pekerjaan dihentikan. Penyebabnya mungkin saja kematian raja yang

memerintahkan pembangunannya atau bencana besar yang tiba-tiba menimpa kerajaan Singasari. Tapi lebih mungkin bahwa candi-candi ini dibangun pada zaman Majapahit, mungkin sekitar 1351. Puja-puji raja Hayam Wuruk dari Majapahit, yang akan kita bahas lebih jauh nanti, mengisahkan bahwa suatu candi yang tak diselesaikan (mausoleum untuk raja Kertanagara dari Singasari?) dikerjakan pada 1351. Tingkat atas menimbulkan kesan bahwa monumen itu tidak pernah diselesaikan, karena ia terdiri atas satu ruang kosong dan tidak ada apa-apa lagi. Tapi memang cocok, menurut konsep masa itu, untuk membaktikan tingkat tertinggi bagi raja yang sudah wafat yang, setelah mencapai Nirwana, paling bagus digambarkan dengan kekosongan.

Pahatan-pahatan pada candi-candi itu menunjukkan pengaruh langsung gaya dan gagasan Jawa asli. Pada relief Candi Jago—candi makam raja-raja Singasari yang lain—para pahlawan selalu diikuti oleh para pelayan mereka, yang gendut, dan—dalam pandangan orang Barat—sosok-sosok yang salah-rupa dan tampak konyol, yang kita kenal dari Wayang. Melalui rincian itu kita mencatat transformasi perlahan gaya Hindu menjadi bentuk Jawa.

Perbedaan antara Buddhisme dan Shiwaisme sudah sepenuhnya lenyap. Mungkin, lebih tepat mengatakan bahwa kedua bentuk ibadah dan kedua konsep keagamaan telah berbaur menjadi satu, yang, dalam hal ini, menghasilkan keunggulan Sinkretisme Tantris. Tantrisme masuk dari Tibet dan penyebarannya didorong oleh pengetahuan bahwa kaisar sakti itu, Kublai Khan, Khan Agung dari Mongol dan Kaisar Cina telah dibaiat ke dalam ilmu gaib serta praktik Tantris. Sinkretisme serupa dianut oleh raja-raja Jawa. Maka terdapatlah campuran simbol-simbol Buddhisme dan Shiwaisme di tembok-tembok candi-candi besar yang terakhir dari periode Hindu-Indonesia. Raja terakhir Singasari, Kertanagara, sangat berpengaruh dalam memenangkan kecenderungan baru pemikiran religius ini.

BAB 3

PENDIRI-PENDIRI IMPERIUM DI JAWA

AKHIR kerajaan Singasari dan awal kerajaan penerusnya, Majapahit, membentuk satu kisah. Raja terakhir Singasari dan pemimpin paling kuat Majapahit adalah tokoh-tokoh dalam sejarah Jawa awal yang kita kenal dengan jelas. Informasi kita datang terutama dari dua kitab yang untungnya tetap terpelihara. Keduanya adalah "Buku Raja-Raja", *Pararaton*, dan *Nagarakertagama*, puja-puji yang ditulis Prapança, pujangga istana Raja Rajasanagara dari Majapahit. Kedua kitab itu adalah sumber sejarah bernilai tinggi tapi hanya, dan ini adalah kualifikasi yang penting, jika dipakai dengan cara yang tepat, yakni jika dibaca dan dimengerti dalam makna seperti yang dikehendaki pengarangnya.

Kisah pembagian kerajaan Airlangga dan kisah Arok, pendiri dinasti Singasari, menunjukkan bahwa konsep-konsep mitologis dan fakta historis terjalin tak terpisahkan dalam "kitab-kitab sejarah" Jawa ini. Tapi, ini bukan sekadar ketiadaan pemikiran kritis. Sebagian pencampuradukan fakta dan fantasi tersebut—bentuk sastra semacam ini bagi sejarawan didikan Barat modern sangat menjengkelkan—memang disengaja. Ia ada untuk satu tujuan yang sangat khusus dan—bagi penulis-penulisnya—sangat perlu: untuk meningkatkan status spiritual dan material—kedua hal ini adalah satu dan sama adanya—dari raja yang menjadi alasan

mereka menulis. Penulis-penulis Jawa kuno punya tujuan yang lebih tinggi untuk dicapai daripada sekadar memuaskan rasa ingin tahu di masa depan, adalah tugas mereka untuk memperkokoh raja yang tenaga dalamnya menjadi saka guru kerajaan dan kesejahteraan rakyatnya.

Prapança menulis bahwa "seluruh dunia penuh pujian bagi sang raja". Dari berbagai negeri kata-kata pujian dikirimkan kepadanya. Ketika tiba, kata-kata itu diuji dan, bila dinilai berharga, ditambahkan ke dalam kumpulan kitab dan nyanyian yang dihaturkan kepada Yang Mulia. Kitab-kitab itu akan membantu sang raja tapi, kalau dia berkenan, juga akan menyerap sebagian dari kelimpahan tenaga gaib raja itu.[1] Jadi *Pararaton* dan *Nagarakertagama* punya makna sakral, seperti semua produk sastra dalam budaya Jawa. Untuk sepenuhnya memahami kitab-kitab itu harus kita ingat bahwa menulis itu sendiri, menaruh pikiran dan ucapan di lempengtembagaatau daun lontar, dianggap tindakan magis yang sangat penting. Penulis harus sangat hati-hati untuk menghindar dari tindakan menggoreskan sesuatu, yang akan ada untuk seterusnya, yang akan membahayakan sang raja yang memerintahkan dia menulis.

Kalau pemahaman ini benar, analisa mana pun atas teks semacam ini dengan memakai metode tradisional kritisisme historis pasti akan menyesatkan. Langkah pertama untuk memahaminya haruslah dengan menemukan untuk tujuan apakah persisnya setiap teks itu dikarang. Bahan yang ada pada kita tidaklah banyak dan karena itu ada, dan mungkin akan selalu ada, banyak keraguan dalam hal ini.

Karena itu, *Pararaton* dan *Nagarakertagama* bukanlah narasi sejarah murni, melainkan hanya karya yang secara historis lebih eksplisit di antara banyak produk tulisan Jawa Kuno. *Pararaton*, dalam bentuk yang kita kenal sekarang, berasal dari abad ke-16. Ia berisi kisah Raja Arok dan penerus-penerusnya, sejarah pendirian kerajaan Majapahit dan, dalam tambahan-tambahan kemudian, serangkaian catatan pendek tentang raja-

raja Majapahit yang belakangan. Sejumlah referensi singkat ini mungkin punya ciri yang lebih historis daripada cerita-cerita panjang sebelumnya. Referensi itu ditulis dalam bahasa Jawa pertengahan, yang jelas berbeda dari bahasa Jawa kuno. Sebagian pastilah sudah dikarang sebelum Prapança menulis puja-pujinya.[2] Jelas Prapança memanfaatkan sebagian versi yang lebih kuno itu untuk tulisannya.

Nagarakertagama ditulis pada 1365. Ia terpelihara hanya dalam satu manuskrip yang baru dikenal ilmuwan modern pada 1894, ketika pasukan Belanda menduduki kediaman Raja Cakranegara di pulau Lombok. Prapança melukiskan dalam kitab itu suatu perjalanan—mungkin berciri sakral—yang dilakukan oleh Raja Rajasanagara, biasanya dipanggil Hayam Wuruk, untuk mengunjungi candi-candi makam nenek moyang dan pendahulunya, serta tempat-tempat suci lain. Teks *Pararaton* serta *Nagarakertagama* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, tapi masih butuh waktu lama dan studi panjang sebelum semua kesulitan linguistik teratasi.[3]

Raja terakhir Singasari, Kertanagara (1268-1292) dikenal sebagai orang yang mahir dalam ilmu yang paling gaib. *Pararaton* tidak banyak bicara tentang dia, kecuali bahwa dia seorang pemabuk dan menyukai arak aren di atas segala sesuatu. Arak itu mengakibatkan kejatuhannya, kata tawarikh itu, karena dia tidak siap dan dibunuh musuh-musuhnya pada waktu sedang berpesta-pora. Orang yang disalahkan untuk kematiannya adalah penasihatnya, yang dikatakan telah mendorong raja itu tenggelam dalam kenikmatan arak. Kemudian dia mati juga tapi cukup beruntung untuk mati sebagai seorang laki-laki, dengan keris di tangan, di medan perang. Prapança mengisahkan cerita yang sama sekali berbeda. Pandangannya tentang Raja Kertanagara sangat berbeda dan hanya pujian yang dia berikan kepadanya, menyebut dia orang suci dan berpantang, bebas dari segala hawa nafsu. Dia tidak menyangkal bahwa raja itu minum banyak arak, tapi menjelaskan bahwa minum adalah bagian dari kewajibannya,

karena raja suci itu hidup pada masa ketika kekacauan melanda seluruh dunia dan pelampiasan nafsu serta praktik ritualnya yang sakti memampukan dia memelihara tata tertib di Jawa dan sekitarnya. Dengan begitu, dia membuat Kertanagara pengikut satu aliran khas Buddhisme (yang tentu saja bercampur-baur dengan unsur-unsur asing) yang berurusan dengan ilmu gaib dan roh-roh jahat, dan tampaknya menjadi ahli yang sangat berhasil menguasai ilmu itu. Raja itu tidak melampiaskan nafsu karena kesenangan yang bisa diperolehnya, tapi sebaliknya, tanpa hawa nafsu dan dengan tujuan tunggal mengusir semua kekuatan jahat yang merajalela di seluruh dunia.

Kita lihat di sini bahwa Prapança pasti tahu tentang cerita yang kemudian dimasukkan dalam *Pararaton*. Mengapa dia membalikkan pendapat penulis yang lebih tua itu? Mengapa ia menganggap perlu mengembalikan nama baik Kertanagara? Apa yang sudah dilakukan raja terakhir Singasari itu yang membuatnya dianggap pendahulu yang sangat penting bagi raja si Prapança sendiri? Pastilah bukan hanya karena praktik ilmu gaib Kertanagara yang sakti. Mungkin hal itu adalah cita-cita yang dikejar Kertanagara, yang membuatnya berusaha memperkuat diri dengan ritus-ritus keagamaan yang dilakoninya dengan sepenuh hati sampai-sampai dia mengabaikan tugas utamanya: memelihara keamanan takhta dan negerinya.

Penyebab utama permasalahan itu harus dicari dalam situasi internasional pada akhir abad ke-13. Abad itu adalah abad Mongol yang penaklukannya atas tempat-tempat jauh mengubah arah sejarah Eropa dan Asia. Pada 1206 Temujin diproklamasikan sebagai Jenghis Khan. Dua puluh tahun kemudian imperiumnya mencakup Rusia sampai Laut Cina. Pada 1258, pasukan-pasukan penerusnya masuk ke Tonkin dan menjarah Hanoi. Pada 1279 pasukan Cina terakhir dimusnahkannya. Kublai Khan, cucu Temujin, diangkat sebagai khan agung pada 1260. Dia memindahkan kediamannya ke Cina bagian utara dan menjadi kaisar pertama dinasti Yuan yang bertahan sampai 1368. Tekanan

serbuan Mongol mempercepat laju invasi lain yang membuat porak-poranda pola politik tradisional Asia Tenggara. Suku Tai, yang datang dari Yunnan, pelan-pelan memasuki Burma utara dan lembah-lembah sungai Menam dan Mekong mulai dari abad ke-11. Sepanjang abad ke-13, kerajaan-kerajaan Hindu kuno di wilayah itu terjungkal dan pada akhir abad itu Tai telah mantap menguasai seluruh wilayah yang sekarang adalah Siam. Antara 1280 dan 1290 pasukan Kublai Khan agung melakukan serangkaian serbuan atas Jepang dan negeri-negeri Asia Tenggara. Mereka kurang berhasil, tapi sekadar fakta bahwa imperium Cina yang kuat tapi yang sebelumnya selalu penuh damai tiba-tiba berubah jadi ekspansionis pastilah menimbulkan kegentaran di seluruh wilayah itu.

Bukan tidak mungkin bahwa ancaman Mongol-Cina adalah penyebab obsesi Kertanagara terhadap perkara-perkara luar negeri. Hanya ada satu cara untuk menentang ancaman Cina: mempersatukan kekuatan-kekuatan Asia Tenggara, dan itulah jalan yang dipilih Kertanagara. Tapi, bagaimana cara dia melakukannya? Kita, di zaman ini, punya jawaban siap saji untuk pertanyaan seperti itu. Kita adakan persekutuan politik yang kemudian diperkuat dengan perjanjian militer. Bahkan kalaupun Kertanagara dapat memikirkan metode seperti itu, bahkan kalaupun gagasan itu tidak sama sekali asing bagi zamannya dan lingkungan tempat dia hidup, itu akan terlalu rumit dan tidak efisien. Usaha bersama untuk memperkuat pasukan pertahanan, dengan tujuan memusatkan alat-alat pertahanan secara strategis dan didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi, adalah fenomena jarang dalam sejarah sebelum abad ke-18, di mana pun di dunia. Namun, ada dua jalan lain yang bisa dipilih Kertanagara untuk mencapai tujuannya. Dia bisa mencoba membuat kerajaannya sekuat mungkin dengan memperlemah tetangga-tetangganya dan kemudian menaruh kepercayaan pada jarak luarbiasa yang memisahkan wilayahnya dengan pelabuhan-pelabuhan Cina, atau dia bisa menggabungkan kekuatan pribadinya, yaitu tenaga

dalamnya, dengan tenaga pihak lain, dan meningkatkan kekuatan gaibnya dengan melakukan ritual-ritual ilmu gaib yang dikenal di negeri-negeri lain. Kekuatan spiritual gabungan dari raja-raja yang bersekutu tersebut lantas bisa menyamai kekuatan Kublai Khan agung, yang keberhasilannya menakjubkan itu tentu saja tidak dianggap akibat kelemahan ekonomi dan sosial dari pihak yang kalah, tapi akibat kualitas suprainsani Khan itu, yang dia warisi dari nenek moyangnya atau yang dia peroleh sendiri. Karena itu, Kertanagara bahkan bisa berbuat lebih baik lagi: dia dapat menimba suatu jenis ilmu gaib yang kabarnya diperoleh Kublai sendiri.[4]

Sedikit bukti yang kita punya, selain kedua tawarikh itu, memungkinkan suatu rekonstruksi fakta yang sesuai dengan salah satu dari kedua cara itu. Ada patung Kertanagara yang tampak seperti Buddha sedang bermeditasi, ditemukan di Majapahit, dan kini ditempatkan di alun-alun kecil di kota Surabaya. Orang Jawa, walaupun menaruh penghormatan besar kepada patung itu, menyebutnya "Jaka Dolog", yang berarti "jejaka gendut". Prasasti pada patung itu mengatakan bahwa ia didirikan "demi raja dan keluarga istana, dan kesatuan kerajaan".[5] Nah, patung ini dikatakan didirikan persis di mana menurut tradisi, Bharada, pendeta besar itu, pernah hidup. Jadi, Kertanagara mendirikannya sebagai bagian dari kekuatan gaib penolak yang ingin dia pakai untuk menghilangkan akibat jahat dari pembagian Bharada atas negerinya. Patung lain dengan prasasti ditemukan di Sumatra di daerah Jambi, di utara Palembang. Di sini, kerajaan Malayu kuno yang pernah kita dengar pada awal-awal sejarah Indonesia, tampaknya telah hidup kembali pada abad ke-12.[6]

Patung itu datang dari Jawa dan didirikan di sana, di kaki pegunungan di jantung Sumatra, entah sebagai tanda kemenangan dari Kertanagara, atau sebagai hadiah kepada penguasa Sumatra yang mau diajak kerjasama oleh raja Jawa itu. Kita tahu bahwa orang Jawa, entah mereka sebagai duta damai atau pasukan perang, membawa pulang bersama mereka seorang putri Sumatra.

Kita juga tahu bahwa Kertanagara mengawini seorang putri Champa (Vietnam bagian selatan), salah satu negeri yang paling terancam oleh serbuan Cina. Prapança mengklaim bahwa untuk sementara ini Jawa telah berhasil berkuasa kembali di Bali. Ini agak meragukan. Bagaimanapun kita menafsirkan bukti-bukti, gambaran Kertanagara selalu muncul sebagai seorang penguasa yang luarbiasa, seorang yang punya visi dan punya pemahaman luas akan dunia luar lebih daripada raja Jawa lain sebelum dia, sejak masa pembangun Borobudur.

Kejatuhan Kertanagara (mungkin pada 1292) terjadi tiba-tiba dan tidak terduga. Seorang penguasa Jawa lain, Jaya-Katong dari Kediri, menyerbu Keraton dengan tiba-tiba ketika sangraja sedang terbenam dalam latihan gaibnya. Singasari lenyap begitu saja seperti kebangkitannya. Tapi kemunculan kembali Kediri sebagai pemimpin di antara penguasa-penguasa Jawa tidak berlangsung lama.

Program Kublai Khan untuk menaklukkan Asia Tenggara tidak berlangsung semulus perkiraan orang Mongol yang sedang mabuk kemenangan. Pasukannya mengalami beberapa kekalahan dan tidak pernah berhasil menaklukkan negeri-negeri di lembah sungai Mekong dan Menam. Di sebelah timur laut angkatan lautnya mengalami bencana ketika mencoba mendarat di Jepang. Penguasa-penguasa di negeri-negeri dan pulau-pulau selatan, termasuk Kertanagara, tidak mau menyerah kepada sang kaisar. Tawarikh Cina menuliskan bagaimana duta-duta kaisar pergi ke Singasari dan memerintahkan rajanya datang sendiri ke istana Yang Mulia. Bukannya menurut, Kertanagara menangkap duta-duta itu lalu mengirim pulang mereka setelah membuat cacat wajah mereka. Kita tidak perlu menerima cerita ini secara harfiah. Setiap penolakan untuk datang bersujud sembah dan menyerahkan upeti dianggap Cina sebagai penghinaan yang tidak bisa diterima terhadap "Putra Langit", yang secara moral *harus* dihormati sebagai penguasa besar oleh semua raja lain. Kehebatan penghinaan itu lantasdigambarkan dengan tuduhan mutilasi yang

biadab. Kita tidak perlu percaya bahwa pemotongan kuping dan hidung adalah bentuk biasa "pemutusan hubungan diplomatik" di zaman dan di bagian dunia itu.

Kebandelan Kertanagara harus dihukum, tentu saja. Cina perlu waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan armada dan tentara. Pada 1292, 1.000 kapal mengangkut 20.000 tentara berlayar ke selatan. Ketika mereka tiba, Kertanagara sudah wafat dan kekuasaannya hancur.[7] Para jenderal Khan Agung menyadari apa yang telah terjadi, tapi itu bukan alasan bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong. Sesuatu harus dilakukan dan seseorang harus dipaksa tunduk. Jalan termudah keluar dari dilema ini adalah dengan menganggap orang yang mengalahkan dan menjadi penerus Kertanagara bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan musuhnya.

Raja Kediri sama sekali tidak sanggup menahan serangan Cina. Ketika berencana menjungkirkan kekuasaan Singasari, dia bersekongkol dengan Arya Wiraraja, penguasa pulau Madura. Bagi Wiraraja, kerajaan kuat di bawah kepemimpinan Kediri tidak kalah berbahaya daripada negara Singasari. Ketika keraton Kertanagara terbakar jadi abu, setidaknya seorang pangeran dari keluarga istana, Wijaya yang muda dan cerdik, berhasil lolos. Wiraraja menawarkan perlindungan kepada sang pewaris takhta itu. Tapi Wijaya yang mungkin tidak percaya kepada pelindungnya memutuskan menyerah kepada Kediri, dan diterima dengan baik oleh Jaya-Katong.[8] Dia bahkan menerima sebidang tanah di hilir sungai Brantas yang dia olah dan di situ dia membangun rumah baru. Seorang Madura pengikut Wijaya yang sedang bekerja di permukiman baru itu memetik buah tapi membuangnya lagi, sambil berkata bahwa rasanya pahit. Inilah, menurut legenda, asal-muasal nama tempat baru itu: *Majapahit*, yang berarti "buah pahit". Tidak lama setelah itu beredar kabar angin bahwa armada besar Cina sedang mendekati Jawa. Wijaya, sebagai pewaris takhta Kertanagara, seharusnya takut kalau pasukan Cina itu mendarat tapi dia berhasil membalikkan keadaan terhadap

tuannya Jaya-Katong yang dia benci, pembunuh raja terakhir Singasari. Dengan bantuan Wiraraja dari Madura, dia mengirim kabar kepada para panglima Cina menawarkan bantuan melawan Kediri, dan mereka, walaupun mungkin menyadari asal-usul Wijaya, mengambil kesempatan untuk memperoleh kemenangan mudah. Mereka mendarat, mengalahkan dan menghancurkan Kediri, tapi kemudian menuntut upeti dari setiap penguasa lokal yang bisa ditemukan pasukan mereka. Wijaya dijadikan tawanan dan dipaksa membawa pasukan mereka ke kediaman barunya–di mana harta yang dia janjikan akan dia serahkan kepada para penakluknya disimpan. Kenyataannya, orang Jawa cerdik ini membawa orang-orang Cina itu ke dalam perangkap. Dia berhasil lolos dan menghimpun para pengikutnya. Dengan bantuan mereka, Wijaya membasmi para pengawalnya dan memulai perang gerilya melawan kekuatan inti para penyerbu. Panglima Cina merasa tidak bijaksana untuk mengambil risiko lebih jauh, karena penghinaan terhadap kehormatan Khan Agung sudah dibalaskan. Pendudukan permanen bukanlah tujuan mereka. Para jenderal dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa kini satu-satunya hasil perjalanan mereka ialah bahwa putra menantu orang yang seharusnya mereka hukum telah mereka pulihkan kekuasaannya. Selingan Cina ini mengawali sejarah kerajaan Jawa terakhir dan teragung, imperium Majapahit.

Pada detik-detik kerajaan baru itu memulai perjalanannya yang megah, tanda-tanda pertama suatu zaman baru dalam sejarah Indonesia tanpa disadari mulai muncul di cakrawala. Pada tahun wafatnya Kertanagara, orang-orang Eropa pertama tiba di Kepulauan Indonesia–orang Venesia, Marco Polo, dengan ayah dan pamannya. Cerita mereka terlalu terkenal dan tidak perlu diulang di sini, dan sebetulnya hanya merupakan satu bagian saja dari usaha Khan Agung untuk mencoba menjalin hubungan dekat antara Cina dan dunia luar. Keluarga Polo tidak datang ke Indonesia sebagai pedagang atau misionaris Eropa, tapi sebagai duta Khan dari Mongolia dan Cina. Mereka hanya melihat pantai

Sumatra bagian timur laut, tempat mereka harus tinggal selama beberapa bulan sambil menanti cuaca membaik (1292). Marco Polo merasa jijik dengan kondisi tak beradab yang merajalela di antara para "kanibal" di wilayah itu, tapi kunjungan itu memberi dia kesempatan untuk menyelidiki keadaan geografi dan ekonomi di pulau-pulau lain. Gambarannya masih juga kabur dan pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan catatan-catatan Cina dan Arab yang lebih tua, kecuali satu hal yang paling penting: dia mencatat bahwa penduduk kota kecil Perlak di ujung utara Sumatra telah menganut Islam.[9]

Perlak waktu itu merupakan satu-satunya tempat Islam di Kepulauan Indonesia. Jadi, kita tahu persis kapan dan di mana agama baru itu masuk ke Hindia Timur. Prasasti Islam paling tua di Sumatra berasal dari tahun 1297, lima tahun sesudah kunjungan Marco Polo. Prasasti itu terdapat di desa Samudra, 150 km ke arah barat laut Perlak di pantai Sumatra, dan berupa tulisan di atas batu nisan Sultan Malik-al-Saleh, penguasa Muslim pertama di pelabuhan yang pernah terkenal itu. Batu nisan itu memberi kita informasi yang sangat banyak tentang periode Islam paling awal di Indonesia. Batu itu, beserta prasastinya, diimpor dari Cambay di India.[10] Pusat perdagangan ini akhirnya takluk di tangan penguasa Muslim pada pertengahan abad ke-13. Jadi sangatlah mungkin bahwa pedagang-pedagang dari pelabuhan inilah yang membawa kepercayaan baru itu ke Sumatra. Pendapat ini disokong oleh keserupaan antara bentuk Islam di India dan Indonesia. Keduanya sangat dipengaruhi oleh kecenderungan India pada mistik. Di sini bisa ditambahkan bahwa hanya 20 tahun setelah penyebaran pertama Islam, misionaris pertama Gereja Katolik tiba di Indonesia – imam Fransiskan, Odorico da Perdenone, yang menjelajahi seluruh Asia tapi tidak pernah menetap dan mulai mengkhotbahkan Kabar Baik. Observasinya sangat dangkal dan tidak tepat sehingga tidak menambah pengetahuan kita tentang Indonesia abad pertengahan.[11]

Selain dua unsur baru dalam sejarah Indonesia–ketibaan

orang-orang Eropa pertama dan keberhasilan pertama Islam–unsur ketiga harus ditambahkan. Dari periode ini datanglah laporan-laporan tertua tentang permukiman Cina di kepulauan Indonesia.[12] Tidak ada imigrasi Cina dalam arti normal kata itu, karena kolonis pertama mungkin adalah pelaut yang terdampar. Pulau-pulau kecil di pantai Kalimantan telah ditempati kelompok-kelompok tentara Cina yang tertinggal dari ekspedisi 1292, dan sekelompok bajak laut Cina disebut-sebut pada zaman yang sama beroperasi di muara sungai Musi, yang pernah menjadi benteng kekuatan Sriwijaya. Orang Cina kawin-mengawin dengan perempuan asli tapi mewariskan peradaban mereka kepada anak-anak mereka, yang dengan demikian tetap berbeda daripada sebagian besar orang Indonesia. Jadi, unsur-unsur yang akan memberikan kepada Indonesia aspek luar peradabannya pada abad-abad berikut, penetrasi Islam dan Cina dan Eropa, sudah ada ketika periode Hindu-Jawa mencapai puncak politiknya.

Perkembangan terakhir peradaban Jawa pra-Islam berlangsung kurang daripada seabad. Kerajaan Majapahit didirikan pada 1293 oleh raja Wijaya, dan kehilangan pengaruhnya bersamaan dengan kematian cucunya Hayam Wuruk pada 1389. Dalam satu hal, kerajaan Majapahit berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya di Jawa. Raja Kertanagara telah memperkenalkan satu unsur baru dengan kebijakan luar negerinya yang berjangkauan jauh dan penerus-penerusnya tidak mau melepaskan klaim penguasaan atas Indonesia, yang ditetapkan oleh penguasa terakhir Singasari. Klaim itu seperti biasa terbungkus dalam bentuk semi-mitologis. Pujangga Prapança yang mengabdi kepada cucu Wijaya menulis, ketika menggambarkan kenaikan Wijaya ke takhtanya, bahwa "seluruh Jawa takluk pada pemerintahannya dan bersukacita karena perkawinan sang raja dengan keempat putri Kertanagara". Agaknya tidak mungkin putri-putri Kertanagara selamat dari bencana besar yang terjadi setelah serbuan Kediri yang mendadak itu, tapi kita tahu bahwa Wijaya mengawini putri Sumatra yang dibawa dari Malayu ketika duta-duta Kertanagara ke negeri itu

merasa sudah aman untuk pulang. Satu dokumen dari tahun 1305 menyatakan bahwa sang raja, yang kini menyandang gelar seremonial Kertarajasajayawardhana, memasuki persekutuan mistik dengan empat putri, yang mewakili empat negeri: Bali, Malayu, Madura, dan Tanjungpura. Tidak penting apakah Wijaya betul-betul punya kuasa atas negeri-negeri itu atau tidak; sejak itu penguasaan formal atas sebagian besar Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan *regalia* raja-raja Majapahit.[13] Kenyataannya kekuasaan riil raja-raja pertama Majapahit sangat jauh dari klaim mereka. Di bawah putra Wijaya, Jayanagara (1309-1328), dan selama pemerintahan yang mewakili keponakannya Rajasanagara, juga dinamakan Hayam Wuruk, para penguasa Majapahit yang baru berdiri itu sangat terancam oleh pemberontakan di Jawa sendiri. Beberapa penguasa besar di wilayah itu, di antaranya Wiraraja dari Madura, angkat senjata menentang keluarga penguasa Majapahit. Kekalahan mereka semua satu per satu, dan pemulihan kekuasaan raja, adalah hasil prestasi besar Gajah Mada, patih atau hulubalang kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah salah seorang tokoh paling menarik dalam sejarah Indonesia. Namanya terus hidup sebagai seorang negarawan besar yang dikatakan telah mempersatukan seluruh Indonesia di bawah satu raja. *Pararaton* mengisahkan cerita berikut tentang peningkatan kekuasaannya.

Gajah Mada, kata *Pararaton*, adalah perwira pengawal raja, ketika kerajaan Majapahit dipecah-belah oleh pertentangan internal dan pemberontakan. Suatu ketika raja harus melarikan diri dari ibukotanya dan tampaknya semua harapan sudah luluh ketika Gajah Mada membawa keselamatan. Dia menghancurkan pemberontakan tentara pengawal dan mengawal raja ke tempat persembunyian yang aman. Setelah itu dia sendiri kembali ke kamp para pemberontak dan menyebarkan kabar bahwa raja sudah gugur. Setelah dengan teliti mempelajari reaksi para tentara itu di antara pasukan pemberontak, dia menyusun revolusi balasan dan memulihkan kekuasaan sang raja. Promosi menduduki jabatan

tertinggi di kerajaan itu adalah hadiahnya. Pada 1331 dia menjadi patih atau perdana menteri.

Dikisahkan pada kitab bahwa kerajaan itu dalam keadaan parah. Wilayah-wilayah pinggiran tidak terkuasai, sebagian Jawa bagian timur menolak mengakui kekuasaan raja. Terhadap pemberontak-pemberontak Jawa inilah Gajah Mada melancarkan ekspedisi militernya yang pertama. Dalam waktu singkat dia pulang dengan kemenangan, dan setelah itu mengangkat sumpah khidmat di hadapan raja bahwa dia tidak akan menikmati *palapa* (mungkin berarti bahwa dia tidak akan ambil bagian dalam ritus-ritus Tantris yang diperkenalkan di masa Kertanagara) sampai semua wilayah raja terakhir Singasari berhasil dipulihkan ke kemuliaannya seperti semula. Seluruh pejabat istana menganggap sumpah itu lucu, penulis tawarikh dan pejabat istana mengolok-olok menteri itu. Gajah Mada tersinggung akan penghinaan mereka; sejak itu, keputusannya tidak terubahkan: dia akan mengikuti jejak Kertanagara dan mempersatukan kembali keempat negeri di luar pulau di bawah mahkota Jawa.

Setelah itu, Prapança mengisahkan bahwa, pertama-tama, Bali merasakan kekuatan tentara Jawa. Seorang raja baru dinaikkan di atas takhta pulau itu untuk memastikan kesetiaannya pada Majapahit. Begitu pula, seorang pangeran muda Malayu yang tinggal di istana Jawa diantar pulang ke negerinya dan dinaikkan di atas takhta di sana sebagai bukti kekuasaan superior Majapahit. Sebagai raja Adityawārman, dia praktis memerintah sebagai raja merdeka dan memperluas wilayah kekuasaannya dari dataran pantai ke daerah pegunungan Minangkabau. Di sana, dia mendirikan dasar untuk perkembangan kerajaan Melayu yang baru. Jauh setelah itu, ketika penduduk pegunungan Sumatra sudah menerima Islam, mereka lebih suka melupakan asal-usul negara mereka yang bersahaja dan meramu silsilah hebat yang membuat raja-raja mereka menjadi keturunan Iskandar, Alexander Agung versi Asia. Alexander dikatakan punya tiga putra, yang tentu saja tidak dikenal dalam sejarah, tapi yang

dalam tradisi Minangkabau menjadi masing-masing Sultan Turki, Kaisar Cina, dan *Maharajadiraja* Minangkabau.

Prapança menyelipkan dalam syair-syairnya sederet panjang negara-negara bawahan Majapahit. Termasuk di sini hampir semua wilayah pantai Indonesia, Sumatra Barat, Timur, dan Utara, pantai-pantai Kalimantan bagian selatan, barat, dan utara, bagian-bagian Sulawesi dan Maluku. Disebutkan ada ekspedisi ke Sumbawa, sebelah timur Bali, dan Lombok. Pulau Timor mengirimkan upeti. Bahkan Palembang, yang pernah menjadi ibukota negara terkenal Sriwijaya dikatakan takluk berhadapan dengan pasukan Jawa. Setelah perjuangan hebat kerajaan Sunda (sebelumnya Pajajaran) di Jawa bagian barat juga ditaklukkan.[14] "Kidung Sunda", roman keksatriaan Jawa, mengisahkan cerita dramatik konflik abad ke-14 ini antara Jawa Timur dan Barat.

Raja yang masih muda, Hayam Wuruk, ingin mengawini putri raja Sunda. Setelah beberapa kali perundingan yang dilakukan patih, undangan dikirimkan kepada raja Jawa Barat untuk datang dengan putrinya ke Majapahit, di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dengan banyak pengikut, raja Sunda tiba di ibukota. Dia berkemah di bagian utara kota, di lapangan luas tempat para bangsawan Majapahit biasa berburu dan mengadakan turnamen. Orang Sunda bangga bahwa seorang putri raja akan menjadi ratu resmi imperium paling kuat di Indonesia. Bagi mereka perkawinan itu berarti awal persekutuan di antara kedua kerajaan tersebut, dan negara Sunda yang miskin mungkin bisa mendapat bagian dari kekayaan tetangganya di timur. Lalu si hulubalang, dengan dingin dan menghina, menghancurkan segala harapan mereka. Dari awal dia sudah menentang perkawinan itu, yang dia anggap merendahkan martabat tuannya. Dia menunjukkan pada orang-orang Sunda itu bahwa dia hanya akan membiarkan mereka mempersembahkan sang putri kepada harem istana sebagai upeti dari seorang raja bawahan kepada raja junjungannya. Tidak ada perkawinan, hanya akan ada upacara penerimaan, di mana Yang Mulia, raja Majapahit, akan dengan rela hati menerima putri itu

sebagai salah satu dari istrinya yang banyak.

Orang-orang Sunda yang bangga akan kemerdekaan mereka itu menolak. Sekali lagi Gajah Mada memerintahkan mereka untuk menyerahkan sang putri. Sementara itu dia mengumpulkan pasukannya. Meloloskan diri tidak mungkin. Bangsawan-bangsawan Sunda lebih memilih mati daripada dihina, dan karena menunda-nunda hanya akan membuat keadaan mereka tambah buruk, mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Raja mereka gugur sejak awal, tapi prajurit-prajuritnya terus bertempur, memukul mundur pasukan Jawa beberapa kali. Karena tidak sanggup menerobos lingkaran baja yang mengelilingi mereka, mereka melakukan penyerbuan terakhir atas Gajah Mada sendiri dan pengawalnya. Demikianlah akhirnya. Panglima perang tua itu tanpa ampun meluluh-lantakkan pasukan Sunda. Tidak ada yang selamat. Ada dua versi tentang apa yang terjadi pada sang putri. Yang pertama menyatakan bahwa raja mengawininya, tapi bukan sebagai ratu resmi, dan dia meninggal segera sesudah itu. Versi lain yang dikisahkan dalam roman yang masih beredar di Jawa dan Bali menyatakan bahwa sang putri membunuh diri di medan pertempuran di samping mayat ayahnya. Setelah pembantaian ini, dendam dan kebencian merebak di antara kedua bagian Jawa ini, dan Sunda tidak pernah tunduk pada kekuasaan Gajah Mada yang mereka benci.[15]

Begitu Gajah Mada memenuhi sumpahnya, dia dengan bangga mengakui kekagumannya kepada pendahulu spiritualnya, Kertanagara, dengan membangun satu candi baru di garis perbatasan lama, yang dikatakan telah digariskan oleh Bharada, dan satu monumen lagi bagi para pendeta dan penasihat yang tewas bersama Kertanagara pada saat-saat terakhir Singasari. Lalu, setelah menjadi kekuatan besar, Majapahit menjalin hubungan secara teratur dengan Cina, Champa, Kamboja, Annam, dan Siam.

Bagaimana kita harus menilai "imperium besar" Majapahit? Apakah kekuasaan Majapahit sungguh-sungguh sampai begitu jauh di barat, utara, dan timur? Bukan tidak mungkin. Boleh

jadi memang terasa kurang mungkin tapi, perasaan ini saja bukan alasan bagus untuk menolak kebenaran cerita Prapança. Pujangga itu mungkin melebih-lebihkan, tapi patut dicatat bahwa ingatan akan kekuasaan Majapahit hidup terus selama berabad-abad. Orang Portugis dan Belanda diberitahu oleh orang-orang Indonesia sezamannya bahwa bagian-bagian wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Maluku pernah berada di bawah pemerintahan Jawa.

Di pihak lain, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa pulau-pulau luar memang pernah berada langsung di bawah pemerintahan Jawa. Prapança bicara dengan agak merendahkan wilayah-wilayah lain sementara dia kehabisan kata-kata pujian untuk negeri kampung halaman rajanya di Jawa. *Kidung Sunda*, kisah roman keksatriaan itu, menawarkan kunci yang mungkin bisa menolong kita memahami jenis hubungan antara Jawa dan bawahannya di luar pulau. Sunda, katanya, diminta mengakui status superior raja besar Majapahit. Tidak lebih daripada itu akan dimintakan dari negara bawahan lain. Upeti sebagai pertanda, mungkin dalam bentuk kuno suatu "hadiah" yang dibalasdengan suatu "penghargaan", akan sudah cukup memadai. Prapança mengatakan bahwa negara-negara bawahan yang tidak membayar upeti secara teratur akan "dikunjungi" oleh armada Jawa dan bahwa beberapa laksamana menjadi terkenal lewat ekspedisi-ekspedisi ini. Tapi pastilah sebagian besar penguasa kecil di negara-negara pantai merasa bahwa hubungan mereka dengan Jawa patut dibanggakan dan sekaligus menguntungkan. Para penguasa, misalnya kepala-kepala suku di pulau-pulau kecil di Maluku, mungkin saja berusaha tampak penting di mata pejabat-pejabat Jawa dengan mendaftarkan banyak tempat yang lebih jauh dan terpencil sebagai daerah bawahan mereka karena makin panjang daftarnya, makin besar kejayaan mereka. Bualan mereka mungkin akan mengakibatkan biaya yang lebih besar dalam jumlah rempah yang dibayarkan sebagai upeti, tapi juga meningkatkan "penghargaan" yang akan mereka terima dalam

bentuk barang-barang Jawa yang mereka butuhkan sendiri atau untuk dijual eceran di antara orang-orang yang tinggal di pulau-pulau di timur yang tak terbilang banyaknya itu.[16]

Tidak semua komunitas yang disebutkan Prapança adalah negara atau kerajaan yang teratur. Di banyak tempat mereka tidak lain daripada kelompok penduduk asli yang terikat tradisi, tinggal di bawah pengaruh kepala suku setempat, dan hukum-hukumnya didasarkan pada adat istiadat dan kepercayaan kuno. Pada kasus lain kerajaan itu mungkin muncul dari pos dagang yang didirikan oleh saudagar dari Sumatra, Malaya, atau mungkin Jawa. Kerajaan-kerajaan semacam itu sering kali muncul—dan sering kali menghilang lagi—di Indonesia, bahkan pada zaman yang lebih belakangan. Yang paling terkenal didirikan pada 1839 oleh orang Inggris, James Brooke, yang menjadi Sultan Sarawak. Cara bagaimana negara-negara kecil ini terbentuk biasanya mengikuti jalur berikut ini.

Seorang saudagar tiba di salah satu pulau yang kurang beradab. Dia mendirikan satu pos dagang di pantai pulau itu, di muara sungai, atau di hulu di pertemuan beberapa anak sungai. Dia lebih cerdik daripada penduduk lokal; dia tahu apa barang dagangan yang diinginkan di dunia luar, dan dia menciptakan monopoli. Dia menghimpun pengikut dan budak dan membentuk barisan pengawal, yang biasanya tidak lain daripada sekelompok penjahat. Dia mulai menarik pajak dari kapal-kapal yang lewat dan menuntut upeti dari suku-suku asli, dan dia memerangi semua pesaing. Orang malang yang jatuh di bawah kekuasaannya menjadi miskin, dan mungkin keturunan dari pendiri "negara" itu menghabiskan kekayaan dan kekuasaannya dalam foya-foya. Dia yang di antara berbagai penguasa setempat berhasil menguasai beberapa pos lain akan menjadi raja. Hampir semua raja-raja kecil ini tidak punya kekuasaan sejati. Mereka dengan cepat takluk kepada kekuasaan yang lebih besar, khususnya bila penyerahan itu mendatangkan kesempatan untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Posisi mereka selalu tidak aman, sehingga terjadilah kebangkitan dan kejatuhan begitu

banyak negara semacam ini. Dengan perang antarmereka yang tak berkesudahan, suatu proses lambat kristalisasi dimulai, yang pada akhirnya mungkin akan menciptakan sejumlah kecil negara yang lebih besar dan terorganisasi dengan baik, tapi proses ini terpotong ketika orang Portugis, dan setelah itu Belanda, berhasil mengontrol laut dan menghentikan perang-perang penaklukan serta pertumbuhan kesultanan yang lebih kuat.

Prapança banyak berkisah tentang kejayaan raja Majapahit yang dia layani. Sayang, referensinya pada ritus dan lembaga keagamaan pada masanya sulit dipahami. Dia membedakan ritus Buddhis dan Shiwais, walaupun nama-nama itu tampaknya sekadar merujuk pada dua aspek luar dari satu sistem agama yang sama. Dia menggambarkan suatu pesta makan istana di Majapahit dan mengacu pada aturan-aturan ritual mengenai makanan, tapi agak santai tentang pelanggaran terhadap aturan itu. Daging kerbau, rusa, domba, dan unggas bisa dinikmati semua orang, kata pujangga itu, tapi daging terlarang anjing, keledai, tikus, dan kodok dimakan oleh banyak orang biasa, "yang," kata Prapança, "makan dengan rakus tanpa peduli perintah para dewa". Jadi, sang raja tidak keberatan menyajikan makanan terlarang, yang dia sendiri tidak makan, kepada orang lain yang tidak begitu rewel. Tidak mabuk adalah salah satu hukum utama kedua agama itu, tapi Prapança mencatat pemandangan yang sangat mengagetkan tentang kemabukan di istana raja, dan kali ini tidak ada keraguan sama sekali tentang pelampiasan hawa nafsu yang dilandaskan agama. Ini jelas-jelas minum berlebihan untuk melampiaskan nafsu minum.

Tugas para pendeta lah menjaga tempat-tempat suci. Ini bukan demi kepentingan para pemuja, tentu saja, tapi demi raja-raja yang dikuburkan di sana, dan demi ketenangan roh-roh mereka. Adalah tugas raja untuk mengikuti aturan dengan ketat untuk memuja para dewa dan menyenangkan nenek moyangnya. Kalau dia berbuat begitu, dia bisa melepaskan semua urusan sekulernya kepada perdana menteri, yang juga adalah penasihat utamanya

mengenai ritus dan ibadah yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan negara. Untuk memenuhi semua tugas keagamaan ini, dan dengan demikian berpartisipasi dalam kekuatan gaib para nenek moyangnya, sang raja harus berkeliling wilayah kerajaannya, mengunjungi semua tempat suci. Dengan begitu dia bisa berhubungan dengan kekuatan roh, sementara perdana menterinya mengurusi perkara duniawi. Jelas, penyembahan nenek moyang, suatu praktik Indonesia kuno, tetap memainkan peran penting dalam ritus keagamaan resmi. Prosesi kerajaan semacam ini adalah rombongan tak teratur laki-laki yang mengendarai kuda dan gajah, kendaraan yang ditarik bagal dan sapi, serta kereta-kereta agung, yang mengangkut harem istana yang menemani seorang suami. Dan di mana saja rombongan ini singgah, ia menjadi beban berat bagi penduduknya, yang harus menyerahkan kerbau sapi, beras, dan sayuran untuk hidangan raja dan pengikut-pengikutnya yang tak terbilang itu. Bila raja tinggal selama beberapa hari di satu tempat, masyarakat sekitar juga harus menyediakan hiburan untuk raja, kata Prapança. Perempuan cantik dan "perawan pilihan" dibawa ke kemahnya. Pujangga itu menggambarkan bagaimana sang raja mengunjungi seorang petapa Brahmanis di hutan, tempat dia "tidur nyenyak dan membuat gadis muda merana dan kesengsem. Bagi mereka dia adalah dewa cinta yang turun ke dunia untuk merayu". Bukan hanya segala sesuatu yang dilakukan raja benar adanya, tapi, dalam pandangan Prapança, dicintai oleh raja merupakan keikutsertaan dalam kekuatan dewa-dewa. Raja tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia boleh melakukan apapun. Adalah hak istimewa, bahkan bagi binatang di hutan, untuk mati demi sang raja, seperti bisa dilihat dari gambaran Prapança tentang suatu pesta berburu raja:

Para pemburu sang raja mengelilingi hutan. Mereka membakar hutan itu dan berteriak-teriak membuat semua binatang melarikan diri dari persembunyian mereka. Binatang-binatang

itu berkumpul di tengah hutan dan mengadakan rapat. Rusa dan binatang-binatang lemah lain menyarankan mereka lari, sementara banteng, babi hutan, dan badak lebih suka tarung. Lalu harimau, raja hutan, memutuskan: "Mari kita bedakan yang baik dan buruk di antara para penyerbu kita. Orang-orang kelas bawah akan lari dari hadapan kita. Pendeta-pendeta dari ketiga aliran akan kita lawan, tapi janganlah menentang sang raja, kalau dia ingin membunuhmu, karena dia punya kuasa untuk membunuh segala makhluk. Shiwa berinkarnasi di dalamnya, dan yang mati di tangannya akan diampuni semua dosanya. Kematian seperti itu akan memberikan lebih banyak berkat bahkan daripada pengorbanan diri di danau suci. Hadiah untukku untuk perbuatan suci itu adalah aku akan dilahirkan kembali, bukan sebagai binatang, tapi sebagai manusia". Binatang-binatang liar itu lalu berbalik dan menyerang para pemburu. Baris pertama serdadu (yang dimanfaatkan untuk memukuli buruan itu) mulai membunuh rusa, tapi babi hutan liar menerjang ganas dan mengusir mereka dengan terbirit-birit dari lapangan. Satu per satu mereka diterjang jatuh. Serdadu-serdadu lain bersenjatakan tombak berat membunuh rusa-rusa itu, tapi lalu badak menyerbu bersama-sama. Para serdadu lari ke kanan dan ke kiri, banyak yang mati. Ada yang naik pohon, ada yang naik batu terjal, tapi ketika mereka jatuh, mereka diterjang binatang-binatang itu. Kini anggota-anggota bangsawan turun tangan dan mengusir badak-badak itu. Dengan semangat menggebu-gebu, bahkan para pendeta angkat senjata, lupa bahwa adalah kewajiban mereka untuk berbuat baik kepada segala makhluk hidup. Ketika mereka mengarahkan tombak mereka pada binatang-binatang itu, hukuman pun langsung jatuh. Harimau-harimau yang mengaum-aum muncul, dan para pendeta itu langsung melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka, dikejar binatang-binatang itu. Lalu sang raja, tanpa takut di atas kereta perangnya, membunuh harimau-harimau itu dan berakhirlah perburuan itu, setelah raja membunuh hewan buruan lebih banyak daripada semua orang lain.

Cerita menarik tersebut mungkin punya makna simbolik, tapi sejauh ini makna itu belum ditemukan. Ceritanya sangat mirip dengan acara perburuan besar yang dilakukan penguasa-penguasa Muslim Mataram, sebagaimana digambarkan pengamat-pengamat Belanda pada abad ke-17. Suatu perbandingan menarik dapat ditarik antara perburuan yang diceritakan Prapança dan pertempuran yang dilakoni para pahlawan perwayangan. Di sini juga pertempuran dimulai dengan serbuan massal oleh serdadu-serdadu biasa. Mereka dipaksa mundur oleh sejumlah kecil pahlawan musuh, yang kemudian dikalahkan oleh beberapa pahlawan paling terkenal dari pihak lawannya. Akhirnya, pahlawan besar perwayangan pun muncul dan, sendirian, menaklukkan semua musuhnya.

Organisasi-organisasi Buddhis dan Shiwais adalah bagian lembaga negara pada zaman Prapança. Kepala para pendeta tentu saja sekaligus pejabat tinggi negara. Seperti halnya awal Abad Pertengahan di Eropa, seni membaca dan menulis hanya dikenal oleh sejumlah kecil orang, dan sebagian besar dari mereka tergolong pendeta. Karena itu, adalah tugas pendeta dan biarawan untuk mengurus arsip. Setiap kuil dan setiap candi punya piagam dan dokumennya sendiri. Kalau kita percaya pada Prapança, Gajah Mada melakukan survei umum atas dokumen-dokumen ini, dan yang hilang digantikan dengan jiplakan baru. Suatu survei umum atas hukum dan adat istiadat dilakukan, dan kodifikasi ini tetap menjadi salah satu pencapaian besar perdana menteri itu. Aturan ketat berlaku untuk administrasi internal, yang dipercayakan kepada beberapa anggota keluarga raja yang terdekat.

Beberapa baris menarik dari epik Prapança menunjukkan bahwa sistem administrasi itu hampir serupa dengan yang ada pada abad ke-19. Tentu saja kita harus ingat bahwa Prapança menggambarkan keadaan *ideal*, bukan praktik sehari-hari "administrasi publik"! Beginilah gambarannya:

Dari sebuah perayaan besar di istana, semua tetua desa dan semua *wadana* pulang ke rumah, setelah pamit pada sang raja.

Beginilah pesan terakhir yang diberikan oleh paman raja:

> Layanilah Tuan dan Rajamu dengan setia! Jangan mengabaikan apapun yang bisa meningkatkan kesejahteraan daerahmu; peliharalah dengan baik jembatan-jembatan, jalan-jalan, *waringin*, rumah-rumah, dan tugu-tugu suci, sehingga sawah kita dan semua yang ditanam akan berbuah, terlindungi, dan terpelihara. Perhatikanlah pematang-pematang *sawah*, agar air tidak menjadi kering dan rakyat harus pindah ke tempat lain yang lebih baik. Dan, kalau rakyat terpaksa pindah ke tempat lain, hendaklah mereka mengikuti aturan kerajaan tentang luas sawah-sawah desa. Jagalah agar dapur-dapur (jumlah keluarga) didaftar dan daftar itu diperiksa pada hari terakhir setiap bulan.

Waringin, atau pohon beringin, masih dianggap pohon suci di desa-desa Jawa. Dalam surat perintah kerajaan, pohon beringin disebut senafas dengan rumah dan candi. Candi adalah tempat tinggal para dewa, rumah adalah tempat tinggal manusia hidup, dan pohon-pohon beringin yang tinggi dan besar itu dipercaya menjadi tempat tinggal jiwa orang mati. Menebang *waringin* akan menimbulkan balas dendam roh-roh atas desa tersebut.

Desa adalah unit sosial dasar di Jawa. Karena itu raja-raja mengumpulkan pajak dalam bentuk produk pertanian dari desa, bukan dari orang per orang, dan mereka menghadiahi pembantu mereka yang setia dengan penghasilan dari satu atau lebih desa, yang harus menyediakan makanan dan tenaga kerja bagi tuan-tuan mereka. Sebagai balasan, desa-desa ini bebas dari pajak umum. Desa-desa lain diperintahkan untuk memelihara tempat suci dan pendeta-pendeta yang melayani di situ. Banyak dari fondasi ini masih terus ada sampai zaman modern.

Imperium Majapahit telah menjadi kekuatan besar. Ibukota telah berkembang pesat dan tumbuh dari satu desa menjadi kota besar. Orang dari seluruh negeri datang ke sana untuk memperoleh kerja atau sekadar hidup dari belas kasihan raja dan para tuan tanah besar. Penghuni istana punya ribuan pengikut di sekeliling mereka. Kandang istana, dengan banyak gajah, kuda, banteng,

dan binatang-binatang langka lain, butuh banyak pengurus. Kota itu ada karena dan untuk raja, oleh sebab itu hanya sedikit sisa kejayaannya, kecuali beberapa reruntuhan candi, tembok kota, dan gerbang. Sebagian besar bangunan dibuat dari bahan yang mudah hancur, karena bahkan bangunan batu dibuat dari bata. Gempa bumi, iklim, dan tanaman yang rimbun dengan cepat mengikis monumen-monumen ini begitu kota itu ditinggalkan.

Pujangga Prapança menggambarkan keindahan ibukota dan gambarannya menunjukkan bahwa pastilah ibukota Majapahit mirip dengan Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada zaman modern. Tembok kota terbuat dari bata merah, tebal dan tinggi. Lewat gerbang di sisi barat pengunjung masuk ke alun-alun besar, yang di tengahnya ada kolam air jernih yang dalam. Di sekeliling alun-alun itu tumbuh beberapa baris pohon tinggi. Di antara pohon-pohon itu petugas keamanan berjalan naik turun, mengawasi lapangan luar istana itu. Di sisi utara ada gerbang utama yang indah dengan pintu besi yang berhias. Gerbang ini menuju ke alun-alun turnamen, yang ditengah-tengahnya berdiri satu paviliun untuk raja. Di satu sisi alun-alun ini ada gedung untuk audiensi dan rapat dewan istana. Di sisi lain tempat pertemuan di mana pendeta-pendeta Shiwais dan Buddhis berdiskusi dan mengatur persembahan korban. Ketika raja datang untuk menghadiri upacara kurban, seluruh alun-alun dilapisi bunga-bunga. Pujangga itu kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kemegahan gedung-gedung itu, tentang kandang-kandang penuh burung-burung yang jumlahnya tak terbilang, tentang serdadu yang berjaga, dan arus pengunjung tak habis-habis yang membawa hadiah untuk raja. Di sekeliling alun-alun terdapat kediaman pangeran-pangeran, dan di timur laut adalah tempat tinggal Gajah Mada, "*patih* Majapahit, berani, bijaksana nasihatnya, dapat diandalkan, setia dengan jujur kepada raja, mahir berdebat, jujur, sederhana, bersiaga, dan bertekad bulat ketika menjalankan perintah Yang Mulia". Ke situ sang raja pergi, kalau kita percaya pada Prapança, dalam kendaraannya yang ditarik anjing dan singa

(macan tutul?). Kedua jenis binatang ini, menurutnya, tidak saling campur, tapi sejumlah besar pelayan menjaga mereka tidak saling terkam dan semua orang menatap dengan penuh kekaguman!

Di alun-alun itu, raja menghibur diri dengan pertandingan dan permainan perang-perangan para bangsawannya. Di sana dia mengundang ribuan pengikutnya makan. Pelawak berkeliling, membuat lelucon dan menari. Semua orang ikut bernyanyi dan mendengarkan dengan kagum ketika Yang Mulia sendiri bernyanyi. "Nyanyian merdu sang raja," kata Prapança, "dikagumi oleh semua. Indah seperti panggilan merak duduk di pohon, manis seperti campuran madu dan gula, menyentuh hati seperti bunyi buluh perindu." Akan terlalu membosankan di dunia ini kalau tidak ada variasi pada selera musik. Tapi para penghuni istana sangat senang. Mereka meminta pertunjukan tambahan talenta artistik keluarga raja. Paman raja memainkan gamelan, ratu memakai rambut palsu lucu dan bernyanyi, raja sendiri memakai kostum pesta, ditemani orang-orang muda istana.

Tapi hari-hari gembira ria itu tidak berlangsung lama untuk Majapahit. Imperium yang kuat itu adalah hasil karya sedikit orang dan, setelah mereka wafat, dengan cepat kehilangan kejayaan.

Wafat Gajah Mada pada 1364 membuat raja merana. Dia memanggil semua anggota keluarga raja mengikuti suatu rapat negara yang khidmat. Empat menteri diangkat dan pekerjaan Gajah Mada dibagi di antara mereka. Beberapa tahun kemudian semua kekuasaan di negara itu sekali lagi diberikan kepada seorang perdana menteri. Catatan mengenai periode akhir pemerintahan Hayam Wuruk jarang ada, dan setelah dia wafat pada 1389, Majapahit sudah mulai memupus.

BAB 4

MUSLIM DAN PORTUGIS

PADA abad ke-15 Islam mulai menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Agama baru itu datang ke Kepulauan Indonesia dari barat. Dengan sendirinya sejarawan mengalihkan perhatian pada jalur padat perdagangan dan perniagaan Asia, selat antara Sumatra dan benua itu. Di sini, satu negara baru sedang naik panggung: kesultanan Malaka.

Tradisi menggambarkan negara itu bermula dari keberanian dan ketekunan seorang bangsawan Jawa yang, setelah lari dari musuhnya di negeri sendiri, tinggal di pos nelayan yang tidak berarti di Malaka, yang kemudian tumbuh menjadi emporium yang penting. Pengikutnya yang berjumlah kecil bercampur dengan penduduk Melayu asli, dan Malaka menjadi tempat perlindungan bagi para bajak laut yang memenuhi selat antara Sumatra dan Malaya. Daerah pantai di situ telah lama berada di bawah kekuasaan raja-raja T'ai dari Siam yang telah menjadi raja-raja paling kuat di Asia Tenggara. Untuk sementara, Majapahit mengatasi pemerintahan Siam, meskipun demikian hal ini tidak berlangsung lama. Lokasi geografis kota yang menguntungkan itu membuat ia berkembang cepat yang memungkinkan penguasanya memperoleh kemerdekaan lengkap.

Penguasa pertama Malaka sepenuhnya mengerti seni meng-

hambat seorang calon musuh dengan memanfaatkan musuh lain. Melawan Siam, dia memperoleh pertolongan Cina.[1] Begitulah dia mencuri waktu untuk membangun kekuatan kerajaan kecilnya. Pada mulanya dia mungkin memperoleh keuntungan dengan menjarah kapal-kapal pedagang yang berlayar dari India ke Indonesia atau Cina, tapi pedagang-pedagang itu dengan cepat belajar bahwa cara terbaik mempertahankan diri dari serangannya ialah dengan mampir secara sukarela di pelabuhan Malaka dan membayar cukai. Mereka melihat bahwa pelabuhan itu lokasinya bagus, di tengah jalan antara India dan Cina dan mudah dicapai oleh pedagang dari Jawa. Dalam beberapa tahun ia menjadi pelabuhan utama di Indonesia. Ketika dua abad kemudian seorang Belanda–Jan Huyghen van Linschoten–menulis untuk pertama kalinya tentang perdagangan di Malaka, dia menjelaskan bahwa dari tempat ini bahasa Melayu berasal dan menyebar ke seluruh Kepulauan Indonesia. Dalam hal ini, ceritanya mencerminkan tradisi lokal yang menyatakan bahwa kota itu bermula dari tempat berkumpul nelayan dari segala bangsa, di mana mereka memutuskan untuk membangun sebuah kota dan "mengembangkan bahasa mereka sendiri, dengan mengambil kata-kata terbaik dari segala bahasa di lingkungan itu". Setelah kota itu menjadi pelabuhan utama di Asia bagian tenggara, "bahasanya yang disebut Melayu lantas dianggap paling sopan dan paling cocok dibanding semua bahasa di Timur Jauh". Kenyataannya, Melayu sudah dipakai sebagai *lingua franca* untuk perdagangan dan hubungan internasional selama beberapa abad sebelum zaman Linschoten.[2]

Beruntung bagi penguasa pertama Malaka, dia mendirikan kerajaannya persis ketika imperium Cina naik daun sekali lagi di bawah dinasti kaisar-kaisar Ming. Pada 1368, Cina terbebas dari dominasi Mongol, dan 14 tahun kemudian imperium itu sepenuhnya dipulihkan di bawah kaisar pertama Dinasti Ming. Dinasti Ming memulai pemerintahan dengan kebijakan ekspansi yang jelas di perairan selatan, meneruskan karya Kublai Khan agung. Duta-duta dikirim ke Champa dan Kamboja, ke Malaya,

dan Indonesia untuk meminta penyerahan dan permintaan itu disokong oleh armada yang kuat. Penguasa Malaya cepat memanfaatkan kesempatannya. Bagaimanapun, kebijakan terbaik adalah langsung menyerah, untuk menjamin kehendak baik dari sang kaisar. Tidak heran jika duta-duta Cina itu, yang berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan dan menjelaskan misi mereka dengan sopan dan persuasif, memperoleh keberhasilan besar. Penguasa-penguasa lokal langsung berjanji akan datang ke Cina dan mempersembahkan upeti. Selama beberapa tahun ada kunjungan tergopoh-gopoh ke Peking. Yang pertama pergi adalah raja Puni (mungkin Bone di Sulawesi, atau suatu tempat di pantai barat Kalimantan). Cina mencatat bahwa raja Puni memohon kepada sang kaisar agar membebaskannya dari keharusan membayar upeti kepada Majapahit dan diizinkan mengirimkan upeti kepada "Penguasa Besar seluruh Dunia", Pemimpin Cina. Tentu saja permintaan itu dipenuhi. Raja Malaka mendapatkan keberhasilan serupa di Peking dan mendapatkan perintah kekaisaran kepada raja Siam untuk tidak mengganggu Malaka. Hubungan antara Malaka dan Cina tetap erat dan baik selama waktu yang panjang. Kunjungan penguasa Malaka ke istana Cina dicatat pada 1411, 1414, 1419, 1424, dan 1433. Kehadiran armada Cina di laut-laut selatan pastilah sangat mengesankan.[3]

Pada masa itu kejayaan Majapahit sedang menyusut dan kekuatannya terguncang hebat. Ketika duta Cina tiba di Jawa, mereka tidak beruntung karena terseret dalam suatu pertempuran lokal, hingga 150 pengikut mereka terbunuh. Tampaknya, raja-raja lokal Jawa sekali lagi terlibat dalam perebutan kekuasaan yang ganas. Pemenang pertempuran itu terpaksa menghaturkan maaf dan membayar denda yang besar.

Pergumulan ini mungkin merupakan bagian dari kekacauan politik yang menyertai peralihan takhta Majapahit kepada suatu dinasti baru dan perpindahan kediaman raja dari Majapahit ke Keraton baru.

Situasi di Sumatra bahkan lebih buruk. Duta-duta Cina

menemukan Palembang berada di bawah kekuasaan seorang kepala bajak Cina, yang berlagak menjadi raja di kota tua ini. Mereka menangkapnya dan mengirimkannya ke Cina, suatu fakta yang membuktikan bahwa kekuasaan sang kaisar sangat dihormati di luar negeri.

Di bawah perlindungan kekuasaan seperti inilah Malaka berkembang pesat. Sementara itu perubahan penting lain terjadi. Penguasa Malaka yang mengunjungi Cina pada 1419 bernama Muhammad Iskandar Syah yang menunjukkan bahwa keluarga penguasa Malaka entah sudah masuk Islam atau digantikan oleh dinasti Muslim yang baru. Batu-batu nisan raja-raja Malaka pada awal abad ke-15 cocok dengan catatan Cina. Nisan-nisan itu pastilah diimpor dari Gujarat dan prasasti di situ tertulis dalam bahasa Arab, bahasa suci dan tulisan Islam. Orang-orang Gujarat mungkin memperoleh bahan material yang sangat murah dengan mengambilnya dari candi-candi Hindu yang mereka cemoohkan sebagai tugu berhala. Kemudian, nasib sama kembali menimpa batu-batu nisan itu, ketika orang Portugis memakainya untuk membangun benteng Malaka, tanpa penghormatan terhadap agama umat Muslim yang mereka benci.

Muhammad Iskandar Syah wafat pada 1424. Islam pada waktu itu sudah menyebar di sepanjang pantai timur laut Sumatra, tapi belum masuk ke pedalaman. Islam dengan cepat menguasai wilayah pantai Semenanjung Malaya. Kuburan berbahasa Arab pertama di Jawa–kecuali kasus tersendiri dari 1102 yang telah disebutkan di muka–berasal dari 1419. Itu adalah kuburan Malik Ibrahim, yang populer sebagai penyebar agama Islam. Para pakar modern telah menerjemahkan prasasti itu dan berkesimpulan bahwa dia adalah pedagang kaya yang mungkin memperoleh hartanya dari perdagangan rempah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sesungguhnya Islam menyebar di seluruh Kepulauan Indonesia.

Bisa kita singkirkan gagasan bahwa agama baru itu dibawa ke Asia Tenggara lewat kegiatan dakwah. Kata "dakwah" itu sendiri

menyesatkan. Sampai tahun-tahun terakhir, ajaran-ajaran Nabi tidak pernah disebarkan lewat kegiatan meng-Islamkan orang secara terorganisasi. Pengikut-pengikutnya tidak mendirikan organisasi agama dan tidak mengenal kelas imam yang khusus. Agama dan negara bersifat satu. Ekspansi pemerintahan Islam atas orang-orang bukan Muslim sering kali secara perlahan menyebabkan orang bukan Muslim menjadi Muslim, dan kehadiran orang-orang Muslim dalam posisi berpengaruh di lingkungan non-Muslim kemungkinan akan mendorong sebagian pelayan dan tetangga mereka untuk mencontoh mereka. Dalam beberapa kasus, perpindahan agama disebabkan keyakinan, dalam kasus lain disebabkan oleh motif-motif kepentingan tersembunyi dan non-religius.

Pedagang-pedagang dari Gujarat yang datang ke Indonesia pastilah tidak datang dengan tujuan menyebarkan agama mereka. Di pihak lain, ada hubungan jelas antara persebaran Islam dan perdagangan rempah. Bukti paling tua kehadiran orang Islam ditemukan di sepanjang jalur perdagangan mulai dari Malaka di barat sampai Maluku di timur. Agama baru itu tampaknya telah mencapai Maluku sebelum akhir abad ke-15, jauh sebelum mencapai Sulawesi atau Kepulauan Sunda Kecil. Ekspansinya lambat dan tidak mendapatkan momentum sampai pertengahan abad ke-16. Pada waktu itu nasib Indonesia sudah tidak terpisahkan lagi dari perjalanan politik dunia.[4] Sebelum menggambarkan peristiwa-peristiwa ini kita harus sekali lagi berpaling sebentar ke Jawa.

Kerajaan Majapahit kehilangan banyak kemegahannya pada seperempat terakhir abad ke-15. *Pararaton* mengatakan "penghancuran" Keratonnya terjadi pada 1478 tapi kita tidak tahu pasti baik tentang tanggal maupun peristiwanya. Menurut kalender Jawa tahun 1478 adalah tahun 1400. Akhir suatu abad dipercaya menandai titik balik dalam sejarah orang Jawa. Jadi, sekadar fakta bahwa suatu abad sedang berakhir dapat dianggap alasan cukup untuk mengubah tempat kediaman raja. Kalau perubahan

ini tidak dilakukan dengan sukarela, ia dapat *dipaksakan* oleh kekuatan yang lebih tinggi, artinya, bencana besar yang akan menghancurkan dinasti yang sedang memerintah bisa terjadi. Bahkan ada bukti bahwa pada akhir abad keturunan Hayam Wuruk digantikan oleh satu keluarga pemerintah yang lain yang menyandang gelar *Girindrawardhana*. Makna nama ini kira-kira serupa dengan *Shailendra*. Tampaknya, raja-raja baru itu ingin menekankan bahwa mereka "sah" menjadi penerus (kalau bukan keturunan dari) para pembangun Borobudur, yang akan memungkinkan mereka mengklaim penguasaan atas seluruh Jawa.

Setelah kematian Hayam Wuruk pada 1389, suatu periode panjang kekacauan politik tampaknya berlangsung. Penyebab kekacauan ini dijelaskan oleh penulis-penulis Jawa waktu itu dalam suatu cerita yang anehnya serupa dengan cerita yang ditulis tentang pendahulu mereka pada peristiwa yang berlangsung sesudah wafat raja Airlangga dan Kertanagara. Raja Hayam Wuruk, kata mereka, tidak punya putra "resmi". Hanya seorang putri yang lahir dari ratu resmi. Daripada membiarkan putranya dari perempuan lain menduduki posisi lebih rendah, Hayam Wuruk memutuskan membagi kerajaannya, dan dengan demikian menghancurkan karya Kertanagara dan Gajah Mada yang telah berusaha mengekang kekuatan jahat pemecah-belah dan memperkuat kekuatan gaib yang mempersatukan. Penulis bagian cerita *Pararaton* ini pastilah sengaja meniru karya tulis pendahulunya. Pelaku-pelaku sama muncul lagi dalam versi baru cerita lama ini. Sekali lagi Kediri memainkan peran sebagai si jahat, dan mewakili perlawanan tiada habisterhadap negara-pemimpin yangsah. Dinasti baru itu, mungkin berkedudukan di keraton baru, mengaku diri pewaris dari kedua periode itu, yaitu periode dinasti sebelum dinasti yang ia gantikan, dan periode pendiri kuno tradisi kerajaan Jawa. Sangat mungkin tentu saja bahwa Kediri memang benar-benar tempat kediaman musuh-musuh Majapahit yang mendirikan dinasti baru itu, tapi kemungkinan bahwa nama-nama dipakai dalam arti simbolik tidak boleh disampingkan. Peristiwa-

peristiwa berikutnya menunjukkan pola serupa. Pada sekitar pergantian abad ada daerah pantai yang dipimpin Muslim, ada yang dipimpin raja "kafir".[5] Cirebon, Demak, dan Jepara, semuanya ada di bagian tengah pantai utara, berada di tangan kaum Muslim. Begitu pula Gresik dan Surabaya di pantai barat Selat Madura. Di antaranya terdapat kota Tuban, yang penguasanya menganut ajaran Islam, walaupun dia dan rakyatnya mempertahankan cara kehidupan Hindu-Jawa. Pada 1513, Tuban digambarkan sebagai satu kota bertembok yang kecil dengan tidak lebih daripada 1.000 penduduk. Di dalam tembok, ada sejumlah rumah benteng milik keluarga bangsawan yang menarik penghasilan dari tanah mereka di perdesaan. Raja Tuban berusaha menjalin persahabatan dengan tetangga-tetangganya yang Muslim dan juga dengan musuh mereka, Portugis, yang pada sekitar 1511 datang ke Jawa untuk pertama kali. Dia juga memelihara hubungan baik dengan penguasa pedalaman "kafir" yang kuat yang terhadapnya dia menyatakan kesetiaan dan yang mungkin adalah penerus raja-raja Majapahit. Walaupun ada keyakinan pribadi, dia tampaknya jauh lebih tertarik melestarikan struktur sosial dan politik tradisional negerinya daripada menyebarluaskan Islam. Kota-kota pantai di timur Surabaya dan seluruh Madura masih di bawah penguasa Hindu-Jawa pada awal abad. Perseteruan umum terjadi di antara banyak penguasa setempat itu, tapi hampir tidak ada bukti ekspansi Muslim lewat peperangan ke Jawa bagian timur pada periode itu. Tapi bagian baratnya terus-menerus di bawah tekanan raja-raja Demak. Mereka sudah menaklukkan Cirebon pada sekitar 1475, lalu menyerbu dan mengalahkan Palembang dan Jambi di Sumatra.

Tampaknya, semangat menyebarkan Islam hanyalah satu motif kecil dalam politik Jawa sekitar pergantian abad. Penguasa pusat dari kerajaan-kerajaan yang paling kuat (Majapahit atau penerus-penerusnya) telah melemah sehingga raja-raja lokal bebas melakukan apa yang mereka suka. Bukan tidak mungkin bahwa jumlah perdagangan yang meningkat antara Indonesia di satu

pihak, dan India dan Cina di pihak lain, telah membantu beberapa daerah pantai yang sebelumnya tidak dikenal berkembang menjadi pelabuhan yang kaya. Penguasa-penguasanya ikut aktif dalam perdagangan ini. Mereka membawa rempah-rempah dari Maluku dan mengapalkannya ke Malaka. Untuk itu, mungkin mereka terbantu oleh pengalaman niaga pedagang Gujarat dan Melayu, yang mereka dukung untuk tinggal di kota mereka atau di sekitarnya, walaupun para pedagang itu tetap dipandang sebagai orang kelas bawah. Sedikit saja dari kapal mereka dibuat di Jawa, di mana hanya Rembang, di antara Tuban dan Gresik, punya dermaga dan pembuat kapal berpengalaman. Sebagian besar dibeli dari pembuat kapal di Pegu di Dataran Rendah Burma, kalau kita percaya pada kesaksian Portugis, dan bila kapal itu lenyap, sulit diganti.[6] Kalau hal ini benar, berarti maraknya perdagangan Jawa pada akhir abad ke-15 disebabkan oleh perkembangan di luar. Dengan begitu hal ini memperkuat daya tarik Islam bagi penguasa-penguasa pantai Jawa. Selama berabad-abad, raja-raja Jawa terbiasa memanfaatkan praktik keagamaan sebagai cara untuk meningkatkan tenaga dalam atau kekuatan gaib mereka. Bisa dimengerti kalau mereka memandang Islam dengan cara sama. Peningkatan pengaruh agama baru itu di seluruh Asia Tenggara membuktikan kesaktiannya. Mengapa penguasa-penguasa Jawa tidak ikut menerima Islam juga? Mengapa tidak menambahkan sumber baru kekuatan gaib ini kepada sumber yang sudah mereka kenal? Ada dua manfaat yang bisa diperoleh sekaligus: mereka akan sejajar secara spiritual dengan kaum Muslim yang mungkin akan jadi musuh mereka, dan mereka mungkin bisa memperoleh bantuan dari kaum Muslim ini untuk melawan musuh-musuh non-Muslim mereka. Pertanda sinkretisme agama ini kita temukan pada kuburan-kuburan kaum Muslim tertua di Jawa yang dihiasi dengan simbol-simbol Shiwais serta prasasti bahasa Arab. Tentu saja tidak bijaksana untuk menyingkirkan kemungkinan adanya tindakan masuk Islam yang murni, tapi Islam jelas tidak menimbulkan pemutusan hubungan yang tegas dengan masa

lalu di Jawa. Wayang dan cerita-cerita dari *Mahabharata* serta *Ramayana* terus berfungsi di antara para bangsawan sebagai pelajaran kesatriaan dan dinikmati orang biasa. Budaya istana Jawa pada intinya tetaplah Hindu-Jawa sampai waktu akhir-akhir ini.[7]

Dunia Indonesia perlahan-lahan berubah akibat dampak suatu agama baru dan peningkatan intensitas perdagangan asing, ketika kedatangan Portugis yang mendadak mempercepat proses evolusinya. Portugis datang ke timur untuk mencari sumber kekayaan itu—yang berlipat ganda nilainya berkat imajinasi mereka—di negeri asal rempah-rempah, tapi kebijakan mereka didorong oleh semangat perang salib. Selama berabad-abad mereka berperang dengan orang "Moor" di negeri mereka sendiri. Setelah mengusir penguasa Muslim terakhir dari negeri mereka, mereka mencoba meneruskan kemenangan mereka dengan menyerbu Afrika Utara. Di sini, mereka berhadapan dengan perlawanan gigih. Lantas, mereka mencoba menyerang benteng kaum Muslim ini dari belakang, dengan berlayar ke pantai selatan Afrika. Usaha ini membawa mereka lebih jauh dari yang semula mereka niatkan, tapi ke mana pun mereka pergi mereka menemukan ada orang "Moor" untuk diperangi, karena bagi mereka semua penganut Islam adalah bangsa "Moor" dan musuh.[8]

Vasco da Gama mencapai pantai India pada musim semi 1498. Beberapa tahun kemudian dia kembali ke perairan India dengan perintah tegas dari raja Portugis untuk menghentikan semua pelayaran Arab antara Mesopotamia dan India. Setelah beberapa pertempuran dahsyat, dia berhasil mengontrol bagian barat Samudra Hindia bagi rajanya. Pekerjaan ini kemudian diselesaikan oleh seorang konkuistador terbesar, Alfonso de Albuquerque, yang dalam enam tahun sebagai gubernur, 1509-1515, membuka laut-laut ke Timur Jauh bagi pedagang-pedagang Portugis. Dia tiba di India pada saat kapal pertama yang telah dikirim untuk menyelidiki Malaka kembali dari penjelajahannya. Awak kapal punya pengalaman tidak enak dengan Sultan Malaka. Pertama

mereka diterima dengan baik, kemudian mereka diserang tanpa peringatan. Beberapa orang ditawan. Mungkin pedagang-pedagang Gujarat, Melayu, dan Jawa, yang pasti mengalami banyak kerugian akibat imbas dari perang Arab-Portugis, sangat ingin menghadang perluasan lebih jauh kekuatan laut Eropa. Mereka menuntut agar penyusup-penyusup tersebut segera dihukum. Sultan Malaka, yang penghasilannya bergantung pada pedagang-pedagang asing, setuju.

Albuquerque mendengar semua kejadian itu setelah dia menaklukkan kota Goa, yang memberikan pijakan bagi imperium maritim Portugis untuk penaklukan lebih lanjut di benua Asia. Dia memutuskan bahwa Malaka harus menjadi pijakan kedua, dan pada 1511 dia berlayar ke timur. Demikianlah, sekali lagi terjadi perang suci antara orang-orang Moor dan Kristen, yang bolak-balik bergolak di Laut Tengah, tapi kini di Indonesia yang jauh. Dengan pukulan pertama, armada Portugis menjatuhkan negara Malaka tapi tiga kerajaan lain bangkit untuk tetap mengibarkan bendera hijau Nabi di Kepulauan Indonesia—kesultanan Aceh di Sumatra bagian utara, Demak di Jawa bagian timur, dan Ternate di Maluku.

Api perang salib cukup kuat dalam diri Albuquerque untuk membuat dia menangkap dan menjarah semua kapal Muslim yang bisa ditemukannya antara Goa dan Malaka. Demikianlah dia memerangi orang-orang Moor itu sambil melayani kepentingan perniagaan Portugis. Tapi ini adalah salah satu contoh pertama blunder-blunder mengerikan yang dibuat orang Eropa ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak begitu mereka kenal. Albuquerque tidak tahu betapa pentingnya posisi pedagang Gujarat selama berabad-abad di Kepulauan Indonesia, dan bahwa semua sanak keluarga dan teman mereka dari Aceh sampai Maluku akan mendengar dalam beberapa minggu bahwa orang Portugis adalah perompak dan tidak bisa dipercaya. Meskipun demikian, Albuquerque, seorang pemimpin sejati, berhasil memantapkan kekuasaan Portugis atas beberapa jalur perdagangan di Asia,

walaupun dia menghadapi lebih banyak masalah dengan perwira-perwiranya sendiri daripada dengan orang Melayu.

Dia menghimpun armada 19 kapal yang diawaki oleh 800 pelaut dan tentara Portugis untuk ekspedisinya ke Timur. Kekuatan ini kecil jumlahnya dibandingkan dengan pasukan Indonesia, tapi lebih unggul dalam peralatan dan terutama dalam organisasi militer. Ketika pasukan itu mendarat dekat Malaka, Sultan menawarkan perundingan. Albuquerque menuntut pampasan perang dan izin untuk membangun benteng Portugis di kota itu. Persyaratan ini tidak bisa diterima Sultan tanpa kehilangan kemerdekaannya. Itu seperti tindakan penyerahan yang sangat berbeda dengan kunjungan penghormatan yang biasa dia lakukan kepada kaisar Cina. Begitu dia menolak, Portugis menyerbu. Serangan pertama tidak berhasil sepenuhnya. Beberapa perwira Portugis protes terhadap perpanjangan ekspedisi itu. Iklim yang sangat tidak sehat di Malaka adalah alasan bagus untuk mengundurkan diri, karena tempat itu sarang demam sehingga orang Belanda pertama di situ menggambarkan bahwa: "Orang Eropa yang selamat tinggal di situ bolehlah bersyukur kepada Tuhan atas mujizat seperti itu".

Tapi Albuquerque menutup mulut penentangnya, dan pada 10 Agustus 1511 memimpin serdadunya menyerang untuk yang kedua kalinya, yang berhasil membuat dia menguasai kota.[9] Dia tidak cukup kuat untuk mengepung kota itu, sehingga tidak bisa mencegah Sultan mundur dengan kalangan istana dan tentaranya lebih jauh ke selatan di pantai dan dari situ meneruskan peperangan.

Sekarang Malaka adalah kota Portugis. Albuquerque langsung mulai membangun benteng. Kuburan orang Muslim tanpa ampun dia hancurkan untuk memperoleh bahan bangunan. Penduduk kota, khususnya saudagar Asia, sama sekali tidak puas dengan perubahan politik itu, dan Albuquerque melakukan kesalahan kedua dengan langsung menghukum mati pedagang utama Jawa dengan tuduhan menentang pemerintahan Portugis. Dengan

keyakinan penuh pada kekuatan armada Portugis, laksamana itu tidak begitu peduli pada pendapat orang Indonesia, yang dia perkirakan dalam beberapa tahun akan sepenuhnya disingkirkan dari perdagangan internasional. Dia segera menyusun ekspedisi ke Siam, Cina, dan Maluku.

Kepulauan Rempah-Rempah sudah menjadi legenda di Eropa sebagai sumber terbesar kekayaan Timur. Cengkeh dan pala adalah produknya.[10] Cengkeh, kuncup bunga yang dikeringkan dari pohon cengkeh, pertama kali dicatat dalam sastra Barat dalam sebuah laporan Yunani dari abad ketujuh Masehi. Di Eropa, selama Abad Pertengahan, rempah ini dijual dengan harga sangat mahal, tapi harga itu hanya sedikit berkaitan dengan biaya produksi atau kuantitas yang tersedia. Pembudidayaan kebun cengkeh hanya membutuhkan sedikit kerja, dan pohon itu terus berproduksi selama tigaperempat abad, yang sangat cukup menutupi ongkos selama periode lama pertumbuhan sebelum mulai berbunga–hampir 12 tahun. Yang membuat biayanya begitu mahal ialah biaya transportasi, serta risiko tinggi perjalanan panjang di laut. Penduduk Kepulauan Maluku tidak banyak beruntung dari perdagangan itu dibandingkan pedagang-pedagang Jawa, Gujarat, dan Cina. Lima puluh kilogram cengkeh hanya berharga satu atau dua dukat di Maluku, tapi dijual 10 dukat atau lebih di Malaka. Makin ke barat harganya makin naik. Kapal Magellan *Victoria* adalah yang pertama membawa cengkeh langsung dari Maluku ke Eropa, di situ ia dijual dengan keuntungan 2.500 persen. Cengkeh aslinya hanya tumbuh di pulau-pulau kecil Ternate, Tidore, Halmahera, dan sedikit pulau lain.[11]

Pala adalah produk utama Ambon dan Kepulauan Banda. Pohon itu mulai berbuah setelah 10 tahun. Pada usia 60 tahun ia berhenti berproduksi, tapi kadang-kadang bisa mencapai usia 100 tahun. Tidak heran orang Banda suka membandingkan pertumbuhan pohon pala dengan hidup manusia. Selama abad terakhir, cengkeh telah ditanam di beberapa tempat lain di dunia, tapi produksi pala masih terbatas pada Kepulauan Indonesia.

Sementara cengkeh dan pala hampir merupakan produk eksklusif pulau-pulau bagian timur Kepulauan Indonesia, lada adalah produk utama Sumatra dan Jawa Barat. Produksi lada tidak pernah hanya terbatas di Indonesia. Pantai Malabar, Siam, dan Cochin-Cina juga menambah suplai tahunan, sebagian besar diekspor ke Cina atau Asia Barat dan Eropa. Tumbuhan lada berbentuk semak yang hanya tumbuh subur di iklim tropis dan agak lembab. Setelah tiga tahun ia mulai berbuah dan, kalau dipelihara dengan baik, akan terus berbuah sampai 20 tahun. Permintaan akan lada jauh lebih banyak dibanding permintaan akan rempah-rempah Maluku dan harganya biasanya bagus di Cina dan Eropa. Kontrol perdagangan memungkinkan sebagian negara di Indonesia menangkis segala ancaman terhadap kemerdekaan mereka untuk waktu lama.

Portugis berharap memegang monopoli atas ekspor rempah-rempah itu. Tapi mereka tidak bisa untung besar kecuali kalau mereka menyingkirkan semua calo dan membawa rempah itu langsung ke Eropa. Tapi menjaga keuntungan besar seperti ini bergantung pada jumlah rempah yang bisa mereka kirim. Suplai melimpah, lebih daripada yang mau dibeli orang-orang Eropa waktu itu. Kalau Portugis ingin harga tetap tinggi, mereka harus memegang monopoli dan membatasi ekspor. Ini berarti perang dengan pedagang-pedagang Asia dan memerlukan patroli permanen atas jalur-jalur laut antara Indonesia dan Arabia. Portugis memulai pekerjaan ini dengan bersemangat. Setiap kilo pala yang diambil dari pedagang Muslim adalah pukulan terhadap kemakmuran kota-kota perdagangan di Suriah dan Mesir, yang akhir-akhir ini telah tunduk di bawah kekuasaan politik Sultan Turki. Ini berarti berkurangnya penghasilan Padishah di Istanbul, dan dengan demikian menguntungkan buat orang Kristen yang harus berperang melawan armada Turki di Laut Tengah. Jadi, membangkrutkan orang Muslim adalah pekerjaan yang patut dipuji sekaligus menguntungkan. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mengikat persahabatan

dengan produsen rempah. Tanpa bantuan mereka, rencana ini akan gagal. Sayang buat Portugis, para produsen ini sudah masuk Islam hanya seperempat abad sebelumnya. Ini membuat masalah menjadi sangat rumit, yang gagal diatasi Portugis.[12] Albuquerque mengirimkan wakilnya, Antonio d'Abreu, dengan tiga kapal, dari Malaka ke Maluku pada hari-hari terakhir tahun 1511. D'Abreu diperintah tegas untuk sama sekali tidak memakai cara militer dan untuk memperkenalkan diri sebagai pedagang. Armada kecil itu didahului oleh kapal layar seorang saudagar asli Melayu, yang berjanji akan mempersiapkan jalan. Bagian pertama perjalanan itu tidak sulit. Pelabuhan Gresik di Jawa bagian timur dicapai dengan selamat, tapi setelah itu kesulitan pun muncul. D'Abreu kehilangan salah satu kapalnya antara Jawa dan Kepulauan Banda. Yang dua lagi tiba dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dia sudah senang bisa membeli kargo cengkeh dan pala dari orang Banda dan bahkan tidak mencoba pergi ke Ternate atau Tidore. Hanya satu kapal kembali ke Malaka; yang satu lagi, dipimpin oleh Francesco Serrao, dihantam badai hingga terdampar di Ambon, dan akhirnya karam tidak jauh dari pulau itu. Kapten Serrao tidak bisa mencapai Ternate dengan kapalnya, tapi dia sendiri berhasil sampai ke sana. Dia membuat perjanjian dengan seorang pelaut Melayu yang membawa dia ke Ambon. Di sini dia berhasil mendapat tempat di hati penduduk setempat dengan menolong mereka dalam peperangan remeh mereka. Segera dia menjadi terkenal sehingga penguasa Ternate mengirimkan sebuah kapal untuknya. Demikianlah, tujuan asli perjalanan untuk membuka hubungan dengan Kepulauan Rempah-Rempah itu tercapai tanpa disengaja.

Narasi penjelajahan Portugis ke Kepulauan Indonesia memungkinkan kita membandingkan beberapa catatan Melayu dan Jawa dengan deskripsi Barat tentang tempat yang sama pada waktu yang sama. Jelas orang Portugis tidak netral dalam laporan mereka tapi mereka melihat Indonesia dari sudut berbeda. Mereka tidak terhalang dalam penggambaran tentang perkara

Indonesia sebab harus meletakkan segala sesuatu dalam kerangka yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh tradisi. Mereka datang untuk mencari produk berharga Kepulauan Rempah-Rempah itu dan tentu saja bukan untuk mempelajari dan menggambarkan kebudayaan Indonesia. Karena itu, mereka tertarik dan melaporkan banyak aspek kehidupan Indonesia yang dianggap semua orang sudah tahu atau dianggap remeh oleh pengarang-pengarang teks Indonesia. Narasi Indonesia, yang dikarang untuk memuliakan penguasa-penguasa Jawa dan Sumatra yang lebih kuat, jelas cenderung berkisar pada hal-hal yang secara kultural lebih unggul. Sebaliknya orang Portugis banyak menulis tentang hal-hal navigasi dan perniagaan. Jadi, mereka menuliskan banyak nama masyarakat Indonesia yang kecil-kecil dan kurang maju yang tidak disinggung dalam karya tulis para penulis Indonesia yang berbudaya lebih tinggi itu, yang menulis dengan tujuan yang sangat berbeda dari upaya menyebarkan pengetahuan geografis.

Hal ini pula yang membuat karya tulis Portugis memungkinkan kita untuk pertama kalinya menyelami lebih jelas faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kehidupan Indonesia abad ke-16. Faktor-faktor ini pastilah memainkan peran penting pada abad-abad sebelumnya, tapi tidak mungkin menjajaki dampaknya atas hal-hal yang terjadi di Indonesia karena sifat tidak biasa sumber-sumber kita dari periode yang lebih awal.

Demikianlah, gambaran situasi Indonesia pada abad ke-16, yang kita dapat dari kombinasi teks Portugis dan Indonesia, tidak mirip dengan dunia Kepulauan Indonesia pada hari-hari kejayaan Majapahit. Patut diingat bahwa perbedaan ini antara lain disebabkan oleh banyak dan beragamnya bukti yang kita miliki dari periode ini dibanding dengan yang tersedia pada abad-abad sebelumnya. Ini juga menjelaskan mengapa kerajaan Aceh di Sumatra, Demak di pantai utara Jawa, dan Ternate di Maluku kini muncul ke depan dalam sejarah Indonesia. Ternate dan pesaingnya Tidore mengontrol sebagian besar produksi cengkeh dan pala. Aceh lumayan berhasil memonopoli perdagangan

lada di Sumatra. Demak, paling tidak untuk sementara, adalah pelabuhan-antara yang utama di Kepulauan Indonesia.

Pada abad ke-15, Aceh merupakan salah satu daerah yang kurang penting di Sumatra Utara.[13] Islam tiba lebih awal di daerah itu. Kerajaan Samudra (Pasir), terletak di sebelah timur Aceh, telah menjadi Islam pada abad ke-13. Aceh bergabung dengan agama baru itu pada paruhan kedua abad ke-15, dan pada awal abad ke-16, penguasa-penguasanya memulai serangkaian "perang jihad" yang membuat mereka mengontrol wilayah-wilayah penghasil lada di pantai barat daya Sumatra. Jadi, mereka menyebarkan Islam sambil menjamin kontrol ketat atas perdagangan lada. Pada pertengahan abad ke-16, mereka menduduki pantai kerajaan yang pernah terkenal dengan nama Minangkabau dan meng-Islamkan raja serta rakyatnya.

Pendudukan Malaka oleh Portugis menimbulkan ancaman gangguan atas arus perdagangan regular di dalam Kepulauan Indonesia berikut ekspor ke Cina dan India. Tapi Malaka harus mengimpor beras dari Jawa, dan Sultan yang sedang dalam pelarian, yang bertahan di pulau-pulau sekitar pantai selatan Semenanjung—tempat dia mendirikan kesultanan Johor—mengganggu jalur suplai Portugis. Secara strategis Portugis ada dalam posisi lemah dan tampaknya pihak-pihak Indonesia juga punya artileri seperti lawan mereka. Dalam keadaan itu, suatu upaya bersama antara Aceh, Johor, dan Demak mungkin bisa menjadi bencana bagi Portugis. Namun, selalu sulit bagi suatu persekutuan untuk melancarkan perang secara efektif. Penguasa Demak memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia menyiapkan sebuah armada, yang dikatakan terdiri atas 100 kapal, dengan 10.000 pelaut dan tentara. Angka ini tampaknya agak tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan kapal-kapal Portugis. Laksamananya, Perez d'Andrada, hanya punya 13 kapal yang bisa dia pakai, kalau kita mengikuti sejarawan Portugis. Makin besar perbedaan dalam jumlah, makin besar pula kejayaan! Portugis memperoleh kemenangan mutlak dan hanya sedikit

kapal musuh yang selamat. Walaupun begitu, kekalahan itu tidak mematahkan kekuasaan Demak. Sebaliknya, ia terus memperluas jangkauan pengaruhnya lewat aksi-aksi militer yang berhasil di sepanjang pantai utara Jawa. Namun, Portugis memperoleh apa yang mereka inginkan. Tempat berpijak mereka di Asia Tenggara sekarang sudah aman. Aceh dan Johor terus mengganggu kapal-kapal Portugis, tapi sering kali mereka saling berseteru sehingga Malaka punya cukup kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Tapi, hanya tempat berpijak itulah yang terjamin bagi Portugis. Sumber daya mereka sangat terbatas, sementara ambisi mereka tidak terbatas. Mereka berada dalam keadaan sangat buruk bila ancaman pesaing dari Eropa ditambahkan pada permusuhan orang-orang Muslim. Pada musim semi 1521 kapal Spanyol *Victoria*, yang awalnya dipimpin Magellan, berlabuh di pelabuhan Brunei, suatu pusat perdagangan di pantai utara Kalimantan. Magellan dan orang-orang Spanyol adalah yang pertama datang dari Amerika ke Asia, tapi sayang, di Filipina, Magellan dan banyak pengikutnya terbunuh oleh penduduk setempat. Kapal itu berlayar ke Brunei, tapi di sanapun awak kapal tidak mendapatkan nasib lebih baik. Raja Brunei baru saja masuk Islam dan sedang sibuk menyebarluaskan agama barunya sambil memperluas pemerintahannya ke arah timur laut. Dia menundukkan pantai utara Kalimantan dan Kepulauan Sulu, dengan demikian membuka jalan untuk Islamisasi pulau Mindanao. Ketika pertempuran pecah antara Spanyol dan Melayu, *Victoria* terpaksa berputar haluan ke timur lagi. Ia berlayar lewat Kepulauan Sulu dan tanpa disengaja tiba di Maluku, yang mengagetkan dan menjengkelkan Portugis. Mereka yakin terlindung dari persaingan Spanyol karena ada keputusan Paus, yang memberi batas pada "lingkup kepentingan akhir" ("*spheres of eventual interests*") kedua negeri itu, tapi pada masa itu masih sangat sulit untuk menentukan derajat garis bujur secara persis untuk tempat-tempat yang jauh, dan kesulitan-kesulitan semacam ini menimbulkan banyak ketidakpastian menyangkut lokasi perbatasan yang sebenarnya yang disarankan

oleh Pemimpin Gereja Katolik Roma tersebut.

Tibanya Spanyol membuat Portugis menyadari bahwa mereka sudah harus memperkuat posisi di Kepulauan Rempah-Rempah. Pembangunan benteng dengan garnisun permanen menjadi kebutuhan mendesak, tapi di mana mereka harus membangunnya? Kedua raja Ternate dan Tidore sama-sama mengundang mereka untuk membangun kantor pusat mereka di wilayah mereka masing-masing. Raja sekaligus pebisnis itu mengharapkan keuntungan besar dari perdagangan dengan Portugis, dengan kemungkinan mendapatkan harga lebih mahal untuk barang dagangan mereka. Mereka tahu mereka akan diletakkan di bawah penguasaan raja Portugis, tapi tidak menganggap terlalu serius hubungan politik ini. Pilihan antara Ternate dan Tidore sulit untuk Portugis. Akhirnya, Portugis memilih bersekutu dengan Ternate, yang dengan sendirinya membawa mereka ke dalam pertentangan dengan pihak yang satu lagi. Ternate dan Tidore keduanya adalah pulau sangat kecil di sebelah barat Halmahera, tapi mereka memperluas kekuasaan mereka atas sejumlah besar pulau lain dan daerah pantai di Maluku. Desa-desa di semua pulau itu terkelompok dalam dua aliansi politik, satu di bawah kepemimpinan Ternate, yang lain di bawah Tidore. Di kedua pulau itu Islam telah menjadi agama resmi, tapi Ternate adalah yang pertama menganut kepercayaan baru itu dan raja-rajanya lebih fanatik. Ternate tidak mau menerima suku-suku atau desa-desa non-Islam ke dalam kelompok politiknya, sedangkan Tidore tidak membeda-bedakan mereka.[14]

Perjanjian yang dibuat antara Portugis dan Sultan Ternate menjamin raja Portugis akan memonopoli perdagangan cengkeh. Tapi kehadiran Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah berdampak pada peningkatan produksi rempah. Perkebunan cengkeh mulai ada pada seperempat kedua abad ke-16 di pulau-pulau lain, seperti Ambon dan Buru, dan pedagang Jawa bisa datang dengan mudah ke pulau-pulau ini. Pejabat Portugis butuh keahlian besar untuk menjaga posisi kontrol mereka karena persaingan di pasar

makin lama makin ketat. Tapi keahlian adalah sesuatu yang tidak dimiliki Portugis. Perilaku mereka begitu serakah sehingga sang misionaris besar, Santo Fransiskus Xaverius, melaporkan bahwa pengetahuan mereka terbatas pada penyebutan segala bentuk kata kerja *rapio*, "mencuri", dan dalam hal ini mereka menunjukkan suatu "kemampuan yang menakjubkan untuk menciptakan tata bahasa baru".[15] Sudah menjadi kebiasaan baru bagi wakil raja (*viceroy*) di Goa untuk mendeportasi orang berkelakuan buruk ke permukiman di Maluku. Para gubernur Maluku hanya berusaha mencari kekayaan untuk diri sendiri dalam waktu empat lima tahun masa tinggal mereka dengan harapan akan hidup mewah untuk selamanya sesudah itu. Antonio Galvao, yang memerintah Ternate dari 1536 sampai 1540, adalah satu-satunya pengecualian. Tentang dia dikatakan bahwa penduduk asli menyesali kepergiannya.[16]

Portugis kurang berhasil di Kepulauan Banda, pusat perdagangan pala. Pada masa itu orang Banda terhimpun dalam beberapa republik, dan sistem pemerintahan mereka dapat disebut demokratik. Mereka punya harga diri dan pekerja keras yang memiliki andil besar dalam perdagangan laut yang ada di antara Maluku dan Jawa. Bukan hanya mereka mati-matian menentang masuknya Portugis tapi mereka tidak membiarkannya membangun benteng apapun di pulau mereka atau memonopoli perdagangan rempah. Untuk mendapat bagian dalam produksi pala Portugis harus bergantung pada perdagangan normal dan pada persahabatan orang Ambon, tapi, biar bagaimanapun, satu tempat berpijak sudah diperoleh di Maluku, dan dengan sendirinya sangatlah penting bagi para pejabat raja Portugis untuk mendapatkan kontrol atas jalur-jalur laut antara Malaka dan Maluku.

Jalur perdagangan normal dari Malaka ke Maluku mengikuti pantai Kalimantan, menyeberang Laut Jawa, lalu mengikuti pantai utara Jawa dan dari sana melalui pantai selatan Sulawesi terus ke timur. Ketika Portugis menjadi lebih kenal keadaan politik di Jawa, mereka berharap dapat memikat penguasa-penguasa non-Muslim di pulau itu untuk berpihak pada mereka. Mereka memperhatikan

pergumulan yang sedang terjadi di antara penguasa-penguasa wilayah Jawa dan dengan sendirinya menafsirkan perseteruan itu sebagai perang agama antara pendukung dan penentang dominasi Islam. Serombongan duta dari penguasa Jawa Hindu yang meminta bantuan mereka melawan musuhnya meyakinkan mereka akan pengharapan mereka. Begitulah, mereka mencoba membangun persekutuan baru dengan raja Sunda Kelapa, yang kotanya mereka kunjungi pada 1522. Ketika mereka kembali lima tahun kemudian, negara kecil itu sudah kehilangan kemerdekaannya. Ia ditaklukkan raja Banten yang Muslim. Di ujung timur pulau itu, keunggulan Hindu tetap tak tergoyahkan sampai 50 tahun lagi, tapi di sini Portugis juga tidak memperoleh banyak keberhasilan. Tampaknya tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa penguasa-penguasa Jawa tidak menganggap peperangan internal mereka yang tak habis-habis itu sebagai perang agama. Bagi sebagian besar dari mereka, menerima Islam hanyalah satu cara mencapai tujuan, dan untuk waktu yang lama banyak dari mereka tetap enggan memahami Islam sebagaimana seharusnya, yakni agama yang berbeda dari semua agama lain.

Demak mencapai puncak kekuasaannya pada sekitar 1540. Enam tahun kemudian, pemimpinnya yang paling kuat terbunuh ketika bertempur melawan Hindu dari Jawa Timur. Setelah itu, posisinya diambil-alih oleh Jepara yang ternyata menjadi musuh paling berbahaya bagi Portugis selama tigaperempat abad ke-16.[17] Dua kali, pada 1550 dan 1574, pasukannya mengepung Malaka, pertama dalam persekutuan dengan Johor, kedua dengan didukung—walau setengah hati—oleh Aceh. Usahanya mendongkel Portugis dari benteng utama mereka gagal tapi pengaruhnya terasa dari Sumatra sampai Maluku, dan ke mana pun kapalnya berlayar, Islam mendapatkan keunggulan.

Portugis bukan hanya gagal mendapatkan sokongan Jawa Hindu melawan Jawa Muslim tapi, tanpa sengaja, mereka bahkan memperkokoh kedudukan Islam. Raja-raja Jawa, yang harus memilih bersekutu dengan Portugis atau bekerjasama dengan

Johor dan Demak, sekaligus harus memilih antara Islam dan Kristen tapi, dalam mengambil keputusan, mereka hampir tidak terpengaruh oleh isi dogmatik kedua agama itu. Yang penting buat mereka ialah yang mana dari kedua agama itu yang lebih berfaedah bagi mereka. Menurut mereka, Islam jauh lebih menarik daripada Kristen. Portugis, yang harus bertahan mati-matian menghadapi musuh-musuhnya, tidak lama membuat orang takut dan hormat, sehingga membuat Kristenisasi jadi urusan berisiko.

Ini tidak berarti bahwa banyak penguasa Indonesia yang menerima Islam hanya di kulitnya di kemudian hari tidak menjadi Muslim yang beriman. Begitu bagian kepulauan yang mudah terjangkau itu diketahui telah masuk Islam, mulailah berdatangan secara terus-menerus ulama-ulama dari Arabia dan pantai barat India, yang dengan senang hati diterima oleh raja-raja Indonesia yang menerima nasihat-nasihat mereka dalam urusan keagamaan. Kita tahu nama-nama beberapa ulama ini yang datang ke Aceh, Sumatra Tengah, dan Jawa Barat pada akhir abad ke-16. Di daerah-daerah ini, ajaran mereka menimbulkan kesan yang mendalam dan panjang. Mereka kurang berhasil di Jawa bagian tengah dan timur, di mana hubungan dengan dunia luar lebih jarang terjadi setelah surutnya pusat-pusat perdagangan di daerah pantai pada awal abad ke-17.[18]

Agama Kristen tampaknya lebih berkesempatan di Maluku. Di sini Gereja Katolik mendapatkan tempat berpijak di pulau Ambon, di bagian utara Halmahera, dan beberapa pulau yang lebih kecil, tapi keberadaan komunitas-komunitas ini tetap sangat rawan. Masa depan mereka bergantung pada perilaku penguasa-penguasa Portugis di benteng Ternate. Ketika kekuatan militer Portugis melemah, misi-misi itu diserang oleh Muslim, dan bila gubernur-gubernur itu dengan semangat menjaga wewenang raja, penduduk pulau-pulau berbondong-bondong mendatangi para misionaris untuk menerima baptisan. Bagi para suku bangsa yang kurang beradab ini, agama sama saja dengan kekuasaan politik. Banyak desa menganut agama Katolik sebagai tanda persekutuan

mereka dengan Raja Portugis yang Katolik, sama seperti mereka pindah ke Islam bila bergabung dengan musuh-musuh Portugis.

Seperti telah kita katakan, Maluku terbagi dalam dua fraksi politik, satu di bawah kepemimpinan Sultan Tidore, yang lain di bawah Ternate. Ternate adalah musuh Kekristenan dan karena itu musuh Portugis Katolik tapi, pada saat yang sama, bersekutu dengan para perwira raja Portugis demi kepentingan perniagaan. Kebingungan yang timbul dari kombinasi aneh ini bisa dibayangkan. Para gubernur tidak berani menentang Sultan Ternate karena takut kehilangan monopoli yang sangat menguntungkan atas ekspor cengkeh. Di Goa dan Lisbon para misionaris memprotes kebijakan yang membuat para perwira menyokong musuh-musuh Gereja Katolik.[19] Jalan keluar terbaik dari dilema ini tampaknya adalah berkonsentrasi pada usaha komersial dan keagamaan di pulau Ambon, karena pulau ini memproduksi cengkeh serta pala dan tidak tunduk pada Ternate ataupun Tidore. Lagi pula, pendirian basis kedua di Maluku akan memberikan Portugis lebih banyak kebebasan bertindak dan mengurangi ketergantungan kepada dukungan Malaka yang jauh letaknya. Sejumlah besar desa Ambon dan pulau-pulau sekitar dilaporkan menanti kedatangan para misionaris. Pada suatu ketika jumlah orang Kristen di daerah ini diperkirakan mencapai 70.000. Benar bahwa laporan yang dikirimkan ke Roma mencatat bahwa orang-orang yang baru di-Kristenkan itu sama sekali tidak mengenal doktrin Kristen. Santo Fransiskus Xaverius agung mengunjungi Ambon pada 1546 dan menyiapkan jalan bagi penerus-penerusnya, tapi jumlah imam yang betul-betul dibutuhkan untuk mengajar orang-orang yang baru masuk Kristen tidak pernah memadai. Sebagian besar dari mereka melepaskan agama Kristen secepat mereka memeluknya begitu terancam oleh orang-orang Muslim. Satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ini adalah penghancuran kekuasaan Ternate. Tapi yang dilakukan para gubernur Portugis itu adalah berusaha berkompromi dengan seorang Sultan yang selalu terbukti lebih cerdik daripada mereka dalam setiap kontroversi.

Sultan Hairun dari Ternate adalah salah satu tokoh Indonesia paling mengesankan pada abad ke-16. Ketika dia ditangkap oleh Portugis berdasarkan alasan yang tidak memadai, dia menuntut dikirimkan ke Goa agar seluruh kasusnya diselidiki, dan dengan ketrampilannya bermanuver dia memaksa Portugis menempatkannya kembali di kerajaannya. Ketika Portugis memutuskan mendirikan benteng kedua di Ambon, dia berhasil membujuk mereka untuk menunda pembangunan dan, sambil memenangkan persahabatan dari para perwira dengan memberikan kepada mereka kesempatan penuh untuk memperkaya diri, pasukannya dengan ganas menyerbu permukiman-permukiman Kristen yang sedang bertumbuh dan membuat ribuan orang meninggalkan Gereja. Dia memperluas kekuasaannya semakin jauh sehingga semua pulau dari Mindanao di utara sampai Ambon di selatan mengirimkan upeti kepadanya. Dengan demikian, dia merongrong kedudukan Portugis di Maluku. Pada 1565 seluruh misi itu hancur. Beberapa imam terbunuh, dan sejumlah orang asli Kristen lebih memilih mati daripada masuk Islam. Dalam keadaan itu para misionaris meminta pertolongan wakil raja Portugis di Goa, yang mengirimkan armada untuk memulihkan tata tertib. Benteng di Ambon kini dibangun, dan sekali lagi para penghuni pulau-pulau berbalik ke Gereja untuk memperoleh dukungan. Keadaan tampaknya aman, ketika gubernur Maluku, karena keserakahannya yang luarbiasa, mengakibatkan keruntuhan bagi kekuasaan Portugis. Dia menganggap kekuasaan Sultan Hairun telah rontok dan mengira waktunya sudah matang untuk merampas dari Sultan itu bagiannya yang sah atas keuntungan perdagangan cengkeh. Hairun bertahan, dan perang tampaknya tidak terhindarkan, ketika para perantara yang berkepentingan berhasil mengusahakan perdamaian. Dengan sumpah khidmat, pembaruan persahabatan diteguhkan. Sultan bersumpah dengan tangannya di atas Alquran, tangan gubernur itu di atas Alkitab. Keesokan harinya, ketika Sultan Hairun datang berkunjung ke benteng Portugis, dia dibunuh dengan keji (1570). Dalam

beberapa jam Ternate bangkit dalam pemberontakan, dan Sultan yang baru, Baabullah, bersumpah akan membalaskan kematian ayahnya dengan mengusir Portugis dari Maluku. Demikianlah, kekuasaan Portugis terguncang persis pada saat persaingan asing mulai mengancam.

Dari sudut pandang politik, Portugis hanya memperoleh sedikit kemajuan. Mereka tidak punya permukiman di luar Malaka dan Maluku. Malaka terus-menerus terancam sejak Aceh menjadi kekuatan penting. Beberapa kali Aceh menyerbu pusat kekuatan Portugis sendiri. Gubernur Portugis berusaha mengatasi musuhnya itu dengan menjalin persekutuan dengan negara-negara Sumatra lain, tapi sia-sia. Dia menjalin hubungan dengan Batak, satu-satunya suku bangsa pagan yang masih tersisa di pulau itu. Tapi semua usahanya tidak berbuah.

Walaupun kedua permukiman Portugis di Malaka dan Maluku terus-menerus terancam, kegiatan komersial mereka makin lama makin luas. Setelah 1545, Portugis memperoleh bagian dalam perdagangan di Banten, dari situ setiap tahun satu setengah juta kilogram lada dikapalkan ke Cina dan India. Mereka mengikat perjanjian dengan Sultan Brunei, yang sudah mereka hubungi ketika mereka mencoba menemukan jalur laut baru di sebelah utara Kalimantan dari Malaka ke Maluku, untuk menghindari jalur berbahaya di Laut Jawa. Portugis memberikan nama kota Brunei kepada seluruh pulau Kalimantan. Jalur baru ke Maluku juga menghasilkan kontak pertama orang Eropa dengan pulau Sulawesi. Portugis tidak pernah menyadari bahwa berbagai bagian Sulawesi yang mereka temukan semuanya adalah bagian pulau yang sama. Mereka percaya semuanya adalah bagian dari sekumpulan pulau yang mereka beri nama "Celebes", suatu nama yang tidak dikenal penduduk aslinya dan yang asal-usulnya tidak dapat ditelusuri.

Keuntungan besar yang diperoleh Portugis memancing bangsa-bangsa Eropa lain datang ke Indonesia. Jalan ke India bukan rahasia. Portugis memakai jasa banyak sekali pelaut asing,

dan peta navigasi dapat dibeli di Lisbon. Pada 1530 seorang Prancis, Jean Parmentier dari Dieppe, seorang terpelajar dan ahli geografi sekaligus pedagang ternama, meninggalkan pantai Normandia untuk menjelajahi Hindia. Dua di antara awak kapalnya bisa bahasa Melayu dan pasti sudah pernah mengawaki kapal Portugis. Dari sudut pandang pelaut, pelayaran itu sangat berhasil, karena Parmentier mencapai Madagaskar dalam empat bulan, dan tiga bulan kemudian, bagian barat Sumatra. Tapi sebagai usaha perniagaan, ia gagal total dan untuk waktu yang lama membuat orang Prancis enggan mengulangi upayanya.[20]

Lebih banyak kesulitan disebabkan Spanyol. Pemerintah Portugis secara resmi memprotes kunjungan kapal Magellan ke Maluku. Mereka anggap itu pelanggaran terhadap Perjanjian Tordesillas, yang disetujui pada 7 Juni 1494 oleh Raja Spanyol dan Portugis, yang membagi dunia dalam dua lingkup kepentingan yang sama. Suatu kongres para ahli dari kedua bangsa membahas peristiwa 1524, tapi orang-orang ini, yang paling ahli dalam geografi dan navigasi dari kedua negeri, bahkan tidak bisa sepakat mengenai letak persis Maluku. Perhitungan Portugis dan Spanyol berbeda kira-kira 47 derajat.

Spanyol memutuskan untuk memantapkan klaim mereka sekali lagi dan mengirim armada yang terdiri atas tujuh kapal ke barat lewat Selat Magellan, tapi hanya empat yang berhasil melewati selat itu. Dan hanya dua yang akhirnya sampai ke Kepulauan Indonesia. Satu terdampar di pantai Mindanao, yang lain mencapai Maluku, tapi dengan kondisi begitu buruk sehingga harus ditinggalkan. Orang-orang Spanyol itu berlayar ke Tidore, di situ Sultannya menerima mereka dengan gembira dengan harapan memakai mereka melawan Ternate dan Portugis. Ada perdamaian antara Spanyol dan Portugis di Eropa, tapi di bawah bendera Ternate dan Tidore, kedua bangsa tersebut berperang dahsyat di Timur Jauh, tempat segelintir orang Spanyol ternyata sanggup menandingi kekuatan Portugis. Gubernur Portugis di Malaka segera mengirimkan bala bantuan, tapi ekspedisi itu

menghasilkan kejutan baru bagi navigator-navigator Portugis. Ketika mereka telah melewati utara Kalimantan, karena salah perhitungan mereka melampaui Maluku dan mendarat di pantai utara pulau Papua, yang dengan demikian ditemukan oleh orang Eropa.

Namun, Spanyol tidak berhasil mendapatkan tempat berpijak di Tidore. Semua dukungan terhadap mereka harus datang dari Amerika, tempat Hernando Cortez yang termasyhur itu baru saja menaklukkan Meksiko. Dia mempersiapkan tiga kapal, tapi hanya satu yang tiba di Maluku, pada waktu yang tepat untuk bergabung dengan jatuhnya benteng Spanyol yang kecil. Sementara itu, pemerintah-pemerintah di Eropa menyetujui suatu pembatasan baru lingkup kepentingan, di situ Spanyol berjanji menghentikan eksplorasi mereka 17 derajat sebelah timur Maluku. Namun, sekali lagi mereka muncul di Filipina 30 tahun kemudian dan, dengan mengabaikan segala protes, merebut kepulauan itu untuk Raja Felipe dari Spanyol dan mendirikan kota Manila pada 1571.[21] Begitulah mereka dengan kokoh bercokol di utara Maluku ketika revolusi besar menentang Portugis terjadi setelah Sultan Hairun gugur.

Selama lima tahun benteng Portugis di Ternate terkepung. Orang-orang Indonesia itu tidak berani menyerbu tembok benteng dan mereka tidak sanggup memotong semua komunikasi dengan dunia luar, tapi mereka tidak pernah memberikan kesempatan bernafas kepada garnisun itu. Benteng Ambon ditinggalkan, dan jejak terakhir kekuasaan Portugis sudah hampir lenyap kalau saja tidak diselamatkan oleh Vasconcellos yang gagah berani dan tidak kenal belas kasihan, yang menghimpun kekuatan yang terdiri atas orang Kristen setempat, membangun benteng baru, dan berperang melawan semua orang Muslim di sekitarnya. Ternate jatuh pada 1574, dan selama itu tidak ada pertolongan yang dikirimkan dari Malaka atau Goa. Begitulah, prestise Portugis runtuh total dan komunitas Kristen di Maluku hancur. Kekuasaan Sultan Baabullah di Ternate mencapai puncak. Seorang misionaris

Italia memperkirakan bahwa ada 72 pulau yang tunduk kepada kedaulatan Ternate pada waktu itu.

Sementara Portugis kehilangan pengaruh, Spanyol memperluas kekuasaan mereka semakin ke selatan. Mereka menghentikan perluasan Islam oleh Sultan Brunei. Mereka hanya menunggu waktu ketika mereka akan dapat mengambil-alih kontrol atas Maluku. Mereka pasti sudah berbuat begitu kalau saja tidak terjadi perubahan besar di Eropa yang membuat hal itu tidak perlu. Pada 1580 Raja Felipe II dari Spanyol memasukkan Portugal dalam wilayah kekuasaannya. Dia menghormati semua hak istimewa rakyat barunya dan dengan tegas melarang perwira-perwiranya di Filipina campur tangan di Maluku kecuali kalau orang-orang Portugis di situ meminta bantuan.

Sebagai pendahulu kedatangan bangsa-bangsa lain, Sir Francis Drake muncul di Maluku, dan di situ dia disambut hangat oleh Sultan Ternate, yang menganggap Drake sekutu potensial untuk melawan Portugis. Lagi pula, Sultan juga untung jika lebih banyak orang Eropa berdagang dengan Maluku, karena persaingan akan menaikkan harga, yang sudah meningkat tiga kali lipat sejak kedatangan Portugis. Sir Thomas Cavendish adalah orang Inggris kedua yang mengunjungi Hindia, tapi dia cuma memotong dari utara ke selatan melalui Selat Makasar dan Bali, yang lebih jarang dikunjungi di Indonesia. James Lancaster, pengunjung berikut dari Inggris, sangat merendahkan reputasi Britania dengan tindakan perompakannya di Selat Malaka, dan ini memberikan kesempatan kepada Portugis untuk mendiskreditkan semua orang asing Eropa di Indonesia.

Ketika Portugis pertama kali ke Indonesia mereka dalam beberapa tahun saja memperoleh reputasi tak terkalahkan. Lima puluh tahun kemudian prestise itu sudah hampir tidak tersisa. Pada 1585 situasi bahkan tampak tanpa harapan, tapi suatu perjanjian damai yang disepakati di Aceh pada 1587 memberi mereka sedikit kelegaan, paling tidak di bagian barat Kepulauan Indonesia. Persekutuan dengan Sultan Tidore dan wafatnya musuh

bebuyutan mereka, Sultan Baabullah, menolong keadaan mereka di Maluku. Tapi tampaknya Portugis tidak punya energi untuk membangun kembali imperium mereka. Bahkan misi-misi Katolik tidak bisa mengandalkan dukungan Portugis. Dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Portugis, sekelompok Pastor Dominikan mulai menyebarkan agama di Kepulauan Sunda Kecil, khususnya di Flores dan Timor, tempat pedagang-pedagang Portugis biasanya datang dua kali setahun untuk membeli kayu cendana yang terkenal itu, yang bernilai tinggi karena minyaknya dan dipakai sebagai pengharum di Hindustan. Tapi gubernur Malaka tidak pernah menganggap perlu memantapkan kekuasaannya di kepulauan Sunda Kecil. Para misionaris mencoba menghimpun orang Kristen setempat untuk mempertahankan diri tapi hanya berhasil sebagian dalam menjaga mereka dari pengaruh penyebar agama Islam dari Jawa. Tapi misi Dominikan itu hidup terus sampai masa VOC.[22]

Bisa dimengerti bahwa perjuangan hebat untuk selamat yang dialami Portugis di Malaya dan Maluku membuat mereka tidak punya banyak kesempatan untuk campur tangan dalam urusan lain di Indonesia. Di Jawa, persaingan untuk supremasi (secara ideologis, pergulatan untuk menjadi penerus Majapahit) berlangsung selama paruh kedua abad ke-16—kalau kita menerima penjelasan penulis-penulis babad yang lebih kemudian (yaitu kisah-kisah semihistoris dari abad ke-17 dan ke-18). Tulisan-tulisan Jawa ini menyebutkan banyak nama penguasa dan daerah tapi cerita mereka sangat diwarnai konsep mitologis dan alegoris hingga membuat suatu rekonstruksi peristiwa yang sebenarnya hampir tidak mungkin. Nama-nama kuno, seperti Kediri dan Mataram, muncul lagi. Antara 1560 dan 1590 daerah Pajang di Jawa bagian tengah (di zaman modern termasuk kesultanan Surakarta) tampaknya menduduki tempat pertama. Kebangkitannya terjadi seiring pelemahan kerajaan-kerajaan pantai di Jawa. Biasanya, pelemahan ini disebabkan oleh usaha Portugis untuk menghancurkan perdagangan yang sudah berlangsung sejak zaman

Indonesia kuno dengan Maluku, tapi ini jelas bukan satu-satunya alasan, dan mungkin bukan alasan utama. Pajang digantikan oleh Mataram (kini wilayah Yogyakarta). Suta-Wijaya, lebih dikenal dalam tradisi Jawa sebagai *Senopati*, "panglima besar", dikatakan adalah pendiri negara baru itu dan pendiri Keratonnya yang pertama. Babad-babad itu, sejarah puja-puji dan mitis Jawa, dikarang di istana penguasa-penguasa Mataram di kemudian hari, menyatakan Senopati mahir melakukan segala macam perbuatan ajaib dan heroik. Mereka menekankan hubungan kekeluargaan pendiri negara baru itu dengan dinasti-dinasti kerajaan Jawa kuno, tapi sumber-sumber lain menunjukkan bahwa Senopati atau penakluk yang di kemudian hari dianggap nenek moyang dinasti Mataram mungkin adalah seseorang dengan latarbelakang rendahan yang berhasil menjadi raja dengan memanfaatkan kekacauan politik yang ada. Bagaimanapun keadaannya, kita bisa dengan pasti menyimpulkan bahwa pada pergantian abad ke-16 menuju abad ke-17, pusat kekuatan politik Jawa telah beralih sekali lagi ke pedalaman.[23] Konsekuensinya bagi daerah-daerah pantai adalah bencana. Penguasa-penguasa di pedalaman itu dan para bangsawannya terus hidup mengikuti tradisi kuno dan tidak ada tempat berarti bagi para saudagar di dunia kesatriaan itu. Kepada duta-duta Belanda pertama yang tiba di istananya, seorang keturunan penguasa Mataram menyatakan: "Kalian boleh berdagang dengan bebas di negeriku tanpa membayar pajak apapun, karena aku bukan pedagang seperti raja-raja Banten dan Surabaya, yang takut disaingi olehmu".

Pada tahun-tahun yang sama ketika Jawa sekali lagi menjadi negara pedalaman, satu kekuatan kelautan baru bangkit di bagian Kepulauan Indonesia yang sebelumnya tidak penting: di pantai barat daya Sulawesi. Di sini kota Makasar dan daerah di dekatnya, Gowa, telah aktif dalam pelayaran dan perdagangan paling tidak dari awal abad ke-16. Tawarikh kerajaan Gowa mencatat kedatangan pedagang Melayu yang berdiam di Makasar pada sekitar 1540. Orang-orang ini melayarkan kapal-kapal mereka

ke Johor di barat, ke Maluku di timur dan, kemudian, bahkan ke pantai Australia di selatan. Tawarikh yang sama menunjukkan bahwa orang Makasar dan Gowa pastilah sudah kenal Islam paling tidak seperempat abad sebelum mereka menganut agama baru itu. Sementara itu, pedagang-pedagang Portugis menemukan jalan ke tempat perdagangan yang baru bertumbuh ini. Mereka segera diikuti Belanda pada sekitar 1600. Jadi raja Gowa pastilah sadar benar makna tindakannya, ketika pada 22 September 1605 dia secara resmi menyatakan penerimaannya terhadap ajaran-ajaran Nabi.[24] Bahwa secara persis tanggal itu dicatat dalam catatan kerajaan menunjukkan bahwa itu dianggap bukan hanya keputusan religius tapi juga politis. Rakyat mengikuti penguasa dan begitulah Makasar menjadi benteng baru Islam di Indonesia. Makasar tetap begitu selama lebih daripada tigaperempat abad.

BAB 5

PEDAGANG DARI NEGERI RENDAH

PADA 5 Juni 1596, empat kapal Belanda mendekati pantai barat Sumatra. Delapan belas hari kemudian mereka mencapai pelabuhan Banten di Jawa barat daya. Baru saja mereka melempar jangkar, beberapa pedagang Portugis naik ke kapal untuk menghormati pendatang baru itu, "menunjukkan segala kesopanan dan menjelaskan kondisi Jawa kepada mereka dan memuji-muji kesuburan dan kekayaan besar pulau itu". Setelah beberapa saat pedagang itu pergi dengan sopan, dihormati oleh pada komandan Belanda, yang menembakkan salut meriam tiga kali.

Inilah cerita perjumpaan pertama antara orang Belanda dan Portugis di Hindia, sebagaimana dikisahkan oleh salah satu pelaut Belanda. Mereka menunjukkan persahabatan satu sama lain dan tahu bagaimana menyembunyikan perasaan sejati mereka. Bangsawan-bangsawan Jawa dari Banten berkunjung ke kapal-kapal itu pada hari berikut. Mereka juga bersahabat, dan mengundang pedagang-pedagang Belanda itu berniaga dengan bebas di pelabuhan mereka. Lantas serombongan perahu yang ditumpangi pedagang Jawa, Cina, dan Gujarat mengelilingi kapal-kapal Belanda itu di dermaga. Sebentar saja geladak berubah jadi pasar. Cerita Belanda itu berlanjut: "Tidak ada yang salah

dan semuanya sempurna kecuali apa yang salah dengan kami sendiri."[1]

Memang, ada yang salah dengan para awak kapal tersebut. Pelayaran itu memakan waktu 14 bulan, hampir dua kali lipat waktu yang sebetulnya dibutuhkan, dan dari 249 awak, 145 telah mati sebelum sampai di Timur. Sebagian besar kemalangan ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan dan pengetahuan navigasi yangmemadai. Terjadi perselisihan terus-menerusantara para kapten dan *commiezen* (para pedagang yang berwenang atas segala urusan keuangan dan perniagaan). Salah satu pemberontak ini telah dirantai dan mengikuti seluruh penjelajahan laut-laut Indonesia dengan terkunci dalam kabin kecil. Ada kapten mati di Indonesia, mungkin diracun oleh pedagang kepala armada itu, yang kemudian ditangkap oleh awaknya sendiri. Perilaku kasar, beringas, dan gila-gilaan membuat orang-orang Belanda pertama ini jatuh ke dalam berbagai kesulitan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Pernah mereka hampir kehilangan semua kapal karena tidak hati-hati dan pada saat lain, karena kecurigaan berlebihan, mereka membunuh seorang pangeran Jawa yang sama sekali tidak bermaksud jahat, dengan banyak pengikutnya. Sebagian besar kesalahan ini harusditimpakan pada pedagang kepala armada itu, Cornelis de Houtman.

Cornelis de Houtman ini menghabiskan banyak tahun di Lisbon.[2] Dia berlagak sangat paham segala hal yang berkaitan dengan Hindia dan tahu segala sesuatu tentang navigasi di perairan Timur. Pada dua perjalanan ke Hindia, dia ternyata seorang pelagak dan bajingan. Tapi, dia berhasil memperoleh dukungan dari sekelompok pedagang kaya di Amsterdam. Pedagang-pedagang ini memperlengkapi ekspedisi pertama ke Indonesia. Kisah perusahaan dagang pertama dengan Hindia Timur ini telah sering kali ditulis, dan hampir semua buku teks mengulang versi cerita yang sama, menghubungkan ekspedisi pertama ini dengan suatu dekrit yang dikeluarkan Raja Felipe II dari Spanyol dan Portugis yang menutup pelabuhan Lisbon dari semua pedagang

Inggris dan Belanda. Karena dekrit ini membuat mustahil mendapatkan rempah-rempah dan produk lain dari Timur di Lisbon, Belanda terpaksa pergi ke Hindia. Cerita ini masuk akal, tapi hanya benar sebagian.

Jauh sebelum 1594, ketika Raja Felipe menandatangani dekrit pengenyahan, Belanda sudah berlayar ke Samudra Atlantik sampai jauh. Mereka berdagang di pantai barat Afrika dan mengunjungi Hindia Barat dan Brazil, entah di bawah bendera mereka sendiri atau di bawah bendera Portugis. Selama bertahun-tahun orang Belanda sudah menjelajahi jalur timur laut yang bisa membawa mereka ke Cina sepanjang rute utara Siberia. Pada 1584 satu kapal Belanda mengunjungi Nova Zembla, dan 10 tahun kemudian empat kapal masuk ke laut Arktik, dan dari situ mereka berharap bisa mendapatkan jalan ke Asia Timur. Alasan mereka menunda-nunda menyusuri rute mengelilingi Tanjung Harapan (*Cape of Good Hope atau sebelumnya bernama Cape Colony di Afrika Selatan – pen.*) bukanlah karena takut pada Portugis tapi karena kesulitan navigasi pada rute ini. Ahli geografi Belanda mengenal baik segala rincian navigasi di Atlantik Selatan dan Samudra Hindia. Ahli besar mereka akan urusan Asia adalah Jan Huyghen van Linschoten, yang hidup bertahun-tahun di Goa dan dengan seksama mencatat segala informasi yang bisa dihimpunnya. Setelah pulang dia menerbitkan karyanya *Itinerario*, suatu jabaran geografis mengenai dunia dengan segala informasi yang diperlukan untuk penjelajahan ke India dan Amerika.[3] Tidak diragukan, para pedagang dari Belanda pasti bisa menemukan jalan ke Kepulauan Rempah-Rempah cepat atau lambat. Bahkan seorang raja kecil Jerman, Herzog von Lauenburg, merancang ekspedisi besar ke Asia pada awal 1592.[4] Dekrit Raja Felipe II itu mempercepat perkembangan tapi tidak menyebabkannya.

Keempat kapal De Houtman tersebut merupakan perintis dari armada besar yang akan datang. Bagi Indonesia, mereka hanyalah pelawat yang datang dan pergi dan segera dilupakan. Mereka terlihat di Banten, tempat mereka menyepakati suatu perjanjian

dengan Sultan. Inilah perjanjian pertama yang pernah disepakati antara orang-orang Belanda itu dan seorang raja Indonesia, karena itu isinya bisa disebutkan berikut ini:

> Atas rahmat Allah, Tuhan kami, dan berkat kehendak kalian, Tuan-Tuan, bahwa kalian datang mengunjungi kami dengan empat kapal, dan karena kami telah melihat surat paten, yang oleh Yang Mulia Pangeran Maurits van Nassau dengan segala hormat telah diperintahkan untuk dipertunjukkan kepada kami, yang dengan surat itu kami mengetahui bahwa Yang Mulia menawarkan segala persahabatan dan persekutuan dengan kami yang persahabatannya akan diteguhkan oleh kalian, kami sangat puas untuk menjalin persekutuan dan persahabatan yang langgeng dengan Yang Mulia Pangeran dan dengan kalian, tuan-tuan yang terhormat, dan kami bersumpah akan memelihara persahabatan dan persekutuan ini dan untuk memerintahkan semua rakyat kami untuk melakukan hal yang sama.[5]

Beberapa minggu kemudian persahabatan itu rusak oleh perilaku kasar Cornelis de Houtman. Persahabatan itu segera diperbaiki, tapi ketika pedagang-pedagang Belanda itu meninggalkan tempat itu, para pesaing Portugis merasa mereka tidak perlu takut terhadap persaingan semacam itu. De Houtman berlayar di sepanjang pantai utara Jawa. Dia mengunjungi kota Sunda Kelapa atau Jayakarta, tempat yang dia anggap lebih menyenangkan daripada Banten dan di situ, 20 tahun kemudian, Batavia dibangun. Di utara Surabaya kapal-kapal itu diserang orang Jawa yang bermusuhan dan begitu banyak awak kapal yang tewas sehingga salah satu kapal harus ditinggalkan. Di pantai Madura, Belanda melakukan kekerasan tanpa alasan. Satu-satunya pengalaman menyenangkan yang dialami ekspedisi yang sial itu di Hindia Timur ialah kunjungan ke pulau Bali. Tampaknya, keindahan pulau itu begitu menawan bagi orang-orang Belanda sehingga dua awak hengkang. Dari Bali skuadron itu melanjutkan pelayaran di selatan Jawa dan kembali ke Eropa.

Sukacita besar terjadi di Belanda, walaupun ekspedisi itu

hanya menghasilkan sedikit keuntungan. Para pemilik kapal mengerti bahwa satu ekspedisi baru di bawah kepemimpinan yang lebih baik bisa membawa keberhasilan besar. Bagi Portugis, kehadiran kapal-kapal Belanda di Asia itu mengagetkan. Sejak 1580, Portugal telah dipersatukan dengan Spanyol di bawah Raja Felipe II, yang merupakan musuh bebuyutan bagi kemerdekaan Belanda. Sejak saat itu, Portugis terlibat dalam perang antara Raja Felipe dengan mantan rakyatnya. Demikianlah, Portugis takut bukan hanya terhadap persaingan pedagang Belanda dalam perdagangan rempah, tapi juga serangan terbuka terhadap permukiman mereka di Asia. Wakil raja di Goa, Francesco da Gama, langsung mengambil langkah mencegah ekspedisi lebih jauh dari musuh itu di Indonesia. Dia memperlengkapi dua *galleon*—kapal layar besar—dan dua *galley*, kapal dayung bergeladak rendah dari jenis serupa yang dipakai di Laut Tengah. Keempat kapal itu dijadikan satu armada dengan sejumlah kapal yang lebih kecil dan dipercayakan di bawah komando Lourenzo de Brito. Wakil raja itu memberikan perintah tegas bahwa armada ini tidak boleh campur tangan dalam pelayaran orang asli dan dalam peperangan antar-raja Indonesia. Dia mengerti sepenuhnya bahwa simpati dan kerjasama orang Indonesia penting untuk menjaga kedudukan Portugis dalam keadaan darurat ini. Tapi dia memilih komandan yang salah.[6]

Ketika de Brito tiba di dermaga Banten dan menanyakan kapal-kapal Belanda itu, dia diberi tahu oleh orang Jawa bahwa musuh itu sudah berlayar ke barat dan mungkin bisa ditemukan dekat Ceylon. Sebenarnya De Houtman sudah pulang ke Belanda. Don Lourenzo merasa perlu memberikan pelajaran kepada raja Banten, agar dia jangan lagi berhubungan dengan pedagang Eropa asing, yang dia sebut, untuk gampangnya, "perompak Inggris". Sir James Lancaster, yang mengunjungi Kepulauan Indonesia beberapa tahun sebelumnya, meninggalkan reputasi buruk dan, karena itu, orang Portugis ini merasa bahwa merupakan politik yang bagus untuk membuat Belanda memperoleh reputasi yang sama.

Berlawanan dengan perintah yang diterimanya, Don Lourenzo menyerang kapal-kapal layar Jawa dan Cina dan menuntut pembayaran uang dalam jumlah besar dari Sultan Banten. Di luar dugaan, perlawanan Jawa ternyata berhasil. Dua kapal Portugis tertawan, dan dengan begitu laksamana yang malang itu berhasil mencapai persis kebalikan dari apa yang diperintahkan kepadanya. Bukannya memperkuat prestise Portugis, Lourenzo menghancurkannya untuk selamanya. Kalah dan terpukul, dia mundur dengan sisa armadanya ke Malaka, di situ dia tidak berbuat apa-apa sampai armada kedua Belanda muncul di perairan Indonesia.

Segera setelah De Houtman pulang, para pemilik kapal Amsterdam memperlengkapi armada kedua, kali ini dengan delapan kapal. Kelompok pedagang lain mengikuti contoh mereka, dan dalam tahun 1598 saja lima ekspedisi, dengan jumlah total 22 kapal, meninggalkan Belanda menuju Asia bagian timur.[7] Tiga belas kapal mengambil rute mengelilingi Tanjung Harapan, sementara sembilan mencoba lewat jalur Selat Magellan. Dari 13 kapal yang berlayar ke timur, 12 selamat dalam perjalanan. Satu karam setelah berlayar tidak lebih jauh dari Dover. Dari sembilan kapal yang berlayar ke barat, sebagian tidak pernah berhasil lewat Selat Magellan. Satu mencapai Jepang, dan dirampas oleh pemerintah Jepang. Satu ditawan Spanyol di Amerika Selatan, satu lagi oleh Portugis di Maluku. Hanya satu kapal, dipimpin Oliver van Noort mencapai Hindia, dan, dengan kembali melalui Tanjung Harapan, menjadi kapal pertama Belanda yang mengelilingi dunia. Kedua ekspedisi yang berlayar ke barat itu menimbulkan kerugian bagi para pemilik kapal lebih daripada setengah juta gulden. Dari tiga armada yang mengambil jalur timur, satu rugi besar, yang kedua untung sedikit, dan hanya yang ketiga memberikan keuntungan besar, hampir 300 persen. Ini membuktikan bahwa pelayaran-pelayaran pertama orang Belanda ke Indonesia tidak selalu menguntungkan seperti yang digembar-gemborkan tradisi. Tapi energi para pemilik kapal tampaknya tidak habis-habis.

Dalam tiga tahun setelah kembalinya ekspedisi pertama,

Banten
Jakarta
Cirebon
Jepara
Demak
Tuban
Madura
Gresik
Surabaya
Mataram
Kediri
Malang
Balambangan
Bali
Perkiraan Perbatasan Bagian
Barat Mataram pada sekitar 1629
Perkiraan Perbatasan Bagian Timur
Mataram pada sekitar 1629
JAWA PADA ABAD KE-16
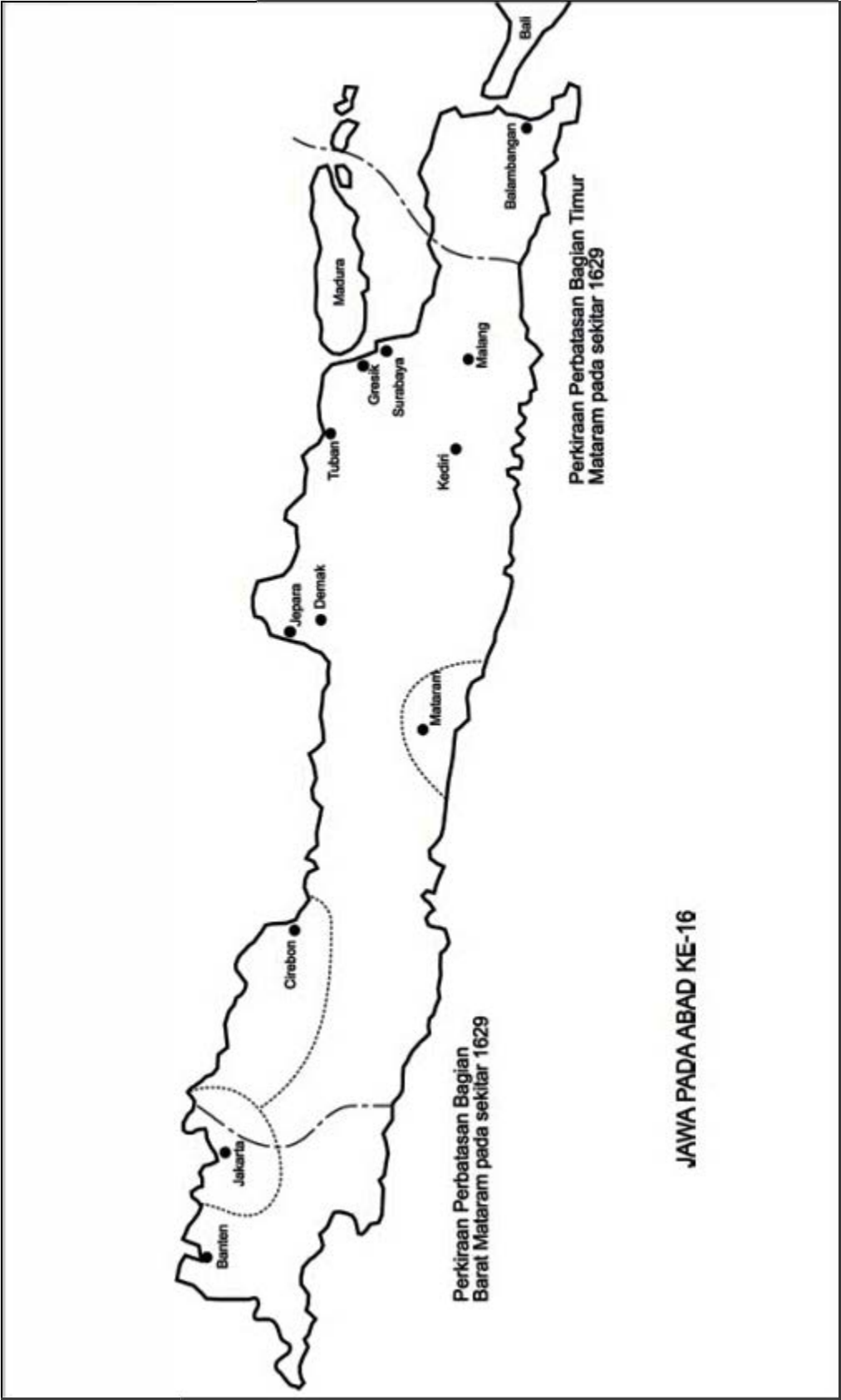
kapal-kapal Belanda sudah muncul di pantai barat Sumatra dan dekat Aceh, mengunjungi Jawa dan Maluku, tampak di pantai utara Brunei di Kalimantan, dan di Manila di Filipina. Mereka mengunjungi pantai Siam dan Indocina dan mencoba membuka hubungan dengan orang Cina di Kanton. Mereka tampak di Jepang pada 1600.[8] Mereka berdagang di Ceylon pada 1602 dan menjelajahi pantai Australia bagian utara pada 1605.[9] Tiga skuadron berlayar dari Belanda pada 1599 dan dua lagi pada 1600. Pada 1601 empat ekspedisi pergi ke Indonesia. Kecuali satu, semua ekspedisi ini tidak punya tujuan lain selain berdagang. Hanya Van Noort yang membuat pelayaran keliling dunianya jadi perjalanan perompakan, yang sangat merugikan Spanyol, tapi yang pada dirinya sendiri juga mengalami kesusahan. Jacob van Neck, laksamana armada kedua itu, melaporkan dengan puas bahwa keuntungan besar telah diperoleh dengan pelayarannya, bukan dengan penindasan yangtidak adil atau tirani, tapi melalui perdagangan yang jujur dengan bangsa-bangsa asing.[10]

Empat kapal dari armada Van Neck adalah skuadron Belanda pertama yang mengunjungi Maluku. Di sini orang Belanda membuka hubungan dagang biasa dengan penduduk, tawar-menawar dengan kepala pelabuhan tentang bea cukai yang harus mereka bayar, dan menjajakan dagangan mereka di gudang di pantai. Dari pagi sampai malam pelaut-pelaut Belanda itu sibuk berjual beli. Dari segala penjuru kepulauan orang datang berbondong-bondong menyaksikan barang dagangan yang ditawarkan: helm, perisai dada, kaca, beludru, dan *Norembergerie* (barang mainan buatan Jerman). Orang Belanda begitu disukai di kalangan orang Banda sehingga mereka meninggalkan beberapa orang untuk tinggal, dengan dagangan bernilai lebih daripada 3.800 gulden. Orang-orang dan dagangan itu dipercayakan pada persahabatan penduduk pulau itu, yang dengan setia melindungi mereka sampai armada baru datang kembali mengunjungi pantai pulau mereka. Bagian dari skuadron yang sama diterima baik oleh Sultan Ternate. Di sini dan di pulau Ambon pos-pos dagang

lain didirikan. Di mana-mana orang-orang Belanda itu disambut dengan hangat. Penguasa-penguasa Maluku berharap akan memakai mereka sebagai sekutu dalam perang mereka melawan Portugis, tapi undangan mereka untuk bergabung dalam aksi penyerangan ditolak dengan sopan oleh laksamana-laksamana Belanda. Perniagaan, bukan perang, yang menjadi tujuan para pemilik kapal itu, dan karena itu para komandan sangat berhati-hati untuk menghindari segala kegiatan militer, walaupun salah satu dari mereka menyatakan dengan terbuka bahwa "di mana dia dan kawan-kawannya mau mempertaruhkan nyawa, para direktur itu lebih baik juga mau mempertaruhkan kapal dan uang mereka".[11]

Tempat-tempat yang tidak menerima orang-orang Belanda itu dengan baik hanyalah Aceh dan Madura. Di Madura kebencian terhadap tingkah laku brutal De Houtman memustahilkan perniagaan yang bersahabat. Aceh dikunjungi dua kapal dari Zeeland pada Juni 1599. Sekali lagi pemimpin skuadron ini ialah Cornelis De Houtman, maka dapat diperkirakan akan muncul masalah. Kali ini kecerobohannya terbukti fatal bagi dirinya sendiri. Dia terbunuh dalam serangan terhadap kapalnya di dermaga Aceh. Saudaranya, Frederick, ditawan selama dua tahun, dan selama itu ia terus terancam akan dibunuh. Tapi dia berkesempatan menyusun satu kamus Melayu-Belanda dan satu terjemahan Melayu dari doa-doa Kristen.[12]

Bagi raja-raja Indonesia, kehadiran pedagang-pedagang Belanda itu sangat menguntungkan. Persaingan antara Belanda dan Portugis, dan lebih-lebih lagi antara perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang berbeda-beda melipatduakan harga lada, cengkeh, dan pala dalam beberapa tahun. Para kepala pelabuhan setempat (setiap desa punya satu atau dua) menaikkan bea pelabuhan setiap bulan. Belanda memprotes tapi selalu terburu-buru untuk mendapatkan kargo yang baik dan karena itu bersedia membayar harga yang diminta. Secara ekonomis, Belanda punya kedudukan lebih kuat daripada Portugis. Kalau raja Portugal

dan Spanyol bermaksud mempertahankan monopolinya atas rempah-rempah, maka ia harus mengusir orang Belanda dengan kekerasan; tapi persis pada saat itu armada Inggris sedang mengepung pelabuhan Lisbon sehingga tidak ada bantuan yang bisa dikirimkan ke Hindia. Pada saat yang sama pedagang Belanda mulai memperluas lingkup pengaruh mereka.

Pada September 1600, suatu perjanjian disepakati antara Laksamana Steven van der Haghen dan penduduk pulau Ambon.[13] Itu adalah perjanjian persekutuan formal melawan Portugis, yang disepakati orang Belanda dan Indonesia secara setara. Belanda berjanji mendirikan benteng di Ambon dan melindungi penduduknya, sedangkan mereka menjanjikan monopoli Belanda dalam perdagangan rempah. Tapi perjanjian ini prematur. Benteng itu tidak dapat dipelihara, dan akibatnya hak monopoli tidak diperbarui dalam perjanjian berikutnya. Kontrak-kontrak pertama antara orang Belanda dan Indonesia ini punya kepentingan historis besar karena menjadi dasar untuk perkembangan politik seluruh Kepulauan Indonesia di masa depan. Ada kesulitan-kesulitan menarik muncul dalam negosiasi-negosiasi ini. Orang Indonesia ingin informasi yang memuaskan tentang kekuatan dan kepribadian raja Belanda sebelum menyepakati perjanjian. Sayang, tidak ada raja Belanda. Alih-alih bersusah-payah menjelaskan kepada orang Indonesia sistem rumit pemerintahan yang ada di Negeri-Negeri Rendah itu, kaum republikan Belanda yang gigih itu demi alasan bisnis mempromosikan *stadhouder* (kepala magistrat) mereka, Maurits, Pangeran Oranje, ke posisi raja.

Pangeran itu punya minat besar terhadap penjelajahan di Hindia dan selalu bersedia mengeluarkan surat-surat rekomendasi untuk para komandan armada Belanda. Surat-surat ini diterjemahkan kepada para raja itu—mungkin menurut terjemahan yang disesuaikan dengan keadaan. Seorang raja Indonesia di Bali begitu serius menanggapinya sehingga menulis surat balasan kepada Pangeran Oranje dalam surat yang ditulis dalam bahasa

Bali, di situ dia mengirimkan salam kepada "Raja Belanda" dan bahkan menyatakan keinginannya bahwa "Bali dan Belanda harus menjadi satu".[14] Dia sangat terkesan oleh kekuasaan pangeran itu ketika utusan De Houtman menunjukkan kepadanya perbatasan Belanda di peta Eropa, perbatasan yang dia letakkan dekat Moskow dan Venesia, sehingga mencaplok sebagian besar Eropa. Sultan Aceh tidak begitu mudah tertipu. Beberapa pedagang Portugis yang tinggal di ibukota Aceh memberi tahu Sultan bahwa Belanda tidak punya raja, dan bahwa Inggris diperintah oleh seorang ratu yang mereka jelek-jelekkan. Akibatnya, raja Aceh menuliskan satu surat kepada Ratu Elizabeth, yang dia kirimkan lewat beberapa pedagang Inggris kepada "Ratu Inggris, Prancis, dan Belanda". Tapi Elizabeth tidak membalas.

Pada tahun-tahun pertama, hubungan antara orang-orang Belanda dan Indonesia cukup memuaskan. Para pedagang yang tinggal di pos-pos mereka di Ternate, Ambon, dan Kepulauan Banda dipandang tinggi oleh para penduduk. Raja Bali menunjukkan persahabatannya kepada Laksamana Van Eemskerk dengan menghadiahinya seorang gadis cantik, hadiah yang sangat menimbulkan rasa malu pada tuan yang terhormat ini. (Rasa malunya bertambah ketika gadis itu menolak meninggalkannya dan kembali ke rumah) Kesulitan yang susah diatasi muncul dalam berhadapan dengan penguasa Aceh. Laksamana Van Caerden, seorang perwira yang tidak sabaran dan berangasan, telah menjarah dan menenggelamkan rakit-rakit dagang Indonesia di lepas pantai Aceh karena dia curiga orang Aceh bersekongkol dengan Portugis untuk menawan kapalnya. Walaupun tindakannya kejam, perilaku penguasa Portugis lebih ganas lagi. Hal ini akhirnya menghasilkan kesepakatan antara Raja Aceh dan Belanda. Laksamana Bicker berjanji menuntut perusahaan Van Caerden di pengadilan Belanda atas tindakan perompakan oleh perwira mereka. Sebaliknya, Raja Aceh membebaskan Frederick de Houtman yang malang. Patut dicatat bahwa pengadilan di Amsterdam menghukum perusahaan Van Caerden membayar ganti rugi lebih daripada 50.000 gulden

kepada pedagang-pedagang Indonesia, dan jumlah itu betul-betul dibayarkan di Aceh.[15] Raja Aceh mengirimkan dua duta ke Belanda untuk memperoleh informasi lebih akurat tentang kondisi politik di Eropa. Kedua orang Aceh ini adalah perwakilan Indonesia pertama yang mengunjungi Belanda. Mereka diterima baik di Zeeland, dan ketika salah seorang meninggal di kota Middelburg, dia dikuburkan dengan ratapan resmi besar-besaran. Duta satu lagi mengunjungi Pangeran Maurits di kemahnya ketika dia sedang mengepung kota Grave, dan, beberapa tahun kemudian, pulang dengan selamat ke negeri asalnya.

Pertimbangan politik dan ekonomi membuat orang Belanda dan Indonesia bekerjasama pada tahun-tahun ini. Tapi sudah pasti bahwa kedua bangsa itu tidak saling mengerti banyak satu sama lain. Orang-orang yang mengawaki kapal-kapal itu ke Hindia adalah kumpulan orang aneh. Hanya disiplin keras yang dapat membuat mereka berperilaku agak sopan. Seorang Inggris, John Davis, mendapatkan kesan sangat buruk mengenai mereka, dan dalam narasinya menyebut mereka pengecut "yang lari dari penduduk asli seperti tikus dari kucing"; tapi nasibnya buruk karena berlayar di kapal yang dikomandani Cornelis de Houtman.[16] Biasanya ada terlalu banyak unsur kriminal di antara para awak kapal. Sebagian besar pelaut tidak mau ikut kapal yang pergi ke Hindia Timur. Risikonya terlalu besar, karena biasanya seperempat pelaut kehilangan nyawa mereka. Pemilik kapal membuat keadaan tambah buruk dengan menaruh di kapal anggota keluarga mereka sendiri atau anggota keluarga teman-teman mereka yang karena alasan pribadi ingin mereka kirim sejauh mungkin dari tempat mereka, suatu praktik yang juga diikuti para pedagang Inggris. Di Hindia para awak tahu bahwa mereka tidak tergantikan, karena itu mereka melakukan segala macam kekurangajaran; mabuk-mabukan dan perkelahian, diikuti dengan pemberontakan, sangat biasa terjadi. Ada yang lari dan menjadi Muslim. Yang lain bergabung dengan perompak pribumi. Kadang-kadang kapten kapal harus minta bantuan

raja lokal untuk memulihkan ketertiban. Tidak mengherankan bahwa pelaut-pelaut itu sering kali ditakuti sekaligus dibenci orang Indonesia. Di lain pihak, ada unsur-unsur yang lebih baik, pelaut baik yang berbelaskasihan pada penduduk lokal, dijahati oleh sesama awak dan kapten mereka, dan yang tidak punya keinginan lain selain menghindarkan segala pertumpahan darah yang tidak perlu. Ada laksamana yang memperlakukan musuh dengan hormat dan penuh kemanusiaan sehingga memperoleh penghargaan dari gubernur-gubernur Portugis. Laksamana van der Haghen bernegosiasi berminggu-minggu dengan orang Kristen dan Muslim di Ambon untuk menghasilkan perdamaian lestari di antara musuh-musuh bebuyutan itu. Seorang saksi mata bercerita bagaimana dia duduk di kabinnya berjam-jam menahan panas menyengat, terus-menerus menyeka keningnya, tanpa lelah mendengarkan keluhan dan argumen pemimpin-pemimpin Ambon sampai dia berhasil mewujudkan rekonsiliasi.

Tahun-tahun 1601 dan 1602 mendatangkan perubahan. Wakil raja Goa memutuskan untuk memulihkan kekuasaan Portugis di Indonesia. Delapan kapal besar dan 20 kapal kecil di bawah komando Furtado de Mendoza berlayar dari Malaka. Setelah pertempuran-pertempuran kecil pertama dengan Aceh, armada itu menuju Banten. Kebetulan, satu armada Belanda di bawah pimpinan Wolfert Harmensz, terdiri atas tiga kapal besar dan dua kecil, sedang mendekati Sumatra dari barat pada saat yang sama. Seorang pedagang Cina memberitahukan mereka tentang armada Portugis. Segera suatu sidang perwira dirapatkan dan keputusan berikut dibuat: "Karena kepemilikan atas Pelabuhan Banten sangat penting bagi Provinsi-Provinsi Bersatu dan perniagaan mereka, kapal-kapal kita akan menyerang armada Portugis dengan berani, percaya akan pertolongan Tuhan Mahakuasa".

Begitulah kelima kapal Belanda itu menyerang 30 kapal Portugis pada Hari Natal 1601. Pada 27 Desember pertempuran itu berulang. Dengan kehilangan dua kapal, Portugis terusir dari dermaga Banten. Di kerajaan ini reputasi Belanda kini tertanam.

Tapi dari sudut pandang militer, hal itu adalah keberhasilan singkat. Harmensz diperintah membeli rempah, bukan menaklukkan kapal Portugis. Dia bergegas ke Maluku, dan di situ kapalnya berpencar di antara pulau-pulau. Dengan demikian, Harmensz tidak bisa menolong orang Ambon ketika mereka diserang dan kalah total dari kekuatan Furtado. Untuk alasan komersial, Ambon dibiarkan sendiri. Ini memberikan Portugis satu kesempatan terakhir untuk memulihkan kekuasaan raja mereka. Suatu pergerakan mencapit direncanakan oleh Portugis untuk melawan musuh utama mereka di Maluku, Sultan Ternate. Dari Ambon, Furtado berlayar ke utara, dan dari Manila satu armada Spanyol bergerak ke selatan, tapi serangan bersama ini gagal total karena pasukan Portugis terlalu lelah dan patah semangat. Dengan kecewa Furtado pulang ke Malaka. Dari situ Portugis mencoba menaklukkan benteng pertahanan utama musuh bebuyutan mereka, Sultan Johor. Di sini, mereka juga tiba terlambat sekali, karena armada Belanda memaksa mereka pulang kandang. Suatu serangan balasan tampaknya akan terjadi. Sultan Ternate, kini sekutu Belanda, lebih kuat dari sebelumnya. Orang Banda menyerahkan monopoli perdagangan rempah kepada para pedagang Belanda, yang persaingan internalnya berhenti ketika pada Maret 1602 Kompeni Hindia Timur Bersatu (*Vereenigde Oostindische Compagnie*, VOC) dibentuk dan diserahi monopoli atas segala perniagaan di Asia dari Parlemen Belanda (*Staten-Generaal*).

Konstitusi dan organisasi keuangan VOC lebih termasuk dalam sejarah Belanda ketimbang Indonesia.[17] Modal sebesar enam setengah gulden dikumpulkan, dan suatu dewan dengan 17 direktur dibentuk. Perlu delapan tahun sebelum dewan direktur itu menunjuk seorang gubernur jenderal yang akan memerintah atas nama mereka di Indonesia. Perusahaan baru itu mengambil-alih semua pabrik yang telah didirikan oleh pendahulu-pendahulunya. Pabrik-pabrik itu ada di Banda, Ternate, Gresik (sebelah utara Surabaya), Patani (pantai utara Semenanjung Malaya), di Aceh, Johor, dan Banten. Perusahaan baru itu langsung diperlengkapi

dengan 14 kapal untuk pelayaran ke Asia Tenggara. Pada tahun berikutnya, 13 kapal meninggalkan Belanda, sementara hanya dua kapal dari ekspedisi sebelumnya kembali. Tiga puluh delapan kapal diperlengkapi dalam tiga tahun. Kapal-kapal bersenjata berat yang kuat ini tidak dimaksudkan hanya untuk berniaga. Piagam VOC memberikan kekuasaan penuh kepada korporasi ini untuk bertindak mewakili Parlemen Belanda dan untuk memanfaatkan semua hak kedaulatan. Para direktur memerintahkan Laksamana van der Haghen, yang mengomandani ekspedisi kedua—yang terdiri atas 13 kapal—untuk menyerang Portugis di semua benteng pertahanan mereka di Mozambik, Goa, dan Malaka, dan untuk membalas serangan atas sekutu Belanda yakni Ambon.

Serangan balasan itu ternyata sangat berhasil. Portugis terusir dari Johor. Armada utama di bawah komando pribadi Van der Haghen muncul di Ambon; di situ, sangat mengherankan buat laksamana Belanda itu, benteng Portugis menyerah tanpa satu tembakan pun. Pada tahun yang sama, benteng Portugis di pulau Tidore jatuh. Portugis mencoba mencari bantuan dari pedagang Inggris, bahkan sampai menjanjikan cadangan rempah mereka sebagai penukar mesiu dan amunisi, tapi gagal. Penaklukan benteng Ambon memberi VOC hak milik teritorial pertama di Kepulauan Indonesia. Pada Februari 1605, Laksamana van der Haghen menyepakati perjanjian dengan semua desa di Ambon, baik yang Islam maupun Kristen, di situ desa-desa ini mengakui kedaulatan Parlemen Belanda sebagai negara atasan. Monopoli dagang, tentu saja, termasuk dalam perjanjian. Suatu klausul menakjubkan menjanjikan kebebasan beragama kepada semua orang, Muslim, Katolik, dan Protestan. Sayang janji ini hanya dipegang selama beberapa bulan.[18]

Tahun berikutnya gempuran tersebut dilanjutkan dengan serangan terhadap Malaka. Suatu perjanjian dibuat dengan Sultan Johor yang menghasilkan suatu persekutuan ofensif dan defensif, serta monopoli dagang. Berdasarkan isi perjanjian ini, kalau kota Malaka ditaklukkan, ia akan menjadi milik Kompeni Belanda. Tapi

serangan itu dipatahkan, dan Malakaterusmenjadi milik Portugis sampai 35 tahun lagi. Keyakinan Sultan Johor terhadap sekutu Belanda-nya melemah, tapi ini cuma perkara kecil dibandingkan bencana yang menimpa kekuatan Belanda di Maluku, di mana armada Spanyol dari Filipina menghancurkan kekuasaan Sultan Ternate dan menaklukkan pos-pos dagang Belanda. Begitulah perang terjadi di antara bangsa-bangsa Eropa di Kepulauan Indonesia tanpa hasil jelas. Seluruh wilayah itu telah memasuki periode transisi yang akan menentukan nasib masa depan orang Indonesia.

BAB 6

INDONESIA DI ZAMAN SULTAN AGUNG DAN JAN PIETERSZOON COEN

SAMPAI awal abad ke-17, kehadiran orang Eropa di Kepulauan Indonesia membawa perubahan kecil dalam konstelasi politik di wilayah itu. Kerajaan-kerajaan yang sampai kedatangan Portugis berperan penting tetap unggul selama abad ke-16; tiga kekuatan laut yakni Demak, Malaka-Johor, dan Ternate berhasil menahan pertumbuhan dominasi Portugis. Tapi kemenangan mereka seperti pemenang yang jadi arang, dan dua di antara mereka menjadi sama sekali tak berdaya. Demak runtuh diserang negara pedalaman Mataram. Johor, untuk sesaat, berharap punya kesempatan memulihkan kekuasaan lamanyadengan pertolongan orang Belanda yang baru tiba tapi, karena dikecewakan, akhirnya mencari perdamaian dengan musuh-musuh lamanya di Malaka. Ternate muncul dari pergumulan itu dalam keadaan begitu lemah hingga tidak punya pilihan selain menerima keunggulan VOC atau Raja Spanyol, yang diwakili gubernurnya di Filipina. Hanya Aceh yang keluar dari konflik itu dengan kekuatan dan reputasi yang meningkat.

Aceh telah menjadi negara utama di bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Ia mendominasi daerah pantai hampir seluruh Sumatra. Pelabuhan-pelabuhan Aceh di ujung utara pulau itu menjadi tempat perhentian alami bagi orang-orang Eropa yang datang dari barat. Kenyataan ini membantu raja-raja Aceh memusatkan perdagangan lada dari hampir seluruh Sumatra di wilayah mereka, dan memungkinkan mereka mengatur monopoli yang tidak bisa diabaikan pedagang-pedagang Eropa. Kadang-kadang kapal-kapal Belanda, Inggris, dan Prancis berlabuh pada saat yang sama di dermaga Aceh. Bila begitu, sang Sultan bisa mengadu satu bangsa dengan bangsa lain dan menaikkan harga lada sekehendak hatinya. Keuntungan besar monopoli itu membuat Aceh, atau setidaknya Sultan dan penasihat-penasihat utamanya, menjadi kaya raya.

Kekayaan mendatangkan kekuasaan. Penguasa-penguasa Deli dan Indragiri di tenggara dan daerah Kedah dan Pahang di Semenanjung Malaya terpaksa mengakui kedaulatan Aceh. Kedah sudah terkenal akan tambang timahnya, dan karena deposit timah di Bangka dan Belitung belum banyak dikenal, kontrol atas timah Kedah memberikan Aceh satu monopoli lain. Pada 1613 tentara Aceh menyerbu Johor, membakar habis ibukotanya, dan menawan Sultannya. Setelah itu, Iskandar Muda, yang memerintah Aceh antara 1607 dan 1636, mengontrol seluruh bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Iskandar Muda menafikan perjanjian yang dibuat sebelumnya dengan VOC, yang disepakati saat bahaya besar mengancam kesultanan, ketika armada Portugis yang kuat sedang bersiap-siap menyerang habis-habisan; perjanjian itu memberikan hak monopoli dagang serta pusat dagang berbenteng kepada orang Belanda. Kemenangan atas Johor memungkinkan Iskandar bersikap keras terhadap VOC, tapi Belanda, ketimbang tunduk pada tuntutan-tuntutannya, sedapat mungkin membatasi perdagangan mereka dengan Aceh.[1]

Aceh tampaknya hampir berhasil mengontrol seluruh selat antara Semenanjung Malaya dan pantai Sumatra, dan dengan

demikian memperoleh keunggulan total atas negara-negara penduduk asli di bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Satu-satunya penghalang persekutuan semua kekuatan kecil di kawasan itu: Malaka Portugis, Johor, dan Patani. Bersama-sama, armada sekutu menghancurkan kekuatan Aceh dalam suatu pertempuran dahsyat dekat Malaka pada 1629. Kekalahan itu menjadi titik balik dalam sejarah Aceh. Pelan-pelan kekuatan Aceh menurun. Aceh mempertahankan kekuasaannya atas perdagangan lada di pantai barat Sumatra selama seperempat abad lagi, tapi kehilangan kontrol atas sebagian besar kerajaan di Semenanjung Malaya, dan klaimnya atas Sumatra bagian barat laut ditentang oleh para Maharaja Minangkabau dan Sultan Johor.

Sementara itu, Belanda membatasi kegiatan mereka di Sumatra hanya pada hubungan dagang regular, terutama dengan kesultanan Jambi dan Palembang. Di kedua kesultanan itu, perdagangan mereka terutama bergantung pada kehendak baik dari penguasa setempat. Walaupun Jambi dan Palembang adalah negara lemah–keberadaan Jambi terus-menerus terancam oleh kekuatan laut Melayu di sekitar Selat Malaka dan keberadaan Palembang terancam oleh kekuatan kesultanan Banten yang semakin meningkat–untuk waktu lama orang Belanda tidak mau mengusahakan monopoli komersial di pelabuhan-pelabuhan itu. Mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem perdagangan Asia. Sultan-sultan itu bertindak sebagai perantara antara petani lada di negeri mereka dan para pedagang asing. Persaingan di antara orang asing tentu saja sangat menguntungkan mereka, dan karena itu, senjata utama Kompeni Belanda terhadap tuntutan harga gila-gilaan dari raja-raja lokal ialah dengan mengancam akan memindahkan pos dagang mereka ke pelabuhan lain dan akan menyatakan blokade atas pantai Sumatra. Ini adalah usaha yang berbiaya tinggi sehingga biasanya kedua pihak menyelesaikan pertikaian mereka dengan kompromi. Belanda juga menjajaki kemungkinan perdagangan di Bengkulu di pantai barat daya dan di pulau Bangka dan Belitung, tapi tidak mendapat untung besar di

situ. Karena itu bisa dikatakan bahwa situasi politik dan ekonomi di bagian barat Kepulauan Indonesia sama sekali tidak nyaman bagi Eropa untuk dengan cepat memperluas kontrol langsung di wilayah itu.

Di bagian timur laut Indonesia situasinya sama sekali berbeda. Kekuasaan Ternate telah dihancurkan serangan balik Spanyol pada 1606. Pos-pos berbenteng Spanyol dan Belanda tersebar di semua pulau kecil Maluku. Di sana, perang gerilya berlangsung di darat dan laut bertahun-tahun lamanya. Ternate, yang was-was akan masa depan, melihat bahwa satu-satunya kesempatan yang dimilikinya adalah jika Belanda menang, karena Belanda paling tidak akan melindunginya dari Spanyol dan Portugis, yang bukan hanya menjadi musuh bebuyutan yang mengancam kemerdekaannya tapi juga agamanya. Karena itu sang Sultan memutuskan untuk mengakui Parlemen Republik Belanda sebagai pelindungnya, dengan janji membayar kepada Kompeni itu biaya perang segera sesudah dia dipulihkan ke kedudukannya semula (1607).[2] Perjanjian ini, digabung dengan pengakuan lebih awal akan kedaulatan Parlemen Belanda oleh Ambon, membuat orang Belanda praktis menjadi kekuatan dominan di Maluku. Ini menimbulkan beban besar pada Kompeni karena orang Belanda jauh dari berhasil dalam kegiatan militernya. Beberapa kali mereka mencoba menghancurkan kekuatan Spanyol di pusatnya di Filipina, tapi dua kali armada mereka kalah total.[3] Kekacauan dan ketiadaan kepemimpinan bisa-bisa membuat kepemilikan atas Kepulauan Rempah-Rempah yang diinginkan semua orang itu menjadi titik lemah Kompeni. Yang membuat keadaan tambah buruk, orang-orang Kepulauan Banda makin lama makin membenci Belanda.

Pada 1602, Banda menandatangani kontrak yang memberikan pada Belanda monopoli atas perdagangan pala. Segera sesudah itu, beberapa orang Belanda terbunuh di pulau itu dan yang lain lari dengan rakit penduduk pribumi ke Banten. Perdamaian dipulihkan dan kontrak diperbarui, tapi monopoli total tidak bisa dipaksakan.

Direktur-direktur Kompeni yang legalistik berpendapat bahwa dengan menandatangani perjanjian itu Banda sepakat untuk selamanya membatasi hubungan dagang mereka hanya dengan Kompeni. Para Direktur meyuruh perwakilan mereka di Maluku memaksakan penerapan kontrak itu, yang ternyata mustahil. Orang Banda, yang bergantung pada impor beras dari Jawa dan Makasar, menolak menghentikan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari sana. Rakit-rakit penduduk pribumi yang membawa makanan ke pulau-pulau itu membawa pulang sebagian dari rempah-rempah Banda yang kemudian dijual di Makasar kepada pedagang-pedagang India serta Portugis dan Inggris. Kompeni Belanda menganggap ini pelanggaran kontrak, dan pertikaian pun menyusul, diperparah kegagalan untuk memahami adat istiadat orang setempat. Di mana-mana mereka curiga ada pengkhianatan dan persekongkolan pembunuhan.[4] Mereka membenci orang-orang Muslim dan menolak menghormati ritus-ritus Islam. Dengan demikian, kesulitan paling kecil pun bisa meledak jadi pertikaian yang mematikan.[5]

Pelan-pelan persahabatan orang Belanda dengan Banda berubah menjadi kebencian terang-terangan. Ada alasan lain timbulnya pertikaian yang disebabkan sistem Indonesia menjalankan bisnis. Panen dijual sebelum saatnya, dan uang yang besar jumlahnya diserahkan kepada produsen sebelum panen. Ada saat ketika Kompeni memberikan kredit lebih daripada 20.000 gulden kepada orang Banda saja. Penduduk pulau itu bukan hanya menghabiskan uang secepat mereka bisa tapi juga menyerah pada pencobaan untuk menjual produk mereka untuk kedua kalinya dan menunda penyerahan rempah-rempah itu kepada Kompeni. Dengan sendirinya makin lama utang mereka makin banyak. Pejabat Belanda yang bertanggungjawab kepada para Direktur di Amsterdam menyalahkan orang Indonesia dan bukan sistemnya serta menyebut mereka dalam laporan, "bajingan dan maling licik". Mereka menyarankan agar rempah yang dijanjikan tersebut dikumpulkan dengan kekuatan senjata

dan, kalau perlu, dengan menaklukkan pulau-pulau itu. Praktik pengambil-alihan kedaulatan atas suatu negeri dan penduduknya sebagai pembayaran utang bukan tidak biasa pada abad ke-17, dan dijalankan baik di Asia maupun Eropa. Kesulitan orang Belanda dan Indonesia untuk saling memahami tersebut—hanya sedikit orang Belanda yang belajar cakap Melayu, dan semacam bahasa Portugis-pelaut yang menjadi alat utama percakapan[6]—memperparah kesalahpahaman. Lagi pula, orang Eropa lain, untuk menarik untung dari konflik itu, dengan sengaja meniupkan api. Portugis mengadu domba dari Makasar, dan Inggris muncul dengan kapal mereka di kepulauan Banda.

Perusahaan India Timur Inggris (*English East India Company*, EIC) didirikan dua tahun sebelum Kompeni Belanda, tapi berkembang lebih lambat. Karena modal Perusahaan Inggris hanya seperdelapan Kompeni Belanda, para pedagang London mengikuti tetangga mereka yang lebih kuat ke mana pun mereka pergi, berharap menarik keuntungan dari hasil rintisan orang lain. Biaya perang melawan Spanyol, yang membuat perdagangan Indonesia menjadi aman untuk bangsa-bangsa bagian utara itu, dengan senang hati diserahkan kepada orang Belanda, tapi di mana saja Kompeni Belanda mendirikan pos dagang, pastilah Inggris menyusul: di Patani, Jambi, Jayakarta, dan di banyak tempat lain. "Dari awal abad", seorang pakar Britania modern menulis, "Inggris, walaupun jauh lebih lemah, terus mengikuti Belanda di sekeliling Kepulauan Indonesia, membuntuti mereka seperti lalat".[7] Di mana pun Belanda mengalami kesulitan dengan orang Indonesia, orang Britania berlagak menjadi sahabat baik untuk "penduduk asli tertindas yang malang", menyarankan kepada mereka untuk mengakui kedaulatan raja Inggris sebagai perlindungan terbaik dari "Belanda yang jahat". Tidak ada tempat lain yang persaingannya lebih sengit daripada Kepulauan Banda, tempat orang Belanda dengan kasar memakai keunggulan mereka dalam hal jumlah dan kapal untuk mempertahankan "hak monopoli" mereka dengan mengusir Inggris lewat peragaan

tembakan senjata yang semarak. Tentu saja, ada perdamaian dan bahkan persekutuan antara kedua bangsa itu di Eropa, tapi itu tidak mencegah keduanya terlibat "perang terbatas" di Timur Jauh! Semua pertengkaran itu dilaporkan kedua belah pihak kepada kantor pusat di Banten, tempat kedua bangsa itu, masing-masing dengan pendukung Cina dan Jawa mereka, berkelahi riuh-rendah di jalan-jalan. Edmund Scott, dalam karyanya *Discourse of Java*,[8] dengan serius mencatat bahwa "orang Flemming bersikap sangat kasar dan tidak tahu aturan dengan kelakuan yang bikin malu dan aib bagi Dunia Kristen". Tapi kita tidak perlu menerima pernyataannya terlalu serius, karena kemudian dia menulis: "Perlu dicatat bahwa walaupun kami adalah musuh besar dalam perdagangan, tapi dalam segala hal lain kami bersahabat dan bersedia sehidup semati satu sama lain."

Tapi di Kepulauan Banda kedua tetangga itu saling *menembak* demi bisnis. Belanda mengusir Inggris, tapi ini tidak membuat keadaan tambah baik. Gubernur Jenderal Kompeni Belanda–kedudukan yang dibentuk oleh para Direktur pada 1610–hanya melihat satu jalan untuk secara efektif mempertahankan monopoli: penaklukan pulau-pulau itu dengan kekuatan senjata; tapi ini ternyata sangat sulit sehingga kebijakan ragu-ragu dan tunggu-menunggu terus berlangsung selama beberapa tahun lagi. Kompeni harus memperhitungkan kenyataan bahwa penaklukan Kepulauan Banda mungkin akan melibatkan armadanya dalam perang dengan kekuatan baru di Indonesia, kerajaan Makasar.

Terletak di antara Jawa dan Maluku, kerajaan Makasar dan Gowa menduduki posisi yang secara strategis sangat menguntungkan. Setelah penguasa Makasar dan Gowa masuk Islam pada 1605, kekuatannya mulai menyebar ke daerah-daerah lain di semenanjung Sulawesi bagian barat daya, pantai timur Kalimantan dan sebagian Kepulauan Sunda Kecil, khususnya di Pulau Sumba dan Sumbawa. Raja-rajanya memaksa penguasa Buton (lepas pantai Sulawesi bagian tenggara) untuk mengalihkan pengakuan kedaulatannya dari Ternate ke Gowa. Portugis, yang

terusir dari sebagian besar Maluku, menjadikan Makasar kantor pusat mereka untuk perdagangan rempah. Para Sultan Makasar, walaupun Muslim, mengikuti kebijakan hati-hati terhadap orang Eropa, dan menyatakan bahwa mereka ingin tetap netral dalam perang antara Belanda dan Portugis. Mereka menolak mengizinkan kedua bangsa itu membangun pos dagang berbenteng di wilayah mereka. Portugis, yang merasa aman di bawah perlindungan sang Sultan, dengan rela tunduk pada semua peraturannya. Orang Belanda mendirikan "*lodge*", yaitu kantor dagang di Makasar tapi karena menggunakan cara kasar dalam menghadapi beberapa pengutang dari kota itu, mereka mendapat kemarahan Sultan. Dari sejak itu sampai 1667, Makasar tetap menjadi pusat oposisi terhadap orang Belanda. Portugis, Inggris, dan bahkan Denmark[9] berdagang dari pelabuhan itu, di situ perdagangan berlangsung marak dengan Kepulauan Rempah-Rempah—"penyelundupan", menurut pejabat Kompeni.

Demikianlah Makasar selama duapertiga abad tetap menjadi benteng perdagangan internasional. Kalimantan juga tetap menjadi wilayah perdagangan bebas, tapi tidak bisa disebut pusat dagang. Kota dan pelabuhannya masih relatif tidak penting. Kesultanan Kutai, negara penerus kerajaan kuno Muara Kaman tidak dikunjungi Belanda sampai 1635. Raja-raja Banjarmasin di tenggara, dan Sukadana serta Sambas di barat sangat ingin menjalin hubungan dagang dengan orang-orang Eropa, tapi pengalaman-pengalaman pertama orang Belanda di daerah-daerah itu tidak menggembirakan. Tapi di Kepulauan Sunda Kecil orang Belanda memperoleh tempat berpijak pada 1613.

Di sini, di Indonesia Tenggara, pengaruh Portugis terbukti lebih berumur panjang daripada di Maluku. Para Pastor Dominikan dengan berani melanjutkan karya misi mereka dalam keadaan paling sulit dan tanpa bantuan apapun dari pemerintah Portugis. Pedagang Portugis dari Malaka biasanya mengunjungi Flores dan Timor untuk mendapatkan kayu cendana yang berharga, yang diekspor ke India dan Cina. Ketika armada Belanda muncul

di pulau-pulau Solor dan Flores, penduduk asli yang beragama Kristen dengan gagah berani mempertahankan benteng lemah yang didirikan menurut petunjuk para Dominikan itu, tapi merekaterpaksa menyerah.[10] Tapi pengaruh Portugistidak lenyap seluruhnya dan menjadi kuat kembali ketika setelah beberapa tahun Belanda, yang kecewa dengan hasil perdagangan, sekali lagi mengundurkan diri dari daerah itu. Sampai lama sesudah itu pengaruh Makasar tetap yang paling utama.

Di bagian tengah Kepulauan Indonesia, keadaan masa depan tampaknya bergantung pada akhir perebutan kekuasaan segi tiga antara kesultanan Banten, perusahaan dagang Belanda, dan imperium Mataram yang telah lahir kembali. *Senopati* dari Mataram, yang oleh tradisi dikatakan telah berhasil memulihkan keunggulan daerah pedalaman, berhasil "mempersatukan kembali wilayah kerajaan kuno Mataram dan Kediri ". Tidak lama sesudah itu, Demak tunduk kepada Mataram. Ketika kapal-kapal pertama Belanda mengunjungi Demak sekitar 1602, mereka menemukan Demak dan Mataram sedang dalam keadaan perang. Penyebab peperangan itu tampaknya karena Demak, yang sudah ditaklukkan pada 1588, memberontak terhadap penguasa barunya itu. Ini adalah versi yang dikisahkan oleh Babad-babad tapi mungkin saja pujangga istana Agung ingin meyakinkan bahwa raja mereka adalah penguasa sah atas seluruh Jawa dan, karena itu, semua perlawanan terhadap kekuasaannya adalah pemberontakan. Catatan-catatan pelaut Portugis dan Inggris membuat kita tahu akan cerita menyedihkan rajanya yang terakhir, yang mengungsi ke Banten tapi yang kemudian lari ke laut, karena tidak merasa aman di tempat pelariannya, dan kemudian dibunuh oleh seorang pengikutnya sendiri.[11] Ratu Jepara yang terkenal yang begitu menyusahkan Portugis di Malaka wafat sebelum pergantian abad, dan segera sesudah itu kediamannya pastilah juga sudah menjadi bagian dari imperium Mataram. Kota kuno Tuban mempertahankan kemerdekaannya selama beberapa tahun lagi. Armada kedua Belanda yang mengunjungi Kepulauan Indonesia

juga datang ke Tuban, dan dari gambaran Belanda kita tahu bahwa tidak ada perubahan penting dalam status kerajaan ini sejak kunjungan Portugis pertama 100 tahun sebelumnya. Tapi nasibnya sudah ditentukan untuk jatuh ke tangan kekuasaan Mataram yang sedang naik daun. Selama dekade pertama abad ke-17, kerajaan pedalaman itu tetap lemah dan sering kali terguncang oleh pemberontakan tuan-tuan tanah. Pada 1613, Nyakra-Kusuma, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung, naik takhta. Ambisinya ialah untuk memulihkan kesatuan politik pulau itu, dan terhadap ancaman itu Tuban, Surabaya, dan Pasuruan (di tenggara Surabaya) bersatu padu. Kekalahan pasukan mereka pada 1614 memupus persekutuan itu. Raja Mataram membalas dengan serangkaian serbuan habis-habisan. Pada 1616 Pasuruan dikalahkan. Pada 1619 giliran Tuban dijadikan negara bawahan. Pada 1622 Agung untuk sesaat mengalihkan perhatiannya ke Kalimantan tempat dia mempermalukan Ratu Banjarmasin yang terpaksa memindahkan kediamannya ke dekat Keraton Mataram. Pada 1624 Agung berusaha menaklukkan Pulau Madura. Setelah pertempuran yang keras dan berdarah, Raja Mataram berhasil mendudukkan Raja Sampang (di Madura Barat) sebagai tuan tanah atas seluruh pulau itu. Tidak terbayangkan olehnya bahwa keberhasilannya memasukkan Madura ke dalam orbit Mataram akhirnya akan mendatangkan kehancuran pada imperiumnya oleh keturunan raja bawahannya itu. Pada 1625 bahkan pusat perdagangan yang makmur di Surabaya harus tunduk pada kehendak Agung, walaupun ada usaha setengah hati dari armada Belanda untuk campur tangan.[12] Raja-raja Cirebon mengakui kedaulatannya dan tetap menjadi pengikutnya yang setia walaupun Agung mengajukan tuntutan menjengkelkan terhadap mereka. Bangga atas pencapaiannya, Agung menyandang gelar *Susuhunan*, "dia yang kakinya harus orang junjung"; atau, "dia yang kakinya aku junjung di atas kepala", dengan kata lain "dia yang ada di atas semua orang". Kemudian, *Susuhunan* menjadi gelar yang diterjemahkan oleh orang Belanda abad ke-17 sebagai

padanan gelar Eropa untuk "kaisar".

Sampai ditaklukkan Mataram, pelabuhan-pelabuhan Jawa terus berdagang dengan Malaka dan Maluku. Pertumbuhan kekuatan Belanda di Kepulauan Indonesia bagian timur dan sikap raja Mataram yang meremehkan para "raja-pedagang" daerah pantai pelan-pelan menjadi dua penyebab turunnya perdagangan luar negeri Jawa. Belanda, dengan cara baik dan buruk, berusaha mendapatkan monopoli perdagangan cengkeh dan pala. Kebangkitan Mataram mengalihkan pusat kehidupan politik, budaya, dan ekonomi dari pantai ke pedalaman Jawa.

Sikap Agung berbeda sepenuhnya dari sikap raja-raja Banten. Banten menjadi kuat sebagai negara sepenuhnya akibat perdagangan lada, dan para penguasanya sangat menyadari hal itu, walaupun kadang-kadang mereka meniru sikap menghina terhadap segala macam perniagaan seperti yang ditunjukkan tetangga mereka yang lebih kuat itu. Pada 1624, Raja Banten menolak dengan kasar untuk mengirimkan duta kepada gubernur jenderal Belanda di Jakarta (ketika itu Batavia), karena "dia tidak bisa merendahkan diri sendiri begitu jauh sampai harus mengirimkan duta kepada seorang yang bukan lain hanyalah kepala sekelompok pedagang".[13] Tapi dia cukup bijaksana untuk tidak mengabaikan sumber utama penghasilannya. Dengan begitu, Banten tetap menjadi pusat dagang yang penting selama sebagian besar abad ke-17, sementara Mataram tetap menjadi negara pertanian murni. Tapi tidak lama kemudian produk pertanian wilayah Mataram secara ekonomis menjadi sama pentingnya dengan rempah-rempah dari daerah timur dan barat Jawa. Bahkan, seluruh perdagangan rempah pasti akan anjlok bila Mataram dan Makasar berhenti mengekspor beras, entah ke Maluku atau ke permukiman-permukiman Belanda.

Jadi, tinggal Banten di barat dan Blambangan di ujung timur pulau itu yang masih bebas dari dominasi Mataram. Blambangan, yang lemah, dengan gigih disokong oleh orang Bali yang doyan perang yang, karena sangat sadar akan klaim lama Jawa untuk

menguasai pulau-pulau sekitarnya, dengan gigih melawan usaha Mataram memperluas kekuasaannya atas negeri pantai di seberang Bali. Perlawanan mereka terhadap dominasi politik Jawa membuat Bali terus mempertahankan struktur sosial kuno mereka. Karena itu, Islam tidak mendapat banyak pengikut di pulau itu.

Banten, daerah yang paling membuat ngiler penguasa Mataram, sulit diserbu. Kekuatan Mataram pelan-pelan melebar sampai ke daerah pegunungan di selatan Jakarta yang membentuk semacam daerah tak bertuan di antara kedua negara itu, tapi ia tidak pernah berhasil menguasai sepenuhnya penduduk pegunungan itu, yang berbeda adat istiadat dan bahasanya dari orang Jawa. Wilayah di kaki pegunungan tempat kota modern Bogor berada telah ditinggalkan penduduknya pada akhir abad ke-16 ketika Banten yang Muslim menghancurkan kerajaan Pajajaran yang penguasa Shiwaisnya telah menemukan tempat pengungsian terakhir di situ. Jalan terbaik mendekati Banten ialah lewat laut; tapi bukan hanya Agung telah menghancurkan basis yang bisa membuatnya mendirikan suatu angkatan laut; jalan ke barat juga terhalang oleh Belanda, yang pada 1619 telah menetap di kota kuno Sunda Kelapa, yang telah berganti nama menjadi Jayakarta beberapa saat sebelumnya. Di sini Kompeni Belanda membangun benteng utamanya yang diberi nama Batavia. Ada alasan bagus bagi Belanda untuk melakukan hal ini.

Setelah berniaga selama 20 tahun di Hindia, para Direktur Kompeni menganggap keadaannya masih sangat tidak memuaskan. Kompeni memang telah memperoleh pijakan di pulau Ambon dan cukup kekuasaan di Maluku, tapi persaingan di pasar rempah masih tetap ketat, dan dengan harga-harga yang meningkat, khususnya biaya besar yang dituntut oleh perang, keuntungan masih kecil. Selama delapan tahun pertama keberadaannya, Kompeni tidak membayar dividen apapun kepada pemegang saham. Setelah itu para Direktur itu memutuskan untuk membayar dividen tidak kurang daripada 162 persen, tapi mereka membayar hanya

sebagian dengan uang kontan dan sebagian besar dengan barang dagangan, terutama rempah. Pemegang saham harus menunggu delapan tahun lagi sebelum dividen kedua dibagikan. Para Direktur itu menulis surat demi surat kepada Gubernur Jenderal mereka di Indonesia dengan perintah agar monopoli perdagangan rempah dijaga dengan segala cara, kalau perlu dengan kekerasan, dan bahwa kuantitas yang diproduksi harus dikurangi untuk menaikkan harga di Eropa. Untuk mencegah penyelundupan, mereka bahkan mengusulkan untuk menekan semua pelayaran penduduk asli di dalam batas-batas imperium Ternate, yang berarti seluruh wilayah di timur Makasar. Mereka sangat mengerti bahwa persaingan dari orang Cina dan Gujarat bahkan lebih berbahaya daripada persaingan dari perusahaan-perusahaan Eropa. Tapi gubernur jenderal-gubernur jenderal pertama tidak setuju dengan pandangan ekstrem itu. Mereka menganggap tindakan ekstrem yang begitu kejam tidak bisa dibenarkan dan takut akan reaksi kekerasan di mana-mana.[14] Persaingan antara Belanda dan Inggris lebih memperumit keadaan.

Edmund Scott menuliskan gambaran yang hidup tentang kehidupan di Banten pada dekade pertama abad ke-17. Orang Eropa selalu terancam akan kehilangan nyawa dan harta mereka dalam kebakaran besar yang melanda kota yang terdiri atas rumah-rumah kayu ini setiap tiga atau empat bulan. Scott punya pandangan seperti orang Eropa waktu itu yang merendahkan "penduduk asli". Sebagian kota itu dihuni orang Cina, katanya, yang bekerja siang malam sementara orang Jawa "berleha-leha". Dia menulis: "Mereka semua miskin, karena mereka punya banyak budak yang bahkan lebih malas lagi daripada tuan mereka, dan yang makan lebih cepat daripada pertumbuhan lada dan beras mereka."[15] Di kota itu intrik, rencana jahat, dan pembunuhan biasa terjadi, dan dengan demikian, Scott tidak menilai tinggi penduduknya. "Semua orang Jawa dan Cina adalah penjahat," tulisnya. Tentu saja ada pertengkaran terus-menerus antara orang Belanda dan Inggris. Kedua pihak membawa pertikaian mereka ke

patih (perdana menteri) Banten, dan tuan ini menjadi kaya karena menerima suap dari keduanya. Kalau bukan karena pertengkaran ini, orang Jawa tidak akan bisa membedakan orang Inggris dari "Fleming". Scott dan teman-temannya memutuskan membuat perkara ini jadi jelas untuk selamanya. Pada Hari Ratu Elizabeth Naik Takhta, mereka memakai pakaian terbaik dan mengadakan parade besar. Mereka hanya 14 orang, jadi mereka berbaris maju mundur, menembakkan senapan mereka dan berteriak "Hore", sampai semua penduduk kota lari keluar rumah untuk melihat pertunjukan besar itu. Begitu orang banyak berkumpul, orang Inggris itu memberitahu orang Banten tentang Ratu Elizabeth mereka yang mulia dan bahwa orang "Fleming" yang malang itu sama sekali tidak punya raja atau ratu. Kita mungkin ragu apakah orang-orang Jawa mengerti apa yang mereka katakan. Sang patih cukup pintar untuk mengerti bahwa dia bisa menangguk untung dari keadaan ini dengan memberikan keistimewaan secara bergiliran kepada setiap bangsa sambil menaikkan bea cukai dan harga lada. Akhirnya orang Belanda mengancam akan memindahkan kantor pusat mereka ke Jayakarta tempat mereka sudah mendirikan satu pabrik kecil.

Reorganisasi total sistem komersial Kompeni tampaknya sudah mulai terlihat. Beberapa proposal untuk reorganisasi sampai ke Para Direktur pada dekade kedua abad ke-17. Yang paling menarik adalah "Diskursus mengenai Negara Hindia" oleh Jan Pieterszoon Coen yang terkenal.[16]

Coen masih muda ketika dia menulis program politiknya. Dia lahir pada 1586 di kota kecil Hoorn, salah satu komunitas pelaut ulung di Zuider Zee. Pada usia 13 dia pergi ke Roma dan mendapatkan kedudukan di kantor seorang pedagang Belanda di kota itu, Mr. Visscher, yang telah meng-Italia-kan namanya menjadi "Pescatore". Coen tinggal enam atau tujuh tahun di Roma, dan belajar sistem pembukuan Italia, yang jauh lebih maju dibanding yang dipakai negeri-negeri belahan utara Eropa. Setelah pulang ke Belanda dia menerima penempatan sebagai pedagang

kedua dengan armada Kompeni yang berlayar ke Indonesia pada 1607.

Armada yang membawa Coen berlayar dengan perintah khusus menjamin monopoli di Kepulauan Rempah-Rempah. Coen menyaksikan kegagalan ekspedisi itu serta terbunuhnya Verhoeff, laksamana yang mengomandani ekspedisi itu, oleh orang Banda. Dengan mata kepala sendiri dia melihat bagaimana orang Inggris menyokong perlawanan orang Banda. Peristiwa dramatik ini tidak pernah dia lupakan. Pada 1610 dia pulang ke Belanda, dan berlayar ke Hindia untuk kedua kali pada 1612. Dia pasti berhasil mendapatkan hati para direktur Kompeni, karena mereka mempercayakan kepadanya komando atas dua kapal dan memberinya gelar pedagang kepala. Ketika tiba di Indonesia, Gubernur Jenderal Pieter Both mengangkatnya sebagai pemegang buku kepala dan direktur dagang di Banten. Dalam posisi ini Coen muda, 28 tahun, menuliskan program politiknya.

Coen mendasarkan pendapatnya pada dua argumen: pertama, bahwa perdagangan dengan Timur perlu untuk kesejahteraan Republik Belanda, dan kedua, bahwa orang Belanda punya hak legal untuk meneruskan perdagangan ini dan bahkan memonopoli perdagangan di banyak tempat.

Argumen pertama mudah dipertahankan dengan fakta bahwa kegiatan Belanda mempermiskin musuh, Spanyol, dengan mengurangi sumber dayanya, dan pada saat yang sama memperkaya negeri sendiri. Dengan demikian, VOC memberikan pukulan ganda kepada kekuasaan kerajaan Spanyol.

Untuk argumen kedua, Coen menyandarkan hak legal untuk berdagang di Indonesia pada dua pertimbangan: bahwa Belanda memulai perdagangan mereka di wilayah tempat Spanyol dan Portugis tidak punya klaim, dan bahwa orang Belanda telah memperoleh hak legal atas wilayah Ambon berdasarkan hak penaklukan ketika Spanyol dan Portugis tanpa dasar menyerang orang Belanda yang "berdagang dengan damai". Hak yang diperoleh itu diperpanjang dengan perjanjian formal dengan bangsa-bangsa

dan raja-raja Indonesia. Dari perjanjian-perjanjian ini lahirlah hak monopoli di Ternate, Ambon, dan Kepulauan Banda. Karena itu, Kompeni punya hak menghukum orang Indonesia yang, meskipun sudah bersumpah, melanggar kontrak ini.

Coen menganggap kedudukan Kompeni secara legal kuat tapi secara politis sangat goyah. Pulihnya perdagangan rempah tidak pernah akan cukup untuk menutup semua ongkos. Tidak mungkin sepenuhnya mencegah penyelundupan yang terus terjadi antara Maluku dan Jawa. Dalam jangka panjang persaingan dengan Inggris akan terbukti lebih berbahaya lagi. Saran Coen ialah menjaga kepentingan Kompeni dengan mendirikan permukiman Belanda. Dia mengembangkan program politiknya sebagai berikut: memastikan kepemilikan total atas beberapa wilayah, misalnya, pulau Bacan di Maluku, Ambon, dan Banda, dan pelabuhan berbenteng di Banten atau Jayakarta; bawa kelompok-kelompok orang Belanda ke tempat-tempat itu dan berikan kepada mereka hak atas tanah dan izin untuk berdagang di pelabuhan-pelabuhan Asia; kirim armada yang cukup kuat untuk menaklukkan Manila dan Makao, untuk menyingkirkan Spanyol dan Portugis dari Filipina dan pantai Cina. Sesudah ini dilakukan, koloni-koloni Belanda dan budak-budak mereka akan cukup kuat untuk mempertahankan milik mereka yang sudah diperoleh. Kompeni tidak lagi akan bergantung pada kehendak baik Raja Ternate dan sekutu-sekutu lain di Indonesia. Kompeni akan sangat dihormati sehingga para pribumi akan setia menaati kewajiban mereka untuk menghormati hak monopoli.

Rencana itu ambisius, tapi tidak mustahil dilaksanakan. Bagian paling sulit ialah menaklukkan Filipina. Menarik untuk dicatat bahwa Coen berharap akan memperoleh bantuan dari orang Filipina, yang katanya membenci pemerintahan Spanyol. Dia berencana memakai ribuan tentara bayaran Jepang. Kaisar Jepang menawarkan akan mengirimkan sebanyak mungkin orang yang diinginkan Kompeni, dan Coen menulis: "Tentara Jepang sama baiknya dengan tentara kita".

Kompeni tidak sanggup mengirim armada besar yang diinginkan Coen, tapi para Direktur itu dua kali mempercayakan jabatan Gubernur Jenderal Hindia kepadanya. Dia menerima posisi tinggi ini untuk pertama kali pada 1618, ketika dia masih berusia 31. Pada 1623 dia kembali ke Belanda, dan dari situ dia dikirim untuk periode kedua jabatan itu pada 1627. Pada tahun-tahun itu dia mengembangkan programnya lebih jauh lagi, tapi dia tidak bisa menerapkan programnya yang paling utama: permukiman koloni Belanda. Selama 15 tahun antara 1614 dan 1629, dua prinsip yang bertolak belakang diperdebatkan para pejabat Kompeni. Para Direktur itu mengambil keputusan akhir pada 1626, ketika mereka memutuskan suatu jalan tengah yang akan menentukan perkembangan koloni Belanda untuk seratus tahun berikutnya.[17]

Coen sudah lebih jauh mengembangkan gagasannya dalam laporannya kepada para Direktur Kompeni. Dalam laporan terakhirnya menjelang akhir periode jabatannya yang pertama, dia memperkirakan bahwa selama 10 tahun antara 1613 dan 1623 Kompeni membelanjakan 9.396.000 gulden, sementara total keuntungan kargo dari 56 kapal yang telah berlayar ke Belanda dalam 10 tahun yang sama berjumlah 9.388.000 gulden, sehingga ada rugi 8.000 gulden.[18] Kita tidak bisa mencek angka-angka ini, karena beberapa buku kompeni telah hilang dan perakunan dibuat sedemikian rupa sehingga sangat sulit mengetahui keadaan finansial sejati Kompeni pada setiap saat tertentu. Walaupun ada kerugian yang dia anggap telah diderita oleh Kompeni, Coen berpendapat bahwa dengan mereformasi sistem komersial bukan hanya semua ongkos di Indonesia akan tertutup, tapi keuntungan tahunan sebesar lima juta gulden bisa didapat dari perdagangan antar-Asia dan lima juta lagi kalau perdagangan Cina dapat dimasukkan kedalam sistem itu. Untuk itu Coen butuh permukiman orang Belanda yang akan menangani produksi rempah-rempah. Permukiman-permukiman ini akan diperkuat dengan para kolonis dari Madagaskar, Burma, dan Cina. Kalau

tidak cukup orang di negeri-negeri itu yang mau secara suka rela datang ke Indonesia, Coen menyarankan untuk menculik mereka sampai jumlah yang diperlukan tercapai. Dia lebih menyukai orang Cina karena menurutnya mereka pekerja keras dan tidak suka perang. Rencananya lebih jauh adalah pemusnahan total pelayaran orang Asia dan Eropa asing di Hindia. Bagi para pemukim itu dia mengusulkan untuk memberi izin pelayaran dan perdagangan bebas di bawah peraturan yang dibuat Kompeni. Menurut sistem perdagangan ini sutra dari Persia, kain dari India, kayu manis dari Ceylon, porselen dari Cina, dan tembaga dari Jepang akan dipertukarkan dengan rempah-rempah dari Maluku dan kayu cendana dari Timor, semua di bawah pengawasan pejabat Kompeni. Keuntungan dari perniagaan yang akan berpusat di pelabuhan Batavia akan cukup untuk menyediakan rempah dan lada dalam jumlah yang diperlukan untuk diekspor ke Eropa. Konsekuensi sistem ini adalah bahwa pelayaran antara Eropa dan Asia akan terbatas pada sedikit kapal per tahun, tapi ini adalah kapal yang dimuati kargo berharga jutaan, sementara pelayaran dan perdagangan Belanda yang hidup akan berlangsung di sepanjang pantai Asia dari Persia sampai Jepang.

Jelas bahwa rencana Coen tidak terbatas pada Kepulauan Indonesia. Dia bermaksud membangun imperium komersial yang besar di Asia dengan ibukotanya Batavia, kota yang didirikannya. Dia tidak tertarik sama sekali dengan perkembangan politik di pedalaman Kepulauan Indonesia. Yang paling penting baginya hanyalah mempertahankan beberapa posisi Belanda yang ingin dia bangun, dan kontrol total atas laut. Jelas dia seorang negarawan dengan visi besar dan imajinasi dan pandangan jauh kedepan yang menjadi ciri utama pemimpin sejati manusia. Bahkan kesempitan pikirannya dalam hal-hal lain, serta kekejamannya, membantu dia mencapai tujuan-tujuan besarnya. Semua pikirannya berpusat pada imperium komersialnya yang besar. Dia begitu yakin akan keberhasilan rencananya sehingga dia menganggap adalah kesalahan para direktur itu sendiri kalau mereka tidak mendapatkan untung jutaan dan, karena itu, dia merasa benar

untuk menuntut penghargaan puluhan ribu untuk diri sendiri, tentu saja di luar gajinya. Keluhannya yang terus-menerus bahwa dia tidak dibayar cukup tidaklah enak dibaca, tapi kita harus ingat bahwa gaji yang dibayarkan Kompeni memang sangat rendah dan bahwa para Direktur itu bisa mendapatkan keuntungan puluhan kali lebih tinggi kalau saja mereka menerima nasihatnya.

Tapi masih banyak yang kurang jelas dalam rancangannya. Dia tidak pernah bisa menjelaskan bagian mana dari perniagaan Asia itu yang akan diperuntukkan bagi Kompeni dan bagian mana untuk pemukim. Dia menjanjikan untung besar tanpa impor modal dari Belanda, tapi, di lain pihak, dia terus-menerus menulis bahwa para Direktur itu harus mengirimkan lebih banyak modal, dan penentang-penentangnya menuduh dia telah meningkatkan biaya di Indonesia dari 600.000 menjadi 1.600.000 gulden setahun. Para penentang itu menunjukkan bahwa Kompeni tetap harus memelihara persahabatan dengan orang Indonesia, dan bahwa memasukkan satu kelas penduduk yang diberi hak istimewa yang akan bersaing dengan tidak adil dengan para saudagar setempat akan menimbulkan reaksi buruk di seluruh Kepulauan Indonesia. Lagi pula, Kompeni punya pengalaman yang sangat buruk dengan sedikit pemukim yang telah mereka kirim sebelumnya. Kebrutalan rencana imperialis Coen tersebut membuat pendahulunya Laurens Reaal menulis: "Apakah memang sudah menjadi tujuan untuk memiliki semua perdagangan dan pelayaran dan bahkan pertanian di Hindia? Kalau begitu, bagaimana cara orang Hindia mendapatkan penghidupan? Apakah dibunuh atau dibiarkan mati kelaparan? Kalau begitu tidak akan ada keuntungan, karena di laut kosong, di negeri kosong, dan dengan orang mati, tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh". "Dengan kekuatan dan kekerasan kau akan melaksanakan rencanamu untuk memperoleh monopoli dagang di Hindia, yang tampaknya begitu indah di matamu, hingga membuatmu tidak segan-segan menggunakan segala cara yang tidak adil, bahkan barbar... tapi dengan inilah Kompeni akan mendatangkan kematiannya sendiri." "Justru sebaliknya, Kompeni harus mencoba memperluas perdagangan

penduduk asli."[19]

Tapi semua pendapat sepakat mengenai satu hal: bahwa Kompeni harus menangguk untung dari perdagangan antar-Asia, bukan dari impor dan ekspor langsung dari Eropa dan Asia. Sangat penting untuk melihat hal ini dengan jelas, karena ini memperlihatkan faktor-faktor mendasar perekonomian Asia pada abad ke-17. Hubungan antara Eropa dan Asia pada tahun-tahun itu bukanlah antara negeri asal dan koloni. Coen menunjukkan bahwa keuntungan dari perdagangan antar-Asia akan melebihi keuntungan perdagangan Eropa, sama "seperti negeri-negeri Asia ini melebihi Eropa dalam jumlah penduduk, konsumsi barang, dan kegiatan produksi".[20] Kuantitas produk Asia yang dapat diimpor ke Eropa kecil dan margin keuntungan terlalu terbatas bagi perusahaan dagang seperti VOC untuk mempertahankan posisinya berdasarkan keuntungan itu saja.

Sudah jadi pendapat umum bahwa penemuan jalur mengelilingi Tanjung Harapan menyebabkan rute perdagangan lama lewat Persia dan Suriah ke Italia dalam waktu singkat menghilang, tapi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Perdagangan rempah-rempah, yang dikirimkan lewat Gujarat di India, Ormuz di Persia, dan Aleppo di Suriah, terus berlangsung sampai awal abad ke-17, yakni sampai Belanda menaklukkan Maluku dan memaksa memutus semua hubungan dengan perdagangan asing lain.[21] Tapi mereka tidak pernah berhasil mengontrol perdagangan lada. Perdagangan sutra dari Persia lewat Suriah tetap aktif sampai abad ke-18, karena biaya pengiriman lewat Laut Tengah, meskipun ada bea cukai yang berat dari Turki, tetap semurah yang lewat Tanjung Harapan. Selama ini ada, Kompeni harus memperhitungkan persaingan orang Arab dan Persia dalam perdagangan ke Barat dan persaingan orang Cina dalam perdagangan ke Utara. Sebagian besar orang Belanda mengakui bahwa orang-orang Asia itu saudagar yang lebih baik dan pintar. Mungkin itulah kesalahan utama Coen bahwa dia pikir pemukim Belanda dapat langsung bersaing dengan orang-orang Asia ini.

Pada 1618, ketika para Direktur itu menunjuk Coen sebagai gubernur jenderal Hindia, keadaan sangat goyah. Penduduk Maluku protesterhadap klaim Belanda atas monopoli. Harga lada di Batam meroket karena ada persaingan dari pembeli-pembeli Belanda, Inggris, dan Cina. Di Jepara, pos dagang Belanda diserang dan dihancurkan oleh tentara raja Mataram; tiga orang Belanda terbunuh dan 17 ditawan. Coen memutuskan untuk menghadapi Banten terlebih dulu. Dia menghentikan semua pembelian lada dan mengancam akan memindahkan pabriknya ke Jayakarta. Dia hampir berhasil mengadakan kesepakatan dengan saudagar-saudagar lokal Cina dan telah memaksa harga lada turun 50 persen ketika Inggris campur tangan. Mereka menghimpun kekuatan penting dekat Banten dan menyerang kapal-kapal Cina, suatu tindakan yang diyakini Coen adalah pendahuluan untuk menyerang kapal-kapalnya sendiri. Dia memerintahkan gudang Kompeni di Jayakarta untuk secara rahasia diubah menjadi benteng yang andal.[22] Raja Jayakarta mengetahui apa yang terjadi dan memprotes, sambil meminta bantuan Inggris. Karena itu Coen memindahkan kantor pusatnya ke Jayakarta dan menyerang satu kubu pertahanan yang telah didirikan penduduk di seberang permukiman Belanda. Kubu itu ditaklukkan, dan dalam peristiwa itu pos dagang Inggris dibakar habis. Inilah awal perang terbuka. Sebelas kapal Inggris berpatroli di dermaga Jayakarta dan mengancam akan memotong semua komunikasi dengan dunia luar. Dengan tujuh kapalnya Coen bertempur melawan mereka selama tiga jam. Lalu dia memutuskan untuk mundur sementara waktu dari hadapan kekuatan musuh yang lebih unggul. Dia berlayar ke Maluku, di situ dia berharap mengumpulkan lebih banyak kapal, dan meninggalkan garnisun di benteng Jayakarta dengan perintah mempertahankan posisi mereka sampai akhir. Dia mengeluh dengan pahit dalam laporannya kepada para Direktur bahwa segala sesuatu terancam musnah karena dia kekurangan kapal dan pasukan, dan dia berani menulis kepada para atasannya di Amsterdam, "Sungguh mati tidak ada musuh

yang lebih mencelakakan tujuan kita daripada kenaifan dan ketololan yang ada di antara kamu, tuan-tuan!"[23]

Keadaan di Jayakarta lebih baik daripada yang diperkirakan Coen. Benteng Belanda selamat, bukan karena kepahlawanan orang-orang yang mempertahankannya melainkan karena musuh-musuhnya tidak bisa sepakat siapa yang akan memilikinya setelah ia ditaklukkan. Baik Inggris maupun Raja Jayakarta ingin memiliki benteng itu sendiri, sementara raja Banten tidak mau membiarkan salah satu dari mereka memilikinya. Ketika garnisun yang putus asa itu memutuskan untuk menyerah kepada Raja Jayakarta, pasukan Banten mencegah penyerahan itu. Wilayah Jayakarta direbut oleh kesultanan Banten, dan rajanya diusir. Inggris mundur dalam kebingungan, takut terjadi apa-apa dengan permukiman dan barang mereka di pelabuhan Banten. Ini memberikan keberanian baru kepada garnisun Belanda, dan antara jam-jam doa dan malam-malam pesta pora dengan anggur dan wanita mereka bersumpah dengan khidmat akan mempertahankan benteng itu "selama Tuhan mengizinkan". Setelah mengambil keputusan berani ini, para perwira tiba-tiba menemukan bahwa benteng itu tidak punya nama. Pada pertemuan semua anggota garnisun pada 12 Maret 1619, benteng itu diberi nama Batavia "seperti Belanda biasa disebut pada zaman kuno".[24] Demikianlah, asal-usul kota Batavia jauh dari kejayaan. Pada Mei 1619 armada Coen kembali dari Maluku. Pada 28 Mei Sang Gubernur Jenderal memasuki benteng Batavia. Dua hari kemudian dia memimpin pasukannya, 1.000 orang, untuk menyerang. Dengan hanya satu orang gugur, kota Jayakarta ditaklukkan. Jayakarta dibakar habis, dan diduduki VOC. Coen langsung memerintahkan pembangunan satu benteng baru yang lebih besar dan satu kota Belanda yang kecil, yang dibangun dalam beberapa tahun berikutnya mengikuti gaya di negeri leluhur, dengan kanal dan jembatan. Untuk waktu lama Coen menolak memberi nama Batavia pada diriannya, tapi pada 4 Maret 1621, para Direktur Kompeni menguatkan resolusi yang diambil oleh garnisun Batavia.

Dengan penaklukan Jayakarta dan pendirian Batavia, diikuti blokade atas pelabuhan Banten, orang Belanda berhasil mengontrol Laut Jawa. Armada Inggris, yang dengan ceroboh dibubarkan oleh para komandannya, diserbu di beberapa titik, dan tujuh kapal tertawan. Yang lain mundur ke India. Raja James memprotes keras kepada duta besar Republik Belanda di London: "Orang-orang kalian merampas hak milik rakyatku, kalian memerangi mereka, kalian membunuh dan menyiksa sebagian dari mereka. Kalian tidak pernah mempertimbangkan manfaat yang kalian terima dari Takhta Inggris yang membuat dan memelihara kalian sebagai bangsa merdeka. Kalian ada orang di Hindia yang layak dihukum mati. Orang-orang kalian memperkenalkan Pangeran Oranje kalian sebagai raja besar di Indonesia sambil menggambarkan aku sebagai penguasa kecil dan anak buah Pangeran itu. Kalian adalah penguasa lautan di segala penjuru dan bisa melakukan apa saja yang kalian mau."[25] Pemerintah Belanda berusaha meredakan kemarahan sang Raja. Mereka bahkan membuat perjanjian dengannya untuk bisa mengadakan kegiatan bersama di Asia (1619) tapi kegiatan Inggris di Indonesia sudah hampir berakhir. "Pembantaian Ambon" pada 1623 yang termasyhur itu, walaupun sering diperingati dalam literatur Inggris dan propaganda abad ke-17 dan ke-18, hanyalah suatu epilog dramatik.[26] Itu bahkan bukan pembantaian. Delapan orang Inggris dihukum mati karena dituduh ingin merebut benteng Ambon dengan bantuan sejumlah tentara bayaran Jepang. Mereka dihakimi di pengadilan di Ambon. Penyiksaan dilakukan, tapi sayang hal ini adalah perkara biasa pada zaman itu. Orang Inggris menganggap hukuman mati orang sebangsa mereka sebagai alasan bagus untuk mundur dengan bermartabat dari posisi yang sudah tanpa harapan. Mereka pura-pura meninggalkan Maluku bukan karena mereka tidak bisa melakukan bisnis apapun yang menguntungkan, tapi sebagai protes atas kekejaman perwira Belanda. Selama 250 tahun "pembantaian Ambon" mempertahankan nilai propagandanya di Eropa. Di Indonesia itu hanyalah satu dari banyak peristiwa ber-darah dalam sejarah persaingan komersial yang tak kenal belas

kasihan.

Hal-hal yang lebih buruk terjadi di Kepulauan Banda. Coen telah memutuskan untuk menghancurkan semua perlawanan dan memastikan monopoli perdagangan pala dengan penaklukan total kepulauan kecil itu. Orang Banda mempertahankan diri dengan lihai dan berani, tapi keadaan mereka tanpa harapan. Kepulauan Banda diduduki setelah pertempuran gigih, dan praktis penduduknya terbasmi habis. Ini adalah tindakan kejam yang bahkan mengagetkan orang-orang zaman itu. Para Direktur di Amsterdam menarik diri dari konsekuensi perintah mereka sendiri, dan memberikan peringatan kepada Coen, dengan mengatakan bahwa dia harus lebih berperasaan. Catatan yang lebih mengena ditulis secrang mantan pejabat Kompeni yang mengatakan: "Kita harus sadar bahwa orang Banda bertempur untuk kemerdekaan negeri mereka, dengan cara yang persis sama seperti yang kita lakukan di Belanda selama bertahun-tahun. Keadilan yang lebih besar seharusnya dapat dilakukan untuk mereka.... Tapi hal itu tidak diizinkan, ada orang yang ingin nama mereka tercatat dan diingat sampai akhir zaman. Tapi masa depan akan mengutuk mereka seperti orang Spanyol dikutuk atas kekejaman mereka di Hindia Barat.... Hal-hal itu dilakukan dengan cara yang sangat kriminal dan penuh nafsu pembunuhan sehingga darah orang-orang malang itu berteriak ke langit menuntut pembalasan..."[27]

Sementara itu, Belanda di Batavia terus-menerus hidup di bawah ancaman serangan Jawa. Dari kedua kesultanan Jawa tidak ada satu pun yang melepaskan klaim atas kepemilikan kota itu dan wilayah bekas Jayakarta.[28] Banten mendasarkan klaimnya atas penaklukan wilayah itu selama pengepungan 1618, sementara Mataram mengacu pada kedudukannya sebagai penerus imperium Majapahit yang kuat itu, penguasa seluruh Indonesia.

Pada tahun terakhir dekade ketiga abad itu, kedua raja Jawa itu mencoba menaklukkan kota baru itu. Sekelompok pendekar Banten menyerbu masuk ke dalam benteng Batavia pada Malam Natal 1617. Gagal dalam usaha mereka, mereka *mengamuk* dan

lolos setelah membunuh beberapa serdadu garnisun. Delapan bulan kemudian, seorang duta besar Mataram muncul di gerbang kastil dan mengumumkan kedatangan satu armada besar kapal kargo yang dimuati makanan dan hewan ternak, suplai yang dipersembahkan Sultan kepada "sahabat-sahabat" di Batavia. Ketika armada itu tiba, para awaknya tiba-tiba menyerang tembok benteng dan hanya bisa dikalahkan dengan susah-payah. Inilah awal perang terbuka. Tentara Jawa menyerbu bagian luar benteng-benteng itu, tapi kalah total dalam suatu serbuan kilat oleh garnisun. Serangan kedua Jawa dilakukan dengan kekuatan lebih besar tapi juga gagal. Selama 30 hari ribuan serdadu Jawa bekerja keras membangun bendungan di sungai Ciliwung dengan harapan akan membuattempat itu kehabisan air minum. Panglima Jawa memerintahkan serbuan terakhir yang nekat, dan ketika ini juga gagal dia mundur, tapi hanya setelah dia menghukum mati hampir 800 tentaranya yang sial sebagai hukuman atas kekalahan itu. "Kami tidak mungkin percaya kekejaman seperti itu sungguh ada," kata Coen, "kalau tidak kami lihat dengan mata kepala sendiri mayat-mayat mereka yang dihukum mati itu."

Sultan Mataram tidak membatalkan rencananya. Persiapan dibuat untuk menyerang dengan kekuatan militer penuh dari imperiumnya. Puluhan ribu rakyatnya dipanggil untuk angkat senjata, dan perlahan-lahan satu kekuatan yang mengesankan terkumpul di sekitar Batavia. Pasukan ini mengancam bukan hanya Belanda tapi terutama juga Sultan Banten yang, karena itu, lebih suka berdamai dengan Kompeni. Setelah 10 tahun, blokade atas pelabuhan Banten dicabut dan hubungan komersial normal pun pulih.

Saat itu, seperti sekarang, garis suplai pasukan sangat penting dalam strategi. Penguasa Mataram tidak dapat menyediakan suplai yang diperlukan pasukannya lewat darat. Dia harus bergantung pada pengapalan di sepanjang pantai, tapi jalur laut sangat rentan terhadap serangan oleh kekuatan laut Belanda yang jauh lebih hebat. Coen memanfaatkan kesempatan ini sebaik-

baiknya, dan 200 kapal penuh beras dihancurkan. Ketika tiba di Batavia, pasukan besar Mataram sudah terancam kelaparan. Garnisun itu, yang bersemangat tinggi karena keberhasilan awal ini, bertahan dengan gagah berani. Garnisun itu terdiri atas tentara banyak ras--Belanda, Jepang, Cina, India, dan Indonesia. Orang Cina, yang pada masa itu tidak punya reputasi besar dalam hal keberanian, mengherankan orang Belanda dengan kehebatan mereka yang luarbiasa dalam bertempur. Setelah lima minggu, pasukan Mataram sudah kelaparan dan terpaksa mundur. "Orang-orang ini pulang ke rumah mereka dengan memelas. Patroli kami mengikuti pasukan itu, dan di sepanjang jalan ditemukan tentara yang mati kelaparan, kerbau yang mati kelelahan, kereta, senjata, dan perkakas yang tercecer." Hanya 12 orang Belanda dan bahkan lebih sedikit lagi serdadu Jepang dan Cina yang gugur di kota, tempat pola normal kehidupan tetap tidak terganggu. Tapi Coen tidak sempat hidup untuk menyaksikan kemenangan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati dan berani itu. Penyakit tropis menyebabkan kematiannya pada malam 20 September 1629. Tubuhnya dikuburkan dengan khidmat di Balai Kota, dari situ dipindahkan ke gereja Batavia ketika bangunan ini diselesaikan pembangunannya. Jauh sesudah itu, ketika pusat kehidupan Eropa di Batavia berpindah lebih ke selatan, gereja ini digusur, dan lokasi persis kuburan pendiri Batavia ini pun terlupakan. Pemujaan pahlawan bukan hal lazim di kalangan Belanda, dan sifat keras Coen, yang tidak pernah dapat memaafkan kesalahan, bahkan yang timbul dari kelemahan manusia yang bisa dimaklumi, dan yang hatinya tidak pernah tersentuh oleh penderitaan musuh-musuhnya, tidak menarik untuk dilestarikan.

Kemenangannya atas kekuatan bersenjata Mataram itu memastikan keamanan Batavia. Tapi masih menjadi pertanyaan bagaimana hubungan ketiga kekuatan di Jawa tersebut, Batavia, Banten, dan Mataram, akan berkembang dan bagaimana kekuatan lain di Kepulauan Indonesia, Aceh dan Makasar, akan bereaksi terhadap perkembangan ini. Pengaruh Spanyol dan Portugis, yang

masih punya pijakan di Tidoredan Malaka, praktistenggelam oleh keunggulan kekuatan laut VOC.

Jelas, penguasa-penguasa Indonesia itu tidak melihat kemenangan Belanda sebagai hasil dari pergulatan keras untuk penguasaan laut. Mereka hanya samar-samar menyadari keberadaan benua-benua besar dan negara-negara mahakuat di luar Asia Timur dan Selatan, dan karena itu, cenderung menafsirkan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam bab ini dengan cara mereka yang khas. Babad besar raja-raja Mataram memecahkan persoalan ini dengan memuaskan penguasa-penguasa itu.

BAB 7

KEUNGGULAN KEKUATAN LAUT DI INDONESIA

SERANGAN Mataram atas Batavia gagal total. Tapi, prestise Mataram tidak rusak oleh kekalahan itu. Raja-raja bawahannya tetap setia dan tunduk pada tuntutan raja Mataram agar mereka tinggal dekat keratonnya, di mana hidup mereka berada di bawah kekuasaan sewenang-wenang Agung. Penguasa-penguasa Palembang dan Jambi di Sumatra mengirimkan duta dan hadiah upeti untuk Mataram, dengan harapan memperoleh bantuan Mataram melawan musuh-musuh mereka, walaupun Mataram tidak bisa memberikan lebih daripada sekadar dukungan moral. Sang Susuhunan tetap bertekad untuk memperluas kekuasaannya atas daerah-daerah yang sampai saat itu tidak tertaklukkan dan daerah di luar Jawa. Tekad seperti ini tidak umum dalam sejarah Indonesia sehingga memerlukan penjelasan lebih jauh. Tentu selalu ada penjelasan sederhana dan mudah, karena nafsu berkuasa sangat tertanam dalam fitrah manusia. Tapi usaha Agung yang tiada henti untuk memperluas lingkup kekuasaannya dilakukan dengan begitu gigih sehingga timbul kesan bahwa dia terdorong oleh suatu gagasan, bahwa dia sedang berusaha memenuhi suatu misi yang dia percayai telah diberikan kepadanya.

Suatu penjelasan dapat ditemukan dalam sejarah puja-puji

yang dia perintahkan ditulis dengan alasan sama seperti Prapança menulis karyanya, *Nagarakertagama*, untuk Raja Hayam Wuruk. Pujangga-pujangga istana Agung menggubah *Babad Tanah Jawi* yang dimaksudkan untuk menggantikan narasi-narasi "sejarah" Jawa yang lebih tua dan berfungsi menyesuaikan catatan masa lalu dengan kebutuhan masa kini.[1] Beberapa komentar tentang struktur *Babad Tanah Jawi* mungkin bisa memperjelas pokok masalah tersebut.

Studi-studi terakhir menunjukkan bahwa sejarah Mataram ini telah direvisi dan diperluas beberapa kali selama abad ke-17 dan ke-18. Ada hubungan erat antara revisi berulang-ulang *Babad* ini dengan perpindahan periodik kediaman Sultan-Sultan Mataram ke keraton baru dalam abad-abad itu. Pada 1681, Sultan Amangkurat II memindahkan kediamannya dari Mataram ke Kartasura, dan, pada 1744, Pakubuwana II memindahkannya dari Kartasura ke Surakarta, tempat keturunan Agung masih tinggal sampai hari ini. Setiap perpindahan kediaman raja menandai awal baru dalam sejarah dinasti itu, dan setiap kali sejarah resmi direvisi untuk menjaga catatan itu tetap selaras dengan kebutuhan masa itu.[2] Dikatakan bahwa kata Jawa *babad* pada mulanya bermakna "membuka lahan untuk dibudidayakan". Sudah kita lihat di bab sebelumnya bagaimana sejarah Majapahit dimulai dengan cerita Pangeran Wijaya yang membuka lahan tempat dia mulai membangun keraton kerajaan terakhir Hindu-Jawa yang kemudian menjadi terkenal. Sejarah Mataram mulai dengan cerita serupa: sebidang tanah diberikan kepada salah satu penerus Agung untuk dibudidayakan dan tempat dia membangun kediaman.[3] Hubungan antara "membuka lahan untuk dibudidayakan" dan "membuka halaman baru dalam sejarah Jawa" tampak jelas. Tampaknya, tradisi kuno periode Hindu-Jawa dengan kuat terus memengaruhi penguasa-penguasa Islam abad ke-17, yang agama barunya tidak mengubah konsep dasar negara dan penguasa. Karena itu bisa dikatakan bahwa *Pararaton*, *Nagarakertagama*, *Babad Tanah Jawi*, dan *babad-babad* lain—yang banyak

jumlahnya– merupakan contoh-contoh yang sama dari satu tipe sastra historis.

Babad Tanah Jawi merangkum sejarah Jawa yang lebih kuno dengan cara sedemikian rupa sehingga mengarahkan perhatian pembaca kepada kedudukan Mataram yang unggul, yang dikatakan adalah negara penerus yang sah dari semua kerajaan pendahulunya, khususnya Majapahit. Ia berusaha membuktikan, bukan hanya bahwa Mataram adalah penerus kerajaan Hindu-Jawa terakhir, tapi juga bahwa keluarga penguasa adalah keturunan langsung dari penguasa Majapahit. Demikianlah, Agung dijadikan keturunan Hayam Wuruk dan kebijakannya melanjutkan kebijakan patih Majapahit yang agung, Gajah Mada. Perang-perangnya yang tak habis-habis mungkin saja diilhami oleh keyakinan bahwa dia ditakdirkan dan bahkan berkewajiban memulihkan imperium Majapahit yang dalam khayalan lebih jaya daripada dalam kenyataan.[4]

Studi lebih jauh *Babad Tanah Jawi* sampai pada hipotesis yang menarik bahwa sejarah legenda ini mungkin sudah ditulis ulang pada masa Agung sendiri.[5] Versi pertama mungkin dikarang pada 1626, beberapa tahun setelah kekalahan serangan atas Batavia. Penulisan ulang cerita itu diperlukan *karena* kekalahan itu, dan hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan peristiwa itu sedemikian rupa sehingga tidak merusak reputasi Susuhunan tapi bahkan meningkatkannya. Pujangga itu mencoba menjelaskan bahwa kalau saja Agung *benar-benar* ingin menghancurkan Batavia, dia bisa melakukannya tanpa unjuk kekuatan militer. Kekuatan gaibnya sudah sangat cukup untuk mencapai tujuan itu. Karena, kata cerita itu, Agung menunjuk dua komandan, satu setia pada raja, sedang satu lagi diketahuinya sebagai pengkhianat di dalam hatinya. Raja mengirimkan komandan kedua, bernama Mandureja, melawan Batavia dan dengan terbuka memerintahkannya mengusir Belanda dari Jawa dengan kekuatan senjata. Tapi pada saat yang sama, dia mengirimkan komandan lain, bernama Purbaya, untuk menjaga agar unjuk kekuatan itu tidak berubah jadi perang

total. Unjuk kekuatan saja sudah dianggap cukup oleh sang Raja. Purbaya pergi ke dekat Batavia dengan kekuatan gaib. Sambil terbang di udara, Purbaya membuat sebagian tembok Batavia runtuh dengan mengucapkan jampi-jampi. Jelas, Belanda tidak kenal tenaga gaib dan karena itu tidak bisa mempertahankan diri dan tidak perlu ditakuti sebagai musuh. Perang tidak diperlukan. Tapi Mandureja, yang tidak diberitahu tentang keberhasilan Purbaya, terus maju menyerang. Mandureja dikalahkan karena dia bertindak menentang kehendak tuannya yang *sebenarnya*, dan Belanda, yang kemudian membunuh Mandureja, tanpa mereka ketahui telah menjadi eksekutor pengkhianat itu. Pemerintah Batavia, yang gembira karena lepas dari ancaman Mandureja, mengirimkan duta ke istana Mataram untuk berterimakasih kepada Sang Raja Besar.

Penggalan cerita ini mungkin mengacu pada duta yang coba dikirim oleh Belanda kepada Agung setelah serangan itu dengan harapan mengikat perdamaian.[6] Ini menunjukkan bagaimana suatu misi diplomatik rutin (dilihat dari sudut pandang Barat) ditafsirkan menurut konsep tradisional hubungan luar negeri di Jawa abad ke-17. Penafsiran itu menjadikan Batavia suatu negara bawahan Jawa, dan menjadikan pemakaian kekerasan lebih jauh tidak perlu. Belanda boleh saja yakin bahwa pertempuran berakhir karena kehebatan mereka, tapi orang Jawa yakin bahwa keunggulan mereka telah diakui lawan.

Konsep Jawa tentang hubungan baru itu lebih jauh dikembangkan dalam cerita para pujangga keraton, yang membuat pemimpin Belanda, gubernur jenderal Jan Pietersz. Coen menjadi pahlawan keturunan Jawa. Menurut cerita, Batavia diperintah oleh Mur Jangkung, yang punya hubungan dengan dinasti Mataram. Ibunya adalah ratu Pajajaran, kerajaan Shiwais kuno di Jawa Barat. Dia diusir oleh suaminya, penguasa Jayakarta. Ayahnya adalah saudara Sekender (kata Jawa untuk Alexander yang menyimbolkan "Penakluk Barat") yang oleh orang Melayu di Minangkabau dijadikan salah satu pahlawan legendaris mereka.

Dengan demikian, ketika Mur Jangkung berkuasa di Batavia, dia hanya mengambil kembali hak miliknya.[7] Demikianlah, semua kekuasaan dan kemuliaan di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya menjadi milik raja Mataram atau berasal dari dinastinya. Jawa Barat, Pajajaran dan Batavia, Sumatra dan Kalimantan, Bali dan pulau-pulau lebih kecil–semuanya bagian dari *satu* kerajaan di dalam pikiran penulis-penulis *Babad* itu, dan seluruh Kepulauan Indonesia bersatu di bawah pemerintahan tuan mereka yang penuh rahmat.

Tentu saja ada perbedaan besar antara yang ideal dan kenyataan. Setelah 1629, Banten aman dari serangan Mataram dari laut. Belanda di Batavia secara efektif menghalangi jalan. Jalur darat tidak praktis. Dataran rendah di sekitar Batavia berpenduduk jarang dan sebagian besar tertutup hutan. Dalam dekade-dekade pertama keberadaan Batavia, sedikit saja orang Belanda yang menjelajah jauh di luar tembok kota mereka. Hutan itu penuh binatang liar dan pada masa itu berburu macan masih merupakan acara santai biasa bagi beberapa gubernur jenderal. Sampai 1636 penguasa Batavia memberikan hadiah kepada setiap badak yang dibunuh di sekitar kota. Hutan itu juga penuh "bandit"–mungkin partisan Banten–dan pemerintah Batavia juga merasa pantas memasang harga untuk setiap kepala bandit yang terbunuh. Usaha-usaha ini tidak membuat keadaan tambah baik dan dataran rendah Batavia belum juga masa damai sampai Batavia berdamai dengan Banten pada 1645.

Satu-satunya kesempatan Mataram untuk memperluas kekuasaannya terletak di timur. Di sini, Blambangan, di ujung paling timur semenanjung, tetap merdeka. Rakyatnya mempertahankan kepercayaan Shiwais mereka dan kadang-kadang mereka disokong Bali yang juga berhasil bertahan dari dampak Islam. Beberapa tahun setelah usahanya yang gagal di barat, Agung mulai bersiap melakukan serangan habis-habisan di wilayah-wilayah non-Muslim ini. Sementara itu, ia mengawasi orang Belanda di Batavia dengan saksama. Agung bernegosiasi

dengan Portugis di Malaka untuk membangun persekutuan melawan musuh bersama mereka, tapi kekuasaan Portugis di Kepulauan Indonesia sudah mendekati hari-hari terakhir. Dia juga mendekati beberapa pedagang Inggris di pantai Jawa, tapi East India Company pada waktu itu tidak sanggup menantang Belanda. Jadi, dengan mengandalkan sumber dayanya sendiri, dia berusaha menaklukkan wilayah timur dan Bali pada 1639. Blambangan langsung dapat diduduki. Tentara Mataram kemudian menyeberangi selat sempit antara Jawa dan Bali, tapi Bali memberikan perlawanan yang gigih dan penaklukan pulau itu tak terselesaikan. Setelah pasukan Jawa pergi, Bali segera mengambil kembali semua wilayah mereka yang telah direbut, termasuk sebagian Blambangan. Tapi, banyak penduduknya telah dibawa pergi oleh tentara Agung dan daerah itu terabaikan untuk waktu yang lama.

Inilah perang Agung yang terakhir. Dia masih memerintah dengan tangan besi tapi mimpi memulihkan imperium Majapahit telah berakhir. Kekuasaan Belanda meningkat: pada 1641, mereka menaklukkan benteng utama Portugis, Malaka. Sejak itu laut-laut di Indonesia dikontrol oleh VOC, yang karena keunggulan lautnya menjadi penguasa atas Kepulauan Indonesia. Di dunia hanya tinggal satu kekuatan yang cukup kuat untuk memberikan tekanan terhadap Belanda demi kepentingan penguasa-penguasa Indonesia, dan kekuatan itu terletak jauh sekali, di ujung paling barat Asia. Padishah Turki merupakan salah satu kekuatan besar Eropa, yang bersaing dengan Spanyol untuk mengendalikan Laut Tengah. Mereka biasanya menjaga hubungan baik dengan Belanda yang juga merupakan musuh Spanyol, tapi mereka bisa sangat merusak kepentingan perdagangan Belanda kalau mereka mau. Sebagian raja Indonesia tampaknya percaya bahwa Sultan Turki akan lebih cenderung menolong mereka kalau mereka menunjukkan perhatian lebih besar terhadap Islam dan lebih ketat mengikuti ajarannya. Raja Banten yang punya hubungan rutin dengan pelabuhan-pelabuhan India dan Persia lewat

para pedagang yang datang ke ibukotanya memutuskan untuk mengirimkan duta untuk naik haji di Mekah. Mereka pulang dengan satu dokumen yang serius, dikeluarkan oleh beberapa orang yang "sangat penting" di Kota Suci itu, yang memberikan hak kepada penguasa Banten untuk menyandang gelar Sultan. Ini terjadi pada 1638 dan mendorong Susuhunan Mataram melakukan hal yang sama. Utusannya pergi ke Arab dan pulang, bukan sekadar dengan dokumen, tapi dengan orang-orang yang mengeluarkan dokumen itu sendiri. Akibatnya, Mataram menjadi kesultanan, dan Susuhunan Nyakra-Kusuma menjadi "Sultan Muhammad Agung".

Memang mungkin saja bahwa nilai tinggi yang diberikan Sultan pada semua hubungan dengan ibu negeri Islam itu tidak hanya diilhami oleh kegunaan politik hubungan-hubungan itu, tapi juga oleh perhatian keagamaan yang murni. Dalam usaha mereka mencari motif "lebih dalam" di balik tindakan politik, sejarawan juga cenderung mempertanyakan ketulusan sang pelaku. Apapun motif Sultan Agung, pernyataan keyakinannya yang lebih dalam terhadap Islam jelas *mengakibatkan* penerapan aturan-aturan Islam yang lebih ketat di kerajaannya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dia berusaha menyesuaikan administrasi peradilan dengan aturan Islam, namun reformasinya tidak sepenuhnya berhasil. Dia menetapkan lembaga peradilan yang anggotanya diambil dari ulama Islam dan memercayakan kepada mereka banyak perkara yang sampai masa itu diadili oleh raja atau wakilnya. Bahwa keadilan ditetapkan oleh suatu proses *pengadilan* yang terdiri atas hakim-hakim dan bukan oleh satu hakim, sudah merupakan suatu konsesi terhadap tradisi Jawa, terhadap "adat". Hukum legal untuk perkawinan memberikan perlindungan lebih besar untuk hak-hak perempuan di Jawa daripada di mana pun di dunia Islam. Begitulah, *Suria Alam*, suatu undang-undang Jawa yang dikarang pada waktu itu, mencerminkan campuran hukum Indonesia dan Muslim.

Dengan demikian, ulama-ulama Muslim mulai berperan

lebih penting di Mataram. Ini memulai suatu perubahan dalam masyarakat Jawa yang mungkin punya akibat hebat. Kita bisa dengan kuat berasumsi bahwa penerapan hukum Islam yang lebih ketat itu menciptakan ketegangan tertentu antara kaum bangsawan lama—yang tetap merupakan kelas sangat berkuasa di Jawa sampai abad ke-19—dan kelas penguasa agama di Jawa yang, biasanya, bukan berasal dari kalangan bangsawan. Di Sumatra, antagonisme serupa menimbulkan pertikaian keras bahkan sampai 1940-an.

Laporan para duta yang dikirimkan pemerintah Batavia ke istana Mataram memungkinkan kita memperoleh pandangan lebih jelas tentang negara Jawa abad ke-17 ini dibanding tentang kerajaan-kerajaan pra-Islam. Struktur sosial negara Majapahit dan Mataram, sejauh kita ketahui, pada intinya sama dan deskripsi Mataram karena itu juga bermakna untuk menambah pengetahuan kita tentang negara-negara yang lebih tua.[8]

Mataram dalam segala aspek adalah negara feodal. Raja menduduki posisi sakral. Itu berlaku untuk Agung, sebagaimana untuk Airlangga atau Hayam Wuruk. Otoritasnya jauh melampaui batas-batas kekuasaan yang ditentukan dalam praktik Islam Ortodoks. Urutan pertama di bawah raja dipegang oleh para *pangeran* dari keluarga raja atau keluarga raja dari wilayah yang tadinya merdeka. Para pangeran itu biasanya harus bertempat tinggal di istana sang Raja-Sultan, untuk memastikan kesetiaan absolut mereka.

Mereka hidup dalam kemegahan, tapi juga terus-menerus ketakutan akan kehilangan nyawa mereka. Wilayah negara dibagi ke dalam sejumlah daerah dan setiap daerah atau provinsi diperintah oleh *tumenggung* atau gubernur. Tumenggung daerah kampung halaman raja, Mataram itu sendiri, tampaknya juga berfungsi sebagai *patih*, perdana menteri, atau mungkin lebih tepat, sebagai penasihat utamanya, suatu kedudukan yang memberikan kesempatan besar bagi orang yang mendudukinya, tapi juga bahaya maut. Pengawasan atas wilayah pantai

dipercayakan kepada dua "komisaris", satu di bagian timur dan satu di bagian barat pantai utara. Adanya kantor ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pelabuhan-pelabuhan dagang yang sedang menyusut itu, dari Semarang dan Jepara di barat sampai Surabaya di timur. Pantai selatan hanya punya sedikit pelabuhan yang bisa dipakai dan bagi orang Jawa, Samudra Hindia yang besar itu adalah batas dunia berpenghuni. Karena Mataram hanya bisa dicapai dari pantai utara, para komisaris wilayah pantai juga bertanggungjawab untuk urusan luar negeri, entah itu diplomatik atau komersial.

Raja tinggal di dalam Keraton, suatu jaringan bangunan yang rumit. Hanya sebagian dari bangunan-bangunan ini yang dapat dikunjungi rakyat dan duta asing. Para duta ini tertarik untuk tahu *di mana* mereka diterima dan pada jarak berapa mereka ditempatkan dari raja, karena seberapa penting kedatangan mereka di mata raja dan bagaimana perasaan raja terhadap pemerintah mereka dapat diukur lewat aturan-aturan protokol itu. Di dalam Keraton, tersembunyi dari mata orang biasa dan orang yang ingkar, *pusaka* dipelihara dan dijaga. Ini adalah barang-barang sakral yang pemeliharaannya dipercaya menjadi gantungan keberadaan kerajaan itu sendiri. Kapan saja raja muncul dan duduk sebagai kepala negara, untuk menerima raja bawahan atau duta asing, atau sekadar menunjukkan diri kepada rakyatnya, dia diiringi pengawal perempuan yang biasanya adalah satu-satunya orang yang duduk di dekatnya. Di tangan mereka ada tombak atau lembing panjang siap siaga melindungi tuan raja mereka. Tapi penjagaan ini diabaikan ketika raja ikut turnamen mingguan yang selalu diadakan pada hari yang sama. Saat itu ia bebas bercampur-baur dengan pengikut-pengikut utamanya atau bahkan ikut serta dalam permainan itu sendiri. Di luar Keraton, tapi tidak terlalu jauh, ada lapangan tertutup yang luas tempat semua binatang liar disimpan untuk dibunuh oleh raja dalam acara perburuan. Penggambaran acara-acara ini sangat serupa dengan cerita Prapança tentang perburuan besar Majapahit.

Pengunjung Belanda bercerita bahwa bagian tengah kerajaan itu berpenduduk padat. Di sini, sawah padi sambung-menyambung menutupi perbukitan. Rijklof van Goens, yang pergi ke Mataram lima kali sekitar pertengahan abad ke-17, memperkirakan jumlah desa di bagian tengah kerajaan itu ada 3.000, masing-masing didiami seratus keluarga atau lebih. Ini berarti ada penduduk beberapa juta orang di Jawa Tengah saja. Jalan-jalan yang biasanya hanya jalan setapak untuk kuda dan pejalan kaki, dijaga ketat, dan di perbatasan daerah Mataram sendiri ada gerbang yang dijaga tentara yang tidak membolehkan siapapun meninggalkan negeri itu tanpa izin Sultan. Penjaga-penjaga ini juga mengontrol ekspor barang. Salah satu dari duta-duta Belanda yang pertama mencatat barang-barang menarik yang ekspornya dilarang: kuda, sapi, kerbau, dan perempuan.[9]

Bagi seorang raja seperti Agung, yang hubungannya dengan raja bawahan dan dunia luar diatur ketat oleh tradisi dan konsep hierarkis yang sudah baku, sikap orang Belanda di Batavia pastilah sulit dimengerti. Tentu saja dia tahu bahwa mereka adalah "saudagar", dan begitulah penilaiannya terhadap mereka, yakni orang dari kelas bawah. Dia punya alasan cukup untuk mengenal kekuatan militer mereka, tapi dia mungkin tidak kaget ketika, hanya beberapa tahun sesudah serangannya atas kota itu, pemerintah Batavia mengabarkan bahwa mereka bersedia mengirimkan duta dan hadiah kepadanya, suatu tindakan yang pastilah dia tafsirkan sebagai tawaran tanda tunduk. Bahkan pada 1634 pemerintah Batavia memutuskan untuk mengakui kekuasaan Mataram sebagai negara atasan, tentu saja dengan syarat Kompeni dibiarkan bebas memerintah kota itu sesuka mereka. Batavia lebih suka perdamaian dan penyerahan hadiah tahunan, yang ongkosnya mungkin 50 sampai 60 ribu gulden, daripada perang yang jauh lebih mahal. Lagi pula, Sultan itu juga wajib memberikan sesuatu sebagai balasan, dan apa yang Kompeni inginkan adalah ketersediaan regular berasdengan harga tetap dan rendah, yang bisa diberikan Agung dengan merugikan

rakyatnya. Kehidupan satu petani, atau bahkan salah satu raja bawahannya yang kecil, bukan perkara penting buat Sultan, yang bisa saja, kalau dia mau, membuang semua nyawa dan harta milik di negerinya. Agung mungkin heran melihat pemerintah Batavia sangat murka ketika orang-orangnya membunuh beberapa orang Belanda dan menawan yang lain. Belanda menjadikan hal ini perkara besar tapi ternyata sulit mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

Orang-orang Belanda itu terbukti kuat dan, karena itu, Mataram menganggap perlu berurusan dengan mereka, dan kalau perlu menjaga mereka tetap tidak berubah. Tapi dapatkah raja menghormati orang-orang yang tinggal di Batavia? Di sana, di tanah Jawa, ada kota di mana tidak ada orang Jawa dan yang didiami orang asing, hampir semuanya orang Belanda dan Cina. Di sana, segala sesuatu yang dianggap sakral bagi orang Jawa, dianggap tahayul buta. Tidak ada kebangsawanan di sana dan kehidupan bangsawan tidak dikenal. Beberapa ratus pejabat Kompeni Belanda membentuk kelaspenguasa. Gubernur Jenderal dan pembantu-pembantu utamanya tinggal di benteng kota, bangunan persegi empat dengan empat menara benteng. Mereka berbagi kediaman ini dengan sejumlah jurutulis dan tukang ahli serta dengan serdadu garnisun. Di luar benteng satu kota kecil tumbuh. Seperti di Belanda, rumah-rumah dibangun berdempet-dempet sepanjang kanal. Penduduk Belanda mempertahankan cara hidup dan pakaian nasional mereka dan tidak berusaha menyesuaikan diri dengan iklim tropis. Mereka dibayar rendah kalau bekerja pada Kompeni dan kegiatan ekonomi mereka sangat dibatasi kalau mereka termasuk kelompok yang disebut "penduduk bebas". Sebagian besar mereka hidup dalam kondisi yang akan dianggap tidak berperikemanusiaan kalau terjadi sekarang. Sangat sedikit layanan medis, bahkan jauh lebih sedikit daripada yang bisa diperoleh di Eropa masa itu, dan bahkan juga sangat sedikit layanan spiritual. Pada masa itu, doktrin Kristen secara resmi diakui sebagai fondasi negara dan masyarakat di

Eropa, tapi dalam piagam pertama VOC, sama sekali tidak ada acuan pada tugas Kompeni untuk menyediakan tempat ibadah dan layanan agama. Kekurangan ini diperbaiki dalam piagam kedua pada 1623, tapi usaha-usaha para Direktur Kompeni untuk menerapkan tugas mereka dalam hal ini jauh dari mengesankan. Para Direktur dan wakil mereka di Batavia, gubernur jenderal dan dewannya, bertekad memegang segala urusan di dalam tangan mereka, termasuk regulasi urusan Gereja. Dengan sendirinya mereka hanya mau pendeta-pendeta Gereja yang punya karakter "tenang dan patuh" untuk dikirim ke Asia![10]

Supaya adil, kita harus menyebutkan fakta bahwa pemerintah Batavia dihadapkan pada beberapa masalah yang sangat sulit. Sebagian besar penduduk ibukota mereka bukan Kristen, dan bukan Eropa.

Dari awal orang Cina merupakan bagian penting penduduk.[11] Belanda berusaha merayu semua saudagar Cina di Banten untuk pindah ke Batavia, tapi usaha ini ditentang keras oleh Sultan Banten, yang mengerti bahwa kalau orang Cina pergi, perniagaan di Banten akan lenyap. Pada tahun pertama keberadaan Batavia, pemukim Cina sudah berjumlah 800, dan 10 tahun kemudian jumlah mereka meningkat jadi 2.000. Mereka bermata pencaharian pedagang, dan mengunjungi pelabuhan dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Indonesia yang tidak terlalu penting untuk dikunjungi kapal-kapal Kompeni. Mereka adalah nelayan dan tukang jahit, tukang batu, dan tukang kayu, jadi tidak berlebihan mengatakan bahwa Batavia tidak mungkin berdiri tanpa orang Cina. Kebiasaan buruk utama mereka ialah perjudian. Mereka tenggelam dalam judi begitu dalam sehingga pemerintah memutuskan menyediakan satu jalan untuk rumah-rumah judi mereka dan menutup jalan ini dari semua orang Eropa pada waktu malam, serta mencegah perselisihan dan akibatnya yang mungkin terjadi. Seperti semua permukiman baru, Batavia adalah kota laki-laki. Sedikit saja orang Cina yang bermigrasi dengan istri mereka. Mereka mengawini perempuan penduduk asli atau membeli budak perempuan, tapi

mereka berusaha keras mendidik putra-putra mereka sebagai orang Cina. Dengan begitu mereka tetap khas secara budaya, berbeda dari sebagian besar penduduk lokal.

Untuk membuat pelabuhan Batavia menarik bagi pedagang asing, para Direktur di Amsterdam memberikan perintah khusus bahwa semua saudagar Cina dan Asia lain yang kapalnya mungkin membuang sauh di dermaga Batavia harus diperlakukan dengan sopan dan hormat. Namun begitu orang Cina berdiam di Batavia, mereka berada di bawah pengaturan Kompeni. Dengan demikian mereka harus menaati hukum Belanda. Ketidakpraktisan sistem ini segera menjadi nyata, dan setelah beberapa tahun pemerintah Batavia memutuskan bahwa perkara yang kurang penting serta urusan warisan yang rumit diurus oleh seorang "kapten" orang Cina, yang ditunjuk oleh gubernur jenderal. Ketika penduduk Batavia semakin bertambah, kebiasaan Portugis mengelompokkan penduduk di seksi-seksi terpisah menurut kebangsaan diperkenalkan, dan pada akhirnya setiap kelompok nasional itu diorganisasikan di bawah pemimpin mereka sendiri, berikut yurisdiksi terbatas atas penduduk bawahannya.

Diskriminasi terhadap orang Asia *an sich* tidak dikenal. Setelah beberapa dekade banyak ras dan bangsa tinggal di Batavia, Belanda, Jepang, Cina, Pampanger (dari Luzon), dan "Mardijker" dari Malabar, Coromandel, Arakan, dan Benggala,[12] dan perkawinan antara pria Belanda dan perempuan Indonesia biasa terjadi. Kalau dibaptiskan, anggota-anggota dari keluarga Indonesia dan keluarga Belanda campuran punya hak yang persis sama dengan orang Belanda. Satu-satunya pembatasan atas mereka ialah bahwa Kompeni mencegah sedapat mungkin emigrasi orang non-Belanda ke Belanda. Tapi menurut gagasan yang dominan waktu itu, ada diskriminasi tajam terhadap semua orang non-Kristen, yang sayangnya terdiri atas mayoritas penduduk Batavia.[13] Hukum dengan tegas melarang pelaksanaan atau pengajaran agama apapun di depan umum atau secara rahasia, kecuali Gereja Reformasi Belanda. Ordinansi itu diulang

NEGARA-NEGARA UTAMA KEPULAUAN INDONESIA PADA ABAD KE-17
Angka tahun menunjukkan waktu pos dagang pertama didirikan
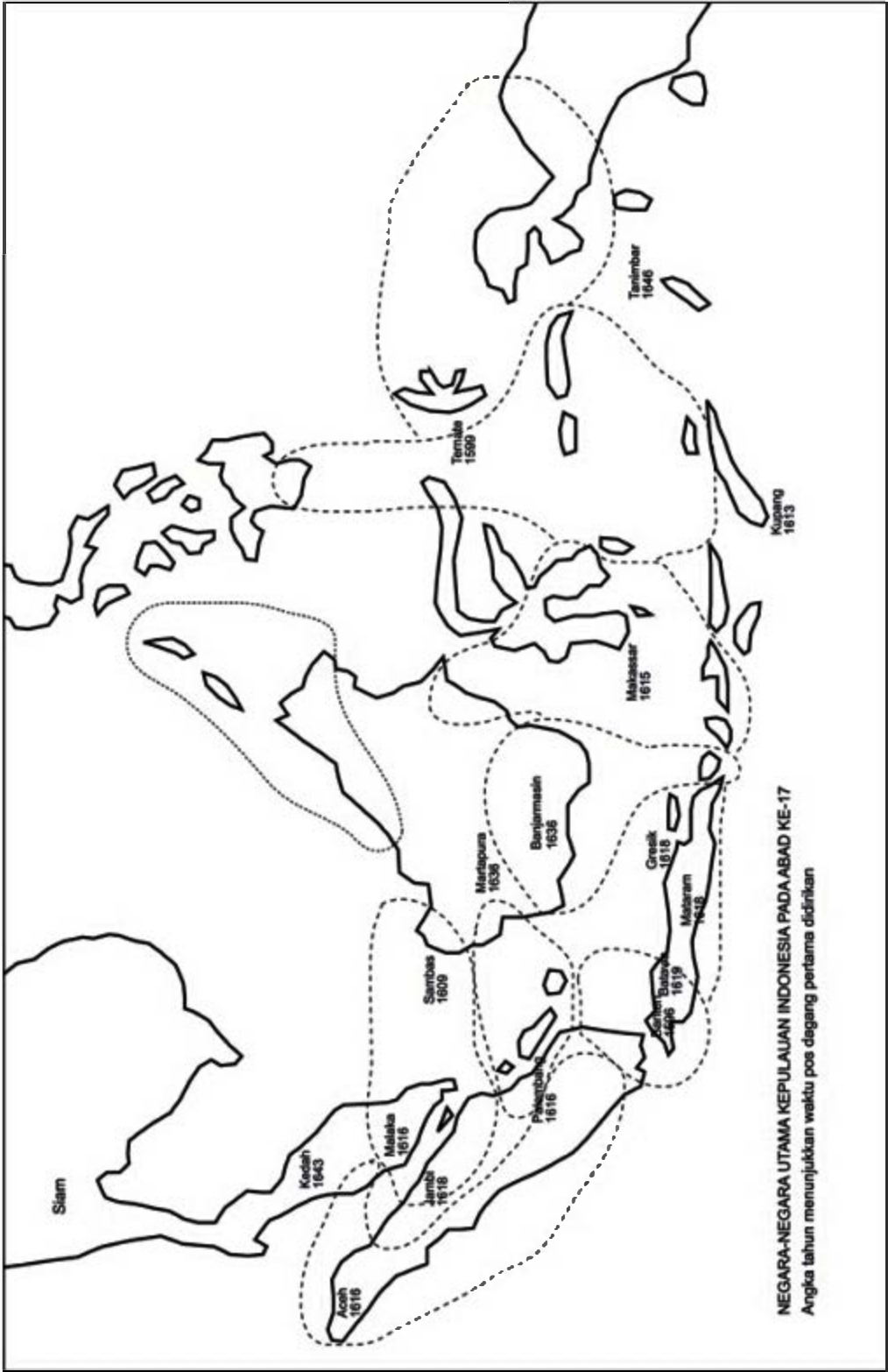
terus-menerus, dan pendeta-pendeta Gereja Reformasi menuntut penerapannya; tapi orang Cina dan Muslim dalam praktik menikmati kebebasan beragama, kalau tidak di dalam, paling tidak langsung di luar tembok kota. Sia-sia saja para pendeta itu memprotes, karena pemerintah menanggapinya dengan meminta mereka menunjukkan lebih banyak semangat dalam usaha meng-Kristenkan orang Indonesia dan lebih sedikit kehebohan dalam menyalahkan pejabat Kompeni untuk moral buruk mereka. Ketika Konsistori Batavia menunjukkan kepada Gubernur Jenderal Maetsuycker bahwa Hukum Musa melarang toleransi atasagama non-Kristen, dia cuma menjawab: "Hukum republik Yahudi kuno tidak punya kekuatan dalam wilayah VOC!"

Batavia bukan hanya berfungsi sebagai kantor pusat pemerintahan bagi Kompeni; ia juga menjadi gudang utama barang dagangan. Garnisun Batavia berfungsi sebagai "cadangan strategis sentral" untuk kekuatan militer Kompeni. Biasanya ada 1.200 orang tapi dapat diperkuat oleh orang-orang dari awak kapal dan pengawal-penduduk Batavia.

Sesuai dengan adat Belanda, semua penduduk bebas Batavia terorganisasikan dalam Pengawal Kota yang dibagi ke dalam kompi menurut bangsa-bangsa. Salah satu kompi Belanda disebut kompi "Pennist" karena terdiri atas orang-orang yang memakai pena, para juru tulis Kompeni. Setelah 1630 orang Belanda tidak lagi menganggap serius tugas militer ini, tapi kompi-kompi dari kelompok rasial lain banyak kali bertempur melawan musuh ketika periode perang-perang besar di Jawa berlangsung.[14]

Pada tahun-tahun ketika Batavia memakai segala cara diplomatik yang dimilikinya untuk memulihkan perdamaian dengan Mataram, ia memperluaspemerintahannya dan monopoli dagangnya atas sebagian besar pantai selatan Asia, sambil memantapkan hubungan dagang reguler dengan berbagai negeri Asia. Setelah kematian Coen, wilayah Asia ini dipimpin berturut-turut oleh Gubernur Jenderal JacquesSpecxdan Hendrik Brouwer. Pada 1636 Anthony van Diemen ditunjuk menduduki posisi tinggi

ini dan di bawah kepemimpinannya Kompeni mencapai perluasan terbesar. Perang dengan Portugis terus berlangsung tanpa henti sampai 1640, ketika Portugis bangkit menentang dominasi Spanyol. Republik Belanda dan Portugal kini punya musuh bersama, tapi baik VOC maupun Kompeni Hindia Barat Belanda tidak mau berhenti mengepung wilayah Portugis di luar negerinya. Perjanjian damai 10 tahun dirundingkan pada 1641, tapi sebelum berita itu bisa mencapai pemerintah di Batavia, Malaka, benteng terkuat Portugis di Asia Tenggara, telah jatuh.

Selama bertahun-tahun keadaan di benteng itu mengenaskan. Aceh tetap menjadi musuh yang tak terangkul. Negara-negara Melayu yang lebih kecil, takut kepada Aceh dan kekuatan laut Kompeni, tidak berani mendukung Portugis. Blokade Selat Malaka oleh Belanda menyebabkan kekurangan pangan di kota. Walaupun begitu, ketika Van Diemen akhirnya memutuskan untuk menyerbu, pertahanan begitu gigih sehingga dia perlu lima bulan untuk mengalahkannya. Pada Januari 1641, benteng Malaka jatuh. Begitu takluk, kota itu segera kehilangan arti-pentingnya. Banyak keluarga Portugis pindah ke Batavia, di situ bahasa mereka terus dipakai selama lebih daripada seabad.

Setelah Malaka jatuh, VOC menjadi tuan atas laut-laut Indonesia. VOC kini dapat memperketat cengkeramannya pada produksi rempah di Maluku. Di sini keadaan pada umumnya telah bergeser dari buruk kemakin buruk. Sistem bayar di muka kepada produsen atas panen yang belum jadi masih terus berlangsung, dan pada 1628 gabungan utang penduduk Kepulauan Banda, Ambon, dan Maluku berjumlah 477.390 gulden. Praktis, tidak mungkin utang-utang ini akan bisa terbayar. Penduduk itu sudah bangkrut, dan Kompeni bersiap memanen konsekuensinya: ia merampas alat-alat produksi dan properti lain milik penduduk pulau itu dan praktis menurunkan derajat mereka jadi sekadar budak. Setelah mendapatkan persetujuan dari penguasa sebagian besar pulau-pulau itu—Sultan Ternate— dengan memberikan kepadanya uang tahunan, Kompeni langsung membasmi pohon-pohon cengkeh di

luar wilayahnya. Penduduk setempat melawan dengan gigih, tapi ditundukkan dengan kekuatan senjata. Kompeni ingin mereka mengubah kebun pohon cengkeh mereka menjadi sawah padi dan kebun pohon sagu, tapi pulau-pulau bergunung yang kecil itu tidak bisa memproduksi cukup pangan, dan penduduknya terpaksa membeli beras tambahan dari Kompeni. Kompeni menjual komoditas ini dengan harga sangat tinggi, yang membuat keadaan tambah mengenaskan. Dengan demikian, hancurlah sistem ekonomi Maluku dan jatuhlah penduduknya dalam kemiskinan.

Pos militer Spanyol terus ada di Tidore sampai 1663, walaupun, sampai perjanjian Muenster (1648) akhirnya menghasilkan perdamaian antara Spanyol dan Belanda, hubungan pelayaran dengan kantor pusat Spanyol di Manila terus terancam oleh armada Belanda. Persaingan Spanyol dalam perdagangan rempah-rempah tidak mengancam kepentingan Kompeni. Yang lebih menjengkelkan adalah pelaut-pelaut Melayu gagah berani dari Makasar, yang terus-menerus menyusup ke dalam perairan terlarang di sekitar Banda dan Seram. Dari pedagang-pedagang Britania, Denmark, dan Portugis di ibukotanya, raja Makasar membeli senjata api dan suplai perang lain dan dengan bantuan mereka dia membuat negaranya begitu kuat sehingga Gubernur Jenderal Van Diemen was-was untuk mengganggu kepentingannya sementara kapal-kapal dan tentara Kompeni dibutuhkan di tempat lain.

Namun tujuan utama Kompeni di Kepulauan Indonesia telah tercapai. Perdagangan kayu manis dan kain dari India telah berada di tangan Kompeni. Tambahannya ialah perdagangan tembaga dari Jepang dan perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Ketika pemerintah Jepang memutuskan untuk mengusir semua orang asing dari negeri itu, ia mengecualikan pedagang-pedagang Kompeni, yang dibolehkan meneruskan kegiatan mereka, di bawah pengawasan ketat, dari pulau kecil Deshima di lepas pantai Pelabuhan Nagasaki.[15] Perdagangan sutra dari Persia berkembang dan ditambah pula dengan perdagangan gula dari Cina, yang

pusat distribusinya adalah benteng pertahanan Belanda di Pulau Formosa.

Tidak puas dengan perluasan hebat perusahaan Belanda ini, Van Diemen berusaha memperoleh harta karun dari semua negeri yang masih belum terjelajahi bagi Para Direkturnya. Ada legenda beredar di kalangan pelaut Spanyol bahwa di timur Jepang telah terlihat sebuah pulau dengan kekayaan besar, pulau itu disebut "Rica Doro" atau "Kaya Emas". Atas perintah Van Diemen, navigator Maarten de Vries berlayar ke timur laut, di situ dia mengunjungi Kepulauan Kuril dan pantai timur Sakhalin, dan mencapai 49 derajat lintang utara, tentu saja tanpa menemukan "kepulauan emas" itu.[16]

Yang lebih menakjubkan adalah penemuan Abel Tasman dan Frans Visscher, yang dikirim untuk menyelidiki "Benua Selatan Besar", yang pantai baratnya telah tampak oleh kapal-kapal Belanda. Pantai ini ternyata sangat tidak ramah, sangat berbeda dari benua kaya dan beradab yang dikisahkan legenda para pelaut itu. Di selatan Australia kedua orang Belanda itu berlayar dari barat ke timur dan mendarat di pulau Tasmania. Makin ke timur mereka menemukan dua pulau yang mereka namakan New Zeeland, menurut nama provinsi kelautan kedua di Belanda. Pelayaran itu sangat menarik dari sudut pandang geografis, tapi, secara ekonomis, waktu dan uang tersia-siakan. VOC adalah perusahaan komersial, bukan perusahaan untuk kolonisasi. Karena itu ia tidak tertarik pada wilayah-wilayah yang hampir tak berpenghuni di Benua Selatan yang ditemukannya.[17] Pada pertengahan abad ke-17 Kompeni telah melebarkan sayap di seluruh wilayah pantai di Asia.

Rencana raksasa Coen untuk membuat Batavia jadi pusat perdagangan Asia yang besar dan, melalui perdagangan ini, mendapatkan cara untuk memperoleh produk berharga yang bisa diekspor ke Eropa tampaknya telah tercapai. Dari empat pusat dagang, barang mengalir ke gudang-gudang Batavia –dari Persia, dari India dan Ceylon, dari Maluku, dan dari Jepang. Akun umum

perdagangan antar-Asia disimpan di Batavia dan di situ juga buku-buku dari semua koloni dan permukiman dikirim untuk kontrol. Data dimasukkan ke dalam suatu laporan umum yang dikirim ke Eropa sekali setahun dengan apa yang disebut "kapal teh dan buku", yang dinamai demikian karena ia hanya mengangkut teh dan jilid-jilid folio di mana tertulis laporan-laporan umum itu.

Para Direktur telah membagikan rata-rata dividen 10 persen setahun selama 30 tahun pertama keberadaan Kompeni. Ini berarti pembagian total 20 juta gulden. Tapi para pemegang saham curiga bahwa laba yang jauh lebih besar telah didapatkan. Mereka tidak tahu bahwa selama periode itu Kompeni telah membuat utang lebih daripada 10 juta gulden di Belanda, yang mengurangi keuntungan riil menjadi rata-rata lima persen setahun. Akibatnya, jelas bahwa pemegang saham menerima lebih daripada yang seharusnya mereka terima menurut angka-angka yang dapat ditemukan dalam perbukuan Kompeni—buku-buku yang dirahasiakan dengan ketat. Tapi, kecurigaan para pemegang saham itu benar bahwa keuntungan bruto jauh lebih besar daripada yang diakui para Direktur itu. Hanya saja, para Direktur itu tidak merasa dibenarkan untuk membagikan jumlah total keuntungan itu. Keadaan yang mengherankan ini hanya bisa dijelaskan dengan meneliti sistem perbukuan yang diikuti para Direktur tersebut.

VOC dirancang sebagai perusahaan pemilik kapal. Pemegang saham menginginkan bahwa semua keuntungan dibagi langsung dan sepenuhnya ketika suatu armada dengan kargo berharga kembali dari Hindia. Setiap ekspedisi ke Hindia dianggap usaha komersial yang terpisah. Di bawah sistem ini, tidak mungkin menghimpun dana cadangan. Tapi, tanpa dana cadangan perniagaan di Asia tidak dapat dipertahankan. Telah kita lihat bahwa para Direktur Kompeni menghadapi kesulitan ini dengan sepenuhnya memisahkan pembukuan Kompeni di Belanda dengan yang dipakai di perwakilan Kompeni di Hindia. Mereka membagi semua uang yang mereka punya di Belanda di antara pemegang

saham, dan bahkan meminjam uang untuk meningkatkan dividen, tapi pada saat yang sama mereka menyimpan kekayaan dalam jumlah besar di Hindia untuk perluasan usaha dagang. Sampai 1630 keuntungan riil Kompeni sangat kecil, tapi para Direktur tersebut berusaha keras menyenangkan hati para pemegang saham dan bertaruh pada masa depan, kebijakan yang akhirnya memberikan hasil bagus. Begitu perdagangan antar-Asia mulai mendatangkan keuntungan, kedudukan finansial Kompeni membaik. Antara 1613 dan 1654 keuntungan ini mencapai 101 juta gulden, sementara ongkos yang dikeluarkan selama masa itu adalah 76 juta gulden. Ini berarti keuntungan 25 juta gulden, dari sini 9,7 juta dikirim ke Eropa dan sisanya disimpan di Hindia sebagai modal kerja untuk perniagaan antar-Asia. Dibandingkan dengan para Direktur di Amsterdam, Sultan Mataram adalah orang miskin. "Gubernur Jenderal kami tidak peduli kepada Sultan, seperti gajah mengabaikan lalat," bual seorang pejabat Kompeni; namun, para tuan di Batavia itu merasa lebih bijak bersikap toleran terhadap sikap angkuh Sultan. Mereka tampaknya kurang tertarik dengan pedalaman Jawa dibandingkan Kepulauan Kuril dan Tasmania. Tiga puluh tahun kemudian keadaan berubah, dan pasukan Kompeni berbaris memasuki ibukota Mataram untuk mengembalikan seorang Sultan pelarian ke takhtanya.

Pada 1645 Batavia berdamai dengan Sultan Banten. Pada tahun yang sama baik Sultan maupun Gubernur Jenderal Van Diemen wafat. Putra dan pengganti Agung, Amangkurat I mengambil sikap lebih berdamai dengan Batavia dan pada 1646 Mataram juga menyepakati suatu perjanjian damai. Untuk mempermudah keadaan, pemerintah Batavia memutuskan mengirimkan duta "untuk meminta damai", dan menawarkan pelayanan mereka untuk Sultan kalau dia membutuhkan. Akibatnya, perjanjian itu menetapkan bahwa Batavia harus mengirimkan duta tahunan, membawa hadiah dan barang dagangan luar negeri yang diperintahkan Sultan, dan bahwa ia harus membawa duta Sultan ke Mekah, kalau Sultan menginginkannya. Yang lebih penting

adalah pasal-pasal yang menyatakan bahwa Sultan dan Kompeni harus saling membantu melawan musuh, dan bahwa rakyat Sultan akan bebas berniaga di seluruh Kepulauan Indonesia. Tapi pemerintah Batavia membuat sangat jelas bahwa mereka tidak akan membantu Sultan melawan orang yang hidup damai dengan Belanda sendiri, dan Sultan juga setuju bahwa rakyatnya tidak akan berdagang di sebelah timur Makasar atau barat Malaka.[18] Pembatasan tersebut membuat bagian perjanjian itu jadi tidak punya nilai praktis, tapi memang itulah yang diinginkan. Suatu kompromi telah tercapai: harga diri Sultan terpelihara dan kedudukannya sebagai penguasa atasan diakui, sedangkan Kompeni memperoleh pengakuan *de facto* atas monopoli dagang mereka dengan ongkos tahunan mungkin 60.000 gulden dalam bentuk "hadiah"–menurut pandangan Batavia–atau dalam bentuk "upeti"–dari sudut pandang Mataram.

BAB 8

KERUNTUHAN NEGARA-NEGARA INDONESIA

SETELAH 60 tahun perdagangan di Hindia, tahun-tahun yang juga dipenuhi peperangan tanpa henti, VOC Belanda menguasai jalur-jalur laut mulai dari Teluk Benggala dan Ceylon (Sri Lanka) hingga Nagasaki di Jepang. Tapi wilayah milik VOC tetap sangat terbatas. Di Indonesia, VOC berdaulat penuh hanya atas beberapa tempat, yang terpenting adalah Batavia. VOC menguasai ratusan pulau kecil di Maluku—bahkan semua wilayah Sultan Ternate dan raja-raja bawahannya—dan beberapa kelompok pulau kecil yang kurang penting di tenggara Kepulauan Indonesia.[1] Termasuk di sini kepulauan Kei dan Aru serta kepulauan Solor di rantai pulau Sunda Kecil. Jauh di barat laut, di Semenanjung Malaya, VOC punya kekuasaan tak terbatas atas kota Malaka, kini tempat terpencil yang telah kehilangan semua perdagangannya yang telah pindah ke Batavia.

Para Direktur Kompeni tidak mau memperluas kekuasaan mereka lebih daripada yang betul-betul dibutuhkan. Mereka mengontrol pulau-pulau besar di luar Kepulauan Indonesia, misalnya Ceylon dan Formosa; mereka punya puluhan posdagang mulai dari Ispahan di Persia sampai Nagasaki di Jepang dan, pada

1652, mendirikan stasiun antara untuk kapal-kapal mereka di titik selatan Afrika, yang kemudian bernama Capetown (*ibukota Cape Colony-pen.*). Imperium komersial mereka cukup memadai untuk mereka; mereka tidak punya ambisi apapun untuk mengubahnya menjadi imperium sejati, yang mencakup wilayah luas di Asia. Mereka sangat yakin imperium kolonial Portugis runtuh karena terlalu luas, atau, dalam bahasa yang sangat gamblang dari masa itu, "karena ada begitu banyak anak ayam sehingga tidak semuanya bisa bernaung di bawah sayap sang induk".[2]

Prinsip membatasi kekuasaan Kompeni atas beberapa pelabuhan dan berkonsentrasi hanya pada kekuatan laut berarti sedapat mungkin Kompeni tidak boleh terlibat dalam pertikaian raja-raja di Indonesia dan konflik internal di tiap-tiap negara setempat. Pemerintah Batavia mau mengakui penguasa mana pun di Indonesia yang memang punya kuasa atas rakyatnya, apapun asal-usulnya atau asal-usul kekuasaannya, selama penguasa itu bersedia meneruskan kewajiban pendahulunya terhadap Kompeni. Kebijakan luar negeri Kompeni ini tidak pernah diikuti secara lebih ketat dibanding ketika di bawah gubernur jenderal Johan Maetsuycker (1635-1678).

Johan Maetsuycker adalah seorang ahli hukum, putra dari orangtua Katolik dan yang telah belajar di Universitas Louvain. Ketika para Direktur berusaha mempekerjakan para ahli hukum untuk menjadi pakar di Dewan Peradilan di Batavia, mereka tidak bisa menemukan satu calon pun untuk menduduki posisi itu kecuali Maetsuycker, yang dengan demikian diterima walaupun ada kendala agama. Dia membuat namanya sendiri terkenal dengan mengarang *Statuta Batavia*. Undang-undang legal ini menjadi dasar administrasi peradilan dan beberapa pranata sosial, seperti rumah yatim piatu Belanda dan Cina. Untuk semua penduduk Batavia, penguasa Belanda memperkenalkan hukum Belanda-Romawi. Pengalaman mengajari mereka bahwa perlu sekali mempertimbangkan adat istiadat orang-orang Asia. Karena itu, orang Cina diatur menurut adat istiadat mereka sendiri, yang

punya kekuatan hukum di antara mereka, dan demikian juga dengan orang Jawa *di kemudian hari* ketika yurisdiksi Kompeni diperluas sehingga mencakup wilayah yang lebih besar di Jawa.[3] Inteligensi dan kemampuan diplomatik Maetsuycker yang hebat dengan cepat menarik perhatian Gubernur Jenderal Van Diemen dan para Direktur di Amsterdam, dan pada 1653 dia ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal. Sesaat sebelum pengangkatannya, "Instruksi untuk Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia" yang dikeluarkan pada 1650 lebih jauh mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah dan permukiman Kompeni. Otoritas tertinggi diberikan kepada Gubernur Jenderal *dan* Dewan itu.[4] Semua urusan pemerintahan di negeri Belanda sendiri dilaksanakan Dewan itu, dan sistem yang sama diterapkan di semua wilayah luar negeri. Tujuh dari sembilan anggota Dewan harus hadir untuk memenuhi kuorum. Tapi raja-raja dan rakyat Indonesia menganggap gubernur jenderal sebagai penguasa orang Belanda di Hindia, dan sikap sebagian besar orang Belanda sesuai dengan pandangan orang Indonesia. Jika si gubernur jenderal punya kepribadian kuat, dia tidak akan mengalami kesulitan menaruh Dewan dalam posisi bawahan. Kalau dia tidak tegas, urusan pemerintah menjadi ajang permainan faksi-faksi.

Selama 25 tahun, Maetsuycker memerintah imperium kolonial dari istana Batavia, dan tidak pernah meninggalkan kota kecuali kadang-kadang berburu di hutan dekat tembok kota. Dalam kebijakan umum dia mengikuti arahan dari para Direktur di Amsterdam secara mendetail, yang sangat puas dengan administrasinya sehingga berulang-ulang mereka menolak permintaannya untuk dilepaskan dari kantornya. Dia tidak jenius seperti Coen dan menghindar dari kebijakan yang diusulkan pejabat-pejabatnya yang paling ternama, Rijklof van Goens dan Cornelis Speelman, yang mengerti bahwa cepat atau lambat perubahan kebijakan Kompeni harus dilakukan dan bahwa imperium kolonial Belanda akan runtuh seperti imperium Portugis kecuali ia didasarkan pada fondasi teritorial yang solid.

Pada akhirnya, keadaan memaksa gubernur jenderal mengikuti kebijakan yang lebih berani.

Masalah muncul lagi di Maluku. Kompeni, dengan dukungan penuh dari Sultan Ternate, menjalankan kebijakan membatasi produksi cengkeh dan pala, kalau perlu dengan menumbangkan pohon-pohonnya, dan melakukan segala sesuatu untuk membasmi persaingan dari para pedagang asli dan Cina. Pelaksanaan yang ketat atas instruksi-instruksi pemerintah Batavia mendatangkan kesulitan hidup yang berat pada penduduk, khususnya Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Pemberontakan muncul susul-menyusul, tapi kepentingan Kompeni diwakili oleh salah satu orang paling keras dalam sejarah, gubernur Arnoud de Vlaming, yang dalam lima tahun peperangan dengan keras menumpas semua pemberontakan. Sultan Ternate tersingkir ke posisi bawahan, bukan sekutu Kompeni yang dihormati. Akibat penindasan brutal ini terjadi penurunan tajam kesejahteraan Maluku.

Tapi kebijakan ekonomi Kompeni bukan satu-satunya penyebab kekacauan di bagian timur laut Kepulauan Indonesia ini. Untuk memantapkan kekuasaannya di atas dasar yang lebih solid dan untuk memperoleh rakyat yang lebih setia di Maluku, yang bisa diandalkan apabila ada pemberontakan dari mayoritas Muslim, Kompeni mencoba mendorong agar suku-suku animistik di Seram dan Halmahera menganut kredo Calvinis, dan mendorong penduduk Kristen Ambon, yang telah dijadikan Katolik oleh misionaris Portugis, mengikuti pendeta-pendeta Protestan yang dikirim dari Belanda. Usaha-usaha ini berhasil sebagian tapi menimbulkan kebencian di kalangan Muslim, yang dengan kuat disokong oleh duta-duta dari Raja Makasar, wakil utama Islam di wilayah itu, setelah Sultan Ternate menyerah pada Belanda.[5] Jadi perang di Maluku bukan hanya bersifat ekonomik tapi juga religius.

Akibatnya, ketegangan antara pemerintah Batavia dan Raja Makasar makin meruncing. Dua kali perang dinyatakan (1653-1655 dan 1660), tapi kedua pihak tidak sampai bertempur habis-

habisan. Maetsuycker tahu bahwa perang melawan Makasar akan menimbulkan biaya besar untuk memperlengkapi pasukan yang cukup besar, dan dia juga tahu bahwa para Direktur di Amsterdam tidak suka mengeluarkan uang mereka untuk penaklukan sebuah Kerajaan di Timur yang tampaknya tidak berguna. Lagi pula, perang telah pecah lagi dengan Portugal pada 1651, dan walaupun armada dan tentara Kompeni di bawah komando Rijklof van Goens sangat berhasil di Ceylon dan India, perdamaian 1661 diterima dengan lega.

Tapi Raja Makasar tidak dapat lolos dari nasibnya. Cukup bisa dimengerti, dia bersiap-siap menghadapi perang dengan Belanda yang dia tahu tidak bisa dielakkan. Pedagang-pedagang Eropa di ibukotanya, dari Britania, Denmark, dan Portugis, menyediakan artileri dan amunisi baginya. Benteng-benteng dibangun di sekeliling ibukotanya, dan satu armada kapal perang diperlengkapi. Perkembangan kekuatan laut Indonesia ini diawasi dengan keprihatinan besar oleh Batavia, tapi ia lebih jengkel terhadap dukungan terbuka yang diberikan raja itu kepada pedagang-pedagang Portugis di kotanya yang dia dorong berdagang dengan Kepulauan Rempah-Rempah, tempat Kompeni mengklaim punya monopoli perdagangan dan pelayaran. Selama bertahun-tahun kepelitan para Direktur menjadi benteng paling kuat bagi kemerdekaan Makasar. Sekarang perkara sudah sampai ke titik di mana Maetsuycker percaya perang diperlukan untuk memelihara kepentingan komersial atasan-atasannya. Alasan lain lagi ialah bahwa perang telah pecah di Eropa antara Belanda dan Britania. Satu skuadron Britania telah menusuk jauh ke perairan Timur Jauh, dan ada laporan bahwa Britania menjanjikan bantuan kepada Raja Makasar kalau dia mau maju perang lagi melawan Kompeni. Nyatanya, kapal-kapal Belanda diserang, dan Sultan Buton (satu pulau di timur Makasar), yang kesetiaannya diklaim baik oleh Ternate maupun Makasar, terancam oleh kekuatan Makasar yang lebih kuat.

Perang melawan Makasar lebih daripada sekadar satu episode

dalam serangkaian ekspedisi perang tiada henti yang dilancarkan oleh Kompeni di Asia. Ia menandai awal suatu periode baru. Dalam tiga dekade antara 1650 dan 1680, semua negara Indonesia yang besar hancur. Ternate adalah yang pertama kehilangan kemerdekaan, tapi Makasar, Mataram, dan Banten menyusul dalam beberapa tahun kemudian. Jelas ada hubungan antara kenyataan bahwa pada sekitar 1650 Kompeni Belanda telah sangat berhasil memantapkan keunggulan angkatan lautnya, dan kenyataan runtuhnya negara-negara Indonesia itu secara tiba-tiba. Fitrah negara-negara itu sendiri membuat rangkaian naik turun yang cepat dalam kehidupan politik tidak terhindarkan, tapi kini, untuk pertama kali dalam sejarah Kepulauan Indonesia, suatu kekuatan luar, yang siap campur tangan setiap saat, mengikuti perkembangannya; dan kekuatan luar ini punya sifat sangat berbeda dari negara-negara Indonesia. Ia tidak terperangkap dalam beragam perubahan yang harus dilalui suatu kesultanan dengan intrik-intrik haremnya yang tidak bisa tidak terjadi. Sebaliknya, pemerintahnya dan suksesi penguasanya teratur dan stabil. Ia lambat bertindak, tapi tidak pernah mengendurkan cengkeramannya. Terlalu sering raja-raja Indonesia membuat kesalahan memanggil kekuatan asing ini untuk campur tangan dalam perselisihan mereka dan dalam perang-perang saudara yang pecah di setiap kesultanan karena ketiadaan hukum suksesi yang tetap, dan walaupun Kompeni sangat tidak suka mengambil risiko atas pasukan dan uangnya dalam perang-perang pedalaman, ia bertekad, begitu melibatkan diri dalam perang seperti itu, untuk menyelesaikannya dan mendapatkan kembali ongkos yang dia keluarkan.

Maetsuycker mempercayakan ekspedisi melawan Makasar kepada Cornelis Speelman.[6] Cornelis Speelman adalah tokoh yang khas dalam sejarah Kompeni. Dari pedagang dia menjadi laksamana sekaligus jenderal, seperti halnya Kompeni itu sendiri berubah dari perusahaan dagang menjadi penguasa imperium teritorial. Cerdas, memiliki pengetahuan luas tentang bahasa

dan adat istiadat Asia, cepat bertindak, berani mempertaruhkan nyawanya, tapi juga tidak segan mengorbankan nyawa orang lain kalau dia anggap perlu, Speelman adalah komandan ideal untuk kekuatan Kompeni. Dia dengan keras menyangkal semua tuduhan terhadapnya bahwa dia menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri, walaupun dia memang menggunakan segala cara untuk menambah jumlah kekayaannya yang sudah besar itu. Dalam salah satu suratnya, Speelman menyebut diri "profesor agung dari murid-murid Bacchus", tapi tubuhnya yang membaja tahan terhadap segala penikmatan berlebihan yang merusak tubuh dan terhadap iklim tropis selama 37 tahun, sampai kombinasi penyakit ginjal dan hati menjatuhkannya pada usia 57, persis pada saat dia berhasil mendapatkan kedudukan paling tinggi di Hindia–kedudukan gubernur jenderal.

Pada 1666, Speelman memulai penyerangan terhadap Makasar dengan armada yang terdiri atas 21 kapal dan kekuatan 600 tentara Eropa. Kekuatan kecil ini sangat diperkuat oleh pasukan cadangan Indonesia, sebagian orang Ambon di bawah komando Kapten Jonker–orang Ambon asli walaupun punya nama Belanda[7]–dan sebagian orang Bugis pengikut Aru (Raja) Palakka dari Bone. Daerah Bone berbatasan dengan Gowa, kampung halaman raja Makasar. Aru dari Bone telah diusir ke pengasingan oleh tetangganya yang lebih kuat dan ingin melakukan balas dendam. Tanpa bantuannya penaklukan Makasar akan sangat sulit.

Tindakan pertama Speelman ialah membebaskan Sultan Buton dari pasukan Makasar yang telah mengepungnya. Dari Buton dia bergerak ke Maluku, di situ dia merundingkan perdamaian yang lestari antara dua musuh bebuyutan, Sultan Ternate dan Tidore. Sampai 1663, Tidore bergantung pada dukungan Spanyol, tapi pada tahun itu semua pasukan Spanyol telah ditarik dari Maluku karena Filipina terancam oleh serangan perompak-perompak Cina. Orang Belanda langsung menduduki benteng-benteng Spanyol yang ditinggalkan. Ini memaksa Sultan Tidore menerima perdamaian, dan dengan perjanjian 1667 dia mengakui Kompeni sebagai penguasa atasan. Dengan demikian, penaklukan

Kepulauan Rempah-Rempah pun tuntas.

Diperkuat pasukan Ternate, Speelman kembali untuk menyerbu Makasar. Palakka mendarat di pantai Bone, yang penduduknya langsung memberontak terhadap Raja Makasar. Masih perlu empat bulan pertempuran gigih untuk membuat Makasar menyerah dan Rajanya setuju pada perjanjian Bongaya (18 November 1668). Bahkan sesudah ini, perlu serangan lanjutan, yangtidak kalah seru dibandingyangpertama, sebelum perjanjian itu dapat diterapkan. Ibukota diduduki, dan sebuah benteng yang disebut "Rotterdam" (menurut tempat kelahiran Speelman) memastikan penyerahannya secara permanen.

Perjanjian Bongaya menimbulkan perubahan revolusioner dalam organisasi politik di bagian timur Kepulauan Indonesia. Kompeni mendapatkan monopoli dagang di pelabuhan Makasar dan semua orang Eropa non-Belanda dipaksa meninggalkan kota itu. Konsekuensi yang lebih besar lagi adalah pembatasan atas lingkungan kepentingan Makasar, yang dengan tegas dikurangi sampai mencakup kota itu sendiri dan sekitarnya. Bahkan di wilayah kecil ini Kompeni punya kekuasaan dan dibolehkan punya Benteng Rotterdam, sementara koin Belanda dinyatakan punya nilai legal di negara itu. Semua wilayah yang dilepaskan Makasar otomatis jatuh ke tangan Kompeni, meskipun karena alasan praktis diletakkan di bawah kekuasaan nominal raja-raja setempat. Bone, yang telah dikembalikan kepada Palakka, dan Buton, yang telah diselamatkan dari kehancuran, menjadi negara bawahan Batavia. Pantai-pantai utara dan timur Sulawesi diserahkan kepada Ternate, yang sekarang sudah sepenuhnya berada di bawah pengawasan Belanda. Pulau Sumbawa, yang dibebaskan dari Makasar, terpaksa menerima Kompeni sebagai penguasa atasan.

Pada 1668 itu juga kekuatan besar lain dari Indonesia yang merdeka, kesultanan Aceh, runtuh. Kepentingan yang meningkat dari tambang timah di Perak di Semenanjung Malaya, di daerah yang takluk kepada Aceh, menyebabkan Kompeni menaruh lebih

banyak perhatian pada urusan Aceh. Sampai pertengahan abad ke-17 timah ini telah diekspor oleh saudagar Gujarat ke India. Kemudian Maetsuycker memutuskan melakukan tindakan yang agak keras untuk mendapatkan sebagian perdagangan itu buat Kompeni. Dia tahu bahwa kekuatan Aceh sudah melemah, khususnya sejak pada 1640 pemerintah kesultanan itu jatuh ke tangan seorang Sultana, dan di bawah pemerintahannya bangunan negara Aceh yang memang kurang kokoh itu mulai retak. Maetsuycker sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini. Dia memperbarui perjanjian Kompeni dengan Aceh, tapi pada saat yang sama mengipas-ngipasi pemberontakan terhadap pemerintahan Aceh di kalangan para raja di pantai barat Sumatra. Suatu blokade atas pantai Aceh membuat penguasa-penguasa Aceh sadar akan perubahan yang terjadi dalam situasi politik di Kepulauan Indonesia. Usaha terus-menerus di kalangan para pemimpin setempat di pantai barat, yang memang sudah membenci kekuasaan Aceh, akhirnya menghasilkan perjanjian Painan (6 Juli 1663), yang membuat daerah Indrapura, Tiku, dan Padang bernaung di bawah Kompeni, yang berjanji menjamin kemerdekaan penuh daerah-daerah itu dari Aceh, dengan imbalan monopoli dagang absolut.[8]

Ini tidak berarti bahwa perdamaian dan ketertiban langsung terjadi di sana. Pada masa itu, pantai barat Sumatra adalah negeri roman, atau, dari sudut pandang yang lebih realistik, sarang perompak yang tidak kenal tobat dan wilayah perburuan idaman bagi mereka yang suka petualangan liar. Pertempuran tidak pernah berhenti. Panglima-panglima setia Meester Johan Maetsuycker yakni Aru Palakka dari Bone dan Kapten Jonker harus melakukan pertempuran di daerah-daerah pegunungan di timur Padang sebelum bisa mendamaikan sebagian negeri itu. Kompeni beruntung punya agen yang cerdik di Padang, seseorang yang memang tertarik kepada orang-orang yang harus dia dekati dan karena itu menjadi tahu banyak tentang mereka. Agen ini, Jacob Pits, mengumpulkan informasi mengenai orang yang tinggal

di pedalaman Sumatra dan terutama di Minangkabau. Dari para pemimpin Melayu dia tahu bahwa seabad sebelumnya atau lebih dataran tinggi Padang diperintah raja-raja Minangkabau, raja-raja yang biasa memanggil Padishah Turki dan Kaisar Cina "saudara" mereka. Keturunan keluarga kerajaan ini masih hidup, dan Pits, setelah disetujui kepala-kepala suku, mengangkat kembali salah satu dari mereka di kerajaan itu. Tindakan itu menyediakan legalisasi bagi kekuasaan Kompeni Belanda di pantai barat. Untuk membalas segala jerih payah Kompeni itu, sang raja baru menyerahkan satu daerah kecil dekat Padang yang kabarnya kaya akan emaskepada pemerintah Batavia.[9]

Begitulah, wilayah pantai Sumatra praktis jatuh ke tangan Belanda. Sultan-Sultan Palembang dan Jambi menyerahkan monopoli perdagangan lada kepada Kompeni dan hak ekstrateritorial kepada para agennya. Kepala-kepala Pulau Bangka dan Belitung telah memisahkan wilayah mereka dari kesultanan Palembang dan mencari perlindungan Batavia untuk mempertahankan kesemi-merdekaan mereka.

Segera setelah kejatuhan Makasar dan Aceh, negara-negara Jawa juga kehilangan kemerdekaan. Selama bertahun-tahun Gubernur Jenderal Maetsuycker telah menerapkan semua keahlian diplomatiknya untuk menghindar dari urusan internal Jawa. Sedikit saja tempat dalam wilayah imperium komersial Kompeni yang lebih tidak menarik untuk ditaklukkan daripada Pulau Jawa. Pemerintah Batavia punya penilaian berlebihan terhadap kekuatan internal kesultanan Mataram dan, di lain pihak, pandangan yang sangat meremehkan terhadap nilai ekonomik pulau itu. Pandangan umum di Batavia adalah bahwa penaklukan sebagian atau seluruh Jawa hanya akan berarti beban bagi Kompeni. Itulah sebabnya, ketika kesultanan Mataram mulai terpecah-belah dan para pesaing perebutan takhta mencari pertolongan Kompeni, Maetsuycker dengan gigih mempertahankan kebijakan tidak campur tangan. Tapi ada suara penentang di Dewan Hindia, dan yang paling keras ialah suara Cornelis Speelman.

Sudah kita lihat bagaimana putra dan penerus Agung, Amangkurat I, segera setelah naik takhta, langsung mengikat perdamaian dengan Kompeni. Meneruskan perang sudah tidak ada gunanya. Itu hanya membuat penguasa Mataram kehilangan kesempatan yang bisa dia peroleh lewat hubungan persahabatan dengan Belanda. Berdasarkan perjanjian 1646, pemerintah Batavia mengakui Sang Sultan sebagai penguasa atasan dalam nama dan berjanji mengirimkan duta setiap tahun, serta membawa hadiah yang banyak kepada pemerintahannya. Pemberian-pemberian ini menjadi sumber penghasilan yang besar bagi sang Sultan. Tapi, dia memperlakukan duta-duta Belanda yang pertama sebagai orang kelas bawah dan tidak penting. Dia membuat mereka duduk jauh dari dirinya, di luar *pendopo*, ruang terbuka yang luas di depan *Keraton*, tempat mereka tersorot langsung sinar matahari. Dia membuat mereka menunggu berjam-jam tanpa memberi perhatian kepada mereka, dan setelah itu, dia mengkritik pemberian mereka dan menuntut agar tahun berikutnya mereka membawa lebih banyak hadiah yang lebih baik. Atas permintaannya pemerintah di Batavia mengirimkan pesan ke Persia untuk meminta kuda-kuda terbesar dan terbaik yang dapat diperoleh untuk dibeli bagi penguasa atasan Jawa mereka. Tapi tahun demi tahun Amangkurat terus menaikkan tuntutannya. Ketika dia ingin artileri "modern", Batavia mengirimkan ke istananya. Ketika dia ingin uang, benda-benda baru yang aneh, dan berlian, Kompeni menyediakan. Kompeni menanggung biaya kira-kira 60.000 gulden untuk hadiah yang diberikan pada 1652. Sebaliknya Kompeni menerima beras dan kayu, diserahkan oleh orang-orang dari daerah-daerah pantai atas perintah Sultan. Batavia sangat membutuhkan suplai ini dan penguasa Mataram dapat bermurah hati dalam hal ini, karena pemberian itu tidak mahal buat dia sendiri, meski merupakan beban berat bagi rakyatnya.

Pemerintah Batavia berusaha keras memuaskan penguasa Mataram. Tapi dalam satu hal ia tetap bersikeras. Setiap tahun Amangkurat bertanya kepada duta Belanda apakah Batavia

sedang dalam keadaan damai dengan Bali atau tidak. Kalau tidak, mereka bisa minta bantuannya untuk melawan Bali menurut perjanjian 1646, dan dengan demikian membalaskan kekalahan ayahnya pada 1639. Kompeni selalu menjawab bahwa ia tidak punya pertengkaran dengan Bali. Batavia tidak tertarik untuk menolong Mataram mencapai perluasan wilayah lebih jauh. Tapi seiring perjalanan waktu, suasana hati Amangkurat melunak dan pelan-pelan duta-duta Belanda diperlakukan lebih hormat.

Empat kali berturut-turut misi ke istana Sultan dipercayakan kepada satu orang: Rijklof Volckertsz. Cerita Van Goens, digabung dengan catatan Belanda yang lain dan tradisi Jawa, memungkinkan kita merekonstruksi jalan peristiwa yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan Jawa besar yang terakhir tersebut.[10] Duta-duta Belanda bergerak ke dalam suatu dunia yang bagi mereka asing ketika mereka mengunjungi Mataram dan, bisa dimengerti, hal yang paling mereka perhatikan adalah yang paling mengagetkan mereka. Mereka ngeri akan kesewenang-wenangan Sultan dalam menentukan hidup mati orang, bahkan keluarga dekatnya. Mereka heran melihat Sultan dan Keratonnya dijaga oleh perempuan (mereka memperkirakan jumlahnya ada 10.000!), dan melihat betapa orang yang menduduki posisi paling tinggi pun gemetar bila tampak sedikit saja ada tanda kecurigaan pada penguasa mereka.

Tidak ada contoh lebih baik, tulis Van Goens di salah satu laporannya, akan kekejaman dan kelicikan Sultan Amangkurat dan akan kekuasaan mutlak yang dimilikinya, daripada keadaan di seputar kematian Pangeran Wira Guna. Pangeran ini, yang disebut Van Goens adalah saudara Susuhunan, menjadi putus asa ketika melihat sang penguasa makin lama makin curiga kepadanya. Dia memutuskan membunuh Amangkurat atau gugur dalam usahanya. Dengan teman-temannya, dia tiba-tiba menyerang ketika Amangkurat sedang duduk memerintah di pendopo istananya. Anak buah dan pengawal Sultan langsung melindunginya, tapi walaupun mereka segera berhasil membunuh teman-teman Wira

Guna, tidak ada satu pun dari mereka yang berani menyentuh sang pangeran. Para bangsawan Mataram dengan rela mengorbankan hidup mereka dengan menggunakan tubuh mereka sebagai penghambat Wira Guna ketika dia mencoba menjangkau Sultan. Walaupun Amangkurat menyuruhnya meletakkan senjata, Wira Guna terus menyerbu maju, membunuh lawannya satu demi satu. Kemudian Sultan mengizinkan kuda Wira Guna dibunuh, tampaknya sebagai peringatan bahwa kesabarannya sudah mulai habis, tapi lagi-lagi pangeran itu meneruskan serangannya. Kemudian Amangkurat mundur ke istananya, sehingga dia tidak usah melihat seorang pangeran berdarah kerajaan dijatuhkan oleh orang-orang dari kelas lebih rendah. Begitu dia pergi, Wira Guna pun terbunuh.

Van Goens mengerti betul mengapa begitu banyak orang penting harus mati sebelum Sultan membiarkan kematian saudaranya. Mereka tidak bisa memenjarakannya, karena menurutnya orang Jawa akan menganggapnya sangat menghina terhadap keluarga raja yang harus dihormati apabila orang biasa dibiarkan turun tangan atas tubuh seorang pangeran yang suci. Akan lebih buruk lagi membunuhnya dengan keris atau tombak. Sang penguasa tidak mungkin hanya melihat bila pelecehan seperti itu dilakukan. Kita bisa berasumsi kuat bahwa ada sebab yang lebih dalam bagi pemberontakan Wira Guna daripada sekadar kebencian pribadi kepada Amangkurat. Van Goens melaporkan bahwa setelah kematian Wira Guna, Amangkurat memutuskan untuk mencopot kekuasaan "ulama-ulama" Muslim, yang dia curigai bersekongkol dengan saudaranya itu. Sultan memerintahkan sejumlah besar dari mereka datang menghadapnya di istana dari segala penjuru Jawa. Di sana dia memerintahkan mereka dikepung tentaranya, dan pada saat yang ditentukan, mereka semua dengan keluarga mereka, berjumlah 6.000 orang, dibunuh. Van Goens yang menyebut para korban itu "imam-imam dan cecunguk lain" tampaknya sependapat dengan Sultan dalam hal ketidaksukaan terhadap campur tangan "keagamaan" dalam urusan negara.

Tapi, makna persis dari kejadian itu lolos dari pengamatannya. Tampaknya Amangkurat tidak mewarisi perasaan ayahnya terhadap Islam. Dia menolak gelar "Sultan" dan lebih suka gelar Jawa "Susuhunan". Dia merevisi administrasi peradilan, yang belum lama diperkenalkan ayahnya, dan membatasi yurisdiksi pengadilan agama. Demikianlah, pemerintahannya merupakan reaksi keras terhadap pertumbuhan Islamisasi dalam masyarakat Jawa. Di lain pihak, dia berupaya sekeras mungkin membatasi kekuasaan raja-raja bawahannya dan menciptakan kontrol pribadi di seluruh wilayahnya. Semua ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pengikutnya.

Pada 1674 ketidakpuasan unsur-unsur dalam imperium itu menemukan seorang pemimpin dalam diri Trunajaya, raja Madura. Pemberontakan itu mungkin masih bisa dipatahkan kalau bukan karena campur tangan kekuatan-kekuatan lain dan kalau tahun 1678 yang sedang mendekat tidak menandai berakhirnya suatu abad dalam era Jawa.

Pemberontakan Trunajaya terjadi ketika Republik Belanda, dan karena itu juga VOC, sedang mengalami salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya. Pada 1672, pecah perang antara Republik Belanda di satu pihak dan Prancis dan Britania Raya, yang didukung beberapa negara Jerman, di pihak lain. Sebagian besar wilayah Republik di Eropa telah diduduki musuh. Keruntuhan kekuatan Belanda di seluruh dunia tampaknya sudah hampir terjadi, tapi orang Belanda berhasil mempertahankan diri di laut, dan di sekitar Asia skuadron Kompeni sekali lagi memperoleh kemenangan menentukan atas Britania.[11] Biarpun begitu, kabar angin bahwa Republik Belanda akan segera menyerah, kabar angin yang dengan gencar disebarkan para pedagang Britania, terus beredar di seluruh Indonesia. Pemerintah Batavia terpaksa mengambil beberapa langkah yang sangat tidak biasa dan menyusun semacam propaganda balasan dengan menyebarkan cerita bahwa kekuatan angkatan laut musuh-musuh Belanda telah hancur dan bahwa Raja Prancis sudah meminta perdamaian.

Tapi musuh-musuh Batavia memutuskan bahwa sudah tiba waktunya untuk bergerak. Pelarian dari Makasar merongrong Kompeni di Madura dan Banten. Trunajaya memperoleh dukungan para petempur nekat yang sudah kehilangan segala sesuatu untuk menggempur Jawa, dan orang-orang Makasar dengan penuh semangat berbaris di bawah benderanya. Sementara itu, di ujung lain pulau itu, Sultan Banten berusaha memperluas wilayahnya atas daerah-daerah barat Mataram. Kalau dia berhasil, Batavia akan dikepung oleh wilayah Banten.

Pada masa itu Banten diperintah Sultannya yang terhebat, Abulfatah Agung (1651-1683), yang berusaha keras memodernkan negaranya dan menjadikannya pusat kegiatan Muslim di seluruh Kepulauan Indonesia. Dia mengirimkan putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki dengan harapan menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam.[12] Pada saat itu juga, Sultan dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasihat dan petualang Eropa. Sultan tua mulai membangun kediaman baru, Keraton Tirtayasa, yang menariknya, dia bangun seperti kota Belanda kecil, rumah-rumahnya dibangun rapi sepanjang kanal. Keyakinan Jawa kuno bahwa penyerapan pengetahuan rahasia musuh adalah pertahanan terbaik terhadap kekuatannya mungkin telah membuat dia melakukan hal itu.

Tapi prestasi terbesar Abulfatah adalah penataan perdagangan luar negeri. Seperti raja Makasar, sang Sultan Banten menyambut baik para pedagang dari Britania, Denmark, dan Prancis di pelabuhan-pelabuhannya. Dengan bantuan orang-orang Eropa ini dia mulai memperlengkapi kapal-kapalnya sendiri, yang dibawa nakhoda asal Eropa berlayar ke Filipina, Makao, Benggala, dan Persia.[13] Pangeran mahkota berlayar ke Mekah di salah satu kapalnya sendiri. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah mereka terusir dari Malaka dan Makasar. Barang dagangan yang dijual di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten, dan gengsi Sultan Abulfatah naik begitu tinggi sehingga dia menuntut bagian dalam perdagangan pala Ambon dan dalam perdagangan timah

Semenanjung Malaya, tuntutan yang dengan takabur ditolak pemerintah Batavia. Dikatakan bahwa tidak pernah sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis, perdagangan yang begitu luas terjadi di satu pelabuhan Indonesia seperti di Banten pada tahun-tahun ketika VOC berada di puncak kekuatannya.

Keberhasilan membuat Abulfatah sangat ambisius. Dia bermimpi memperoleh keunggulan di seluruh Jawa bagian barat. Dia menjalin jaring diplomatiknya di seluruh Kepulauan Indonesia. Di Maluku dia berintrik dengan Sibori, Sultan Ternate, yang biasa dikenal di antara orang Belanda sebagai "Sultan Amsterdam". Serdadunya menyerang pos-pos Belanda di Sumatra. Akhirnya, dia menulis surat kepada Raja Britania Raya dan Sultan Turki untuk memperoleh persekutuan mereka.[14]

Melihat Sultan Banten mengancam Batavia dari barat sementara Trunajaya dan pendukung-pendukung Makasarnya menyulut bara di negeri Mataram di timur, Kompeni harus bertindak. Maetsuycker masih mencoba membatasi campur tangan Belanda seminimum mungkin, tapi dia terpaksa mengirimkan kekuatan laut di bawah komando Speelman untuk melawan orang Makasar yang mendukung Trunajaya. Terlambat. Walaupun tentara Kompeni menduduki Surabaya dan kota-kota pantai serta sebagian pulau Madura, Trunajaya berhasil mengalahkan tentara Susuhunan Amangkurat. Pertahanan raja yang dulu pernah begitu kuat ternyata lemah. Tapi apa gunanya perlawanan? Waktu yang diberikan nasib kepada dinasti itu sudah hampir berakhir: tradisi Jawa membatasi setiap periode pemerintahan yang tidak terputus hanya selama 100 tahun!

Keyakinan ini tercermin dalam cerita Babad. Sekali lagi Kediri memainkan peran musuh raja yang tak kenal kompromi.[15] Speelman yang energetik ingin menyerbu dengan pasukannya langsung ke pedalaman Jawa yang kurang dikenal itu, Kediri, dengan harapan menghancurkan kekuatan sang pemberontak sebelum bisa berakar. Dia dengan gigih menyarankan kebijakan

yang tegas dan tersusun baik, pertama memulihkan kekuasaan Susuhunan, yang dengan demikian akan berutang kepada Kompeni, lalu beralih melawan Banten untuk mengakhiri segala rencana dan klaim Sultan Abulfatah. Tapi Maetsuycker yang sangat hati-hati tidak mau mendengarkannya. Dia masih berharap bisa berunding dengan Trunajaya dan menunda konflik dengan Banten.

Tapi keadaan memaksa ia bertindak. Amangkurat, yang dikalahkan pemberontak, tiba-tiba menemukan bahwa dia ditinggalkan semua pengikutnya dan bahkan sebagian besar anggota keluarganya. Harta karun Susuhunan, permata mahkotanya, gajah dan kuda bahkan haremnya, jatuh ke tangan penguasa baru yang mengangkat diri sebagai penerus sah raja besar Hayam Wuruk dari Majapahit, dengan kata lain pewaris sah takhta Jawa Timur yang telah "diserobot" oleh raja-raja Mataram. Untuk beberapa waktu Kediri memperoleh kembali kejayaan masa lalunya. Sementara itu Amangkurat dalam pelariannya berusaha mencapai pantai, ke permukiman Belanda. Dia wafat kelelahan di jalan. Imperium itu tampaknya sudah lepas dari tangan dinastinya. Sebelum meninggal, dia menasihati putranya untuk bersekutu dengan Kompeni.

Susuhunan baru, Amangkurat II, adalah orang yang berkarakter lemah. Satu-satunya harapan baginya adalah Belanda (yang untung sekali tidak sadar akan pentingnya tahun 1678). Untuk memperoleh bantuan mereka dia tidak segan menjanjikan kepada pemerintah Batavia pembayaran atas semua biaya perang, monopoli impor kain dan opium, dan terakhir, penyerahan pelabuhan Semarang dan satu wilayah besar di selatan Batavia. Bahkan prospek memperoleh keuntungan besar ini belum cukup mengatasi keengganan Maetsuycker. Dia mencoba mencegah Speelman berpihak terang-terangan kepada Susuhunan. Dia membuat begitu banyak alasan penolakan atas saran komandan angkatan bersenjatanya sehingga Speelman menjawab: "Satu-satunya alasan penolakan yang tidak saya jumpai dalam suratmu

ialah bahwa mungkin langit pun akan runtuh dan menghancurkan seluruh umat manusia".[16]

Harus kita tambahkan bahwa Susuhunan muda itu melakukan segala hal yang dia bisa untuk menghancurkan keyakinan yang mungkin dimiliki Speelman dan orang-orang lain atas karakternya. Alih-alih bekerjasama dalam merebut kembali imperiumnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk dengan konyol berusaha merebut kembali salah satu perempuan haremnya yang sejak ditawan oleh Trunajaya telah mengelana dari satu istana Jawa ke istana berikut sampai akhirnya dia tiba di Banten, tempat Abulfatah yang cerdik menahannya dengan ketat dengan harapan bisa memanfaatkannya dalam intrik-intrik diplomatiknya di kemudian hari.

Tapi pada 1678, dengan kematian Gubernur Jenderal Maetsuycker pada 4 Januari, pengaturan urusan Belanda beralih ke tangan Rijklof van Goens yang lebih berjiwa perang. Speelman dipanggil ke Batavia, dan dia menjadi anggota paling berpengaruh dalam Dewan Hindia. Pasukan Belanda, diperkuat dan dipimpin Anthony Hurdt, masuk ke pedalaman Jawa, dan setelah mengatasi kesulitan yang sangat besar, bertempur sampai ke Kediri. Trunajaya berhasil menyelamatkan hidupnya tapi tidak memiliki apa-apa lagi. Takhta Majapahit, yang direbut kembali oleh seorang perwira Belanda, dengan khidmat diletakkan di kepala Amangkurat II oleh komandan pasukan Belanda. Waktu sudah berubah. Ayah dan kakek Amangkurat mengklaim diri sebagai penguasa Batavia dan bahkan menuntut bagian dari bea cukai kota itu; Amangkurat II praktis adalah bawahan Kompeni.

Setelah penaklukan Kediri, pasukan Kompeni dan Susuhunan berusaha menangkapi sisa-sisa tentara Trunajaya. Begitulah Belanda untuk pertama kalinya mengenal pedalaman pulau Jawa. Sekutu Kompeni yakni orang-orang Bugis yang dipimpin Palakka dan orang-orang Ambon yang dipimpin Jonker amat cocok untuk tugas mengejar gerilya Trunajaya di gunung-gunung bertutup hutan di Jawa Timur, dan Jonker adalah orang yang

akhirnya memaksa si pemberontak menyerah.[17] Begitu semua pemberontakan di Jawa Timur telah dihancurkan, sekutu masuk ke Mataram. Kediaman lama itu sudah jadi reruntuhan. Menurut pemikiran Jawa tempat itu sekarang berhawa buruk dan Susuhunan tidak bisa berdiam di situ tanpa membangkitkan kekuatan jahat. Karena itu ibukota baru pun dibangun, Kartasura di lembah Bengawan Solo. Di kediaman baru ini Amangkurat II dilindungi dari musuh-musuhnya oleh satu batalion tentara Kompeni (1681).

Dengan demikian, Mataram praktis kehilangan kemerdekaannya, dan Banten menikmati kebebasan sepenuhnya hanya lima tahun lebih lama. Kalau saja Sultan, keluarganya, dan rakyatnya tetap bersatu melawan orang asing, mereka akan bisa menahan orang Belanda lebih lama lagi, karena kepelitan dan kehati-hatian pemerintah Batavia adalah penjamin terbaik untuk kemerdekaan mereka. Tapi sekali lagi kisah lama kecemburuan dan kebencian antara Sang Sultan dan pangeran mahkota berulang. Baik Abulfatah maupun putranya, biasa disebut Pangeran Haji (karena sudah naik haji ke Mekah), sama-sama sangat gigih dalam menegakkan agama Islam, tapi pangeran mahkota itu menunjukkan persahabatan dengan orang Belanda sedangkan Sultan tidak pernah menyembunyikan kebenciannya yang menyala-nyala terhadap mereka. Selama perang saudara di imperium Mataram dia mengirimkan tentaranya untuk menjarah daerah sekitar Batavia dan pantai utara Jawa bagian tengah. Dia berintrik dengan raja-raja Cirebon dan mencoba membujuk mereka mengalihkan kesetiaan mereka dari Mataram ke Banten. Di kerajaannya dia menerima semua unsur anti-Belanda—pelarian dari Makasar dan Sumatra serta orang Muslim militan—sementara pedagang Britania dan Denmark menyediakan senjata api dan mengirimkan pelaut mereka untuk menjadi petembak dan insinyur.

Sultan muda itu tidak kurang fanatik tapi jauh kurang berani dibandingkan ayahnya. Tapi dia juga ambisius dan ingin cepat

naik takhta. Karena itu dia mencari persahabatan dengan orang Belanda, dan ketika perang saudara pecah di kalangan para partisan keduanya, dia memanggil Belanda. Kali ini tidak ada keraguan sedikit pun di Batavia, di mana van Goens, setelah tiga tahun memerintah, telah digantikan sebagai Gubernur Jenderal oleh Cornelis Speelman (1681-1684). Praktis semua rakyat Banten mendukung Sultan Abulfatah melawan putranya, tapi pasukan Sultan tua itu tak kuasa menahan serdadu Kompeni yang berpengalaman. Sekali lagi Jonker dari Ambon mendatangkan kemenangan buat Kompeni. Banten ditaklukkan dan Abulfatah ditawan. Pendukungnya yang terakhir dikejar-kejar lewat pegunungan Priangan yang tidak dikenal, dan dengan ini tentara Belanda untuk pertama kali mencapai pantai selatan pulau Jawa lewat darat.[18]

Baik Mataram maupun Banten kini berada di bawah pengawasan Kompeni. Di kedua negara itu, Kompeni memperoleh monopoli dagang untuk beberapa produk. Raja-rajanya, yang ditaruh di atas takhta oleh tentara Batavia, berutang besar kepada Kompeni untuk mengembalikan biaya perang. Walaupun pemerintah ini terbukti bersedia tidak meminta pelunasan utang-utang itu selama Sultan-Sultan itu dengan setia menerapkan perjanjian komersial yang baru disepakati, kedua negara Jawa itu kini berada dalam keadaan sama seperti para petani pala yang bangkrut di Maluku setengah abad sebelumnya. Wilayah Banten dan Mataram kini dipisahkan oleh wilayah Batavia, yang meluas ke selatan sampai ke laut, hingga mencakup daerah-daerah gunung Priangan. Raja-raja Cirebon ditempatkan dalam perlindungan Kompeni.

Peristiwa-peristiwa ini punya akibat sangat jauh. Kegiatan orang Britania, Denmark, dan Portugis berakhir di hampir segala tempat di Kepulauan Indonesia. Britania, yang terusir dari Banten, membangun benteng di pantai barat Sumatra dekat Bengkulu pada 1684. Mereka mempertahankan kedudukan mereka di sini selama 150 tahun.[19] Portugis mundur ke Timor, tempat yang agak terpencil di Kepulauan Indonesia, di mana mereka memperta-

hankan tempat berpijak yang terus terancam sampai sekarang. Sistem monopoli Kompeni kini meluas hingga ke semua pulau kecuali Kalimantan. Di Sumatra, Kompeni campur tangan dalam perselisihan yang terus-menerus terjadi di antara Sultan-Sultan Palembang, Jambi, dan Johor, dan pelan-pelan memperluas hak-hak istimewanya. Keadaan telah menimbulkan perubahan besar dalam tubuh Kompeni, dan sebagian anggota Dewan Hindia yang lebih berpengaruh mulai merasa bahwa seluruh sistem Kompeni harus disesuaikan dengan keadaan baru itu.

Para Direktur tersebut tetap enggan menerima kebijakan baru. Tentu saja mereka menyadari bahwa keuntungan perdagangan antar-Asia sedang menurun (1693 adalah titik balik perkembangan ini),[20] tapi mereka tidak khawatir terhadap penurunan ini, karena harga semua produk Asia di Eropa tiba-tiba naik. Setelah kematian Speelman kedudukan gubernur jenderal jatuh ketangan Johannes Camphuijs (1684-1691) yang kurang suka perang, dan walaupun pemerintah Batavia menuntut penyerahan tanah-tanah Priangan oleh Susuhunan, ia masih ragu-ragu memproklamasikan kedaulatan atas wilayah itu. Sekali lagi keadaan memaksa pemerintah mengambil kebijakan tegas dan jelas terhadap raja-raja lokal Priangan dan Cirebon.

Kejatuhan Mataram dan juga Banten telah menyebabkan reaksi besar di dunia Muslim Indonesia. Orang mulai bicara tentang "Jihad" melawan "Kafir". Laut Jawa dibuat tidak aman oleh armada seorang perompak Melayu Minangkabau yang menyebut diri Ibnu Iskandar ("keturunan Alexander Agung") dan seorang nabi Islam.[21] Pendukung terakhir Abulfatah yang menyerah kepada Belanda adalah Syekh Yusuf, seorang Makasar yang telah belajar di Mekah, dan dihormati sebagai orang suci di Batavia serta Banten. Selebaran yang diedarkan di antara penduduk Batavia dan pemberontakan lokal di Madura, semua untuk melawan "Kafir", membuat pemerintah Batavia agak gelisah. Sebagian agitator ditangkap, tapi setidaknya salah satu dari mereka dilepaskan setelah Aurang Zeb agung, kaisar India,

mengirimkan protes keras. Hutan-hutan dataran rendah Batavia dan pegunungan Priangan menjadi tempat sembunyi ratusan orang mencurigakan dan budak-budak pelarian, khususnya dari Bali, yang mulai menyebut diri "patriot". Tokoh paling dramatik di antara mereka adalah seorang budak pelarian dari Bali yang memakai nama Surapati. Setelah bergabung dengan tentara Belanda, dia pindah ke pemberontak karena penghinaan yang dideritanya dari seorang perwira Belanda yang, baru datang dari Belanda, tidak berpengalaman dengan tentara Indonesia. Dengan pengikutnya, Surapati dari Bali ini meneror negeri di selatan Batavia dan kemudian lari ke istana Susuhunan Amangkurat II. Raja ini, yang berutang pada Belanda atas takhtanya dan jelas bukan Muslim fanatik, berintrik dengan segala pihak dan menawarkan perlindungan kepada Surapati. Dia berhubungan dengan Iskandar sangnabi, dan ketika satu utusan khusus Belanda dikirim ke istananya, dia membiarkan Surapati menyerang dan membunuh sang duta besar dan banyak pengiringnya.[22] Setelah itu Surapati lari ke sudut paling timur Jawa, tempat dia mulai menaklukkan satu kerajaan miliknya sendiri.

Batavia menunda-nunda. Pemerintahnya takut pemberontakan umum; ia tidak merasa yakin lagi akan pasukan penduduk aslinya, khususnya setelah ada bukti bahwa bahkan Kapten Jonker yang gagah berani itu terlibat dalam suatu persekongkolan melawan Kompeni. Dewan Hindia, setelah dengan saksama mempertimbangkan argumen pro dan kontra, memutuskan untuk menahan petempur tua Ambon ini. Hal ini merupakan alasan yang cukup bagi Kapten Jonker untuk angkat senjata melawan pemerintah yang telah dia bantu menjadi sangat berkuasa di Indonesia itu. Dalam pertempuran kemudian dia tewas.

Pada 1703 Amangkurat II wafat. Putra tunggalnya, Amangkurat III, biasa dikenal dalam tradisi Jawa sebagai *Sunan Mas*, diketahui sangat membenci Belanda. Seorang calon pewaris takhta lain adalah paman Sultan muda ini, Pangeran Puger, yang dulu di zaman Trunajaya sudah pernah mencoba merebut takhta Mataram

dari pemilik sahnya. Pemerintah Batavia agak ragu mendukung si pengejar takhta itu melawan keponakannya yang toh punya klaim lebih kuat. Akhirnya mereka memutuskan mendukung Pangeran Puger, yang dikawal ke Mataram dan didudukkan di Keraton oleh tentara Kompeni (1705). Sultan muda lari ke Jawa bagian timur, yang memaksa dilakukannya peperangan kedua dan jauh lebih sulit. Gabungan kekuatan Amangkurat III dan Surapati melakukan perlawanan hebat. Ketika Surapati gugur (1706), Amangkurat pun kalah. Pada 1708 dia menyerah kepada kekuatan Kompeni dan dikirim ke Ceylon untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan. Untuk mencegah pemberontakan lebih jauh, semua unsur asing dipaksa meninggalkan pulau Jawa. Ribuan orang Bali, Madura, dan Makasar yang bekerja sebagai serdadu bayaran bagi bangsawan-bangsawan dan raja-raja Jawa terpaksa pulang ketanah leluhur mereka.

Raja Mataram menyandang gelar Pakubuwana, "poros dunia". Perjanjian baru antara Kompeni dan Susuhunan disepakati pada 5 Oktober 1705, yang mencakup semua hal penting mengenai status Jawa bagian barat. Sejak itu Kompeni akan punya kekuasaan sebagai penguasa atasan yang penuh dan tak terbatas atas semua negeri di sebelah barat daerah Tegal dan Banyumasdan atasbagian timur Madura. Hubungan Cirebon dengan Mataram berakhir; di masa depan Cirebon akan menjadi tanah milik Batavia. Sisa wilayah Mataram masuk dalam kontrol Kompeni sejauh mengenai perdagangan dan perniagaan: Kompeni akhirnya menjadi tuan di Jawa. Dari 1705 sampai 1941, jalan peristiwa politik di Indonesia ditentukan oleh kekuatan Belanda yang memerintah. Sejak saat itu, Batavia, yang kembali menjadi Jakarta pada 1949, menjadi pusat politik Indonesia.

BAB 9

ASPEK-ASPEK BARU KEHIDUPAN DI INDONESIA

DALAM 50 tahun setelah pendirian Batavia satu jenis baru orang Indonesia telah ditambahkan kepada beragam suku bangsa dan orang di Hindia. Kepada jenis baru Indonesia ini Dr. De Haan memberikan nama "Homo Bataviensis", orang Belanda Indonesia. Dalam bukunya *Oud Batavia* dia menggambarkan bagaimana, di bawah pengaruh iklim tropis dan lingkungan timur, "Homo Batavus" atau orang Belanda asli, pribadi yang rajin bekerja, keras kepala, dan mudah marah, telah berkembang menjadi "Homo Bataviensis", jenis yang mungkin lebih malas tapi tidak kurang cerdik dan malah lebih mudah marah. Tentu saja "Homo Bataviensis" hanya menjadi bagian sangat kecil dari penduduk Indonesia. Tidak mungkin memperkirakan jumlah persis penduduk Eropa di Batavia pada abad ke-16 dan ke-17, tapi mungkin tidak pernah lebih daripada lima sampai 10 ribu. Tapi beberapa ribu orang ini punya posisi dominan dalam politik dan ekonomi Indonesia.

Perkembangan dari "Batavus" menjadi "Bataviensis" adalah perkembangan yang sulit dan pedih. Banyak orang Belanda yang tiba di Batavia tidak punya kesempatan untuk menjadi anggota

kelompok insan manusia yang menarik itu. Mereka mati dalam beberapa bulan setelah tiba. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesempatan selamat seorang tentara dalam perang modern beberapa kali lebih besar daripada seorang Belanda yang bermaksud tinggal di Batavia pada "zaman indah dulu". Ketika J. P. Coen kembali ke daerah tropis, dalam beberapa minggu dia kehilangan anaknya, ibu mertuanya, dan ipar laki-lakinya.[1] Tapi sebagian besar dari mereka yang selamat menjadikan Indonesia kampung halaman mereka yang permanen. Di Belanda kebanyakan mereka termasuk dalam kelas miskin dan mereka datang ke Hindia sebagai pelaut dan serdadu, berharap memperoleh keberuntungan di Asia. Hanya sedikit yang berhasil, dan bagi sebagian besar dari mereka, begitu mereka berhasil jadi pejabat tinggi di Timur Jauh, pulang ke Belanda tidaklah menarik. Di Asia mereka hidup seperti raja; di Belanda mereka warga biasa, tersingkir dari kasta para "*regent*", penguasa oligarki yang mengontrol Republik. Lagi pula, banyak orang Belanda secara legal mengawini perempuan Indonesia, dan untuk alasan sosial Para Direktur itu berusaha mencegah emigrasi orang Indonesia ke Eropa. Ada pula yang punya kepentingan tetap berada di Timur. Keturunan para *blijver*[2] ini menjadi inti penduduk Batavia.

Sebagian besar pengunjung asing yang datang ke Batavia pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kota itu. Seorang pelaut Britania menggambarkannya sebagai berikut pada 1718:

> Kanal-kanal besar mengalir lewat beberapa jalan di Batavia hingga membuatnya rapi dan sejuk. Di setiap sisi kanal ini ditanam barisan pohon indah yang selalu hijau, yang, bersama keindahan dan kerapian bangunan-bangunan, membuat jalan-jalan begitu menawan sehingga saya pikir kota ini (dengan ukuran sebesar itu) adalah salah satu yang terapi dan terindah di seluruh dunia.[3]

Tapi dalam catatan lain ia tanpa tedeng aling-aling disebut lubang hama dan rumah maut! Ini mungkin menjelaskan bagian

kedua penggambaran dari pelaut Britania yang sama:

> Juga ada dua dermaga besar yang menjorok kira-kira tigaperempat kilometer ke laut dan berfungsi mengalirkan air dari kanal-kanal dan kali yang mengalir di seluruh kota. Kira-kira 100 budak dipekerjakan untuk mengangkat lumpur dan membersihkan ruang antara kedua dermaga ini, yang jika tidak dilakukan akan segera tersumbat dengan segala sesuatu yang tersapu dari kota dan negeri itu.[4] Di muara tempat ini ada banyak buaya, dan anjing mati atau mayat binatang yang hanyut sampai di situ tidak akan terus hanyut ke laut tapi akan langsung habis disantap.

Cukuplah ditambahkan bahwa penjelajah ternama itu, Kapten James Cook, melihat seekor kerbau mati terbaring berhari-hari di salah satu kanal.

Bangunan pertama yang dilihat orang-orang Batavia yang baru tiba dari laut adalah istana. Ia adalah ciptaan Coen dan tampak cukup kokoh, tapi dindingnya sudah sangat rapuh sehingga pada abad ke-18 garnisun itu dilarang menembakkan terlalu banyak tembakan kehormatan dari meriamnya agar dinding-dinding itu jangan sampai runtuh karena getaran. Di dalam, bukan hanya garnisun itu, tapi juga gubernur jenderal, anggota Dewan, pejabat tinggi, dan sejumlah pekerja Kompeni tinggal, dan semuanya berada di dalam sebuah persegi empat kecil kira-kira 135 meter per sisi. Dalam ruang terbatas ini, tertutup dinding setinggi enam meter, pejabat-pejabat Kompeni, pemerintah kolonial paling berkuasa di zaman itu, mengadakan rapat, menerima duta dari imperium-imperium besar, menyimpan akun-akun komersial, mengadili dan menghukum mati para penjahat, menyimpan barang dan harta Kompeni, dan terakhir—karena mereka pada dasarnya adalah pedagang —menjual kain meteran dan bir gentongan kepada umum. Pastilah di dalam tembok-tembok itu sangat panas dalam iklim Batavia dengan suhu rata-rata 28 derajat siang malam. Tapi tuan-tuan itu dengan gagah memakai pakaian Eropa mereka yang berat dan para wanitanya berpakaian dengan korset ketat untuk menyemarakkan dansa-dansa dan

pesta Yang Mulia Gubernur Jenderal. Angin sepoi-sepoi dari laut tidak bisa masuk ke gang-gang sempit. Dapur dan gudang makin membuat udara pengap, tapi tidak ada yang mengeluh. Mereka yangberhasil selamat melewati bulan-bulan pertamatinggal di situ adalah individu kuat. Mr. Van Outshoorn menikmati lingkungan tersebut selama 60 tahun dengan selamat. Mr. Johan Maetsuycker berhasil mempertahankan kecerdikannya selama 25 tahun sambil memerintah Imperium itu dari kastil Batavia yang pengap dan berbau busuk, tanpa pernah meninggalkan kota kecil itu.

"Homo Bataviensis" biasanya sangat takut pada udara segar karena dia selalu dan di mana-mana khawatir masuk angin. Orang Batavia yang terlatih baik pada 1700 menutup rumah, pintu, dan jendela padajam sembilan pagi untuk mencegah angin laut masuk. Angin laut membawa segala macam bau busuk dari pantai berlumpur itu, dan bau busuk dianggap berbahaya.[5] Orang Batavia menutup jendela untuk menjaga angin jangan masuk dan menurunkan tirai agar panas tidak masuk. Ada perbedaan pandangan mengenai apakah bagus membuka pintu dan jendela di waktu senja, tapi pada malam hari harus ditutup karena udara malam sangat berbahaya. Jadi, orang Batavia masuk ke kamar tidurnya sekitar jam 11, tempat dia melindungi tubuhnya yang sensitif dengan menumpuk bantal di sekelilingnya di ranjang. Lalu dia menurunkan kelambu di sekeliling ranjangnya yang bertiang empat untuk menjaga nyamuk tidak masuk. Toh dia berhasil selamat melewati malam.

Orang Batavia menjaga kesehatannya dengan caranya sendiri. Butuh waktu lama untuk meyakinkannya bahwa kebersihan tubuh dan sering mandi itu penting untuk kesehatan. Sampai 1775 masih ada perintah dari Pemerintah Tinggi melarang pemaksaan terhadap serdadu garnisun agar mandi sekali seminggu. Para istri orang Belanda yang hampir semuanya lahir di Indonesia tidak setakut itu pada air dibandingkan suami mereka yang datang dari Belanda yang basah dan berhujan. Banyak rumah yang dibangun di sepanjang kanal punya kamar mandi kecil di atas air kanal, dan

dari sana nyonya-nyonya itu tanpa malu-malu terjun berendam di dalam bak mandi untuk masyarakat umum itu–suatu kebiasaan yang dilarang, namun tanpa hasil, oleh Van Imhoff karena kanal-kanal itu dipakai sebagai got dan karena itu memang *agak* jorok.

Tuan-tuan itu punya cara lain untuk melindungi kesehatan mereka. Hari mereka dimulai dengan minum segelas gin dengan perut kosong. "Bangsa kita harus minum atau mati," tulis Coen pada 1619. Obat yang sama diminum beberapa kali sehari dan pada malam hari sebelum tidur. Tidaklah heran bahwa penyulingan *arak* disebut industri utama Batavia. Arak Batavia menjadi terkenal di seluruh Asia. "Orang-orang kita saling merangkul dan memberkati diri sendiri karena mereka berhasil tiba di tempat yang begitu luarbiasa racikan *punch*-nya," tulis seorang kapten Britania, Woodes Rogers, pada awal abad ke-18.[6] Kapten Cook mencatat sebagai suatu fakta luarbiasa bahwa satu-satunya pelaut di kapalnya yang tidak jatuh sakit selama tinggal di Batavia adalah seorang tua berumur lebih daripada 70 tahun yang tidak pernah berhenti mabuk. Demikianlah daya tangkal alkohol terhadap penyakit jelas terbukti! Pencegahan lain ialah merokok. Masa itu adalah zaman emas ketika cerutu Belanda yang baik dijual seribu batang tiga dolar, dan bahkan cerutu Havana hanya berharga 10 dolar per seribu batang. Tapi orang Batavia lebih suka rokok pipa daripada cerutu. Mereka merokok pipa ketika menghadiri upacara pemakaman dan ketika naik kuda dalam parade sebagai pengawal kota Batavia yang penuh kebanggaan, dan tentu saja mereka merokok pipa ketika duduk malam-malam di depan rumah masing-masing menikmati udara "segar" dari kanal.

Tapi salah jika menyimpulkan bahwa orang Batavia hanya minum, merokok, dan tidur, dan tidak bekerja. James Cook menulis pada 1770, "Sulit mencari di Batavia seorang Cina yang sedang berleha-leha, dan seorang Belanda atau Indonesia yang sedang bekerja."[7] Tapi pernyataan ini tidak sesuai dengan pernyataan lain yang dibuatnya sendiri.

Ada dua kelompok yang harus dibedakan di antara penduduk

Batavia: pegawai Kompeni dan mereka yang disebut warga bebas. Yang pertama ada di bawah perintah langsung Pemerintah Tinggi dalam segala hal. Coen sang diktator bahkan sampai memerintahkan seorang calon pemimpin gereja pergi ke Bali dan memilih seorang istri dari pulau itu. Kelompok kedua disebut "warga bebas", walaupun dalam praktik kebebasan mereka sangat terbatas. Mereka praktis terkungkung dalam ruang kecil kota Batavia dan sekitarnya. Lebih banyak perdagangan yang terlarang daripada yang diperbolehkan bagi mereka. Jadi kita temukan perbedaan besar dalam derajat kegiatan kedua kelompok itu.

Pegawai-pegawai Kompeni bekerja seperti budak, khususnya selama abad ke-17. Para juru tulis, yang berjumlah beberapa ratus anak muda yang dibayar kecil, kurang gizi, sering demam, bangun pada pukul 5:30 pagi, mulai bekerja pada jam enam, dan terus duduk di meja tulis sampai jam enam sore dengan istirahat selama 30 menit untuk makan pagi dan dua jam untuk makan siang. Tidak ada istirahat siang; pekerjaan berlanjut di bawah terik matahari tropis. Kalau ada banyak pekerjaan, lilin dipasang segera setelah jam enam sore dan penulisan dilanjutkan. Mereka menulis berak-rak jilid-jilid folio, dan mereka menulis dengan indah. Mereka tidak boleh meninggalkan kastil kecuali pada Rabu dan Minggu sore, dan bahkan itu pun harus pulang pada jam tujuh malam. Hampir tidak ada hiburan sesudah itu, dan mereka masuk asrama, loteng bangunan kantor yang lembab dan panas itu.

Para tukang Kompeni tidak hidup lebih gampang. Pembuat sepatu diperintahkan menyelesaikan sepasang sepatu setiap hari dengan ancaman hukuman penjara. Tukang kayu dan pembuat kapal di galangan Kompeni masih begitu efisien pada akhir abad ke-18 sehingga James Cook, yang memerintahkan perbaikan total atas kapalnya di pelabuhan itu, menulis: "Tidak ada galangan kapal laut di seluruh dunia yang lebih baik daripada Batavia."[8]

Hidup para warga bebas berbeda. Banyak dari mereka hidup sebagai perente dan kegiatan serupa yang memberikan mereka banyak waktu luang. Hampir semua warga bebas adalah

mantan pegawai Kompeni, dan masyarakat Batavia terdiri atas orang kaya baru yang suka pamer kekayaan berselera rendahan. Dianggap tanda kemakmuran bila punya banyak budak dan melepaskan semua kerja dan urusan, bahkan pendidikan anak-anak, kepada pelayan. Bagi orang-orang yang mencoba mencari mata pencaharian dalam profesi bebas, hidup itu keras. Fakta ini dialami seorang anak menantu Rembrandt yang terkenal itu, yakni Cornelis Suythoff, yang juga adalah seorang pelukis. Dia berusaha sekuat mungkin untuk hidup sebagai seniman, tapi untuk penghasilan tambahan dia harus melakukan pekerjaan lain, di antaranya ada yang terlarang oleh hukum Kompeni. Ini hampir membuat dia masuk penjara, tapi para pejabat mengubah pikiran mereka dan menolong dia keluar dari kesulitan dengan mengangkatnya sebagai kepala penjara![9]

Penghidupan yang mudah tidak mengubah standar peradaban penduduk Batavia. Sejak bayi, anak-anak diserahkan ke dalam pemeliharaan budak perempuan. Anak laki-laki mungkin mendapatkan pendidikan dari guru privat, tapi anak perempuan nyaris tidak belajar apa-apa, kadang-kadang bahkan bahasa Belanda pun tidak. Mereka bicara campuran bahasa Melayu, Portugis, dan Belanda, yang menjadi satu-satunya alat ekspresi mereka seumur hidup.[10]

Memang demikianlah keadaannya, karena penduduk keturunan Belanda hanya minoritas kecil di antara penduduk Batavia. Di samping Belanda ada beberapa kelompok ras non-Indonesia, di antara mereka keturunan imigran Portugis dari Malaka (hingga ada jalan di Batavia yang dinamakan "Rua Malacca"), keturunan mantan budak, sebagian besar diimpor dari pantai India dan disebut "Mardijker" oleh orang Belanda dan Cina. Para Mardijker punya reputasi buruk. Mereka Kristen, karena itu bebas dari keharusan memakai kostum nasional seperti orang Asia lain. "Mereka memakai apa yang disebut kostum Eropa," tulis salah seorang Belanda masa itu, "tapi tanpa baju, kaus kaki atau sepatu. Mereka berparade, berpakaian seperti topeng monyet di

pasar malam kampung, dan paling licik dan paling suka bersombong diri di antara semua penduduk Batavia."[11]

Orang-orang Indonesia, mungkin berjumlah 20.000 pada abad ke-18, terbagi ke dalam kelompok-kelompok nasional, tinggal di luar tembok kota. Di situ ada orang Bali, Bugis, Makasar, Melayu, dan lain-lain, tapi selama puluhan tahun setelah pendirian Batavia hampir tidak ada orang Jawa. Pemerintah tidak bisa melupakan serangan mendadak tentara Mataram pada 1628, dan tidak mengizinkan orang Jawa terlalu dekat dengan tembok kota. Pelan-pelan penduduk majemuk ini berkembang menjadi kelompok nasional Indonesia baru, yang berbeda dari orang Sunda di Barat dan orang Jawa di Jawa Timur, dan memakai Melayu pasar, *lingua franca* Kepulauan Indonesia, sebagai bahasa ibu mereka. Dari beberapa ribu pada akhir abad ke-17, jumlah mereka menjadi sejuta pada 1940.[12]

Ada jauh lebih sedikit perempuan non-Indonesia dibandingkan laki-laki non-Indonesia, akibatnya ada kecenderungan kuat ke arah indonesianisasi seluruh penduduk. Masuknya orang asli Belanda secara tetap menimbulkan efek perlawanan terhadap kecenderungan ini, tapi tidak cukup kuat, dan para Direktur di Amsterdam mengawasi perkembangan ini dengan keprihatinan serius. Mereka ingin Kekristenan disebarkan dan bahasa Belanda diajarkan di seluruh wilayah mereka tapi mereka enggan mengeluarkan banyak uang untuk mencapai tujuan-tujuan itu dan karena itu hasilnya sangat sedikit.

Piagam Kompeni yang diperbarui, dikeluarkan Parlemen Republik Belanda pada 1617, mengharuskan Kompeni bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Kristen dan menyediakan pengajaran di "sekolah-sekolah yang baik". Di sekolah-sekolah ini, bahasa Belanda harus menjadi bahasa pengantar, karena pengetahuan akan bahasa Belanda dianggap persyaratan yang perlu untuk penyebaran agama Kristen Protestan kepada orang Indonesia yang "kafir". Pengetahuan bahasa Belanda akan memungkinkan orang yang baru masuk Kristen

untuk membaca Alkitab, yang baru sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Penerjemahan seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa-bahasa utama di Indonesia terlalu berat bagi segelintir pendeta Gereja yang melakukannya.

Lagi pula, orang Indonesia yang menjadi pegawai Kompeni ternyata enggan belajar bahasa Belanda. Pendeta Caspar Wiltens, pendeta Gereja di pulau Ambon, menulis, setelah pengalaman beberapa tahun: "Orang Ambon terlalu tolol dan terlalu malas."[12] Lima puluh tahun kemudian, situasi belum berubah dan Gereja Reformasi di Maluku mengirimkan permintaan untuk buku-buku berbahasa Melayu, bukan bahasa Belanda, karena "ternyata mustahil mengajar penduduk asli dalam bahasa Belanda". Tampaknya, orang Ambon lebih suka beribadah kepada Tuhan dalam bahasa mereka sendiri, yang tidak dengan sendirinya berarti pertanda "kemalasan". Mulanya, penguasa Belanda berharap mengubah paling tidak sebagian Maluku menjadi wilayah berbahasa Belanda, tapi usaha itu sudah pasti gagal. Pada akhir abad ke-17, ada 29 sekolah dengan 34 guru dan 1.057 murid di Maluku. Rata-rata kehadiran yang rendah membuktikan bahwa upaya pendidikan Kompeni tidak dihargai. Sejarawan Kompeni, François Valentijn, mungkin benar ketika dia menulis bahwa orang Maluku menganggap penerimaan terhadap agama Kristen samacam layanan kecil terhadap penguasa dan kehadiran di sekolah semacam perbudakan.[13]

Keadaan agak lebih baik di Batavia. Portugis dan Melayu adalah bahasa yang paling banyak dipakai sehari-hari, dan para Direktur memberikan perintah keras untuk melawan penyebaran bahasa Portugis dan memperbanyak pemakaian bahasa Belanda, yang mereka anggap penting "untuk alasan-alasan kenegaraan yang berbobot".[14] Sekolah-sekolah disediakan untuk penduduk Kristen asal non-Indonesia, dan sekolah berbeda, tapi hanya sedikit, untuk orang Kristen Indonesia. Kebijakan ini tidak berhasil, karena dalam dua abad hampir semua kelompok penduduk asli Kristen dan sebagian besar Kristen Mardijker terserap oleh massa

Islam Indonesia. Cerita sama berulang dan berulang: Kompeni ingin sekolah Belanda tapi tidak menyediakan dana yang cukup; ia mau pemeliharaan dan penyebaran agama Kristen tapi menolak membayar pendeta Gereja dengan baik; ia mengkritik pendeta-pendeta karena kurang gigih tapi menghukum mereka ketika menunjukkan kecenderungan bertindak independen, bahkan di bidang propaganda agama mereka sendiri. Para Direktur boleh saja menulis dari Amsterdam: "Sekolah adalah kebun persemaian *commonwealth*," seperti mereka tulis pada 1661, tapi kebun persemaian butuh uang.

Para Direktur ingin sekolah menengah disediakan bagi anak-anak pejabat mereka di Batavia, tapi "sekolah Latin" yang didirikan atas perintah mereka tidak pernah awet. Lingkungan Batavia tidak mendukung perkembangan budaya. Tapi Batavia punya gaya sendiri dalam seni tertentu. Rumah-rumah penduduk kaya kadang-kadang dengan indah dihiasi karya-karya seniman ahli pertukangan Belanda-Jawa, dan ada minat besar terhadap lukisan. Ada warga yang memiliki 70 lebih lukisan, di antaranya mungkin karya seniman-seniman terkenal abad ke-17.

Batavia punya penyair, seperti setiap kota abad ke-17 yang lain. Kualitas syairnya agak rendah; hanya pantas disebut sajak.[15] Tokoh paling menarik di antara penyair Batavia adalah Jacob Steendam, yang juga punya reputasi dalam sejarah sebagai penyair pertama di emporium lain yang didirikan Belanda, New York. Selama beberapa waktu dia tinggal di permukiman kecil di Colony of New Netherland. Ketika New Netherland ditaklukkan Britania, Steendam pulang ke kampung halamannya, tapi beberapa tahun kemudian dia pergi ke Hindia Timur. Di Batavia dia diangkat menjadi pengurus rumah yatim piatu, dan di sini dia menerbitkan syair-syairnya tentang kehidupan Batavia.[16]

Kemakmuran terbesar Batavia terjadi pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Pada masa itu, kota kecil itu marak dengan aktivitas orang Belanda dan Cina, dan jalan-jalan dipenuhi orang yang berpakaian khas paling eksotik dan berwarna-warni dan

sejarawan Valentijn menulis: "Tiada kota lebih indah daripada Batavia di waktu malam. Pada malam hari orang-orang muda naik perahu di kanal-kanal sambil main musik dan bernyanyi."[17] Dalam kenyataan, kehidupan malam Batavia tidak seromantik itu. Jalan-jalan tidak aman setelah gelap, dan polisi tidak terorganisasi dengan baik.

Sangat beruntung buat Batavia bahwa perdamaian yang mantap disepakati dengan Banten pada 1684. Lingkungan sekitar kota itu menjadi lebih aman, suatu keadaan yang sangat disokong oleh lembaga polisi lapangan, yang terutama terdiri atas orang Ambon dan Bali. Warga mulai membangun vila-vila di hulu, tapi untuk waktu lama mereka masih harus tetap berada di sekitar sungai, karena tidak ada alat transportasi lain. Perlu seabad lagi sebelum orang Belanda mulai berdiam di daerah perbukitan Priangan yang lebih sejuk dan sehat. Tapi, perluasan permukiman Batavia menandai awal suatu perkembangan baru yang sangat penting.

Di antara berbagai sebab transformasi ini, ada satu sebab, yang tampaknya agak remeh, yang patut dicatat: kecintaan orang Belanda abad ke-18 terhadap pertamanan. Salah satu aspeknya ialah minat terhadap bunga dan tanaman eksotik.

Sekitar 1700, ada pejabat-pejabat tinggi di Hindia yang sama-sama punya hobi bertaman di rumah. Kelompok kecil hortikulturis Batavia ini termasuk dua gubernur jenderal dan beberapa anggota Dewan.[18] Johan van Hoorn salah satunya. Di tanahnya yang luas di perdesaan dekat Batavia dia bereksperimen dengan banyak tanaman non-Indonesia. Di antara tanaman-tanaman itu terdapat beberapa pohon kopi kecil yang dikirimkan kepada Van Hoorn dari pantai barat daya India. Pada waktu itu, Van Hoorn tentu tidak dapat membayangkan bahwa eksperimennya membuka jalan untuk revolusi ekonomi dan sosial yang akan mengubah nasib penduduk Jawa.[19]

Pohon-pohon kopi Van Hoorn tidak tumbuh subur di tanah asing di Jawa. Zwaardecroon (Gubernur Jenderal yang kemudian)

dan Chastelein meneruskan eksperimen itu dengan lebih berhasil, tapi tanpa campur tangan Nicholas Witsen usaha mereka mungkin tetap tidak berbuah.[20] Witsen, kepala hakim yang menangani perkara kecil (*burgomaster*) Amsterdam sekaligus direktur VOC, adalah orang yang berminat besar pada sains dan arkeologi. Dia punya sifat ingin tahu khas abad ke-18 yang mendorong dia mengumpulkan bahan-bahan—sering kali dengan biaya sangat mahal—yang sangat beragam tapi selalu eksotik. Dia mengirim Cornelis de Bruyn, pelukis dan pengelana, ke Persia untuk melukis reruntuhan Persepolis. Selama 20 tahun dia mengumpulkan bahan untuk peta dan deskripsi Siberia. Dia mengunjungi istana Pyotr Agung di Rusia, dan di Hindia dialah orang yang memulai pembudidayaan tanaman-tanaman ekspor baru, suatu gagasan yang sama sekali asing buat Kompeni, yang sampai saat itu bergantung hanya pada produksi pertanian asli.

Witsen, seorang kerabat Van Hoorn, mendapatkan untuk teman-temannya di Batavia suatu perintah oleh para Direktur untuk meneruskan usaha mereka, dengan janji hadiah kalau eksperimen mereka berhasil memungkinkan produksi tanaman-tanaman baru yang bernilai komersial di Jawa. Pada 1707 tanaman kopi dibagi-bagikan di kalangan para kepala daerah di sekitar Batavia dan Cirebon. Pada 1711, 50 kg pertama panen kopi diserahkan ke gudang Kompeni oleh Arya Wiratana, bupati Cianjur di Jawa.[21] Sembilan tahun kemudian panen tahunan meningkat menjadi 45 ton dan setelah 12 tahun produksi mencapai 5.500 ton. Hasil eksperimen Van Hoorn dan Witsen tersebut menakjubkan, tapi para Direktur menganggapnya menakutkan. Mereka telah melepaskan kekuatan alam dan sekarang melakukan usaha mati-matian untuk kembali mengontrolnya.

Dalam sistem perdagangan Kompeni yang ketinggalan zaman, produksi massal dan jual murah di pasar yang terus meluas tidak bisa terjadi. Perluasan perdagangan Asia Timur akan memaksa terjadinya perluasan modal Kompeni. Transportasi produk massal akan meningkatkan pengeluaran. Para Direktur

itu hanya ingin suplai terbatas produk-produk Asia yang dapat mereka jual dengan harga tinggi, dan, untuk menjaga suplai itu terbatas, mereka menuntut kontrol ketat atas produksi berlebih dan ketaatan mutlak terhadap sistem monopoli. Keberhasilan perkebunan kopi yang tak terduga itu mengguncang seluruh sistem sampai ke dasar-dasarnya. Besarnya jumlah kopi yang diproduksi membuat kontrol ketat atas ekspor mustahil dilakukan. Bahkan kalau pemerintah Batavia menggunakan seluruh armada kapal patroli di sepanjang pantai Jawa, ia tidak bisa mencegah berton-ton kopi diselundupkan ke permukiman Britania di Bengkulu dan pos-pos Portugis di Timor. Sebetulnya hal ini bukan masalah besar karena pemerintah Batavia selalu bisa mendapatkan sebagian besar produksi itu sendiri dengan harga murah, tapi hal ini tampaknya tidak bisa dimengerti Para Direktur tersebut. Orang Belanda di Indonesia lebih tahu, tapi mereka tidak bisa meyakinkan Amsterdam.[22]

Ada aspek lain yang menggelisahkan mengenai perkara ini, paling tidak di mata Para Direktur itu. Pada tahun-tahun pertama industri baru itu, ketika harga-harga masih sangat tinggi, beberapa penguasa daerah Jawa mengumpulkan jumlah uang yang besar. Mereka memaksa rakyat mereka menanam kopi tapi membayar sangat rendah untuk usaha mereka, sementara mereka sendiri menerima harga tinggi dari Kompeni, sampai 50 gulden satu pikul (56 kg).[23] Jelas, hubungan ekonomi semacam ini membuat para penguasa daerah Jawa jadi bawahan paling setia yang bisa ditemukan Kompeni di seluruh dunia, tapi juga membuat mereka berkuasa dan percaya diri. Juga di sini Para Direktur itu tidak bisa melihat keadaan dengan wawasan luas. Dari awal periode baru itu mereka khawatir bahwa "orang Jawa akan jadi terlalu kaya". Yang mereka maksudkan bukanlah petani Jawa yang miskin; mereka *ini* kecil kemungkinan akan menjadi kaya; yang mereka maksudkan terutama para bupati, walaupun para penguasa ini menghabiskan kekayaan baru mereka lebih cepat daripada waktu untuk memperolehnya.[24] Para Direktur

itu tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa peningkatan kesejahteraan di Jawa mungkin membuka pasar baru bagi barang dagangan Kompeni. Bahkan kalau sistem perdagangan Para Direktur itu memungkinkan pengenalan terhadap gagasan baru seperti ini, penerapannya mungkin akan terbukti sulit karena apa sajakah barang yang diproduksi Belanda pada waktu itu yang dapat dikirimkan ke Hindia untuk dijual?

Karena itu Para Direktur tersebut mencari jalan lain untuk mempertahankan kebijakan komersial tradisional mereka. Secara drastis dan sewenang-wenang mereka menurunkan harga produk mentah di Batavia dari 50 menjadi 12 gulden per pikul. Kemudian, mereka memerintahkan pembatasan perluasan perkebunan. Untuk memaksa harga lebih turun lagi, pejabat Batavia memperkenalkan pembedaan canggih terhadap "pikul gunung" seberat 102 kg dan pikul Batavia seberat 56 kg. Para produsen dipaksa menyerahkan jumlah kopi yang ditentukan dalam ukuran pikul gunung tapi menerima pembayaran dalam jumlah pikul Batavia yang sama. Perbedaan berat dijelaskan sebagai biaya pengeringan selama transportasi dari daerah-daerah pegunungan ke gudang-gudang Batavia. Dengan memanipulasi jenis pikul yang berbeda para pejabat tersebut memperoleh ganti sangat memadai atas upaya mereka sendiri sekaligus atas kerugian Kompeni.

Tentu saja dalam keadaan seperti itu petani-petani Jawa tidak bersemangat menanam kopi. Keuntungan terbatas tersebut, yang dengan murah hati diberikan Kompeni kepada para produsen, berakhir di kantong para penguasa daerah. Untuk para petani, budaya kopi itu tampaknya hanya mendatangkan beban tambahan, tanpa penghasilan tambahan. Akibatnya hal itu dibenci oleh orang banyak. Keengganan mereka bekerjasama menjadi begitu kuat sehingga selama beberapa tahun Kompeni bahkan tidak bisa memperoleh jumlah terbatas yang dituntutnya. Para petani mengabaikan kebun kopi mereka.

Terhadap perlawanan itu, Kompeni menemukan jalan keluar yang mudah. Pada tahun-tahun pertama budidaya kopi pemerintah

Batavia mendorong penanaman pohon kopi dan menawarkan untuk membeli produk itu dengan harga tetap. Begitu petani Jawa mulai menunjukkan keengganan meneruskan produksi, penguasa Batavia tiba-tiba ingat kembali bahwa, menurut perjanjian dengan Mataram, mereka punya kedaulatan atas semua wilayah sebelah barat Kesultanan Cirebon dan bahwa mereka juga menjadi penguasa atasan kerajaan kecil itu. Pada 1677 Kompeni telah menguasai daerah Priangan, tapi pemerintah Batavia tidak terlalu peduli dengan daerah bawahan barunya itu. Ia tidak repot-repot menghimpun upeti yang sebelumnya dibayarkan kepada Mataram dan kini seharusnya diberikan kepada Batavia. Selama 20 tahun Batavia membiarkan wilayah barunya di Priangan tanpa campur tangan terhadap urusan internalnya.

Pada 1694 sikap pemerintah mulai berubah. Pada tahun itu pemerintah Batavia mengirimkan komite, terdiri atas dua orang Indonesia dan dua pejabat Belanda, ke daerah gunung dengan perintah untuk membeli–di pasar terbuka – dan untuk membawa turun ke Batavia semua benang yang bisa diperolehnya dari produsen setempat. Pada 1696 pemerintah mengubah sikap dan me*nuntut* sejumlah tertentu lada, benang, dan komoditas lain dari setiap daerah. Harga pantas ditetapkan untuk produk-produk ini, dan diumumkan bahwa semua barang yang ditawarkan di atas jumlah yang dituntut itu juga akan diterima. Inilah pertama kali pemerintah Batavia menerapkan kekuasaannya di Priangan untuk menjamin penyerahan barang dagang tertentu. Tapi itu bukan gagasan baru, karena pernah diterapkan di Kepulauan Rempah-Rempah selama beberapa dekade. Sekitar 1700 sistem itu masih diterapkan dengan tidak berlebihan. Tapi daerah Priangan tidak pernah menyuplai jumlah barang yang dituntut, dan pemerintah tidak repot-repot memaksakan penerapan dekritnya.

Budidaya kopi mengubah gambaran itu. Kalau para bupati tidak mau bekerjasama dalam penyerahan kopi dengan jumlah tepat kepada Kompeni sebanyak yang diinginkan untuk pasar Eropa, mereka akan dipaksa menyerahkan jumlah itu, dan

memberikannya kepada Kompeni dalam bentuk upeti (alih-alih upeti beras yang sebelumnya dibayarkan Susuhunan Mataram), atau mereka dipaksa menjualnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah, dan mengirimkannya dengan biaya sendiri ke gudang-gudang Batavia.

Serangkaian dekrit menentukan aturan untuk sistem baru ini, yang dalam kepustakaan sejarah dikenal dengan nama "Kuota dan Penyerahan Paksa" (*Contingents and Forced Deliveries*).[25] Pada 1723 kopi dijadikan barang monopoli, dan pada tahun itu juga para Direktur Kompeni menentukan jumlah pengeluaran tahunan 4 juta pon dan harga 12,5 gulden sepikul. Sekitar 1760 penanaman tahunan sejumlah pohon kopi baru diharuskan. Seluruh budidaya itu diserahkan kepada para bupati, yang mengatur produksi sesuai dengan permintaan "Komisaris untuk Urusan Pribumi", seorang pejabat Belanda yang ditunjuk Gubernur Jenderal. Karena pengabaian dan ketidakpedulian yang ditunjukkan para petani penduduk asli, para pengawas pun diangkat untuk membantu para bupati mengatur produksi dan mengontrol perawatan kebun kopi. Para pengawas ini dikenal dengan nama "sersan kopi" dan dari kelompok pengontrol inilah pegawai negeri di negara kolonial Hindia Belanda dikembangkan.

Sejauh ini kita sudah mendiskusikan pentingnya budidaya kopi bagi Kompeni Belanda. Apa gunanya untuk penduduk Jawa? Pertama-tama, ia mendatangkan persekutuan erat antara penguasa Belanda dan bupati-bupati Jawa Barat. Sebagian wilayah Priangan sudah menjadi daerah semiotonom pada masa Mataram; yang lain diciptakan oleh pemerintah Batavia. Para bupati itu diangkat oleh Gubernur Jenderal, yang kurang lebih menghormati hak-hak keturunan. Kekuasaan mereka dibatasi oleh kewajiban meminta persetujuan Batavia mengenai penunjukan para *patih* atau letnan mereka. Juga para "sersan kopi" mengawasi sikap politik para bupati tersebut. Tapi pembatasan paling kuat terhadap kemerdekaan mereka ialah utang finansial mereka terhadap "Komisaris untuk Urusan Pribumi".

Para bupati itu lebih suka menjual produk pertanian mereka di muka, dan atas permintaan mereka, Komisaris itu biasa memberi mereka pinjaman berdasarkan perkiraan jumlah uang yang akan mereka terima begitu kopi diserahkan. Para bupati itu– karena terikat oleh adat istiadat untuk menyokong sebagian besar sanak saudara dan sejumlah besar pengikut mereka dengan penghasilan yang bertambah itu, yang sering kali menyebabkan mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada yang bisa mereka peroleh–segera jatuh dalam utang berat yang harus mereka bayar dengan bunga satu persen sebulan. Utang-utang ini menumpuk begitu cepat sehingga pada akhir abad seluruh produksi kopi tidak cukup untuk membayar bunganya saja! Akhirnya pemerintah Batavia terpaksa menghapuskan semua utang para bupati tersebut dan membolehkan mereka memulai dari awal yang baru.

Yang lebih berat dibanding kewajiban memproduksi kopi tersebut ialah membawa produk itu ke gudang-gudang Batavia. Muatan itu harus dibawa ke gudang kabupaten lalu dibawa dengan konvoi kerbau ke titik-titik bongkar muat di sungai-sungai di Dataran Rendah. Ratusan kerbau mati kelelahan, dan di Batavia ratusan orang Jawa tewas karena malaria. Tapi budidaya kopi mengubah keadaan Jawa Barat menjadi lebih baik. Kepentingan budidaya kopi tidak lagi memungkinkan terjadinya perang-perang kecil di antara para bupati yang mengakibatkan penderitaan besar di kalangan petani di zaman Mataram, dan perdamaian itu saja adalah manfaat yang sangat besar untuk rakyat hingga mungkin lebih berarti daripada beban tanam paksa itu.

BAB 10

ORANG BELANDA DAN INDONESIA PADAABAD KE-18

RUNTUHNYA kerajaan Makasar, Mataram, dan Banten mengunci nasib Indonesia. Orang Belanda mulai mengontrol Kepulauan Indonesia sejak 1680. Tujuh puluh tahun kemudian, sekitar 1750, hanya sedikit dari pulau-pulau itu yang masih bebas dari campur tangan kekuasaan dominan itu. Dua di antaranya ialah Bali dan Lombok. Di semua wilayah lain di Indonesia, Kompeni Belanda sampai tingkat tertentu memiliki kekuasaan, meskipun biasanya terbatas hanya pada wilayah pantai. Bali dan Lombok tetap merdeka baik karena sifat gemar perang penduduknya maupun keremehan nilai ekonomik produk mereka. Satu-satunya barang dagangan yang ditawarkan Bali ialah budak. Raja-raja kecil di situ saling menangkap dan menjual rakyat lawan mereka. Pada 1778 ada lebih daripada 1.300 budak dan budak yang sudah dimerdekakan asal Bali yang tinggal di Batavia. Tapi selama pemburu budak Bali tidak memperluas perburuan mereka di wilayah Kompeni, pemerintah Batavia memilih untuk menutup mata. Orang Bali dengan keras kepala mempertahankan tradisi Hindu mereka, dan setelah runtuhnya Mataram mereka tidak

lagi takut pada tetangga-tetangga Muslim mereka. Adat istiadat lama dengan semua peragaannya yang semarak terus berlangsung tanpa gangguan.

Sekitar 1750, kita bisa membedakan tiga wilayah pengaruh Barat di Kepulauan Indonesia. Yang pertama mencakup pulau-pulau Sumatra dan Kalimantan. Di sini kehadiran orang Eropa hampir tidak berpengaruh pada cara hidup orang Indonesia. Wilayah kedua ada di kepulauan di timur, di situ pengaruh Barat kuat tapi sifatnya menindas bukan membangkitkan. Yang ketiga adalah pulau Jawa, tempat orang Belanda kini mulai menusuk ke pedalaman dan, dengan memperkenalkan cara produksi baru, menimbulkan perubahan besar pada keadaan sosial dan ekonomi.

Situasi politik di Sumatra kacau-balau. Kesultanan Aceh yang pernah perkasa berada dalam keadaan kalut. Setelah Belanda menghancurkan kontrol Aceh atas perdagangan lada di pantai utara dan barat Sumatra sekitar 1680, sultan-sultan Aceh kehilangan kekayaan mereka, dan karena itu juga rasa hormat dari bawahan-bawahan mereka yang bandel. Tapi, hanya Aceh saja dari semua negara Sumatra yang masih mempertahankan kemerdekaan politik. Penduduk Nias dan pulau-pulau kecil lain di lepas pantai barat mencari perlindungan dari Belanda terhadap serangan perompak Aceh. Padang, pelabuhan "Imperium" Minangkabau, digenggam erat oleh Kompeni. Kepala-kepala suku animistik Batak, yang berjuang keras mempertahankan kemerdekaan dari Minangkabau yang Islam, turun dari pusat pertahanan mereka di gunung-gunung untuk menyepakati perjanjian dagang dengan Belanda.[1] Di pantai timur, kesultanan Palembang dan Jambi terus hidup sebagai negara bawahan Batavia. Dataran rendah di utara Jambi dikontrol oleh Sultan Johor, sekutu lain Kompeni, sampai saat ketika penduduknya, dengan bantuan Minangkabau, membentuk negara mereka sendiri, kesultanan Siak.

Semua negara itu telah memberi Kompeni hak eksklusif untuk menangani tanaman ekspor mereka yang paling penting,

tapi di sini sistem monopoli tidak menimbulkan akibat separah di beberapa bagian lain Kepulauan Indonesia. Monopoli itu tidak dipaksakan dengan keras, terutama karena kehadiran Britania di Bengkulu dan kedekatan pada benua Asia membuat pemaksaan seperti itu tidak bisa efektif. Negara-negara Sumatra lebih tidak stabil daripada kesultanan-kesultanan Jawa. Pertahanan paling baik bagi kemerdekaan kerajaan-kerajaan ini adalah keengganan para Direktur Kompeni, yang diketahui umum, untuk memperluas wilayah. Hanya apabila campur tangan aktif diperkirakan akan mendatangkan keuntungan barulah Batavia mengubah kebijakannya. Ini terjadi dalam kasus Bangka dan Belitung. Di Bangka, deposit timah telah ditemukan sekitar 1709. Lima puluh tahun kemudian Belitung pun mulai menguakkan harta karunnya. Beberapa dekade sebelumnya, Pemerintah Batavia telah menyambut tawaran seorang kepala suku Bangka untuk menerima kedaulatan Belanda (1688), tapi ia tidak pernah berusaha menerapkan perjanjian itu. Kini Belanda memperkuat hak-haknya dengan perjanjian dengan Palembang, yang juga mengklaim kedaulatan atas pulau itu, dan, dengan masih berpegang pada kebijakan perdagangannya yang sudah ketinggalan zaman itu, berusaha membatasi dan memonopoli produksi timah.[2] Pelan-pelan Batavia menancapkan kuku di kedua pulau itu.

Kalimantan secara budaya dan ekonomi lebih tidak berkembang dibandingkan Sumatra. Kesultanan Banjarmasin di sudut tenggara pulau itu adalah satu-satunya negara di Kalimantan yang cukup kuat mempertahankan diri melawan armada-armada perompak yang merajalela di laut-laut Indonesia. Tapi tempat itu punya reputasi buruk di kalangan orang Belanda. Mereka sudah berdagang di pelabuhan itu sejak 1606. Pada 1669 perwakilan mereka dikhianati dan dibunuh. Kemudian orang Britania mencoba peruntungan mereka, tapi pada 1707 pedagang-pedagang mereka mengalami nasib sama. Pada periode yang sama misionaris-misionaris Portugis mencoba masuk ke pedalaman untuk mengkhotbahkan Injil di kalangan orang Dayak yang

animis. Mereka juga dibunuh, karena Sultan-Sultan Banjarmasin sangat takut pada hubungan langsung antara orang Eropa dan Dayak, yang dengan kejam mereka eksploitasi dan tindas. Pelan-pelan ibukota kesultanan mereka menjadi makin penting. Setelah kejatuhan Makasar, Banjarmasin menggantikan Makasar sebagai titik pertemuan bagi pedagang-pedagang non-Belanda. Orang Portugis datang dari Timor, kapal-kapal Britania dari Bengkulu, dan beberapa jung Cina mampir setiap tahun. Lada yang tumbuh di sekitar kota dan rempah-rempah yang diselundupkan dari Maluku adalah barang dagang utama. Pada 1756 pemerintah Batavia mengirimkan duta khusus, Johan Paravicini, dan, setelah menyepakati perjanjian dagang yang baru, berhasil mengontrol keadaan.[3]

Negara-negara lain di Kalimantan hampir tidak layak disebutkan. Sultan-Sultan Sambas, Sukadana, dan Kutai keadaannya kembang-kempis, terus-menerus terancam oleh pesaing dalam keluarga mereka sendiri, dan oleh kepala-kepala bajak yang berusaha membangun kerajaan sendiri.[4] Peristiwa menarik dalam sejarah Kalimantan abad ke-18 ialah pendirian satu koloni Cina yang kuat di barat laut kesultanan itu, Sambas. Deposit emas yang kaya telah ditemukan di perbukitan bagian timur dan tenggara kota Sambas. Sultan memanggil ratusan petambang Cina. Para pekerja ini berorganisasi dalam "persatuan buruh" mereka, *kongsi*, dan melalui organisasi-organisasi ini mengadakan kontrak dengan sultan-sultan itu untuk mengeksploitasi berbagai tambang. Dalam 20 tahun jumlah orang Cina meningkat sampai beribu-ribu. Untuk mengawasi organisasi-organisasi yang berbahaya ini, sultan-sultan itu menaruh mereka di bawah kontrol penjaga Dayak. Pelecehan dan pemerasan yang menjadi konsekuensi sistem ini dengan sabar ditanggung oleh orang Cina sampai 1770, ketika kesabaran mereka habis. Pemberontakan pun terjadi; para penjaga Dayak dibasmi habis; dan sejak itu kongsi-kongsi itu membentuk republik-republik setengah merdeka. Pada 1855, ketika otoritas Belanda ditegakkan, orang Cina di Kalimantan

Barat Laut berjumlah lebih daripada 30.000, semua berdarah campuran, karena sampai 1823 perempuan Cina masih sangat jarang di daerah itu.

Sejarah kongsi-kongsi ini hanyalah serangkaian pertikaian antara kelompok-kelompok yang bersaing karena mulai habisnya tambang lama dan pembukaan tambang baru. Begitu ladang emas berhenti memberikan keuntungan, orang Cina harus mengandalkan pertanian, dan begitulah satu dari sedikit permukiman perdesaan asing muncul di Indonesia. Para pemukim menunjukkan keterikatan yang sangat kuat terhadap tradisi mereka dan adat istiadat Cina, tapi tidak ada tanda-tanda adanya peradaban yang lebih tinggi.[5] Begitulah, masuknya orang Cina di bagian barat Kepulauan Indonesia mencapai hasil yang lebih spektakular daripada dominasi Belanda.

Di bagian timur Kepulauan Indonesia persis kebalikannya yang terjadi. Barangkali untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, orang-orang Maluku berada dalam keadaan damai dengan sesama mereka, sejak Laksamana Speelman mencapai kesepakatan perjanjian yang sama dengan Sultan-Sultan Ternate dan Tidore. Tapi di sini kedamaian tidak lebih baik dibanding keadaan perang. Ordinansi yang dikeluarkan Batavia membatasi produksi cengkeh dan pala hanya pada Kepulauan Banda dan Ambon. Di luar wilayah ini semua pohon rempah diperintahkan untuk dibasmi, tentu saja dengan izin dari Sultan-Sultan Ternate dan Tidore, penguasa resmi Maluku. Dalam hal seperti ini Kompeni sangat legalistik sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Untuk menerapkan ordinansi-ordinansi ini setiap tahun diselenggarakan *hongi*, ekspedisi oleh armada perahu bersenjata yang diawaki oleh orang Ambon dan Banda dan dikomandani oleh pejabat-pejabat Belanda. Armada-armada ini mengunjungi pantai-pantai pulau-pulau di mana dicurigai ada kebun pohon rempah yang tidak sah. Pohon-pohon "berlebih" itu ditebang untuk mengurangi produksi rempah sampai seperempat dari masa sebelum Kompeni memegang kontrol.

Jadi penduduk Ambon dan Kepulauan Banda punya "hak istimewa", meminjam istilah dalam dokumen-dokumen Batavia, dalam hal produksi rempah. Hak istimewa ini termasuk bukan hanya kewajiban mengurangi jumlah pohon rempah kapan saja Kompeni menganggap perlu, tapi juga kewajiban membeli semua bahan pangan dari Kompeni dengan harga yang ditetapkan sangat tinggi. Dengan kondisi-kondisi ini, budidaya cengkeh dan pala jauh dari menarik. Orang Ambon dan Banda yang punya "hak istimewa" itu kehilangan minat untuk mendapatkan hak istimewa mereka. Dalam satu abad Ambon kehilangan kira-kira sepertiga penduduknya. Dan "warga bebas" Banda terpuruk jadi miskin.[6]

Para Direktur Kompeni itu memperoleh ganjaran atas pemerintahan buruk mereka berupa konsekuensi jahat sistem mereka sendiri. Ketika akhirnya permintaan atas rempah-rempah di Eropa meningkat, dan harga-harga naik, produksi tidak bisa lagi ditingkatkan. Perlawanan penduduk terhadap perluasan perkebunan tersebut tidak bisa diatasi. Dengan sangat ketat monopoli dipertahankan dengan biaya tinggi, dan ketika permintaan untuk rempah akhirnya meningkat, monopoli itu ternyata terbukti tidak ada. Orang Prancis dan Britania telah berhasil menanam pohon cengkeh dan pala di koloni-koloni mereka di India. Dengan demikian, monopoli itu hanya meninggalkan ingatan buruk yang pada awal abad ke-19 masih menyebabkan ledakan kekerasan terhadap kekuasaan Belanda.

Inilah dampak pengaruh Barat di Maluku. Indonesia Timur mencakup dua kelompok pulau yang lain, Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, serta kelompok Sunda Kecil, dari Sumbawa sampai Timor. Kelompok ketiga ialah Kei, Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Semua ini, bersama pantai barat Papua, praktis tidak penting buat Kompeni. Di sana warga Banda dibiarkan berdagang dengan kapal mereka sendiri dan atas risiko sendiri.

Di Kepulauan Sunda Kecil, pengaruh Eropa lemah. Pulau-pulau besar berpenduduk jarang itu menjadi tempat sembunyi alami bagi para perompak dan pengelana. Ada peperangan terus-

menerus di antara kepala-kepala suku lokal. Satu unsur yang sangat mengganggu dibentuk oleh "Orang Asing Hitam" dari Timor, suatu klan yang dibentuk oleh pembelot Prancis dari pasukan Kompeni yang, seperti seorang Romulus abad ke-17 di antara para pengayau, menghimpun sekelompok unsur pelawan hukum dan mendirikan satu "kota". Di bawah ancaman terus-menerus dari Orang Asing Hitam ini, Belanda membatasi aktivitas mereka ke titik selatan pulau itu, tempat mereka punya benteng "Concordia", sementara Portugis mundur ke titik utara, dekat kota yang sekarang disebut Dili. Kehidupan di sudut Kepulauan ini berciri primitif. James Cook mengisahkan betapa pada 1770 dia bertemu seorang pejabat Belanda di Timor yang, selain pakaian yang dia pakai dan warna kulitnya, cara hidupnya dari luar sama sekali tidak berbeda dengan orang-orang Timor di sekelilingnya. Pada 1756 Johan Paravicini, yang telah kita sebut sebagai duta untuk Banjarmasin, mengunjungi Timor dan menyepakati serangkaian perjanjian dengan kepala suku lokal, dan berdasarkan hal itu kekuasaan Belanda tetap berlaku di wilayah itu selama abad berikut.[7]

Ujung timur laut dan ujung barat daya pulau Sulawesi adalah contoh dua aspek yang bertolak belakang dari pengaruh Barat di Indonesia. Pada 1679 Gubernur Robert Padtbrugge dari Maluku mengunjungi Manado di daerah Minahasa di utara Sulawesi. Pemimpin-pemimpin lokal dengan sukarela mengikat persekutuan dengannya, dan persekutuan ini tidak terganggu selama lebih daripada dua abad.[8] Pada abad ke-19 banyak orang Manado menerima agama Kristen, dan Minahasa menjadi salah satu bagian Kepulauan Indonesia yang paling mengalami pembaratan.

Di sudut barat daya Sulawesi, ketidakpuasan di kalangan orang Gowa selalu mengancam, dan bisa meledak menjadi kekerasan. Kota Makasar yang pernah makmur merosot dengan cepat. Dermaganya, yang 70 tahun sebelumnya adalah tempat pertemuan saudagar-saudagar Cina, Denmark, Britania, Portugis, dan Melayu, kini terbengkalai. Perintah Kompeni yang keras telah

mengakhiri semua perdagangan dan pelayaran. Kota yang menuju kematian itu sepenuhnya didominasi oleh benteng "Rotterdam" yang dibangun atas perintah Laksamana Speelman. Di sebelah barat Gowa hidup orang Bone, sekutu bebas pemerintah Batavia, tapi sekutu yang sering membuat ulah dan penyelundup rempah-rempah yang mendarah daging. Jasa yang diberikan Palakka I dari Bone, yang membantu menaklukkan Makasar, Mataram, dan Minangkabau, membuat rakyat Bugis-nya memperoleh kebebasan bergerak lebih besar daripada banyak suku bangsa di Indonesia, tapi jelas mereka menyalahgunakannya.

Armada perompak Bugis merambah seluruh Kepulauan Indonesia. Mereka bercokol mantap dekat Samarinda di kesultanan Kutai, di pantai timur Kalimantan. Mereka menolong sultan-sultan Kalimantan di pantai barat dalam perang-perang internal antarmereka; mereka menyusup ke kesultanan Johor dan mengancam Belanda di benteng Malaka. Tapi mereka bukan satu-satunya perompak di perairan Indonesia. Juga ada orang dari Tobelo, suatu tempat pertemuan penjarah di timur laut pantai Halmahera yang membajak hingga bagian selatan Timor. Perompak dari "Kepulauan Papua", pulau-pulau di lepas pantai Papua, membuat semua laut di sebelah timur Jawa tidak aman untuk pelayaran pribumi. Yang paling buruk adalah orang Moro (juga dinamakan "Illanos") dari Kepulauan Sulu. Orang Moro punya armada yang terdiri atas 100 lebih kapal, di antaranya dibangun seperti kapal perang (*galley*) orang Romawi kuno, dengan tiga geladak pendayung, yang dipersenjatai dengan beberapa meriam, dan diawaki oleh 150 orang. Kapal-kapal ini bahkan berani menyerang kapal penjelajah Kompeni yang bersenjata berat. Pada akhir abad ke-18 Moro membangun benteng di titik selatan Sumatra, yang memberikan mereka kesempatan untuk merompak kapal-kapal yang melewati Selat Sunda, dan dari situ mereka menjarah daerah-daerah pantai di Jawa, menculik perempuan dan anak-anak untuk dijadikan budak.

Pastilah ada alasan bagi "wabah" perompakan di semua

perairan Kepulauan Indonesia. Akan gampang kalau kita bisa menjelaskannya sebagai salah satu akibat buruk sistem monopoli yang memaksa orang Indonesia mencari pekerjaan lain setelah mereka dilarang melakukan perdagangan dan pelayaran yang normal. Tapi penjelasan ini tidak memuaskan. Di Kepulauan Sulu, pusat utama perompakan, VOC sama sekali tidak punya pengaruh. Lagi pula, sulit dipercaya bahwa perairan Indonesia lebih aman di zaman sebelumnya ketika kekuatan laut raja-raja Jawa dan Makasar masih ada. Para raja ini tidak banyak tertarik "mengamankan" laut. Tampaknya penjelasan yang sebenarnya adalah perompakan telah merajalela di pulau-pulau itu sejak zaman dahulu, tapi bahwa pada abad ke-18 para narator Eropa mulai memandangnya sebagai perompakan, untuk membedakan "perompak" dari "pedagang jujur", sementara pada abad ke-16 dan ke-17 mereka tidak membuat pembedaan itu.

Ketika orang Eropa pertama kali datang ke Hindia mereka sama sekali tidak punya bayangan tentang sifat orang di Timur Jauh. Mereka tidak tahu apa yang diminati orang-orang itu, apa adat istiadat dan cara hidup mereka. Ada cerita yang tak terlupakan tentang satu perusahaan Amsterdam yang pada masa-masa awal perdagangan di Asia Tenggara mengekspor ke Thailand koleksi ribuan etsa Belanda untuk dijual di pasar Patani. Di antaranya terdapat etsa Bunda Maria (untuk dijual kepada orang Buddha dan Muslim atas perintah pedagang-pedagang Calvinis) dan pemandangan dari Alkitab; juga ada, untuk orang Siam yang berwawasan klasikal, buku-buku yang mengisahkan cerita-cerita karangan Livius (*sejarawan Romawi kuno-pen.*), dan akhirnya, bahan cetakan dengan daya tarik umum yang lebih manusiawi, koleksi gambar telanjang dan kurang sopan.[9] Kesalahan seperti ini hanya dibuat sekali. Begitulah akibat ketiadaan pengetahuan total atas perkara Asiatik pada zaman awal perdagangan Hindia Timur. Para pedagang Belanda yang pertama tidak mengerti bahasa dan adat istiadat orang Indonesia dan karena itu tidak memercayai mereka. Bagi mereka, seperti halnya bagi Edmund Scott, mereka

"semuanya maling dan bajingan".

Pada abad ke-18 orang Eropa mulai memahami keadaan. Walaupun orang Belanda pada periode itu belum memiliki pengetahuan luas tentang adat istiadat dan bahasa-bahasa di Kepulauan Indonesia, dan walaupun mereka masih tidak tahu sedikit pun tentang prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan Indonesia, paling tidak mereka sudah memperoleh pengetahuan praktis untuk urusan Indonesia dan khususnya Jawa. Makin lama makin banyak catatan pemerintah Batavia yang menyebut "pakar urusan penduduk asli". Logis bahwa, begitu mereka mulai membedakan orang Indonesia "baik" dan "buruk", mereka juga mulai melihat perbedaan antara pedagang jujur dan perompak, sehingga menerapkan pada gagasan Asia sesuatu yang agak baru bagi orang Belanda itu sendiri. Eropa bagian barat pada waktu itu baru mulai belajar hukum internasional, dan salah satu butirnya ialah pembedaan jelas antara "perang laut sah" dan "perompakan". Ada ribuan contoh dapat diambil dari sejarah abad ke-15 dan ke-16 untuk membuktikan bahwa sebelum masa itu pembedaan tidaklah jelas di kepala sebagian besar penjelajah laut Eropa. Cukuplah disebutkan di sini penjelajahan perompakan Sir Francis Drake dan kegiatan pemilik kapal sekaligus perompak Dunkirk. Pada perjalanan pertama De Houtman ke Hindia, para awak kapal minta izin menggasak kapal Portugis yang penuh kargo, dengan anggapan bahwa itu jalan yang lebih mudah mendapatkan keuntungan daripada perjalanan jauh ke Hindia. Kalau orang Belanda pada abad ke-18 mundur dua abad ke dalam sejarah mereka sendiri, mereka akan mengerti bagaimana orang Indonesia tidak punya keberatan moral untuk menyerang "orang kafir" dan menculik anak-anak "penyembah berhala". Perompakan hanyalah salah satu aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia dan masih tetap begitu selama sebagian besar abad ke-19.[10] Walaupun begitu, seharusnya pemerintah Batavia dapat menjaga keamanan laut lebih baik daripada yang dilakukannya. Batavia bahkan tidak menyediakan perlindungan memadai terhadap

para pemburu budak di pantai-pantai Jawa. Inilah satu indikasi awal memudarnya semangat kegiatan Kompeni yang makin lama makin jelas selama abad ke-18.

Tidak ada tempat lain di Indonesia yang lebih terpengaruh dominasi Barat daripada Jawa. Kita sudah bahas tentang kondisi sosial di sebagian pulau Jawa yang sejak akhir abad ke-17 langsung diperintah Batavia, yaitu Dataran Rendah Batavia dan daerah Priangan. Tapi negara-negara bawahan Batavia, yaitu Banten dan Mataram, juga sangat terpengaruh Belanda. Kedua negara itu dengan cepat terpecah-belah.

Setelah pengusiran Amangkurat III dan dilepasnya daerah Priangan, pelabuhan Semarang, serta penguasaan atas Cirebon kepada Kompeni pada 1705, imperium Mataram hanya mempertahankan bayangan dari kekuatannya dahulu.

Konsesi teritorial ini dilakukan Susuhunan Pakubuwana I, yang telah diangkat ke takhta atas perintah Batavia. Pasukan Kompeni mengiringinya ke kediamannya, menghancurkan perlawanan pesaingnya—antara lain Susuhunan Amangkurat III yang tersingkir—dan, akhirnya, telah menghancurkan kekuatan Surapati, kepala serdadu swasta (*condottiere*) Bali yang gagah berani yang lama sekali menjadi tulang punggung semua perlawanan terhadap Kompeni. Secara politis Mataram masih merdeka, tapi secara ekonomis ia sudah jadi negara bawahan Kompeni, karena perjanjian 1705 membuat ia wajib menyerahkan, dengan harga yang ditetapkan, beras dalam jumlah yang akan ditentukan Kompeni. Setelah kesepakan perjanjian ini, pemerintah Batavia melakukan segala sesuatu untuk memelihara perdamaian di kesultanan itu, tapi ini terbukti mustahil.

Posisi Pakubuwana I terus-menerus terancam oleh anggota keluarganya sendiri serta bawahan-bawahannya yang memberontak. Bali mengulangi invasi mereka dan memaksa pasukan Sultan keluar dari Blambangan. Surapati sudah tewas tapi anak-anaknya terus memerintah Malang. Tuan-tuan tanah Surabaya dan Pasuruan mengabaikan kekuasaan Susuhunan. Kalau mereka

tidak dihalangi oleh garnisun benteng-benteng Belanda yang dibangun di kedua kota itu selama perang sebelumnya, mereka sudah akan terang-terangan menentang penguasa atasan mereka di Kartasura. Mereka bahkan sudah akan menaklukkan keratonnya dan membasmi keluarga penguasa, karena kapan saja tentara Mataram bertemu musuh di medan perang, mereka kalah. Paku-buwana jelas tidak bisa merebut penghormatan dari rakyatnya. Untuk mereka, dia adalah dan tetaplah kaki-tangan kekuatan asing. Sayang buat dia, kekuatan asing ini terbukti tidak mau membelanya sampai tuntas. Batavia menolak melakukan langkah militer yang mahal terhadap negara-negara bawahan yang tidak setia di pantai timur Jawa, dan ia lebih suka menjalin hubungan baik dengan para raja Madura, yang kekuasaannya dapat saja ia pangkas untuk menjamin kedudukan Sultan.

Tujuan umum kebijakan Belanda terhadap berbagai negara Jawa adalah untuk memelihara perdamaian internal dan bukan untuk mendukung sekutu Batavia melawan musuh mereka. Batavia terus-menerus menentang usaha Sultan Agung dan Amangkurat I untuk memperluas pemerintahan mereka atas Jawa Barat dan Bali. Kompeni tidak akan memperoleh apa-apa dan bahkan melihat ancaman besar kalau terjadi penyatuan politik di pulau itu. Di lain pihak, ia akan rugi besar kalau keadaan perang dan pertikaian internal terus muncul dari Banten dan Bali. Keadaan seperti itu akan mengakhiri "penyerahan" beras yang telah dijadikan tanggungjawab penguasa-penguasa daerah di Mataram. Karena itu, kebijakan Batavia ditujukan pada pencegahan semua aksi militer, baik yang diambil Sultan untuk memperkuat kekuasaannya maupun para penentangnya yang ingin menggulingkannya. Mungkin banyak raja Jawa merasa sangat tidak puas terhadap Batavia yang membuat mereka semua lemah dan yang mencegah kebangkitan kembali negara-negara Jawa yang kuat. Lagi pula, pemerintah Batavia khawatir bahwa perang tiada habis para raja tersebut bisa menjadi ajang latihan bagi petani Jawa yang cinta damai menjadi petempur kawakan,

suatu perubahan yang tentu tidak akan menguntungkannya.[11]

Pemerintah Batavia bahkan mencoba memperkuat kekuasaan Sultan dengan merombak pengaturan wilayah negara itu. Pada 1709, pembagian daerah-daerah feodal yang ada di Mataram dihapuskan dan wilayahnya dibagi kembali ke dalam 43 kabupaten yang kurang lebih berukuran sama dan berstatus setara. Tujuan langkah ini adalah mengurangi kekuasaan turun-temurun penguasa-penguasa yang sebelumnya merdeka, yang karena nenek-moyang mereka yang terkenal dan dihormati menikmati prestise besar di seluruh Jawa, tapi bahkan langkah yang cukup drastik ini gagal memperbaiki keadaan politik. Pakubuwana wafat pada 1719, tapi ketika pemerintah Batavia, yang bertindak sebagai penguasa atasan Mataram, memilih salah satu putranya sebagai penerus (Amangkurat IV, 1719-1726), pemberontakan muncul lagi. Suatu serbuan terhadap Keraton dipatahkan oleh garnisun Belanda dan tentara Belanda memulihkan ketertiban seadanya di seluruh negara setelah empat tahun peperangan. Banyak pemimpin pemberontak ditawan dan dikirim ke pembuangan, di antara mereka adalah putra-putra Surapati.

Amangkurat IV digantikan oleh Pakubuwana II pada 1727. Kedua raja itu sangat mengandalkan kekuatan militer Kompeni untuk bertahan di takhta. Tentu saja Belanda tidak memberikan dukungan mereka dengan gratis. Setiap campur tangan meningkatkan jumlah utang Sultan kepada Batavia, dan dengan cepat jumlah keseluruhan melampaui kemampuan bayarnya. Dalam dekade yang sama Sultan Banten mengalami keadaan serupa.

Setelah perjanjian 1684, ketika semua pedagang asing diusir dari negerinya, Banten sangat terpukul. Sultan, patihnya, dan sebagian bangsawan kehilangan sumber utama penghasilan mereka, yang terdiri atas segala macam pemajakan atas perdagangan lada pedagang-padagang Eropa. Dibandingkan dengan Mataram, Banten terbelakang dan petani-petaninya, serta daerah perdesaan, berada dalam kemiskinan, tapi kelas

penguasa memperkaya diri dengan menangani produk lada dan dengan manipulasi yang cerdik atas persaingan yang ada di kalangan orang Eropa dan Cina. Kekuasaan Kompeni Belanda sebagai penguasa dan permulaan monopoli dagang mengakhiri keuntungan mereka. Setelah 1684, bahkan kaum bangsawan pun tidak bisa mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan lada. Para pemilik tanah tidak mau lagi berproduksi dan mulai beralih pada budidaya tanaman pangan. Semua ini mengakibatkan ketidakpuasan umum dan penyusutan kekuasaan Sultan yang memaksanya mencari perlindungan Batavia.

Pada 1731 Batavia menyepakati satu perjanjian baru dengan Banten dan dua tahun kemudian dengan Mataram. Kompeni, sesuai dengan jiwa merkantilisnya, membuat semua perjanjian itu dalam bentuk kontrak bisnis. Kontrak dengan Banten memberikan hak kepada Batavia untuk mendirikan benteng di beberapa titik, yang akan memungkinkannya melakukan kontrol lebih baik atas pelabuhan utama kesultanan. Kontrak dengan Mataram memutihkan utang Sultan sebagai ganti peraturan "penyerahan" dan "kuota" yang baru dan lebih ketat. Tapi, semakin tunduk para sultan terhadap orang asing yang dibenci, semakin rendah pula rasa hormat rakyat terhadap penguasa asli mereka. Pakubuwana pertama dan penerus-penerusnya terpaksa melindungi diri dari rakyat mereka dengan membentuk barisan pengawal yang terdiri atas tentara bayaran non-Jawa dan dengan membayar biaya pemeliharaan garnisun Belanda di ibukota mereka. Dalam usaha mereka yang tergesa-gesa untuk meningkatkan penghasilan, mereka juga melakukan hal yang sangat tidak populer: mereka menerima masuknya pedagang-padagang Cina ke pedalaman Jawa dan bahkan menyewakan desa-desa dan kabupaten-kabupaten kepada orang Cina kaya yang kuat membayar mahal kepada Sultan karena tahu bagaimana caranya memeras beras sebanyak mungkin dari penduduk desa.

Pemerintah Batavia sangat sadar akan bahaya membiarkan situasi politis yang goyah di Jawa terus berlangsung. Tapi pada

masa itu orang Batavia punya masalah sendiri yang perlu mereka khawatirkan.

Pada 1732 Batavia mendapat pukulan berat yang menyebabkan keadaannya menurun selama seabad berikut. Pemerintah telah memerintahkan penggalian satu kanal baru agak jauh di luar kota. Tiba-tiba sebagian besar penghuni dua permukiman Indonesia dekat kanal baru itu jatuh sakit, dan dari situ penyakit itu menyebar ke Batavia. Angka kematian naik sampai ke tingkat yang mengerikan, dan tetap tinggi sampai abad berikut. Pengunjung asing yang datang ke Batavia dan menjalin pertemanan di sana, sering kali tidak menemukan satu pun dari temannya masih hidup ketika mereka datang lagi setengah tahun kemudian setelah menjelajah Kepulauan Indonesia. Dari gejala penyakit tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa wabah itu adalah malaria, tapi tidak bisa dijelaskan mengapa penyakit itu muncul begitu tiba-tiba atau, paling tidak, mengapa penyakit itu menyebar luas begitu mendadak setelah 1731 dan apakah penggalian kanal baru itu berhubungan dengan hal itu. Dokter masa itu gagal menemukan penyebabnya. Mereka menyalahkan angin laut, kemudian angin darat. Mereka mengimpor air Spa atau Seltzer dari Eropa, dan tidak minum dari air sungai yang kotor itu, dan akhirnya mereka bahkan mulai menganggap bahwa keberadaan kanal-kanal kotor itu sendiri tidak menyehatkan. Tapi orang Indonesia, yang tidak memedulikan kualitas air minum, lebih kebal daripada orang Eropa. Orang Cina praktis bebas dari penyakit itu. Karena orang Cina minum banyak teh, kepercayaan menyebar bahwa teh adalah minuman obat, suatu pendapat yang dengan cepat dimanfaatkan oleh Para Direktur di Amsterdam. Mereka mengedarkan selebaran di kalangan rakyat Belanda yang menasihati mereka untuk minum teh agar lebih sehat, dan menyarankan orang minum 40 cangkir sehari![12]

Batavia, yang pernah jadi mutiara di antara permukiman Eropa di Timur, mendapatkan reputasi sebagai salah satu tempat paling tidak sehat di bumi. "Kematian tidak berarti apa-apa di sini," kata

James Cook ketika dia tinggal beberapa bulan di Batavia pada 1770. "Satu-satunya komentar atas kematian sesama warga adalah: yah, dia tidak utang apa-apa kepadaku, atau, harus aku dapatkan kembali uangku dari pembagi warisannya."[13] Mereka yang dapat pindah ke luar kota, ke pedesaan yang lebih sehat, melakukan hal itu. Bahkan Gubernur Jenderal pun melawan tradisi, dan setelah 1741 tidak mau lagi tinggal di istana. Bisa dimengerti kalau bagian-bagian Batavia lama menjadi makin terabaikan setiap tahun, sampai-sampai seorang profesor Jerman terpelajar pada awal abad ke-19 dapat ilham untuk meramal: "Karena tidak ada kegiatan perbaikan, Batavia tidak akan bertahan lama."[14]

Pada tahun itu juga orang Belanda Batavia mengalami kejutan lain yang mengerikan. Selama Kompeni ada, pegawai-pegawainya di Timur selalu dibayar dengan gaji yang luarbiasa kecil.[15] Akibatnya setiap orang mencari keuntungan tambahan lewat pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan swasta, dengan melanggar monopoli Kompeni. Para Direktur sangat sadar akan semua pelanggaran itu. Mereka melihat sebagian pejabat mereka yang gajinya tidak pernah lebih daripada beberapa ribu gulden setahun pulang ke Belanda setelah 12 atau 15 tahun dengan membawa modal ratusan ribu gulden. Setiap orang tahu, misalnya, bahwa penghasilan regular dari perdagangan ilegal oleh wakil Kompeni di Jepang berjumlah 30.000 gulden setahun. Pelepasan armada dari Batavia pulang ke kampung halaman adalah peristiwa tahunan paling besar di kota itu. Ribuan urusan harus dibereskan secara pribadi antara nakhoda dan pelaut di satu sisi, serta para pemukim di sisi lain. Barang yang diselundupkan ke Eropa sering kali lebih besar nilainya daripada kargo regular untuk Kompeni. Gubernur Jenderal Zwaardecroon menghukum mati 26 orang pada awal abad ke-18 karena melanggar hukum Kompeni, tapi sia-sia. Lima belas tahun kemudian, pada 1731, Para Direktur memutuskan menjatuhkan hukuman tegas untuk membuat orang jera dan memerintahkan pemecatan segera dan pemulangan paksa ke Belanda Gubernur Jenderal Durven, direktur jenderal

perniagaan Asia, dua anggota Dewan Hindia, dan sejumlah pejabat tinggi lain. Untuk sementara penyelundupan berhenti, tapi akibatnya ratusan orang Batavia bangkrut karena kehilangan sumber mata pencaharian mereka.

Puncak dari semua ini, terjadi pembunuhan massal atasorang Cina Batavia pada 1740. Sudah sejak 1721 warga terhasut oleh cerita aneh mengenai konspirasi Jawa, yang katanya dirancang oleh Peter Erberfelt, seorangwargakelahiran Indiadari keturunan Jerman-Siam. Erberfelt dan sejumlah orang lain dihukum mati setelah diadili di pengadilan Batavia.[16] Pada 1740 cerita lain mulai beredar, bahwa orang Cina berencana memberontak dan bermaksud menaklukkan Batavia dengan mendadak. Agak mengherankan bahwa orang Cina akan merencanakan hal itu, karena mereka selalu menjadi rakyat favorit pemerintah Batavia karena kerajinan, kedamaian, dan perilaku tenang mereka. Tapi pada beberapa tahun terakhir, sejumlah besar imigran miskin Cina tiba di Batavia dan setelah itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Pemerintah membatasi jumlah imigran dan mengatur sistem kuota, tapi hukum ini terus dilanggar oleh orang Cina, yang tahu titik lemah sistem pemerintahan Kompeni, yakni gaji kecil pegawai-pegawainya. Maka, terlalu banyak yang datang, dan mereka yang gagal mendapatkan kerja halal mulai menjarah daerah-daerah perdesaan di sekitar ibukota itu.[17]

Pemerintah memutuskan mendeportasi semua orang Cina pengangguran ke Ceylon dan Afrika Selatan. Ketika embarkasi dimulai, suatu cerita beredar di antara orang Cina bahwa ini cuma trik pemerintah untuk menguasai para korban dan bahwa sesudah itu orang-orang Cina malang itu akan dilemparkan ke luar kapal di tengah laut! Kompeni punya catatan kegiatan buruk, tapi ia tentu saja tidak pernah melakukan, bahkan membayangkan pun tidak, kejahatan seperti itu. Tapi ada orang Cina yang jadi nekat. Kelompok bersenjata berkumpul di sekitar kota dan mulai menyerang pos-pos jaga. Tidak ada bukti bahwa orang Cina lain yang tinggal di dalam tembok kota berencana bergabung dengan pemberontakan

mereka, tapi kegelisahan penduduk Belanda bisa dibayangkan, dan pemerintah dengan tepat memutuskan untuk memerintahkan pencarian senjata di semua rumah Cina. Ketika pencarian dimulai, terjadi kebakaran dan kemudian pemerintah kehilangan kontrol. Pelaut, serdadu, warga Belanda, dan budak Indonesia turun ke jalan dan mulai membunuhi orang Cina di mana-mana. Beberapa ribu tewas dalam bencana itu. Pemerintah tampak tak berdaya atau tidak mau menghentikan pembunuhan massal sebelum yang paling buruk terjadi. Setelah itu anggota-anggota Dewan Hindia mencoba meletakkan seluruh tanggungjawab di pundak Gubernur Jenderal, yang pada gilirannya, dengan tepat, berpendapat bahwa atas semua tindakan pemerintah, Gubernur *dan* Dewan sama-sama bertanggungjawab. Para Direktur Kompeni di Amsterdam memerintahkan penangkapan Gubernur Jenderal ketika dia pulang ke Belanda, dan penyelidikan kemudian berlangsung bertahun-tahun, tanpa hasil jelas.[18]

Di sebagian kota pantai bagian utara dan timur laut pemberontakan orang Cina dipatahkan sejak awal. Tapi di beberapa tempat lain para pemberontak berhasil menguasai benteng dan keberhasilan mereka sebagian besar disebabkan dukungan tersembunyi atau terbuka dari para penguasa Jawa setempat. Bahkan benteng dan pusat dagang Belanda yang penting di Semarang nyaris jatuh ke tangan mereka. Pada saat kritis ini Belanda mendapatkan dukungan luarbiasa dari Cakraningrat, penguasa Madura Barat. Cakraningrat, walaupun asalnya bawahan Mataram, adalah musuh bebuyutan Dinasti Agung dan Amangkurat I, dan penuh semangat berapi-api untuk mengulang keberhasilan Trunajaya dan menghancurkan kesultanan Jawa. Melihat bahwa para penguasa Jawa daerah-daerah pantai mendukung orang Cina pemberontak, dengan persetujuan rahasia dari Pakubuwana, dia bergabung dengan Belanda dan menghancurkan pemberontakan di sepanjang pantai timur laut. Di lain pihak, Sultan yang sudah lama curiga terhadap Cakraningrat dan berprasangka bahwa pemerintahan

Batavia bersekongkol dengan Madura, kini memutuskan untuk memihak orang Cina. Garnisun Belanda di Kartasura dipancing ke dalam perangkap dan dibinasakan. Di seluruh Jawa bagian utara, orang-orang diajak berperang "jihad" melawan Belanda. Tapi satu kemenangan tentara Kompeni dekat Semarang sudah cukup untuk menghentikan Pakubuwana terlibat permusuhan lebih lanjut. Tapi perubahan mendadak ini membuat dia masuk kedalam kesulitan lebih parah lagi. Sebagian besar anak-buahnya memberontak, keratonnya direbut dan seorang pengejar mahkota didudukkan di atastakhta. Walaupun pemerintahan pemberontak itu tidak lebih lama daripada enam bulan, Pakubuwana tidak punya banyak alasan untuk bergirang. Yang memang bukanlah tentara-*nya* tapi tentara musuh besarnya, Cakraningrat. Secara politis, Jawa berada dalam kekalutan. Dalam keadaan ini, semua orang yang akan mengalami kerugian bila kekacauan terus berlangsung menoleh ke Batavia sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa memulihkan ketertiban. Pakubuwana dipulihkan ke takhtanya–dengan kekecewaan besar di pihak Cakraningrat dari Madura –tapi harga yang harus dibayarnya sangat mahal.

Perjanjian 1743 memberikan semua daerah sepanjang pantai utara Jawa kepada Kompeni, ditambah pula "ujung timur" Jawa yang dulu wilayah Blambangan, serta kontrol eksklusif atas semua pelabuhan laut di Jawa. Setelah 1743, Mataram secara resmi menjadi negara bawahan Kompeni. Keraton Kartasura telah dicemarkan oleh pembunuhan dan penakluk asing dan karena itu Pakubuwana mulai membangun kediaman baru di Surakarta, tidak jauh dari istananya semula. Sangat sadar akan kelemahan dinastinya, dia memutuskan, sesaat sebelum wafat untuk menjamin pewarisan takhta kepada putranya Pakubuwana III (1749-1788), dengan menyerahkan semua negerinya kepada Kompeni. Sultan baru menerima kerajaannya dari tangan Gubernur Jenderal. Keturunan Sultan Agung telah jadi "putra" Gubernur Jenderal yang kini adalah "ayah" Mataram.

Peristiwa-peristiwa pada 1740 dan tahun-tahun berikutnya

begitu mengesankan para Direktur Kompeni di Amsterdam hingga mereka memutuskan untuk mengambil langkah drastis untuk memulihkan ketertiban di imperium Asia mereka yang gonjang-ganjing. Untuk itu mereka memilih seorang pejabat ternama yang sudah terkenal kegigihan dan kemampuannya ketika menjadi gubernur Ceylon, Gustaaf Willem, baron Van Imhoff. Penunjukannya mencakup persetujuan rencana Van Imhoff untuk reformasi administratif dan komersial di koloni-koloni itu.[19] Butir paling menarik dari rencananya adalah pengurangan sukarela komitmen Kompeni terhadap wilayah barat Samudra Hindia dan pemukiman kolonis Eropa di Dataran Rendah Batavia. Van Imhoff ingin VOC memusatkan semua kegiatan di Ceylon dan Kepulauan Hindia Timur. Kalau reformasi ini dijalankan sepenuhnya, ia akan mengubah sifat Kompeni dan menekankan posisi barunya lebih sebagai kekuatan teritorial daripada komersial.

Van Imhoff berlayar ke Batavia dengan kapal yang dinamakan *Restorer* (*Pemulih*). Gubernur Jenderal baru itu adalah contoh sejati pembaharu abad ke-18 yang cenderung percaya bahwa sifat masyarakat manusia dapat diubah dengan dekrit. Seperti para sejawatnya di Eropa, yang didahului satu dekade, dia memulai kegiatan lebih banyak daripada yang dapat diselesaikannya, dan dia tidak pernah mengambil waktu untuk melaksanakan satu rencana sampai selesai sebelum memulai yang lain. Dia mengorganisasi ulang pedagang yang sekaligus menjadi pelaut Kompeni, yang ingin ia perbaiki dengan memperkenalkan peringkat militer untuk nakhoda dan mualim. Dia mendirikan akademi angkatan laut, mereformasi sistem sekolah di Batavia, mentransfer perdagangan opium di Jawa dari Kompeni kepada suatu asosiasi swasta berizin, dibentuk oleh para warga bebas Batavia, dan membuat regulasi yang lebih liberal untuk perdagangan antar-Asia oleh individu swasta. Dia tidak kenal lelah dalam kerja dan menerbitkan satu ordinansi demi satu ordinansi, tapi sedikit dari reformasinya yang lestari.

Van Imhoff tidak keberatan melanggar tradisi. Dia mungkin

Gubernur Jenderal pertama yang memberikan pidato di depan umum, dan jelas dia gubernur jenderal pertama yang percaya pada publisitas. Dia bahkan mendukung publikasi sebuah surat kabar.[20] Ini tampaknya begitu mengagetkan Para Direktur itu sehingga mereka cepat-cepat melarang inovasi berbahaya itu. Kegiatannya yang paling mengesankan ialah usahanya, yang dia lakukan dengan tanggungjawab sendiri tanpa sepengetahuan Para Direkturnya, untuk membangun hubungan dagang langsung antara Indonesia dan dunia barat. Batavia sangat membutuhkan lebih banyak impor perak untuk mata uang koin, dan karena ada perang antara Spanyol dan Britania Raya, tidak bisa mendapatkannya dari Meksiko lewat Filipina atau Spanyol. Karena itu Van Imhoff memutuskan untuk mengirimkan dua kapal langsung ke Meksiko. Dengan bantuan seorang imam Katolik Irlandia yang kebetulan berada di Batavia dan bersedia ikut dalam upaya itu, kapten-kapten kapal itu disuruh menjalin kontak dengan penguasa Spanyol. Kedua kapal itu mencapai pantai barat Amerika dekat gugus pulau Tres Marias, dan dari situ ke Acapulco, tapi semua percobaan untuk membuka hubungan dengan orang Spanyol gagal. Van Imhoff menerima celaan kerasPara Direktur itu karena tindakannya yang ceroboh tersebut, yang, pada gilirannya, telah dikecam oleh Parlemen Belanda setelah ada protes kerasdari duta besar Spanyol menentang upaya Van Imhoff. Tampaknya hal ini memang merupakan pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam perjanjian damai Muenster antara Spanyol dan Belanda[21] yang menyebabkan pemerintah Spanyol bicara mengenai "*une crime inouie*" (tindak kriminal yang luarbiasa)!

Beberapa tahun setelah kematian Van Imhoff (1 Nov. 1750) hampir tidak ada sisa dari "perbaikan"-nya kecuali satu rumah peristirahatan besar dengan lahan luas di perdesaan yang telah dia dirikan di tempat yang sekarang bernama Bogor, dan yang dia beri nama yang agak konvensional "Buitenzorg" (Sans Souci). Dia merencanakan rumah peristirahatan itu sebagai kediaman penjabat gubernur jenderal di perdesaan, tapi Para Direktur itu

menolak menyetujui "kemewahan" ini dan malah memberikan rumah baru itu kepada Van Imhoff pribadi sebagai pemberian gratis. Pada 1811, akhirnya fungsinya diubah menjadi seperti yang dikehendaki Van Imhoff, dan pada awal abad ke-19 dibangunlah di atas tanah itu "Plantentuin" yang terkenal itu, Taman Botani Pemerintah [*sekarang Kebun Raya Bogor–pen.*], yang berkembang menjadi salah satu lembaga botani utama di dunia.

Bahkan sebelum kematian Van Imhoff, masalah baru telah muncul di Jawa bagian tengah dan timur. Kesepakatan 1743 telah memulihkan Sultan Pakubuwana ke takhta walaupun dia berkhianat dalam krisis 1740. Dua raja menolak kesepakatan itu. Salah satunya adalah Cakraningrat dari Madura yang telah mendukung Batavia ketika ia sedang sangat butuh sekutu. Dia tidak menerima keuntungan apapun selain perintah mengalihkan penaklukannya dari Sultan lemah itu ke pemerintah Batavia yang kuat. Cakraningrat memanggil pengikutnya angkat senjata. Dalam suatu serbuan nekat diamenimbulkan baradi seluruh pantai timur Jawa tapi ketika tentara Kompeni memulai serangan balasan, perlawanannya yang gigih sia-sia. Orang Madura membuat Kompeni membayar mahal untuk kemenangannya, namun hasil perang itu sangat jelas.

Raja lain yang menolak tunduk kepada kekuatan Pakubuwana yang dipulihkan adalah pamannya, Mangkubumi. Selama bertahun-tahun pangeran ini berselisih dengan saudaranya mengenai bagiannya dari penghasilan kesultanan. Kini setelah jelas tersingkir dari hak miliknya, dia "pergi ke gunung", yakni mengumpulkan pengikutnya dan memulai perang gerilya melawan Susuhunan. Keponakannya Mangkunegara, putra saudara Pakubuwana II yang lain, bergabung dengannya. Kedua pangeran itu menunjukkan kemahiran luarbiasa dalam jenis peperangan seperti itu, sehingga kekuatan gabungan Kompeni dan Susuhunan gagal menundukkan mereka. Pemerintah Batavia jadi lelah melakukan pertempuran yang tiada akhir dan mahal demi seorang penguasa yang tidak cukup kuat untuk mempertahankan

haknya sendiri. Sebaliknya raja itu tahu betul bahwa dia sepenuhnya bergantung pada dukungan Kompeni. Inilah alasan-alasan mengapa ketiga kekuatan yang berkepentingan tersebut akhirnya setuju menyepakati perjanjian rekonsiliasi, yang tercapai pada 13 Februari 1755, di Surakarta.[22] Imperium Mataram dibagi jadi dua negara, Surakarta, yang penguasanya akan menyandang gelar Susuhunan Pakubuwana, dan Yogyakarta, di bawah Sultan Hamengkubuwana. Kedua negara itu ada sampai 1950.[23] Setelah kesepakatan itu Susuhunan juga terpaksa mengadakan kesepakatan dengan Mangkunegara yang mudah bergolak dan berbahaya, hingga dia pun menyerahkan daerah lain lagi dari negaranya.[24]

Pada tahun-tahun ini Jawa Barat akhirnya juga tunduk sepenuhnya kepada Batavia. Sultan-sultan Banten selalu bangga atas ortodoksi Muslim mereka. Sekitar 1750 kesultanan praktis diperintah oleh "Ratu Syarifa", putri seorang pemimpin spiritual Arab yang mengklaim sebagai keturunan Nabi sendiri. Ratu Syarifa mewakili pengaruh Arab yang, sejak abad ke-17, makin meningkat di Indonesia dan yang mendapatkan prestisenya dari Kota Suci Mekah, walaupun sebagian besar imigran Arab adalah pedagang yang berasal dari Hadramaut. Tapi pemberontakan orang Banten pada 1750 ditujukan *kepada* Ratu Syarifa. Dia dibenci karena tuntutannya yang sewenang-wenang kepada rakyat dan, penting dicatat, para petani pemberontak memilih sebagai kepala mereka seorang "Kiai Tapa", seorang petapa suci yang tinggal di satu gua suci di pegunungan dan telah lama dihormati oleh orang banyak. Petapa ini lebih mengingatkan kita kepada zaman Hindu-Jawa kuno Raja Hayam Wuruk daripada Nabi Muhammad dan Alquran, suatu pendapat yang diperkuat oleh fakta bahwa guanya diketahui berisi banyak relik Hindu. Suatu tradisi kuno masih hidup di sini di kalangan umum, dan kepadanyalah mereka berpaling dalam keadaan terdesak.[25]

Pemberontakan 1750 menimbulkan kerusakan besar di dataran rendah Batavia yang sebagian hancur terbengkalai. Setelah

beberapa tahun perang gerilya, pemberontakan itu dilumatkan, tapi pemerintah Batavia menganggap bijaksana untuk menyingkirkan Syarifa dari kesultanan dan menaruh seorang sultan baru di atas takhta. Dengan peristiwa-peristiwa ini kekuasaan Kompeni atas Jawa Barat diperkuat, tapi kondisi di wilayah itu tidak berubah dan tetap buruk bagi penduduk asli.[26]

Negara Jawa lain, Mataram, hanya tinggal bayang-bayang kekuasaannya dulu, dan sejak 1755 VOC menjadi kekuatan teritorial terbesar di Jawa. Mayoritas dari tiga setengah juta penduduknya kini langsung diperintah dari Batavia.[27] Lima negara Jawa kecil, Banten, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan Negeri Mangkunegara, adalah bawahannya, dan penduduk Belanda di istana-istana para raja ini punya kontrol tertentu atas pemerintahan mereka. Perang di antara para raja itu dilarang. Kompeni melindungi Jawa Timur dari orang Bali yang ganas dan berhasil mengusir para penyerbu dari wilayah itu, suatu keberhasilan yang tidak tercapai tuntas sebelum 1774. Begitulah Jawa berhasil menikmati suatu periode yang relatif damai, yang tentu saja sangat menguntungkan buat rakyat miskin, tapi keuntungan yang dibeli dengan harga mahal—yakni ketundukan kepada pemerintahan Kompeni dan sistem eksploitasi ekonominya. Laksamana Speelman biasa bicara tentang "pemerintahan adil dan budiman" Kompeni, tapi pemerintah itu jelas telah menaruh beban besar pada rakyatnya.

Paling tidak di satu daerah, keuntungan situasi baru ini lebih besar daripada kerugiannya. Setelah pengusiran atas penjarah Bali, wilayah Blambangan berada dalam keadaan hampir kosong. Bahkan lembah sungai Brantas Hulu, tempat lima abad sebelumnya kerajaan Singasari berkembang, tinggal jadi belantara. Satu dekade setelah pendudukan Belanda, lembah ini, kini kabupaten Malang, menjadi kabupaten produsen kopi yang makmur. Para imigran mengalir dari Jawa Timur dan Madura dan imigrasi ini akhirnya membuat Islam dominan di sudut terjauh pulau itu.

Mungkin tidak ada tempat selain kesultanan kecil Cirebon yang mengalami dampak lebih buruk akibat situasi politik baru

di Jawa. Tiga Sultan bersama-sama memerintah kerajaan ini tapi sebenarnya seluruh pemerintahan dilakukan oleh "Residen" yang adalah seorang agen Kompeni di istana seorang penguasa lokal. Orang Cirebon diharuskan melakukan rodi untuk Kompeni dan dipaksa membudidayakan kopi dan nila. Di samping itu para Sultan mereka, yang merasa aman duduk di takhta mereka karena dukungan Batavia, sama sekali menyalahgunakan kekuasaan mereka. Untuk meningkatkan penghasilan, mereka menyewakan desa secara keseluruhan kepada pemodal Cina. Pada 1768 ketidakpuasan telah tumbuh begitu kuat sehingga orang banyak minta pemerintah Batavia memecat para Sultan dan langsung menerapkan pemerintahan Belanda atas wilayah mereka. Mereka percaya ini akan melindungi mereka dari pemerasan oleh orang Cina, karena mereka tahu bahwa Batavia bahkan tidak mengizinkan orang Cina masuk di daerah Priangan yang langsung berada di bawah pemerintahan mereka.[28] Pemerintah menolak permintaan itu, dan sejak itu pemberontakan terjadi di Cirebon satu disusul yang lain. Bahkan setelah semua orang Cina diusir dari kesultanan Cirebon, kekacauan berlanjut.

Di kabupaten-kabupaten pantai utara, dari Tegal ke Surabaya, orang Cina mencoba memainkan peran serupa seperti di Cirebon, tapi pejabat-pejabat Kompeni di Semarang dan Surabaya mengawasi mereka lebih ketat daripada yang dilakukan para Sultan Cirebon. Biarpun begitu, juga di sini kita temukan mereka hidup sebagai petani sawah padi (yang mencakup tenaga buruh orang-orang yang tinggal dekat sawah), sebagai petani pemungut tol di jalan raya, dan sebagai perente di desa-desa. Kabupaten-kabupaten bagian timur laut ini terbebani oleh pajak tinggi dalam bentuk kuota dan penyerahan paksa, beban setinggi yang dapat ditanggung daerah-daerah itu, untuk memakai kata-kata beberapa pejabat Kompeni.[29]

Dalam mengatur pemerintahan wilayah-wilayah tersebut, pemerintah Batavia menghadapi banyak masalah. Salah satunya berkaitan dengan sistem moneter. Sultan-Sultan Banten dan

Mataram biasanya punya hak mencetak uang. Kompeni melakukan hal yang sama dan mengimpor koin perak dari Belanda. Tapi selalu ada kekurangan koin dan bahan koin di Hindia. Semua emas yang diimpor langsung menghilang ke dalam kotak perbendaharaan para raja. Perak diekspor lagi, terutama oleh orang Cina. Situasi menjadi betul-betul membingungkan ketika, selain koin Belanda, Mataram, dan Banten, mulai beredar pula koin dari Madura, Cirebon, dan koin-koin timbal kecil dari Palembang dan Bali. Pada 1764 pemerintah Batavia menutup perundingan dengan raja-raja Surakarta dan Yogyakarta dengan kesepakatan penyatuan sistem moneter, dan sejak itu Kompeni mengeluarkan koin tembaga yang dicetak di Batavia. Keputusan ini jelas memperlancar transaksi komersial di Jawa dan menguntungkan orang banyak sampai pemerintah, karena dipaksa keadaan, memulai kebijakan inflasi.[30]

Kerangka kerja untuk pemerintahan dibuat dengan membagi seluruh wilayah ke dalam kabupaten-kabupaten. Di beberapa daerah keluarga penguasa terus menduduki jabatan sedangkan di daerah lain pemerintah menunjuk pejabat baru. Daerah-daerah tertinggal yang mulai menarik imigran kadang-kadang dipercayakan di bawah kontrol orang Cina sampai cukup teratur untuk diserahkan kepada kepemimpinan bupati orang pribumi yang lebih tidak efisien tapi juga kurang keras.[31] Masalah paling sulit adalah pengaturan lembaga peradilan. Pada mulanya hukum Belanda diberlakukan di permukiman Kompeni. Statuta Batavia menyatakan bahwa untuk segala hal yang tidak tercakup dalam hukum Batavia, yang harus diikuti adalah hukum adat istiadat tak tertulis Belanda, dan kalau ini juga tidak memadai, hukum Romawi. Telah kita lihat bahwa aturan ini selalu diterapkan dengan hati-hati. Adat istiadat Cina mengenai hukum waris sudah sejak awal dihargai. Tapi adat istiadat ini, walaupun biasanya *dihormati*, tidak dianggap *hukum*. Pada 1708 Gubernur Jenderal Van Hoorn mengeluarkan dua dekrit penting. Yang pertama melembagakan desentralisasi peradilan dengan memberikan hak

kepada pengadilan lokal di luar yurisdiksi Batavia untuk menangani segala perkara atas nama Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Yang kedua memerintahkan bahwa semua urusan kriminal dan perdata di daerah Priangan harus diputuskan oleh bupati dan pengadilan mereka, yang akan mengadili sesuai dengan hukum setempat. Satu-satunya tugas pejabat Belanda ialah memastikan bahwa keadilan diterapkan tanpa berpihak serta hukum dan adat istiadat setempat diikuti dengan setia.[32] Dekrit ini sangat penting secara historis, bahkan bila pun pada abad ke-18 tidak pernah betul-betul ditaati. Di Priangan ada konflik jurisdiksi terus-menerus antara pengadilan Batavia dan pengadilan kabupaten, tapi telah dinyatakan satu prinsip bahwa hukum setempat tidak dikalahkan oleh hukum Barat.

Tapi bagi penguasa Batavia abad ke-18 tidaklah jelas apa sebenarnya isi hukum adat itu. Salah satu penduduk Cirebon mencatat bahwa sultan dengan semangat Keislaman tinggi, sebelum menjatuhkan keputusan atas perkara besar, biasanya menanyakan nasihat "imam-imam", tapi bahwa raja yang kurang bersemangat dalam Islam lebih suka nasihat "perempuan tua". Salah satu penduduk paling tahu urusan di Cirebon, Jan Frederik Gobius, menulis pada 1717: "Saya selalu membuat hakim-hakim Cirebon mengikuti adat istiadat dari zaman pra-Islam dan menentang campur tangan para imam." Orang-orang ini jelas melihat perbedaan antara "adat" Indonesia (hukum kuno kebiasaan tak tertulis penduduk asli) dan hukum Alquran, dan sengaja mendukung yang pertama.[33] Inilah awal mula studi atas hukum Indonesia oleh ahli-ahli Belanda yang akhirnya menghasilkan kemajuan ilmiah besar pada abad ke-20.

Demikianlah, pemerintahan Kompeni atas wilayah utara Jawa memberikan sedikit keuntungan buat orang banyak, tapi banyak hal bergantung pada sifat orang-orang yang menduduki jabatan tinggi. Kalau dia orang yang rakus dan bejat, dia bisa membuat hidup sengsara bagi orang banyak dan bahkan bagi para bupati. Dalam keadaan seperti ini jelas orang Jawa lebih suka diperintah

raja mereka sendiri daripada Belanda, khususnya bila Kompeni terlalu membebaskan orang Cina yang menjadi petani pemungut pajak. "Tampaknya," tulis Nicolas Hartingh pada 1756, "orang Jawa lebih suka dikuliti oleh orang mereka sendiri daripada ditindas oleh orang asing."[34] Tapi tidaklah tepat kalau dari pernyataan tadi diambil kesimpulan bahwa keadaan petani miskin di wilayah kesultanan-kesultanan Jawa lebih baik daripada di wilayah kekuasaan Belanda.

Narasi historis Jawa dari paruh kedua abad ke-18 memberikan keterangan jelas tentang kondisi yang ada di kerajaan-kerajaan ini. Narasi itu hampir tidak bicara apa-apa tentang rakyat. Yang diperhatikan para penulis hanyalah para raja, putra-putri mereka, dan para patih.[35] Dari setiap halaman narasi itu jelas bahwa perdamaian di antara kedua dinasti raja itu terpelihara hanya karena kontrol Batavia yang mahakuat. Kadang-kadang penjarahan dan pembakaran desa-desa sudah berlangsung ketika pemerintah Belanda menghentikan permainan itu. Mangkunegara pertama adalah pembuat onar yang paling parah. Dia jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada kekuatan militer Belanda dan bahwa dia akan dengan senang hati terjun ke dalam peperangan kalau saja dia tidak tahu betul bahwa pamannya, Sultan Yogya, akan senang mendapatkan kesempatan membereskan beberapa persoalan dengan bekas sekutunya itu dan akan cepat membela Batavia. Dalam waktu singkat pejabat-pejabat Belanda belajar semua trik diplomasi Jawa. Gubernur di Semarang bahkan harus menetapkan urusan perkawinan keluarga kerajaan dan mengumumkan perceraian—peran baru bagi tuan ini, yang fungsi utamanya ialah pengumpul pajak dan pedagang kepala untuk Kompeni.

Mengingat sifat khusus historiografi Jawa tersebut, yang telah dibahas di bab-bab sebelum ini, tidak bisa diharapkan bahwa babad-babad ini akan bercerita banyak tentang sikap mental para bangsawan Jawa yang sebenarnya terhadap orang Belanda. Tapi tampaknya orang Jawa harus melewati pengalaman

yang sama dengan orang Belanda. Pada awal hubungan dengan orang Belanda, mereka tidak mengerti apapun tentang cara pikir mereka, tapi pelan-pelan mereka mulai membedakan antara orang Eropa "baik" dan "buruk", sama seperti orang Belanda belajar perbedaan antara orang Indonesia "jujur" dan "pengkhianat". Rincian kecil kadang-kadang mencerminkan sentimen utama dan menerangkan taktik yang diikuti para penguasa Jawa dalam hubungan mereka dengan orang Belanda. "Pujangga" Yogyakarta berkisah bagaimana Sultan pertama setuju dalam perjanjiannya dengan Batavia untuk mendirikan konstruksi benteng Belanda di ibukotanya. Dua puluh delapan tahun kemudian tembok benteng tersebut masih belum selesai. Sultan membuat sibuk tukang batu dan kayunya membangun istana-istana dan rumah taman, pengairan dan dekorasi kediamannya sendiri, dan begitu mereka selesai membangun sesuatu, dia menyatakan kecewa atas hasilnya dan memerintahkan pembongkaran! Orang-orang itu langsung disuruh kerja pada proyek lain. Jelas perlu sikap keras kepala yang luarbiasa untuk melangsungkan permainan ini selama 28 tahun.

Seorang pejabat tinggi Belanda datang ke istana Yogya dan membawa seekor harimau—menurut cerita, harimau raksasa dengan rambut putih. Dia berniat membuat Sultan senang dengan menghadiahinya binatang itu, karena mengadu harimau dan banteng adalah salah satu hiburan kesukaan Sultan. Harimau itu telah menang dalam banyak laga. Si pejabat Belanda langsung melihat bahwa hadiahnya menimbulkan kesibukan luarbiasa di istana. Dengan tergesa-gesa satu lapangan terkurung dipersiapkan untuk laga dan semua penghuni istana datang untuk menonton. Kali ini sang banteng menang, dan sekali lagi kegembiraan besar terjadi. Setelah laga itu, wakil penguasa Belanda itu melihat sang Sultan sangat gembira dan dia bisa memperoleh apapun yang diinginkannya. Suatu catatan dalam *History of Java* karangan Raffles menjelaskan seluruh cerita ini. Raffles berkata bahwa orang Jawa biasa membandingkan harimau dalam laga-laga seperti itu dengan orang Belanda dan banteng dengan orang Jawa. Karena itu

seorang Belanda yang memiliki harimau tak terkalahkan adalah pertanda paling buruk untuk masa depan para raja Jawa, tapi bahwa justru harimau ini terbunuh oleh banteng Sultan adalah pertanda kemujuran besar!

Penguasa Jawa adalah diplomat andal dan politikus cerdas tapi mereka sering kali susah mengerti maksud orang Eropa yang sebenarnya. Kita mendengar tentang seorang pangeran Jawa yang pernah diasingkan ke Ceylon dan yang, setelah kembali ke Jawa, dianggap ahli dalam urusan dengan orang Eropa. Dia mencoba menjelaskan kepada orang sebangsanya perbedaan antara orang Belanda dan Britania, dan pendapatnya cukup menarik untuk dituliskan, khususnya bila diingat bahwa ini dikemukakan pada sekitar 1780. "Orang Britania," katanya, "adalah seperti arus air yang kencang, mereka tekun, energetik, dan tak tertahankan dalam keberanian mereka. Kalau mereka betul-betul mau memperoleh sesuatu mereka akan memakai kekerasan untuk mendapatkannya. Orang Belanda sangat berkemampuan, cerdas, sabar, dan tenang. Kalau mungkin mereka lebih suka mencapai tujuan dengan bujukan daripada kekuatan senjata." "Mungkin saja terjadi," ia menyimpulkan, "bahwa Jawa akan ditaklukkan oleh orang Britania." Tiga puluh tahun kemudian itulah yang terjadi.

Walaupun tawarikh-tawarikh itu tidak memberikan informasi banyak tentang kondisi sosial dan sentimen politik yang jelas, ada cukup banyak keterangan tentang situasi religius di Jawa abad ke-18. Tampak bahwa keyakinan dan tradisi Hindu masih kuat di kalangan umum dan bangsawan. Banyak rincian yang diceritakan dapat saja dikaitkan dengan Hayam Wuruk dari Majapahit. Para raja dan rakyat sama-sama didominasi keyakinan pada kekuatan gaib. Salah satu penulis tawarikh mengatakan bahwa dia lebih suka diam saja menyangkut peristiwa-peristiwa buruk tertentu di masa lalu karena dia takut membangkitkan kembali kekuatan jahat yang menjadi penyebabnya dan yang tampaknya telah kehilangan kekuatan mereka. Roh-roh nenek moyang yang

ada di mana-mana dicatat di setiap halaman. "Babad" itu sendiri ditulis untuk memanggil kembali kekuatan dan kejayaan nenek moyang, dan untuk memperkuat pembacanya dengan kekuatan nenek moyang itu. Mangkubumi minta dibacakan bagian-bagian "babad" setiap hari dan mencari bimbingan dari isinya. Seperti *Pararaton*, sejarah-sejarah ini berkisah tentang tombak dan keris gaib. Raja-raja mendapatkan kekuatan gaib dengan tinggal siang malam di antara kuburan nenek moyang. Salah satu kisah yang paling menarik, karena berkaitan langsung dengan zaman Hindu kuno, ialah kisah berikut. Seorang pangeran mahkota Yogya berusaha melanggar tradisi lama yang melarangnya mengunjungi satu tempat berhantu, "bukit seribu patung", yakni Borobudur. Tradisi menetapkan bahwa nasib buruk akan menimpa orang yang naik ke bukit untuk memandang setan yang dipenjarakan dalam kandang (Dhyanibuddha di dalam stupa mereka!). Sang Pangeran memandang setan dalam kandang tersebut, tapi akibat buruknya langsung terlihat karena dia tidak bisa lagi mengendalikan diri dan menjadi gila nafsu hingga Sultan merasa adalah bijaksana dan adil memerintahkan dia dibunuh untuk mencegah keburukan lebih jauh.

Sekitar 1788 Susuhunan sepenuhnya jatuh ke dalam pengaruh beberapa "imam" istana tertentu. Catatan-catatan yang muncul kemudian mengaitkan kegiatan orang-orang ini dengan penyebaran sekte baru Muslim, misalnya Wahabi, dan menyatakan bahwa mereka mendapat perlawanan dari ulama-ulama Muslim resmi karena "kesesatan" mereka. Tampaknya lebih mungkin bahwa para ulama resmi melihat imam-imam favorit Susuhunan itu sesat dalam jenis lain, yaitu orang yang mencampur Islam dengan praktik keyakinan Jawa kuno. Mereka berjanji kepada Susuhunan akan menjadikannya penguasa tunggal di pulau itu, dan meyakinkannya bahwa dengan kata-kata gaib mereka kekuasaan Yogyakarta akan runtuh dan meriam-meriam benteng Belanda dekat keraton akan meleleh dan lenyap. Mereka membuat raja percaya bahwa mereka bisa terbang di udara dan bergerak

di bawah tanah sesuka hati. Tidak mengherankan bahwa ketika petugas Kompeni mengakhiri benih pemberontakan itu dan para ahli gaib ditangkap tanpa perlawanan, penulis tawarikh tersebut menjelaskan kegagalan mereka dengan menunjukkan bahwa Kapten Ritman, komandan tentara Belanda, punya kekuatan gaib lebih besar lagi daripada musuh-musuhnya, bahwa dia menguasai kekuatan alam begitu baik sehingga dia membuat bola meriam pecah di udara sebelum dapat mengenainya.

Setelah hubungan antara pemerintah Batavia dan kesultanan-kesultanan Jawa berbalik, yang di atas menjadi di bawah dan sebaliknya, sastra mitologis-historis Jawa harus disesuaikan dengan situasi baru. Setelah 1755, suatu versi baru *Babad Tanah Jawi* dikarang. Pujangga istana Surakarta dan Yogya mulai mencari karya-karya lebih kuno untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk apa yang akan terjadi di masa depan, apakah raja dan rakyat mereka akan sekali lagi memperoleh kebebasan mereka. Pada tahun-tahun itu "ramalan-ramalan" dikarang dan dikatakan berasal dari Raja Jayabhaya di abad ke-12, salah satu raja tertua di Jawa yang dikenal namanya (karena *Bharatayuddha*, yang dikarang atas perintahnya) oleh orang Jawa pada abad ke-18. Ramalan-ramalan itu bicara tentang periode panjang penaklukan diikuti oleh pemulihan kejayaan dan kebebasan zaman kuno. Karena itu, orang Jawa tidak pernah putus asa akan memperoleh kembali kemerdekaan mereka, walaupun mereka harusmenunggu sampai 1949 sebelum harapan mereka terpenuhi.

Bab mengenai abad ke-18 di Indonesia ini tidak akan lengkap kalau tidak kita tambahkan beberapa kata mengenai salah satu akibat terburuk pengaruh asing di Kepulauan Indonesia, yaitu impor dan konsumsi opium. Benar bahwa kebiasaan mengisap opium sudah ada di sebagian wilayah Indonesia sebelum orang Eropa pertama tiba. Opium mungkin diimpor dari Benggala dan konsumsinya terbatas pada penduduk pelabuhan-pelabuhan utama. Tapi selama abad ke-17 opium menyebar di Sumatra, Jawa, dan Maluku. Sultan Agung dari Banten melarang keras

impor dan pemakaian opium di wilayahnya. VOC setidaknya ikut bertanggungjawab atas penyebaran kebiasaan mengonsumsi opium di wilayah Mataram. Hampir tidak bisa diragukan bahwa kebiasaan mengonsumsi opium memang akan menjadi lebih lazim di seluruh Kepulauan Indonesia, bahkan kalaupun Kompeni Belanda tidak pernah menguasai Kepulauan Indonesia. Namun tetap saja ada fakta bahwa Kompeni memonopoli perdagangan opium begitu impor lewat jalur biasa mulai dilakukan, dan akibatnya Kompeni lantastertarik mempromosikan impor opium untuk alasan finansial. Kompeni memelihara pos dagang di hilir sungai Gangga yang mempermudah impor dan dengan demikian merangsang pemakaian dadah berbisa itu. Jumlah impor tahunan naik sampai 45ton. Pemerintah Bataviamerasauntung membayar para bupati Priangan sebagian dengan opium dan hanya sebagian dalam uang kontan untuk "penyerahan" mereka. Penduduk Priangan tampaknya tidak biasa mengisap opium karena semakin lama, semakin besar penentangan terhadap bentuk pembayaran Batavia itu. Untuk adilnya kita harus menambahkan bahwa Kompeni di lain pihak melarang impor di pulau Ambon ketika diminta oleh sejumlah pemimpin desa Ambon. Walaupun Batavia tidak segan menjual opium kepada petani miskin di Jawa, ia tidak mau mengalami kesulitan dengan raja-raja Jawa yang menolak penjualannya. "Kau tahu berapa banyak uang dihabiskan di daerah-daerah ini untuk opium," tulis Nicolas Hartingh pada 1756, "tapi kini penjualan mulai berkurang terutama karena para raja menolaknya, dan orang biasa mengikuti pemimpin mereka."[36] Selama abad berikut pemerintah kolonial mengikuti kebijakan yang pelan-pelan membatasi impor tersebut untuk mencegah kebiasaan itu merebak dan untuk mengurangi dampak buruknya.

SULTAN AGUNG
1613-1645
AMANGKURAT I
1645-1677
AMANGKURAT II
1677-1703
PANGERAN PUGER
dilantik oleh Batavia
sebagai
PAKUBUWANA I
1705-1719
AMANGKURAT III
1703-1705
diberhentikan oleh Batavia
AMANGKURAT IV
1719-1726
PAKUBUWANA II
1726-1749
MANGKUBUMI
(AMENGKUBUWANA I)
SULTAN YOGYAKARTA
1755-1792
MANGKUNEGARA
diasingkan ke Ceylon
1722
PAKUBUWANA III
1749-1788
MANGKUNEGARA I
1757-1795
Susuhunan dari
Surakarta
AMENGKUBUWANA
II
1713-1828
PANGERAN NATAKUSUMA
PAKU ALAM I
1813-1829
Keturunan termuda
dari Surakarta
Sultan dari Yogyakarta
Keturunan termuda
dari Yogyakarta

BAB 11

HERMAN WILLEM DAENDELS, NAPOLEON DARI BATAVIA

PADA abad ke-17, Batavia adalah benteng yang terisolasi di tengah hutan lebat dan dikelilingi orang-orang yang memusuhinya, tapi selama periode itu Batavia adalah pusat kekuatan laut dan ekonomi yang besar. Pada abad ke-18, hutan-hutan di sekitar kota itu telah berubah jadi sawah dan kebun tebu, dan tetangga-tetangga yang bermusuhan sudah ditaklukkan, tapi kekuatan Batavia menurun dengan cepat. Di lain pihak, kemajuan besar dicapai oleh orang Belanda Batavia dalam memahami kehidupan dan pemikiran Indonesia. Jan Pieterszoon Coen menyebut raja-raja Asia "orang bodoh tolol yang malang", tapi, 70 tahun kemudian, Pieter van Hoorn menulis syair didaktik mengenai kebijaksanaan Konghucu. Sayang, gagasan-gagasan liberal ini tidak banyak diteruskan dalam 50 tahun berikutnya.

Daftar buku dan pamflet yang diterbitkan di Batavia memberi kita indeks memadai tentang kehidupan intelektual orang Batavia.[1] Benar bahwa pemerintah punya kontrol total atas penerbitan, karena bukan hanya naskah disensor sebelum publikasi, tapi mesin cetak itu sendiri adalah milik Kompeni dan ditempatkan di dalam tembok kastil. Tapi pemerintah sangat memperhatikan penjagaan "rahasia" komersial Kompeni. Buku-buku

yang menggambarkan fasilitas dagang serta tempat dan metode produksi yang mungkin membocorkan informasi kepada pesaing sangat terlarang. Kehidupan intelektual, sejauh ada, hampir sama bebasnya di Batavia dengan yang ada di Belanda.[2]

Bibliografi publikasi Batavia mendaftar serangkaian panjang ordinansi dan peraturan pemerintah, sejumlah buku agama dalam bahasa Portugis dan Melayu,[3] sekali-sekali cetak ulang kamus dan buku tata bahasa Belanda-Melayu yang biasa dipakai, dan terakhir, sejak 1731, almanak tahunan dengan nama dan gelar pejabat-pejabat Kompeni. Kemonotonan regulasi dan cetak ulang tersebut kadang-kadang diseling oleh terbitan yang lebih menarik, misalnya, pada 1671, syair didaktik Steendam untuk orang muda Batavia dan diskusi puitis Pieter van Hoorn mengenai ajaran Konghucu. Dua karya sejarah muncul di daftar itu: pada 1695 suatu cerita tentang pengepungan Batavia pada 1628, salah satu kontribusi Camphuijs untuk seni dan sastra Batavia, dan pada 1758, suatu "Sejarah Ringkas Imperium Mongol". Buku pertama kemudian mengilhami seorang penyair Batavia, Pieter de Vries, untuk menulis suatu sandiwara "yang dilengkapi dengan nyanyian, tarian, dan tablo" dan diberi judul "Jan Pieterszoon Coen, Pendiri Batavia Merdeka, suatu sandiwara perang dengan akhir bahagia". Dalam kata-kata "Pendiri Batavia Merdeka" (suatu judul yang kurang cocok untuk penguasa tak kenal kompromi dari 1620 itu) bisa kita bayangkan ada nada baru, gaung samar dari apa yang terdengar di Eropa pada waktu yang sama.

Kita tidak bicara tentang surat kabar pertama Batavia, *Nouvelles* dari 1744, serta usaha satu-satunya mendukung studi klasik mengenai daerah tropika, suatu edisi dari *P. Ovidii Nasonis Tristium Libri V* dari 1748. Kedua publikasi itu adalah hasil upaya keras Gubernur Jenderal Van Imhoff. Yang pertama dilarang atas perintah Para Direktur, yang kedua terlalu dini untuk dilanjutkan dengan usaha serupa. Setelah 1770, produk-produk industri sajak Batavia mulai mengalir dari percetakan pemerintah. Batavia ikut menelurkan karya bercorak diletantisme sastra pada paruh

kedua abad ke-18. Segera ia juga akan punya filsuf dan moralis diletan, sesuai gaya zaman itu. Willem van Hogendorp, anggota kelas oligarki penguasa di Belanda yang datang ke Hindia untuk memulihkan kekayaannya, menulis beberapa sandiwara dengan judul-judul menarik seperti "Sophonisba, atau kebahagiaan seorang ibu karena vaksinasi putri-putrinya" dan "Kraspoekol, atau akibat menyedihkan dari sikap keras yang berlebihan terhadap para budak".

Kecenderungan baru masuk ke Batavia, dan dari gagasan-gagasan baru ini muncullah dua organisasi, *Lodge* (kelompok) gerakan Freemason yang pertama dan Masyarakat Kesenian dan Keilmuan Batavia[4]. Kedua perkumpulan itu didirikan satu orang, Johan C. Radermacher, dan keduanya berasal dari satu lingkungan gagasan, yakni humanitarianisme akhir abad ke-18. Radermacher adalah putra seorang pejabat tinggi di istana "*stadhouder*" dan pergi ke Hindia ketika berusia 16 tahun. Dia naik dengan cepat—relasi keluarganya punya pengaruh atas hal ini—dan pada usia 21 dia kembali ke Belanda dengan peringkat pedagang kepala, salah satu jabatan tinggi dalam kepegawaian Kompeni. Di Belanda dia bergabung dengan Perkumpulan Seni dan Sains Haarlem, yang menjadi model bagi lembaga serupa di Batavia. Setelah beberapa tahun berdiam di kampung halaman dia kembali ke Batavia. Di sini, pada 1778, dia mendirikan Masyarakat Batavia tersebut, organisasi pertama dari jenisnya yang didirikan di suatu koloni di daerah tropis.[5] Lembaga baru itu tidak bermaksud mempromosikan seni dan sains begitu saja, tapi untuk melayani kepentingan publik. Laporan-laporan tertua yang diterbitkan Perkumpulan itu terkait dengan masalah-masalah seperti reformasi saniter di Batavia, lampu jalan, perbaikan jalan, kondisi pelabuhan, dan seterusnya. Walaupun piagam Perkumpulan itu menunjukkan bahwa "laporan mengenai sejarah alam dan benda antik serta adat istiadat orang Indonesia akan diterima baik", pokok-pokok studi ini dengan sendirinya menduduki tempat kedua. Meskipun demikian, penyebutan sejarah dan adat istiadat penduduk asli sebagai pokok

yang punya bobot sains itu sendiri adalah hal baru yang sangat penting. Gubernur Jenderal yang sedang memerintah, Reinier de Klerk, sangat tertarik pada yayasan baru itu dan mencoba memberi dukungan pada urusan itu dengan mengirimkan surat edaran kepada semua bawahannya, dan menyarankan mereka untuk bergabung dengan Perkumpulan itu.

Lodge para Freemason yang pertama, bernama "La Choisie", tidak bertahan lama dan dengan cepat diikuti dua lagi: "La Fidélité Sincère", dan "La Vertueuse".[6] Tentu saja kita tidak tahu seberapa serius doktrin *Freemason* dianut oleh anggota-anggota *Lodge* ini. Orang Batavia yang tidak punya kegiatan pastilah sangat senang dengan kejadian ini, karena hal ini memberikan hiburan pada kehidupan mereka yang biasanya membosankan itu. Fakta bahwa nama-nama *Lodge* itu berbahasa Prancis tidaklah mengherankan. Selama abad ke-17 pastilah ada sejumlah orang Prancis yang tinggal di Batavia, karena kita tahu bahwa sampai 1721 khotbah-khotbah dalam bahasa Prancis secara regular disampaikan di gereja-gereja Batavia. Setelah 1721, kebiasaan itu dihentikan, lalu dilanjutkan lagi pada 1779 atas permintaan "banyak orang penting".[7] Tampaknya orang Batavia ketika itu juga terpengaruh kesukaan orang Belanda pada umumnya pada bahasa dan sastra Prancis. Kita tahu pasti bahwa di antara orang Belanda di Hindia, bahasa Prancis lebih dikenal dibanding bahasa Inggris.[8] Kita cukup bisa berasumsi bahwa teori utama filsuf-filsuf Prancis abad ke-18 dikenal baik di Batavia. Masih harus dilihat bagaimana orang Batavia akan menanggapi doktrin baru kebebasan dan kesetaraan.[9]

Pada 1780 terjadi hal lain yang lebih memusingkan daripada urusan filsafat. Belanda terlibat dalam perang Prancis-Britania-Amerika. "*Stadhouder*", Pangeran Willem V van Oranje, bertahan selama mungkin pada kebijakan tradisional bersekutu dengan Britania, tapi akhirnya pengikut-pengikutnya terdepak dari Majelis Negara oleh usaha bersama lawannya yang oligarkis dan demokratik. Sayap demokratik oposisi tersebut diwakili oleh para

"patriot", suatu gerakan yang ingin mereorganisasi Republik Belanda, menggabungkan cita-cita politik baru dengan tradisi Belanda lama. Para "patriot" berusaha keras menghancurkan kekuasaan oligarki yang berkuasa dan juga kekuasaan "*stadhouder*". Keruntuhan oligarki tersebut akan berdampak pada VOC, yang para Direkturnya termasuk kelas ini. Dalam hal ini kaum demokrat tidak berhasil, dan untuk sementara seluruh perhatian dari semua kalangan anti-Oranje dibutuhkan untuk perang dengan Britania.

Koloni-koloni Belanda tidak punya pertahanan memadai melawan kemungkinan serangan Britania, tapi hanya daerah milik Kompeni di daratan India yang mengalami kerusakan karena aksi musuh. Yang lebih parah ialah bahwa Britania berhasil memblokade dengan sangat efektif pelabuhan-pelabuhan Belanda sehingga semua hubungan langsung antara Belanda dan Hindia terputus. Produk tropis dalam jumlah besar tertimbun di gudang-gudang Batavia. Walaupun semua produk ini bernilai jutaan, pemerintah Batavia sangat kekurangan uang. Suplai koin perak dan tembaga yang biasa datang dari Belanda tidak tiba, dan Batavia tidak dibolehkan menjual produknya di pasar terbuka untuk memperoleh uang kontan yang dibutuhkannya. Uang kertas harus diterbitkan. Para Direktur itu tetap tutup telinga terhadap semua permohonan dari Batavia dan menuntut agar monopoli tetap dijaga ketat, yang berarti menyingkirkan semua pedagang asing dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Dengan sikap ini mereka memberikan pukulan maut kepada Kompeni mereka sendiri. Di Belanda ia tidak dapat lagi membayar utangnya dan nyaris bangkrut. Di Asia Tenggara ia kehilangan kepercayaan. Seusai perang, urusan Kompeni begitu kacau sampai-sampai Kompeni tidak pernah pulih lagi.[10]

Perjanjian damai di Paris pada 1784[11] mematahkan monopoli pelayaran Belanda di perairan Hindia Timur. Perjanjian itu membuka semua laut Kepulauan Hindia Timur, bahkan jalur-jalur ke Maluku yang dijaga dengan saksama terhadap kapal-kapal

Britania. Penyelundupan timah dan rempah-rempah kini jadi perkara mudah. Britania tidak menutup-nutupi maksud mereka ketika pada 1788 mereka menduduki pulau kecil Penang di lepas pantai Kedah di Semenanjung Malaya, dan ketika, beberapa tahun kemudian, mereka mulai menjelajahi pantai Papua untuk menemukan tempat yang layak buat permukiman.[12] Dengan terburu-buru para Direktur memerintahkan pendudukan faktual atas semua pelabuhan dan daerah pantai antara Sulawesi dan Papua, tapi Batavia dengan sumber dayanya yang kecil tidak bisa melaksanakan perintah itu.

Persaingan yang ditakuti bukan hanya datang dari Britania. Menteri Belanda pertama untuk Amerika Serikat, Pieter van Berckel, segera sesudah tiba di New York, melaporkan bahwa pemilik-pemilik kapal Amerika sedang memperlengkapi kapal untuk berdagang dengan Hindia Timur. Betul bahwa istilah ini mencakup seluruh Asia Selatan dan Timur, dan bahwa sebagian besar kapal Amerika bertujuan Bombay atau Kanton, tapi ada yang menjadwalkan pelayaran mereka sedemikian rupa sehingga mereka bisa singgah di pelabuhan Batavia sebelum melanjutkan perjalanan ke Cina. Pada 1786 kapal *Hope*, diperlengkapi oleh seorang bernama Mr. Sears dari New York, mengunjungi Batavia, tempat sebagian kargonya, khususnya tar, tambang, dan peralatan pelayaran lain, terjual dengan laba besar. Lalu untuk pertama kali dalam sejarah muncul suatu visi tentang hubungan langsung di antara negeri-negeri di lingkar Pasifik dan reorientasi Asia Tenggara ke arah Amerika, suatu visi yang tidak tampak menarik buat Para Direktur di Amsterdam dan yang, jika diwujudkan, mereka anggap sebagai bencana bagi kepentingan Eropa.[13]

VOC mungkin akan berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan ini kalau direorganisasi total tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi. Tidak banyak artinya ketika, antara 1783 dan 1795, Parlemen Republik Belanda pelan-pelan memangkas kemerdekaan Kompeni dan berusaha membuatnya lebih tunduk pada pemerintah pusat di Eropa.[14] Pada 1784 satu skuadron

angkatan laut Belanda dikirimkan ke Hindia untuk memperkuat armada VOC, yang pada saat itu sudah sangat payah. Skuadron itu tiba terlalu lambat untuk ambil bagian dalam operasi laut melawan Britania, tapi memberikan hasil besar dalam memerangi perompak Bugis di Laut Jawa dan Selat Malaka, yang sudah menganggap diri mereka penguasa laut yang tak terkalahkan.

Pengiriman skuadron angkatan laut itu diikuti penunjukan suatu komite militer untuk menyelidiki keadaan pertahanan di koloni-koloni itu, suatu komite yang kembali ke Belanda dengan sangat kecewa dan jijik dengan semua yang mereka lihat dan dengar. Tapi pada waktu itu, suatu kontrarevolusi, didukung oleh Britania Raya dan Prusia serta dilakukan sepenuhnya dengan bantuan tentara Prusia, telah memulihkan kembali "*stadhouder*" Willem V di kedudukannya semula, termasuk kedudukan Direktur Jenderal VOC. Pangeran Willem, seorang baik hati yang plinplan, karena khawatir merusak kepentingan para pengikutnya, memutuskan untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Kompeni, dan menunjuk satu komite baru dengan instruksi mempelajari reorganisasi total sistem perdagangan dan pemerintahan Kompeni. Kepala komite ini adalah S. C. Nederburgh, ahli hukum Kompeni, seorang yang cerdas tapi sombong dan pakar intrik. Dia meninggalkan Belanda pada 1791, menghabiskan waktu setahun di Tanjung Harapan, tempat dia memperkenalkan perubahan kecil dalam pemerintahan koloni, dan tiba di Batavia pada 1793. Dia langsung bergabung dengan klik yang berdiri di belakang Gubernur Jenderal yang sedang memerintah, Willem A. Alting. Nederburgh dan Alting, didukung oleh Johan Siberg cerdas dan bertangan dingin, putra menantu sang Gubernur Jenderal, yang telah diangkatnya menjadi direktur jenderal perniagaan, dengan cepat menyingkirkan lawan mereka dari semua posisi penting, sehingga menciptakan suatu kelas yang sangat istimewa dalam komunitas Belanda-Indonesia yang sudah oligarkis itu. Sekali lagi tuntutan reformasi terbungkam, tapi belum lagi Nederburgh dan teman-temannya memantapkan pemerintahan mereka yang

baru, seluruh bangunan politik Belanda, dan dengan demikian juga imperium Kompeni Hindia Belanda, terancam mengalami keruntuhan total.

Pada 1793, Republik Belanda, mengikuti contoh Britania Raya, terjun dalam perang menentang Prancis yang revolusioner. Ribuan orang Belanda di pembuangan, yang terusir dari kampung halaman mereka oleh kontrarevolusi 1787 yang dikontrol Prusia, bergabung dengan tentara revolusi, di mana mereka membentuk "Legiun Batavia". Salah satu perwira komandan legiun ini adalah Herman Willem Daendels, mantan pengacara di kota kecil Hattem di Gelderland. Pada 1793 serbuan tentara revolusi dipatahkan, tapi pada 1795, awal Januari, serdadu Jenderal Jourdan berbaris di atas sungai-sungai beku Belanda dan menduduki negeri itu tanpa pertempuran. Beberapa jam sebelum tentara Prancis mencapai Amsterdam, revolusi tak berdarah terjadi dan oligarki yang berkuasa tersebut digulingkan dan digantikan oleh para pemimpin gerakan demokratik. "*Stadhouder*" pergi ke pembuangan, dan sementara dia menemukan perlindungan dengan sanak keluarganya di Inggris, sistem *stadhouder* dihapuskan di Belanda dengan dekrit Parlemen. Pemerintah Belanda yang baru menyepakati persekutuan dengan Republik Prancis dan dengan demikian terlibat dalam perang dengan Britania Raya.

Suatu keadaan yang mengherankan pun muncul. Dari 1795 sampai 1810 Belanda praktis menjadi negara taklukan Prancis dengan sangat sedikit kebebasan bertindak. Tapi pemerintahan demokratik di Den Haag jelas adalah pemerintahan sah di Belanda. Pangeran Oranje, yang bertempat tinggal di Kew dekat London, tidak bisa mengklaim secara sah mewakili Republik Belanda tapi dia dapat memberikan argumen kuat bahwa otoritasnya atas koloni-koloni tersebut tidak pernah hilang. Dalam fungsinya sebagai Direktur Jenderal VOC, gelar yang diberikan kepada ayahnya dengan hak turun-temurun pada 1747, dia bisa bertindak "melindungi" koloni-koloni itu dari konsekuensi revolusi 1795. Dalam kapasitas ini dia mengeluarkan satu surat edaran—bertanggal

di Kew, 7 Februari 1795, dan dialamatkan kepada semua gubernur dan komandan di wilayah dan benteng Hindia Timur dan Barat yang ada di bawah kedaulatan Belanda–yang memerintahkan mereka untuk menerima tentara dan administrator Britania dan untuk menyerahkan semua otoritas kepada mereka. Pemerintah Britania, katanya, telah berjanji bahwa begitu situasi politik di Belanda pulih seperti semula, koloni-koloni itu akan dikembalikan kepada pemerintah yang sah.

Kini Batavia harus memilih, apakah akan mengikuti "*stadhouder*" atau Parlemen Belanda. Nederburgh dan Gubernur Jenderal itu sangat konservatif dan tanpa simpati apapun terhadap gagasan-gagasan baru revolusi. Slogan "Kemerdekaan, Kesetaraan, Persaudaraan" tidak bermakna untuk mereka. Tapi prospek menyerahkan administrasi Jawa kepada Britania bahkan lebih tidak menarik lagi, dan, lagi pula, Nederburgh masuk dalam kelompok oligarki Belanda yang selalu menentang pengaruh pangeran-pangeran Oranje. Jadi Batavia memutuskan mengambil jalan tengah, yaitu tetap mengikat diri dengan pemerintah Den Haag, tapi pada saat yang sama menolak semua kecenderungan liberal di koloni itu.

Setelah mengenal keadaan orang Belanda di Timur, tidak bisa diharapkan ada kecenderungan pemikiran liberal apapun yang akan muncul di Batavia. Tapi begitu berita dari Belanda tiba bahwa suatu pemerintah baru telah didirikan dengan dasar demokratik, terjadi berbagai perubahan di Jawa.[15] Pertama ada petisi kepada "Pemerintah Tinggi", diserahkan oleh satu kelompok besar warga dan pegawai Kompeni. Ia dikarang dengan gaya berbunga-bunga tapi tampaknya ini tidak terhindarkan dalam semua proklamasi dari periode itu. Petisi pada 5 Desember 1795 itu menyatakan, antara lain:

> Kami semua, warga dan pegawai Kompeni, sama-sama terdorong oleh patriotisme dan cinta pada kebebasan, telah mendengar dengan sukacita besar akan perdamaian dan perjanjian persekutuan dan persahabatan yang disepakati

> antara Batave[16] dan Republik-Republik Prancis.... Tidak ada kejadian dalam sejarah Republik kita yang begitu penuh berkat dan menggembirakan seperti yang baru saja terjadi. Kalau kebebasan pura-pura yang sampai sekarang menopengi penindasan yang paling berat terhadap rakyat telah berhasil membuat Belanda suatu republik ternama yang begitu besar sehingga membuat seluruh Eropa iri, bayangkan apa yang bisa kita harapkan begitu kebebasan telah ditanamkan di sini berdasarkan pilar kesetaraan dan persaudaraan yang tak tergoyahkan.... Pemerintah Tinggi memberi tahu kami tentang perjanjian yang disepakati dengan Prancis itu, tapi tidak menjelaskan apakah perang dengan Inggris telah terjadi akibat perjanjian ini atau tidak.... Bagi setiap penduduk koloni ini tampaknya mengherankan bahwa, sementara kita terancam oleh bahaya yang begitu besar, tidak ada persiapan yang dilakukan untuk pertahanan. Apakah mengherankan bahwa orang banyak menjadi curiga dan bahwa, melihat contoh yang diberikan oleh bajingan dan pengkhianat dari Tanjung Harapan itu,[17] banyak dari kami khawatir akan nasib kota kita?

Para penulis petisi itu mencurigai kesetiaan Nederburgh dan Alting. Tuntutan langsung mereka sangat moderat: perayaan "pembebasan" Belanda, penghapusan semua pembedaan peringkat di kalangan para pegawai, dan pengorganisasian pertahanan Jawa. Nederburgh setuju melakukan tuntutan pertama tapi memberitahu Den Haag bahwa seluruh gerakan itu tidak lain daripada intrik yang digerakkan oleh musuh-musuh pribadinya yang mencoba menjungkirkan pemerintah; dia tidak membuang waktu menyerang balik pada pendukung petisi, yang dia tangkap dengan berbagai tuduhan. Tidak ada satu pun pegawai Kompeni yang tidak pernah melanggar aturan dagang yang ditentukan Para Direktur itu, sehingga pemerintah punya senjata sangat efektif yang dapat ia pakai terhadap individu mana pun dalam kepegawaiannya yang mulai terlihat melawan. Nederburgh memakai senjata ini dengan cara yang paling sewenang-wenang, dan dengan cepat membungkam penentangnya. Tapi satu penentang lolos, dan dia ternyata adalah yang paling berbahaya.

Pada waktu terjadi revolusi di Belanda, Dirk van Hogendorp, putra Willem van Hogendorp yang telah kita sebutkan sebagai pengarang beberapa sandiwara, adalah gubernur pantai timur laut Jawa. Dirk van Hogendorp adalah seorang yang cerdas tapi ceroboh dan ambisius.[18] Sebelum revolusi diketahui di Hindia dia sudah mengerjakan suatu laporan mengenai reorganisasi sistem pemerintahan. Begitu dia mendengar peristiwa di negerinya, dia percaya waktunya telah tiba dan mengirimkan sebuah laporan rahasia ke Belanda, di mana dia mengkritik keras administrasi Nederburgh. Untuk mendapatkan perhatian dari para penguasa baru Belanda, dia menggembar-gemborkan doktrin kebebasan dan kesetaraan untuk segala insan manusia, tapi menunjukkan, pada saat yang sama, bahwa suatu reorganisasi pemerintah kolonial akan membuat Kepulauan Indonesia menghasilkan lebih banyak keuntungan buat Belanda. Tidak perlu diragukan bahwa dia berharap reorganisasi ini akan diserahkan kepadanya, dengan jabatan gubernur jenderal dengan kekuasaan luarbiasa. Sayang baginya, laporan rahasianya tidak pernah sampai ke Belanda tapi jatuh ke tangan Nederburgh, yang tanpa membuang waktu menangkap gubernur ambisiusitu dengan tuduhan biasa, korupsi. Van Hogendorp, yang mengenal musuhnya, mengambil risiko besar untuk melarikan diri, dan berhasil. Sampai di Belanda, dia menerbitkan karyanya *Berigt*, suatu buku kecil mengenai perkara Hindia Timur di mana dia membela reformasi radikal atas prinsip-prinsip yang menjadi dasar seluruh struktur politik dan ekonomi di Hindia.[19] Setahun kemudian Nederburgh juga kembali ke Belanda, tempat dia menjadi pemimpin kelompok konservatif pakar kolonial. Gerakan "demokratik" Batavia di Hindia telah dibungkam; sejak itu konflik pendapat dipertikaikan di negeri leluhur.

VOC pada saat itu sudah tidak ada lagi, dan sebagian besar imperiumnya sudah hilang. Pada 1 Maret 1796 para Direktur menyerahkan administrasi Kompeni kepada suatu komite yang ditunjuk pemerintah. Diputuskan bahwa Piagam VOC, yang

berakhir pada 31 Desember 1799, tidak akan diperbaharui. Negara akan mengambil-alih semua hak milik dan utang Kompeni, dan demikianlah, dengan harga 134 juta gulden, jumlah total utang itu, ia memperoleh seluruh imperium kolonial dengan segala sumber dayanya—jelas suatu transaksi yang menguntungkan.

Begitu Republik Batave yang demokratik tersebut mewarisi koloni-koloni Kompeni yang oligarkis, ia harus merumuskan suatu kebijakan kolonial. Kompeni sebagai perusahaan komersial tidak perlu pusing dengan prinsip-prinsip pemerintahan, karena tujuan satu-satunya ialah keuntungan komersial, tapi negara baru itu harus membawa administrasi kolonial sejalan dengan prinsip-prinsip yang dengan lantang ia nyatakan di negeri sendiri. Komite untuk Urusan Hindia Timur yang baru itu memang telah menulis ke Batavia bahwa introduksi prinsip-prinsip yang berlaku di Belanda harus dipersiapkan, dan bahwa sistem kebebasan dan hak-hak rakyat harus diterapkan di semua koloni sama seperti di negeri induk. Terhadap surat bertanggal 5 September 1796 ini penguasa Batavia memberikan jawaban yang hati-hati dan sangat diplomatik.[20]

> Kami harus menyatakan (kata mereka) bahwa kami sulit membayangkan bagaimana revolusi yang berdasarkan sistem kebebasan dan hak-hak rakyat dapat diperkenalkan di negeri ini tanpa menghancurkan manfaat negeri ini untuk negeri leluhur.
>
> Tentu saja kami tidak tahu benar tentang prinsip-prinsip khusus sistem baru itu... tapi kami percaya bahwa kami boleh menyatakan perubahan revolusioner tidak akan diterapkan pada hubungan kami dengan raja-raja dan penduduk asli, karena perubahan seperti itu akan menyebabkan revolusi di Negara ini sendiri, sebab seluruh keberadaan Negara ini didasarkan pada kondisi moral dan politis yang secara aktual ada di antara para raja dan rakyat di sini.
>
> Karena itu kami berasumsi bahwa adalah tujuan anda bahwa sistem baru itu akan diterapkan hanya pada Pemerintahan Kompeni, pegawai-pegawainya, dan warga Belanda. Tapi jumlah warga ini amatlah terbatas, dan hanya sebagian kecil dari mereka mampu membentuk penilaian

> memadai atas urusan-urusan penting. Kepentingan beberapa warga yang sedikit ini tidak bisa melebihi kepentingan Kompeni dan tidak boleh dibiarkan membahayakan kepentingan yang lebih besar ini.

Penguasa-penguasa baru di Belanda cukup bersedia mempertimbangkan kepentingan-kepentingan khusus ini. Pastilah sangat melegakan bagi pemerintah di Batavia ketika menerima jawaban dari Den Haag, bertanggal 27 April 1799, di mana "Komite untuk Urusan Hindia Timur" membuat pilihan antara teori politik dan politik praktis. Komite itu menulis:

> Kami bertahan dalam pendapat yang selalu kami pegang bahwa doktrin kebebasan dan kesetaraan, bagaimanapun kuatnya berdasarkan hak-hak orang dan warga yang tak boleh diabaikan, dan bagaimanapun menyeluruhnya doktrin itu diperkenalkan dalam *commonwealth* (Belanda) dan beberapa negeri Eropa lain, ia tidak dapat dipindahkan atau diterapkan di wilayah taklukan Negara di Hindia Timur selama keterjaminan wilayah ini akan tetap menjadi hak milik Belanda bergantung pada keadaan subordinasi (orang Indonesia) yang sudah ada dan harus tetap ada dan selama introduksi itu tidak dapat terjadi tanpa memaparkan wilayah milik Belanda itu pada kekacauan yang akibatnya tidak bisa diperkirakan.

Komite itu juga menyatakan simpati untuk "nasib malang para budak, laki-laki dan perempuan, yang lahir bebas seperti kita dan seluruh umat manusia", tapi menyatakan bahwa penghapusan perbudakan harus menunggu "sampai tata peradaban umum yang lebih tinggi memungkinkan perbaikan nasib mereka di bawah kerjasama semua bangsa Eropa yang punya wilayah yang menjadi milik mereka di luar negeri".

Pernyataan-pernyataan ini kurang memberikan harapan bahwa gagasan lebih liberal yang dibela Van Hogendorp akan mendapat tempat. Dalam karyanya *Berigt*, terbit pada tahun yang sama, 1799, di mana surat yang dikutip di atas tertulis, dia dengan keras memprotes pembedaan itu, yang tampaknya seolah-olah

menyatakan bahwa orang Indonesia adalah manusia yang sama sekali berbeda dari manusia yang tinggal di Eropa. Sesuai dengan teori masa itu, dia percaya bahwa permainan bebas kekuatan-kekuatan ekonomi, di Indonesia serta Eropa, akan merangsang produksi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Lalu dia mengusulkan untuk menghapus semua penyerahan paksa dan tanam paksa tanaman ekspor dan menggantikan sumber penghasilan pemerintah ini dengan pajakkepalayangdiberlakukan atas semua penduduk Jawa.[21] Untuk merangsang persaingan di antara para petani, dia mengusulkan penghapusan kepemilikan komunal atas tanah sawah di tempat ini masih berlaku, dan memperkenalkan kepemilikan pribadi atas tanah di kalangan orang Jawa. Reformasi berjangkauan jauh ini ditentang oleh Nederburgh dalam tulisannya *Consideratiën* dan *Verhandeling*, di mana dia mengajukan teori bahwa orang Jawa tidak akan pernah membuat kemajuan dengan mengandalkan diri sendiri "karena kemalasan mereka yang membuat mereka tidak cocok untuk kerja apapun kecuali untuk apa yang diperlukan untuk memproduksi bahan pangan yang paling dibutuhkan".[22] Kemalasan alami yang dituduhkan atas orang Jawa tersebut tetap menjadi titik sentral semua diskusi tentang ekonomi teoretis orang Jawa selama beberapa dekade. Kalau petani Jawa sungguh-sungguh terlalu malas untuk melakukan pekerjaan lebih daripada yang sangat dibutuhkan, hukum-hukum kehidupan ekonomi Barat tidak bisa diterapkan atasnya dan rodi yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta bagi penguasanya mungkin bisa dibenarkan. Kalau dia tidak termasuk jenis manusia malas seperti yang digambarkan Nederburgh dalam laporannya, rodi untuk tanaman khusus jelas menindas dan tidak bisa dibenarkan.

Tapi problem ini murni masalah teoretis. Problem sebenarnya terletak pada kemiskinan orang Jawa, yang membuat mustahil mengumpulkan penerimaan pemerintah yang mencukupi dari pajak normal. Rodi, kata pendukung pandangan Nederburgh, hanyalah pajak yang dihimpun dalam bentuk pekerjaan sebagai

ganti uang kontan, dan kalau terorganisasi dengan baik, tidak lebih menindas bagi petani Indonesia daripada pajak uang bagi orang Eropa. Penentang mereka tidak menyangkal hal ini, tapi menekankan bahwa pajak dalam bentuk kerja tidak pernah dikenakan tanpa penyalahgunaan berat dari pihak kolektor, baik itu bupati Indonesia maupun pejabat Belanda, dan bahwa permainan bebas kekuatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga pajak normal dengan segera akan bisa menutupi pengeluaran publik. Dengan kata lain, Hogendorp dan pendukungnya, dengan keyakinan penuh pada kebenaran teori mereka, ingin bersandar pada keuntungan yang akan didapatkan di masa depan, sementara Nederburgh dan pengikutnya lebih suka tetap berdiri di tanah kokoh masa kini. Tidak sulit memperkirakan pihak mana yang akan menang.

Setelah likuidasi VOC, administrasi wilayah Asia Timur yang dimiliki Belanda diserahkan kepada suatu "Dewan untuk Urusan Asia". Pada 1802 suatu komite baru ditunjuk untuk menyusun suatu "Piagam" bagi pemerintah dan perniagaan Hindia Timur.[23] Komite itu diperintahkan untuk merencanakan suatu sistem administrasi yang akan menghasilkan "kesejahteraan sebesar mungkin untuk penduduk Hindia, keunggulan sebesar mungkin untuk perniagaan Belanda, dan keuntungan sebesar mungkin untuk keuangan negara Belanda". Kalau kita menganggap bahwa urutan butir-butir di atas menunjukkan kepentingan relatif di mata pemerintah Belanda, instruksi itu tidaklah sekonservatif kelihatannya. Baik Hogendorp maupun Nederburgh adalah anggota komite, tapi Nederburgh-lah yang menuliskan naskah pertama piagam itu, dan ini kemudian diterima oleh komite. Tidak ada usul reformasi Hogendorp yang diterima. Penyerahan paksa dan tanam paksa kopi dan produk lain akan diteruskan. Tidak ada perubahan yang akan dilakukan atas hak milik persawahan. Van Hogendorp hanya berhasil di satu titik. Komite memerintahkan pemerintah Batavia menyelidiki keadaan kepemilikan tanah di Jawa dan menjajaki kemungkinan menggantikan kepemilikan

komunal dengan kepemilikan pribadi atas tanah. Begitulah Hogendorp boleh dikata adalah pencetus riset sosiologis yang paling awal yang pernah dilakukan di Indonesia.[24]

Piagam itu tidak pernah diterapkan. Ia ditarik oleh pemerintah Belanda (di mana pemerintahan berganti dengan cepat di zaman Napoleonik) dan digantikan oleh Undang-Undang Administrasi 1806, yang sedikit lebih liberal daripada piagam itu. Ini pada gilirannya dibatalkan ketika "Republik Batave" lenyap dan digantikan oleh "Kerajaan Belanda" dengan saudara Napoleon, Louis, sebagai raja pertama—dan terakhir.

Ketika di Belanda para pakar urusan Hindia Timur membahas prinsip-prinsip pemerintahan dan ekonomi penduduk asli, pemerintah kolonial sendiri berusaha mempertahankan kemerdekaannya di tengah bahaya dan kesulitan yang makin meningkat. Pembahasan di Belanda secara khusus berkisar pada masalah-masalah Jawa, dan itulah masalah yang secara aktual masih harus dipecahkan, karena hampir semua wilayah lain yang pernah dimiliki Kompeni sudah lepas ke tangan Britania. Di Kepulauan Indonesia, Malaka, pantai barat Sumatra, Ambon, dan Banda telah menyerah pada ultimatum pertama. Perwira-perwira komandan entah tidak siap atau tidak mau melawan. Setelah kehadiran skuadron Britania di Maluku, peperangan sering meletus di kepulauan yang malang itu. Pertikaian lama antara Islam dan Kristen serta antara Tidore dan Ternate hidup kembali dan membakar seluruh kepulauan Maluku dengan perang saudara dan perang suku. Dari semua benteng Belanda, hanya Ternate yang bertahan melawan kekuatan musuh yang jauh lebih unggul.[25] Pada 1799 suatu pemberontakan di kalangan para perwira garnisun membuat kekalahan tidak terhindarkan. Di Timor ada keberhasilan ketika komandan setempat dengan bantuan budak bersenjata dan anggota suku mengusir Britania dari benteng Kupang, yang telah mereka duduki. Di samping Timor, hanya Makasar, Banjarmasin, dan Palembang yang masih berada di bawah kekuasaan Batavia.

Pertahanan Jawa sendiri sangat tidak memadai. Tentara di sana berjumlah tidak lebih daripada 3.000 serdadu, dan hanya 1.000 di antaranya orang Eropa. Bahwa kekuatan kecil seperti itu bisa memelihara ketertiban di Jawa menunjukkan bahwa pemerintah didukung penuh oleh para raja dan bupati Jawa. Namun, penaklukan Jawa pastilah perkara mudah bagi Britania kalau saja mereka tidak sibuk di tempat lain. Dengan Filipina yang dikuasai Spanyol dan Jawa yang dikuasai Belanda di timur, Mauritius di bawah Prancis di selatan, dan pasukan Prancis di Mesir di barat, posisi mereka di India, di mana sedang terjadi perang yang sulit dengan Tippu Sahib dari Mysore, agak terancam. Orang Belanda di Jawa adalah yang paling kurang berbahaya dari semua musuh mereka, karena tidak punya kekuatan untuk menyerang. Agar Belanda sama sekali tidak bisa bergerak, satu skuadron Britania berlayar di sekitar Jawa, menghancurkan kapal perang Belanda dan membakari dermaga reparasi. Dengan demikian sisa-sisa terakhir angkatan laut Kompeni yang pernah sangat kuat pun musnah.

Perdamaian muncul pada 1802, sebelum suatu ekspedisi Britania terhadap Jawa dapat dilancarkan. Semua koloni yang ditaklukkan Britania kecuali Ceylon dikembalikan kepada Belanda.[26] Perdamaian hanya berlangsung selama setahun. Dengan cepat Britania menaklukkan kembali hampir semua wilayah yang baru saja mereka kembalikan itu. Sekali lagi Jawa selamat dari serangan musuh karena Britania tidak menyerang, bukan karena kekuatannya sendiri. Pemerintah Batavia kurang peduli pada kelemahan pertahanan pulau Jawa. Karena masih menimbang-nimbang antara kecenderungan konservatifnya dan kesetiaannya pada Den Haag, ia lebih suka terus berada dalam status setengah merdeka, dan menjalankan administrasi dari hari ke hari dengan sumber daya yang ada di tangan.[27] Ia berharap Britania akan tidak mengganggu Jawa selama Belanda tidak memberikan dukungan aktif kepada Prancis. Seorang jenderal Prancis yang tiba-tiba sampai di Batavia dengan staf terdiri atas

40 perwira dan menyatakan bahwa mereka telah diperintahkan oleh Napoleon Bonaparte untuk mengambil alih komando atas pasukan sekutu di Timur dengan sopan ditolak masuk ke Jawa dan dikirim balik ke Mauritius sebelum dia dapat menunjukkan kredensial sah yang dikeluarkan Den Haag. Gubernur Jenderal Van Overstraten bahkan menyebut pertahanan gigih di Timor suatu "tindakan tergesa-gesa dan tidak hati-hati yang bisa mengundang Britania untuk membalas dendam!" Naiknya saudara Napoleon di takhta Belanda makin menyebabkan kendornya hubungan antara Jawa dan negeri induk Belanda. Dalam suatu acara minum, salah satu perwira utama terang-terangan menjawab penghormatan terhadap raja baru itu dalam bahasa Inggris dengan ucapan "Terkutuklah raja"!

Keadaan setengah merdeka yang mengherankan ini bisa terjadi akibat perubahan hubungan ekonomi antara Belanda dan koloninya. VOC, dengan sistem pelayaran dan perdagangannya yang tertinggal zaman, tidak dapat memperoleh penghasilan cukup. Begitu Batavia mulai menjual produk-produknya di pasar terbuka kepada pedagang-pedagang netral yang datang membeli di Jawa dan Maluku serta mengapalkannya dengan risiko sendiri, gambaran ini langsung berbalik. Penguasa di Den Haag hanya terpaksa setuju dengan perdagangan ini, tapi Batavia, sambil menulis surat-surat yang menghibur ke negeri induk, memanfaatkan kesempatan sepenuh-penuhnya. Adalah kebetulan yang menguntungkan Batavia bahwa justru pada tahun-tahun selama ia bebas dari pengawasan ketat oleh Dewan Direktur yang kolot itu harga-harga produk tropis, terutama kopi, tiba-tiba naik. Pemberontakan budak di Haiti menghancurkan produksi kopi di Hindia Barat. Jawa tidak bisa memproduksi cukup untuk memenuhi permintaan. Dalam satu tahun (1797), 20 kapal Denmark dan 31 kapal Amerika lego jangkar di dermaga Batavia. Pada 1799 lima setengah juta ton kopi diekspor. Tapi Batavia bukan hanya ingin menjual kopi, melainkan juga lada, gula, cengkeh, dan pala. Pada 1805 tidak ada satu kilo pun kopi

yang tertinggal di gudang-gudang. Pemerintah memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk membuka lebar Maluku bagi perdagangan luar negeri, khususnya Amerika. Untuk membuat pengaturan awal dengan para pedagang Amerika Serikat, wakil khusus dikirim ke New York. Untuk ini ditunjuklah Rogier G. van Polanen, wakil presiden Pengadilan Tinggi di Batavia, yang tahu banyak tentang Amerika, tempat dia selama satu periode menjadi Menteri Parlemen Belanda.[28]

Periode ledakan ekonomi itu berakhir sama mendadaknya seperti saat mulai. Pada 1807 Denmark diserbu oleh angkatan laut Britania, dan akibatnya terlibat dalam perang di pihak Prancis. Pelayaran Denmark pun berakhir.[29] Pada 1807 dan 1808 Undang-Undang Embargo dikeluarkan dan diperpanjang oleh pemerintahan Jefferson, dan semua pelayaran Amerika ke negeri asing tiba-tiba berhenti. Sejak itu, hanya sedikit pelanggar blokade Amerika yang yakin mereka bisa lari lebih cepat daripada kapal perang Britania yang muncul di dermaga Batavia. Tapi 10 tahun kemakmuran sudah cukup untuk memenuhi kotak perbendaharaan pemerintah Jawa. Ketika Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kantor pusatnya kepada penerusnya, ada dua juta gulden dalam perbendaharaan Batavia.[30]

Penerus ini adalah Herman Willem Daendels. Seorang Bonapartetelah naik takhtadi Belanda, dan sejak itu pertimbangan militer menduduki tempat pertama dalam rencana kolonial Den Haag. Daendels tidak pernah tinggal di Timur, tapi tampaknya dia jenis orang yang cocok untuk membersihkan Batavia yang busuk dan kotor, orang *baru* yang berdiri di luar klik dan gang, yang tahu apa yang ia inginkan dan bertangan besi. Dari seorang orator revolusioner, pada hari-hari "patriot", Daendels tumbuh menjadi perwira diktator model Napoleon. Dia masih bicara dalam ungkapan-ungkapan matang bahasa revolusioner, tapi baginya semua itu sudah jadi slogan tanpa makna. Pada 1 Januari 1808 Daendels tiba di pelabuhan kecil dekat Banten setelah pelayaran yang sulit dan berbahaya dari Belanda lewat Lisbon

dan Maroko. Perilaku Gubernur Jenderal baru itu menimbulkan kekagetan demi kekagetan bagi para orang lama. Begitu tiba, dia memutuskan untuk meninggalkan Batavia yang tidak sehat dan pindah ke Buitenzorg. Pejabat-pejabat tinggi mengatakan bahwa di musim hujan saat itu dia akan butuh 30 tim kuda untuk sampai di sana. "Saya akan pakai 31 tim," kata Daendels, dan mulai jalan.

Raja Louis memberikannya kekuasaan luarbiasa yang membuatnya bebas dari Dewan Hindia. Daendels dengan segera mereorganisasi Dewan itu dan hanya memberikannya hak penasihat. Lalu dia mulai bekerja, memangkas korupsi, menghancurkan dan membangun administrasi, membangun jalan dan benteng, pendeknya, segala hal yang bisa diperkirakan akan dilakukan seseorang yang menganggap diri diktator. Dia mencapai banyak hasil tapi mendatangkan kebencian besar pada banyak orang yang kepentingannya dia rusak; akibatnya, penerusnya, Thomas Stamford Raffles, bisa mengambil keuntungan dari hasil reorganisasi pemerintahan Jawa itu untuk dirinya sendiri, sementara ingatan pada Daendels dibebani dengan aspek-aspek yang membuat namanya buruk.[31]

Salah satu tindakan yang diambil Gubernur Jenderal baru itu adalah reformasi total administrasi. Sampai masa Daendels semua wilayah Belanda sebelah timur Cirebon membentuk satu provinsi, provinsi pantai timur laut Jawa. Gubernur provinsi itu, karena berbagai "tunjangan" yang berkaitan dengan kedudukannya, menikmati penghasilan tahunan 100.000 gulden, sementara, kalau kita menerima perkataan Daendels, pemasukan pemerintah dari wilayah itu praktis nol.[32] Dengan dekrit 18 Agustus 1808 provinsi itu dibagi ke dalam lima prefektorat* dan 38 kabupaten. Semua pejabat menerima pangkat militer dan gaji memadai. Hadiah suap dari bupati-bupati Jawa, keuntungan istimewa, semua penyalahgunaan ini harus dihentikan. Kesulitannya ialah: dari mana mencari uang untuk membayar gaji lebih tinggi itu?

Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda, untuk melindungi mereka, katanya, dari

beban pemerasan dan perlakuan menghina dari pihak pejabat Eropa. Sangat meragukan apakah para bupati itu menghargai kesetaraan status teoretis dengan orang Eropa yang mereka peroleh tersebut, karena mereka harus membayar mahal dengan kehilangan penghasilan dan prestise, dan khususnya kebebasan bertindak terhadap rakyat mereka. Tidaklah menarik buat mereka menggantikan kedudukan semiotonomi yang mereka punyai pada masa Kompeni dengan kedudukan pegawai negeri dengan pangkat letnan kolonel dalam birokrasi Napoleonik-Belanda. Sultan-Sultan Cirebon diturunkan ke jabatan bupati, degradasi yang layak mereka terima karena penindasan keji yang mereka lakukan, tapi campur tangan radikal terhadap lembaga-lembaga turun-temurun seperti ini cenderung menimbulkan kekhawatiran di kalangan bangsawan-bangsawan Jawa. Daendels, yang datang untuk mengatur pertahanan Jawa, butuh dukungan pemimpin-pemimpin Jawa. Tapi karena dia dengan mudah tertipu oleh sikap menyerah yang diperagakan para pejabat Jawa yang dia temui, dia sangat yakin bahwa metodenya dalam menangani penguasa setempat sudah tepat.

Dalam karya apologetiknya, *Staat der Belandasche Oost Indische Bezittingen*, Daendels dengan tajam mengkritik organisasi dan praktik peradilan Batavia. Kritiknya jelas bisa dibenarkan karena, dibandingkan kritik sejarawan Belanda modern, kritiknya boleh dibilang kurang pedas.[33] Beberapa pengadilan yang sebelumnya didirikan Kompeni tersebut tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk, dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan makin lama makin tidak tertahankan. "Perlakuan terhadap orang tahanan di penjara Batavia mengerikan," kata Daendels, dan dia bukanlah orang yang berhati lembut. Akibatnya dia melakukan reorganisasi menyeluruh terhadap peradilan, yang masih tetap merupakan salah satu karya paling penting yang dia capai. Ordinansi 1708 dan dekrit-dekrit lain dari Kompeni telah berhasil merumuskan segelintir prinsip yang harus diperhatikan pengadilan Batavia ketika berurusan dengan kasus-kasus di mana hanya orang-

orang non-Kristen yang terlibat, dan telah mempertahankan kekuasaan peradilan para bupati Jawa, tapi ordinansi-ordinansi ini tidak begitu jelas dan tidak diterapkan dengan ajek. Akibatnya terjadi kekacauan yurisdiksi di antara pengadilan-pengadilan yang berbeda. Adat istiadat dan hukum penduduk asli mungkin diterima, atau ditolak, sesuka hati pengadilan Eropa. Daendels memutuskan pemisahan kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Dia memberikan setiap kabupaten, dan di atas kabupaten, setiap prefektorat, pengadilannya sendiri, yang terdiri atas orang Indonesia, dengan dua anggota orang Eropa di pengadilan-pengadilan prefektorat. Pengadilan-pengadilan ini akan menghakimi semua kasus di mana hanya orang Jawa saja yang terlibat. Semua kasus yang berkenaan dengan *orang asing*, yakni, Eropa, Cina, Arab, atau Indonesia yang bukan Jawa, akan ditangani oleh "Dewan Peradilan" yang didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Kelompok pengadilan pertama akan melaksanakan peradilan menurut adat-istiadat dan hukum Jawa, yang kedua menurut undang-undang Hindia Belanda yang ada.[34] Sistem pemisahan peradilan menurut kelompok nasional dipertahankan dan diperbaiki oleh administrasi-administrasi di kemudian hari. Daendels sendiri tidak lebih hanya menetapkan prinsipnya dan menciptakan bentuk luar organisasi dari sistem itu. Dia terlalu bersifat diktator untuk merasa terikat pada peraturannya sendiri dan menunjukkan kesukaan pada "peradilan administratif", yakni penghukuman lewat dekrit tanpa proses pengadilan. Untuk membenarkan sikapnya, dia suka membandingkan kedudukannya sebagai penguasa koloni terisolasi dengan komandan benteng yang terkepung. Namun bahkan keadaan darurat militer tidak mengizinkan campur tangan sewenang-wenang dalam urusan peradilan seperti yang dilakukan Daendels.

Daendels memang punya pandangan yang terlalu berlebihan tentang kedudukan dan kekuasaannya. Dia seenaknya mengabaikan perjanjian dagang yang disepakati wakil Hindia Timur di Amerika Serikat dan terlibat dalam konflik pribadi

dengan beberapa pejabat utama di Jawa. Dia sangat mencela Menteri Koloni-Koloni di Belanda. Dia melakukan hal-hal yang dia larang dengan keras dilakukan bawahannya. Walaupun dia menikmati gaji yang untuk saat itu sangat besar, 130.000 gulden setahun, ditambah "tunjangan-tunjangan" yang cukup besar, dia berkeluh-kesah bahwa dia dibayar sangat kecil, dan secara terbuka menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas bagi dirinya sendiri rumah peristirahatan Buitenzorg, lantas menjualnya kembali kepada pemerintah. Dengan transaksi ini saja, dia mendapatkan keuntungan pribadi 900.000 gulden. Sikap sewenang-wenang Gubernur Jenderal tersebut, yang menganggap diri ada di atas hukum, menjengkelkan orang Belanda maupun Jawa. Daendels menolak berkompromi kecuali bila bagus untuk kepentingannya. Tidak ada orang yang lebih membenci hal ini daripada para raja Jawa.

Hubungan antara Sultan dan Susuhunan di satu pihak dengan VOC di lain pihak secara legal sangat jelas; para raja menerima takhta mereka dari Kompeni dan setelah kematian mereka negeri mereka dikembalikan kepada Kompeni untuk diserahkan kepada penerusnya. Tapi dalam praktik sehari-hari sikap Kompeni agak hormat pada para raja. Para residen di istana Yogyakarta dan Surakarta bertindak seolah-olah mereka adalah penasihat Sultan dan Susuhunan, bukan wakil kekuasaan yang berdaulat; dengan begitu mereka memberikan kedudukan pertama kepada raja-raja itu di semua acara publik. Daendels yang lebih berpikiran rasional membuang jauh-jauh semua pengaturan ini. Dia menganggap kompromi ini, yang menggelembungkan harga diri raja-raja itu, merusak hak-hak kedaulatan negara Belanda. Untuk menjelaskan rakyat di kerajaan-kerajaan Jawa itu bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Batavia, dia memerintahkan para residen, kini dinamakan "menteri", untuk memakai atribut kerajaan, "payung emas", tidak mengangkat topi waktu memberi hormat kepada raja, dst. Tawarikh-tawarikh Jawa mencerminkan sekilas apa yang terjadi di dalam jiwa Sultan dan Susuhunan ketika hal-hal baru yang

menyinggung perasaan ini diperkenalkan. Harga diri mereka yang terluka membuat mereka marah dan meradang di dalam. Mereka tahu bagaimana menyembunyikan perasaan mereka di hadapan wakil-wakil pemerintah, tapi amarah mereka adalah pertanda tidak baik buat masa depan.

Sebagaimana dia tidak menghargai perasaan para raja Jawa itu, Daendels juga tidak menghormati perjanjian-perjanjian yang ada dengan mereka. Daendels menuntut Sultan Banten memasok ratusan pekerja untuk memperkuat benteng-benteng di sepanjang pantai Selat Sunda. Penolakan terhadap tuntutan ini dianggap bukti ketidaksetiaan. Tuntutan berikut dihadapi dengan kekerasan di pihak rakyat Banten, dan dengan demikian suatu pemberontakan pecah, yang seharusnya dapat dihindari. Di sini Daendels, Jenderal Revolusi dengan pedang teracung, seperti ikan dalam air. Tinggi di atas kudanya dan sendirian dia membuka jalan untuk pasukannya menyerang Banten, menerjang melewati kelompok-kelompok pemberontak bersenjata yang, bengong dan gentar, minggir dari hadapan Gubernur Jenderal. Daerah-daerah pantai kesultanan dirampas sebagai wilayah yang diperintah langsung Batavia. Daerah pedalaman bertahan selama beberapa tahun berikutnya sebagai negara bawahan.

Semua reformasi ini sangat penting. Dengan itu sistem lama Kompeni dihancurkan dan fondasi untuk sistem baru diletakkan. Tapi tujuan utama misi Daendels sebetulnya berbeda. Dalam "Instruksi untuk Gubernur Jenderal atas Wilayah Asia milik Raja Yang Mulia" yang dikeluarkan Raja Louis pada 9 Februari 1807, 12 dari 37 pasal berhubungan dengan urusan militer dan pasal 14 menyatakan bahwa reorganisasi tentara adalah kewajibannya yang pertama.[35] Hal-hal lain yang secara khusus diperintahkan kepadanya ialah: penyelidikan terhadap kemungkinan penghapusan tanam paksa dan penyerahan paksa kopi, perbaikan kondisi kehidupan penduduk asli dan, terutama, budak-budak, serta yang terakhir, perbaikan kondisi saniter di Batavia, atau, jika tidak mungkin, pemindahan ibukota ke kabupaten yang lebih sehat di Jawa.

Jelas bahwa yang pertama dan terakhir akan menuntut pengeluaran uang dari perbendaharaan, sementara yang kedua dan ketiga akan cenderung mengurangi pemasukan pemerintah. Ini mendatangkan dilema yang bahkan oleh Daendels tidak dicoba untuk diatasi. Walaupun dia tidak punya pengetahuan pribadi apapun tentang urusan Jawa, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa tanam paksa harus diperluas bukan dikurangi. "Satu-satunya jalan untuk memungut pajak dari petani miskin Jawa adalah dengan membuat mereka bekerja," dia menulis kepada Menteri Koloni-Koloni di Belanda. "Penyerahan paksa," tambahnya, "bukan tidak adil, tapi semua keuntungan harus diperuntukkan bagi negara."[36] Daendels memang mencoba dengan keras memastikan para petani memperoleh bagian sah mereka atas harga kopi dan mengurangi kesewenang-wenangan para bupati yang berusaha memangkas paling tidak sebagian dari uang yang diperuntukkan bagi para petani untuk diri mereka sendiri. Pengecualian dari rodi di perkebunan kopi tidak diizinkan lagi. Anggota keluarga bangsawan dan pengikut pribadi para bupati diharuskan bekerja berdampingan dengan orang biasa, yang sampai saat itu adalah satu-satunya golongan masyarakat yang harus menanggung beban itu. Daendels memperkirakan bahwa langkah ini akan mengurangi jumlah hari di mana setiap orang harus bekerja di perkebunan, tapi pada saat yang sama dia menambah jumlah pohon kopi yang harus dipelihara oleh setiap kabupaten!

Kopi bertumpuk di gudang-gudang Batavia dan tidak ada orang yang datang membeli. Semua perdagangan netral telah dihentikan. Blokade Britania makin lama makin ketat. Situasi menarik muncul di Jawa. Pemerintah Batavia memiliki barang dagangan bernilai beberapa juta, tapi tidak punya uang. Ia mengeluarkan uang kertas tapi langsung terdepresiasi karena pemerintah tidak dipercaya orang sementara bawahannya, Sultan Yogyakarta, menimbun semua emas yang dapat dia kumpulkan, harta karun bernilai dua juta gulden. Daendels terpaksa melakukan upaya

terakhir: penjualan "tanah milik pemerintah", suatu langkah yang juga bermanfaat untuk mencapai tujuan ulterior "memodernkan" struktur ekonomi masyarakat Jawa. Untuk memahami hal ini, kita harus menyadari bahwa Daendels menganggap seluruh Jawa, kecuali wilayah para raja, adalah "tanah milik pemerintah". VOC membedakan antara tanah yang didapat melalui penaklukan, yakni dataran rendah di seputar Batavia, dan tanah yang kedaulatannya diserahkan oleh para raja, yakni Priangan dan pantai timur laut Batavia. Daendels, peniru setia Revolusi Prancis dan Napoleon, mengabaikan pembedaan seperti itu. Seperti para ideolog Revolusi, dia hanya tahu satu obsesi besar: melakukan sistematisasi. Bagi Daendels hak kedaulatan negara Belanda mencakup seluruh Jawa dan tidak terbatas. Untuk membenarkan penjualan tanah yang sudah berpenduduk dan dibudidayakan oleh petani lokal dia bisa mengajukan, misalnya, teori penguasa-penguasa Jawa, bahwa tanah dan orang adalah hak milik raja; tapi Daendels tidak merasa perlu repot-repot membenarkan keputusannya tersebut dengan penjelasan teoretis.

Hasil pertama dan paling diinginkan dari transaksi itu adalah memasukkan uang ke dalam perbendaharaan. Yang kedua, jika kata-kata Daendels bisa diterima, adalah mempromosikan pertanian dan industri. Kompeni telah melestarikan pranata-pranata dan menutup negeri itu dari perusahaan Eropa. Daendels, dengan menjuali "tanah milik pemerintah" itu, mengklaim telah membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Dia membayangkan semua daerah pantai Jawa sudah dibagi-bagi di antara ribuan lahan perdesaan besar, sementara wilayah gunung di barat, Priangan, akan tetap menjadi "cadangan kopi" pemerintah, dan wilayah timur, daerah para raja Jawa. Kompeni juga sudah menjual tanah pada pekebun Eropa, tapi undang-undangnya sangat membatasi hak pemilik tanah atas hamba sahaya Jawa yang tinggal di lahan perdesaan itu. Daendels menghapuskan pembatasan-pembatasan itu. "Perlindungan buruh penduduk asli," katanya, "hanya membuat dia makin bertahan dalam kemalasan alaminya,

dan membuat pekebun Barat enggan berusaha."[37] Kepentingan masyarakat akan paling terurus baik apabila, menurut teori ekonomi pada masa itu, ada kebebasan bagi buruh maupun pemilik perkebunan.

Daendels sebenarnya menjual tanah yang luas di barat dan timur Batavia. Tapi transaksi terbesarnya adalah penjualan seluruh kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Cina, Han Ti Ko, dengan harga satu juta dolar. Ini, dan beberapa transaksi lain, murni usaha spekulatif di pihak pembeli. Untunglah Daendels tidak memerintah cukup lama sehingga bisa sepenuhnya menjalankan rencana-rencananya, yang akan berakibat separuh penduduk Jawa terpuruk menjadi hamba sahaya, *taillable et corvéable à merci* (yang bisa diapakan saja oleh tuannya). Apa yang dihapuskan revolusi di Eropa dimasukkan ke Asia atas nama kebebasan ekonomi untuk semua orang.

Gubernur Jenderal diktator yang dengan demikian berusaha menjungkirkan seluruh ekonomi Jawa tersebut tidak lupa bahwa alasan utama kehadirannya di Jawa adalah keadaan parah pertahanan koloni itu. Setelah perdamaian 1802, bala bantuan kuat dikirim dari Eropa sehingga tentara, menurut daftar, berjumlah 17.000 orang. Jumlah itu dengan cepat menyusut karena penyakit-penyakit tropis. Perwira sangat dibutuhkan, dan Daendels mempromosikan sejumlah juru tulis dan warga berdarah campuran (banyak di antaranya bahkan tidak bisa baca tulis) ke pangkat perwira. Tidak ada cukup petembak artileri dan senjata atau perlengkapan. Daendels dengan sangat giat berusaha menyediakan segala sesuatu, membangun pabrik mesiu dan senapan dan benteng dan meriam pantai. Untuk meningkatkan komunikasi, setelah kini Britania sepenuhnya mengendalikan laut, satu jalan raya dibangun dari Banten di barat sampai Pasuruan di timur. Sebagian besar pekerjaan dilakukan petani yang dipanggil untuk bekerja rodi. Jalan raya itu selesai dalam waktu satu tahun, dengan mengorbankan nyawa orang dalam jumlah besar.[38]

Daendels tahu bahwa Batavia tidak akan pernah bisa dipakai

sebagai pusat utama pertahanan pulau Jawa. Istana tuanya, dengan tembok-tembok yang rapuh, dapat dihancurkan dari laut. Iklimnya bisa membunuh serdadu garnisun bahkan sebelum musuh menyentuh pantai. Instruksi kepada Daendels memberinya hak untuk memindahkan ibukota ke daerah yang lebih sehat, dan salah satu pendahulunya sebagai gubernur jenderal, Van Overstraten, telah mengembangkan rencana untuk memindahkan kedudukan pemerintah ke pedalaman Jawa Tengah, tempat kekuatan gabungan Belanda dan raja-raja Jawa dapat melawan kekuatan yang berjumlah lebih besar untuk waktu yang lama.[39] Daendels sendiri berpikir-pikir akan memindahkan ibukota ke Surabaya, yang dia reorganisasi sebagai basis yang lebih baik untuk operasi militer daripada Batavia. Akhirnya dia mundur karena berbagai kesulitan memindahkan seluruh permukiman Batavia, dengan gudang-gudangnya dan berkapal-kapal barang dagangan berharga, dan memutuskan untuk memindahkan bagian perumahan kota itu beberapa kilometer ke pedalaman, ke daerah pinggiran, yang ketika itu disebut Weltevreden, sebelumnya salah satu lahan perdesaan milik Chastelein. Bahan bangunan disediakan dengan menghancurkan sejumlah rumah, dan bahkan juga kastil kuno Coen, di bagian lama kota itu. Di selatan Weltevreden, satu perkampungan berbenteng dibangun, yang akan menjadi pusat utama pertahanan jika Britania menyerbu. Invasi Britania akan segera datang, karena langkah-langkah Daendels membangun pertahanan justru memaksa Britania menghancurkan benteng Belanda-Prancis itu sebelum menjadi tersusun rapi. Tapi Daendels tidak diizinkan melaksanakan pertahanan itu. Pada 1810 Napoleon Bonaparte menurunkan saudaranya Louis, Raja Belanda, dan memasukkan Belanda ke dalam Imperium Prancis. Daendels mengibarkan bendera Prancis di Batavia, walaupun tanda dominasi asing itu menyebabkan ketidakpuasan besar di kalangan pemukim-pemukim lama Belanda. Segera sesudah merampas Belanda, Napoleon memutuskan memanggil pulang Daendels dan mengantikannya dengan orang yang bersifat

lebih moderat. Dia mengirimkan Jan Willem Janssens, yang sebelumnya menjadi gubernur provinsi Cape Colony, yang dia capai persis pada waktunya untuk melawan invasi Britania dan lantas menyerahkan koloni itu kepada musuh. Nasib sama terjadi lagi padanya ketika dia tiba di Jawa.

BAB 12

THOMAS STAMFORD RAFFLES, PENDIRI SINGAPURA

PADA 31 Agustus 1810, Dewan Perusahaan India Timur Inggris menulis kepada Lord Minto, Gubernur Jenderal India:

> Kami tidak segan menyatakan persetujuan penuh terhadap gagasan Tuan mengenai perlunya usaha mengusir musuh dari permukiman mereka di Pulau Jawa, dan dari setiap tempat lain yang mereka tempati di Perairan Timur. Selama Belanda merdeka, atau paling tidak secara nominal merdeka dari Prancis, mereka tidak berkepentingan dan bukan kebijakan mereka untuk mengganggu kita dari Batavia atau permukiman mereka yang lain di perairan itu. Tapi keadaan kini sudah berubah drastis.[1]

Aneksasi Belanda ke dalam imperium Napoleon dan usaha Daendels mereorganisasi kekuatan militer Hindia Belanda adalah penyebab langsung serangan Britania atas wilayah luar negeri Belanda yang terakhir. Bagi Para Direktur Perusahaan Inggris (yang harus menyediakan kapal dan pasukan) prospek menyerang Jawa tidaklah menarik. Mereka tidak mau memperoleh kedaulatan atas Jawa, karena mereka sangat memandang rendah nilai ekonomis pulau itu.

Pemerintah Britania ingin melakukan ekspedisi itu karena alasan strategis, tapi walaupun dapat mengklaim Jawa untuk takhta Britania, ia tidak tertarik menduduki pulau itu secara permanen.[2] Karena itulah serangan itu dirancang sebagai ekspedisi penghukuman, "untuk mengusir musuh dari semua permukiman mereka, menghancurkan semua benteng mereka, merampas semua senjata dan amunisi, dan menghancurkan semua gudang senjata dan amunisi, demi pengembalian semua permukiman itu ke tangan penduduk asli". Orang-orang yang harus menjalankan perintah kejam ini punya pendapat berbeda.

Gubernur Jenderal India masa itu ialah Gilbert Elliot, Lord Minto. Sebagai anggota ternama partai Whig,[4] Elliot adalah salah satu tokoh utama dalam tentangan terhadap Warren Hastings dan pengikutnya. "Partai Whig," kata seorang sejarawan modern Britania, "menjadikan peristiwa itu suatu manifesto rasa kemanusiaan mereka dan ajang pemakaian kata-kata kasar." Tidak perlu diragukan ketulusan humanitarianisme yang dianut Lord Minto dan pengikut-pengikutnya, tapi tidak bisa disangkal bahwa mereka juga membuat keyakinan mereka menjadi slogan untuk perpolitikan partai.[3] Dalam mempersiapkan ekspedisinya melawan orang Belanda di Jawa, Lord Minto mengumpulkan sejumlah orang yang betul-betul punya minat terhadap urusan Indonesia, bahasa-bahasa Melayu, dan sejarah serta adat istiadat kelompok-kelompok bangsa Indonesia—yakni orang-orang yang jelas juga punya pandangan humaniter seperti dia sendiri, tapi yang juga tahu bahwa kesempatan mereka untuk memperoleh promosi hanya terletak pada penilaian baik dari para politikus Whig ternama yang juga menjadi atasan langsung mereka itu. Penjelasan ini tidak menyangkal keberhasilan orang-orang ini sebagai promotor studi urusan-urusan Indonesia, tapi bisa menjelaskan celaan moral mereka yang berlebihan atas ketidakadilan yang dilakukan orang lain, sementara tindakan mereka sendiri sering kali jauh dari tak bercela.

Salah satu tokoh paling menarik di antara pembantu Lord

Minto adalah Dr. John C. Leyden.[4] Dia sangat ahli dalam urusan Melayu, tapi personalitasnya sepenuhnya dibayang-bayangi anak muda yang dia rekomendasikan kepada Gubernur Jenderal itu, yakni Thomas Stamford Raffles. Gabungan ambisi membara dan kecerdasan brilian membuat Raffles orang yang tepat untuk menjalankan rencana Lord Minto untuk Indonesia. Raffles bukanlah orang berkarakter hebat, tapi dia cukup bijaksana untuk lebih memilih reputasi dalam sejarah daripada penghasilan material sesaat. Untuk membangun reputasi itu dia bekerja seumur hidupnya, mula-mula dengan melayani negarawan-negarawan humaniter utama, kemudian dengan menciptakan, lewat tulisan-tulisannya, suatu legenda historis mengenai administrasinya di Jawa, dan akhirnya, dengan suatu kebijakan ekspansi yang berani yang membuat dia mencapai keberhasilan terbesarnya: pendirian Singapura.[5] Dan dia menulis begitu baik, dalam bentuk sangat menarik, sehingga selama seabad setelah kematiannya orang terus menilai Raffles lebih berdasarkan kata-katanya daripada perbuatannya. Raffles punya satu keunggulan besar atas pendahulu-pendahulunya di administrasi kolonial: dia tahu bagaimana menulis, bagaimana menghiasi narasinya dengan slogan-slogan yang akan dihargai, pertama oleh para pelindungnya, kemudian, setelah menjadi terkenal, oleh publik umum. Selama dekade-dekade terakhir abad ke-18, suatu sentimen antikolonial yang kuat mendapat tempat di antara para intelektual Eropa barat. Ekspansi kekuasaan Eropa di negeri-negeri jauh telah ditolak baik berdasarkan alasan kemanusiaan maupun ekonomi. Karya Abbé Raynal *Histoire philosophique et politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes*, pertama kali terbit di Amsterdam pada 1771, adalah satu celaan panjang terhadap kolonialisme dan dibaca luas di seluruh Eropa. Penilaian keras Raffles atas kebijakan-kebijakan pendahulu-pendahulunya orang Belanda, catatannya akan "perilaku serakah orang Eropa" sepenuhnya sejalan dengan kecenderungan pemikiran progresif yang waktu itu sedang laris di Britania dan Prancis.

Raffles memulai karirnya di kantor-kantor Perusahaan di London dan diangkat ke posisi agen Perusahaan di Pulau Penang pada 1805. Di sini dia memulai studinya atas bahasa, adat-istiadat, dan sejarah Melayu, dan dalam rangka studinya itu, dia melakukan banyak surat-menyurat dengan William Marsden, penulis *History of Sumatra* (*Sejarah Sumatra*), dan dengan Dr. Leyden. Ketika waktu untuk menyerang wilayah milik Belanda semakin dekat, Lord Minto memilih Raffles untuk persiapan diplomatik penyerangan itu. Perintah dari London adalah untuk berteman dengan "penduduk asli", dan membuat serangan itu semudah dan sesingkat mungkin. Untuk tugas ini Raffles menyibukkan diri dengan antusiasme penuh. Dengan memakai saudagar Indonesia sebagai perantara, dia mengirimkan surat-surat kepada kerajaan-kerajaan Jawa. Jawaban yang dia terima membesarkan hati, dan dia menganggapnya cukup serius sebagai bukti adanya simpati terhadap Britania, walaupun dia mungkin menyadari bahwa penguasa-penguasa Indonesia, yang melihat puncak ketegangan antara kedua kekuatan Eropa itu mendekat, berusaha mendapatkan tempat berpijak pada kedua pihak.[6] Urutan kejadian di Palembang dengan jelas membuktikan hal ini.

Tidak mengherankan bahwa di mata Raffles serangan terhadap dominasi Prancis di Jawa mengambil bentuk jihad untuk membebaskan Melayu dari penindasan Belanda. Kutipan berikut dari salah satu surat-surat Dr. Leyden menunjukkan arus pemikirannya:

> (Ada orang) yang telah berhasil meyakinkannya (Lord Minto) dengan bicara tentang membiasakan orang Melayu terhadap kemerdekaan dan segala macam hal. Orang Melayu tidak boleh merdeka juga tidak boleh terlalu tidak merdeka, tapi kita harus punya suatu liga Melayu umum di mana semua Raja harus bersatu... dan semuanya harus punya wakil dalam suatu Parlemen umum negara-negara Melayu seperti Dewan *Amphitryonic* orang Yunani, dan Dewan ini harus bertemu di pulau Madura atau tempat kuno terkenal lain dan di bawah perlindungan Gubernur Jawa.

Sejarah Dewan-Dewan *Amphitryonic* yang sebenarnya tidaklah membesarkan hati buat mereka yang ingin mendirikan pranata serupa di Melayu. Gagasan Raffles sendiri atas pokok itu lebih masuk akal, walaupun didasarkan pada konsep salah tentang sejarah Indonesia. Dalam surat 10 Juni 1811, dia menyarankan dihidupkannya kembali kekuasaan raja-raja Majapahit yang mengatasi raja-raja lain, yang dia yakini punya "hak pengawasan umum atas, dan hak campur tangan terhadap, semua negara Melayu". Raffles percaya bahwa, kalau raja-raja Indonesia dapat dibujuk untuk menyerahkan gelar dan hak-hak kuno raja-raja Majapahit kepada Gubernur Jenderal Britania di India, tidak akan ada kesulitan mendirikan pemerintahan Britania atas seluruh Kepulauan Indonesia dan memperoleh dukungan dari raja-raja lokal.[7]

Gagasan Leyden dan Raffles terbukti tidak praktis dan tidak sejalan dengan pendapat Dewan Direktur yang hanya bertujuan menghancurkan kekuatan Belanda di Indonesia. Tapi Lord Minto setuju sepenuhnya dengan perwira-perwira bawahannya itu. Begitu penaklukan Jawa selesai dia melaporkan kepada Dewan itu tentang "sangat perlunya mengkaji ulang bagian dari Instruksi itu yang memerintahkan penghancuran pertahanan Belanda serta pengabaian terhadap koloni kuno Eropa itu, tanpa senjata, di bawah ancaman pembalasan dari, dan perampasan oleh, suku-suku penduduk asli", yang dengan pertimbangan ini, "membuat perintah itu sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, sebab secara moral memang mustahil".[8] Lord Minto pastilah tahu akan pertimbangan ini sebelum dia memulai serangannya, dan kita bisa berasumsi bahwa dia tidak pernah bermaksud melaksanakan perintah itu. Dia pun tidak setuju dengan pandangan radikal Leyden dan Raffles. Dr. Leyden meminta Raffles mendesak orang Melayu untuk mengusir "orang Prancis dan Belanda yang sadis dan khianat itu", tapi Lord Minto tahu bahwa satu-satunya kemungkinan untuk mendirikan administrasi yang efisien atas Jawa terletak pada kerjasama pejabat-pejabat Belanda, dan karena

itu dia tidak mau menyusahkan mereka tanpa perlu – khususnya karena dia mengerti bahwa sebetulnya sebagian besar dari mereka sangat menentang dominasi Prancis.

Gubernur Jenderal pengganti Daendels, Janssens, menghadapi situasi tanpa harapan ketika dia tiba di Batavia. Pasukannya tersebar di seluruh pulau Jawa. Keangkuhan Daendels telah menimbulkan kebencian di kalangan penguasa Jawa dan pemberontakan bisa saja terjadi, tapi tidak ada raja yang mengangkat satu jari pun, untuk menentang atau membela Belanda. Dalam enam minggu saja serangan itu berakhir dengan kemenangan Britania.[9] Dengan armada hampir seratus kapal dan kekuatan 12.000 serdadu Lord Minto berlayar dari Malaka. Pada 3 Agustus 1811, dia muncul di Batavia. Setelah pertempuran sengit pertahanan terakhir di selatan Batavia diserbu dan diduduki Britania. Gubernur Jenderal Janssens sebisa mungkin mengatur pasukannya dan menduduki posisi kuat di selatan Semarang, di mana dia berharap memperoleh bantuan dari kerajaan-kerajaan Jawa, tapi hanya Prang Wedana, penerus Mangkunegara sebagai "Raja Muda" Surakarta, yang datang membantunya. Begitu Britania menyerang, kekuatan yang dihimpun dengan terburu-buru itu langsung cerai berai melarikan diri. Pada 18 September 1811 penyerahan ditandatangani. Jawa, dengan semua bawahannya, Timor, Makasar, dan Palembang, menjadi wilayah Britania. Di Timor dan Sulawesi pengalihan kekuasaan tidak mengalami kesulitan, tapi ketika duta-duta Britania datang ke Palembang, Sultan memberitahu mereka dengan sopan bahwa dia sudah mengikuti nasihat Raffles untuk mengusir "Belanda keji", tapi bahwa dia melakukannya *sebelum* penyerahan itu (walaupun setelah pertempuran di Batavia!) dan bahwa, karena itu, dia telah menghancurkan kekuasaan Belanda sebagai penguasa atasan atas wilayahnya sebelum Britania mengambil alih hak Belanda! Raffles dengan tegas menyatakan bahwa pengusiran Belanda (sebagian besar dari mereka dibunuh setelah menyerah) terjadi segera *sesudah* Semarang takluk, dan bahwa, karena itu, Sultan

itu harus menghormati perjanjian yang sebelumnya dia sepakati dengan pemerintah Belanda. Pernyataan ini diikuti permintaan agar dia menyetujui perjanjian baru yang akan memberikan hak eksklusif kepada Britania untuk membeli produksi tambang timah Bangka. Setelah Sultan menolak, kekuatan Britania dikirim untuk membalas "pembunuhan massal yang mengerikan" atas orang-orang Belanda. Sultan lari ke pedalaman, dengan hati-hati menjaga surat-surat yang mengompori dari Raffles yang menjadi penyebab awal masalah itu. Bertahun-tahun kemudian dia mempertunjukkan surat-surat itu kepada pemerintah Belanda untuk membela tindakannya.[10]

Lord Minto mengatur pemerintahan Jawa sebelum kembali ke Kalkuta. Dia mempercayakan kedudukan Letnan Gubernur kepada Thomas Stamford Raffles. Kepulauan Indonesia kini sepenuhnya berada di bawah kontrol Perusahaan India Timur Inggris dan dibagi ke dalam empat unit administratif, pemerintahan Malaka, Bengkulu, Jawa, dan Maluku.[11] Situasi di Sumatra praktis tidak berubah selama masa pemerintahan Britania. Raffles menunjukkan minat besar terhadap harta karun yang kabarnya disembunyikan oleh bekas sultan Palembang, tapi perburuan harta karun itu tidak berhasil. Namun Sultan terpaksa menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Britania, yang dengan demikian menguasai produksi timah baik di Indonesia maupun Malaya.

Maluku sangat beruntung atas perubahan administrasi itu. Sistem monopoli tidak dihapuskan tapi diterapkan dengan lebih longgar, karena Perusahaan India Timur Inggris tidak punya kepentingan finansial untuk menjaga ketat sistem itu seperti Belanda. Britania sudah berhasil memindah-tanamkan pohon cengkeh dan pala di wilayah mereka sendiri di India dan lebih suka meneruskan eksperimen itu. Pengawasan Maluku akan membutuhkan lebih banyak tentara dan kapal daripada yang bisa dibenarkan oleh kemungkinan keuntungan. Lagi pula, sangat mungkin bahwa sesudah perang dengan Napoleon wilayah itu

akan dikembalikan kepada Belanda. Karena itu, pengawasan atas pelayaran Indonesia kurang ketat dibandingkan sebelum penaklukan Britania. Penganiayaan terburuk yang dialami penduduk Maluku pun terobati.

Periode pemerintahan Britania di Sulawesi dan Kalimantan lebih tidak damai. Di Sulawesi ada peperangan terus-menerus dengan Bugis. Para pelaut dan perompak menjalankan perdagangan budak yang menguntungkan, dan Raffles memulai kegubernurannya dengan tekad tegas menentang perbudakan sekuat tenaga, dan dia tidak mundur dari tujuannya itu hanya karena perlawanan dari mereka yang ingin mempertahankannya, baik itu orang Eropa maupun Indonesia. Di Batavia sendiri, Letnan Gubernur Britania berusaha memperbaiki nasib para budak, dan dengan menetapkan pajak khusus dan upaya-upaya lain dia berusaha membuat penduduknya berhenti memelihara para hamba sahaya ini.[12] Hasilnya biasa-biasa saja, tapi langkah-langkah ini tetap diingat sebagai langkah pertama menentang peninggalan "zaman emas masa silam" yang sangat patut dicela.

Tentu saja orang-orang lama di kalangan warga Belanda mengkritiknya karena aturan baru itu, dan menyatakan dengan jengkel bahwa rasul antiperbudakan itu toh menyetujui langkah-langkah yang tampaknya jelas berlawanan dengan teori-teorinya. Langkah-langkah itu berkaitan dengan izin yang diberikan Raffles kepada temannya, Alexander Hare, untuk "mendeportasi penjahat dan gelandangan" dari Jawa ke lahan perdesaan milik tuan itu dekat Banjarmasin di Kalimantan. Beberapa ribu orang Jawa miskin dipindahkan, dan sebagian besar akhirnya diizinkan kembali ke Jawa setelah pemulihan kekuasaan Belanda. Langkah itu jelas patut dicela, dan Mr. Hare, seorang individu yang agak eksentrik, harus menderita karenanya, sebab dia diusir dari tanahnya oleh penguasa Belanda.[13]

Campur tangan Raffles dalam urusan wilayah non-Jawa dari provinsinya tersebut tidak berarti banyak. Ketenarannya dalam sejarah Indonesia disebabkan oleh reorganisasi yang dilakukannya

ataspemerintahan Jawa. Di sini, karyanya memangsangat penting dan dia memperoleh hasil yang lestari. Dalam buku-bukunya dia bicara dengan sangat jijik tentang administrasi sebelum dia. Dia cenderung melebih-lebihkan aspek "menindas dan kejam" walaupun dia tidak menuduh orang per orang Belanda melakukan kekejaman dan berkarakter rendah.[14] Trik litererrnya membuat dia berhasil menciptakan dampak yang menguntungkannya, membuat kontras antara administrasinya sendiri dengan pendahulu-pendahulunya. Tapi kontras itu sebetulnya tidak selalu besar, seperti yang dia ingin kita percayai. Raffles terus melanjutkan beberapa pranata yang secara prinsip dia tentang. Lagi pula, konsep-konsep yang menjadi dasar reformasi Raffles telah diformulasikan oleh Lord Minto, dan pelaksanaannya sangat difasilitasi oleh nasihat dan dukungan administrator Belanda. Dalam karyanya, *Substance of a Minute*, Raffles sendiri mengaku bahwa ia "berutang untuk keberhasilan yang bagus dari perubahan penting ini" kepada "Mr. Muntinghe, yang kemampuannya tidak terperikan".[15] H. W. Muntinghe menduduki jabatan-jabatan pemerintahan penting di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Dia setuju dengan beberapa pandangan yang sudah dikemukakan Van Hogendorp. Fakta ini dan pengalaman pribadinya –dia terdidik di Inggris– mungkin telah mempermudah jalan bagi kerjasamanya yang berhasil dengan para pejabat atasannya yang baru.

Tugasyang diusahakan oleh Gubernur Britania baru itu adalah tugas raksasa, dan dia mungkin tidak menyadari semua kesulitan yang menghadang dalam pengubahan sistem pemerintahan tidak langsung menjadi administrasi langsung, khususnya di suatu negeri di mana gagasan tentang suatu hubungan langsung antara organ pusat pemerintahan dan tiap-tiap warga negara sama sekali tidak dikenal. Perubahan serupa (walau tidak persis) dalam administrasi abad ke-18 Prancis hanya dimungkinkan oleh suatu revolusi besar. Di Prancis perlu beberapa tahun sebelum hal itu selesai. Di Jawa hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali sebagai hasil proses bertahap yang lambat. Tapi Raffles mencoba

mempercepat prosesitu. Dia hampir tidak menunggu hasil dekrit-dekritnya yang pertama dikenal orang sebelum memerintahkan langkah kedua yang lebih sulit dijalankan. Raffles juga didorong oleh ketidaksabaran yang menjadi ciri pembaharu politik masa itu, dan dia juga agak bosan dengan rincian administratif yang meletakkan beban berat berupa problem-problem praktis sehari-hari yang muncul berulang-ulang untuk diatasi sang pembaharu.

Karya Letnan Gubernur Jawa dari Britania itu dapat dibagi ke dalam tiga bagian: revisi ataspe rjanjian yang mengatur hubungan pemerintah Batavia dengan raja-raja Jawa, reorganisasi lembaga-lembaga administratif dan peradilan di pulau itu, dan—yang paling spektakuler dari reformasinya—usaha mereformasi total sistem pajak dan cukai.

Reformasi pertama itu pastilah tidak menimbulkan simpati untuk pemerintahan Britania seperti yang diklaim Raffles. Kebijakan Daendels, yang sudah menimbulkan kejengkelan di kalangan para raja Jawa, sekarang diterapkan sepenuhnya. Kompeni Belanda telah menghapuskan kemerdekaan politik penguasa penduduk asli tapi membiarkan mereka terlihat dari luar seolah-olah masih memiliki kedaulatan itu. Daendels merampas hal itu dan mempermalukan mereka dengan memberikan kedudukan pertama di semua acara publik kepada wakil-wakil dari Batavia. Raffles memutuskan untuk mengambil dari para raja itu sebagian besar kekuasaan mereka dalam pengaturan urusan internal negara-negara mereka. Banten, yang sudah kehilangan separuh wilayah asalnya karena Daendels, tamat sebagai kesultanan. "Pada 1813," tulis Raffles, "Sultan dengan sukarela menyerahkan administrasi negeri itu ke tangan Pemerintah Britania, dengan memperoleh pensiun tahunan 10.000 dolar Spanyol." Dua tahun kemudian Cirebon juga direbut, suatu langkah yang jelas sangat menguntungkan penduduk tertindas di daerah itu. Sementara itu kekuasaan Yogyakarta juga dipatahkan. Daendels sangat tidak peduli perasaan orang lain dalam pengaturan hubungan dengan kesultanan. Dia menurunkan Sultan yang sedang memerintah, dan,

berdasarkan tuduhan samar, menangkap Natakusuma, pangeran Yogya yang paling andal, yang kemudian dia perintahkan dihukum mati tanpa pengadilan. Untunglah pejabat yang bertanggung jawab atas pengawalan pangeran itu menolak melaksanakan perintah itu. Bisa dimengerti bahwa di bawah administrasi Raffles masalah muncul lagi. Segera timbul krisis. Keraton Sultan diserbu pasukan Britania, Sultan ditawan, dan semua hartanya dijarah. Lebih daripada 750.000 dolar dibagi-bagi di kalangan perwira dan serdadu. Setiap serdadu Eropa menerima 35 dolar sebagai bagiannya, kapten sebanyak 4.900 dolar, dan perwira komandan 16.900 dolar, jumlah yang besar pada awal abad ke-19.

Kedua raja tersebut—karena Susuhunan dianggap diam-diam bersekongkol dengan Sultan—lebih jauh dihukum dengan pembatasan wilayah mereka. Hak mereka untuk memelihara pasukan dihilangkan, kecuali satuan kecil pengawal. Dalam segala urusan internal mereka berjanji akan mengatur diri sendiri sesuai dengan keinginan Batavia, yang mengambil sebagian besar sumber pendapatan mereka lalu membayar mereka dengan pensiun tahunan.[16] Kekuasaan Yogyakarta semakin dikurangi dengan pendirian kerajaan kedua dalam wilayah perbatasannya. Seperti halnya Mangkunegara yang memegang satu wilayah kecil sebagai negara anakan Susuhunan sejak 1756, "Paku Alam" juga memegang negara anakan Sultan Yogya. Hak-hak kedua cabang yang lebih muda ini dijamin oleh Batavia, sehingga dalam kenyataan kekuasaan Susuhunan dan Sultan sebagai penguasa atasan hanya berlaku luarnya saja. Paku Alam pertama ialah Natakusuma, yang dengan demikian menerima upahnya atas kesetiaannya selama pemerintahan Belanda dan Britania. Begitulah, organisasi politik empat kerajaan Jawa yang ada sekarang terbentuk pada 1812.

Reformasi kedua Raffles berkenaan dengan struktur administrasi dan peradilan. Di sini juga, sampai batas tertentu karyanya adalah lanjutan usaha Daendels. Konsekuensi logis reformasi Daendels adalah mencabut dari para bupati sisa-sisa terakhir otonomi mereka, dan membuat mereka sekadar pejabat di bawah kontrol langsung administrator provinsi-provinsi, yang

disebut "residen" alih-alih "prefek" atau "*Landdrost*" seperti pada zaman Daendels.

Dilihat sebagai kesatuan, Revolusi Daendels dan Raffles terdiri atas suatu transformasi total sistem pemerintahan Jawa. Reformasi ini cenderung menggantikan bentuk administrasi Asia dengan bentuk Eropa. Tujuan utamanya ialah menggantikan sistem feodal dengan organisasi modern. Pemerintahan langsung rakyat oleh pejabat pemerintah yang digaji harus menggantikan pemerintahan tidak langsung lewat perantara kepala-kepala daerah herediter.

Reorganisasi Raffles atas peradilan merupakan contoh bagus bagaimana maksud baiknya gagal karena ketidaksabarannya sendiri dan cara pikirnya yang skematik. Di sini dia membuat kesalahan dengan mencoba mencangkokkan lembaga khas Britania ketanah asing. Usaha memperkenalkan sistem juri, yang tidak dikenal di Belanda dan asing bagi jalan pikiran orang Jawa, adalah kegagalan. Sistem ini dihapuskan setelah Belanda berkuasa kembali. Penghapusannya tidak pernah disesali. Langkah lain untuk mewujudkan keadilan dan khususnya untuk memberikan perlakuan lebih baik kepada orang tahanan praktis tetap jadi reformasi di atas kertas karena tidak ada waktu dan uang yang cukup untuk menerapkannya, namun langkah itu patut diingat karena hal itu memperlihatkan pandangan terbaik Raffles. Tapi pencapaian administrasi Raffles yang terpenting adalah reformasi sistem pajak dan keuangan.

Lord Minto, sebelum meninggalkan Jawa dan mengalihkan administrasi kepada Raffles, telah meletakkan prinsip-prinsip reformasi pajak. Dia memerintahkan penghapusan segera semua penyerahan paksa dan kuota dan "perubahan mendasar dalam seluruh sistem hak milik dan hak guna tanah". Dan dia menambahkan: "Tapi pembahasan atas masalah ini pastilah akan tertunda, sampai penelitian yang dibutuhkan menjadi lebih lengkap."[17] Perintah ini mudah didekritkan, tapi tidak gampang dilaksanakan. Kalau penyerahan paksa dan kuota dihapuskan,

pemerintah kolonial akan kehilangan bagian penghasilannya yang di zaman Raffles adalah pilar tempat pemerintah bergantung. Hasil panen kebun-kebun kopi menumpuk di gudang-gudang, tapi walaupun pelabuhan-pelabuhan Jawa terbuka untuk pedagang dari banyak bangsa, tidak ada yang datang membeli produknya. Tidak ada lagi pasar untuk kopi setelah pernyataan Blokade Benua dari Napoleon dan pecahnya perang Britania-Amerika. Sistem penerimaan yang lama tidak bisa dihapuskan kecuali pajak baru diperkenalkan, dan ini, pada gilirannya, mencakup revisi kebijakan tanah Batavia. Ia juga menuntut diperkenalkannya suatu ekonomi uang di negeri tempat uang jarang ada dan selama berabad-abad setiap desa boleh dibilang hampir merupakan unit ekonomi swasembada. Kalau para petani harus membayar pajak dalam bentuk uang, mereka harus belajar bagaimana menabung sebagian dari penghasilan uang kontan mereka. Kalau gagal melakukannya, mereka mungkin sekali justru akan lebih bergantung pada perente uang Cina di bawah sistem "liberal" yang baru daripada yang pernah terjadi dalam sistem "feodal" yang lama.[18] Bagaimanapun juga, petani perlu belajar banyak hal, yang, dari sudut pandang *mereka*, hanya bermanfaat bagi pengumpul pajak. Untuk melawan reaksi akhir seperti itu di kalangan penduduk petani, Raffles ingin menggabungkan reformasi pajak dengan revisi radikal atas hubungan yang ada antara petani dan "bupati" Jawa di kabupaten mereka. Reformasi pajak menyediakan kesempatan bagus untuk menghapuskan klaim bupati atas dukungan material dan tenaga kerja gratis, tapi ternyata mustahil mengubah dalam semalam hubungan kuno yang didasarkan pada adat istiadat yang sudah berlaku berabad-abad ini. Kalau para "bupati" terus memanfaatkan hak-hak istimewa mereka, sistem pajak baru mungkin akan meningkatkan beban petani alih-alih menguranginya. Tidak ada yang bisa membayangkan apakah pendapatan dari pajak baru itu akan cukup untuk membiayai pemerintahan. Karena itulah, komite Belanda pada 1803 menolak gagasan-gagasan Dirk van Hogendorp tersebut. Dari sudut pandang finansial, reformasi

itu adalah lompatan ke dalam kegelapan. Raffles merasa harus mengambil risiko itu.

Dalam arsip Batavia, Raffles menemukan hasil suatu penelitian tentang kondisi hak milik tanah yang diperintahkan Daendels. Penelitian itu sangat tidak lengkap, karena itu Raffles memerintahkan penelitian kedua, yang lebih rinci. Dengan informasi yang diperoleh dengan cara itu, dia mendasarkan reformasinya. Raffles dan orang-orang yang bekerjasama dengannya jelas membuat banyak kesalahan dalam kesimpulan mereka dari bahan-bahan yang mereka kumpulkan, tapi kemudian, setelah seabad lebih riset ilmiah di bidang ini, para ahli dalam pokok bahasan ini tidak bisa sepakat mengenai butir yang sedang dipermasalahkan. Kekurangan paling besar dari laporan itu ialah bahwa ia tidak paham bahwa di bagian Jawa yang berbeda, pranata-pranata yang berada di bawah pengaruh faktor-faktor politik telah berkembang dengan cara berbeda. Khususnya di kabupaten-kabupaten yang selama berabad-abad telah diperintah oleh raja-raja Jawa yang despotik, kondisi hak milik tanah telah jauh melenceng dari pranata-pranata Jawa yang asli.

Tapi Raffles menemukan apa yang ia cari dalam laporan-laporan yang diserahkan kepadanya: suatu gambaran tentang kondisi sosial di kalangan orang Jawa yang mirip orang India di Benggala, yang membenarkan dia dalam memperkenalkan sistem pajaknya yang, bisa dimaklumi, mengikuti model yang dijalankan oleh Perusahaan India Timur Inggris di India. Raffles mengeluarkan dekrit berdasarkan teori bahwa semua hak milik tanah, bahkan seluruh negeri, sah dimiliki oleh penguasa berdaulat, yakni pemerintah Batavia, menurut adat istiadat Timur "bahwa tanah dianugerahkan kepada beberapa kelas kepala suku dan pejabat publik untuk sementara waktu atau selama Raja suka... bahwa kepemilikan nyata atas tanah terletak di tangan Raja, pendeknya bahwa tidak ada pihak mana pun yang berdiri di antara Penguasa berdaulat dan pengolah tanah yang punya hak milik yang sebenarnya."[19] Dalam dekritnya (15 Oktober 1813)

Raffles berkata: "Tanah-tanah pemerintah pada umumnya akan disewakan kepada kepala-kepala desa.... Seterusnya mereka akan menyewakan ulang tanah-tanah ini kepada para pengolah menurut pembatasan tertentu, dengan harga yang tidak menindas; dan hak semua penyewa di bawah Pemerintah akan dilindungi dengan seadil-adilnya, selama mereka terus menjalankan tanggungjawab mereka dengan setia."[20]

Sewa tanah itu sendiri ditetapkan menurut nilai tanah dan berkisar dari seperempat sampai setengah hasil panen. Seluruh sistem itu ditelurkan oleh Raffles dan Muntinghe menurut hukum pajak yang ada di Benggala. Tapi kondisi di Benggala dan Jawa berbeda dalam banyak hal dan di Jawa teori Raffles bisa berujung pada konsekuensi yang parah. Teori itu menganggap, misalnya, bahwa semua tanah yang tidak dibudidayakan berada langsung di bawah pemerintah dan bisa ia apakan saja, suatu hal yang jelas merupakan ketidakadilan bagi orang Jawa, yang menganggap wilayah tanah tak terolah sebagai tanah cadangan mereka (suatu fakta yang diketahui jelas oleh Muntinghe)[21] yang akan diolah bila jumlah penduduk meningkat. Kalau pemerintah memutuskan menjual tanah ini kepada petanam Eropa atau Cina, akan timbullah suatu kaum proletariat tak bertanah, dengan problem-problem sosial yang menyertainya, di desa-desa.

Lebih mudah menggariskan hukum-hukum sistem baru itu daripada menerapkannya. Sistem itu mengharuskan adanya survei menyeluruh atas sawah-sawah di Jawa. Karena penyewaan harus dilakukan berdasarkan kontrak, catatan sewa harus disimpan di setiap desa. Kepala desa diharuskan memberikan akun sewa yang jelas kepada tiap-tiap pengolah tanah dan memberikan tanda terima untuk setiap pembayaran. Semua ini harus dilakukan di negeri di mana praktis tidak ada satu pun petani, dan hanya sedikit kepala desa, yang melek huruf. Pada mulanya, diputuskan untuk "menyewakan" tanah itu (yaitu, menjajaki besar pajak tanah) lewat perantaraan kepala desa setempat. Setiap desa harus memilih seorang kepala, dan kepala desa ini bertugas memutuskan

pembagian beban pajak yang adil di kalangan penduduk desa. Metode ini dimaksudkan untuk menggantikan bupati aristokratik dengan kepala desa sebagai perantara administrasi di level lebih tinggi, yang ditangani orang Eropa, dan orang banyak. Tentu saja ia tidak menghilangkan kemungkinan pembebanan ilegal atas para petani. Walaupun hasil finansial tahun-tahun pertama sistem pajak baru itu ternyata bagus, Raffles memutuskan untuk langsung melangkah lebih jauh dalam reformasinya dan menetapkan kontak langsung, yang dianggapnya lebih baik, antara level lebih atas dari pemerintahan dan "orang biasa". Kepala desa dikurangi perannya jadi sekadar "pemegang buku" dan kontrak penyewaan harus dibuat langsung dengan petani. Hasil langkah ceroboh ini adalah bencana besar. Penghasilan sewa tanah jatuh sampai kurang daripada separuh dibanding yang diterima dengan metode pengumpulan sebelumnya. Walaupun prinsip sistem penyewaan tanah itu bagus, tapi hanya setelah pengorganisasian selama bertahun-tahun barulah sistem baru itu bisa berlaku sepenuhnya. Pada dasarnya ia lebih bermanfaat bagi orang banyak dibandingkan sistem lama, tapi pada mulanya dampaknya tampaknya bersifat menindas di banyak kabupaten.

Kesulitan finansial pemerintah Jawa juga menjadi penyebab inkonsistensi besar dalam reformasi Raffles. Dia tidak punya pilihan selain mengecualikan kabupaten-kabupaten Priangan yang memproduksi kopi dari sistem pajak barunya itu. Di sini dan di daerah-daerah hutan, produksi wajib dan penarikan pajak dalam bentuk tenaga kerja dilanjutkan, seperti pada masa Kompeni, walaupun di bawah kontrol administrasi yang lebih baik. Akhirnya, Letnan Gubernur Britania ini pun mengikuti metode penjualan tanah pemerintah, yakni daerah-daerah yang sudah dibudidayakan berikut para penduduk desanya, kepada pemodal Eropa atau Cina. Raffles dituduh memakai kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri. Ini memungkinkan Mayor Jenderal R. R. Gillespie, perwira komandan pasukan Britania di Jawa, mengajukan sebagian argumen terbaiknya ketika dia memutuskan

menyampaikan protes mengenai Letnan Gubernur itu kepada para pejabat di Kalkuta. Dari awal sudah ada perbedaan pendapat yang besar dan iri hati di antara keduanya, dan begitu Lord Minto, pelindung Raffles, mundur dari kedudukan Gubernur Jenderal di India, Gillespie maju ke depan dengan tuduhan-tuduhannya.[22]

Dewan Direktur Perusahaan India Timur di London kurang puas dengan administrasi Raffles. Sang Gubernur tidak berhasil menyeimbangkan anggaran koloni baru itu—yang bukan sepenuhnya akibat kesalahannya—sehingga Perusahaan India Timur tak tertarik mempertahankan satu koloni yang memakan ongkos begitu besar setiap tahun. Pada 1815 Raffles dipanggil pulang, dan John Fendall ditunjuk menjadi penerusnya.[23] Sebagai administrator Raffles tidak berhasil, tapi masa selingan Britania dalam sejarah Jawa telah membersihkan sebagian besar debu yang sudah lama melekat sejak zaman Kompeni Belanda, dan Raffles adalah orang yang sudah membuka jendela dan pintu sehingga angin segar bisa bertiup masuk ke rumah tua itu. Zaman berikutnya lebih mengenal Raffles sebagai penulis *History of Java* (*Sejarah Jawa*) daripada sebagai gubernur yang memperkenalkan sistem sewa tanah.

Minat Raffles terhadap bahasa dan adat istiadat Indonesia sangat kuat. Dia membaktikan banyak waktunya dan banyak surat-menyuratnya pada hal-hal yang murni etnologis. Membangkitkan kembali Masyarakat Kesenian dan Keilmuan Batavia yang sudah mati suri adalah salah satu tindakan pertamanya. Dia menuliskan beberapa karya untuk Perkumpulan itu, yang kemudian bersama karya ahli-ahli Indologi lain dari Britania dan Belanda diterbitkan dalam publikasi Perkumpulan itu, *Verhandelingen*. Dia mendorong studi botani, dan penjelajah Amerika Dr. Thomas Horsfield menjadi salah satu temannya. Karya Raffles sendiri, *History of Java*, ditulis di Inggris, dalam banyak hal adalah karya yang mengesankan.[24] Seperti karya Marsden, *History of Sumatra* (*Sejarah Sumatra*), ia dimaksudkan sebagai penggambaran lengkap pulau itu: iklimnya, penduduknya, peninggalan masa

silamnya, dan sejarahnya. Buku Marsden jelas adalah model yang diikuti Raffles, tapi sementara sejarawan Sumatra itu pertama-tama adalah seorang ilmuwan, penulis *History of Java* pada saat yang sama mengejar tujuan lain. Demikianlah isinya menjadi campuran menawan deskripsi ilmiah, apologi, dan apa yang di zaman modern akan disebut pelaporan cerdas. Laporan itu jauh dari netral, tapi, karena brilian dan menarik, memberikan publisitas kepada Jawa dan rakyatnya di seluruh dunia berbahasa Inggris untuk pertama kali dalam sejarah. Lady Raffles, dalam penghargaan yang pantas terhadap karya almarhum suaminya, suka melebih-lebihkan pentingnya tulisan-tulisannya. Mengenai satu surat yang ditulis Raffles kepada Lord Minto pada 1811, dia berkata: "Pembaca harus ingat bahwa Surat-Surat ini ditulis pada masa ketika orang hampir tidak tahu apa-apa, entah sastranya ataupun orangnya, tentang negeri-negeri di negeri Timur ini", seolah-olah tidak pernah ada seorang François Valentijn yang menulis berjilid-jilid folio besar dengan informasi rinci, atau seorang George Rumphius dan Justus Heurnius. Tapi memang karya Raffles jauh lebih mudah dibaca dan ditulis dengan lebih baik daripada tulisan para pendahulunya, dan dia menuliskan karyanya dengan simpati besar pada penduduk asli Indonesia yang dalam sebagian besar karya-karya sebelumnya sayang sekali tidak ada.

Salah satu orang yang bekerjasama dengan Raffles dalam penulisan buku itu adalah John Crawfurd, yang menjabat sebagai Menteri pemerintah Batavia yang berurusan dengan raja-raja Jawa. Crawfurd menulis *History of the East Indian Archipelago* (*Sejarah Kepulauan Hindia Timur*) dalam tiga jilid, karya yang jauh kurang rinci dibandingkan karya Raffles, tapi ditulis dengan semangat besar dan dengan sentimen humanitarian dan kemarahan membara, yang sedang musim waktu itu, atas ketidakadilan yang dilakukan orang-orang lain.[25] Bertahun-tahun kemudian Crawfurd merevisi *History*-nya dan menerbitkannya kembali dalam bentuk *A Descriptive Dictionary of the Indian*

Islands and Adjacent Countries (*Kamus Deskriptif Kepulauan Hindia dan Negeri-Negeri Sekitarnya*) yang mengandung banyak sekali informasi yang masih bermanfaat.

Ketika John Fendall ditunjuk sebagai Letnan Gubernur di Jawa, dia tahu bahwa posisinya bersifat sementara, karena pemerintah Britania telah memutuskan akan mengembalikan Jawa kepada Belanda yang telah dipulihkan. Pada November 1813, setelah pertempuran Leipzig, Belanda memberontak terhadap dominasi Prancis. Pangeran Oranje, Willem VI, kembali dan mula-mula menyandang gelar "Pangeran Berdaulat", lalu, pada 1815, gelar "Raja Belanda Serikat". Pada 13 Agustus 1814 wakil-wakil Britania Raya dan kerajaan baru itu setuju atas butir-butir isi suatu perjanjian yang akan mengembalikan semua koloni Belanda yang dulu berada di bawah kedaulatan Belanda pada 1803, kecuali Cape Colony dan Demarara.[26] Ini mengecualikan Ceylon, tapi mengharuskan pengembalian semua pos dan wilayah di Kepulauan Indonesia. Di sini hanya Bengkulu, yang sudah menjadi milik Britania sejak akhir abad ke-17, tetap berada di bawah Perusahaan India Timur Inggris. Pemulihan yang sebenarnya tertunda akibat kembalinya Napoleon dari Elba. Tapi pada 19 Agustus 1816 bendera Belanda sekali lagi berkibar di Batavia.

Untuk mengambil alih pemerintahan di Kepulauan Indonesia Raja Willem mengirimkan tiga Komisaris Jenderal. Kepala komite itu adalah C. Th. Elout. Anggota lain ialah A. Buyskens, seorang komandan angkatan laut, dan G. Baron van der Capellen, yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal dan akan tinggal di Indonesia setelah kerja Komite itu selesai. Pejabat-pejabat Britania memang menyerahkan roda pemerintahan tapi dengan setengah hati, dan mencari alasan untuk menunda dengan harapan kosong bahwa pemerintah di London akan mengubah pendiriannya. Penundaan itu memperumit tugas Komite yang sudah sulit itu. Hal itu juga memberikan waktu bagi Raffles, kini Sir Stamford Raffles, untuk kembali ke Indonesia sebagai Gubernur Bengkulu sebelum mereka menyelesaikan tugas mereka, dan begitu kembali dia langsung

KEPULAUAN INDONESIA PADA ABAD KE-19
Wilayah yang langsung berada di bawah pemerintahan Belanda pada 1815.
Angka menunjuk tahun ketika kontrol Belanda ditegakkan.
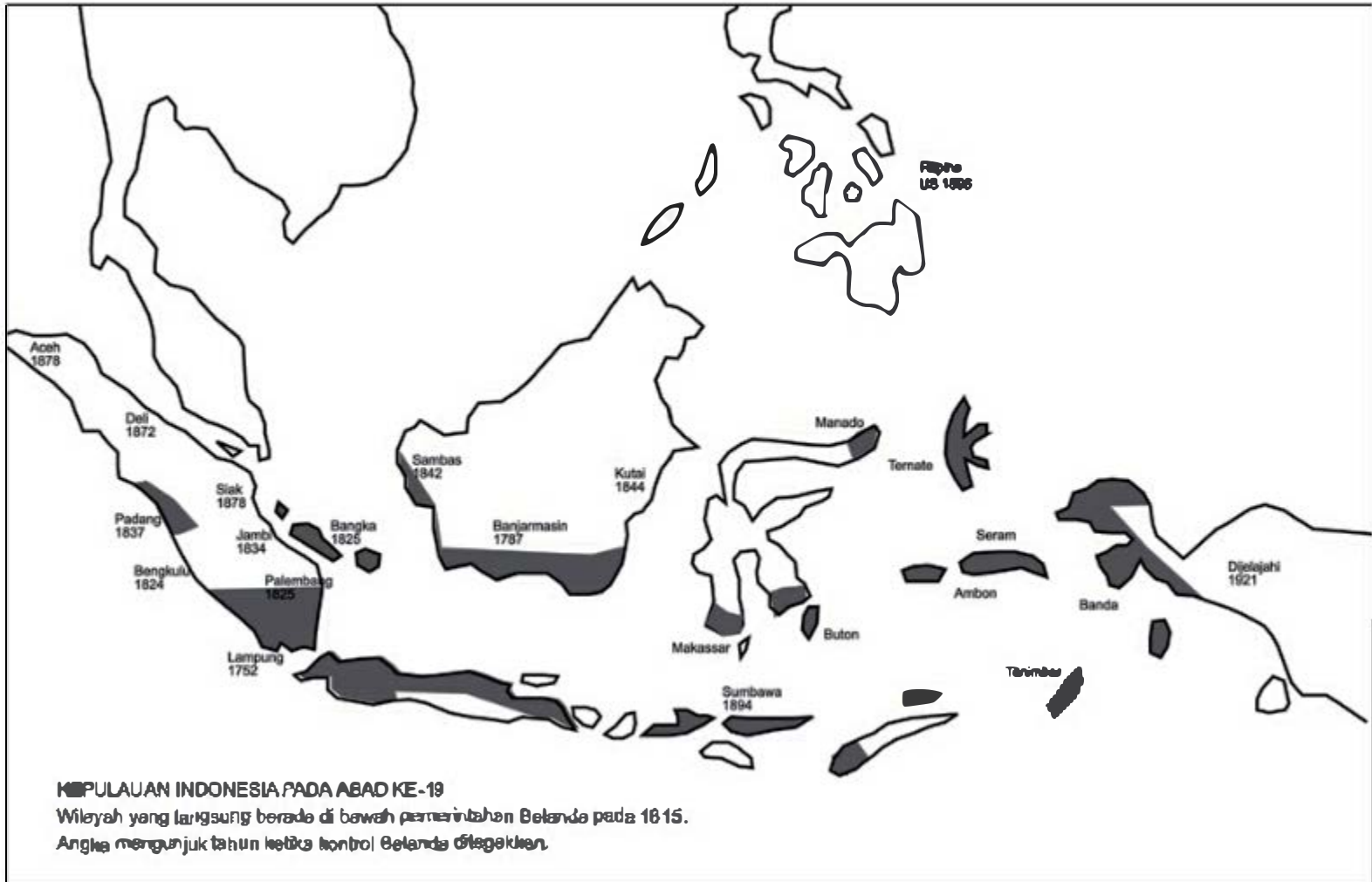
memulai pergulatan diplomatik melawan Belanda.

Para Komisaris itu menemukan pemerintahan koloni itu dalam keadaan kacau.[27] Raja Willem dari Belanda tidak terikat oleh perjanjian untuk menerima atau melanjutkan reformasi apapun yang diperkenalkan Britania. Walaupun secara teoretis ada kebebasan untuk kembali kesistem Kompeni, dia memutuskan bahwa telah tiba waktunya Kepulauan Indonesia diperintah demi "kesejahteraan umum", yakni kesejahteraan bukan hanya untuk orang Belanda tapi juga orang Indonesia. Begitu tiba di Batavia, Para Komisaris yang telah diperintah seperti itu dengan khidmat menyatakan bahwa sudah menjadi tujuan satu-satunya dari Raja Belanda, "untuk mempromosikan kepentingan semua rakyatnya, tanpa kecuali".[28]

Tidak ada alasan untuk meragukan ketulusan para Komisaris tersebut dalam mengumumkan prinsip perilaku pemerintah ini, tapi adalah perkara lain apakah bisa diterapkan dalam praktik, dan kalau bisa, apakah *memang akan* dijalankan. Kesulitan yang hampir tidak tertanggulangi muncul sendiri. Fondasi negara Belanda harus didirikan, baik di Eropa maupun di Asia. Di kedua belahan muka bumi ini pemerintah sangat butuh uang. Sebagian besar kekayaan nasional telah hilang selama periode Napoleon, dan sejauh itu, tidak ada sumber penghasilan baru yang ditemukan. Budidaya kopi tidak banyak rusak di bawah langkah-langkah reformasi Raffles yang terburu-buru itu, tapi sejumlah besar panen tropis telah bertumpuk di gudang-gudang Perusahaan India Timur Inggris selama perang dengan Napoleon dan ketika ekspor ke Benua Eropa berlangsung lagi, pasar menjadi jenuh dengan barang. Para Komisaris tersebut merasa memiliki produk pertanian dalam jumlah raksasa yang mereka yakini berharga, dan dari penjualannya mereka berharap mengisi kembali perbendaharaan kolonial, tapi, dengan kecewa, mereka menemukan bahwa tidak ada pasar untuk produk itu.

Dengan keputusannya yang terburu-buru untuk memperkenalkan tahap kedua reformasi pajaknya sebelum tahap pertama

terselesaikan, Raffles telah membuang semua perolehan finansial yang didapatkan lewat penggantian sistem penyerahan paksa dengan sistem sewatanah. Dengan begitu, gudang-gudang Batavia makin lama makin penuh sementara kotak-kotak keuangannya kosong melompong seperti sebelumnya.

Walaupun begitu Para Komisaris memutuskan bahwa sistem pajak Raffles lebih adil dan lebih praktis daripada sistem VOC yang sudah bangkrut itu. Itulah sebabnya sistem sewa tanah dipertahankan.

Raffles yakin bahwa metode pemajakannya akan merangsang petani Jawa melakukan aktivitas ekonomi yang lebih besar sementara dia bebas memilih cara untuk memperbaiki keadaan. Dengan coba-coba penduduk desa akan menemukan apakah lebih menguntungkan buat mereka memproduksi tanaman komersial untuk dijual di "pasar dunia" atau memanfaatkan semua tanahnya untuk memproduksi tanaman pangan. Tapi para petani tidak terlalu memikirkan perkara itu. Mereka menghabiskan hampir semua sumber daya mereka untuk memproduksi padi, antara lain karena mereka sangat membutuhkannya, dan juga karena padi diperlukan untuk tawar-menawar di pasar lokal, serta juga karena nenek moyang mereka menanam padi dan bukan yang lain, dan dengan demikian hal itulah yang harus mereka lakukan. Tapi peningkatan produksi beras tidak banyak berfaedah bagi pemerintah kolonial yang sedang mencari solusi untuk masalah-masalah keuangan. Walaupun ada hasil finansial yang cukup bagus pada tahun-tahun pertama sistem sewa tanah itu, Raffles terpaksa bergantung pada berbagai cara yang kurang "liberal" untuk meningkatkan penghasilan pemerintah kolonial dan bahkan walaupun begitu tetap saja administrasinya membebani Perusahaan India Timur Inggris sampai jutaan rupiah. Pemerintah Belanda yang baru tersebut dihadapkan dengan begitu banyak kesulitan keuangan sehingga ia tidak dapat memberikan bantuan keuangan kepada administrasi kolonial sampai sejauh yang dilakukan Perusahaan Inggris. Dalam jangka panjang, kebijakan

ekonomi baru itu pastilah akan merangsang jiwa kewiraswastaan di kalangan para petani Jawa, dan mengakibatkan peningkatan penghasilan pemerintah tapi, bahkan kalau itu terjadi, senjang waktu yang besar harus dijembatani dan dalam periode-antara ini administrasi kolonial harus disokong oleh pemerintah di negeri leluhur Belanda. Konsep semacam ini akan mendapatkan pendukung 100 tahun kemudian tapi bukan begitu pandangan orang pada awal abad ke-19. Pemerintah Eropa dan kelas menengah makmur yang mendukungnya punya pandangan yang lebih berbau bisnis atas masalah itu, dan menetapkan teori bahwa kebijakan kolonial yang baik haruslah melayani kepentingan ekonomi baik bagi yang memerintah maupun yang diperintah, tapi tentu saja yang pertamalah yang diprioritaskan.

Bagaimana mencapai hal ini? Di sini ada pendapat berbeda-beda. Kecenderungan pemikiran konservatif merujuk pada kebijakan ekonomi terencana. Pemerintah harus mempromosikan produksi barang-barang yang dibutuhkan di negeri leluhur, atau barang yang dapat segera dijual di pasar dunia. Negeri leluhur harus memproduksi apa yang paling dibutuhkan di koloni. Dalam praktik awal abad ke-19, hal ini berarti pertukaran tekstil produksi Eropa dengan bahan mentah dan pangan produksi luar negeri. Pokoknya pemerintah harus menjamin bahwa koloni akan membiayai administrasinya sendiri *dan* menyumbang pada biaya pemerintah negeri leluhur sebagai kompensasi untuk "perlindungan" koloni itu terhadap kemungkinan serangan atau untuk biaya pertahanan militer.

Mengenai prinsip-prinsip administrasi kolonial itu ada pandangan umum yang sama. Tapi ada pendapat berbeda-beda mengenai metode terbaik untuk sampai ke hasil yang diinginkan itu. Banyak orang liberal percaya bahwa solusi dapat ditemukan kalau persaingan ekonomi bebas diizinkan. Modal Barat harus didukung untuk berinvestasi dalam kegiatan pertanian skala besar. Orang Indonesia harus bebas membeli dan menjual tanah sesuka hati, dan sistem kuno kepemilikan komunitas

harus dihapuskan. Dengan kata lain, mereka ingin menerapkan prinsip ekonomi "*laissez-faire*"*. Ahli kolonial lain dengan keras menentang penerapan kebebasan ekonomi mutlak bagi individu-individu. Mereka beralasan bahwa ini akan menyebabkan terusirnya petani miskin dari tanah mereka; akan membuat mereka jadi miskin, korban kesewenang-wenangan kapitalisme asing. Gubernur Jenderal Van der Capellen punya pendapat seperti ini. Dia berkata: "Langkah-langkah, yang dilihat dari jarak 5.000 kilometer tampaknya liberal, di sini terbukti sangat tidak liberal dampaknya." Kalau Para Komisaris mulai menjuali tanah luas kepada pengusaha non-Indonesia, mereka akan memasukkan sistem kapitalis di mana pemilik tanah kaya akan mendominasi penduduk asli. Orang Jawa tidak bisa bersaing dengan mereka dalam membeli tanah, karena bukan hanya mereka tidak memiliki modal yang diperlukan, tapi seluruh gagasan membeli tanah di bawah hukum Eropa tidak masuk akal dalam konsep mereka mengenai hak milik tanah.

Pemukim Jawa secara ekonomi lemah, pemilik tanah secara ekonomi kuat, dan suatu kontrak, termasuk kontrak tenaga kerja antara kedua pihak ini hanya akan menguntungkan pemilik tanah. Dengan demikian, seluruh sistem kontrak bebas akan berakhir, lewat jalan berputar—pada kembalinya keadaan kepemilikan lahan agraria abad ke-18, ketika pengolah tanah Jawa berada dalam keadaan "corvéable et taillable à merci". "Kalau saya harus berasumsi," kata Van der Capellen, "bahwa di Belanda Liberalisme dimengerti sebagai perlindungan terhadap pemilik tanah Eropa dengan merugikan penduduk asli, dan bahwa kepentingan penduduk asli sama sekali diabaikan untuk memberikan kesempatan kepada segelintir spekulator dan avonturir untuk berhasil dalam rancangan mereka, maka saya harus menyatakan diri sebagai seorang yang sangat anti-Liberal."[29]

Karena itu, mereka berusaha menemukan cara lain untuk memperbaiki pertanian Jawa. Mereka mendirikan satu departemen pemerintah baru, yakni "Pertanian, Seni, dan Pendidikan".

Jelas bahwa di sini yang diinginkan bukan sekadar kombinasi administratif "Pertanian" dan "Pendidikan". Tugas departemen baru itu ialah memperbaiki metode pertanian dengan menyebarluaskan pendidikan umum dan profesional, dan dengan mendukung riset di bidang botani. Direktur pertama departemen ini ialah Profesor Caspar Reinwardt. Profesor Reinwardt lahir di Prusia dan semasih kanak-kanak bermigrasi ke Belanda. Di situ dia belajar botani dan menjadi profesor di Universitas Amsterdam. Taman Botani Buitenzorg yang terkenal itu adalah ciptaannya.

Perbaikan pendidikan dasar di Indonesia adalah masalah sulit. Kompeni telah membatasi kegiatan pendidikannya hanya di Batavia dan beberapa tempat di Maluku. Pendidikan dasar, sampai Revolusi Prancis, biasanya adalah urusan Gereja. Di Jawa ada di tangan para guru agama Islam.[30] Guru-guru itu hanya menerima upah kecil untuk pengajaran mereka, dan mereka tidak mengajar orang Jawa dengan bahasa dan huruf-huruf mereka sendiri, tapi bahasa Alquran. Mereka biasanya mengajar bagaimana mengaji Alquran dari teks Arab tapi sering kali juga dari terjemahan Melayu. Sejumlah kecil anak Jawa, terutama dari kelas bangsawan, menerima pengajaran baca tulis dalam bahasa Jawa. Tradisi sastra kerajaan Jawa kuno dan imperium Mataram masih hidup di keraton-keraton Yogya dan Surakarta. Pemerintah Kompeni tidak pernah repot memikirkan warisan budaya Jawa, tangannya terlalu sibuk berusaha mendapatkan cukup pemasukan dari perdagangan lada dan rempah-rempah. Gubernur Jenderal pertama yang menaruh minat terhadap tradisi Jawa ialah Herman Daendels. Pada 1808 dia mengeluarkan ordinansi yang menetapkan tugas bupati-bupati Jawa di provinsi-provinsi pantai, yang berisi:

> Para bupati harus memastikan bahwa pengajaran diberikan kepada anak-anak dan kepada mereka diajarkan adat istiadat, hukum dan praktik keagamaan orang Jawa. Untuk itu sekolah-sekolah akan didirikan di komunitas-komunitas utama di setiap kabupaten.

Dekrit ini adalah salah satu ordinansi Daendels yang bertujuan baik, tapi tidak pernah diterapkan karena periode Daendels duduk di posisinya terlalu singkat bahkan untuk sekadar memulainya. Bagaimanapun, kemungkinan besar hal ini hanya bisa diterapkan dengan cara ala kadarnya karena tidak ada guru yang tersedia meskipun sekolah-sekolah dibangun.[31]

Daendels adalah murid sejati Revolusi Prancis (yang dia saksikan sebagai saksi mata yang antusias ketika hidup dalam pelarian di Prancis) dan keprihatinannya terhadap pendidikan untuk semua orang sungguh nyata, tapi motif di belakang minatnya terhadap sekolah kadang kala ditimbulkan oleh motif yang agak reaksioner. Sejarawan pendidikan di Hindia Belanda mengatakan bahwa Daendels memerintahkan mantan sultan Cirebon untuk menyediakan tiga sekolah tari untuk anak perempuan,[32] dengan harapan "mengalihkan perhatian penduduk wilayah yang sedang bergolak itu pada adat istiadat kuno mereka dan hiburan populer serta mengalihkan perhatian mereka dari agitasi oleh tukang bikin kacau politik". Gubernur Jenderal itu juga mendorong penduduk "Eropa", khususnya di Batavia, mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah tempat mereka akan diajar bicara Belanda. Raffles tidak punya minat besar untuk memperluas pengajaran. Komisaris Jenderal melihat masalah itu lebih serius. Begitu Reinwardt diangkat, undang-undang pendidikan umum dikeluarkan, diikuti setahun kemudian (1819) dengan instruksi umum untuk sekolah-sekolah. Reinwardt telah diperintahkan oleh raja untuk memperbaiki sekolah-sekolah di koloni itu menurut prinsip-prinsip yang ketika itu berlaku di Belanda. Jadi tidaklah heran bahwa undang-undang dan ordinansi ditiru dari peraturan sejenis di Belanda. Tujuan pendidikan umum adalah bahwa anak-anak harus diajar "prinsip-prinsip moral yang berlaku pada semua umat manusia". Bahasa pengajaran harus Belanda dan kurikulum dibentuk sedemikian rupa sehingga ia terutama melayani kebutuhan penduduk asal Eropa. Konsekuensi tak terhindarkan ialah bahwa sedikit saja orang non-Eropa yang mau memanfaatkan

kesempatan untuk mengirim anak-anak mereka untuk dididik di sekolah-sekolah ini, walaupun Komisaris Jenderal itu, dengan cara yang sangat liberal, membuka sekolah-sekolah itu untuk murid dari segala ras dan agama (pasal 100 dari undang-undang 1818).

Van der Capellen juga membuktikan diri sebagai liberal sejati dengan menolak bersikap doktriner dalam menerapkan prinsip "nonsegregasi". Tidaklah sulit memperkirakan bahwa sekolah-sekolah yang ada tidak akan menarik banyak murid Indonesia. Karena itu dia memerintahkan penyelidikan terhadap "sistem sekolah" penduduk asli dengan harapan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan modern dan menjadikannya, paling tidak untuk sementara, medium untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak. Keputusan mengesankan ini menetapkan prinsip bahwa anak-anak Indonesia harus menerima pengajaran berdasarkan, dan dengan jiwa, budaya mereka sendiri. Keputusan ini disusul dengan keputusan lain, yang memerintahkan perencanaan "untuk menyebarkan pengetahuan tentang bahasa-bahasa Melayu, Jawa, dan lain-lain di kalangan orang Eropa". Hasil-hasil upaya berwawasan luas ini sangatlah sedikit, tapi nama Van de Capellen patut diingat sebagai seorang Gubernur Jenderal yang mengerti, paling tidak dalam prinsip, kebutuhan akan bentuk pendidikan Indonesia di negeri yang didiami orang Indonesia.

Pada tahun-tahun eksploitasi ekonomi atas Indonesia oleh pemerintah Belanda, yang terjadi kemudian adalah bahwa seluruh rancangan itu tersingkirkan. Tapi Profesor Reinwardt punya banyak urusan penting lain yang harus dia kerjakan. Salah satu seksi departemennya adalah Kesehatan Umum. Dalam kapasitas ini dia berusaha memberantas cacar. Penyakit ini menyebarkan kengerian hebat di kalangan orang banyak sehingga desa-desa dikosongkan begitu ada satu saja kasus cacar yang muncul di dekatnya. Pemerintah akhirnya berhasil meyakinkan orang akan kegunaan vaksinasi, dan penyebaran penyakit itu pun tertahan.

Berbagai masalah mereka tersebut sudah cukup merepotkan

Komisaris tanpa campur tangan terus-menerus dari Raffles yang tak pernah diam itu, yang kembali ke Kepulauan Indonesia sebagai gubernur pos dagang Britania kecil di Bengkulu. Sir Thomas (gelar itu diberikan kepadanya sebagai hiburan atas kecaman para Direktur Perusahaan India Timur) bukanlah orang yang puas hanya mengurusi tanaman lada dan kebun-kebun kecil pohon cengkeh di Bengkulu. Akibatnya, dia membaktikan semua waktu dan energinya untuk mencari-cari lubang dalam perjanjian 1814 yang akan memungkinkannya merebut sebagian besar Kepulauan Indonesia dari Batavia. Dia segera berpendapat bahwa di bawah perjanjian itu Belanda tidak punya klaim atas Sumatra dan Kalimantan. Kalau dia dapat mencegah mereka menduduki pulau-pulau itu, dia mungkin bisa memperolehnya untuk raja Britania.

Raffles tiba di Bengkulu pada Maret 1818. Tindakan pertamanya ialah mengunjungi pos-pos kecil yang dimiliki Perusahaan India Timur Inggris di sepanjang pantai barat Sumatra. Dalam perjalanan ini dia sekaligus mengadakan kunjungan singkat ke pedalaman Minangkabau, di situ dia menyepakati perjanjian-perjanjian dengan kepala-kepala suku lokal yang berhasil dia bujuk untuk meminta perlindungan Britania terhadap kemungkinan campur tangan Belanda. Untuk memastikan akses bebas ke laut bagi protektoratnya yang baru itu, dia menolak menyerahkan kota Padang kepada Belanda, walaupun hak mereka menduduki kembali pelabuhan itu tidak terbantahkan berdasarkan perjanjian 1814.

Dua bulan setelah tiba di Bengkulu, Raffles mengirimkan satu detasemen kecil pasukan ke ujung selatan Sumatra untuk menduduki satu desa di pantai Selat Sunda. Belanda mengibarkan bendera mereka berdampingan dengan bendera Britania, dan secara resmi memprotes di Kalkuta. Atas perintah Kalkuta, Raffles disuruh meninggalkan posisi yang didudukinya itu. Dia protes keras, tapi sia-sia. Waktu itu dia sudah melakukan ekspedisi lain. Muntinghe, dalam kapasitasnya sebagai komisaris Batavia,

berusaha membereskan masalah ini di Palembang, di mana Sultan yang memerintahkan pembunuhan massal atas orang Belanda pada 1811 masih berkuasa. Ketika Muntinghe bernegosiasi, satu pasukan kecil Britania masuk ke kota, langsung ke istana putra Sultan, dan mengibarkan bendera Britania. Mereka datang dari Bengkulu, menyeberangi Sumatra dari barat ke timur (orang Eropa pertama yang melakukannya), dan berpura-pura bahwa Sultan muda itu minta bantuan mereka. Muntinghe protes, dengan tegas menyuruh mereka menurunkan bendera Britania, dan, akhirnya, memerintahkan penangkapan seluruh kelompok itu dan mengirim mereka ke Batavia. Sekali lagi Raffles memprotes, tapi sekali lagi pemerintah di Kalkuta mendukung Batavia, karena Palembang jelas-jelas termasuk dalam wilayah yang harus dikembalikan berdasarkan perjanjian 1814.

Dalam surat-suratnya ke Kalkuta dan London, Raffles berdalih bahwa pemerintah Britania tidak boleh mengizinkan kesatuan politik Sumatra dipecah-belah. Seluruh pulau itu, katanya, harus diletakkan di bawah perlindungan Britania. Dia tidak memperoleh dukungan untuk gagasannya itu. Tapi dia tidak menyerah. Perjanjian 1814 tampaknya tidak jelas mengenai pulau Belitung yang memproduksi timah. Tidak ada tentara atau perwira Britania di pulau itu; bahkan, ia diduduki satu pasukan kecil Belanda-Indonesia; tapi Raffles (kali ini didukung oleh pemerintah London), mempertahankan klaimnya. Raffles mendorong sejawatnya di Pulau Penang menunda penyerahan Malaka dan mengirimkan satu ekspedisi kecil ke Kalimantan bagian barat untuk memantapkan klaim atas wilayah itu. Dia juga mengajukan klaim atas Banjarmasin, pos yang jelas ada di tangan Belanda pada 1803, tapi telah dikosongkan Daendels karena alasan militer.

Telah kita lihat bagaimana Komisaris Jenderal menganggap baik untuk mengusir teman Raffles, Mr. Alexander Hare, dari koloninya dekat Banjarmasin. Kini mereka segera mengirimkan satu pasukan untuk menduduki kembali Pontianak di Kalimantan barat. Ekspedisi lain berlayar ke Malaka. Komandan ekspedisi

ke Malaka tidak menunggu sampai menerima izin Britania untuk mendarat, tapi, dengan mengklaim wilayah itu sebagai milik Belanda berdasarkan perjanjian, langsung mendaratkan pasukannya. Sementara itu orang Britania di Pulau Penang campur tangan dalam suatu perang suksesi di Aceh dan mendukung klaim seorang pedagang kaya di kota itu atas takhta kesultanan. Raffles memutuskan bahwa sudah waktunya bertindak tegas, jangan sampai dia kalah dalam pertempuran diplomatik di seluruh wilayah itu. Dia bergegas ke Kalkuta dan menjelaskan dengan rinci kepada Gubernur Jenderal Lord Moira akan perlunya mempertahankan suatu tempat berpijak di Selat Malaka demi keamanan perniagaan Britania dari India ke Cina. Dia berdalih bahwa pemerintah Belanda bermaksud memulihkan sistem monopoli dan menutup perairan di timur itu dari semua bangsa lain, suatu kebijakan yang tidak mungkin mereka terapkan sekalipun mereka mau. Dari Kalkuta dia bergegas ke Pulau Penang dan mengirimkan ekspedisi lewat Selat Malaka untuk mencari tempat yang sesuai untuk mendirikan satu pusat dagang dan pelabuhan-antara untuk pelayaran ke Cina. Dia berencana menduduki Johor, tapi lagi-lagi Belanda telah mendahuluinya, dan telah memperbarui perjanjian 1785 mereka dengan Sultan. Sejawat Raffles lalu menyarankan kepulauan Karimun di Selat Malaka, tapi ternyata kurang cocok untuk maksud mereka. Sekali lagi Raffles menengok ke kepulauan Riau, yang merupakan bagian kesultanan Johor, dan membeli pulau Singapura dari Sultan Johor. Di sana bendera Britania dikibarkan pada 29 Januari 1819.[33] Dari Singapura Raffles bergerak ke Aceh, tempat dia menyepakati suatu perjanjian dengan Sultan. Raffles mencabut dukungan terhadap pengejar takhta yang dipilih para sejawatnya di Pulau Penang, dengan hasil bahwa Sultan yang baru berjanji memberi Perusahaan India Timur Inggris posisi istimewa di wilayahnya dan tidak memberikan akses kepada semua orang Eropa kecuali pejabat-pejabat Perusahaan itu.

Begitulah Singapura didirikan, tapi Belanda sebenarnya punya hak atas wilayah Singapura. Kalau mereka mau menuntut hak itu,

dan kalau mereka bertindak cepat seperti dalam kasus-kasus lain, kecil kemungkinan Raffles akan berhasil. Saat itu pemerintah Britania sudah sangat jengkel dengan intrik-intrik Raffles yang tak habis-habis. George Canning, Menteri Luar Negeri Kerajaan Britania setelah 1822, menulis kepada Raffles pada suatu kesempatan:

> Saya tidak bisa menyangkal bahwa kegiatan ekstremmu dalam mengorek-ngorek pertanyaan-pertanyaan sulit dan kesukaanmu dengan seenaknya membuat pemerintahmu terlibat, tanpa pengetahuan atau mandat mereka, dalam langkah-langkah yang mungkin saja mendatangkan perang pada mereka tanpa persiapan, pernah pada suatu ketika memaksa saya untuk mengucapkan apa yang ada dalam pikiran saya kepadamu dengan kata-kata yang tidak begitu halus.[34]

Namun Raffles berharap membuat Singapura berkembang dalam beberapa tahun, yang akan membuat pemerintah Britania mengubah pikiran, dan dia berhasil. Pelabuhan Singapura dinyatakan bebas cukai dan menjadi pusat perkapalan Indonesia dan Eropa. Beberapa pejabat Belanda dengan sia-sia mendorong Gubernur Jenderal Van der Capellen mengikuti contoh itu di Malaka.[35] Tapi Batavia membiarkan kesempatan tersebut lewat, dan membatasi diri pada protes di ataskertasalih-alih mengambil tindakan dengan mengibarkan bendera Belanda di samping bendera Britania. Raffles, yang bersemangat karena keberhasilan ini, meneruskan "eksperimen"-nya dan menduduki pulau Nias dekat pantai barat Sumatra, dan menyatakan bahwa penduduknya meminta perlindungan terhadap pedagang-pedagang budak dari Aceh (sekutu Raffles hari sebelumnya!). Kali ini dia langsung diperintahkan untuk menarik mundur tentara Britania dan juga menyerahkan Padang kepada Belanda. Dengan menggerutu dia menurut. Tapi dengan penunjukan Canning, situasi politik di Britania berubah menguntungkannya. Pemerintah London ingin tetap memiliki permukiman Singapura yang menjanjikan itu,

tapi dengan dasar perjanjian yang terhormat dengan Belanda. Pemerintah Belanda segera setuju dengan solusi kompromi karena, apa lagi yang bisa ia perbuat?

Di Sumatra, Sultan Palembang melancarkan perang terhadap Belanda, perang yang berakhir dengan pengusirannya dan penaklukan kesultanan itu menjadi wilayah yang diperintah langsung oleh Belanda. Di Minangkabau, kepala-kepala desa meminta bantuan Belanda di Padang untuk melawan petempur-petempur suatu sekte Muslim baru, yakni para "Padri".[36] Sekte ini didirikan beberapa orang Melayu yang telah naik haji ke Mekah dan di sana berkenalan dengan ajaran Wahabi, yang ketika itu untuk pertama kali berkuasa di Arabia. Pulang ke kampung halaman, mereka melihat kesalahan pada pranata-pranata desa bangsa mereka. Suku-suku Melayu di Minangkabau sampai hari ini bertahan pada bentuk matriarkhal organisasi keluarga, yang sangat tidak sesuai dengan perintah Alquran. Para pembaharu yang gigih ini juga menolak konsumsi tembakau dan opium, serta banyak lagi kebiasaan lokal. Mereka memulai suatu kampanye reformasi, menghimpun pengikut dalam jumlah besar, dan mulai menyebarkan keyakinan mereka dengan pedang. Sebagian besar haji Sumatra berlayar ke Mekah lewat Pedir. Karena itulah mereka dikenal sebagai "orang-orang Pedir", yang oleh orang Belanda, mengikuti hukum linguistik *lucus a non lucendo,* dihubungkan dengan kata Portugis "Padre" atau imam. Perlawanan kepala-kepala puak Melayu, yang kekuasaannya berakar pada pranata-pranata tradisional, didukung oleh tentara Belanda. Orang Batak yang non-Muslim, yang negerinya (terletak di utara Minangkabau) sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang Muslim, juga memberikan dukungan. Perang yang terjadi kemudian berlangsung beberapa tahun dan berakhir dengan kekalahan para "Padri". Pada saat yang sama pemberontakan lokal muncul di Maluku karena penduduk takut sistem monopoli dan pembatasan produksi lama akan diberlakukan lagi.[37] Setelah pemberontakan itu dihancurkan, Van der Capellen bergegas mengunjungi kepulauan Maluku. Dia

menerbitkan satu ordinansi yang memerintahkan penghapusan semua pembatasan. Harga yang lebih adil untuk panen dijanjikan kepada para petani. Pemerintah masih memberlakukan untuk sementara sistem monopoli, tapi Van der Capellen secara pribadi mendesak raja Belanda untuk juga mengakhiri sisa-sisa sistem Kompeni itu.

Semua pertikaian dengan Britania Raya terselesaikan pada 1824 dengan perjanjian kedua yang disepakati di London.[38] Singapura telah tumbuh menjadi emporium yang penting dan Britania bermaksud tetap memiliki kota itu dan wilayah di sekitarnya, tapi, karena mengakui klaim Belanda atas wilayah yang sama, pemerintah Britania mengusulkan tukar-menukar Semenanjung Malaya dengan daerah Bengkulu, klaim Britania atas Belitung, dan hak-hak yang diperoleh Raffles di Aceh pada 1819. Lagi pula, Britania berjanji tidak akan lagi campur tangan di Sumatra atau pulau-pulau lain di Kepulauan Indonesia. Orang Belanda berjanji menghormati kemerdekaan Aceh, tapi sekaligus bertekad melindungi pelayaran di sekitar ujung utara Sumatra dari perompak-perompak Aceh, dua janji yang sulit dipegang pada saat yang sama.

Perjanjian 1824 mengakhiri kekuasaan Britania atas Bengkulu. Raffles kembali ke Inggris, tempat dia meninggal dua tahun kemudian pada ulang tahunnya yang ke-45. Dia tidak berhasil mendirikan pemerintahan Britania di Kepulauan Indonesia, tapi kota Singapura yang ia dirikan menjadi emporium utama di Asia bagian selatan.

BAB 13

JOHANNES VAN DEN BOSCH DAN KAUM LIBERAL

PERIODE jabatan Van der Capellen sangat tidak memuaskan bagi Pemerintah di Belanda.[1] Utang publik Hindia Belanda meningkat pesat. Produksi tanaman ekspor menyusut. Pekebun keturunan Eropa patah arang terhadap Gubernur Jenderal itu karena kebijakannya mengenai kepemilikan tanah. Kaum Liberal di Belanda menyalahkannya karena kebijakan "reaksioner"-nya, dan raja menyalahkannya karena parahnya keuangan koloni itu. Selama tujuh tahun administrasinya, Van der Capellen menghabiskan 24 juta gulden melebihi pendapatan pemerintah. Harga jatuh secara tiba-tiba di pasar kopi yang menyebabkan pemerintah Batavia kehilangan penghasilan besar. Terakhir, Van der Capellen, yang berniat baik, mengambil langkah-langkah yang ternyata malah menimbulkan pecahnya perang besar di Jawa. Dia dipanggil pulang pada 1824 dan menyerahkan roda pemerintahan pada 1826, ketika penerusnya, Du Bus de Gisignies, seorang bangsawan Belgia, tiba.[2] Du Bus memerintah selama empat tahun. Keempat tahun itu disibukkan oleh perang melawan Dipanegara, pangeran Yogyakarta.

Dalam karir Dipanegara, kisah Raja Airlangga, petapa yang

duduk di takhta itu, tampaknya berulang lagi.[3] Dipanegara adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwana III dan berharap menggantikan ayahnya, tapi penguasa Batavia lebih suka menyerahkan takhta kepada adiknya. Dipanegara mengundurkan diri dari istana dan tampaknya mencari penghiburan dengan mengucilkan diri. Mengelana di seluruh negeri, bertapa sendirian di gua-gua suci, Dipanegara pelan-pelan menguatkan diri sendiri untuk melakukan perjuangan menentukan melawan orang-orang Belanda. Metode persiapan mentalnya bersifat pra-Islam, tapi dia menyatakan perangnya sebagai "Jihad" melawan orang kafir, untuk mengusir mereka. Reputasinya di kalangan umum terus-menerus naik. Cerita-cerita beredar tentang keris gaib yang jatuh dari langit di kaki Pangeran itu. Legenda "Ratu Adil" yang akan datang untuk memimpin orang Jawa hidup kembali.

Dipanegara mau saja berperang, tapi dia butuh dukungan paling tidak sebagian dari kaum bangsawan. Prospeknya bagus, karena ada ketidakpuasan umum yang tersebar di seluruh kerajaan. Setelah Daendels dan Raffles menyusutkan wilayah para raja, makin sulitlah bagi Susuhunan dan Sultan untuk menyediakan sumber penghasilan yang memadai dalam bentuk tanah dan pekerja bagi sanak saudara mereka yang banyak itu. Untuk menggantikan pengurangan wilayah tanah yang diberikan pada mereka, para bangsawan itu berusaha mendapatkan keuntungan lebih besar per desa. Mereka bisa melakukan itu dengan menyewakan sawah dan pekerja kepada wiraswasta Cina dan Eropa. Di sebagian lahan perdesaan yang disewakan ini, para petani diuntungkan oleh perubahan itu, karena mereka mendapatkan penghasilan lebih tinggi, tapi, sangatlah wajar bahwa mereka tidak suka *dipaksa* untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Pemerasan orang Cina yang menggarap pajak tol jalan raya adalah sumber lain ketidakpuasan. Ada cerita-cerita bahwa mereka memaksa para ibu Jawa yang membawa anak-anak di punggung mereka membayar tol, karena mereka membawa "barang"! Orang Belanda dibenci karena mereka penguasa asing dan karena itu

dianggap sumber utama segala pemerasan ini. Orang Cina bukan hanya dibenci, mereka juga dimusuhi. Tapi tetap saja orang banyak tidak mau berperang sampai kaum bangsawan memberikan tanda untuk memberontak. Tapi para bangsawan itu adalah mereka yang beruntung dari kehadiran Belanda dan Cina, dan mereka ragu-ragu untuk menghentikan hubungan menguntungkan ini walaupun mereka sangat tidak suka campur tangan Batavia dalam urusan mereka.

Kemudian Gubernur Jenderal Van der Capellen mengambil keputusan yang sangat menentukan. Setelah perjalanan inspeksi ke Jawa bagian tengah, dia memerintahkan pembatalan hak sewa lahan perdesaan yang dikelola orang asing atas dasar bahwa para pemegang sewa telah memakai tenaga rodi ilegal. Dia mendekritkan bahwa pemegang sewa punya hak ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemilik. Tapi para pemilik ini adalah penguasa-penguasa yang ingin dia lindungi. Tidak heranlah bahwa orang Jawa tidak mengerti motivasi dekrit Van der Capellen, dan mereka tidak bisa percaya bahwa itu dilakukan bukan untuk menentang mereka, tapi menentang para wiraswasta asing. Para bangsawan tersebut, karena kehilangan sumber penghasilan penting, kini siap memberontak, dan rakyat mengikuti penguasa mereka. Dipanegara "mundur ke pegunungan" dengan sejumlah pengikutnya. Orang-orang bangkit dan membunuhi sejumlah pemungut pajak jalan Cina. Kaum bangsawan Yogyakarta bergabung dengan pemberontak, kecuali Paku Alam dan sebagian pengikutnya yang setia. Tapi di Surakarta Susuhunan dan hampir semua bangsawan tetap setia.

Perang berlangsung lima tahun.[4] Dipanegara menghindari pertempuran berhadap-hadapan di mana dia tidak akan sanggup menghadapi pasukan pemerintah. Dia mengandalkan taktik gerilya dan terbukti dia sungguh ahli, walaupun masih kalah hebat dari keponakannya Sentot, putra seorang pangeran yang gugur dalam pemberontakan melawan Daendels. Sangat beruntung baginya bahwa orang banyak bersimpati kepadanya, bahkan di

daerah negeri itu yang tidak secara terbuka bangkit melawan pemerintah. Di lain pihak, Belanda hanya punya pasukan kecil. Pelan-pelan pasukan ini diperkuat dengan bala bantuan prajurit milisi dari wilayah-wilayah Susuhunan dan bupati-bupati yang setia. Susuhunan sendiri berbaris menentang pemberontak untuk menunjukkan kesetiaannya kepada pemerintah. Para raja Madura menambahkan bantuan, dan sebagai penghargaan atas dukungan tersebut mereka menerima gelar Sultan. Pasukan tambahan direkrut di Sulawesi bagian utara. Toh tambahan kekuatan dari Eropa harus diperoleh, karena tingkat kematian serdadu tinggi. Korban penyakit–kolera menghantam negeri itu pada tahun-tahun yang sama–jauh lebih banyak daripada yang gugur oleh musuh. Para petani yang malang, tidak bisa memanen padi karena kelompok-kelompok gerilya dan serdadu pemerintah, sangat menderita. Ketika harapan para pemberontak pupus, Sentot berbalik kepada Belanda dengan semua orangnya. Dipanegara tidak punya apa-apa lagi dan harus menyerah. Dia menawarkan perundingan dan diundang mengunjungi kantor pusat tentara Belanda. Di situ dia dikhianati dan ditawan lalu dikirim ke pembuangan di Sulawesi. Selama pertempuran itu, hampir 15.000 serdadu pemerintah gugur, di antaranya 8.000 orang Eropa. Jumlah orang Jawa yang mati akibat perang, oleh penyakit dan kelaparan selain oleh pedang, diperkirakan 200.000. Angka ini pastilah kurang daripada sepersepuluh yang gugur di medan tempur.

Setelah perang, perbatasan Surakarta dan Yogyakarta digariskan dengan jelas. Baik Susuhunan maupun Sultan menerima subsidi tahunan dalam bentuk uang kontan sebagai ganti sebagian dari wilayah mereka yang diambil alih oleh Batavia. Susuhunan, yang tetap setia, protes bahwa dia diperlakukan tidak adil, tapi tidak timbul perlawanan lebih jauh, dan perjanjian 1830 tetap berlaku sampai akhir pemerintahan Belanda di Indonesia. Bagi Batavia tentu saja perang itu berakibat parah. Keadaan keuangan pemerintah yang sudah payah jadi hancur. Sesuatu yang

lebih buruk lagi terjadi. Pada 1830 itu juga, ketika perang Jawa berakhir, perang pecah di Eropa. Pemberontakan Belgia terhadap pemerintahan Raja Willem I menimbulkan konflik bersenjata. Selama sembilan tahun perang berlangsung. Keuangan Belanda kosong melompong sampai ke dasar-dasarnya, di Belanda dan di Jawa. Dalam keadaan darurat ini Johannes van den Bosch menawarkan cara mendapatkan penghasilan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan keuangan kerajaan itu.[5]

Van den Bosch sudah pernah datang ke Indonesia pada masa sebelum Daendels, ketika dia tidak beruntung menimbulkan kemarahan tuan itu dan terpaksa meninggalkan Jawa. Dalam perjalanan pulang dia ditawan Britania, dan menghabiskan dua tahun di Inggris, tapi ketika pada 1813 Eropa bangkit melawan dominasi Prancis, Van den Bosch bergabung dengan gerakan nasional di Belanda. Dia memegang posisi militer tinggi di negara Belanda baru, dan ketika pensiun dia mengabdikan waktunya untuk masalah-masalah sosial ekonomi. Dia sangat berminat menciptakan kesempatan kerja untuk ribuan orang miskin yang ketika itu memadati kota-kota Belanda. Untuk para penganggur ini tampaknya tidak ada harapan untuk memperoleh masa depan lebih baik. Van den Bosch mengorganisasikan suatu "Masyarakat Budiman" untuk memukimkan orang miskin kota itu di wilayah pertanian yang belum terbangun di Belanda bagian timur laut. Ia diambil dari pekerjaannya oleh raja yang memercayakan kepadanya suatu misi khusus ke Hindia Barat. Setelah pulang dia menerima perintah untuk pergi ke Hindia Timur dan mereorganisasi struktur ekonomi di wilayah itu.

Van den Bosch tidak percaya pada prinsip liberal bahwa orang akan selalu mencari keunggulan ekonomi jika mereka bebas melakukannya. "Biarkan petani Jawa bebas menangani urusannya sendiri," kata Muntinghe, "dan dia akan menghias perbukitan dengan sawah-sawahnya." Van den Bosch tidak yakin pada teori ini. Dia juga tidak percaya pada prinsip lain yang dikemukakan Nederburgh 50 tahun sebelumnya, ketika dia membahas

pandangan Hogendorp, bahwa petani Jawa terlalu malas untuk mengejar keuntungannya sendiri. Dia yakin bahwa penduduk Kepulauan Indonesia, betapapun inginnya mereka, terlalu tidak berpengetahuan untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa bantuan. Mereka harus dibimbing oleh penguasa, dan mereka harus *diajar* untuk bekerja, dan kalau tidak mau belajar, mereka harus dipaksa bekerja. Membandingkan standar penghidupan petani Jawa dengan kaum papa Belanda, Van den Bosch berkesimpulan bahwa penghidupan petani Jawa jauh lebih baik. Karena itu, kalau pemerintah "mengorganisasikan" pertanian Jawa untuk mengangkatnya ke tingkat lebih tinggi, ia sekadar melaksanakan kewajibannya. Di samping berbagai keuntungan lain, penerapan rencana ini akan memampukan pemerintah menyeimbangkan neraca anggarannya, baik di Eropa maupun di Hindia. Dari teori-teori ini muncullah apa yang disebut "Sistem Kultur".[6]

Van den Bosch kini meyakinkan rajanya bahwa dia akan menemukan cara untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor di Jawa sampai senilai 20 juta gulden setahun. Langkah-langkah khusus akan memberikan pedagang Belanda dan pelayaran Belanda kesempatan pertama untuk menangani hasil panen. Dia tidak bermaksud meletakkan seluruh beban memproduksi kekayaan ini di pundak petani Jawa. Sebaliknya, dia berharap membayarkan bagian mereka dari keuntungan usaha itu. Karena Van den Bosch sekali lagi menjadikan pemerintah Hindia Timur Belanda promotor langsung usaha pertanian, dia disebut pendukung konservatif ekstrem yang sengaja berusaha kembali ke sistem tiranis VOC. Ini tidak tepat, karena VOC memerintahkan penyerahan hasil panen tanaman ekspor tertentu sebagai upeti. Ia sekadar memberitahu para bupati berapa banyak upeti, dan dari jenis apa, yang harus mereka bayarkan, tapi ia jarang mengurusi langsung penanganan produksi itu sendiri. Pada zaman Kompeni, pemerintah Batavia memerintahkan pembatasan atau perluasan produksi, tapi tidak peduli oleh siapa hasil panen diproduksi dan bagaimana pengaturan tenaga kerjanya. Semua ini menjadi

perhatian pemerintah di bawah Sistem Kultur tersebut.

Di bawan sistem ini pemerintah menuntut entah pembayaran sewa tanah (biasanya dua perlima hasil panen) atau pemakaian seperlima tanah sawah untuk membudidayakan tanaman yang ditentukan oleh sang Direktur Kultur. Diketahui bahwa tenaga kerja yang dipakai dalam pembudidayaan itu tidak boleh lebih daripada jumlah yang diperlukan untuk memproduksi padi di petak yang sama besarnya. Kalau panen yang diproduksi nilainya lebih tinggi daripada nilai sewa tanah sebelum sistem itu diperkenalkan, kelebihannya harus dibayarkan kepada para petani. Sebagian penduduk desa bisa dibebaskan dari kewajiban bekerja di ladang pemerintah tapi dapat diminta bekerja di pabrik-pabrik di mana hasil panen, gula dan nila misalnya, dipersiapkan untuk diekspor. Pabrik-pabrik ini diorganisasikan dan diatur oleh orang Eropa dan Cina yang menerima uang muka dari pemerintah, dan yang menerima bayaran tetap untuk menangani hasil panen. Untuk semua kerja di pabrik-pabrik ini atau untuk mengirimkan produk, penduduk desa harus dibayar. Secara teoretis, semua kesepakatan mengenai sawah ladang, tenaga kerja, dan pengiriman dibuat berdasarkan kontrak bebas antara pejabat pemerintah dan kepala desa. Karena pihak-pihak yang berkontrak agak tidak setara dalam kekuasaan dan kekuatan ekonomi, sedikit saja pilihan bebas yang tersedia bagi pihak yang lemah.

Dalam praktik, sistem itu memperkenalkan pajak baru, yang akan dibayarkan dalam bentuk rodi. Hasilnya ialah eksploitasi Jawa seolah-olah ia adalah perkebunan besar milik pemerintah. Sistem itu menuntut reformasi administrasi. Sebelumnya dalam buku ini telah kami sebutkan pengangkatan "sersan kopi". Pada zaman Kompeni petugas-petugas ini diperintahkan untuk mengontrol produksi dan penyerahan kopi di daerah-daerah Priangan. Jabatan resmi mereka menjadi *opziener*, yakni inspektur. Tentu saja para petugas ini memperoleh tugas baru setelah usaha pemerintah diperluas. Karena pemerintah juga sangat butuh bantuan para bupati untuk mengatur tenaga

kerja lokal, Gubernur Jenderal Van den Bosch melalui reformasi administrasinya memberikan tempat penting kepada para bupati dan "*opziener*" tersebut. Para bupati memperoleh kembali atribut kepangkatan dan hak-hak herediter mereka. Gelar resmi *opziener* diubah menjadi "pengontrol", dan mereka diperintahkan bukan hanya mengurusi pertanian pemerintah, tapi juga mengawasi administrasi para bupati dan bawahan mereka.[7] Sekali sebulan bupati mengumpulkan para "wedono" atau camat. Para wedono pun mengadakan pertemuan bulanan dengan asisten wedono dan kepala desa, sementara asisten wedono mengumpulkan kepala desa setiap minggu. Para pengontrol diminta menghadiri sejumlah pertemuan ini dan dengan demikian terus mengikuti perkembangan yang sedang terjadi di Jawa. Mereka juga berhak mengontrol kelompok-kelompok penduduk yang tidak termasuk dalam administrasi bupati, yakni orang Cina dan "Asia Asing" lain. "Asia Asing" adalah istilah resmi untuk menamai penduduk Kepulauan non-Indonesia yang lahir di Asia, seperti Cina, India, dan Arab.[8] Jumlah dan pengaruh orang Arab semakin bertambah sejak awal abad ke-19, ketika imigrasi dari Arabia bagian selatan, khususnya Hadramaut, mulai meningkat.

Gula, kopi, dan nila adalah produk utama yang disediakan Jawa selama periode Sistem Kultur itu. Kopi, sebagian besar diproduksi di Priangan, tumbuh di tanah pemerintah di luar sawah penduduk. Karena itu produksinya sebetulnya bukanlah bagian dari sistem itu, karena tidak diproduksi orang sebagai pembayaran pajak. Tapi Van den Bosch telah menerapkan kembali monopoli produk, dan sebagian besar pemasukan dari sistem itu sebetulnya dihasilkan dari produk yang satu ini. Biaya produksi semua tanaman lain begitu tinggi, walaupun memakai rodi, sehingga pemerintah sulit meneruskan produksi. Bekerja di bawah sistem ini, orang Jawa hanya memproduksi sepertiga dari apa yang bisa mereka hasilkan dengan kerja bebas. Salah satu alasan kegagalan ini tentu saja adalah kurangnya pengalaman para pengontrol dalam urusan-urusan yang murni pertanian. Pemerintah mencoba mening-

katkan minat terhadap produksi dengan membolehkan mereka mendapatkan persentase tertentu dari hasilnya (hak serupa dianugerahkan kepada bupati), tapi langkah ini hanya membuat para pengontrol dan bupati makin memperbesar pembebanan mereka pada penduduk, dan meningkatkan pemerasan yang menindas. Namun, kopi mengompensasi banyak kegagalan lain, dan bagian terbesar dari kerugian yang ditimbulkan percobaan pertanian yang gagal ditanggung oleh orang Jawa.

Sistem itu bukan hanya mendatangkan pemasukan besar bagi perbendaharaan pemerintah, tapi juga berhasil mempromosikan perniagaan dan perkapalan Belanda. Sampai 1830 raja Belanda sia-sia mencoba membuat perkapalan Belanda mampu bersaing dengan Britania dalam perdagangan Asia. Sampai taraf tertentu, tarif protektif agak membantu barang dagangan Belanda bersaing di pasar Indonesia, tapi produk-produk Kepulauan Indonesia ditangani sebagian besar oleh pedagang asing. Setelah Sistem Kultur diperkenalkan, kesepakatan dibuat antara Pemerintah Belanda dan Perusahaan Dagang Belanda, yang didirikan Raja.[9] Semua produk yang diperoleh pemerintah di bawah Sistem Kultur diserahkan kepada perusahaan ini untuk dibawa ke Amsterdam. Dalam beberapa tahun penjualan produk-produk tropis di kota itu telah menjadi penting lagi seperti yang pernah terjadi di zaman VOC. Perusahaan Dagang itu pada gilirannya mempromosikan pemakaian perkapalan Belanda. Armada pedagang Belanda dengan cepat menjadi yang ketiga terbesar di dunia, yang hanya dilampaui oleh Britania dan Prancis.

Hasil finansial Sistem Kultur tersebut dikenal luas dan sangat memuaskan bagi Belanda.[10] Antara 1831 dan 1877 perbendaharaan Belanda menerima 823 juta gulden dari Hindia. Sebagian dari uang ini dipakai untuk melunasi utang kolonial. Sisanya dipakai untuk membayar utang Belanda dan biaya perang dengan Belgia, serta untuk pembangunan rel kereta api dan pekerjaan umum. Karena pada tahun-tahun itu anggaran tahunan Belanda tidak lebih daripada 60 juta gulden, kontribusi Indonesia dengan

rata-rata 18 juta gulden setahun sangatlah besar. Begitu sistem itu mulai membuahkan hasil, kecenderungan manusiawi untuk menarik untung sebanyak mungkin terlihat dengan sendirinya di Kementerian Koloni di Belanda, dan selama hampir 20 tahun belanja pemerintah di Hindia diciutkan sampai sekecil-kecilnya, tanpa berpikir tentang keperluan pendidikan atau politik, untuk meningkatkan pengiriman uang tahunan dari Batavia ke Eropa.[11] Tapi sudah sejak 1850 defisiensi Sistem itu menjadi jelas, dan pemerintah mulai melunakkan regulasinya. Liberalisme, ketika itu dominan di Belanda, menentang Sistem itu sebagai inkonsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi dari arus pemikiran liberal.

Reaksi menentang Sistem Kultur yang mulai terjadi sekitar 1848 terungkapkan dalam sejumlah buku di mana Sistem itu dan semua konsekuensinya dikutuk total. Karena reaksi ini, dampak sistem itu atas kesejahteraan dan kondisi sosial penduduk Jawa kini sulit dipastikan. "Sistem Kultur," tulis seorang sejarawan Britania modern, "diikuti oleh reaksi Liberal, dan penulis-penulis aliran ini menggambarkannya dengan warna paling gelap; sejak itu ia tidak pernah dikaji ulang secara kritis, sehingga usaha untuk meneliti dampaknya atas keadaan sosial ekonomi adalah seperti berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi terhadap suatu ajaran murtad hanya lewat sisa-sisa tulisan kaum ortodoks."[12]

Kekurangan dan konsekuensi buruk sistem itu cukup jelas dan telah ditekankan oleh banyak penulis. Hanya tiga atau empat persen dari tanah subur di Jawa yang dipakai untuk menanam tanaman yang dibutuhkan, tapi transportasi produk itu menimbulkan tekanan beban yang besar pada orang banyak. Bila terjadi gagal panen, penduduk harus bertanggungjawab untuk kerugian; suatu penyalahgunaan kekuasaan yang berlawanan dengan perintah awal Van den Bosch. Penduduk desa sering kali harus berjalan berkilo-kilo meter sebelum mencapai ladang tempat mereka bekerja untuk pemerintah. Pembuatan nila sering membuat penduduk seluruh desa meninggalkan rumah berbulan-bulan. Pekerjaan di pabrik gula sangat melelahkan. Berlawanan dengan maksud Van den

Bosch, sewa tanah juga dituntut dari orang yang sudah membayar pajak dengan bekerja di bawah Sistem Kultur tersebut. Jadi beban nyata yang ditaruh di pundak orang banyak berada jauh di atas beban yang pada mulanya diperkirakan dalam ordinansi awal. Tambahkan pada hal ini pemerasan-pemerasan oleh sejumlah bupati dan pejabat pemerintah serta perlakuan keras pemilik pabrik gula Cina, dan pemungut pajak tol jalan Cina serta pajak pasar, maka kita mendapatkan gambaran kondisi di Jawa sekitar 1850 yang jauh dari cerah. Pengontrol-pengontrol dari Demak, Grobogan, dan beberapa daerah di Cirebon melaporkan bahwa kelaparan mengancam penduduk daerah mereka karena sawah mereka dipakai untuk menanam tanaman ekspor.

Kemunduran yang berkaitan dengan sistem itu tidak mencegah semakin meningkatnya penduduk Jawa. Pengimporan barang asing juga meningkat, yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai perbaikan keadaan ekonomi orang Jawa secara keseluruhan. Wilayah tanah yang dibudidayakan meluas dengan cepat. Tampaknya dampak sistem itu tidak selalu, dan di setiap tempat, separah yang dikatakan sebagian pengkritik. Dalam kenyataan, akibatnya sangat berbeda-beda di wilayah berbeda di pulau itu. Kalau keuntungan netto dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan orang Indonesia, sistem itu mungkin akan dipuji dengan hangat oleh penulis modern. Antara lain, administrasi Batavia akan lebih tidak menuntut dalam penerapan sistem itu dan akibatnya ia akan lebih tidak menindas. Dapat kita katakan bahwa hampir semua penulis pokok bahasan ini sepakat bahwa praktik pengiriman surplus anggaran kolonial ke Belanda menyebabkan tuntutan pemerintah leluhur meningkat, dan bahwa tekanan berat dibebankan oleh pemerintah itu atas pemerintah kolonialnya. Tapi, tidak ada artinya membahas apa yang mungkin bisa terjadi, kalau ini atau itu dilakukan. Dalam kenyataan, sistem itu, karena didasarkan pada kerjasama erat kelas penguasa Eropa dan Jawa, cenderung menghambat perkembangan sosial dan politik di kalangan orang Jawa.

Salah satu hasil yang lebih menguntungkan adalah diperkenalkannya banyak tanaman ekspor baru. "Arahan Kultur" tersebut ditekankan secara keras antara 1830 dan 1860, untuk bereksperimen dengan tanaman asing. Eksperimen-eksperimen itu mendatangkan keuntungan langsung yang kecil tapi kemudian memberikan sumbangan besar bagi kemakmuran pulau itu, ketika suatu sistem ekonomi kolonial yang lebih liberal diperkenalkan.[13]

Eksperimen yang paling penting adalah eksperimen yang memperkenalkan pohon teh. Teh adalah barang dagangan yang sangat menguntungkan sejak akhir abad ke-17. Ia diimpor langsung dari Cina. Sudah lama dianggap bahwa hanya Cina dan Jepang-lah produsen teh di dunia. Pada 1825, seorang perwira Britania menemukan pohon teh di Assam, tapi selama bertahun-tahun daun dari pohon ini dianggap tidak cocok untuk dijadikan minuman teh. Pada 1826, benih teh diimpor ke Jawa dari Jepang dan ditanam di Taman Botani Buitenzorg. Hasil yang lebih baik diperoleh ketika J. Jacobsen, ahli teh dari Perusahaan Dagang Belanda, mengimpor benih dan pohon dari Cina, tempat dia mempelajari pembudidayaan dan penyiapan teh selama enam tahun. Pada 1832 dia kembali ke Jawa ditemani beberapa pekerja Cina yang ahli. Eksperimen dengan produksi teh dilakukan di 13 kecamatan di Jawa. Permulaan suatu kultur baru selalu sulit dan mahal, dan pemerintah tidak berhasil membuat kultur teh menguntungkan. Karena itu, kebun teh dipindahtangankan kepada pihak swasta, dan pada 1860 Direktur Kultur memutuskan menghentikan semua partisipasi pemerintah dalam kultur baru itu. Para petanam swasta tidak lebih berhasil daripada pemerintah, dan kultur teh tidak maju-maju sampai 1873 ketika pohon teh dari Assam diperkenalkan. Varietas ini tumbuh jauh lebih subur dalam iklim Indonesia daripada teh Cina, dan pelan-pelan semua kebun yang ditanami teh Cina ditebang dan digantikan dengan pohon teh Assam. Sebelum perang Pasifik, Jawa dan Sumatra memproduksi hampir 70.000 ton teh setahun, atau 18 persen dari ekspor dunia dari komoditas ini.

Produk lain yang, walaupun tidak diperkenalkan, kemudian dianggap menguntungkan oleh Sistem Kultur adalah tembakau. Tembakau diperkenalkan ke Asia oleh Spanyol lewat Filipina, dan dikenal di Indonesia pada akhir abad ke-16, tapi VOC tidak pernah tertarik mendukung produksinya. Tapi orang Indonesia segera kecanduan tembakau dan memproduksi jumlah yang memadai untuk konsumsi dalam negeri. Karena kualitasnya tidak setinggi yang dituntut orang Eropa, "Direktur Kultur" akhirnya memutuskan mengirimkan seorang ahli ke Kuba untuk mempelajari kemungkinan reintroduksi tanaman itu. Hasil eksperimen pertama tidaklah memuaskan. Misi kedua ke Kuba pada 1854 tidak lebih berhasil, dan pada 1864 pemerintah memutuskan menyerah dalam urusan kultur itu yang selama itu telah lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Tapi hampir pada saat yang sama ketika pemerintah menghentikan eksperimennya, pihak swasta berhasil memasukkan tanaman tembakau di Sumatra bagian utara, Deli baru.[14] Di sini usaha itu terbukti sukses besar. Ketika periode Sistem Kultur hampir usai, dan Perusahaan Dagang Belanda mulai mengubah kegiatannya menjadi bank yangmemberikan subsidi padaperusahaan kolonial, ia menyediakan modal yang berhasil membantu mengubah Deli dari daerah hutan menjadi negeri besar dan makmur.

Produksi lada tidak bisa ditingkatkan dengan tanam paksa, dan produksi kayu manis, dimasukkan dari Ceylon (Sri Lanka), hanya memberi hasil seadanya. Eksperimen dengan sutra tidak lebih berhasil. Kapas, yang ditanam dalam jumlah kecil oleh orang Indonesia sejak zaman kuno, memberikan hasil lumayan hanya di daerah Palembang. Ketika penduduk Jawa bertambah, dan produksi beras tampaknya tidak bisa menjawab tuntutan yang makin bertambah akan pangan, pemerintah memutuskan mempromosikan pembudidayaan ubi kayu, yang dapat ditanam sebagai tanaman kedua di sawah. Pohon ubi kayu dikenal di Indonesia, karena dimasukkan dari Amerika oleh Spanyol (atau Portugis), tapi varietas yang tumbuh di Jawa berkualitas rendah.

Karena itu pemerintah mengimpor jenis lain dari Amerika dan berhasil membujuk orang Jawa untuk menanamnya di samping padi, walaupun ia tetap kurang penting. Dari pantai barat Afrika kelapa sawit dimasukkan pada 1848, tapi sampai awal abad ke-20 ia dimanfaatkan hanya untuk tujuan dekoratif. Lalu suatu industri penting dikembangkan untuk pengolahan produk itu, dan pada 1930-an ekspor produk-produk kelapa sawit meningkat sampai hampir satu juta ton.

Hasil-hasil yang lambat tapi sangat bagus membuat pemerintah Hindia Belanda mencoba memperkenalkan pohon cinchonadan membuat kina. Nilai medistanaman ini telah dikenal selama hampir dua abad, tapi Amerika Selatan tetap menjadi satu-satunya pusat produksi. Harga tetap tinggi, dan kualitas buruk, sehingga proyek memulai perkebunan di negeri tropik lain menggiurkan. Pada 1852 pohon cinchona pertama dibawa ke Jawa dari Paris melalui taman botani Leiden. Perlu waktu 13 tahun penuh sebelum benih subur pertama dapat diperoleh dari tanaman ini. Pemerintah tidak menunggu hasil eksperimen ini, tapi pada 1854 mengirimkan salah satu pejabat Institut Botani Buitenzorg ke Amerika Selatan. Utusan ini, J. K. Hasskarl, seorang Jerman yang bekerja untuk Belanda, kembali ke Jawa dengan 75 pohon cinchona, yang menjadi stok dasar perkebunan pertama pemerintah. Beberapa tahun kemudian Hasskarl menyerahkan pengaturan perkebunan ini kepada mantan rekan sejawatnya, Franz W. Junghuhn, dan di bawah pengawasannya perkebunan itu mulai membuahkan hasil pertama.[15] Tapi butuh 20 tahun lagi sebelum kina Jawa dapat dijual di pasar dunia.

Produksi naik dari 22 ton pada 1875 menjadi 500 ton pada 1885, dan 1.000 ton pada 1895. Pada abad ke-20 Jawa memproduksi lebih daripada 90 persen produksi total dunia. Ia tiba-tiba kehilangan posisi menguntungkan ini ketika suatu pengganti untuk kina alami ditemukan para ilmuwan semasa perang yang terakhir.

Dengan demikian, Sistem Kultur itu harus disyukuri karena

memperkenalkan beberapa tanaman baru bernilai ekonomis, dan manfaat yang diperoleh dari keberhasilan ini agak mengimbangi beban yang ditindihkan atas mereka oleh sistem ini.

Aspek khas periode Sistem ini adalah keengganan pemerintah Batavia untuk campur tangan dalam urusan Indonesia di luar Jawa kecuali sangat diperlukan. Kegiatan kolonial Belanda, yang terkonsentrasi di Jawa hampir seabad sebelum 1830, terus berlangsung demikian selama 40 tahun sesudahnya. Akibat kebijakan itu terlihat nyata, karena perbedaan besar dalam pembangunan ekonomi antara Jawa dan pulau-pulau lain terjadi, walau tentu saja tidak sepenuhnya, antara lain akibat kebijakan pemusatan kegiatan ini. Dari narasi kita, jelas bahwa dari zaman paling kuno Jawa sudah lebih maju daripada pulau-pulau lain, dengan kekecualian beberapa daerah di Sumatra. Namun, fakta bahwa jumlah penduduk Jawa, yang mungkin dua kali lipat Sumatra pada akhir abad ke-18 dan naik sampai lima kali lipat pada abad ke-20, pasti juga disebabkan keprihatinan besar pemerintah kolonial terhadap urusan Jawa yang membuat pemerintah dengan ketat memelihara perdamaian di antara penduduk pulau itu. Pulau-pulau lain di Kepulauan Indonesia tidak begitu penting untuk Batavia pada pertengahan abad ke-19. Perompakan masih merajalela di semua perairan Indonesia. Satu demi satu ekspedisi pembersihan dikirimkan untuk menghadapi perompak Tobelo di Maluku, para raja di pantai timur Kalimantan, Aceh, dan bahkan Moro di Filipina, yang secara teoretis adalah rakyat Spanyol. Joseph Conrad menggambarkan dunia petualangan yang asing ini dalam novel-novelnya.

Salah satu tokoh menonjol di dunia semacam itu adalah orang Inggris, James Brooke.[16] Perwira Perusahaan India Timur Inggris ini lahir di Benares, India, dan bergabung dengan tentara Perusahaan itu. Setelah pensiun dari tugas militer dia memutuskan untuk berkelana di perairan timur. Dia berlayar ke Singapura, dan dari sana terus ke Kalimantan bagian utara, bagian pulau itu yang resminya diperintah oleh Sultan Brunei. James Brooke membantu

Sultan melawan suku-suku Dayak di pedalaman yang diaku Sultan itu sebagai rakyatnya, dan yang mungkin punya alasan bagus untuk menjaga agar kaki tangan Sultan tetap berada sejauh mungkin dari rumah mereka. Untuk bantuannya James Brooke menerima wilayah Sarawak. Dari bawahan dia mengangkat diri menjadi penguasa berdaulat dan penguasa atasan atas mantan tuannya. Pulau Labuan dia caplok untuk pemerintah Britania, dan dia menjadi gubernur pertamanya pada 1846. Dengan demikian, pengaruh Britania dengan cepat meluas di pantai utara Kalimantan. Protes Pemerintah Belanda atas apa yang dianggapnya pelanggaran terhadap perjanjian 1824 tidak digubris. Pemerintah Britania ngotot dengan penafsiran literal klausul yang menjamin hak-hak Belanda di *selatan* Selat Malaka. Pantai utara Kalimantan memang terletak pada derajat lintang utara yang lebih tinggi daripada Singapura. Pencaplokan Kalimantan bagian utara melengkapi penguasaan sekeliling Laut Cina Selatan oleh bawahan-bawahan Britania. Begitulah, Kalimantan terbagi antara Britania dan Belanda.

Alasan serupa untuk perluasan wilayah Britania tidak bisa dikemukakan ketika beberapa tahun kemudian orang Inggris lain mencoba mendirikan satu negara bawahan Britania di Siak, salah satu daerah di Sumatra bagian timur laut.[17] Permintaannya kepada penguasa Britania di Singapura tidak digubris, karena kali ini perjanjian 1824 tidak bisa ditafsirkan lain; tidak boleh ada satu pun permukiman Britania di selatan Selat Malaka, dan tidak ada penentangan dari Singapura, ketika pada 1858 pasukan Belanda menduduki wilayah itu. Jadi, kontrol atas sebagian Sumatra didapatkan Belanda. Pada 1837 perang dengan "Padri" berhasil diselesaikan. Perluasan lebih jauh kekuasaan Belanda terhalang oleh perjanjian 1824 yang sering dikutip itu, yang mengharuskan Belanda menghargai kemerdekaan Aceh dan wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Selama 20 tahun kebijakan Belanda mengenai Sumatra tidak jelas. Tapi, setelah Britania menduduki pantai utara

Kalimantan, penguasa Batavia menjadi lebih bersemangat. Satu pos militer didirikan di pulau Nias dekat pantai barat Sumatra untuk melindungi penduduk dari pemburu budak dari Aceh. Pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan Aceh pelan-pelan berakhir dengan pendudukan sebagian besar pelabuhan di pantai barat Sumatra, tempat beberapa kepala suku Aceh mendirikan basis untuk kegiatan perompakan mereka. Pelabuhan-pelabuhan Aceh itu sendiri tidak boleh diduduki orang Belanda, walaupun merekalah satu-satunya yang wajib membasmi perompakan di perairan itu. Kapal-kapal Eropa sangat sering diserang oleh Aceh, dan ekspedisi penghukuman yang dilakukan angkatan laut dari negara-negara yang kapalnya diserang sama sekali tidak efektif. Pada 1831 satu kapal perang Amerika Serikat menghujani salah satu desa pantai Aceh dengan tembakan, dan desa-desa lain diserang kapal perang Britania. Pemerintah Belanda berusaha memperbaiki keadaan dengan mengirimkan duta khusus kepada Sultan Aceh, tapi misinya hanya mengungkapkan bahwa kekuasaan raja yang pernah terkenal itu telah merosot menjadi hanya pemimpin nominal para kepala desa dan kepala daerah di kesultanan itu. Janji dan kesepakatan terbukti tidak bernilai karena Sultan tidak bisa memaksakan perintahnya.

Ada alasan lain di samping kekhawatiran akan persaingan Britania yang memaksa pemerintah Batavia lebih bersemangat terkait dengan penduduk "wilayah bagian luar". Hari-hari kapal layar lama sudah berlalu. Kapal uap telah menggantikannya, dan karena pelaksanaan kontrol laut sangat penting bagi pemerintah di Kepulauan Indonesia, eksplorasi untuk menemukan tambang batubara pun dimulai. Hasilnya memuaskan. Kepulauan Indonesia punya banyak batubara. Segera eksploitasi sebagian tambang ini dikerjakan. Pemerintah mengeksploitasi tambang dekat Banjarmasin di Kalimantan bagian tenggara, dan satu perusahaan swasta melakukannya di Kutai, di pantai timur pulau itu. Pengolahan tambang dekat Banjarmasin menimbulkan konflik dengan Sultan kota itu, dan mengakibatkan perang yang berakhir

dengan aneksasi kesultanan itu ke dalam wilayah Belanda. Kepentingan pertambangan lain, kali ini terhadap deposit timah di Belitung, menyebabkan pendirian Perusahaan Timah Belitung yang besar, dan pendudukan mutlak oleh Belanda atas pulau Belitung.[18]

Bagian lain dari kepulauan Indonesiatidak banyak mengalami perubahan pada pertengahan abad ke-19. Suatu ekspedisi melawan kongsi-kongsi tambang Cina di Kalimantan bagian barat memulihkan ketertiban di kesultanan Sambas dan Pontianak, yang sebagian wilayah negerinya terus-menerus bergolak akibat pertikaian internal. Ekspedisi lain ditujukan melawan raja-raja Bali; perang-perang di antara mereka akhirnya mengundang pasukan Belanda ke pulau itu, setelah dua abad hubungan kadang baik kadang buruk dengan Batavia. Sebagian pulau itu langsung diduduki. Terjadi pertempuran di Sulawesi ketika seorang ratu Bugis memerintahkan nakhoda-nakhodanya untuk mengibarkan bendera Belanda terbalik di kapal-kapal mereka. Batavia membalas dengan kekuatan senjata, dan serangan itu memberi Belanda kesempatan untuk memperbarui persekutuan lama mereka dengan Aru Palakka dari Bone.[19] Di Timor ada masalah dengan Portugis menyangkut perbatasan yang membelah pulau itu. Perbatasan itu tidak pernah ditetapkan dengan jelas. Pada 1860 perjanjian disepakati, tapi butir-butir isinya sangatlah kabur dan menyisakan banyak hal untuk disalahtafsirkan.[20]

Maluku akhirnya mendapat kesempatan mengambil satu langkah lagi menuju pembebasan mereka dari tindak penindasan. Pada 1854 beberapa pelabuhan di kepulauan Maluku dibuka untuk semua pelayaran. Ini adalah celah pertama dalam sistem monopoli yang masih dipertahankan untuk pulau kecil itu, tapi yang akan segera hilang dalam waktu dekat. Tapi semua ini hanyalah perkara kecil dibandingkan dengan perubahan besar yang akan terjadi dan yang akan mengawali satu babak baru dalam sejarah Kepulauan Indonesia.

Kita bisa berhenti sejenak di sini untuk mengkaji sikap yang

diambil Belanda di Eropa terhadap koloni mereka di Indonesia. Bagi masyarakat Belanda, Kepulauan Indonesia hanya dikenal samar sebagai *de oost*, Timur, suatu negeri tempat pelaut dan serdadu pergi bila mereka tidak punya cara lain mendapatkan mata pencaharian, atau ketika negeri leluhur tidak lagi menginginkan kehadiran mereka. Ke Timur mereka pergi dan di Timur mereka mati. Kelas yang lebih terpelajar tidak punya penghargaan lebih tinggi terhadap koloni-koloni itu sampai pertengahan abad ke-19. "Pergi ke Timur" biasanya adalah jalan keluar terakhir bagi kelas menengah Belanda. Ada ketidaktahuan yang memalukan tentang geografi Indonesia dan tentang penduduknya. Nama-nama geografis berbahasa Jawa yang terdengar aneh biasanya membangkitkan tawa di parlemen. Sedikit saja anggotanya yang punya pengetahuan lumayan tentang Indonesia. Ketika sekitar 1840 kondisi ekonomi menjadi tak tertahankan bagi ribuan petani miskin di Belanda, dan ketika Albertus van Raalte, seorang pendeta Gereja, berencana beremigrasi dengan ratusan pengikutnya, dia minta izin pergi ke Jawa, mengira bahwa dia bisa mendirikan permukiman petani Belanda di pulau tropik itu. Pemerintah, yang tidak mau mengubah kebijakannya dalam hal hak milik tanah pribadi di Jawa, menolak, tapi menawarkan dia mendirikan koloni di pulau Seram di Maluku. Van Raalte dengan bijaksana menolak tawaran itu dan membawa orang-orangnya ke Amerika Serikat, tempat mereka mendirikan kota Belanda, di negara bagian Michigan.

Van Raalte memperkirakan dia dan teman-temannya dapat menyebarkan agama Kristen di kalangan orang Jawa. Usaha pengkristenan orang Indonesia merupakan salah satu tanda pertama minat tak egois yang ditunjukkan orang Belanda di wilayah seberang laut. Telah kita lihat bahwa VOC tidak menganggap serius usaha penyebarluasan agama Kristen. Karena pejabat Kompeni diperintahkan untuk memberikan sejumlah beras kepada anak-anak yang datang ke sekolah, di hari kemudian orang terbiasa mengejek tentang "orang Kristen beras" Kompeni. Penolakan

utama Kompeni terhadap kerja misionaris adalah bahwa Para Direktur itu tidak bisa membiarkan lembaga lain, bahkan Gereja, untuk membangun pengaruh di wilayahnya. Tapi ketika Kompeni sudah pasti akan bangkrut, sekelompok Calvinis di Rotterdam pada 1797 mendirikan "Masyarakat Misionaris Belanda". Ini terjadi setengah abad sebelum kelompok misioner lain dibentuk. Jadi perkumpulan pertama inilah yang mereorganisasi Gereja Calvinis di Hindia setelah pemulihan pemerintahan Belanda. Masyarakat Misionaris memberi perhatian khusus kepada kelompok-kelompok orang Kristen pribumi di Maluku, yang disatukan dan diorganisasikan ke dalam Gereja oleh pendeta pertama mereka J. Kam. Keberhasilan paling besar yang diperoleh Masyarakat Misionaris adalah Kristenisasi orang Minahasa. Prosesnya mulai pada 1827 dan praktis selesai pada 1860. Lebih daripada 100.000 orang Manado masuk Kristen pada masa itu. Paksaan Raja Willem I untuk mengorganisasikan Gereja di Indonesia menurut gagasannya sendiri dan menjadikannya satu departemen pemerintah merupakan penghalang bagi misi Protestan. Dia sekadar memerintahkan semua orang Protestan untuk bersatu dalam satu komunitas tunggal dan menguasai wewenang mengangkat semua pendeta dan misionaris. Orang Katolik, yang untuk pertama kali sejak kekalahan Portugis menikmati kebebasan beribadah di bawah Jenderal Daendels, mungkin senang bahwa mereka diperbolehkan mengorganisasikan beberapa jemaat di antara orang Eropa di perkotaan. Kerja misioner sebenarnya tidak dibolehkan untuk mereka. Minat terhadap kerja misioner tetap terbatas pada sejumlah kecil orang Belanda.

Tidak ada yang menentang ketika Undang-Undang Dasar 1815 menyerahkan kontrol mutlak atas koloni ke tangan raja, yang di sini bisa memerintah secara otokratis tanpa campur tangan parlemen. Ketika Undang-Undang Dasar itu direvisi pada 1840, klausul ini tetap tidak berubah. Ketika pada 1848 Willem II dengan bijaksana menurut pada tuntutan akan kontrol publik yang lebih besar atas urusan pemerintahan, dan Undang-Undang

Dasar Belanda direvisi sekali lagi, sehingga kekuasaan pemerintah praktis diletakkan di tangan kelas menengah yang posisinya lebih unggul, satu klausul disisipkan sehingga Raja, lewat Menteri Koloninya, harus memberikan laporan tahunan kepada Parlemen tentang kondisi yang sedang berlaku di Hindia Belanda.[21] Parlemen tidak mendapatkan kontrol langsung atas kebijakan yang diikuti pemerintah di Hindia sebelum *Comptability Act* 1864 / 302 diundangkan. Di bawah Akta itu anggaran untuk pemerintahan Hindia Belanda harus disetujui oleh parlemen Belanda.

Sebelum Akta itu diberlakukan, partai Liberal di negeri Belanda tidak bisa campur tangan dalam kebijakan yang diambil pemerintah di luar negeri. Baik partai Liberal maupun Konservatif di parlemen menerima prinsip bahwa koloni harus menyumbang untuk kemakmuran material negeri leluhur. Tidak ada yang menentang pengiriman surplus anggaran Indonesia ke Belanda. Kedua partai itu pada dasarnya setuju bahwa keuntungan-keuntungan ini harus didapatkan tanpa mengorbankan kesejahteraan orang Indonesia, tapi karena ketidaktahuan tentang urusan Indonesia begitu besar, hampir semua wakil rakyat sungguh percaya bahwa sama sekali tidak ada yang salah dengan administrasi koloni dan eksploitasi penduduknya.

Orang Jawa punya beberapa pendukung setia di Parlemen Belanda. Yang paling terkenal ialah W. R. van Hoevell, seorang pendeta Gereja yang diusir dari Hindia karena mengkritik pemerintah. Dia menuntut keadilan dalam urusan pemerintah dengan orang Indonesia.[22] Van Hoevell tidak menentang prinsip eksploitasi koloni untuk kepentingan Belanda, tapi kewajiban pertama pemerintah haruslah menjaga dengan baik kepentingan penduduk aslinya. Akibatnya, Ordinansi mengenai Administrasi Hindia Belanda, yang disetujui oleh kedua Kamar Parlemen Belanda pada 1854, mendekritkan bahwa usaha pertanian pemerintah yang ada harus diteruskan.[23] Suatu provisi dalam Ordinansi itu yang menentang perluasan lebih jauh tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap Sistem itu, tapi hanya sebagai perlindungan terhadap

perusahaan swasta, yang berawal dari antipati pihak partai Liberal, yang dikenal luas, terhadap campur tangan pemerintah dalam usaha ekonomi.

Perbedaan besar antara kalangan Konservatif dan Liberal mengenai kebijakan kolonial muncul dari prinsip politik ini. Kedua partai menyatakan diri sangat prihatin terhadap nasib petani Jawa miskin, dan tidak perlu diragukan mereka sangat jujur dalam pernyataan ini, tapi harus diingat bahwa pada periode ketika pembahasan politik ini terjadi, pandangan akan kebijakan kesejahteraan sosial sama sekali berbeda dari pandangan kita sekarang. Parlemen Belanda memperhatikan kepentingan petani Jawa seperti ia memperhatikan kepentingan kelas pekerja di negeri sendiri; yakni, ia berusaha menciptakan lapangan kerja dan kesempatan memperoleh upah, selebihnya diserahkan kepada "Hukum Alam" yang mengenainya para ahli ekonomi politik pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 telah menulis dengan indah dan puitis. Tapi dalam beberapa pokok kalangan Liberal tidak kenal kompromi. Salah satunya adalah masalah perbudakan. Partai Liberal menuntut perbudakan segera dihapuskan, baik di Hindia Barat maupun Timur. Partai Konservatif berusaha dengan sia-sia agar penebusan budak dilakukan secara bertahap. Perbudakan secara resmi dihilangkan dari Indonesia pada 1 Januari 1860.[24]

Tapi dalam jangka panjang tidak ada jalan lari dari kesimpulan bahwa prinsip-prinsip Liberalisme tidak bisa dicocokkan dengan sistem perusahaan pemerintah yang didasarkan pada rodi dan monopoli dagang. Usaha tak kenal lelah Van Hoevell untuk menyebarkan pengetahuan lebih baik tentang urusan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Tapi perhatian publik tertawan oleh buku Eduard Douwes Dekker, yang dengan nama samaran "Multatuli" menerbitkan karyanya *Max Havelaar*.

Yang mengejutkan, buku itu menjadi *bestseller* dalam waktu pendek. Gayanya, kekuatan penggambarannya atas hubungan sosial di Indonesia, dan kebaruan pendekatannya atas masalah tersebut, sepenuhnya menunjang keberhasilan itu. Ia menandai

titik balik dalam sastra Belanda dan tetap menjadi sastra Belanda klasik abad ke-19. "Max Havelaar" adalah satu dari sangat sedikit buku Belanda masa itu yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang lebih umum dikenal, dan pembaca non-Belanda, yang tentu saja tidak tahu apa-apa tentang buku-buku yang sangat banyak mengenai Indonesia yang diterbitkan dalam bahasa Belanda, cenderung percaya bahwa "Multatuli" ("dia yang telah banyak menderita", nama samaran yang mencerahkan!) adalah satu-satunya otoritas dalam urusan kolonial.[25]

Douwes Dekker adalah seorang pejabat di administrasi kolonial. Dia bertugas sebagai "asisten residen" di Jawa Barat tempat dia berkonflik dengan atasannya. Dia menuduh mereka membiarkan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan bupati Lebak, orang yang menurut tugasnya harus dia nasihati (dan kontrol) dalam pemerintahan kabupatennya. Dekker berniat baik, tapi terlalu bersemangat dan sarannya untuk memperbaiki penyalahgunaan wewenang akan menyebabkan revolusi dalam praktik administrasi Batavia. Dekker bukan hanya bersikukuh dengan sarannya, tapi juga mengajukannya langsung kepada Gubernur Jenderal, dengan harapan bahwa Gubernur Jenderal yang dia percayai sebagai teman pribadi dan pelindungnya akan menyetujui rencananya. Alih-alih didukung, dia disalahkan dan dipindahtugaskan ke pos yang kurang menyenangkan. Dengan marah Dekker menjawab dengan mengirimkan pengunduran dirinya yang tidak bisa tidak diterima Gubernur Jenderal. Ada dua kualitas yang harus dimiliki setiap pejabat dalam posisi penting: keadilan dan kebijaksanaan. Douwes Dekker berusaha sekeras mungkin bersikap adil kepada orang miskin, tapi dia jelas tidak punya kebijaksanaan untuk melangkah dengan taktis. Setelah dipecat dan kembali ke Belanda, dia dengan menyedihkan menghabiskan waktu memuliakan "kemartiran"-nya.

Bukunya, "Max Havelaar", lebih daripada sekadar kritik terhadap pemerintahan kolonial dalam bentuk sastra, juga merupakan satir tanpa simpati terhadap suatu jenis borjuasi

Belanda, yang saleh dan bahkan moralistik di antara sesama mereka, tapi merogoh setiap sen yang bisa mereka peras dari Hindia, sambil dengan seenaknya mengabaikan kondisi parah orang Indonesia yang memeras keringat untuk memproduksi kekayaan itu. Walaupun berhasil terjual banyak, buku itu tidak berhasil membuat para pembacanya mengambil kesimpulan ekonomi atau politik darinya. Bahkan penulisnya sendiri pasti akan senang kembali ke Hindia, dan menerima jabatan tinggi dalam pemerintahan di bawah sistem yang ada. Tapi ekspresi sentimennya yang keras membuat buku itu menjadi pendakwaan atas sistem pemerintahan yang ada dan membangkitkan dalam diri pembacanya kecenderungan pemikiran yang jauh lebih radikal daripada yang mungkin pada mulanya diinginkan penulisnya. Ia membantu mempersiapkan latarbelakang populer bagi kaum Liberal yang ingin melakukan usaha serius memasukkan prinsip mereka ke dalam pemerintahan kolonial.

Walaupun semua peristiwa dan perubahan pandangan politik dan sosial itu terjadi di Belanda sendiri, gemanya di Hindia begitu kuat sehingga perlu bagi kita menjelaskan dengan singkat makna sepenuhnya. Sejak salah seorang dari kaum Liberal muda ditunjuk menjadi Menteri Koloni, dampak perubahan-perubahan pandangan atas pemerintahan kolonial itu terjadi dengan sangat cepat. Ini terjadi ketika Isaac Fransen van de Putte menjadi Menteri Koloni. Sebagai perwira dari armada laut para pedagang dan sebagai pegawai salah satu pabrik penyulingan gula besar di Jawa, dia punya pengetahuan tangan pertama tentang urusan Indonesia. Sepulangnya di Belanda dia menulis pamflet-pamflet mengenai masalah kolonial, dan pada 1863 diminta bergabung dengan kabinet kedua bentukan pemimpin besar Liberal, Thorbecke.[26] Fransen van de Putte menunjukkan bahwa dia mengerti arah gagasan yang ada di antara mayoritas anggota parlemen. Pendahulunya di kabinet, Uhlenbeck, begitu ceroboh sehingga menyatakan bahwa sudah waktunya Belanda belajar hidup tanpa kontribusi *apapun* dari perbendaharaan Indonesia kolonial, dan bahwa seluruh

Sistem Kultur harus langsung dihapuskan. Sikap ini terlalu radikal untuk mayoritas yang telah bersusah-payah mencari alasan yang bisa membenarkan kombinasi antara kebijakan Liberal dengan keberlangsungan pengiriman uang dari Batavia. Fransen van de Putte mengusulkan untuk menghapuskan semua usaha pertanian pemerintah kecuali kultur gula dan kopi, untuk menghentikan semua monopoli, dan untuk memperkenalkan suatu kebijakan perniagaan baru yang didasarkan pada perdagangan bebas. Usulannya tersebut – yang menjamin adanya periode singkat pemasukan dari perkebunan gula dan kopi, satu-satunya yang masih menguntungkan–diterima. Keputusan itu menandai, di antara hal-hal lain, akhir penindasan ekonomi yang terjadi sejak lama di Maluku. Pembatasan produksi rempah oleh Kompeni telah dihapuskan oleh Van der Capellen. Undang-Undang 1863 akhirnya menghentikan tanam paksa pohon rempah dan monopoli dagang. *Comptability Act* 1864 meletakkan administrasi "Hindia Belanda" di bawah kontrol parlemen Belanda. Setahun kemudian, kerja rodi di daerah-daerah hutan pemerintah dihapuskan.

Periode baru telah mulai di Indonesia. Van de Putte mencoba membuka kemungkinan baru untuk usaha pertanian swasta dengan hukum yang mengatur kondisi di mana tanah dan tenaga kerja bisa tersedia untuk usaha-usaha ini. Tapi upayanya itu gagal. Penentangan dari partai Konservatif tumbuh lebih kuat. Partai itu menolak apa yang disebutnya campur tangan terhadap "adat istiadat dan pranata-pranata asli Jawa", tapi dukungannya yang digembar-gemborkan terhadap pranata-pranata ini dipakai sebagai argumen politik untuk mempertahankan sistem ekonomi yang dikontrol pemerintah. Walaupun begitu, gerakan ke arah reformasi unggul. Pada 1870 dua undang-undang yang sangat penting diterima oleh Parlemen Belanda. Undang-Undang atas kultur gula menghapuskan semua perusahaan pemerintah di bidang ini. Dari semua Sistem Kultur hanya tanam paksa kopi yang tertinggal. Tanam paksa kopi masih ada sampai 1 Januari 1917, ketika akhirnya dihapus di daerah terakhir tempat berlakunya,

Priangan, tempat tanam paksa kopi pertama kali dimulai dua abad sebelumnya.

Undang-Undang yang satu lagi, yang diundangkan pada 1870, adalah usaha untuk merumuskan hak-hak kepemilikan tanah di Indonesia. Tujuan hukum ini adalah menetapkan dasar bagi peraturan-peraturan di masa yang akan datang, di mana perusahaan pertanian swasta di tanah yang dimiliki penduduk asli akan diizinkan. Undang-undang itu, yang biasa disebut Undang-Undang Agraria, mengakui sifat khusus hak milik Indonesia dan variasi hak-hak yang ada di berbagai tempat berbeda di Kepulauan Indonesia.[27] Undang-Undang itu melarang penjualan tanah yang dimiliki atau dipakai orang Indonesia kepada orang non-Indonesia, dan mengklaim sebagai milik pemerintah semua tanah yang tidak diklaim orang Indonesia.

Rumusan itu agak rumit dan banyak hal tetap tidak jelas karena berbagai perbedaan dalam hal hak-hak kepemilikan di wilayah yang berbeda dari Kepulauan Indonesia. Ini membuka kemungkinan pengubahan surat tanah yang dianut di bawah hukum Indonesia menjadi surat tanah baru yang dirumuskan menurut konsep barat akan hak milik tanah, tapi usaha selanjutnya untuk mendorong orang Indonesia, khususnya orang Jawa, agar menerima hak kepemilikan tanah individual yang bebas dari pembatasan sangat tidak berhasil. Di bawah Undang-Undang Agraria tersebut pemerintah telah merumuskan hak milik tanah Indonesia sedapat mungkin, tapi penyelidikan seksama atas seluruh bahan rumit yang telah diperintahkan pada 1867 tidak dapat diselesaikan pada waktunya untuk dimanfaatkan. Ia butuh waktu sampai 20 tahun untuk diselesaikan![28] Sementara itu Undang-Undang Agraria itu mengizinkan individu swasta dan perusahaan memegang sewa herediter atas tanah (tak terbudidayakan) pemerintah selama 75 tahun. Ia juga membolehkan mereka mengatur dengan pemilik-pemilik individual (pemilik aktual) sawah desa untuk sewa yang tidak lebih lama daripada 20 tahun, atau dalam kasus tertentu, tidak lebih daripada lima tahun. Partai Liberal berharap bahwa

walaupun ada penghapusan rodi di bawah sistem baru iklim usaha bebas, koloni itu akan terus memproduksi kekayaan yang lebih besar daripada kebutuhannya. Mereka berharap bahwa kehilangan pemasukan dari perusahaan pertanian pemerintah akan digantikan oleh penghasilan yang jauh lebih besar dari bea cukai dan pajak, dan mereka dengan yakin menatap ke masa depan ketika Indonesia bukan hanya akan mampu mengurus diri sendiri dalam hal pendidikan dan kesejahteraan sosial tapi, di atas itu semua, meningkatkan pengiriman uang kepada Belanda. Peristiwa-peristiwa berikut menghancurkan ilusi itu, dan konsep-konsep baru dan lebih baik mulai muncul.

BAB 14

PENYATUAN INDONESIA

BERTAHUN-tahun paraPembaharu Liberal memburuk-burukkan sistem perusahaan pemerintah dan rodi. Berkali-kali mereka mengemukakan keyakinan mereka akan manfaat permainan bebas kekuatan ekonomi. Kalau kekuatan-kekuatan ekonomi di Indonesia dibebaskan, kata mereka, baik kekayaan negeri itu maupun Belanda akan meningkat pesat. Jika metode yang sama diikuti, kekuatan-kekuatan yang menyebabkan perkembangan ekonomi yang cepat di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 juga akan menggulirkan kekuatan produksi di timur, karena teori liberal tentang kesetaraan manusia telah menghasilkan keyakinan pada fitrah persaudaraan umat manusia di seluruh dunia.

Lima belas tahun pertama di bawah sistem baru itu tampaknya memang membuktikan bahwa kaum Liberal benar. Perkembangan sebagian usaha pertanian menakjubkan. Antara 1870 dan 1885, produksi gula berlipat dua, bukan hanya lewat perluasan wilayah penanaman, tapi juga karena keluaran per unit tanah dua kali lebih tinggi daripada di masa Sistem yang terkenal (atau terkenal jahat) itu. Fakta ini saja jelas membuktikan bahwa usaha bebas lebih superior daripada eksploitasi pemerintah. Alih-alih 152.595

BAB 14

PENYATUAN INDONESIA

BERTAHUN-tahun paraPembaharu Liberal memburuk-burukkan sistem perusahaan pemerintah dan rodi. Berkali-kali mereka mengemukakan keyakinan mereka akan manfaat permainan bebas kekuatan ekonomi. Kalau kekuatan-kekuatan ekonomi di Indonesia dibebaskan, kata mereka, baik kekayaan negeri itu maupun Belanda akan meningkat pesat. Jika metode yang sama diikuti, kekuatan-kekuatan yang menyebabkan perkembangan ekonomi yang cepat di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 juga akan menggulirkan kekuatan produksi di timur, karena teori liberal tentang kesetaraan manusia telah menghasilkan keyakinan pada fitrah persaudaraan umat manusia di seluruh dunia.

Lima belas tahun pertama di bawah sistem baru itu tampaknya memang membuktikan bahwa kaum Liberal benar. Perkembangan sebagian usaha pertanian menakjubkan. Antara 1870 dan 1885, produksi gula berlipat dua, bukan hanya lewat perluasan wilayah penanaman, tapi juga karena keluaran per unit tanah dua kali lebih tinggi daripada di masa Sistem yang terkenal (atau terkenal jahat) itu. Fakta ini saja jelas membuktikan bahwa usaha bebas lebih superior daripada eksploitasi pemerintah. Alih-alih 152.595

ton, angka 1870, Jawa pada 1885 memproduksi 380.346 ton gula. Kalau kita lihat ke belakang pada angka-angka produksi gula di bawah Kompeni, akan kita sadari bahwa kapasitas produksi telah meningkat selama abad ke-19. Pada 1637, di hari-hari pertama industri gula Batavia, hasilnya hanya mencapai 12 ton. Bahkan pada 1779, ketika tercapai produksi maksimum di bawah pemerintahan lama, ia hanya mencapai batas 100.000 pikul, yaitu, 6.250 ton. Di bawah Raffles produksi jatuh ke separuh angka itu, tapi di bawah Sistem Kultur produksi meningkat 100 kali lipat.[1] Selain itu, ada ekspor teh dan tembakau yang meningkat, dua produk panen yang tidak tumbuh dengan baik di masa Sistem itu. Pada 1890 nilai ekspor tembakau meningkat dari 3,6 juta gulden menjadi 32,3 juta gulden, hampir 10 kali lipat.[2] Kapuk juga menjadi produk ekspor; lebih daripada 2.000 ton bahan ini diekspor pada 1891. Pada periode yang sama, pada 1883, Taman Botani Buitenzorg menerima sejumlah contoh kecil pohon karet Brazil, "*Hevea brasiliensis*". Karet sudah diproduksi di Jawa dan Sumatra dari tanaman asli penghasil bahan karet, tapi kualitas dan kuantitas rendah. Hanya setelah spesies dari Brazil itu masuk dapatlah kultur baru itu menjadi penting secara komersial. Walaupun begitu, Jawa dan Sumatra bersama-sama memproduksi tidak lebih daripada 7.500 ton komoditas ini, bahkan sampai 1914.

Bahkan di bawah sistem Liberal tersebut pemerintah tetap berkepentingan langsung dalam eksploitasi timah. Berkat modernisasi metode penambangan, produksi tambang-tambang Bangka meningkat 10 kali lipat sejak 1811, ketika produksinya tidak lebih daripada 1.000 ton per tahun. Pada 1870, hasil tahunan rata-rata adalah 2.200 ton, tapi pada 1900 meningkat jadi 10.000 ton. Pulau tetangganya, Belitung, bahkan terbukti lebih kaya dibanding Bangka. Eksploitasi telah dimulai oleh Perusahaan Timah Belitung, di mana Hendrik, pangeran Belanda, adalah promotor utamanya. Perusahaan ini mulai dengan modal lima juta gulden, tapi sudah memperoleh keuntungan 54 juta gulden setelah

32 tahun! Tampaknya ini sangat berlebihan sehingga pemerintah Belanda menolak memperbarui konsesi kecuali perusahaan itu setuju menyerahkan lima perdelapan keuntungannya kepada kas koloni. Tapi, bila diingat bahwa ekspor kopi, yangtetap merupakan produk pemerintah, juga meningkat padatahun-tahun yang sama, kitasadar bahwa bukan hanya penerapan prinsip-prinsip ekonomi liberal, tapi berbagai alasan lain pastilah menjadi penyebab pemekaran perniagaan dan industri ini.

Di antara sebab-sebab itu, yang paling menonjol ialah pembukaan Terusan Suez. Dalam sejarah Indonesia peristiwa ini harus dicatat sebagai peristiwa sangat penting. Komunikasi dengan Eropa diperpendek, bukan hanya dalam jarak, tapi terutama dalam waktu. Jalur baru itu membuktikan keunggulan koneksi kapal uap atas hubungan kapal layar. Biaya transportasi jatuh, dan pasar untuk produk tropis meluas dengan sendirinya, karena harga dapat turun. Hubungan antara Asia Timur dan Eropa menjadi lebih dekat. Semua faktor ini, digabungkan dengan faktor lain–perluasan ekonomi Jerman, pembukaan Rusia, pembangunan Amerika Utara yang menakjubkan–menyebabkan periode ledakan besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kali ini, tidak seperti dekade pertama setelah dominasi Prancis, orang Belanda siap menghadapi perubahan. Semangat nasional tampaknya hidup kembali setelah mati suri lebih daripada seabad. Dalam banyak bidang kegiatan ilmiah dan ekonomi orang Belanda berhasil mengejar ketertinggalan selama tahun-tahun panjang ketika negeri-negeri lain membuat kemajuan pesat. Stigma yang melekat pada "Timur" dalam pandangan begitu banyak orang Belanda, yang menganggap itu adalah tempat yang hanya cocok untuk orangyangtelah gagal memanfaatkan kesempatan di negeri sendiri, mulai lenyap. Orang dari segala tingkat masyarakat mulai melihat Indonesia seperti Amerikaabad ke-19: sebagai negeri yang menawarkan kesempatan bagus untuk memperoleh penghidupan baik bagi orang yang mau bekerja keras.

Pemodal Belanda makin lama makin tertarik berinvestasi

di Indonesia. Antara 1860 dan 1880, sejumlah perusahaan dagang dan bank didirikan dengan maksud menyediakan modal yang diperlukan untuk perusahaan pertanian swasta.[3] Beberapa di antaranya adalah Bank Dagang Hindia Belanda, "Handelsvereeniging Amsterdam", "Koloniale Bank", dan bank "Dorrepaal & Co.", kemudian menjadi "Vorstenlanden". Tapi, yang paling utama adalah Perusahaan Dagang Belanda, yang didirikan Willem I. Lembaga ini kehilangan bidang kegiatannya yang pertama–membeli produk pemerintah berdasarkan konsinyasi dan menjualnya di Eropa–ketika Sistem Kultur berakhir. Kemudian Perusahaan Dagang itu mulai meminjamkan uang kepada pengusaha swasta, dan pada 1875 telah menginvestasikan hampir 10 juta gulden dalam perusahaan-perusahaan pertanian. Perusahaan Tembakau Deli, antara lain, didukung oleh Perusahaan Dagang. Makin lama ia makin bertumbuh menjadi perusahaan perbankan yang membuka cabang-cabangnya di seluruh Asia bagian timur dan selatan, dari Jepang sampai Bombay, dan dengan demikian sampai tahap tertentu menghidupkan kembali tradisi perniagaan antar-Asia VOC.

Telah dikenal selama bertahun-tahun bahwa minyak dapat ditemukan di Indonesia. Orang Indonesia tahu ada banyak sumur alam dan memakai minyak untuk berbagai keperluan. Tapi sampai 1885 yang berlaku adalah pandangan bahwa kuantitas dan kualitas minyak itu tidak menguntungkan untuk dieksploitasi. Perusahaan pertama yang didirikan untuk mengeksploitasi sumur minyak adalah "Dordtsche" (Dordrecht Oil Company), satu perusahaan kecil dengan modal hanya 75.000 gulden, yang mencoba menangani ladang-ladang minyak di Jawa. Dua tahun kemudian, pada 1889, perusahaan lain mulai bekerja di Kalimantan bagian timur, dan pada 1890 Royal Dutch yang besar itu didirikan.[4] Yang disebut terakhir ini mula-mula berkonsentrasi pada ladang minyak di Sumatra bagian utara, tapi direkturnya, August J. Kessler, mengerti bahwa perusahaan itu pasti akan gagal, kalau membatasi kegiatannya pada satu ladang, betapapun kayanya ladang itu. Dia

32 tahun! Tampaknya ini sangat berlebihan sehingga pemerintah Belanda menolak memperbarui konsesi kecuali perusahaan itu setuju menyerahkan lima perdelapan keuntungannya kepada kas koloni. Tapi, bila diingat bahwa ekspor kopi, yangtetap merupakan produk pemerintah, juga meningkat padatahun-tahun yang sama, kitasadar bahwa bukan hanya penerapan prinsip-prinsip ekonomi liberal, tapi berbagai alasan lain pastilah menjadi penyebab pemekaran perniagaan dan industri ini.

Di antara sebab-sebab itu, yang paling menonjol ialah pembukaan Terusan Suez. Dalam sejarah Indonesia peristiwa ini harus dicatat sebagai peristiwa sangat penting. Komunikasi dengan Eropa diperpendek, bukan hanya dalam jarak, tapi terutama dalam waktu. Jalur baru itu membuktikan keunggulan koneksi kapal uap atas hubungan kapal layar. Biaya transportasi jatuh, dan pasar untuk produk tropis meluas dengan sendirinya, karena harga dapat turun. Hubungan antara Asia Timur dan Eropa menjadi lebih dekat. Semua faktor ini, digabungkan dengan faktor lain—perluasan ekonomi Jerman, pembukaan Rusia, pembangunan Amerika Utara yang menakjubkan—menyebabkan periode ledakan besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kali ini, tidak seperti dekade pertama setelah dominasi Prancis, orang Belanda siap menghadapi perubahan. Semangat nasional tampaknya hidup kembali setelah mati suri lebih daripada seabad. Dalam banyak bidang kegiatan ilmiah dan ekonomi orang Belanda berhasil mengejar ketertinggalan selama tahun-tahun panjang ketika negeri-negeri lain membuat kemajuan pesat. Stigma yang melekat pada "Timur" dalam pandangan begitu banyak orang Belanda, yang menganggap itu adalah tempat yang hanya cocok untuk orangyangtelah gagal memanfaatkan kesempatan di negeri sendiri, mulai lenyap. Orang dari segala tingkat masyarakat mulai melihat Indonesia seperti Amerikaabad ke-19: sebagai negeri yang menawarkan kesempatan bagus untuk memperoleh penghidupan baik bagi orang yang mau bekerja keras.

Pemodal Belanda makin lama makin tertarik berinvestasi

di Indonesia. Antara 1860 dan 1880, sejumlah perusahaan dagang dan bank didirikan dengan maksud menyediakan modal yang diperlukan untuk perusahaan pertanian swasta.[3] Beberapa di antaranya adalah Bank Dagang Hindia Belanda, "Handelsvereeniging Amsterdam", "Koloniale Bank", dan bank "Dorrepaal & Co.", kemudian menjadi "Vorstenlanden". Tapi, yang paling utama adalah Perusahaan Dagang Belanda, yang didirikan Willem I. Lembaga ini kehilangan bidang kegiatannya yang pertama—membeli produk pemerintah berdasarkan konsinyasi dan menjualnya di Eropa—ketika Sistem Kultur berakhir. Kemudian Perusahaan Dagang itu mulai meminjamkan uang kepada pengusaha swasta, dan pada 1875 telah menginvestasikan hampir 10 juta gulden dalam perusahaan-perusahaan pertanian. Perusahaan Tembakau Deli, antara lain, didukung oleh Perusahaan Dagang. Makin lama ia makin bertumbuh menjadi perusahaan perbankan yang membuka cabang-cabangnya di seluruh Asia bagian timur dan selatan, dari Jepang sampai Bombay, dan dengan demikian sampai tahap tertentu menghidupkan kembali tradisi perniagaan antar-Asia VOC.

Telah dikenal selama bertahun-tahun bahwa minyak dapat ditemukan di Indonesia. Orang Indonesia tahu ada banyak sumur alam dan memakai minyak untuk berbagai keperluan. Tapi sampai 1885 yang berlaku adalah pandangan bahwa kuantitas dan kualitas minyak itu tidak menguntungkan untuk dieksploitasi. Perusahaan pertama yang didirikan untuk mengeksploitasi sumur minyak adalah "Dordtsche" (Dordrecht Oil Company), satu perusahaan kecil dengan modal hanya 75.000 gulden, yang mencoba menangani ladang-ladang minyak di Jawa. Dua tahun kemudian, pada 1889, perusahaan lain mulai bekerja di Kalimantan bagian timur, dan pada 1890 Royal Dutch yang besar itu didirikan.[4] Yang disebut terakhir ini mula-mula berkonsentrasi pada ladang minyak di Sumatra bagian utara, tapi direkturnya, August J. Kessler, mengerti bahwa perusahaan itu pasti akan gagal, kalau membatasi kegiatannya pada satu ladang, betapapun kayanya ladang itu. Dia

merumuskan suatu rencana untuk mengorganisasikan layanan transpor di mana seluruh Asia bagian selatan dan timur akan disuplai dengan minyak dari Sumatra, serta dari ladang Rusia. Pada masa itu tentu saja minyak untuk lampu, bukan untuk mesin, yang menjadi produk utamayang menghidupi perusahaan. Kisah bagaimana minyak lampu diperkenalkan ke semua pelosok Asia sudah sering diceritakan oleh sejarawan dan novelis. Dari sudut pandang perusahaan minyak, hal yang paling utama adalah mengorganisasikan distribusi minyak dan penjualan produk di emporium-emporium besar perniagaan Asia–Singapura, Rangoon, Penang, Kanton, Shanghai, dan pelabuhan-pelabuhan Jepang. Kessler menemukan mitraterbaik, yakni Henry Deterding, sebelumnya pegawai Perusahaan Dagang Belanda yang berkantor di Penang. Deterding-lah yang membuat Royal Dutch menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia.

Pada 1893 Royal Dutch sudah terlibat dalam pergumulan hidup mati dengan Standard Oil Company yang waktu itu sangat kuat. Ia unggul dalam pertempuran ini karena, berkat biaya transportasi rendah, ia bisa menyuplai Asia timur dengan harga jauh lebih rendah daripada Standard. Begitu berhasil masuk ke jalur sukses, Royal Dutch bisa mengorganisasikan semua perusahaan minyak di Indonesia menjadi satu perusahaan, Asian Petroleum Company, yang akan menangani semua penjualan dari produk semua pihak yang bergabung. Ini menciptakan Royal Dutch yang mahakuat, yang menjadi lebih kuat lagi setelah bergabung dengan Shell Transport and Trading Company, suatu perusahaan Britania. Pada 1907 perusahaan gabungan baru itu mengorganisasikan produksi minyak Indonesia di bawah tiga anak perusahaan. Dari ketiganya, "Bataafsche Petroleum Maatschappij" akan menangani eksplorasi dan eksploitasi ladang minyak di Kepulauan Indonesia. Sementara itu hasil minyak tahunan meningkat dari 300 ton (1889) menjadi 363.000 ton pada 1900. Tapi pemerintah tidak mungkin menyetujui perkembangan ekonomi di mana harta karun alami negeri itu akan sepenuhnya diambil oleh perusahaan

internasional. Karena itu suatu undang-undang pertambangan 1899 mendekritkan bahwa pemerintah Batavia harus mencadangkan ladang minyak tertentu untuk eksploitasi pemerintah. Bukan hanya pertimbangan ekonomi tapi juga politik mendorong pemerintah memegangkontrol atasproduksi minyak, karena pada masa itu Indonesia adalah satu-satunya produsen penting di Asia. Kemudian, ketika mesin berbahan bakar minyak telah diciptakan, situasi yang menguntungkan dari ladang-ladang itu—yakni dekat jalur laut yang mahapenting—memberinya signifikansi strategis yang besar.

Kaum Liberal bersikukuh bahwa kemakmuran umum di Indonesia akan menyediakan alat bagi pemerintah Batavia untuk mendapatkan pemasukan pengganti yang cukup untuk mengompensasi kehilangan pemasukan dari kultur pemerintah. Tapi, kali ini, pengharapan mereka tidak mewujud begitu cepat. Sedikit angka akan menggambarkan situasi finansial Hindia Belanda selama periode antara 1867 dan 1897, ketika sistem Liberal bisa melakukan apa saja.

Pada 1867 penghasilan total pemerintah kolonial berjumlah sekitar 137,5 juta gulden.[5] Karena pembiayaan menghabiskan sekitar 96 juta gulden, ada surplus 41,983 juta gulden, dan hampir 15 juta di antaranya langsung dikirim ke perbendaharaan Belanda di Eropa. Dari sumber apakah pemasukan itu diperoleh? Monopoli-monopoli negara atas penjualan garam dan opium serta pengelolaan balai pergadaian menghasilkan kira-kira 14,190 juta gulden. Pajak tanah 12,6 juta dan bea cukai 7,5 juta. Semua ini dan pajak-pajak lain bersama-sama memasukkan tidak lebih daripada 25,599 juta gulden, sementara produksi gula, kopi, timah, dan seterusnya (setelah pengurangan biaya produksi) memasukkan hampir 50 juta gulden. Jelas, administrasi pada 1867 bergantung pada Sistem Kultur. Kopi saja memasukkan 37,736 juta gulden. Sepuluh tahun kemudian situasi sudah berubah. Kultur gula pemerintah masih lancar, tapi produksi kopi bukan hanya bertahan pada level sebelumnya, melainkan meningkat 11 juta.

Jadi, pemasukan total dari produk pemerintah mencapai 54,998 juta gulden. Tapi pemasukan dari pajak juga meningkat dari 25 menjadi 35 juta. Walaupun ada peningkatan, anggaran ditutup dengan kerugian 4,239 juta gulden, suatu defisit yang antara lain disebabkan pemerintah di Belanda, karena Menteri Keuangannya, walaupun tahu akan ada defisit, berhasil mengalirkan untuk negeri leluhur dua setengah juta gulden dari perbendaharaan kolonial!

Tapi, pembayaran 1877 adalah upeti terakhir yang dibayarkan koloni itu langsung ke perbendaharaan Belanda. Defisit 1877 dan tahun-tahun berikutnya terutama disebabkan oleh peningkatan cepat pengeluaran pemerintah di Indonesia. Pengeluaran ini meningkat dari 96 juta pada 1867 menjadi 159 juta gulden pada 1877. Sepuluh tahun kemudian perkembangan ini, dimulai dengan penghapusan Sistem Kultur, jelas menunjukkan akibatnya dalam angka-angka anggaran. Pada 1877, pemasukan negara turun menjadi 143,351 juta, 42,377 juta di antaranya datang dari berbagai produk, dan 46,001 juta dari pajak. Untuk pertama kali dalam sejarah administrasi Batavia pemasukan pajak lebih besar daripada produk. Perkembangan ini lebih terlihat lagi pada 1897 ketika pemasukan pajak 53 juta dan produk hanya 10 juta. Pengeluaran, yang berkurang sampai 117,896 juta pada 1887, naik lagi menjadi 148,626 juta dan defisit tampaknya akan menjadi entri normal dalam anggaran. Pada 1897 jumlahnya 18 juta. Dari luar, koloni itu tampak makmur, tapi pemerintah lebih besar pasak daripada tiang. Jelas sistem pajak belum lagi disesuaikan dengan keadaan baru. Tigaperempat dari pajak itu dibayar oleh orang-orang Indonesia, dan mereka ini tidak punya banyak uang untuk membayar.

Hanya dengan memperkenalkan sumber pemasukan baru (yang berarti memperbaiki metode dan jenis produksi agraria dan memasukkan keahlian Barat) dapatlah pemasukan ditingkatkan. Diharapkan bahwa pelan-pelan suatu kelas baru akan tercipta dalam masyarakat Indonesia yang sejauh itu tidak punya kelas menengah sejati, dan bahwa kelas baru ini akan merangsang

kegiatan ekonomi Indonesia, hingga memungkinkan pemerintah meningkatkan pemasukan dari pajak.

Sebelum 1870 praktis semua orang Eropa yang tinggal di Indonesia adalah pegawai pemerintah. Setelah tahun itu mulai terjadi "imigrasi" orang Belanda. Pada 1872 ada 36.467 orang Eropa, termasuk orang Eurasia, yang tinggal di Indonesia.[6] Jumlah "orang Eropa" meningkat menjadi 43.738 pada 1882, dan sepuluh tahun berikutnya naik jadi 58.806. Dalam 20 tahun jumlah relatif pegawai pemerintah turun jauh di bawah pegawai perusahaan swasta. Kelas petani kaya muncul. Tentu saja wajar bahwa kelompok ini pun akan berkontribusi untuk pengeluaran pemerintah, dan lewat berbagai pajak tak langsung mereka sudah berbuat demikian, tapi tidak cukup. Pajak langsung atas penghasilan orang Eropa diperlukan, tapi pada akhir abad ke-19 orang belum terbiasa dengan gagasan pajak langsung yang dikenakan pada penghasilan. Pajak penghasilan regular tidak diterapkan di Belanda sebelum 1913, dan di Hindia Belanda diperkenalkan pada 1908. Karena itu, defisit seperempat terakhir abad ke-19 harus ditutup dengan utang yang pada 1898 berjumlah total 100 juta gulden.

Solusi masalah ini tidak bisa ditemukan dalam pengurangan pengeluaran, karena sistem Liberal menuntut perluasan alat komunikasi dan pemeliharaan keamanan lebih baik di perdesaan—kedua langkah yang dimaksudkan untuk memfasilitasi perusahaan ekonomi swasta. Menurut prinsip-prinsipnya, sistem Liberal itu menuntut perluasan fasilitas pendidikan, juga untuk orang Indonesia, dan administrasi lokal lebih baik dengan pengawasan dari pejabat orang Eropa. Langkah-langkah ini mahal dan sebagian besar cenderung menempatkan beban yang makin bertambah pada keuangan pemerintah. Di samping itu, kebijakan baru itu tidak membolehkan pulau-pulau luar dibiarkan mengurus diri sendiri dengan semua konsekuensi kebijakan itu: perompakan, kekacauan, perang lokal, dan akibatnya gangguan terhadap perniagaan, khususnya perkapalan orang Indonesia. Prinsip-

prinsip baru tersebut menuntut bahwa "ketertiban dan kedamaian" harus dijamin di seluruh Kepulauan, bahwa pengayauan, dan perang suku yang diperintahkan raja-raja kecil, harus diakhiri.

Eropa pada tahun-tahun ini melampaui semua bagian dunia lain dalam hal kekuatan politik dan militer, kemakmuran, dan produksi. Banyak orang Eropa sangat yakin bahwa keadaan seperti itu adalah akibat alamiah dari superioritasEropa, mungkin bukan dalam kualitas rasial (walaupun ada orang Eropa yang sangat meyakini hal ini juga!) tapi pastilah keunggulan dalam rasionalitas, dalam kemampuan mengambil usahabaru, dan dalam mengorganisasikan dan mengembangkan perusahaan ekonomi. Sedikit saja orang di Eropa yang ragu tentang "hak nyata" mereka atau bahkan "kewajiban" mereka untuk membereskan "cacat" primitif terakhir dalam masyarakat manusia, untuk membawa "ketertiban" di mana ada kekacauan, dan untuk mencegah pertumpahan darah di antara berbagai kelompok suku. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai itu semua sering kali menuntut campur tangan bersenjata. Dalam banyak kasus, hasil *akhir* memang menguntungkan bagi orang-orang tersebut, walaupun ada tuduhan "agresi" yang kemudian ditujukan kepada kekuatan-kekuatan kolonial itu. Tapi terlalu sering orang Eropa gagal mengerti bahwa mereka tidak bisa berharap orang-orang ini akan bersyukur untuk apa yang dilakukan pada dan untuk mereka, bahkan jika tindakan-tindakan itu terbukti bermanfaat!; bahwa mereka tidak bisa memaksakan asimilasi atau akulturasi orang-orang non-Eropa, bahwa mereka tidak bisa berharap akan ada upah ekonomi atas layanan yang mereka berikan, dan, yang paling penting, bahwa tindakan mereka tidak memberi mereka hak untuk menduduki secara permanen wilayah-wilayah non-Eropa. Setelah runtuhnya kekuasaan Eropa secara tiba-tiba atas sebagian besar Asia pada tahun-tahun antara 1946 dan 1950, banyak orang Eropa mengeluh bahwa misi kultural mereka telah terpotong sebelum waktunya. Protes banyak orang Asia bahwa orang Eropa telah menerima upah yang substansial untuk layanan yang mereka

berikan, bahkan jauh sebelum mereka mulai mempertimbangkan perlunya dengan sukarela mengakhiri pemerintahan kolonial, dapat dengan mudah dimengerti. Janji yang sering diulangi bahwa hubungan kolonial akan diakhiri begitu penduduk koloni sudah "matang untuk memerintah diri sendiri" tidak dianggap terlalu serius oleh orang-orang di koloni. Mungkin benar adanya bahwa dari semua sebab percekcokan dan permusuhan antara penguasa dan yang dikuasai di koloni-koloni itu, tidak ada yang lebih merusak terhadap hubungan mereka daripada sikap superioritas intelektual, yang dipegang bukan hanya oleh komunitas Eropa itu sendiri, tapi oleh sebagian besar orang Eropa juga.

Dua dekade terakhir pada abad ke-19 dan dua dekade pertama abad ke-20 dikenal sebagai "Zaman Imperialisme". Memang, itulah Zaman Emas bagi Pembangun Imperium. Penjelajah dan komandan Britania dan Prancis menyokong perluasan kekuasaan pemerintah nasional mereka atas wilayah luas di Afrika. Negara-negara merdeka terakhir di Asia (dengan kekecualian Jepang) ada dalam bahaya akan dijadikan provinsi Eropa. Pemerintah Belanda menyesuaikan kebijakannya di Indonesia dengan kecenderungan yang ada. Selama bertahun-tahun pemerintah Batavia, dengan persetujuan penuh dan bahkan tuntutan atasannya di Den Haag, mengikuti kebijakan membatasi campur tangannya terhadap sebagian besar wilayah Kepulauan (khususnya Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil) hanya pada urusan mempertahankan kekuasaan sebagai penguasa atasan dalam nama saja, atau pada pengakuan formal kekuasaan sebagai penguasa atasan itu oleh sultan dan raja-raja lokal. Sejak 1870, ia mulai memaksakan klaimnya atas kedaulatan dan "menghukum" penguasa lokal yang mengabaikan nasihat Batavia atau terus mengganggu pelayaran di perairan Indonesia. Perubahan perilaku ini muncul, bukan hanya dari keinginan menciptakan ketertiban di tempat biasanya ada kekacauan, dan dari dorongan menyistemasi hubungan Batavia dengan komunitas Indonesia di seluruh Kepulauan, tapi bahkan lebih lagi, ia muncul dari kekhawatiran bahwa pengabaian untuk

"memelihara ketertiban" bisa dipakai negara Eropa lain yang lebih kuat sebagai alasan untuk "mengangkat beban kolonial yang tampaknya telah menjadi terlalu berat bagi bangsa Belanda yang kecil".

Beberapa pendapat di Belanda mengatakan bahwa lebih baik menjual hak kedaulatan Belanda kepada negara Eropa yang lebih kuat yangtoh akan mengambil Kepulauan Indonesia kalau mereka betul-betul mau. Setelah penghapusan perbudakan (1869) dan kemudian penyusutan perkebunan gula di Surinam, koloni-koloni Hindia Barat menimbulkan beban pengeluaran bagi perbendaharaan Belanda. Koloni Belanda kecil di Pantai Emas Afrika, yang dulu pernah jadi pasar budak penting, adalah "sakit kepala" kolonial utama bagi pemerintahan Den Haag. Sejak awal abad ke-19 perdagangan budak dari Afrika ke Amerika telah dilarang oleh Britania yang menganggap keunggulan laut mereka sudah cukup menjadi dasar pembenaran atas keputusan yang berat sebelah itu, tapi dianggap paling berfaedah di bidang hukum maritim internasional. Wilayah Pantai Emas Belanda tercabik-cabik oleh perang suku dan penguasa di Den Haag enggan mengorbankan banyak jiwa manusia dan jutaan gulden untuk memperdamaikan negeri itu. Keadaan sampai sedemikian rupa sehingga seorang Menteri Koloni Belanda dengan serius menyarankan penjualan semua wilayah milik Belanda di luar negeri kecuali Jawa, tapi bahkan termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Maluku. Kabinet menolak usulan ini tapi memutuskan bernegosiasi dengan pemerintah Britania berkenaan dengan penjualan koloni Afrika. Tapi, kalau kedaulatan Belanda atas Indonesia ingin dipertahankan, ia harus melakukannya *dalam kenyataan*, bukan hanya mengklaimnya dalam teori.

Klaim Belanda atas kedaulatan di wilayah-wilayah Indonesia tampaknya didasarkan pada perjanjian-perjanjian yang disepakati pada abad-abad sebelumnya antara raja-raja Indonesia dan VOC Belanda. Lingkup pengaruhnya juga dirumuskan oleh perjanjian-perjanjian yang disepakati dengan Britania Raya pada 1815 dan

1824, tapi masih ada satu lubang besar (di samping banyak lubang kecil), yaitu posisi internasional kesultanan Aceh yang tidak ditetapkan.[7] Perjanjian 1824 telah menghapuskan perjanjian yang disepakati antara Raffles dan calon-sultan yang dipromosikan ke takhta oleh tuan itu. Pemerintah Britania berjanji tidak akan mendirikan pos apapun, atau melanjutkan klaim apapun, di wilayah Aceh. Di lain pihak, Belanda berjanji akan menghormati kemerdekaan Aceh. Tapi yang terjadi ialah Aceh sendiri melakukan sejumlah besar tindakan perompakan. Kapal-kapal Inggris, Belanda, Amerika, dan Italia dijarah oleh gang-gang dari pelabuhan Aceh. Di bawah perjanjian 1824, pemerintah Batavia wajib melindungi pelayaran internasional melawan kegiatan perompakan seperti ini, tapi pemerintah Batavia tidak bisa melakukannya tanpa menduduki pelabuhan-pelabuhan utama Aceh, tindakan yang dilarang oleh perjanjian yang sama! Orang Aceh sangat sadar akan kesulitan Batavia dan mencoba lebih memperumit keadaan dengan meminta perlindungan Sultan Turki, yang telah mereka tawari kedudukan sebagai penguasa atasan atas negeri mereka sejak abad ke-17. Tapi, bahkan kalau dia ingin melakukannya, Padishah hampir mustahil menuruti permintaan mereka, karena diajukan pada 1868, ketika Turki sangat berutang budi pada Britania dan butuh bantuan Imperium Britania untuk menghadapi kemungkinan serbuan Rusia.

Pemerintah Belanda menganggap penting untuk memfokuskan diri pada pencegahan terjadinya segala kemungkinan keadaan darurat. Ia menyepakati satu perjanjian baru dengan Britania yang menarik penolakannya atas kemungkinan pendudukan Aceh oleh Belanda. Pada saat itu juga, perjanjian lain disepakati mengenai penyerahan Pantai Emas Belanda kepada Britania (1871).[8] Begitu ia bebas dari semua halangan, pemerintah di Batavia merasa terdorong mengambil tindakan radikal, tapi ia harus mempertimbangkan pandangan pemerintah di negeri leluhur. Perang dengan Aceh akan jadi tindakan yang jauh lebih penting daripada ekspedisi mana pun yang dilakukan di Indonesia sejak perang 1830

di Jawa. Perlu kekuatan besar dan suplai mahal. Menteri Koloni minta kesabaran, karena tahu benar bahwa orang di Belanda sangat enggan terjun dalam peperangan dengan "skala" seperti itu, walaupun aksi perompakan di Selat Malaka menuntut adanya tindakan segera. Serangan-serangan Aceh yang baru atas kapal-kapal dagang membuat keadaan menjadi krisis, meskipun demikian pecahnya perang akan tertunda kalau bukan karena kekhawatiran pemerintah Belanda yang terus-menerus bahwa suatu kekuatan asing mungkin akan mendahului Belanda dan merebut kekuasaan atas kesultanan Sumatra. Turki sudah jelas tidak mau ikut campur. Wazir Sang Padishah memberitahu Menteri Belanda di istana Turki bahwa dia tidak ingin terlibat dalam urusan Indonesia. Tapi segera sesudah itu ada kabar angin bahwa Sultan Aceh telah mengirimkan utusan ke Prancis dan bahwa satu kelompok politik di kerajaan Italia yang baru didirikan berencana membangun satu imperium kolonial dan sedang mencari kesempatan menduduki sebagian Kalimantan dan Sumatra di mana kekuasaan Belanda belum ditegakkan. Juga Jepang masuk dalam perlombaan, dan ambisinya sejak awal sudah sangat tinggi.

Pemerintah Batavia sedang meneruskan usaha mengadakan kesepakatan yang memuaskan dengan Sultan Aceh, kesepakatan yang akan menampakkan bahwa dari luar kedaulatan raja tidak terganggu, ketika satu laporan konsul jenderal Belanda di Singapura memicu berbagai peristiwa.[9] Duta-duta Aceh yang kembali dari Kepulauan Riau, tempat mereka berunding dengan residen Belanda, singgah di Singapura, tempat mereka mengadakan perundingan rahasia dengan konsul-konsul Amerika dan Italia.

Konsul Jenderal Belanda di Singapura diberitahu tentang usaha-usaha itu dan langsung mengirimkan telegram kepada pemerintah di Jawa. Bisa dimengerti, laporannya menimbulkan kehebohan di Batavia dan langsung diteruskan ke Den Haag. Berita itu mengguncang penguasa sehingga menimbulkan demam aktivitas diplomatik dan politik. Agak menarik menggambarkan peristiwa-peristiwa ini dengan lebih rinci karena, dari sudut pan-

dang sejarawan, itulah bahan-bahan terbaik untuk "suatu studi kasus mengenai konflik yang terjadi di wilayah pendudukan pada akhir abad ke-19".

Laporan Konsul Jenderal di Singapura (seorang bernama Mr. Read yang berasal dari dan berkebangsaan Britania) agak kurang cermat. Dalam kenyataan, konsul-konsul Italia dan Amerika dihubungi seorang Aceh tak dikenal bernama Ariffin, yang mengaku bertindak atas perintah rahasia dari duta-duta resmi itu. Duta-duta itu berlayar dari Riau ke Singapura dengan kapal pemerintah Belanda. Dari Singapura mereka seharusnya melanjutkan perjalanan ke Aceh. Perantara itu meminta kedua konsul tersebut menerima duta-duta itu untuk membahas campur tangan Amerika atau Italia untuk menghambat aksi bersenjata Belanda. Konsul Italia *langsung* menjawab bahwa dia tidak punya mandat untuk berunding dan membujuk orang Aceh itu untuk tidak lagi mencoba-coba. Konsul Amerika, seorang bernama Mr. Studer, tidak senegatif itu tanggapannya dan sejak ia memutuskan setuju mengadakan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin Aceh, dia membiarkan diri semakin masuk ke dalam urusan diplomatik yang agak meragukan. Dia sama sekali tidak punya landasan untuk menganggap bahwa Amerika Serikat punya minat memperoleh pijakan di Sumatra bagian utara.[10] Tampaknya, Mr. Studer punya pandangan sama dengan mayoritas saudagar dan pedagang kecil Singapura, yang sangat menentang perluasan kekuasaan Belanda atas Aceh dan mengeluh bahwa kepentingan mereka telah "dikhianati" oleh Yang Mulia Pemerintah di London. Mereka mungkin percaya bahwa campur tangan Amerika atau Italia akan membuat pemerintah Britania menegaskan kembali klaimnya.

Mungkin saja konsul jenderal Belanda itu merasa perlu mengirimkan peringatan kepada pemerintah Batavia yang peragu itu bahwa perlu ada tindakan cepat. Bagaimanapun pikirannya, Mr. Read melaporkan ke Batavia, bahwa duta-duta Aceh telah mengunjungi Mr. Racchia (konsul Italia) dan Mr. Studer, dan

bahwa Mr. Racchia "kemungkinan besar akan pergi ke Aceh, begitu dua kapal, yang kini dalam perjalanan dari Italia menuju Singapura, tiba". Read memerintahkan perantara Aceh itu, Ariffin, untuk melapor ke Riau. Baik Read maupun residen di Riau berkesimpulan bahwa konsul Amerika sangat terlibat dalam urusan ini. Bahkan, Studer telah mengirimkan telegram kepada komandan skuadron armada Amerika yang sedang berpatroli di Laut Cina, untuk maju ke Singapura. Lebih daripada itu, dia membahas dengan Aceh draf "perjanjian persahabatan" yang akan disepakati antara Sultan dan Amerika Serikat.

Mr. Read melebih-lebihkan ancaman, tapi Gubernur Jenderal mengirimkan telegram ke Den Haag:

> Konsul Jenderal Singapura melaporkan pengkhianatan Aceh. Konsul Italia dan Amerika telah dihubungi dan keduanya berunding dengan Aceh. Konsul Amerika mengusulkan perjanjian Aceh Amerika. Konsul Italia menunggu dua kapal tibadan kemudian akan pergi ke Aceh.[11]
>
> Mr. Read melaporkan bahwa campur tangan Italia mungkin terjadi. Dalam berita Batavia ke Den Haag hal itu menjadi kepastian. Karena itu Menteri Koloni melaporkan kepada Yang Mulia Raja:
>
> Laporan terakhir dari Batavia mengatakan bahwa konsul-konsul Amerika dan Italia *telah campur tangan* dan *akan mengirimkan kapal perang* ke Aceh.

Akibatnya, Kabinet Menteri di Den Haag memutuskan memerintahkan Gubernur Jenderal (18 Maret 1873) "untuk mengirimkan skuadron laut yang kuat ke Aceh dan menanyai Sultan untuk mendapatkan penjelasan tentang perilaku khianat ini".

Kementerian Luar Negeri Belanda memerintahkan Kedutaan di Roma dan di Washington untuk menghubungi Kantor Luar Negeri di sana. Jawaban yang diterima sangat memuaskan. Menteri Luar Negeri Italia langsung menjawab bahwa konsul

tidak punya wewenang menyepakati perjanjian politik atau masuk dalam perundingan politik, dan bahwa, karena itu, tidak perlu ada penyelidikan lebih jauh tentang masalah itu, yang belum pernah didengar oleh Menteri sebelum menerima pertanyaan Belanda tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika, Mr. Hamilton Fish, dengan panjang lebar menunjukkan bahwa konsul Amerika bebas sepenuhnya meminta tolong Angkatan Laut Amerika Serikat kapan saja perlindungan kepentingan Amerika membuat hal itu diperlukan, dan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat bebas mengunjungi pantai Aceh–hak yang tidak pernah dipertanyakan siapapun–tapi bahwa sejauh itu dia tidak menerima informasi mengenai urusan itu dan bahwa Amerika Serikat tidak secara khusus tertarik pada kesultanan Aceh dan hubungannya dengan pemerintah-pemerintah lain. Dengan kebapakan, dia menambahkan bahwa ada bahaya Belanda mungkin akan melibatkan diri dalam kerumitan atas wilayah yang tidak penting ini. Atas permintaannya akan informasi, dia menerima laporan panjang dari konsul jenderal di Singapura, "terlalu panjang," kata Menteri Luar Negeri itu kemudian, "untuk dibaca," dan yang mengenainya dia berkomentar dalam suatu komunikasi dengan Menteri Amerika di Den Haag dengan kata-kata berikut yang sangat pendek dan jelas: "Orang itu (yakni konsul jenderal) goblok!"[12]

Laporan Mr. Studer memang panjang, karena dia merasa perlu memberikan alasan pembenaran bagi tindakannya yang ceroboh. Bersama laporan itu dia melampirkan draf perjanjian Amerika-Aceh ke Washington, di mana ia mungkin masih bisa ditemukan, dalam teks Aceh dan Inggris. Dia terus mengirimkan komunikasi-komunikasi panjang kepada Menteri Luar Negerinya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa dia adalah korban intrik Belanda-Britania-Aceh. Pastilah merupakan saat yang menyedihkan baginya ketika dia harus melaporkan bahwa "perantara" Aceh itu, Ariffin, yang kunjungannya menjadi awal semua perkara, telah meninggalkan Malaya dengan ... kapal

pemerintah Belanda.

Sementara itu, utusan-utusan Batavia telah masuk dalam perundingan dengan Sultan Aceh untuk berusaha mendapatkan kesepakatan yang akan memuaskan kedua belah pihak dengan menjamin keselamatan pelayaran di perairan Aceh. Setelah menerima jawaban yang tidak memuaskan, mereka secara resmi menyatakan perang. Kekuatan penyerbuan pertama mendarat pada April 1873 dan menyerang benteng-benteng pantai Aceh, tapi, karena hanya terdiri atas 3.000 orang, mundur beberapa minggu kemudian.[13] Ekspedisi kedua yang dilakukan dengan kekuatan hampir 7.000 serdadu mendarat pada Desember tahun itu juga, dan menaklukkan keraton sang Sultan dalam delapan minggu. Segera sesudah itu Sultan wafat, dan pemerintah memerintahkan penundaan operasi militer lebih jauh, berharap bahwa keberhasilan tentaranya akan memengaruhi Sultan baru untuk menyepakati perjanjian di mana kedaulatan Belanda akan diakui dengan jaminan kemerdekaan dalam urusan internal. Betapa kaget penguasa Batavia ketika mereka tahu bahwa Sultan tidak berkuasa memaksa rakyatnya taat pada perjanjian apa saja yang mungkin dia sepakati; bahwa perang harus dilancarkan terhadap setiap kepala daerah dan pemimpin agama, serta pengikut-pengikut mereka, dan bahwa karena luasnya wilayah Aceh, dan keberanian penduduknya, perang ini paling tidak akan berlangsung lima tahun. Tapi mundur lagi kini sudah tidak mungkin, dan perang itu pun berlanjut, walaupun tanpa banyak semangat. Begitu Keraton ditaklukkan, terjadilah pertempuran yang tersebar. Setiap kali keberhasilan diperoleh, pemerintah akan menghentikan serangan dengan harapan orang Aceh akan mengubah pikiran dan berdamai, tapi satu-satunya dampak kebijakan setengah hati ini hanyalah memperkuat perlawanan. Tahun demi tahun perang berlarut-larut. Pada 1880, persis ketika orang Aceh mulai merasa bahwa perlawanan lebih jauh tidak berguna, pemerintah memutuskan untuk menempatkan seorang sipil untuk menangani administrasi, dengan harapan mengambil

hati orang Aceh, tapi langkah ini berdampak sebaliknya. Kekerasan langsung meningkat lagi. Biaya perang menguras perbendaharaan kolonial dan pandangan publik Belanda makin lama makin kritis terhadap administrasi kolonial tersebut.

Administrasi itu dikritik, pertama, karena memulai perang, dan kedua, karena tidak melancarkan perang itu dengan semangat begitu sudah dimulai. Ada pengkritik yang menuntut bahwa semua usaha itu dihentikan, dan tempat-tempat yang dikuasai ditinggalkan. Yang paling pesimistik di antara para pengkritik itu meramalkan lepasnya koloni dan keruntuhan finansial negeri leluhur. "Hindia," kata seorang mantan menteri Koloni, "adalah gabus tutup botol yang menjaga negara Belanda tetap terapung." Satu slogan pun tercipta: "kalau Hindia hilang, semua hilang". Bertahun-tahun kemudian, setelah 1949, bahkan kolonialis yang paling keras kepala pun mengakui bahwa "akhir koloni Belanda" tidak menimbulkan "akhir semua kemakmuran". Sekitar 1880 ada orang Aceh yang mengklaim bahwa para pejuang mereka telah menewaskan lebih daripada 17.000 serdadu Belanda selama 10 tahun pertama perang itu, tapi bahkan kalangan yang optimis ini akan heran bila mendengar bahwa sebagian orang di Belanda memperkirakan betapa besar kemenangan yang akan mereka peroleh.

Tapi jelas ada yang salah dengan kebijakan Batavia. Partai Liberal yang dominan sangat bangga akan pencapaian Menteri Koloni dan para gubernur jenderalnya. Mereka telah berhasil menjalankan reformasi penting atas kebijakan kolonial, mereka telah membatasi keikutsertaan pemerintah dalam perusahaan ekonomi kolonial, dan mereka sudah berhasil mendorong kegiatan swasta di bidang ekonomi; tapi kini, partai berkuasa harus mengakui bahwa urusan Aceh telah ditangani dengan buruk. Juga menjadi jelas bahwa banyak kesalahan yang dilakukan tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan yang sangat mengherankan tentang negeri yang akan ditaklukkan oleh administrasi mereka. Pemerintah Batavia telah abai meminta nasihat profesional

sebelum mulai perang, yang pasti dapat diberikan para pakar, yang tahu banyak tentang urusan Islam pada umumnya dan Islam Indonesia pada khususnya.

Akibatnya, pemerintah mengundang Christian Snouck Hurgronje, profesor studi Islam di Universitas Leiden, untuk mengadakan studi menyeluruh tentang negeri dan orang Aceh. Snouck Hurgronje lahir pada 1857, dia belajar bahasa Arab di Universitas Leiden dan Strassbourg, dan kemudian kembali ke Leiden untuk mengajar Hukum dan Agama Islam. Dia sudah memperoleh reputasi internasional karena studinya atas Mekah, dan dia memuncaki risetnya dengan kunjungan ke Kota Suci itu sendiri. Pada 1884 dia mendarat di Jeddah tempat dia tinggal beberapa waktu untuk mendapatkan pengetahuan sempurna tentang bahasa itu dan kemudian, menyamar sebagai ulama Muslim, dia pergi ke Mekah. Dia sudah memperhitungkan waktunya sedemikian rupa sehingga dia tiba bukan di saat hari-hari sibuk musim haji, karena dia ingin mempelajari kehidupan sehari-hari orang Mekah dan membahas pokok-pokok Hukum Islam dengan ulama Arab di kota itu. Dia juga ingin melihat koleksi buku, manuskrip, dan karya para pakar yang biasa dipelajari para ulama ini, dan dengan demikian memperluas pengetahuannya sendiri. Dia tinggal enam bulan dan berteman dengan banyak orang terpelajar Mekah yang kemudian tetap ingin berhubungan dengan orang Belanda "Muslim" ini, Abd-al-Gaffar, setelah dia pulang ke negerinya sendiri.

Masa tinggal Snouck Hurgronje di Mekah membuka aspek-aspek kehidupan Indonesia yang sama sekali baru dan sampai saat itu tidak diketahui. Dia menemukan bahwa ada koloni orang Indonesia yang cukup besar tinggal di Kota Suci itu, dan bahwa orang-orang Indonesia di Mekah tetap berhubungan dengan keluarga dan teman di kampung halaman mereka. Hubungan antara orang Indonesia di rantau dan pusat kehidupan Islam terbukti jauh lebih erat daripada yang diperkirakan. Fakta itu memperjelas cerita-cerita tentang hubungan agama dan politik

antara Jawa dan Sumatra di satu pihak dan Arab di lain pihak, yang dikisahkan oleh catatan-catatan dari abad ke-17.

Snouck menuliskan buat kita gambaran nyata tentang haji Indonesia pada masanya. Dalam kelompok-kelompok besar dia melihat mereka berjalan di dalam kota itu, mengikuti para *syekh* (guru) mereka. Ada syekh khusus untuk setiap wilayah Indonesia, untuk orang Aceh dan Melayu-Minangkabau, untuk orang dari Kalimantan Barat dan untuk mereka yang datang dari Sulawesi dan untuk pengunjung yang datang dari berbagai wilayah Jawa. Mendengarkan pembicaraan jemaah haji ini dengan orang-orang senegeri mereka yang tinggal permanen di Mekah, Snouck belajar banyak tentang sikap Indonesia terhadap pemerintah kolonial, dan juga tentang kepentingan Mekah sebagai pusat studi Islam untuk Indonesia. Dia telah mencatat bahwa di antara orang Muslim pada umumnya, Rusia adalah yang paling sedikit tidak disukai (tentu saja tetap tidak disukai) dari semua negeri Eropa yang menguasai wilayah berpenduduk Muslim. Britania adalah yang paling dibenci, tapi ini mungkin karena ada jumlah besar orang Muslim India yang datang ke Tempat-Tempat Suci. Orang Mekah punya banyak kesempatan mendengarkan segala sesuatu tentang kejahatan pemerintahan Britania, sementara hanya sedikit yang diketahui tentang kondisi yang ada, misalnya, di Turkestan Rusia. Ketika Snouck sedang di Mekah, pertempuran di Aceh sudah terjadi, dan dia kaget mendengar bahwa pecahnya perang itu menimbulkan kehebohan besar di dunia Islam. Pada dekade antara 1880 dan 1890 terjadi banyak peristiwa, yang merangsang imajinasi orang Mekah, dan menimbulkan harapan mereka akan kebangkitan kembali kekuatan Muslim di seluruh dunia kuno. Pada tahun-tahun itu, Mahdi memimpin serdadu fanatiknya, bersenjatakan hanya pedang dan tombak, melawan tentara Mesir yang dipimpin perwira Inggris dan membawa mereka dari kemenangan ke kemenangan. Akibatnya, perang di Aceh dilihat sebagai salah satu dari rantai peristiwa yang membesarkan hati. Ini dilihat sebagai kemenangan Islam karena orang Aceh dapat dengan sah

mengklaim mereka telah memukul mundur penyerbu pertama Belanda dari negeri mereka segera setelah mereka mendarat, dan berhasil menghentikan serbuan kedua di dekat pantai. Maka, orang "Jawah" (penduduk Indonesia di Mekah) ternyata jauh lebih tertarik pada kelangsungan perang Aceh daripada sebagian orang Indonesia yang tinggal di Kepulauan Indonesia. Pertanyaan pertama yang biasa ditanyakan orang "Jawah" kepada jemaah haji yang baru tiba adalah apakah orang-orang "kafir" itu sudah terusir ke laut dan kapan suatu pemberontakan menyeluruh orang beriman akan menghentikan pemerintahan orang kafir di Kepulauan Indonesia. Jawaban para jemaah haji sering mengecewakan mereka. Orang Aceh membanggakan keberhasilan militer mereka, tapi orang lain mengemukakan pandangan bahwa orang Aceh sangat tidak bijaksana melawan Belanda dengan mengorbankan begitu banyak jiwa manusia, karena, kalau Allah tidak ingin orang Belanda menaklukkan Indonesia, ia tidak akan mengizinkannya, dan kalau pemerintahan mereka ditakdirkan berakhir, Allah akan menghancurkan kekuatan mereka. Lagi pula, kalau Belanda terusir, Inggris mungkin akan masuk dan akibatnya akan lebih buruk! Terhadap pandangan seperti ini orang Jawah dan orang Mekah lain akan menentang dengan keras. Di Kota Suci itu sikap anti-Kristen dan karena itu antikolonial tampaknya merupakan satu-satunya sikap yang benar. Pada saat-saat seperti itu, biasanya ada banyak pembicaraan tentang "Jihad", tapi ulama-ulama Mekah mengatakan jihad adalah suatu *prinsip* yang, dalam keadaan tertentu, harus diikuti tapi tidak bisa begitu saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Snouck di hari kemudian di Hindia menunjukkan bahwa banyak pejabat kolonial Barat sama sekali tidak tahu tentang pembatasan ajaran Islam dalam praktik "Jihad", dan bahwa mereka cenderung melebih-lebihkan bahaya "fanatisisme" Islam dan pengaruh "subversif" atas jemaah haji setelah mereka pulang ke negeri mereka sendiri.

Salah satu hal pertama yang dilakukan Snouck, ketika dia tiba di Indonesia dalam kapasitas barunya sebagai penasihat

pemerintah, adalah meyakinkan para pejabat bahwa mereka tidak perlu takut pada pengaruh para "haji", dan bahwa tidaklah bijaksana memperlakukan orang-orang ini dengan kecurigaan tak berdasar. Snouck sudah belajar bahwa Mekah bukan hanya pusat religius, tapi juga pusat politik bagi Kepulauan Indonesia, dan dia berpandangan bahwa kebijakan terbaik adalah berteman dengan pemimpin-pemimpin Islam di Kota Suci itu. Kemudian nasihatnya diikuti dan hasilnya bagus.

Setelah tinggal sebentar di Jawa, Snouck Hurgronje mengunjungi Aceh. Selama tujuh bulan dia tinggal di ibukota Aceh, menjauh dari sejawatnya dan mengabdikan seluruh waktunya untuk menyelidiki perilaku, bahasa, serta pranata-pranata politik dan religius orang Aceh. Snouck menerbitkan laporannya pada 1892 setelah mengembangkannya menjadi karya ilmiah yang tebal. Pengalamannya di Mekah menolongnya mengerti bahwa Muslim di Aceh tidak akan pernah bekerjasama dengan sukarela dengan pemerintah Hindia Belanda, karena selama perlawanan masih dimungkinkan, adalah tugas Orang Beriman untuk melawan pemerintahan Kristen. Bahkan kalaupun sebagian besar penduduk perdesaan yang sederhana rindu akan perdamaian, para ulama tidak akan menyerah, dan mereka bisa mendapatkan cukup petempur profesional di kalangan para pengikut kepala suku untuk meneruskan perang. Tapi kalau kekuatan dihadapi dengan kekuatan, dan pada saat yang sama rakyat biasa diyakinkan bahwa agama dan adat istiadat mereka akan tetap terjamin di bawah pemerintahan Belanda, Snouck percaya bahwa pada akhirnya akan terbuka mata mereka bahwa ada kesempatan lebih besar memperoleh penghidupan baik di bawah pemerintahan Belanda daripada di bawah pemimpin-pemimpin gerilya yang, apabila tidak ada Belanda, akan kembali berperang satu sama lain. Bila sebagian besar rakyat sudah percaya hal itu, perang di Aceh, walaupun sangat sulit karena alam yang liar di negeri berpenduduk jarang ini, pastilah dapat diakhiri dengan berhasil. Di sini, kebijakan "memecah-belah dan

memerintah" dapat diterapkan dengan efektif. Belanda dapat mencoba bersahabat dengan kepala suku lokal yang kekuasaannya berakar pada tradisi dan yang kedudukannya sering terancam oleh ulama agama. Taktik ini memperoleh hasil lumayan. Patut dicatat bahwa para ulama membalas dendam pada 1941. Ketika mereka bangkit untuk membantu penyerbu Jepang melawan Belanda, mereka memakai senjata mereka melawan para kepala herediter, banyak di antaranya yang terbunuh.[14]

Pada 1893 Gubernur Jenderal baru C.H. van der Wijck tiba di Hindia dan mulai mererapkan kebijakan yang lebih bersemangat, bukan hanya di Aceh tapi juga di wilayah-wilayah lain. Pada 1894 penduduk Muslim pulau Lombok tertekan berat oleh para penjarah Bali. Satu kekuatan bersenjata dikirim untuk mengakhiri perang antarpulau di sana. Lombok ditempatkan di bawah pemerintahan langsung Belanda. Berikutnya dalam daftar Gubernur ialah Aceh. Komando atas tentara diserahkan kepada Lt. Kolonel Joannes B. van Heutsz. Komandan baru itu memerintahkan pasukannya untuk terus-menerus mengejar kelompok gerilya Aceh. Dalam tiga tahun hampir semua pemimpin gerilya menyerah. Kolonel van Daalen menyelesaikan penaklukan Sumatra bagian utara dengan berbaris masuk ke jantung negeri itu, negeri Gayo dan Alas, dan menundukkan penduduknya. Baik Van Heutsz maupun Van Daalen adalah orang militer yang andal. Prestasi terbesar mereka adalah memulihkan semangat serdadunya yang lemah akibat taktik maju mundur yang dipakai para pendahulu mereka. Tapi perilaku pasukan mereka begitu buruk sehingga beberapa kali protes keras muncul di Parlemen Belanda di Den Haag.

Dibanding yang diperoleh dengan aksi militer yang kejam, hasil-hasil yang lebih bermanfaat diperoleh oleh banyak ilmuwan Belanda yang kini mulai membaktikan usaha mereka untuk mempelajari pranata-pranata dan sejarah Indonesia. Profesor C. van Vollenhoven dari Universitas Leiden menjadi terkenal sebagai penemu "adat", hukum tak tertulis penduduk asli. J. H. Kern dan J. L. A. Brandes menghidupkan kembali pengetahuan

akan bahasa dan sastra Indonesia kuno. N. J. Krom dan lain-lain merekonstruksi sejarah Indonesia pra-Islam, dan menghidupkan kembali kejayaan kerajaan-kerajaan Singasari dan Majapahit. Reruntuhan monumen-monumen besar Indonesia digali dan dipulihkan. Dalam dekade-dekade berikut, gerakan nasionalis Indonesia memanfaatkan dengan baik fakta-fakta sejarah yang ditemukan para ahli ini. Dengan menghidupkan kembali masa lalu Indonesia, para ahli Belanda memberikan kepada para nasionalis satu argumen yang suka mereka pakai. Borobudur didirikan pada abad kedelapan, ketika negeri Belanda masih liar dan tak bisa didiami.

Pada masa-masa ini, pemerintahan Belanda diperluas mencakup seluruh Kepulauan dan sampai ke pelosok-pelosok terjauh. Pemerintah Batavia mulai campur tangan dalam pemerintahan raja-raja lokal yang diharuskan menandatangani suatu formula ("Korte Verklaring", yakni, "Pernyataan Singkat") berisi pernyataan bahwa mereka memberikan kekuasaan kepada administrasi kolonial untuk memberikan petunjuk kepada mereka mengenai cara menjalankan pemerintahan mereka.[15] Lebih daripada 250 penguasa, di antaranya ada pemerintah wilayah besar, ada juga yang hanya kepala desa atau daerah kecil, menandatangani pernyataan itu dan dengan demikian sepenuhnya takluk kepada pemerintah Batavia. Konsep "*paramountcy*"*, yang diterapkan Britania di India, tidak dikenal di Hindia Belanda yang mulai sekarang, suatu pengakuan akan kedudukan Batavia sebagai penguasa atasan mencakup pengalihan *de facto* semua kekuasaan kepada pejabat Belanda. Pada awal abad ke-20 kesultanan Bone dan Gowa di semenanjung barat daya Sulawesi diduduki tentara Belanda. Tindakan ini sangat disesali bangsawan kedua negeri itu, tapi diterima sangat baik oleh suku-suku non-Muslim di pedalaman, yang sampai saat itu menderita akibat serbuan-serbuan penculik budak dari tetangga-tetangga Muslim mereka di sebelah selatan. Indonesia terbagi ke dalam begitu banyak negeri, negara besar dan kecil, dan terdiri atas begitu banyak bangsa dan

suku bangsa, banyak di antaranya saling bermusuhan dengan banyak pihak, sehingga kekalahan satu suku atau negara selalu menguntungkan kepentingan pihak lain. Ketika akhirnya semua bangsa dan suku bangsa itu dipaksa takluk kepada pemerintah Belanda, sangat sedikit kelompok yang tidak merasa terpukul dalam satu atau lain hal. Dalam kasus tertentu kekuasaan yang menguntungkan bangsa berperadaban lebih tinggi atas tetangga mereka yang kurang beradab telah terpangkas, dalam kasus lain suku primitiflah yang merasa kebebasan mereka telah terkungkung, karena ada kebiasaan yang mereka anggap penting dilarang dilakukan. Pengayau yang terlindung dari penculik budak tetap saja protes terhadap campur tangan pelindungnya itu dalam hal tradisi kuno perkayauan.

Adalah tugas yang tidak kenal terimakasih yang diselesaikan oleh gubernur jenderal Van Der Wijck dan Van Heutsz. Kebijakan pendamaian mereka dibenci oleh mereka yang didamaikan, dan disebut "imperialisme demi kepentingan kapitalis" oleh banyak orang Eropa lain. Sebagian besar orang Belanda, dan banyak orang Eropa lain, mungkin sudah akan memprotes, kalau Batavia tidak menjalankan "pendamaian" itu, dan *tidak* mengakhiri kebiasaan-kebiasaan yang sebagian bersifat barbar tersebut. Kalau pemerintah Hindia Belanda tidak punya kepentingan selain kapitalisme, mereka pasti akan membiarkan saja sebagian besar wilayah dan orang Kalimantan serta Sulawesi, karena hampir semua usaha kapitalis berkonsentrasi hanya di Jawa dan Sumatra.

Keadaan Indonesia pada 1910 sangat berbeda dari keadaan pada 1890. Entitas politik dan sosial yang tak terkira jumlahnya di Kepulauan Indonesia telah dipersatukan. Kini ada satu komunitas politik, keberhasilan besar yang di kemudian hari dinilai jauh lebih tinggi oleh kalangan nasionalis antikolonial daripada "kolonialis". Perdamaian ada di mana-mana dan administrasi Batavia menjadi sangat efisien dari segi teknis. Dari segi ekonomi, negeri itu berkembang luar biasa. Pada 1899 Hindia Belanda sudah

hampir bangkrut. Perlu pinjaman sampai 100 juta gulden untuk menutupi defisit anggaran. Pada 1907 anggaran menunjukkan surplus, walaupun ada fakta bahwa beban perbendaharaan makin lama makin meningkat. Tapi, masih banyak yang harus dilakukan. Orang-orang seperti Snouck Hurgronje menyarankan kebijakan yang berani menyangkut pendidikan. "Orang Indonesia," katanya, "memohon kita untuk mengajar mereka; dengan mengabulkan keinginan mereka kita akan mendapatkan kesetiaan mereka sampai selamanya."

Salah satu alasan penolakan pemerintah untuk segera menyebarkan pendidikan dalam skala besar adalah bahwa perlu biaya terlalu besar untuk memberikan pendidikan universal kepada setiap orang. Memang, pada saat itu, biaya pendidikan umum akan lebih besar daripada pemasukan pemerintah, tapi tidak bisa disangkal bahwa pemerintah telah mengabaikan pendidikan umum, bukan hanya di masa Sistem Kultur, tapi juga selama 30 tahun berikutnya.[16] Sampai 1854 satu-satunya sekolah yang mendapat dana publik adalah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa. Sekolah-sekolah ini terbuka untuk anak Indonesia sampai 1848. Sejak itu prinsip sekolah terpisah untuk orang Indonesia diperkenalkan, tapi tanpa menyediakan sekolahnya! Selain pendirian dua sekolah guru untuk orang Indonesia pada 1866 dan 1867, sangat sedikit yang tercapai. Pada periode Liberal terjadi perluasan pengajaran dasar untuk orang Indonesia. Suatu reformasi terhadap sistem sekolah Indonesia yang dilakukan pada 1893 memungkinkan, dengan menurunkan standar umum pengajaran (salah satu kelemahan pengajaran dasar Belanda di Eropa adalah terlalu membebani murid), perluasan wilayah tempat pengajaran diberikan. Tapi bahkan dalam bentuk termodifikasi ini, sistem sekolah masih terlalu mahal. Untuk mendirikan sekolah-sekolah "kelas dua" ini (demikian nama resminya) di seluruh Jawa dan Madura—belum lagi pulau-pulau lain—perlu biaya lebih daripada 60 juta setahun, atau 50 persen dari pemasukan negara.

Kebutuhan mendesak akan pendidikan yang lebih banyak dan

lebih baik, digabung dengan keadaan parah keuangan negara, menyebabkan terbitnya sebuah artikel yang mengguncangkan sentimen publik di Belanda. Di bawah judul "A Debt of Honor", Mr. Conrad Th. van Deventer menerbitkan artikel ini di majalah ternama "De Gids" pada 1899, di mana dia berargumen bahwa Belanda telah memperoleh berjuta-juta dari Indonesia dengan cara tanam paksa tanaman-tanaman berharga dan, karena itu, pada masa ketika koloni itu sangat membutuhkan dana untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk asli, Belanda terikat "demi kehormatan" untuk membayar budi atas dana berjuta-juta itu. Dia memperkirakan jumlah yang akhirnya harus dikembalikan adalah 187 juta gulden. Dengan uang sejumlah itu, sistem sekolah akan membaik dan banyak kerja lain untuk kepentingan publik dapat dilakukan. Sangat benar bahwa, kalau orang Belanda sungguh-sungguh percaya dalam prinsip kemajuan dan peradaban moral yang mereka nyatakan dengan begitu penuh perasaan di Eropa, mereka punya kewajiban menyediakan kebutuhan orang Indonesia, dan bukan hanya sebatas jumlah uang tertentu, tapi sejauh mereka mampu dan dengan semua sumber daya yang mereka miliki. Tujuan Van Deventer sangat baik, tapi alih-alih menyarankan restitusi uang yang diterima dari Indonesia bertahun-tahun yang lalu, akan lebih baik kalau dia menyarankan alokasi dana memadai untuk melakukan apa yang harus dilakukan, karena bahkan apabila Belanda tidak pernah memperoleh keuntungan dari koloni itu, ia tetap punya kewajiban terhadap penduduknya.

Pada 1901 "kewajiban moral Belanda kepada rakyat Hindia" dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu prinsip yang akan mendasari kebijakannya di masa depan.[17] Pada 1905 jumlah 40 juta gulden dibayarkan oleh perbendaharaan Belanda kepada perbendaharaan koloni untuk "perbaikan kondisi ekonomi di Jawa dan Madura". Pada 1912 keuangan Belanda dan Hindia terpisah tegas. Sementara itu, pemerintah Batavia berhasil mengatasi kesulitan keuangannya dan mengubah defisit menjadi surplus.

Maka pelarangan legal terhadap transfer itu pun diumumkan pas pada waktunya.

Sebab-sebab ekonomilah yang terutama mengakibatkan perubahan ini. Peningkatan harga pada umumnya untuk produk-produk tropis terjadi pada awal abad ke-20. Konferensi di Brussels membuka peluang yang lebih besar bagi gula tebu untuk bersaing dengan gula bit. Inilah awal zaman emas untuk perkebunan tebu Jawa. Produksi naik dari 700.000 ton (pada 1900) menjadi 1,4 juta ton pada 1914. Produksi teh meningkat lima kali lipat, tembakau naik 50 persen, karet praktis dari nol menjadi 15.000 ton. Belanda dan modal asing melihat Indonesia sebagai tempat bagus untuk investasi. Produksi gula hampir seluruhnya berada di tangan Belanda, tapi dalam hal teh, karet, dan tembakau, banyak modal asing yang terlibat, sekitar 50 persen, terutama Inggris, kalau bisa kita terima statistik yang dipakai J. S. Furnivall.[18] Produksi minyak naik dari 360.000 ton pada 1900 menjadi 1,54 juta ton pada 1914, meningkat empat kali lipat dan menarik modal dari seluruh dunia. Standard Oil Company bekerja berdampingan dengan Royal Dutch, dan mendirikan Netherlands Colonial Oil Company untuk mengeksploitasi ladang-ladang minyak kaya di Palembang. Perkembangan yang paling mengesankan adalah makin bertambahnya keterlibatan "Wilayah Luar", khususnya Sumatra, dalam produksi. Nilai barang ekspor meningkat dua kali lipat pada periode antara 1900 dan 1914, tapi walaupun pada 1900 hanya sepertiga ekspor ini datang dari pulau-pulau di luar Jawa, kontribusi wilayah-wilayah itu telah meningkat sampai 50 persen dari total ekspor pada 1914.

Dalam keadaan seperti ini pemerintah dapat memperkirakan pemasukan yang lebih baik dari pajak serta perusahaan miliknya sendiri, dan pendapatan total negara memang berlipat dua pada 14 tahun yang sama. Pajak menghasilkan lebih daripada 50 persen pendapatan, dan perusahaan pemerintah, kopi dan timah, hanya seperempat. Populasi orang Eropa yang sudah meningkat mencapai hampir 80.000 orang, mulai menyumbangkan lebih

banyak dalam bentuk pajak, seperti bisa diperkirakan. Pada 1907 Van Heutsz berhasil memperoleh surplus pemerintah dan berhasil mempertahankan anggaran yang berimbang baik. Di bawah dampak perubahan yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan tekanan dari orang-orang berpengaruh untuk membuat awal baru dalam hal kebijakan kolonial baru, pemerintah mulai mengabdikan lebih banyak dana dan perhatian untuk kesejahteraan orang Indonesia. Memang sudah biasa kebijakan kolonial Belanda berupaya sebaik mungkin memperbaiki posisi material orang Indonesia, tapi terus menganggap remeh kebutuhan pendidikan dan politis rakyat banyak.

Salah satu masalah besar pemerintah adalah melindungi orang Indonesia terhadap kekuatan ekonomi Barat. Ia harus menjaga agar petani kecil tapi mandiri tidak terusir dari tanahnya dan terganggu dalam memproduksi pangan untuk dirinya dan keluarganya akibat perkembangan perusahaan pertanian kapitalis. Ini antara lain dicapai lewat undang-undang agraria dan pelarangan pemindahan kepemilikan tanah dari orang Indonesia ke orang non-Indonesia, tapi dengan meningkatnya penduduk perhatian khusus harus diberikan kepada perluasan sawah ladang, khususnya sawah irigasi, dan pemasukan tanaman-tanaman baru. Seluruh masalah itu dikaji oleh suatu komite khusus "untuk meneliti sebab-sebab kesejahteraan yang menurun di Jawa", yang dibentuk pada 1902.[19] Penelitian ini diikuti oleh penelitian lain pada tahun-tahun berikutnya. Tidak semua pakar berkesimpulan sama berdasarkan bahan-bahan yang banyak dikumpulkan oleh komite-komite ini. Kesan umum adalah bahwa petani Jawa bukan hanya berhasil mendapatkan penghasilan pas-pasan untuk makan–satu-satunya yang bisa dikatakan tentang abad-abad sebelumnya, di bawah pemerintahan Indonesia dan Belanda–tapi nyata bahwa standar penghidupannya telah meningkat. Komite pertama, ditunjuk untuk meneliti "penurunan kesejahteraan" ini mencatat bahwa kesejahteraan orang banyak *secara keseluruhan* tidak menurun. Yang juga masuk dalam pertimbangan adalah fakta bahwa

penduduk Jawa telah meningkat lima kali lipat atau lebih sejak awal abad ke-19. Tanah yang seabad lalu menghidupi satu keluarga kini harus menghidupi lima keluarga. Tampaknya pemerintah wajib meningkatkan wilayah tanah yang bisa dibudidayakan, dan ini dilakukan lewat berbagai irigasi yang penting. Dengan langkah ini dan langkah-langkah lain kemajuan besar tercapai, walaupun masih cukup banyak pengkritik, bahkan di Parlemen Belanda, yang mendesak pemerintah meneruskan upayanya.[20] Tapi pakar-pakar lain menyimpulkan bahwa kesejahteraan telah menurun, bukan hanya secara proporsional tapi juga secara absolut. Salah satu jalan keluar dari kesulitan ini ialah emigrasi petani Jawa ke daerah-daerah berpenduduk jarang di Wilayah Luar [Jawa]. Tapi orang Jawa sangat enggan meninggalkan negeri mereka. Sistem terbaik adalah bedol desa, dan di daerah Lampung (Sumatra bagian selatan) ditemukan tanah yang cocok untuk permukiman. Tapi apapun yang direncanakan pemerintah, peningkatan cepat penduduk Jawa terus menciptakan ketegangan baru di pulau kecil berpenduduk terlalu padat itu.

Jumlah total penduduk Jawa dan Madura naik dari lima juta pada 1815 menjadi 11 juta pada 1860, 28 juta pada 1900, dan 34 juta pada 1920. Pada 1942 ia mencapai 48 juta. Jutaan orang ini, praktis semuanya petani, atau hidup dari perdagangan yang langsung bergantung pada pertanian, cepat tersebar di seluruh pulau tersebut, sampai ke sudut-sudut terjauh dan naik ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Maka, masalah baru muncul setiap hari. Tidak cukup menolong petani dengan membangun sistem irigasi dan mempromosikan emigrasi. Dalam keadaan seperti itu masing-masing orang Jawa mudah jatuh jadi mangsa perenteuang. Sangatlah umum bagi petani untuk menjuali panennya di muka. Kita lihat bagaimana sistem ini dipraktikkan para petanam pala di Maluku dan bagaimana itu menjadi salah satu sebab kehancuran mereka. Petani Jawa mengikuti adat yang sama dan sering menjadi korban tengkulak (biasanya orang Cina). Undang-undang agraria pemerintah Belanda yang membatasi kepemilikan tanah hanya

pada orang Indonesia melindungi mereka dari konsekuensi terburuk penyalahgunaan ini, tapi untuk menolong petani kecil pemerintah juga mengorganisasikan sejumlah lembaga untuk menyediakan kredit rakyat. Pada 1917, ada lebih daripada 10.000 lembaga seperti itu yang pada tahun itu saja menyediakan bantuan kepada lebih daripada 1,3 juta petani. "Bank Desa" didirikan, dan ada lebih daripada 2.000 cabang pada 1917, dengan lebih daripada 600.000 nasabah. Angka ini meningkat 50 persen pada 10 tahun berikutnya.

Tapi petani Jawa punya musuh selain perente. Sayang Asia adalah tempat banyak penyakit epidemik. Pada Mei 1905, laporan dari Sumatra bagian timur menimbulkan kepanikan besar. Seorang kuli Jawa yang bekerja di gudang beras mendapat penghargaan besar dari tuannya karena keahliannya sebagai penangkap tikus. Dia telah membuat "racun" yang sangat manjur. Setiap hari dia mendapatkan puluhan tikus mati. Tiba-tiba, dia sendiri sakit dan mati dalam dua hari. Suatu penyelidikan medis menunjukkan bahwa dia—dan tikus-tikus itu—mati karena wabah pes. Pada 1911 satu kasus mencurigakan dilaporkan dari Malang, Jawa Timur. Penyelidikan lebih jauh membuktikan bahwa sejumlah orang di daerah ini telah mati karena wabah dan di sini penyakit itu juga menyebar dari gudang beras dan telah dibawa masuk dari Batavia. Pada 1911, 2.000 orang mati karena wabah itu; pada 1913 lebih daripada 12.000. Pemerintah mengerahkan semua energinya berjuang melawan penyakit itu. Yang paling efektif tampaknya adalah pembersihan menyeluruh rumah-rumah dan lumbung-lumbung padi, dan sejauh mungkin pembasmian semua tikus dan binatang terinfeksi lain. Nyatanya lebih daripada satu setengah juta rumah dihancurkan dan dibangun kembali, dengan biaya 30 juta gulden. Selain langkah-langkah saniter ini, penyuntikan dilakukan dengan hasil besar. Dalam perjuangan yang berlangsung 25 tahun, epidemi itu terhentikan dan negeri itu sekali lagi bebas dari wabah.

Penyakit lain yang menjadi epidemik di Indonesia sejak

zaman dahulu ialah *beri-beri*, panyakit yang umum terdapat di semua negeri tropis. Jacob Bontius menggambarkan gejalanya dalam bukunya *De medicina indicorum*, terbit di Leiden pada 1642. Orang-orang dari ras Melayu tampaknya sangat rentan, dan di Indonesia penyakit ini menyebabkan kematian ribuan orang. Adalah Dr. Christiaan Eijkman yang akhirnya menemukan sebab penyakit itu ketika dia menemukan bahwa orang yang makan nasi dari beras sosoh sebagai makanan normal mereka mudah menjadi korban, sedangkan orang yang biasa makan nasi dari beras pecah kulit tetap bebas dari penyakit itu. Untuk waktu yang lama Eykman gagal meyakinkan sejawatnya akan kebenaran dan pentingnya penemuannya itu. Makna sejati karyanya menjadi nyata ketika Funk, pada 1911, yang mengadakan penelitian dengan mengikuti arah yang digariskan Eykman, menemukan pentingnya *vitamin*, penemuan yang berdampak dahsyat pada seluruh ilmu kedokteran. Eykman, yang kini diakui sebagai salah satu pionir dalam riset medis, dihargai di hadapan seluruh dunia ketika, pada 1929, hadiah Nobel untuk kedokteran diberikan kepadanya.

Telah kita lihat bahwa karena alasan finansial tidaklah mungkin menyediakan pengajaran dasar sepenuhnya kepada semua anak Indonesia dan bahwa, sekalipun uangnya tersedia, tidak tersedia guru dalam jumlah yang cukup. Gubernur Jenderal Van Heutsz merasa bahwa orang Indonesia harus mendapatkan pengajaran bahkan sebelum suatu sistem sekolah dapat dibentuk, yang akan memenuhi tuntutan yang agak berlebihan itu, yang ditentukan oleh para pakar pendidikan Belanda masa itu. Dia tidak setuju dengan pandangan yang agak konyol bahwa tidak ada yang boleh dilakukan, kecuali bila dilakukan pada level yang sesuai dengan tuntutan teoretis. Gagasannya adalah mengorganisasikan pengajaran menurut tipe tertentu yang akan cocok dengan lingkungan perdesaan yang, secara ekonomis, tidak akan terlalu jauh di atas penduduk desa, dan, karena itu, yang akan menjadi bagian alami desa itu, bukan suatu lembaga asing yang dipaksakan dari atas.

Karena itu sekolah-sekolah desa dibentuk dan, dengan bantuan pemerintah, orang-orang setiap desa akan mengorganisasikan pengajaran dasar untuk anak-anak mereka dengan biaya sangat murah. Pemerintah memberikan dana untuk bangunan sekolah dan menyediakan kayu agar orang desa bisa membuat meja kursi untuk sekolah. Pemerintah membantu mereka menemukan guru, biasanya orang muda yang telah tamat pendidikan dasar di sekolah "kelas dua", dan ia membayar gajinya; tapi di luar semua ini, lembaga tersebut dibiayai dari dana desa, dan setiap anak membayar beberapa sen sebulan untuk pendidikannya.

Pelaksanaan rencana untuk "menyebarkan" pendidikan di kalangan orang-orang buta huruf menghadapi banyak kesulitan. Sering kali diyakini bahwa, begitu dana disediakan, sekolah dapat dibangun dan guru diangkat, dan bahwa begitu pintu sekolah dibuka, orang-orang, yang sangat ingin belajar, akan menyerbu masuk ke ruang kelas. Dalam kenyataan, yang pertama kali dibutuhkan adalah bahwa orang membangun *kebiasaan* untuk mengirimkan anak ke sekolah, dan bahwa mereka jadi yakin bahwa belajar baca tulis lebih penting bagi anak-anak daripada, misalnya, membantu orang tua bekerja di sawah. Kebiasaan ini hanya muncul pelan-pelan dan pada awalnya diperlukan semacam paksaan halus.

Selain itu, banyak orang Indonesia mungkin merasa bahwa sistem sekolah, yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda, adalah suatu beban tambahan baru yang dipaksakan penguasa asing. Tanggapan orang banyak terhadap sekolah yang didirikan oleh pemerintah republik setelah 1949 sangatlah berbeda.

Pada 1903, ada tidak lebih daripada 1.700 sekolah di Hindia, dengan 190.000 murid. Pada 1913, ada 7.000 sekolah, di antaranya 3.500 sekolah desa, dengan total 227.000 murid. Sepuluh tahun kemudian jumlah murid meningkat menjadi 700.000 dan pada 1940 ada 18.000 sekolah desa dengan sekitar dua juta murid.[21] Jumlah sekolah bertambah setiap tahun kira-kira 800. Lebih daripada separuh anak berusia antara enam dan 10 tahun ketika

itu sudah menerima pendidikan dasar, dan dengan perkembangan rancangan itu tingkat pertambahan sekolah pastilah dapat lebih besar dan mantap. Hasil-hasil sistem itu tidaklah spektakuler, tapi sistem itu sendiri bagusdan, karena itu, hasilnya diperkirakan bisa langgeng. Tapi, seluruh sistem pendidikan, yang diperkenalkan pada tahun-tahun itu, dapat dikritik mengenai satu pokok yang paling penting: ini hampir tidak menyediakan kesempatan apapun untuk anak muda Indonesia yang mampu dan ingin menempuh posisi dan profesi yang lebih tinggi. Anak-anak muda Indonesia ini tidak bisa tidak harus masuk ke sekolah berbahasa Belanda dan pergi ke Belanda untuk melanjutkan studi mereka di universitas. Penolakan beberapa pejabat kolonial, bahwa tidak ada universitas yang boleh didirikan di Indonesia sampai sebagian besar penduduk sudah menjadi melek huruf, agak munafik. Indonesia punya 50 sampai 60 juta penduduk pada masa itu. Begitu 10 persen penduduk sudah menyelesaikan sekolah dasar, koloni itu akan punya penduduk melek huruf sejumlah penduduk melek huruf di Belanda masa itu, dan di Belanda ada empat universitas yang disokong oleh dana publik. Kalau saja ada pembangunan universitas yang bagus pada waktu yang tepat, yang menerima mahasiswa dari sejumlah (walaupun hanya sejumlah kecil) sekolah menengah, boleh jadi Belanda akan terhindar dari banyak kekecewaan yang dialaminya kemudian.

BAB 15

BERAKHIRNYA SUATU KOLONI, LAHIRNYA SATU BANGSA

SETELAH lebih daripada dua ratus tahun pengaruh Belanda sangat menonjol di Indonesia, terlihat bahwa sesudah Perang Dunia Pertama, kebijakan kolonial yang baru mulai menghasilkan buah. Evolusi administrasi kolonial Belanda telah menghasilkan satu studi sejarah yang sangat menarik. Ketika para pedagang dan pelaut Belanda pertama–jujur menurut pandangan mereka sendiri, tapi kasar, berani, pekerja keras, dan tanpa pemahaman akan adat istiadat asing–tiba di Kepulauan Indonesia, mereka takjub oleh ragam fitrah dan peradabannya, dan yang paling jeli di antara mereka segera menyadari bahwa Asia bagian selatan dan timur jauh lebih maju dibanding Eropa bagian barat dalam hal kekayaan dan kemampuan komersial. Orang-orang Belanda itu masuk ke dalam dunia asing ini, kadang-kadang dengan persetujuan penduduknya, lebih sering dengan penolakan; atau mungkin lebih tepat, mereka, setelah diterima dengan ramah di tengah-tengah orang Indonesia, menolak pergi ketika kehadiran mereka tidak lagi diinginkan. Selama seabad mereka puas dengan mengekploitasi kekayaan alam yang ada di Kepulauan Indonesia. Selama abad berikutnya mereka mulai memasukkan sumber

kekayaan baru yang mereka eksploitasi dengan cara serupa, dengan mempertahankan monopoli secara ketat. Karya mereka bersifat komersial, keterkaitan mereka dengan dunia Indonesia bersifat insidental. Selama dua abad pemerintah Batavia menolak menyibukkan diri dengan urusan Indonesia. Demi kepentingan perniagaan, semua pertimbangan lain harus menyingkir.

Lalu datanglah Revolusi Prancis dan cita-citanya membentuk, paling tidak dari luar, kebijakan Belanda selama 30 tahun berikutnya. Prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dipermaklumkan, tapi ditafsirkan dengan munafik; ia menghasilkan kesetaraan teoretis antara orang Eropa dan Indonesia, tapi suatu kesetaraan yang cenderung mengakibatkan penaklukan total orang Indonesia yang secara ekonomis lemah oleh orang Eropa dan Cina yang secara ekonomis kuat. Raffles, yang berlaku lebih sebagai politikus daripada negarawan dalam hal ini, tidak mengubah kecenderungan ini. Adalah ironi sejarah bahwa komisaris dari kerajaan Belanda yang baru pulih diserahi tugas untuk menerapkan pada pemerintahan koloni prinsip keadilan bagi semua orang yang menjadi inti sari dari teori-teori revolusi besar itu. Tapi itu adalah perjuangan sia-sia melawan gagasan yang berlaku masa itu dan kerumitannya menyebabkan kegagalan total administrasi Van der Capellen yang punya niat baik. Tidak seorang pun, liberal maupun konservatif, mempertanyakan hak penakluk untuk secara ekonomis mengekploitasi negeri yang ditaklukkan. Bahkan, dalam hal ini kata "keadilan" tampaknya berarti tidak lebih sekadar ketiadaan kekerasan sewenang-wenang. Dengan berakhirnya administrasi Van der Capellen, orang Belanda sekali lagi berpaling pada kebijakan kolonial yang berbeda, yaitu mengeksploitasi Indonesia melalui pembangunan dan pengorganisasian produksi pertaniannya di bawah kontrol langsung pemerintah.

Revolusi Liberal pada 1848 tidak memprotes prinsip yang membuat koloni membayar untuk kebutuhan negeri penguasa. Sekali lagi "kesempatan setara" dalam bidang ekonomi untuk

kedua rasdituntut, tapi lagi-lagi tanpa ketentuan yang melindungi kepentingan ekonomi pihak yang lebih lemah, orang Indonesia. Dan sekali lagi kelompok yang lebih konservatif di Belandalah yang membetulkan pada waktunya kebijakan berniat baik kaum Liberal dengan menyisipkan jaminan mahapenting menyangkut kepemilikan tanah oleh orang Indonesia kedalam undang-undang Hindia Belanda.

Harapan kaum Liberal mengenai pembangunan ekonomi negeri itu melalui perusahaan swasta hanya mewujud sebagian. Perusahaan swasta menghasilkan kekayaan besar, tapi keuntungan terutama masuk kantong pengusaha, bukan pekerja. Pada awal abad ke-20 muncul suatu prinsip bahwa Indonesia harus diperintah, bukan demi Belanda, tapi demi penduduk aslinya. Ini adalah prinsip yang mendasari "kebijakan etis". Tapi peraturan tersebut, yakni bahwa koloni harus diperintah demi penduduknya, mau tidak mau akan menuju pada prinsip pemerintahan sendiri untuk koloni itu. Dalam hal Hindia Belanda, pertanyaan pun muncul, "pemerintahan sendiri sampai di mana?" dan, "kepada siapa pemerintahan itu harus dipercayakan?" atau, untuk mengatakannya lebih tegas: apakah itu akan berarti "pemerintahan sendiri untuk Hindia Belanda dan kelas atasnya", atau untuk "Indonesia dan orang Indonesia"? Apakah itu pemerintahan sendiri untuk Hindia Belanda oleh kelas atasnya, terutama keturunan Belanda dan orang Indonesia yang telah mengasosiasikan diri sepenuhnya dengan orang Belanda? Ataukah itu harus dimengerti sebagai pemerintahan sendiri dengan dasar demokratik? Banyak orang Belanda membayangkan bahwa pemerintahan sendiri akan berarti suatu *commonwealth* di mana unsur-unsur beragam penduduk, minoritas dari keturunan asing serta minoritas berdarah Indonesia, akan bekerjasama secara harmonis dengan mayoritas orang Melayu dan Jawa. Kemungkinan solusi lain ialah bahwa "Indonesia"—nama ini mulai banyak dipakai setelah 1884, tapi sangat tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang menolak menyetujui pemakaiannya

sampai 1945–akan menjadi rekan dengan hak-hak sama dalam suatu kerajaan Belanda yang terdiri atas empat wilayah, di mana setiap entitas (Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Antilles) akan berhak menentukan urusan internalnya masing-masing.

Perkembangan gagasan pemerintahan sendiri tersebut dipercepat oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Belanda dan wilayah-wilayah luar negerinya cukup beruntung tidak terlibat dalam konflik itu, tapi selama beberapa tahun komunikasi antara kedua bagian imperium itu sangat sulit. Produk-produk Indonesia tidak bisa dikapalkan ke luar, dan untuk sementara produsen dan pekerja di Indonesia harus menghadapi kesulitan besar. Bisa dimengerti bahwa selama tahun-tahun itu bangsa-bangsa lain mulai mengambil alih tempat bangsa-bangsa Eropa sebagai pengimpor produk industri, dan melampaui mereka sebagai pembeli produk-produk pertanian Indonesia.[1] Dalam 10 tahun setelah 1914, ekspor Hindia ke Amerika Serikat meningkat tujuh kali lipat, yakni meningkat dari dua persen dari ekspor total sebelum perang menjadi 14 persen. Jepang meningkatkan impornya empat kali lipat, dari hampir dua menjadi lebih daripada delapan persen dari impor total. Demikianlah bangsa-bangsa Eropa kehilangan pijakan, yang tidak bisa diperoleh lagi; sebaliknya, kecenderungan ini diperkuat oleh dampak depresi besar pada 1929 dan tahun-tahun berikutnya.

Namun, perubahan ekonomi ini hanyalah satu dari dampak kecil Perang Dunia atas kehidupan di Indonesia. Kehebohan politik di Eropa yang mencapai puncaknya antara 1917 dan 1920 menyebabkan pandangan yang sebelumnya dianggap sangat radikal sebelum perang menjadi dominan. Di Belanda konsep baru kebijakan kolonial maju pesat, dan di Indonesia baik gerakan internasional maupun nasional menjadi makin kuat. Marilah kita pertama-tama mengkaji asal-usul gerakan nasional Indonesia untuk melihat bagaimana nasionalisme ini dipengaruhi oleh kecenderungan internasional dan bagaimana reaksi pandangan politik Belanda dan Belanda-Indonesia terhadap kecenderungan itu.

Bangkitnya kesadaran nasional di kalangan orang Indonesia berhubungan erat dengan perubahan yang terjadi di Asia setelah 1900. Modernisasi Jepang menimbulkan kesan hebat pada banyak orang Indonesia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 dipuji di seluruh Asia kolonial sebagai fajar periode sejarah baru. Contoh ini mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia mencari kesetaraan hak dengan penduduk Eropa di negeri mereka. Pemerintah Belanda sendiri pada 1899 telah memberikan warga negara Jepang kesetaraan status dengan orang Eropa, dan setelah 1909 seorang Jepang memegang jabatan konsul di Batavia. Tapi sampai bertahun-tahun kemudian jumlah warga Jepang yang tinggal di Indonesia tetap kecil. Pada 1923 jumlah total orang Jepang yang tinggal di Kepulauan Indonesia tidak lebih daripada 4.200. Bahkan pada 1940 jumlahnya hampir tidak lebih daripada 8.000.

Hak yang diberikan kepada orang Jepang menggugah orang Cina Indonesia untuk bergerak.[2] Antara 1860 dan 1900 jumlah orang Cina yang tinggal di Jawa saja telah meningkat dari 150.000 menjadi hampir 280.000, dan terus meningkat dengan cepat. Di pulau-pulau lain, khususnya Sumatra, peningkatan itu lebih cepat lagi. Di sini jumlahnya meningkat dari 70.000 menjadi 260.000 pada periode yang sama. Setelah 1900, dengan perluasan lebih jauh perkebunan di Sumatra dan dengan perkembangan perusahaan-perusahaan, jumlah orang Cina yang tinggal di Kepulauan Indonesia naik sampai 1,25 juta dalam periode 20 tahun.

Imigran abad ke-20 adalah tipe orang Cina yang agak berbeda dari orang-orang yang datang sebelumnya. Orang yang datang sebelumnya tersebut terutama berasal dari provinsi Fukien, dengan Amoy sebagai pelabuhan emigrasinya, dan termasuk dalam golongan pedagang. Mereka tahu sedikit banyak tentang peradaban kuno negeri mereka yang besar. Imigran akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terutama datang dari Kanton dan termasuk golongan orang yang berbeda, mereka buta huruf dan hanya tahu sedikit tentang budaya Cina, walaupun mereka

berpegang teguh pada adat istiadat bangsa mereka. Mereka tidak tertarik pada urusan Indonesia, tapi selalu berpaling ke Cina, tempat mereka berharap pulang begitu mereka punya simpanan sedikit "di bank".

Pada masa ini, kebijakan luar negeri pemerintah Cina berbalik dari ketidakpedulian total pada nasib emigrannya menjadi dukungan besar terhadap kepentingan nasional Cina di luar imperium itu. Selama berabad-abad, kaisar-kaisar dinasti Manchu melarang emigrasi dan menganggap semua orang Cina di luar imperiumnya telah kehilangan kebangsaan mereka. Ordinansi Imperial bahkan melarang emigran pulang ke negeri leluhur mereka. Tapi pada 1896, semua hukum ini dicabut dan pemerintah imperial mengklaim bahwa semua orang berdarah Cina, yakni keturunan dari seorang ayah Cina, tetap menjadi warga negara Cina. Ada ratusan ribu orang Cina di Hindia yang telah lupa bahasa ibu mereka, sebagian besar dari mereka secara rasial sudah menjadi bukan Cina, dan melalui kawin campur selama 100 tahun atau lebih, telah berasimilasi dengan orang Indonesia, tapi, kultus nenek moyang membuat tradisi Cina tetap hidup nyata di kalangan mereka. Mereka semua tiba-tiba kini dinyatakan oleh pemerintah imperial sebagai rakyatnya sementara undang-undang Belanda-Indonesia menganggap mereka rakyat Batavia. Pembalikan politik ini bertepatan waktu dengan awal ketidakpuasan orang-orang Cina Indonesia terhadap administrasi Belanda. Sebelum 1800, orang Cina Indonesia disukai oleh VOC; setelah 1800 mereka menjadi bagian penting dalam pengorganisasian Sistem Kultur dan monopoli pemerintah dalam perdagangan opium, serta manajemen balai pergadaian. Pada masa-masa itu, mereka dianggap buangan oleh kaisar mereka sendiri dan dimusuhi oleh orang Indonesia, tapi menemukan perlindungan di bawah pemerintah Batavia, tempat mereka diperintah oleh perwira mereka sendiri dan menurut adat istiadat mereka sendiri sampai, sekitar pertengahan abad ke-19, suatu undang-undang sipil diberikan kepada mereka berdasarkan

prinsip hukum Barat. Kalau masih bicara bahasa Cina, biasanya dialek dari kampung halaman, bahasa Fukien atau Kanton, tapi sebagian besar sudah bicara Melayu (dan sebagian kecil bahkan bahasa Belanda) sebagai bahasa ibu mereka.

Ketika setelah 1900 pemerintah Batavia mulai mencurahkan energi besar pada perluasan pengetahuan di kalangan orang Indonesia dan mendirikan sekolah Belanda dan Indonesia berdampingan, orang Cina boleh masuk sekolah untuk kelompok mana pun hanya apabila, setelah semua orang Belanda dan Indonesia yang mendaftar diterima, ada tempat yang masih lowong. Jadi tidak ada usaha khusus untuk memenuhi kebutuhan orang Cina, karena tidak ada sekolah khusus yang mementingkan anak-anak Cina. Ini adalah gejala kebijakan baru administrasi itu, yang kini mengalihkan perhatiannya terutama terhadap orang Indonesia. Bagi orang Cina ini dirasakan sebagai kemunduran dari posisi mereka sebelumnya yang memiliki hak istimewa. Karena itu bisa dimengerti bahwa kebijakan baru pemerintah imperial Peking diterima dengan persetujuan besar di kalangan orang Cina di Hindia, baik di kalangan pendatang baru dari Kanton maupun di kalangan mereka yang nenek moyangnya sudah tidak pernah melihat Cina selama 100 tahun. Orang Cina kini memulai sekolah mereka sendiri, didukung oleh dana yang dikumpulkan dari orang Cina sendiri, dan di sekolah-sekolah ini, bahasa Cina, bukan salah satu dari banyak dialek melainkan bahasa Cina Mandarin, yang dipakai sebagai bahasa pengajaran. Kalau ada bahasa asing diajarkan di sekolah sekolah ini, itulah bahasa Inggris, karena manfaatnya dalam transaksi bisnis. Pemerintah imperial di Peking melihat kesempatan di sini dan mengirimkan beberapa inspektur untuk menyatukan metode pengajaran di sekolah-sekolah ini, dan dengan cara ini, ia mencoba menjalin hubungan regular dengan penduduk Cina di Indonesia. Hanya dalam 10 tahun, lebih daripada 400 sekolah swasta Cina didirikan. Karena sebagian besar guru sekolah belajar di Amerika atau Jepang, gagasan reformasi dan, kemudian, revolusi melawan imperium

gaya lama disebarkan di seluruh permukiman Cina. Perkumpulan komersial Cina yang didirikan setelah 1901 menolong gerakan ini tumbuh ke arah modernisasi. Kekuasaan "kapten" Cina lokal; yang diakui oleh pemerintah sebagai pemimpin penduduk Cina, melemah. "Gerakan Cina Muda" di Indonesia mengemuka dalam pengorganisasian dukungan terhadap para revolusioner di Cina yang pada 1911 menggulingkan pemerintahan imperial di Cina dan mendirikan Republik Cina.

Tentu saja Batavia mengubah kebijakannya akibat pengaruh peristiwa-peristiwa ini. Pembatasan terhadap penerimaan anak-anak Cina ke dalam sekolah Belanda atau Indonesia dihapuskan. Pemerintah mengorganisasikan apa yang disebut sekolah "Belanda Cina", khusus ditujukan untuk anak-anak Cina tapi dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengajaran. Terakhir, setelah republik Cina didirikan, suatu kesepakatan tercapai dengan Cina, isinya adalah negeri itu mencabut klaimnya atas orang Cina kelahiran Indonesia dan setuju mengakui mereka sebagai rakyat Belanda, sementara pemerintah Belanda menerima konsul-konsul Cina untuk mengurus kepentingan imigran kelahiran Cina yang banyak itu yang masih tetap menjadi warga negara Cina. Perjanjian ini menciptakan situasi baru, penuh dengan kerumitan aneh. Untuk memahami hal ini, yang menggambarkan betapa rumit kondisi kehidupan sosial di Indonesia, kita harus mengkaji dengan singkat status legal dari berbagai kelompok nasional yang berbeda dalam perkembangannya. Kekhasan posisi orang Cina tersebut dan kesulitan menemukan solusi untuk masalah-masalah rumit yang berkaitan dengannya akan menjadi jelas.

Pada bab terdahulu sudah kita lihat bagaimana VOC Belanda menjalankan administrasi peradilan pada rakyatnya di wilayahnya sendiri. Wilayahnya *sendiri*, yakni yang langsung diperintah oleh Kompeni, untuk waktu yang lama sangatlah terbatas. Ia tidak lebih jauh dari tembok kota Batavia dan beberapa lusin benteng yang tersebar di Kepulauan Indonesia. Di wilayah ini Kompeni menjalankan peradilan, mengangkat petugas pengadilan dan

mengeluarkan undang-undang. Semua orang yang tinggal di wilayah yang diperintah langsung oleh Kompeni harus tunduk pada hukum yang sama, yang didasarkan pada konsep hukum Belanda-Romawi. Telah kita lihat bagaimana pemerintah Batavia dengan cepat menemukan bahwa tidaklah mungkin menerapkan prinsip ini dengan ketat. Bagaimana seorang Cina bisa diyakinkan bahwa dia harus menulis surat wasiat agar hak miliknya bisa diserahkan kepada pewarisnya, bahwa dia harus menikah–tidak pernah bercerai! –menurut gagasan yang berlaku atas urusan-urusan ini di dunia Barat pada abad ke-17? Kesulitan sama dihadapi bila berkaitan dengan orang-orang berkebangsaan Timur Jauh dan Timur Dekat. Karena itu dibuatlah hukum bahwa kelompok-kelompok nasional orang Timur, bahkan walaupun tinggal di wilayah dan di bawah administrasi langsung Kompeni, harus mengikuti adat istiadat nasional mereka sendiri mengenai hukum perdata. Hukum kriminal tetap sama untuk semua kelompok penduduk.

Kemudian, setelah penaklukan sebagian besar Jawa pada paruh pertama abad ke-18, para Direktur Kompeni memutuskan bahwa di wilayah-wilayah yang baru diperoleh itu hukum adat istiadat lokal harus tetap berlaku bagi orang non-Kristen. Pengadilan dirancang berdasarkan prinsip ini ketika Ordinansi untuk Administrasi Hindia (1854) diundangkan. Hukum kriminal tetap sama untuk semua kelompok penduduk tapi pelanggar hukum dari kelompok penduduk yang berbeda akan diadili di hadapan pengadilan berbeda. Bagi orang Belanda serta mereka yang disamakan dengan orang Belanda–orang Eropa lain dan non-Eropa yang berasal dari negeri *Kristen* (Amerika Serikat, Afrika Selatan, Australia, Amerika Selatan)–ada pengadilan Eropa; untuk orang Indonesia dan "*Oosterlingen*" (Orang Timur) lain–warga dari negeri non-Kristen (Mesir, Persia, Arabia, Cina, Siam)–ada pengadilan Indonesia. Dalam hukum perdata, bukan hanya pengadilan tapi isi hukum pun berbeda. Di sini setiap bangsa, bicara kasarnya, diadili menurut adat istiadat dan lembaganya sendiri. Gagasan di

balik pengaturan ini bukanlah untuk menciptakan diskriminasi tapi lebih merupakan usaha menerapkan prinsip bahwa setiap orang harus diadili menurut konsep hukumnya sendiri. Faktor *ras*, walaupun diperkenalkan pada 1854, tetap merupakan faktor sekunder.[3] Sebaliknya, orang Indonesia, melalui suatu prosedur, bisa mendapatkan status legal yang sama, hak sama, dan tentu saja kewajiban sama, dengan orang Eropa dan, karena itu dapat ditunjuk sebagai hakim di pengadilan Eropa, sementara orang Eropa tidak akan pernah bisa diangkat di pengadilan Indonesia.

Sejauh ini seluruh rancangan itu relatif sederhana. Tapi ia menjadi sangat rumit ketika pembagian ke dalam dua kelompok tidak bisa lagi didasarkan pada antitesis "pada dasarnya Kristen" vs. "pada dasarnya non-Kristen". Ini terjadi ketika orang Jepang, menurut kesepakatan pada 1899 antara Belanda dan Jepang, diletakkan pada posisi sama dengan "orang Eropa". Satu faktor baru kini masuk ke dalam masalah itu. Warga suatu negara asing yang diperintah menurut konsep administrasi Eropa dianggap punya status sama di hadapan hukum sebagai warga dari negara "Kristen".[4] Pertanyaan pun langsung muncul: mengapa orang Jepang dan tidak orang Turki atau Mesir atau Cina?

Memang sebetulnya tidak ada alasan mengapa orang Turki atau Persia atau Siam tidak boleh, dalam kualitas mereka sebagai warga negara asing, dikelompokkan dengan orang Eropa, Amerika, dan Jepang. Akhirnya ini pun terjadi, walaupun orang Turki tidak mendapatkan status itu sampai setelah Perang Dunia Pertama dan orang Siam sebelum 1938. Sejauh perkara orang Cina, ada kesulitan.

Pertama, siapakah orang Cina yang akan menjadi subyek peraturan baru itu? Semuanya? Tapi sejumlah besar dari mereka hanyalah orang Cina dalam tradisi, bukan kebangsaan. Mereka berpegang teguh pada adat istiadat tertentu tapi tidak bisa mengklaim harusdiperlakukan berbeda dari penduduk asli lain di Indonesia. Hanya orang Cina yang adalah warga negara Cina? Ini akan membelah penduduk Cina ke dalam dua kelompok sejauh

terkait dengan proses pengadilan, sementara mereka akan tetap merupakan satu entitas tersendiri sejauh mengenai pokok-pokok tertentu dalam hukum perdata.[5]

Bagi banyak orang Cina, status legal setara dengan orang Eropa hanyalah urusan prestise. Di bawah peraturan yang ada mereka merasa berada pada posisi inferior dibandingkan dengan orang Jepang, yang sangat tidak mereka sukai. Tampaknya, seluruh persoalan prosedur kriminal dan perdata bagi orang Cina hanya dapat diselesaikan melalui suatu reorganisasi total atas peradilan di Hindia, suatu reformasi baru berada dalam tahap persiapan ketika perang pecah pada 1941. Jadi, antara 1911 dan 1940 penduduk Cina terombang-ambing antara negeri lama mereka, Cina, yang telah bangkit kembali hingga memperoleh kekuatan baru dengan revolusi 1911, dan negeri baru mereka, Indonesia, yang oleh banyak orang Cina berbudaya dirasakan punya ikatan erat berupa tradisi ratusan tahun. Tapi, satu kesimpulan sudah dapat ditarik: posisi istimewa orang Cina, yang sudah ada sejak zaman dulu, jelas telah berakhir, karena pasang naik rasa nasional di kalangan orang Indonesia banyak diarahkan untuk melawan mereka. Bagi orang Indonesia, peristiwa politik di Cina dan Jepang tidak punya makna sama seperti bagi orang senegeri mereka yang keturunan Cina. Begitu rasa nasional orang Indonesia mulai mewujud, ia lebih melihat ke Barat daripada ke Utara, yang toh pada akhirnya hanya meneruskan kecenderungan historis Indonesia untuk memelihara kontak dengan India dan Timur Dekat.

Setiap usaha untuk menggambarkan asal-usul dan pertumbuhan nasionalisme Indonesia sampai 1945 akan menghadapi banyak kesulitan. Untuk alasan yang mudah dimengerti, pemerintah Hindia Belanda sebelum perang dalam laporan-laporannya cenderung tidak terlalu peduli terhadap gerakan yang ia anggap bisa secara serius mengancam stabilitas pemerintahannya dan yang dengan cepat ia tafsirkan sebagai "gerakan subversif" yang didukung, kalau bukan dimulai, oleh pengaruh luar. Keyakinan

ini terus bertahan hingga setelah 1945 dan kecenderungan banyak orang Belanda adalah untuk menganggap perjuangan nasionalis untuk kemerdekaan sebagai usaha sekelompok kecil revolusioner, yang didorong oleh kekuatan luar untuk menentang upaya niat baik Belanda untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban di seluruh Kepulauan Indonesia. Yang sama-sama dipersalahkan melakukan campur tangan jahat ini pada tahun-tahun pascaperang adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Tidak ada studi menyeluruh tentang nasionalisme Indonesia selama tahun-tahun sebelum perang ketika sejumlah besar bahan tersedia, kemudian banyak di antaranya hilang selama dan setelah perang. Perang itu disusul empat tahun konflik Belanda-Indonesia. Dalam masa delapan tahun antara invasi Jepang dan perjanjian Belanda-Indonesia pada 1949, kemarahan dan permusuhan marak di kedua belah pihak, hingga membuat penggambaran obyektif atas pergerakan nasional makin sulit.[6] Maka, untuk berbagai alasan, lebih baik membatasi narasi dalam buku ini pada garis besar perkembangannya.

Pada 1906, seorang dokter Jawa, Mas Wahidin Sudiro Husodo, berkeliling Jawa untuk mengumpulkan dana yang akan dipakai untuk menyediakan beasiswa bagi putra-putra Jawa. Selama dua tahun, Mas Wahidin menerbitkan satu majalah dalam bahasa Melayu dan Jawa ("Retno Dumilah") dengan maksud membangkitkan minat dalam urusan budaya di kalangan massa orang Jawa. Usahanya untuk menghimpun suatu "Dana Pendidikan Orang Jawa" sejalan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tiga murid Sekolah Kedokteran Jawa (*Stovia*, "School tot Opleiding van Inlandsche Artsen") tergerak oleh usaha Mas Wahidin tersebut, dan mereka memutuskan mendirikan satu organisasi Jawa untuk mempromosikan budaya yang mereka beri nama *Budi Utomo*. Raden Sutomo yang, bersama dengan rekan mahasiswanya Gunarwan dan Suraja, mengambil inisiatif ini, di kemudian hari menjadi salah satu pemimpin ternama nasionalisme Indonesia awal. Perkumpulan baru itu didirikan pada 1908. Dalam

setahun ia sudah mendapatkan lebih daripada 10.000 anggota. Ia membatasi kegiatannya di Jawa dan Madura dan mengusahakan pengorganisasian sekolah dengan dasar nasional. Secara politis ia pada tahun-tahun pertama keberadaannya hampir non-partisan. Sifat organisasi dan pernyataan pemimpinnya tampaknya membenarkan pandangan, yang dipegang oleh hampir semua pakar Eropa mengenai Indonesia, bahwa Islam hampir tidak mengubah pandangan hidup orang Jawa dari prototipe yang pada dasarnya Indonesia dan bahwa konsep ideal Islam tidak pernah secara radikal mengubah perilaku spiritual itu.

Pengikut-pengikut Budi Utomo yang pertama terdiri atas kaum bangsawan Jawa, pejabat pemerintah, dan intelektual Indonesia. Bahwa pandangan kelompok-kelompok sosial ini tidak sama dengan orang banyak menjadi jelas beberapa tahun kemudian. Anggota-anggota Budi Utomo nyatanya berpaling pada India, dan dari negeri ini mereka berharap akan mendapatkan guru untuk sekolah-sekolah mereka. Untuk sesaat, pemimpin India, Tagore dan Gandhi, menjadi teladan mereka sebagai pemimpin kebangkitan nasional. Tapi orang banyak jauh lebih mudah terpengaruh oleh cita-cita yang didasarkan pada konsep-konsep Islam. "Kebangkitan Islam" telah menjadi cita-cita umum untuk jutaan Muslim. Bahkan, sebagian besar kelompok etnik Indonesia dengan kuat berpegang pada prinsip Islam, meskipun banyak dari mereka tidak pernah menyesuaikan adat istiadat dan cara hidup mereka dengan aturan ketat Alquran. Orang Jawa di Jawa Tengah termasuk dalam kelompok yang disebut terakhir ini. Tapi orang Muslim India dan Arab terus mengusahakan intensifikasi Islam di antara orang-orang yang 'namanya saja' Muslim di Kepulauan Indonesia. Awalnya, orang Indonesia tidak peduli pada cita-cita Pan-Islam yang digembar-gemborkan dari Istanbul dan Mekah pada dekade-dekade pertama abad ke-20, tapi mereka menemukan bahwa Islam adalah seruan pemersatu yang sangat bagus untuk melawan pengaruh asing.[7] Misi-misi Protestan dan Katolik di Jawa dan Sumatra hanya sedikit berhasil; kesempatan nyata mereka ada

di Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku, di mana baik orang-orang Katolik maupun Protestan mendapatkan kemajuan pesat. Di Sumatra sebagian orang Batak (yang tidak pernah menerima Islam) dapat di-Kristenkan. Mayoritas orang Sumatra dan Jawa bersatu di bawah bendera Nabi dalam reaksi instinktif terhadap usaha memperkenalkan keyakinan baru kepada mereka. Organisasi-organisasi Islam yang kuat muncul dalam semalam, tapi sering kali menghilang secepat munculnya, kecuali bila mereka belajar metode yang sama dengan misi-misi itu, yaitu berkonsentrasi pada upaya-upaya tak kenal lelah untuk menghasilkan perbaikan sosial.

Dalam arti tertentu organisasi-organisasi Islam berawal dari reaksi terhadap berbagai pengaruh asing, fakta yang membedakan mereka dari perkumpulan yang didirikan berdasarkan idealisme Jawa, seperti Budi Utomo. Ciri gerakan massa Islam ini jelas sejak awal, karena gerakan itu pertama kali muncul sebagai reaksi terhadap pengaruh ekonomi yang makin besar dari orang Cina. Begitu orang Cina di Jawa dibebaskan dari pembatasan legal dalam hal perjalanan dan permukiman, mereka mulai mendapatkan pengaruh ekonomi yang tidak proporsional di setiap sudut negeri itu, bahkan di wilayah paling terpelosok. Kepentingan ekonomi orang Jawa kelas menengah sangat terpukul oleh persaingan Cina dalam perdagangan eceran, dan mereka bereaksi dengan membentuk organisasi koperasi.Tapi, di kalangan orang Jawa, orang-orang kelas menengah ini adalah orang-orang yang paling sadar akan keislamannya. Di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi dari Surakarta mereka mulai mengorganisasikan perkumpulan koperasi, suatu tindak tandingan yang, sebagai konsekuensi karakter orang Jawa pada umumnya dan khususnya kelas orang yang berprihatin, dengan cepat mengambil bentuk gerakan sosial religius. Demikianlah, pada 1911 *Sarekat Dagang Islam* didirikan. Tujuan pendiri perkumpulan ini jelas bersifat damai, tapi sentimen anti-Cina telah naik begitu tinggi sehingga pendirian organisasi-organisasi itu bertepatan waktu dengan

berbagai kerusuhan anti-Cina, baik di Surabaya maupun Surakarta. Karena itu perkumpulan di Surakarta untuk sesaat dilarang oleh pemerintah. Perkumpulan itu direorganisasikan sebagai *Sarekat Islam* pada 1912.[8] Program organisasi baru ini termasuk butir-butir berikut:

1) Promosi usaha komersial di antara orang Indonesia,
2) Pengorganisasian dukungan timbal-balik dalam bidang ekonomi,
3) Promosi kesejahteraan intelektual dan materiil orang Indonesia, dan terakhir,
4) Promosi Islam.

Pada kongres pertamanya, Omar Said Tjokro Aminoto, pemimpin barunya, menunjukkan panjang lebar bahwa Sarekat Islam tidak direncanakan sebagai partai *politik* dan bahwa kesetiaan yang tidak goyah terhadap pemerintah harus dijaga. Juga ia tidak dimaksudkan untuk menghasut rasa keagamaan Muslim melawan pengikut agama lain.

Dalam waktu sangat singkat, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa pertama di Hindia. Dalam lima tahun ia punya 800.000 anggota. Ciri keagamaan asosiasi itu ditekankan. Di sana sini di Kalimantan dan Sulawesi, ada orang yang menganggap bahwa pembentukan perkumpulan itu adalah langkah pertama mengorganisasikan "jihad" tapi kesulitan awal ini dapat dengan mudah diatasi. Nyatanya, perkembangan cepat yang menakjubkan dari perkumpulan itu bahkan mengejutkan pendirinya sendiri dan menyebabkan mereka menjadi terlalu percaya-diri. Orang banyak beramai-ramai bergabung, tapi kecuali aspek religius secara umum, hampir tidak tahu apa yang diperjuangkan gerakan itu. Bagi sebagian besar anggotanya, organisasi itu hanyalah alat penyaluran yang sudah lama diidam-idamkan untuk mengeluarkan unek-unek mereka tentang kondisi sosial yang ada. Selama 25 tahun berikutnya keanggotaan berfluktuasi antara dua juta dan beberapa ribu.

Sementara program yang mencampurkan agenda ekonomi dan religius Sarekat Islam mendapatkan dukungan massa, gerakan keagamaan Islam puritan *Muhammadiyah*, dimulai Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912, berkembang lebih lambat. Gerakan ini berkaitan dengan kecenderungan ke arah reformasi keagamaan dalam Islam yang berasal dari Mesir dan menyebar ke seluruh dunia Islam. Gerakan ini cenderung ke arah modernisasi prinsip-prinsip kemasyarakatan, kembali kepada perintah asli Alquran, yang ditafsirkan dengan cara modern. Kehidupan Islam di mana-mana diatur lebih menurut aturan-aturan empat mazhab hukum Islam daripada oleh usaha menaati langsung hukum asli Alquran. Menyingkirkan semua penafsiran dari masa kemudian, membasmi semua adat istiadat takhayul, terutama peninggalan-peninggalan dari masa pra-Islam, dan melonggarkan ikatan kaku tradisi yang cenderung mencekik semua kehidupan kultural, adalah tujuan para pembaharu tersebut, dan di sini termasuk para pengikut Muhammadiyah. Usaha ini sulit, karena telah kita lihat bahwa di Indonesia, mungkin lebih daripada di mana pun, adat istiadat pra-Islam diizinkan oleh para penafsir tradisionalis hukum agama dan tetap berlaku. Keanggotaan Muhammadiyah bertumbuh mantap dan organisasi itu mengambil kepemimpinan dalam urusan Islam ketika mulai kelihatan, bahkan oleh massa yang kurang berpengetahuan, bahwa gerakan besar Sarekat Islam mulai mengalihkan perhatiannya ke bidang politik dan sosial-ekonomi. Dengan melakukan itu, ia mau tak mau jatuh di bawah pengaruh gerakan sosialis internasional.

Kota Semarang di pantai utara Jawa adalah pusat penyebaran gagasan sosialis ke seluruh Indonesia. Sejak pertama kali kehidupan politik modern muncul di Kepulauan Indonesia—ketika pemilihan pertama untuk dewan kota diadakan pada 1903—"Semarangsche Kiesvereeniging" (Persatuan Pemegang Hak Pilih Semarang) sudah sangat radikal dalam pandangan politiknya.[9] Sosialisme memperoleh tempat berpijak di sini, khususnya di kalangan orang *Indo*, orang Eropa berdarah campuran. Banyak

Indo mengikuti kepemimpinan Eduard F. E. Douwes Dekker, yang juga Indo dan masih keluarga jauh dari pengarang *Max Havelaar*. Dari sudut pandang radikal, Douwes Dekker jelas suatu contoh internasionalisme. Ayahnya warga Belanda, anak dari ayah Belanda dan ibu Prancis. Ibunya seorang Indo, putri seorang ayah Jerman dan ibu Jawa. Lahir di Indonesia dan menganggap negeri itu ibu pertiwinya yang sejati, dia memulai suatu gerakan dengan slogan "Hindia untuk mereka yang berumah di sana", yang ditujukan untuk menentang jumlah orang Belanda yang makin banyak beremigrasi ke koloni dengan tujuan utama kembali ke Eropa begitu keadaan memungkinkan. Partai Douwes Dekker dimaksudkan menjadi interasial. Orang Indonesia Belanda (murni Belanda dan Indo), Cina Indonesia, Arab Indonesia, dan murni Indonesia diminta bergabung dalam oposisi yang bersatu melawan pemerintahan langsung Belanda dari Den Haag. Kemerdekaan untuk suatu Indonesia yang multi-ras dipermaklumkan sebagai tujuan gerakan itu. Tidak bisa dihindari bahwa kelompok itu semakin jatuh dalam pengaruh orang Indonesia murni, yang toh mewakili 95 persen jumlah seluruh penduduk. Pada waktu yang sama Douwes Dekker sendiri makin beralih pada sosialisme radikal.

Di bidang ini pemimpin-pemimpin lain mendahuluinya. Anggota "Semarangsche kiesvereeniging" yang tidak mengikuti Douwes Dekker bergabung dengan Hendrik Sneevliet, bekas anggota Partai Demokrat Sosial di Belanda (kaum "sosialis reformasi" yang sebanding dengan kaum sosialis Fabian di Britania) yang pindah ke Hindia dan mendirikan "Perkumpulan Demokratik Sosial Hindia", kelompok politik yang prinsip-prinsipnya dengan cepat berkembang menuju Marxisme yang sangat radikal. Dari awal, Sneevliet[10] menunjukkan simpati besar pada revolusi Rusia dan para pemimpinnya. Tujuannya adalah untuk memulai gerakan revolusioner di Indonesia dan bergabung dengan Komintern. Tapi selama gerakan itu tetap terbatas hanya pada penduduk orang Eropa dan Indo-Eropa, kesempatan untuk berhasil sangat kecil,

atau bahkan untuk sekadar memperoleh kedudukan penting. Untuk berhasil perlu sekali baginya mendapatkan hati orang Indonesia agar mendukung cita-cita sosial politiknya. Sneevliet berhasil menguasai bahasa Melayu dan Jawa dalam waktu yang sangat singkat, tapi rintangan bahasa bukanlah satu-satunya kesulitan yang harus dia atasi. Untuk mencapai tujuannya dia harus mengatasi masalah bagaimana menggabungkan Marxisme radikal berikut kecenderungan antiagamanya dengan cita-cita Islam kelompok-kelompok Indonesia. Hampir semua Marxis adalah orang Belanda, dan fakta ini menghadapkannya dengan masalah lain, yaitu, bagaimana meyakinkan orang Indonesia. Di sini seorang muda Jawa muncul sebagai perantara. Orang muda ini, dengan nama Semaun, adalah anggota aktif Sarekat Islam cabang Semarang dan pada waktu yang sama adalah pendukung gigih teori Marxis. Dia mulai mempengaruhi kelompok-kelompok Sarekat Islam lokal untuk menerima slogan-slogan Marxis.

Perkembangan yang terjadi selanjutnya sangatlah menarik. Komite eksekutif Sarekat Islam, di bawah kepemimpinan Tjokro Aminoto dan Abdul Muis, tetap sangat moderat dalam tuntutan politik mereka sampai 1917. Dalam kongres pertamanya pada 1913 para pemimpin itu menolak semua gagasan tentang aktivitas anti-Belanda. Pada Kongres Nasional pertama, Juni 1916, dirumuskan suatu tuntutan akan pemerintahan sendiri, tapi slogannya adalah: "Kerjasama dengan Pemerintah demi kesejahteraan Hindia!" Pemerintahan sendiri, demikian dikatakan, akan mempersatukan Belanda dan Hindia. Partai Indo-nya Douwes Dekker berusaha bekerjasama dengan Sarekat Islam dalam tuntutannya untuk kemerdekaan Indonesia, tapi perbedaan agama terlalu besar untuk memungkinkan kerjasama di atas prinsip apapun. Pada Kongres Batavia pada 1917, pemimpin Sarekat Islam sudah bicara dengan nada sangat berbeda. Dengan keras mereka menyerang administrasi negara dan, meskipun mereka tidak secara langsung menyebut pemerintah, mereka dengan tegas mengkritik para pejabat. Tuntutan untuk kemerdekaan diangkat, walaupun ini

diharapkan bisa diperoleh "lewat evolusi, bukan revolusi". Sarekat Islam mungkin tidak akan begitu cepat berpaling pada kebijakan yang lebih radikal kalau bukan karena Perang Dunia Pertama. Ini mungkin terasa aneh karena, nyatanya, Perang Dunia Pertama bukanlah perang *dunia*, melainkan perang Eropa. Kecuali beberapa pertempuran laut dan pertempuran di Afrika Timur yang terbatas lokasinya walaupun berlarut-larut, semua kegiatan militer terjadi di Eropa dan Timur Dekat. Biarpun begitu, perang itu menimbulkan kesulitan besar pada bagi pemerintah Belanda. Tentara Belanda terkonsentrasi di negeri sendiri, dan bahkan kalau Konstitusi memberikan wewenang kepada pemerintah mengirimkan sebagian pasukannya ke luar negeri, ia tidak bisa melakukannya, karena tidak ada kapal. Situasi yang ada, di mana pertempuran besar antara angkatan laut Britania dan kapal selam Jerman merebak di sekeliling pantai Belanda, membuat bahkan impor pangan ke Belanda pun nyaris tidak mungkin. Tapi tentara kolonial paling-paling berjumlah 25.000 dan mereka ini tidak terlatih dan tidak terlengkapi untuk bertahan melawan invasi. Setelah kini Britania terlibat sepenuhnya dalam perang Eropa itu, ada kekhawatiran bahwa Jepang mungkin akan memanfaatkan kesempatan besar itu untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Satu-satunya cara memperkuat pertahanan Hindia Belanda adalah dengan memobilisasi sebagian kekuatan rakyat Indonesia. Di sini ada sumber besar kekuatan militer potensial. Pertanyaannya ialah, bagaimana orang Indonesia akan bereaksi terhadap undang-undang yang memperkenalkan wajib militer untuk paling tidak sebagian orang muda Indonesia? Penguasa Belanda di Batavia mengajukan pertanyaan ini kepada pemimpin-pemimpin "Budi Utomo" dan menerima jawaban yang mungkin sudah mereka perkirakan: "tiada wajib militer tanpa pemerintahan sendiri sampai tahap tertentu dan, terutama, tanpa perwakilan parlementer." Dengan kata lain para pemimpin nasionalis menuntut bahwa pemerintahan kolonial otokratik diubah menjadi (kurang lebih) pemerintah demokratik dan

parlementer. Mempertimbangkan pro-kontra usul ini pemerintah Belanda di Eropa setuju pada solusi jalan tengah yang biasa: tiada wajib militer, tiada sistem pemerintahan parlementer tapi suatu reformasi persiapan: lembaga perwakilan dengan wewenang memberikan nasihat.

Pemerintah tidak memberikan konsesi ini tanpa rasa waswas yang dalam. Kelompok-kelompok nasionalis makin tahun makin radikal, khususnya dalam pandangan mereka akan ekonomi dan hubungan sosial. Ini juga mungkin sudah diperkirakan, karena toh keunggulan Belanda punya akar sejarah dalam kegiatan ekonomi VOC Belanda, dan selama dua setengah abad pemerintahan Belanda bertujuan membuat Indonesia membayar untuk para direktur dan pemegang saham Kompeni dan, setelah 1815, untuk perbendaharaan Belanda. Setelah 1870 administrasi kolonial mengubah perilakunya, tapi bahkan pada 1914 hubungan erat antara pemerintah Belanda dan perusahaan Belanda masih mencolok mata. Terlalu berlebihan untuk mengharapkan orang Indonesia biasa yang buta huruf bisa membedakan pemerintah Belanda dengan kegiatan ekonomi Belanda swasta. Baginya orang Belanda, yang semuanya adalah satu kelompok tunggal, mewakili "kelas penguasa". Orang Indonesia mungkin juga menganggap nasionalisme dan sosialisme itu satu dan sama adanya. Paling-paling, dia akan menganggap keduanya cara yang sedikit berbeda dalam perjuangan melawan dominasi asing.[11]

Akibatnya, ketika persoalan itu muncul, pemimpin-pemimpin kelompok itu tidak menolak ambil bagian dalam Dewan Rakyat yang baru didirikan. Tapi yang patut dicatat adalah timbulnya unsur baru dalam perdebatan itu, yang dinyatakan sebagai perjuangan melawan "kapitalisme penuh dosa".

Inilah pertama kali satu slogan Marxis dimasukkan ke dalam pidato Kongres Sarekat Islam, tapi, menariknya, karakter Marxian sejatinya dimodifikasikan dengan penafsiran lokal. "Kapitalisme *penuh dosa*", dari sudut pandang Marxis, tentu saja merupakan suatu kontradiksi istilah, karena ia membuka kemungkinan

adanya *kapitalismesaleh*, yangtidak mendapat tempat dalam teori Marx. Tjokro Aminoto diminta menerangkan *kapan* kapitalisme itu bisa penuh dosa dan jawabannya ialah, "Kapitalisme asing selalu penuh dosa." Dengan pernyataan jelas padat ini identitas perjuangan untuk mencapai tujuan sosial dan politik dengan sempurna dipermaklumkan.

Berbagai peristiwa berlangsung cepat setelah 1917. Didorong oleh persaingan para sosialis untuk mendapatkan dukungan massa, dan merasa bahwa slogan-slogan Marxis sangat bermanfaat menggalang massa untuk partai mereka, dan, terakhir, dipicu oleh jalannya berbagai peristiwa di Eropa, Sarekat Islam beralih dari oposisi politik non-kekerasan menjadi perlawanan terbuka terhadap pemerintah. Ia menuntut perlindungan segera untuk massa buruh, mendukung pemogokan yang terjadi terus-menerus di kota-kota yang lebih besar di Jawa, dan menolak kerjasama lebih jauh dengan pemerintah dalam urusan parlemen. Bangsawan Jawa Suryopranoto mengorganisasikan "Personeel Fabriek Bond", "Serikat Buruh Industri". Persatuan buruh penting pertama adalah "Serikat Buruh Kereta Api" dan yang cepat menjadi penting, *Persatuan Pergerakan Kaum Buruh*, suatu "Kongres Serikat Buruh Sosialis Revolusioner" didirikan. Pemimpin-pemimpin Komunis (termasuk Semaun) berpengaruh dalam mengorganisasikan serikat buruh ini dan organisasi itu diketuai oleh gabungan komunis dan nasionalis. Kondisi di perkebunan gula dan perusahaan lain menyediakan kesempatan besar untuk melakukan aksi militan. Sarekat Islam dan organisasi-organisasi afiliasinya masih menganut kebijakan "kekerasan moral", yang mungkin bisa diterjemahkan dengan "perlawanan pasif". Sebagian pemimpin nasionalis menyatakan bahwa kata "revolusioner" dan "sosialis" tidak boleh dipahami secara harfiah. Mereka khawatir memancing tindakan drastik pemerintah yang bisa mengakhiri agitasi sosialis dan pada saat yang sama menghancurkan gerakan nasionalis yang baru bermula. Tidaklah heran bahwa organisasi-organisasi Marxis di Semarang, dipimpin Semaun

yang gigih, sangat tidak puas dengan sekutu-sekutu "Sosialis Revolusioner" mereka. Semaun mencoba membuat Kongres Serikat Buruh menerima prinsip-prinsip komunis, dan ketika ini mengakibatkan perpecahan, dia berhasil mendirikan organisasi tandingan, "Gerakan Serikat Buruh Revolusioner". Kali ini istilah "Revolusioner" harus diterima dengan serius. Pada 1922 serikat buruh nasionalis dan sosialis bergandengan tangan tapi tidak lama. Sarekat Islam, yang berkembang menjadi organisasi dengan 250.000 anggota, kini secara politis berada dalam kesulitan terbesar. Intelektual dan bangsawan Jawa menjaga jarak dan tetap bertahan dengan Perkumpulan Budi Utomo mereka. Sebagian besar bupati mengorganisasikan "Persatuan Bupati" yang terpisah dan kelompok-kelompok lain pejabat pemerintah Jawa, yang dengan jujur percaya pada nilai konstruktif pekerjaan mereka dan cenderung menolak gerakan revolusioner, melakukan hal serupa. Douwes Dekker dan pengikutnya kini menuntut reorganisasi mengikuti garis yang murni nasionalistik, dan mendesak pemimpin-pemimpinnya tidak terlibat dalam perjuangan yang berciri ekonomik semata. Kelompok-kelompok sosialis dan komunis di Semarang mendesak mereka membuang jauh-jauh pokok-pokok Islam dari platform tersebut dan bergabung dengan Organisasi Buruh Internasional yang dipimpin Moskow.

Sneevliet telah diusir dari Indonesia setelah gagal melahirkan revolusi di kalangan serdadu dan pelaut angkatan darat dan laut Hindia Belanda. Tapi penerusnya, di antaranya Semaun yang menjadi makin terkenal, bertahan pada prinsip yang diajarkannya. Pada 23 Mei 1920, Perkumpulan Demokrat Sosial di Semarang memutuskan menyandang nama *Perserikatan Komunist di India* (PKI).[12] Pada 25 Desember tahun itu juga kelompok itu memutuskan bergabung dengan Third International (Komintern–Komunis Internasional) di Moskow. Bahkan sebelum ini terjadi, Indonesia sudah diwakili dalam Kongres Kedua Komintern (Juli-Agustus 1920) oleh Sneevliet, yang mengangkat diri sendiri mewakili massa orang Indonesia. Komintern, pada masa itu, sudah

mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai kebijakannya terhadap masalah kolonial. Ia menuliskan di dalam programnya penghapusan tanpa kecuali semua kontrol Eropa dan Amerika atas daerah jajahan asing, tapi dia juga merumuskan aturan taktis untuk membimbing organisasi-organisasi lokal dalam aksi mereka. Haruskah kalangan komunis bekerjasama sementara dengan gerakan-gerakan antikolonial nasional, misalnya dengan kelompok Muslim dan Hindu di India, bahkan bila mereka menentang prinsip-prinsip Marxisme? Kongres kedua pada 1920 dengan tegas menyatakan bahwa komunisme menentang Pan-Islamisme sama kerasnya seperti ia menentang dominasi Eropa (atau Amerika); keduanya dianggap hanyalah bentuk berbeda dari kapitalisme. "Pan-Islamisme dan gerakan-gerakan serupa yang bertujuan menggabungkan perjuangan demi kebebasan melawan imperialisme Eropa dan Amerika sambil memperkuat kekuasaan para Khan, pemilik tanah kaya, Mullah, dan seterusnya, harus ditentang", demikianlah resolusi Kongres itu. Butir yang terdapat dalam prinsip komunis ini menimbulkan kecanggungan di Jawa di antara pemimpin komunis karena mereka hanya bisa berhasil kalau ada kerjasama dengan Sarekat Islam. Tapi satu jalan keluar ditemukan. Kelompok itu menyatakan "kediktatoran proletariat" sebagai tujuan akhir partai itu, tujuan yang harus dicapai "dengan memakai segala metode yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip komunis". Taktik yang disarankan untuk partai komunis lokal adalah memperlemah pengaruh pemimpin-pemimpin Sarekat Islam dan membawa seluruh organisasi itu pelan-pelan lewat infiltrasi ke dalam payung komunis. Kalangan komunis mengabdikan energi dan inteligensi mereka yang sangat luarbiasa untuk mencapai tujuan itu.

Salah satu keberhasilan pertama mereka adalah pengambilalihan Serikat Buruh Kereta Api, yang punya anggota Eropa dan Indonesia. Pada 1921 mereka tampaknya telah berhasil memojokkan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ke dalam posisi putus asa. Tjokro Aminoto yang peragu dan goyah, tertekan dari

banyak sisi, melihat prestise partainya menurun. Untuk memastikan kesetiaan anggota, Sarekat Islam harus bertempur melawan kaum "modernis" Muhammadiyah, komunis, dan nasionalis "sekuler" pada waktu yang sama. Kalangan komunis berusaha mempercepat keruntuhan Sarekat Islam dengan menyerang keras pemimpinnya, dan dengan menuding bahwa manajemen keuangan partai itu jauh dari tanpa noda. Dengan harapan mempertahankan simpati massa, Tjokro berpaling sekali lagi pada pihak Marxis. Kongres kelima Sarekat menghasilkan pernyataan resmi partai tentang relasi antara Belanda dan Indonesia. Asal-usul dan perkembangan relasi ini dijelaskan pada orang banyak menurut teori materialisme historis Marxis. Doktrin sosial Marxisme diterima, walaupun dengan kualifikasi agak lemah bahwa ini tidak berarti kerjasama dengan organisasi-organisasi politik sosialis asing. Sikap terhadap pemerintah Batavia direvisi dan pelan-pelan berkembang menjadi oposisi terbuka.

Semua usaha mempertahankan Sarekat sebagai organisasi Indonesia utama tersebut sia-sia. Kekecewaan terhadap para pemimpin meningkat. Pendukung Arab dalam kelompok ini, sebagian besar saudagar dari Hadramaut yang datang ke Indonesia untuk memperoleh kekayaan, meninggalkan organisasi itu sebagai protes. Ketika pegawai negara dari balai pergadaian pemerintah mogok, Sarekat Islam mendukung aksi mereka dan berbagi kekalahan mereka. Semaun panen dan berhasil mendapatkan hati sebagian besar serikat buruh Indonesia untuk partainya. Anggota lain dari komite eksekutif kelompok komunis, Tan Malaka, telah diusir pemerintah setelah pemogokan balai pergadaian itu, dan pergi ke Moskow tempat dia memperjuangkan perubahan taktik Komintern terhadap Pan-Islamisme dan gerakan anti-Eropa lain. Pan-Islamisme, katanya, tidak berarti apapun selain perlawanan gabungan dari semua Muslim terhadap pemerintahan kolonial. Karena itu, dia mengajukan usul agar Komintern memberikan dukungan penuh terhadap gerakan itu.

Tapi persis ketika dia mengajukan teorinya itu, pemimpin

Sarekat Islam sekali lagi bersatu di sekitar panji-panji Pan-Islamisme untuk membendung pasang naik propaganda komunis. Dalam kongres nasional keenam pada Oktober 1921, ketika Abdul Muis dan Haji Agus Salim memimpin rapat, suatu usul diajukan oleh komite untuk memperkenalkan disiplin partai, yakni peraturan bahwa tidak ada anggota Sarekat yang pada saat yang sama diperbolehkan menjadi anggota partai politik lain. Ini ditujukan untuk menghancurkan pengaruh kelompok komunis. Dengan melemparkan mereka ke luar dari organisasi utama, jumlah mereka yang kecil akan terlihat dan prestise mereka dihancurkan. Kalangan komunis membalas dengan menuduh Sarekat menjadi lembaga "kapitalis", dengan mengejek gagasan kapitalisme "penuh dosa", dan dengan menuntut agar pengelompokan orang dilakukan menurut garis pemisahan kelas, bukan agama. Haji Agus Salim menentang pelecehan terhadap Sarekat itu dan terhadap Islam pada umumnya dan, karena berani menyatakan bahwa Muhammad telah mengajarkan doktrin materialisme historis dalam Alquran 12 abad sebelum Marx lahir, menang pada hari itu. Kelompok komunis terpaksa mundur dari Sarekat Islam.

Ini adalah persimpangan pertama dalam sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Selama lima tahun berikutnya Sarekat berjuang dalam pertempuran yang teruskalah melawan kelompok komunis, yang sementara itu mengorganisasikan Sarekatnya sendiri, khususnya dekat Semarang. Ia mendukung pemogokan buruh kereta api dan, akhirnya, ia mengorganisasikan barisan petempur di kalangan para bandit di beberapa daerah di Jawa bagian barat. Tapi organisasi-organisasi besar Sarekat Islam, Budi Utomo, dan PKI bukanlah satu-satunya yang ada di lapangan. Indonesia adalah negeri banyak suku bangsa dan bahasa serta juga banyak agama, dan banyak dari kelompok rasial dan keagamaan lokal ini merasa perlu mempertahankan warisan budaya khas mereka, dengan mendirikan organisasi umum. Dalam beberapa tahun setelah pendirian Budi Utomo ada persatuan nasional

"orang Sumatra" (sebagian besar Minangkabau), orang Madura dan Sunda, orang dari Ambon dan Minahasa, dan bahkan orang Timor. Biasanya gerakan-gerakan dimulai di kalangan orang non-Jawa yang tinggal di Jawa dan dari sana menyebar ke kampung halaman orang-orang itu. Ini menunjukkan bahwa kegiatan nasionalis bermula dari kontak dengan dunia Barat dan bahwa lebih khususnya lagi mereka mendapatkan pengikut pertama di antara orang-orang yang jauh dari lingkungan tradisonal mereka.

Satu ciri khusus gerakan nasional Indonesia adalah pembentukan perkumpulan perempuan. Di kalangan banyak orang Indonesia, perempuan punya posisi setara dengan laki-laki. Hukum Islam membawa sedikit saja perubahan adat istiadat dalam hal ini. Usulan bahwa hak pilih harus diberikan kepada laki-laki serta perempuan–begitu suatu bentuk perwakilan pemerintah akan diperkenalkan–tidak ditentang, seperti yang bisa diperkirakan akan terjadi di kalangan Muslim ortodoks.

Keragaman organisasi Indonesia sangat besar sebagaimana seharusnya, karena toh Indonesia punya wilayah sangat luas dan beragam. Tapi sebesar apapun perbedaan itu, rasa kesatuan nasional, berdasarkan bukan hanya kepentingan umum tapi juga nasib sejarah yang sama, tumbuh mantap. Orang Belanda telah membangun kerangka untuk kesatuan ini; lewat merekalah berbagai suku bangsa yang berbeda, ribuan pulau, telah menjadi satu tubuh politik tunggal yang terkoordinasi; dan ini adalah suatu pencapaian penguasa Eropa yang dengan penuh tekad tidak akan pernah dilepaskan oleh kalangan nasionalis Indonesia. Mungkin akan lebih bermanfaat baik bagi pemerintah maupun orang Indonesia jika *pada waktu itu* dasar bagi suatu organisasi politik federal diletakkan. Suatu usulan untuk memperkenalkan pemerintahan sendiri secara terbatas untuk pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan kelompok kepulauan di timur, diajukan oleh Hendrik Colijn, yang kemudian menjadi perdana menteri Belanda, tapi ditolak pemerintah. Bisa dikatakan bahwa jenis "federalisme" ini bukanlah yang diinginkan orang Indonesia.

Sementara tanda-tanda pertama gerakan Indonesia mulai tampak, langkah pertama ke arah pemerintahan sendiri diambil oleh lembaga *Volksraad, Dewan Rakyat*. Undang-Undang 1903, yang mengatur desentralisasi administrasi Indonesia, menghasilkan pembentukan dewan-dewan regional dan kota dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Langkah berikut ke arah itu adalah pengenalan pemerintahan sendiri sampai tingkat tertentu untuk desa dan kabupaten. Eksperimen pertama dalam pemerintahan sendiri ini, yang memang sangat kecil, dianggap berhasil di kalangan pejabat, tapi sangat dikritik oleh para pakar Belanda. Dalam kenyataan, administrasi oleh pemerintah pusat dan oleh dewan setempat masih terlalu campur-baur untuk memungkinkan penilaian yang jelas terhadap efisiensi pemerintahan sendiri di tingkat lokal sebagai suatu prinsip kerja. Pada 1893 dan 1907, usaha yang lemah dilakukan untuk mereformasi pemerintah kolonial pusat tapi tanpa hasil. Pada 1913 masalah partisipasi yang lebih besar dari penduduk Indonesia dalam urusan pemerintahan dihidupkan kembali, dan pada 1916 hasilnya adalah lembaga Dewan Rakyat, terdiri atas orang Eropa, Indo-Arab, Indo-Cina, dan Indonesia. Pada 18 Mei 1918, rapat pertama Dewan itu dibuka oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum.

Dewan Rakyat terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat, yakni diangkat oleh Gubernur Jenderal. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi minoritas yang kalau tidak begitu tidak akan punya kesempatan untuk terwakili. Karena anggota terpilih ditentukan lewat pemilihan tidak langsung dewan regional dan kota, dan jumlah pemegang hak pilih masih sangat terbatas, beberapa kelompok politik, khususnya oposisi, kemungkinan kecil akan mendapat tempat di Dewan. Dalam kasus seperti itu, kalau Gubernur Jenderal menganggap kelompok itu cukup penting, dia dapat memberikan kursi di Dewan kepada salah satu anggotanya. Sebetulnya, beberapa pengkritik pemerintah yang paling keras pada tahun-tahun berikutnya diangkat oleh pemerintah. Tapi kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Rakyat begitu terbatas sehingga

beberapa orang berkualitas tinggi di Belanda dengan jengkel mengeluh bahwa pemerintah di Den Haag sedang menjalankan kebijakan "perlawanan pasif" terhadap tuntutan penduduk koloni. Karena Gubernur Jenderal tidak dapat bertindak lepas dari pemerintahan di Den Haag, Dewan itu menerima hanya kekuasaan penasihat termasuk hak untuk mengusulkan kepada Gubernur Jenderal reformasi yang dianggapnya perlu. Pada 1918 mayoritas anggota adalah orang Eropa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah di negeri leluhur tidak punya keinginan memindahtangankan sebagian kekuasaannya kepada orang Indonesia, tapi bahwa ia hanya mau administrasi kolonial berurusan dengan seksi penduduk Eropa, ditambah sejumlah kecil orang Indonesia, Cina, dan Arab. Kalangan nasionalis Indonesia sangat kecewa. Di Dewan Rakyat, dengan pengorganisasian seperti pada 1917, tidak ada tempat untuk kelompok oposisi nasionalis. Ia akan selalu kalah jumlah dari mayoritas besar anggota yang termasuk dalam kelas atas masyarakat kolonial.

Peristiwa-peristiwa di Eropa pada November 1918 mendorong Gubernur Jenderal menjanjikan perluasan hak kepada Dewan Rakyat, dan pada 1920 jumlah anggotanya ditambah. Lebih penting lagi adalah reformasi pada 1922 dan 1925, tapi bahkan saat itu pun kekuasaan pemerintah tetap jauh lebih besar daripada kekuasaan "parlemen" itu, dan di parlemen anggota orang Indonesia yang secara rasial mewakili lebih daripada 95 persen penduduk hanya punya kursi sedikit lebih daripada 50 persen.

Undang-undang Dasar Belanda direvisi pada 1922 untuk memungkinkan masuknya reformasi demokratik yang tampaknya diharuskan oleh perkembangan politik Eropa pascaperang. Relasi antara negeri induk dan koloni juga dibahas dan suatu formula baru yang menggambarkan relasi itu pun disepakati. Kata "koloni" dan "wilayah Belanda di luar negeri" akan dihilangkan dari konstitusi. Di masa depan wilayah-wilayah yang membentuk bagian dari kerajaan akan diperlakukan sebagai entitas berbeda.

"Regeeringsreglement" (Undang-Undang Administrasi

Hindia Belanda) digantikan dengan suatu konstitusi yang mencakup pemberian kekuasaan ekskutif dan legislatif yang lebih besar di Indonesia kepada Gubernur Jenderal, yang kini butuh persetujuan dari Den Haag hanya dalam keputusan-keputusan besar saja, sementara dalam banyak hal lain dia diperintahkan untuk berkonsultasi dengan, dan sering kali mendapatkan persetujuan dari, Dewan Rakyat. Rincian anggaran tahunan harus diselesaikan dengan kesepakatan bersama Gubernur Jenderal dan Dewan, sementara Parlemen Belanda hanya memiliki kekuasaan untuk menolak anggaran *en bloc*. Jumlah anggota Dewan ditetapkan 60, yang, menurut Konstitusi 1925, terdiri atas orang Belanda 30, Indonesia 25, serta lima orang Indo-Arab dan Indo-Cina. Pemerintah ingin lebih liberal terhadap penduduk orang Indonesia, tapi perubahan pada rancangan undang-undang yang disetujui oleh mayoritas parlemen Belanda membalikkan angka yang semula diusulkan (30 orang Indonesia serta 25 orang Belanda dan lima untuk sisanya). Akibatnya timbul reaksi keras di Indonesia, dan sudah sedari 1928 angka itu dibalikkan lagi. Jumlah pemegang hak pilih yang berhak memilih langsung wakil-wakil di "Volksraad" tetap kecil, dan akan tetap kecil sampai akhir administrasi Belanda. Di bawah sistem pengambilan suara "bertingkat", yang ditetapkan untuk pemilihan "Volksraad", setiap pemilih mewakili pemegang hak pilih yang tidak ditentukan jumlahnya yang berhak memilih untuk badan perwakilan lokal dan regional. Pemegang hak pilih untuk "pemilihan Dewan", dengan demikian dapat dibandingkan dengan "*electors*" dalam pemilihan presiden Amerika.

Pada 1924, hanya 452 orang Indonesia yang berhak ikut serta dalam pemilihan, dibandingkan dengan 594 orang Belanda "Eropa". Angka untuk 1927 adalah 750 orang Indonesia dan 508 orang Eropa; pada 1935, 1.529 orang Indonesia dan 550 Eropa; dan pada 1939, 1.452 Indonesia dan 343 Eropa. Pemilihan 1927 adalah yang terakhir di mana orang Indonesia dan Eropa membentuk satu badan pemegang hak pilih. Setelah itu mereka

memilih dalam pemilihan terpisah untuk masing-masing 30 kursi Indonesia dan 25 kursi Eropa.

Undang-Undang 1918, 1922, dan 1925 menyisakan sejumlah besar persoalan yang harus diatasi, namun solusinya tidak akan pernah didapatkan kecuali kalau pihak-pihak yang berkepentingan bersedia menyepakati suatu tujuan umum yang hendak mereka perjuangkan. Sayang perbedaan antara pendekatan Belanda dan Indonesia mengenai masalah-masalah ini justru makin tahun makin lebar. Pemerintah Belanda mendukung kuat pandangan publik Belanda, baik di Belanda maupun di Hindia, yang ingin maju pelan-pelan, dan menunda-nunda konsesi politik sampai orang Indonesia "matang untuk pemerintahan sendiri dalam skala lebih besar". Tidak pernah dikatakan, oleh orang Belanda, maupun negara-negara Eropa lain, apa kualifikasi yang harus dimiliki suatu bangsa supaya "matang untuk pemerintahan sendiri", dan kebijakan penguasa kolonial untuk membuat diri mereka sendiri hakim satu-satunya dalam urusan "matang untuk pemerintahan sendiri" ini menjengkelkan dan dianggap menghina orang-orang jajahan. Mereka ini bisa saja mengeluh bahwa mereka diperlakukan seperti anak sekolah yang diberitahu mereka harus lulus ujian yang sulit tapi tidak diberitahu tentang mata pelajaran yang harus mereka persiapkan untuk ujian itu.

Di lain pihak, orang Indonesia tidak sepakat di antara mereka sendiri tentang status politik masa depan yang mereka sendiri inginkan untuk negeri mereka dan tentang jenis masyarakat yang mereka rencanakan akan dibangun, begitu pemerintahan sendiri itu diperoleh, atau tentang taktik yang akan dipakai untuk mencapai tujuan itu. Orang Belanda yang lebih konservatif cenderung melihat semua permintaan Indonesia untuk pemerintahan sendiri sebagai pemberontakan, atau, paling tidak, sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh negara Belanda kepada kesetiaan rakyat Asianya. Mayoritas orang Belanda–dan pemerintah punya pandangan sama–berpandangan lebih moderat mengenai tuntutan reformasi politik tapi mereka

juga menganggap tuntutan untuk kemerdekaan penuh adalah suatu aksi pemberontakan yang harus dihukum sepatutnya.

Pada saat itu hampir semua orang di Belanda bersedia setuju bahwa pemerintahan kolonial harus dianggap suatu "*trusteeship*" ("perwalian") yang akan berlangsung sampai massa Indonesia menjadi melek huruf dan terdidik secara politis, yang mampu memerintah negeri mereka sendiri berdasarkan prinsip-prinsip demokratik. Tapi, orang Belanda yang sama ini berpikir, akan butuh waktu lama sebelum orang Indonesia mencapai derajat kedewasaan yang akan memuluskan transfer kedaulatan. Pertanyaan yang membelah pendapat publik Belanda berkenaan dengan bagus tidaknya menyerahkan sebagian otonomi internal kepada *Hindia Belanda*—usulan yang jauh berbeda dengan penyerahan *pemerintahan sendiri kepada Indonesia*. Otonomi untuk Hindia Belanda berarti bahwa pemerintah Batavia tidak lagi berlaku otokratik dan akan berbagi kekuasaan dengan wakil-wakil kelas terdidik di kalangan penduduk tetap koloni. Paling tidak 80 persen kelas terdidik itu lahir di Eropa atau keturunan Eropa; sisa 20 persen adalah orang Indonesia atau Cina. Sudah kita lihat bahwa gagasan ini dianut luas di kalangan orang Belanda di Indonesia tapi pemerintah di Belanda tidak begitu berkenan. "Kelas terdidik" membentuk satu minoritas kecil di kalangan massa Indonesia. Mampukah mereka mempertahankan posisi berkuasa mereka melawan keinginan massa, kalau mereka ini mulai menuntut "bentuk pemerintahan demokratik"? Mungkinkah pemerintah demokratik di Belanda, bila terjadi hal seperti itu, mempertahankan minoritas itu yang toh tidak lebih daripada oligarki yang sedang berkuasa? Pendukung "otonomi Hindia Belanda" menyatakan bahwa kelompok oligarki yang awalnya kecil itu akan bertambah jumlahnya tahun demi tahun dengan penyebaran dan kemajuan pendidikan, dan bahwa akhirnya orang Indonesia akan merupakan mayoritas di kalangan pemilih dan bahwa, selain itu, minoritas Belanda yang kecil itu akan pelan-pelan terserap oleh mayoritas Indonesia yang besar.

Ini gambaran indah yang dilukiskan, tapi pemerintah Belanda tidak mau menyerahterimakan kekuasaannya kepada golongan orang yang mungkin akan menempatkan kepentingan ekonomi koloni di atas negeri leluhur, dan pada saat yang sama menuntut dukungan Belanda untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Orang Indonesia bahkan menolak mempertimbangkan solusi ini, yang akan membuat posisi mereka lebih buruk dibanding sebelumnya. Mereka sama sekali tidak yakin akan janji dari kelompok orang yang kepentingan utamanya ialah mempertahankan kedudukan mereka dengan melawan massa Indonesia. Orang Indonesia lebih suka menerobos tahap-antara "pendidikan untuk demokrasi". Pemerintah Belanda tidak menolak mendiskusikan versi otonomi "Hindia Belanda" tapi sangat tidak setuju akan pembahasan apapun mengenai versi "Indonesia". Pemakaian kata "Indonesia" dilarang. Secara resmi, tidak ada wilayah itu di peta. Pemerintah Belanda dan mayoritas bangsa Belanda sepakat penuh bahwa tidak boleh ada perubahan rasial dalam aturan konstitusional Hindia Belanda dan mereka menyatakan hal ini dengan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan. Pembangunan ekonomi pada tahun-tahun antara 1925 dan 1929 membuat perusahaan Belanda berkembang sangat pesat sehingga—menurut banyak orang Belanda—semua pertimbangan lain harus disingkirkan. Panen sudah matang dan kerja itu tidak boleh terganggu. Kemakmuran koloni memang mencapai puncak pada 1928. Penduduk Belanda dan Eropa (dan mungkin juga sedikit orang Cina) mendapatkan jauh lebih banyak faedah dari kemakmuran ini dibandingkan massa orang Indonesia, tentu saja, tapi yang disebut terakhir ini juga mendapat bagian. Fakta bahwa jumlah jamaah haji ke Mekah mencapai puncak tertinggi pada 1927 membuktikan hal itu. Lebih daripada 52.000 orang Indonesia menempuh perjalanan jauh itu pada tahun itu dan mereka harus membayar biaya perjalanan dari kantong mereka sendiri. Nyatanya, orang Indonesia adalah kelompok haji nasional terbesar di Kota Suci, jauh dibandingkan kelompok lain.

Indonesia juga mendapatkan manfaat dari pekerjaan umum baru dan dari perbaikan sistem transportasi yang dimungkinkan oleh kemakmuran ini. Kegiatan ekonomi yang marak pada tahun-tahun itu memperkuat keyakinan banyak orang Eropa bahwa, pada waktunya, orang Indonesia juga akan memperoleh bagian yang akan terus lebih besar dari pemasukan nasional yang terus meningkat. Karena itu, kelas penguasa menjadi makin tidak sabar dengan agitasi para nasionalis dan dengan peringatan dan celaan kaum "progresif" Belanda. Bukankah jauh lebih baik mengabdikan waktu dan energi untuk mengusahakan perluasan ekonomi daripada ribut-ribut soal hukum konstitusional? Terbukti, agitator nasionalis berusaha menentang kepentingan sejati rakyat mereka sendiri dan kaum progresif tampaknya adalah tukang bikin ribut yang suka bertikai! Orang Indonesia—atau sebagian orang yang menunjukkan minat terhadap urusan-urusan ini—melihatnya dengan kacamata lain. Sebagian agitator nasionalis, dan, khususnya agen-agen komunis di kalangan mereka, dengan lantang menyatakan bahwa setelah kemerdekaan dimenangi, semua keuntungan akan mencapai kantong orang biasa. Konsep "kemerdekaan" dan "standar penghidupan lebih tinggi" menjadi saling berkaitan erat dalam pemikiran banyak orang Indonesia yang buta huruf.

Pemerintah Belanda sangat lega dengan perbaikan situasi ekonomi, dan beberapa orang Belanda terkemuka mulai berpikir bahwa seharusnya tidak perlu tergesa-gesa memperkenalkan reformasi konstitusional pada 1916 dan mendirikan Dewan Rakyat. Pandangan publik berbalik menentang Mr. Van Limburg Stirum yang pada 1918 berjanji bahwa kekuasaan Dewan Rakyat akan diperluas dalam waktu dekat. Ketika masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal selama lima tahun berakhir, dia digantikan oleh Mr. D. Fock yang dengan teguh bersandar pada sudut pandang ultrakonservatif. Di bawah pemerintahannya, serta penerusnya De Graeff dan De Jonge yang sangat didukung oleh Menteri Koloni konservatif di Den Haag, kebijakan represi

terhadap gerakan nasionalis dimulai.

Sebagian besar orang Belanda setuju bahwa kaum nasionalis harus punya cukup kebebasan berbicara dan bertindak, tapi hanya bila mereka ternyata bersedia "bekerjasama" dengan pemerintah. Kaum nasionalis sendiri sangat terbelah dalam hal kerjasama ini dan mereka berpaling ke Eropa dengan harapan memperoleh pelajaran dari pengalaman kelompok minoritas Eropa, yang telah berhasil memperoleh kemerdekaan politik. Irlandia tampaknya menyediakan contoh bagus. Akankah lebih baik, mereka bertanya pada diri sendiri, mengikuti taktik partai Nasionalis yang bekerjasama dengan pemerintah London tapi, dengan alasan apapun, tanpa memperoleh hasil yang diinginkan; ataukah taktik Sinn Fein di bawah De Valera yang tidak mau bekerjasama tapi *telah* memperoleh hasil dengan kemerdekaan Eire? Sebagian besar kaum nasionalis cenderung mengikuti metode yang disebut terakhir dan menolak kerjasama paling tidak sampai masalah kemerdekaan bagi Indonesia (yang akan diperintah orang Indonesia dan bukan oleh kelas atas yang sebagian besar orang asing) diterima sebagai dasar diskusi oleh penguasa Belanda. Begitu dasar ini disetujui, suatu kompromi dapat dibicarakan.[13]

Pemimpin-pemimpin kaum nasionalis dihadapkan pada masalah lain yang menjadi sangat mendesak setelah 1923, ketika rezim komunis-Soviet berkonsolidasi di Rusia. Sebagian besar kalangan nasionalis tidak menolak kerjasama erat dengan rekan seperjuangan mereka yang komunis, dan tidak enggan menerima bantuan dari komunisme internasional yang terorganisasi, tapi mereka tidak mau menjadi alat komunisme itu. Pemimpin komunis Indonesia, sebaliknya, tidak bisa memanfaatkan nasionalisme non-komunis yang, paling-paling, dapat dipakai sebagai ujung tombak untuk menyerang rezim kolonial. Mereka tidak segan memakai kekerasan, bahkan bila pemberontakan yang mereka cetuskan sudah pasti akan gagal. Peningkatan kebencian dan sakit hati yang terjadi setelah represi pemberontakan juga bermanfaat untuk mereka. Tentara kolonial pastilah akan memakai cara-cara

yang sangat keras, hingga menambahkan minyak ke dalam bara api ketidakpuasan publik.

Seharusnya menjadi peringatan bagi pemimpin komunis bahwa sebagian kelompok nasionalis, dan terutama Sarekat Islam, menjadi makin bermusuhan dengan gerakan mereka. Di Jawa bagian tengah, pengikut Sarekat Islam dan Muhammadiyah terang-terangan menyerbu dan membubarkan rapat-rapat komunis. Tapi tidak ada yang dapat menghentikan rancangan revolusioner mereka. Pemimpin Sarekat Islam yang muak pada kegiatan-kegiatan kelompok komunis berhasil membuat kongres partai mereka yang dilaksanakan di Madiun pada Oktober 1922 memperbarui peraturan menentang keanggotaan ganda di kedua kelompok itu. Untuk mempertahankan daya tarik massa, Sarekat Islam sekali lagi berpaling, dengan semangat baru, kepada Pan-Islamisme. Beberapa "Kongres Seluruh Islam" diadakan. Persoalan Kekhalifahan, yang dipicu oleh berbagai tindakan Mustafa Kemal terhadap Sultan Turki terakhir, dibicarakan, dan, ketika Abdul-Aziz Ibn Saud dari Arabia tampaknya bersedia mendirikan Kekhalifahan baru di Mekah, Tjokro Aminoto dikirim ke kongres yang diadakan di Kota Suci itu.

Yang tidak begitu sejalan dengan kecenderungan ini ialah rencana lain para pemimpin Islam, yaitu menghimpun semua orang Indonesia, tanpa memedulikan perbedaan agama, dalam suatu organisasi yang mengatasi semua organisasi lain. Suatu rencana dibuat untuk mengorganisasikan suatu "Kongres Insular", mengikuti model Kongres India, di setiap pulau dan mempersatukan semua wakil dari semua kongres insular ke dalam Kongres Pan-Indonesia. Kesulitannya ternyata tidak teratasi. Upaya terakhir yang bisa dilakukan Sarekat adalah mengabdikan seluruh energinya untuk mendukung pendidikan dengan harapan memperoleh dukungan lebih besar dari generasi mendatang, tapi di tengah-tengah kegiatan mereka, suatu agitasi revolusioner kelompok komunis menjungkirbalikkan semua rencana mereka.

Ketika gerakan komunis Indonesia mulai, Rusia Soviet masih

merupakan satu negara yang kesempatannya untuk bertahan tidak pasti, dan tertekan berat oleh sejumlah musuh. Kesulitan-kesulitan itu teratasi dan Rusia berkembang mantap menjadi salah satu kekuatan besar di bumi. Kepentingan Rusia dan komunisme non-Rusia tidak selalu sejalan pada masa itu, tapi pemimpin Indonesia yang masih kurang pengalaman dengan metode organisasi sentral di Moskow menerima dengan serius janji-janji pemberian bantuan dari Zinoviev pada 1925 dan Bucharin pada 1926. "Orang Hindia boleh yakin akan bantuan kami," kata Bucharin pada Kongres Komite Eksekutif Komintern. Pada masa itu, Zinoviev dan Bucharin sudah menjadi orang yang terancam, tapi ini tidak diketahui di Indonesia, kecuali mungkin di kalangan para pemimpin komunis tertinggi. Mereka percaya akan mendapatkan dukungan penuh dari Moskow, apapun taktik yang mereka pakai. Dalam kenyataan, Moskow sangat menentang kebijakan yang akan menyia-nyiakan sumber daya komunisme internasional dalam usaha-usaha revolusioner yang tidak bermanfaat. Lenin biasa berkata (mengikuti gaya seorang negarawan non-komunis): "usaha revolusi yang tidak terencana dengan baik lebih buruk daripada kejahatan, ia adalah kesalahan." Moskow tahu benar bahwa pemberontakan lokal di Indonesia pada 1926 pasti akan gagal. Administrasi koloni berfungsi mulus dan tentara kolonial, termasuk serdadu Indonesia, setia. Tapi kalangan komunis Indonesia tidak mau bergeser dari rencana mereka. Peringatan Moskow dan agen tertingginya di Asia Tenggara, Tan Malaka yang orang Indonesia, tidak digubris.[14] Rencana dibuat dalam suatu rapat yang diadakan di reruntuhan candi Prambanan. Pemerintah akan "diperlemah" dengan serangkaian pemogokan diikuti oleh pemberontakan bersenjata, pertama di pantai bagian barat Sumatra, lalu di Jawa Barat. Pemogokan gagal dan pemberontakan di Jawa Barat dengan mudah dihancurkan tentara Belanda, walaupun sekelompok pemberontak berhasil menduduki kantor telepon pusat Batavia selama beberapa jam. Pecahnya pemberontakan di Sumatra tertunda dan tidak dimulai

sebelum pemberontakan di Jawa berakhir.

Pemerintah membalas dengan berbagai langkah keras. Represi oleh militer memang keras dan kejam. Sejumlah besar orang komunis, dan orang lain yang dianggap komunis atau terlibat dalam pemberontakan, ditangkap dan dibuang ke kamp di hulu sungai Digul di Papua. Paratahanan terputus dari hampir semua komunikasi dengan dunia luar. Jarak besar yangterhampar antara kamp dan pantai, hutan lebat dan penduduknya yang suka mengayau menjadi pagar yang lebih efektif daripada pagar berduri mana pun. Pembuangan itu dimaksudkan bersifat sementara tapi, walaupun banyak tahanan pertama pelan-pelan dilepaskan atau dipindahkan ke lingkungan yang lebih ramah, kamp itu tetap terpakai sampai 1941.

Pengaruh kalangan komunis menurun hebat karena kebodohan para pemimpin awal mereka. Periode kedua dalam gerakan nasionalisdimulai tapi kini pandangan publik di kalangan penduduk Belanda di Kepulauan Indonesia sudah bangkit. Perjuangan makin lama makin sulit.

Sebelum perang 1914, hanya sedikit murid Indonesia yang berhasil sampai ke universitas di Belanda. Setelah 1918 jumlah mereka meningkat pesat. Banyak murid Indonesia dengan mudah bergaul dengan sesama murid Belanda, tapi, pada saat yang sama, mereka makin kuat dalam keyakinan nasionalis mereka berkat pengalaman di Eropa itu. Pada masa itu Eropa adalah ajang kebangkitan nasional banyak negeri. Pembebasan Polandia oleh Pilsudski dan lain-lain, Cekoslovakia oleh Masaryk, Finlandia dan negara-negara Baltik, dan perangyangdilancarkan oleh Sinn Feinn Irlandia melawan pemerintahan Britania, menggugah perasaan generasi muda di hampir semua negeri di Eropa serta di wilayah kolonial. Konferensi Damai Paris telah mengagungkan prinsip penentuan nasib sendiri secara nasional, dan sejumlah kelompok nasional kecil menuntut penerapannya di beberapa bagian Eropa, suatu hal yangjika diterima akan menimbulkan ketidaknyamanan besar bagi kekuatan-kekuatan yangjustru merumuskan prinsip itu

di Paris. Banyak orang muda Eropa dan hampir semua orang Asia mengkritik kekuatan-kekuatan besar Eropa atas "kemunafikan" mereka yang tampaknya sangat buruk dibandingkan sikap liberal yang ditunjukkan Lenin.

Karena, Lenin juga menerima prinsip penentuan nasib sendiri tapi penafsirannya atas prinsip itu berbeda secara mendasar dari tafsiran penganut prinsip itu di Barat yang demokratik. Dia memang mempermaklumkan prinsip penentuan nasib sendiri dan bahkan hak minoritas nasional untuk memisahkan diri dari negara induknya, tapi sedikit orang yang membaca semua pamflet politiknya, dan karena itu tidak pernah memperhatikan bahwa, menurut pemimpin Bolshevisme itu, kedua hak itu didudukkan di bawah kepentingan proletariat. Prinsip itu tidak dapat dipakai untuk membenarkan pemisahan yang ditujukan untuk mendirikan kembali komunitas politik borjuis, karena hak penentuan nasib sendiri, seperti semua hak lain, hanya boleh dimiliki "proletariat". Keadaan memaksa Lenin menyetujui pemisahan diri Finlandia dan negara-negara Baltik walaupun faktanya pemisahan itu justru bertujuan menggulingkan rezim komunis, atau menghadang pendirian rezim seperti itu. Kelompok minoritas lain dari imperium Rusia diperkenankan membentuk pemerintahan revolusioner proletarian mereka sendiri, yang tindakan pertamanya dapat dipastikan adalah menjalin kembali ikatan politik yang ada sebelumnya dengan Rusia.

Bagi mahasiswa Indonesia di Belanda dan banyak orang lain dari wilayah kolonial, kemerdekaan negara-negara Baltik adalah contoh gemilang penerapan liberal dan jujur dari prinsip itu. Hampir tidak mungkin berpikiran lain, karena pembatasan yang ditempatkan Lenin atas penerapannya masih belum diketahui. Tapi ada alasan lain mengapa banyak orang Asia berpaling dengan penuh harap pada Moskow pada masa itu. Lenin membalikkan kebijakan Tsar terhadap negara-negara Asia. Pada 1914 hanya tujuh negara Asia yang masih bisa dianggap bebas dari dominasi asing: Turki, Arabia Tengah, Persia, Afghanistan, Siam, Cina,

dan Jepang. Sebagai akibat perang dan peristiwa pascaperang sampai 1923, Cina memperoleh kembali sebagian kebebasannya. Sebagian bekas imperium Turki (tanah Arab) dikuasai Eropa, tapi inti negara Turki berhasil membebaskan diri dari belenggu yang dipaksakan pada 1919 oleh kekuatan-kekuatan yang menang perang. Persia sangat tertekan dalam perjuangan melawan usaha Britania mendirikan suatu protektorat.[15] Di Cina peran Britania Raya, Jerman, dan Prancis diambil alih oleh Jepang dan negeri ini memakai metode paling sadis untuk mencapai tujuan imperialisnya.

Gerakan pertama Lenin adalah memberikan sokongan kuat kepada orang Turki dan Cina. Langkah keduanya bahkan lebih mengesankan lagi. Dia melepaskan semua hak ekstrateritorial dan hak-hak khusus lain yang telah diperoleh oleh Tsar dan dia menyerahkannya tanpa kompensasi.[16] Negarawan Barat mungkin beralasan bahwa kemurahhatian Lenin hanya terbatas pada negeri-negeri tempat kedudukan Rusia kini melemah setelah kekuatan militernya tampaknya hancur untuk selamanya, atau mereka mungkin menunjuk pada kenyataan bahwa Lenin menolak memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada orang-orang yang wilayahnya membentuk sebagian imperium Tsar dan yang masih punya kepentingan strategis dan ekonomis untuk Rusia, tapi orang Asia dengan mudah bisa membalas bahwa *perbuatan* lebih baik daripada *perkataan* dan bahwa sejauh itu Rusia Komunis adalah satu-satunya negara yang memberikan konsesi serius. Para pemimpin nasionalis Asia tidak khawatir terlalu banyak tentang beberapa juta orang Muslim di Turkestan, yang tanpa ampun dibunuh ketika mereka berani melawan kekuasaan Moskow. Mereka terutama tertarik pada 50, atau 250 juta rakyat di negeri mereka sendiri yang tiba-tiba mendapati salah satu negara terbesar di dunia berpihak pada mereka. Argumen lain bahwa Lenin kurangtertarik pada usaha memastikan pembebasan penduduk kolonial dibandingkan usaha menggerogoti kedudukan kekuatan-kekuatan kolonial juga tidak berpengaruh pada

pemikiran orang Asia.

Begitulah, Lenin mendapatkan kekaguman dan persahabatan dari sebagian besar pemimpin nasionalis Asia bagi negara Soviet yang baru. Salah satu akibatnya ialah bahwa "Indische Vereeniging", asosiasi mahasiswa Indonesia di universitas-universitas Belanda, memilih menutup pintu untuk orang-orang non-Indonesia dan mencari hubungan dengan Komintern. Sebagian pemimpinnya yang paling ternama menghabiskan waktu di Moskow. Orang-orang muda ini tidak menjadi komunis; tujuan mereka lebih berupa usaha memanfaatkan kebijakan Rusia Soviet untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Tentu saja Moskow berharap dapat memanfaatkan *mereka* untuk mencapai tujuan yang sangat berbeda.

Ketika para mahasiswa ini pulang ke Indonesia mereka bergabung dengan kelompok-kelompok nasionalis yang dengan senang hati menerima mereka, dan dalam kasus tertentu mengangkat mereka jadi pemimpin. Gerakan nasionalis kekurang an orang-orang yang terlatih secara akademis dan secara intelektual sejajar dengan pejabat Belanda. Sutomo, salah satu pendiri Budi Utomo, mencoba mengatasi kekurangan ini dengan membentuk "Klub Studi Indonesia" mengenai masalah sosial, ekonomi, dan politik di seluruh Jawa. Beberapa kelompok mendapatkan pemimpin mereka dari kalangan lulusan sekolah pemerintah di Jawa yang selevel dengan universitas. Sukarno yang lulus dari Sekolah Teknologi Bandung, dan Tjipto Mangunkusumo, dokter yang dididik di Sekolah Kedokteran Jawa, pada 1929 mendirikan "Perserikatan Nasional Indonesia". Mangunkusumo, yang dituduh terkait dengan pemberontakan 1926, dibuang dari Jawa. Tapi Sukarno dengan cepat menjadi terkenal di kalangan pemimpin nasionalis yang berusaha dia yakinkan akan pentingnya mempersatukan usaha mereka dan menganut kebijakan antikerjasama. Selama beberapa waktu, usahanya tampak hampir berhasil, tapi paling lama dalam waktu dua tahun berbagai kelompok nasionalis berbalik ke kebijakan

dan sikap awal mereka. Tapi, Sukarno bertahan dengan upayanya. Talenta oratoris Sukarno yang hebat membantunya memperoleh pengakuan luas di kalangan orang Jawa sebagai pemimpin massa. Dia tahu bagaimana merumuskan slogan yang menarik pendengarnya. Dia memahami pentingnya simbol yang dipakai orang banyak sebagai alat pemersatu untuk mengemukakan sentimen nasional mereka. Gerakan nasional tidak memiliki bendera nasional dan lagu nasional. Bendera yang lalu dirancang, merah putih, kemudian menjadi bendera Republik Indonesia pada 1945.[17] Himne "Indonesia Raya" dikarang oleh W. R. Supratman, seorang penulis novel Melayu (Jawa) dan wartawan.[18]

Sukarno sendiri sangat cenderung pada konsep sejarah dan masyarakat Marxis. Pandangan-pandangan ini ditolak oleh banyak pemimpin nasionalis yang lebih dewasa. Mungkin Sukarno agak gegabah dalam seruannya kepada orang Jawa untuk menolak bekerjasama dengan "imperialis kapitalis" Belanda, dia mungkin sakit hati oleh penolakan banyak pemimpin nasional lain untuk bergabung dengannya dan membentuk barisan bersama menghadapi Belanda, toh pidato-pidatonya makin lama makin membakar dan revolusioner. Pemerintah makin prihatin dengan agitasi yang makin meningkat di kalangan penduduk Indonesia di perkotaan, dan terpaksa bertindak karena orang Belanda protes keras atas "sikap lembeknya dan menuntut langkah tegas terhadap kaum revolusioner tersebut". Pada 20 Oktober 1929, suatu organisasi politik Belanda dibentuk untuk memberikan tekanan pada Batavia dan Den Haag. Dua bulan kemudian, pada 29 Desember tahun itu juga, polisi menangkap Sukarno dan beberapa rekan politiknya.

Sekali lagi, gerakan nasional Indonesia tiba di persimpangan, dan kita harus mengalihkan perhatian pada latarbelakang umum, yang menjadi panggung babak berikut dari drama itu.

Periode antara 1920 dan 1940 menandai akhir dunia Indonesia lama dan awal yang baru. Garis pemisahnya sendiri bersamaan dengan depresi ekonomi besar pada 1930-an. Pada paruh pertama

periode itu, produksi dan kemakmuran Hindia Belanda mencapai puncak tertinggi. Antara 1920 dan 1930, produksi timah meningkat 50 persen, batubara dan minyak hampir 100 persen. Dari produk pertanian, kopi masih bertahan pada level produksi lama sekitar 60.000 ton setahun, tapi gula dan teh meningkat 100 persen, kopra meningkat 50 persen, dan karet 200 persen. Pemasukan pemerintah, dari semua sumber ini, naik sampai lebih daripada 500 juta gulden, sekitar 20 persen di antaranya diperoleh dari perusahaan dan produk, sementara pajak, yang terutama dibayar oleh penduduk Eropa, menghasilkan 114 juta gulden. Situasinya sama sekali berubah sejak masa-masa awal abad ke-20, ketika produk dan sewa tanah menjadi sumber utama pemasukan negara. Tapi Hindia Belanda bukanlah negeri para jutawan. Di kalangan orang Eropa tidak sampai tiga persen menikmati penghasilan lebih daripada 25.000 gulden setahun. Tentu saja, pemasukan besar lebih jauh didapatkan dari produksi Indonesia oleh pemegang saham perusahaan pertanian dan pertambangan di seluruh dunia, walaupun sebagian besar pemegang saham ini masih terdapat di Belanda. Pada 1929 investasi total modal internasional di Indonesia mencapai sekitar empat miliar gulden dan pada tahun yang tampaknya penuh kemakmuran itu penghasilan yang diperoleh dari modal itu mungkin hampir setengah miliar. Para pakar menghitung bahwa pada 1928 antara 12 dan 15 persen pemasukan nasional Belanda di Eropa didapatkan (langsung atau tidak langsung) dari Indonesia.

Konsekuensi perkembangan ini ialah bahwa sejumlah besar orang Eropa, khususnya orang Belanda, datang ke Indonesia. Jumlah orang Eropa (termasuk Indo-Eropa berdarah campuran) sudah naik menjadi sekitar 170.000 pada 1920, tapi pada 10 tahun berikutnya melonjak menjadi 242.000. Dari jumlah ini kira-kira 40.000 lahir di Belanda, sisanya lahir di Indonesia. Masuknya orang Belanda kelahiran Eropa menyebabkan perubahan cukup besar dalam struktur sosial negeri itu, karena sebagian besar imigran ini datang tanpa maksud tinggal permanen di daerah

tropis. Mereka berharap bekerja sepanjang kontrak mereka (rata-rata 20 tahun) dan kemudian pulang untuk menikmati pensiun mereka selama 20 tahun lagi atau lebih. Masa ketika harta melimpah bisa diperoleh di koloni dalam waktu relatif singkat sudah berlalu, tapi hak pensiun pada usia pensiun yang masih muda membuat lapangan kerja di luar negeri sangat menarik.

Mulai saat itu, pembedaan biasa dibuat antara "*trekker*" dan "*blijver*" di kalangan orang Belanda di Indonesia. "*Blijver*" adalah mereka yang tinggal di koloni seumur hidup dan anak-anak mereka (walaupun murni keturunan Eropa) menganggap Indonesia tanah air. "*Trekker*" adalah mereka yang datang untuk menyelesaikan tugas 20 tahun mereka dan setelah itu berencana pulang ke kampung halaman secepat mungkin. "*Trekker*" tidak tertarik pada perpolitikan kolonial. "*Blijver*" mengharapkan akulturasi perlahan-lahan orang Belanda dan Indonesia yang, akhirnya, akan menemukan ekspresi politik dalam "kewarganegaraan Hindia Belanda" yang terbuka bagi semua orang yang menganggap Kepulauan Indonesia tanah air sejati mereka. Dalam hal tertentu kelompok ini didukung beberapa kelompok politik Eropa lain, seperti Partai Katolik dan Kelompok Liberal Demokratik. "Sociaal-Democratische Partij" (sosialis Marxis moderat) selama beberapa waktu lebih suka solusi yang lebih radikal, yakni kemerdekaan penuh untuk Indonesia, tapi kemudiaan mengubah pandangannya. Selama 10 tahun pertama keberadaan Dewan Rakyat, berbagai partai dibentuk berdasarkan asosiasi sukarela orang Eropa dan Indonesia demi tujuan politik dan sosial bersama. Di antaranya "Nederlands-Indische Vrijzinnege Bond" ("Perserikatan Progresif Hindia Belanda") dan "Perserikatan Politik dan Ekonomi".

Pada akhir 1920-an sekitar 25.000 orang Eropa dan 50.000 orang Indonesia terorganisasi secara politis, dan sebagian besar dari 75.000 orang ini memilih pemerintahan Indonesia sendiri atau kemerdekaan, walaupun sebagian besar ingin tetap di dalam batas "Imperium" Belanda, sebagai tujuan politik. Orang Cina, yang terancam terjepit antara pihak Eropa dan Indonesia,

membentuk organisasi politik mereka sendiri. Sebagian orang Cina, terutama *peranakan* (orang Cina kelahiran Indonesia), menyatakan diri mendukung evolusi konstitusional, yang lain menyatakan dukungan untuk nasionalisme Indonesia, dan kelompok ketiga berpaling ke Cina dan mendukung pemulihan kewarganegaraan Cina dan kerjasama dengan gerakan politik dan kultural baru di Cina.

Reformasi sistem pemilihan 1927 justru menghancurkan dasar yang menopang "kelompok asosiasi". Di bawah sistem baru, 30 kursi di Dewan Rakyat diperuntukkan bagi wakil orang Indonesia ("pribumi"), 25 untuk wakil kelompok penduduk Belanda, dan lima untuk "Asia Asing", yakni orang Cina dan Arab. Konsekuensi pemisahan ini ialah bahwa pemilih juga harus dibagi ke dalam tiga seksi etnik. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi wakil yang didukung oleh kelompok pemilih yang secara etnis campuran. Sistem baru itu diberlakukan setelah Dewan untuk periode 1927 sampai 1931 dipilih. Jadi, ia berlaku pada pemilihan 1931. Pada tahun itu, suatu fase baru dan sulit dalam sejarah Hindia Belanda mulai.

Pada 1927 pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatra telah dihancurkan. Pemogokan yang dicetuskan kaum komunis melumpuhkan gerakan serikat buruh. Kekalahan usaha revolusi komunis yang prematur tersebut menjelekkan seluruh gerakan nasionalis. Sukarno, yang tetap bertahan dalam usahanya membangkitkan orang Indonesia, ditangkap pada 1929 dan pada tahun berikutnya dihukum penjara beberapa tahun. Setelah pengadilan, partainya dilarang pemerintah. Ledakan revolusioner yang tiba-tiba pada 1927 telah membuat takut penduduk Belanda di Indonesia dan banyak dari mereka menyalahkan pemerintah atas krisis itu. Kebijakan "lunak"-nya terhadap gerakan nasionalis, katanya, telah membahayakan hidup perempuan dan anak-anak Belanda. Demi kepentingan mereka sendiri "penduduk pribumi" harus diperintah dengan tegas. Mayoritas orang Indonesia setia, demikian dipercaya, dan kalau "unsur-unsur subversif" tersisih,

kedamaian dan ketertiban akan terjamin. Lagi pula, bangsa Belanda tidak dapat terus ada tanpa hubungan erat dengan Hindia. Karena itu, kembali ke kebijakan konservatif yang keras merupakan suatu keniscayaan. Cukup menarik, oposisi terkuat terhadap kecenderungan reaksioner ini tidak datang dari partai-partai politik demokratik di negeri leluhur, tapi dari sekelompok orang Belanda di Indonesia.

Di bawah dampak peristiwa 1927 dan 1929 suatu organisasi politik konservatif yang kuat dibentuk di Hindia yang menyandang nama "Vaderlandsche Club" (Perserikatan Patriot). Program perserikatan baru ini menginginkan adanya ikatan erat antara Belanda dan Hindia dan penguatan kekuasaan Belanda dan kelompok penguasa Belanda di seluruh Kepulauan Indonesia. Untuk menentang kelompok ini, sejumlah intelektual Belanda yang andal dan progresif di Indonesia pada 8 Februari 1930 mendirikan gerakan politik dan budaya yang dikenal dengan nama majalahnya: "De Stuw" (berarti "Gerakan Maju").[19] Nama resminya "Perkumpulan untuk mendukung pembangunan sosial dan politik Hindia Belanda". Anggotanya sedikit dan semuanya orang Belanda, dan tentu saja mereka menimbulkan penolakan besar dari rekan-rekan mereka. Gerakan itu jelas lebih memperoleh dukungan di kalangan orang Indonesia daripada Belanda. Namun, sebagian anggotanya ditakdirkan memainkan peran penting dalam peristiwa sesudah 1945, di antaranya H. van Mook, J. Jonkman, dan J. Logemann.[20]

Perubahan konstitusional 1918 dan 1922 memungkinkan orang Belanda di Indonesia menyatakan pandangan mereka dengan bebas dalam penerbitan. Van Imhoff adalah Gubernur Jenderal pertama yang mengizinkan penerbitan berkala suatu lembar berita, "*Bataviasche Nouvelles*". Gubernur Daendels dan Raffles menerbitkan lembar berita resmi. Terbitan Raffles bernama "*Java Government Gazette*" dan terus terbit sampai akhir pemerintahan Belanda (setelah 1828 namanya menjadi "*Javasche Courant*") sebagai koran berita resmi. Pada 1831, surat kabar swasta pertama

mulai muncul: "*Surabaya Courant*". Sejak 1845, sebuah koran diterbitkan di Semarang yang pada 1863 mengambil nama "*De Locomotief*", dan tidak berhenti terbit sampai beberapa tahun lalu. Sekitar 1885 ada sekitar 28 surat kabar di Indonesia (berbahasa Belanda dan Melayu) tapi oplah total tidak lebih daripada 1.000. Kehidupan seorang redaktur jauh dari mudah pada masa itu, karena beberapa redaktur pertama dipenjara untuk "tulisan berbau pemberontakan". Tidak ada kebebasan total untuk pers sampai 1918, dan bahkan ketika itu pun pemerintah masih memegang kekuasaan untuk menghentikan penerbitan untuk sementara. Sekitar 1935 ada kurang lebih 320 surat kabar di Hindia, sebagian adalah majalah kecil. Dari 19 koran harian berbahasa Belanda, tidak ada yang pelanggannya lebih daripada 7.000![21]

BAB 16

MENUJU PERANG DAN REVOLUSI

DI BAWAH pemerintahan Gubernur Jenderal B.C. de Jonge (1931-1936) kebijakan Belanda terhadap nasionalisme Indonesia menjadi jelas-jelas reaksioner. Polisi ("PID", *Politieke Inlichtingen-dienst*) dengan ketat mengawasi setiap tindakan dari para pemimpinnya. Sedikit saja yang lolos dari hukuman yang diusulkan oleh PID, karena Gubernur Jenderal itu selalu dengan mudah menerima dan bertindak berdasarkan masukan dari pejabat polisi, dan pemerintah di negeri leluhur tidak campur tangan dengan kebijakan ini. Sebaliknya ia dengan semangat mendukung "sikap tegas"-nya, walaupun ada protes dari Parlemen dan sebagian pers Belanda. Polisi kolonial bahkan memperluas pengawasan ini pada warga Belanda yang tinggal di Hindia; mereka melakukan semua yang bisa mereka lakukan agar orang di Belanda tidak tahu apa yang mereka lakukan di koloni dan mencoba menjaga agar orang Belanda yang tinggal di sana tidak tahu apa yang dipikirkan dan dikatakan sebagian orang di kampung halaman mereka. Penjualan atau penyebaran majalah dan tulisan Belanda "kiri"—memang kiri atau dianggap kiri—dilarang dan orang Belanda di luar negeri kadang-kadang sulit memperoleh majalah "terlarang" yang mereka langgani.

Peraturan polisi yang ketat digariskan untuk mengontrol pertemuan-pertemuan politik. Izin untuk rapat ruang terbuka jarang dikabulkan. Polisi harus punya akses ke semua rapat publik dan diberi hak memotong pembicara dan membubarkan rapat kalau pidato atau sikap peserta menunjukkan ciri "revolusioner". Dalam beberapa tahun, sebagian besar pemimpin nasionalis menjadi korban berbagai peraturan, dan akibatnya dipenjara di salah satu pulau terpencil di Kepulauan Indonesia. Mereka yang kehadirannya di Jawa dibiarkan atau yang punya izin pulang ke sana praktis sudah terbungkamkan secara politis.[1] Kebijakan penindasan ini membuat tawar hati banyak orang nasionalis tapi menyakitkan hati orang banyak dan ini akan berbuah pahit 15 tahun kemudian.

Dua orang nasionalis berhasil meneruskan karya mereka bahkan dalam keadaan yang sulit ini. Raden Mas Suwardi Suryaningrat—juga dipanggil Ki Hajar Dewantoro, yang berarti "guru segala dewa"—lahir sebagai bangsawan Jawa yang menjadi anggota partai Douwes Dekker. Dia diusir dari Jawa tapi, karena bebas menentukan sendiri kediaman barunya, memilih pergi ke Belanda. Di sini dia tinggal beberapa tahun dan mempelajari berbagai persoalan tentang pendidikan. Dia mengembangkan rencana bagi suatu sistem pendidikan nasional yang sungguh-sungguh Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, dia mendirikan "Sekolah Taman Siswa". Dia ingin mengalihkan sejawatnya dari jenis sekolah Barat yang dia anggap terlalu murni intelektual dan terlalu materialistik. Pendidikan seperti itu, dia yakin, tidak akan pernah memuaskan kebutuhan orang di negerinya. Prinsipnya ialah bahwa pendidikan harus bertujuan "konstruksi suatu peradaban dari bawah, mula-mula Jawa, kemudian Indonesia", dan bukan "tiruan budaya Barat". Dewantoro, yang punya hubungan keluarga kerajaan dengan Paku Alam dari Yogyakarta, tumbuh dalam lingkungan yang sangat berakar dalam tradisi budaya Jawa, tapi dia sepenuhnya mengerti bahwa di luar Jawa Sekolah Taman Siswa harus disesuaikan dengan ciri wilayah tempat

sekolah itu didirikan. Dia biasa berkata bahwa budaya nasional suatu bangsa, dalam perkembangannya sepanjang zaman, dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman itu, tapi bahwa ia tidak boleh *dihancurkan*. Kebijaksanaan, keindahan, seni, dan sains dari luar boleh diterima dan sungguh beruntunglah bisa mengenal semua itu. Dia sering kali mengutip ungkapan terkenal bahwa "belajar satu bahasa baru berarti memperoleh jalan masuk ke dunia baru". Tapi, semua unsur asing harus diserap oleh, dan dicocokkan ke dalam, pola budaya nasional. Salahlah, katanya, untuk memaksakannya berada di atas budaya itu. Cita-citanya ialah mendidik orang menjadi laki-laki dan perempuan yang memiliki kemandirian, dengan pemahaman akan prinsip *harmoni*, karena hanya berdasarkan kehidupan harmonis dan masyarakat harmonislah suatu peradaban sejati dapat dibangun.[2]

Dewantoro berhasil mendirikan sejumlah besar sekolah Taman Siswa di seluruh Kepulauan Indonesia. Pada 1940, ada 250 sekolah. Ini adalah pencapaian yang mengesankan, karena dia menolak semua bantuan keuangan dari pemerintah. Orang Indonesia harus membangun dan menyokong sekolah mereka *sendiri*, dan sekolah-sekolah ini harus mencerminkan jalan hidup komunitas. Sekolah mewah di komunitas miskin adalah anomali. Guru-guru sekolah Taman Siswa dibayar kecil. Tapi mereka terus bertahan, bahkan bila mereka terancam kelaparan.

Argumen lain untuk tidak menerima bantuan keuangan pemerintah ialah kekhawatiran Dewantoro—kekhawatiran yang dapat dibenarkan—bahwa pemerintah hanya akan memberikan hibahnya dengan syarat tertentu, khususnya hak mengadakan inspeksi dan, dengan cara itu, campur tangan dalam kurikulum. Dia dengan tepat menolak persyaratan ini, yang kalau diterima dapat dipastikan akan membelokkan usaha pendidikannya dari tujuan aslinya.

Rencana Dewantoro mengusahakan sistem sekolah *nasional* tidak terilhami, seperti sudah kita katakan, oleh kurangnya penghargaan terhadap pencapaian budaya Barat. Sebaliknya dia

ingin murid-muridnya belajar bahasa Barat dan kenal dengan produk-produk besar sastra Barat. Dia menolak pemerintahan Belanda yang otokratik atas Indonesia, tapi akal sehatnya membuat dia menolak saran agar orang tidak belajar bahasa musuhnya. Kerancuan antara kondisi politik sementara dan nilai pendidikan permanen seperti ini sangat asing untuk orang seperti Dewantoro dan, bahkan, untuk sebagian besar kalangan nasionalis Indonesia. Selama konflik pascaperang, negosiasi antara pemimpin Republik Indonesia dan perwakilan pemerintah Belanda dilakukan dalam bahasa Belanda, dan untuk waktu lama, bahkan setelah 1949, bahasa Belanda tetap menjadi alat komunikasi di kalangan nasionalis Indonesia yang datang dari kelompok bahasa Indonesia yang berbeda. Karena sikap orang Indonesia terhadap bahasa Belanda ini—yang masih dipakai luas dan dipelajari di Indonesia pada zaman kita—orang Belanda yang mengetahui fakta ini tidak bisa tidak merasa sangat malu akan sikap yang diambil sebagian sejawat mereka yang lebih tua pada masa sebelum perang di Hindia—di antara mereka ada pejabat tinggi—yang dengan marah melarang orang Indonesia yang berderajat lebih rendah berbicara dengan mereka dalam bahasa Belanda. Orang-orang ini tampaknya percaya bahwa pemakaian bahasa mereka oleh orang Indonesia yang rendah hanya tanda kesombongan. Orang Indonesia harus puas saja kalau "tuan besarnya" bersedia bicara dengannya dalam bahasa Melayu. Tapi, pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Belanda, kasus-kasus seperti ini sudah sangat jarang.

Pemimpin nasionalis kedua yang berhasil melanjutkan karyanya, bahkan di bawah kontrol ketat polisi, adalah Dr. Sutomo, pendiri "Klub Studi Indonesia". Klub-klub ini tumbuh menjadi organisasi yang terlibat dalam semua jenis kerja sosial di kalangan massa Indonesia buta huruf. Ia mendirikan sekolah, koperasi, dan bank, ia membantu pengorganisasian persatuan buruh dan memberikan nasihat kepada persatuan buruh itu, dan ia memimpin perjuangan melawan praktik perente yang sering sekali berhasil menguasai total petani miskin. Dr. Sutomo mengecam

propaganda yang agak murahan dari beberapa politikus nasionalis, dan dia menuntut bahwa perbaikan kondisi sosial harus dimulai *sekarang*, dan tidak ditunda sampai kemerdekaan diperoleh dan para pemimpin nasionalis itu mendapatkan kekuasaan. Begitu para nasionalis tersebut terbebani dengan urusan pemerintahan, mereka akan punya banyak masalah yang harus diselesaikan, dan pada waktu itu jalan yang tersedia bagi mereka mungkin terbukti tidak memadai untuk melakukan semua hal yang mau mereka lakukan. Menurut Sutomo, penolakan kerjasama bukanlah urusan prinsip, tapi perkara taktik. Apa gunanya penolakan untuk "bekerjasama" kalau penolakan itu hanya membuat para nasionalis itu menganggur?

Pada Januari 1931, pada pertemuan "Klub Studi"-nya, Sutomo mengusulkan agar klub tersebut direorganisasi menjadi partai politik baru: "Persatuan Bangsa Indonesia" (PBI).[3] Partai baru itu membatasi keanggotaan pada orang Indonesia. Anggota partai bebas menerima kedudukan di berbagai badan perwakilan lokal atau regional, tapi tidak dalam kapasitas sebagai anggota partai. Dengan kata lain: para anggota bebas "bekerjasama", tapi partai itu sendiri akan tetap menolak bekerjasama. Tapi tetap ada larangan menjadi anggota Dewan Rakyat untuk menunjukkan solidaritas partai baru itu terhadap orang-orang nasionalis yang dipenjarakan pemerintah. Setelah pengadilan Sukarno pada 1930, Partai Nasional Indonesia dibubarkan atas perintah pemerintah. Partai baru dengan program yang hampir sama—harus ada *sedikit* perbedaan!—diorganisasikan pada April 1931 oleh R. M. Sartono dengan nama Partai Indonesia (biasa disingkat Partindo). Nama partai baru itu mencerminkan tujuan pendirinya: Sartono ingin menjadikannya titik pemersatu bagi semua kelompok nasionalis, tapi banyak pemimpin lain menolak programnya yang dianggap terlalu ekstrem dalam beberapa hal, atau tidak cukup ekstrem dalam *segala* hal. Sekali lagi, Sutomo menolak mempertahankan prinsip menentang kerjasama tanpa kecuali. Kelompok "kooperatif" nasionalis baru didirikan pada September 1930 dengan nama

Partai Ra'jat Indonesia dan pemimpin kelompok ini dengan sendirinya berharap mengumpulkan di bawah sayapnya sejumlah pengikut Sukarno dan menjaga mereka tetap terorganisasi, sampai tiba saat yang lebih baik yang memungkinkan kelahiran kembali Partai Nasional Indonesia.

Pada titik ini, Sutan Sjahrir masuk ke gelanggang politik dan tindakan pertamanya ialah menolak Partindo karena kesediaannya berkompromi dalam hal perjuangan-kelas. Kaum nasionalis, katanya, harus dengan jujur mendasarkan tindakan mereka pada ideologi Marxis, dan menuliskan dalam program mereka penentangan tanpa kecuali kepada segala bentuk kapitalisme– "kapitalisme" kelas menengah Indonesia, serta kapitalisme perusahaan asing besar. Tidak lama sesudah itu, Muhammad Hatta kembali dari Belanda tempat dia membuktikan diri sebagai seorang mahasiswa cemerlang dan mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Ekonomi Rotterdam. Hatta bergabung dengan partai Sjahrir. Ketika Sukarno dibebaskan dari penjara pada 1932 (dua tahun setelah vonis) dia mencoba menyatukan kembali orang-orang nasionalis-"sosialis" di bawah benderanya, tapi tanpa hasil. Sayang, dia adalah salah seorang yang mendapatkan pengawasan dari Gubernur Jenderal baru yang memerintahkan penahanannya, dan, karena itu, dia segera ditawan di pulau Flores (1933). Setelah itu, tapi hanya sesaat sebelum pecah perang di Pasifik, dia dibawa ke Benkulen di Sumatra. Ironisnya, orang bisa mengatakan bahwa Mr. Sukarno mendapatkan kedudukan tinggi sekarang justru karena perhatian yang diberikan kepadanya oleh Gubernur Jenderal De Jonge, karena pemenjaraan dan penahanannya yang cukup lama menjadikan dia pahlawan di mata rakyatnya. Akankah Sukarno memperoleh dukungan populer pada 1945 dan sesudahnya, kalau dia harus terpaksa bersaing dengan Hatta dan Sjahrir untuk posisi kepemimpinan nasionalisme Indonesia di masa sebelum perang? Tapi Gubernur Jenderal juga menyingkirkan para pesaingnya dari gelanggang. Pada 1934, Sjahrir dan Hatta dibuang ke kamp sungai Digul, dan dari sana kemudian mereka dipindah ke Kepulauan

Banda.

Pada pertengahan 1930-an, pemerintah Batavia punya alasan berpuas diri dengan kebijakan represinya karena ketika itu semua agitasi revolusioner berakhir, atau lebih tepat lagi, semua *kehidupan* politik telah berakhir. Jauh sebelumnya, Partai Sarekat Islam Indonesia telah kehilangan dukungan umat Muslim Indonesia. Muhammadiyah terlibat dalam kerja sosial dan religius. Karya Dewantoro memang lolos dari pembasmian—atas perintah pemerintah. Pemerintah Hindia mempertimbangkan akan mengeluarkan dekrit yang akan "melindungi anak-anak Indonesia terhadap guru-guru tak cakap yang memberikan pengajaran di tempat yang dinamakan "sekolah liar" ("*wilde scholen ordonnantie*"). Ungkapan "*wilde scholen*" tersebut sulit diterjemahkan. Ada tanaman yang tumbuh "liar", di mana alam menyediakan tanah yang cocok dan menaburkan benih sendiri, tapi juga ada tanaman yang tumbuh di taman, tempat ia ditanam dan dirawat. Pemerintah Hindia pada 1935 tampaknya berpandangan bahwa tanaman hanya boleh tumbuh di taman, suatu pandangan yang dapat dibilang "bisa diperdebatkan".

Tapi masih ada jalan ke luar dari kesulitan yang menghadang gerakan nasionalis tersebut. Gubernur Jenderal De Jonge masih menjabat ketika pemerintah mengumumkan—lewat juru bicaranya di Dewan Rakyat – bahwa partai yang punya wakil di Dewan tidak dihalangi dalam hal kebebasan berkumpul. Ini memungkinkan kalangan nasionalis meneruskan propaganda mereka, dengan hati-hati, kalau mereka mau berubah dari menolak kerjasama menjadi mau bekerjasama, dan banyak pemimpin gerakan tersebut dengan bijaksana tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Untuk memperkuat kedudukan mereka, beberapa kelompok nasionalis memutuskan membentuk Fraksi Nasional Indonesia, disingkat Frani, pada sidang kelima Dewan Rakyat. Sidang ini memulai sesi empat tahunnya pada 1931.[4] Undang-undang pemilihan yang baru menjamin 25 kursi untuk anggota Eropa, 10 di antaranya diisi anggota yang ditunjuk Gubernur Jenderal.

Dua dari lima kursi yang disediakan untuk "Asia Asing" dan 10 dari 30 kursi yang disediakan untuk orang Indonesia diisi oleh orang yang ditunjuk. Akibat tak terelakkan dari penempatan 22 kursi oleh anggota yang ditunjuk, serta kebijakan yang diikuti oleh penguasa dalam menunjuk anggota-anggota itu, adalah terpecah-pecahnya lembaga perwakilan itu ke dalam banyak kelompok politik kecil. Pemerintah percaya adalah tugas mereka untuk memakai kekuasaan penunjukan untuk menjamin perwakilan bagi kelompok minoritas, yang dianggap penting tapi tidak cukup banyak jumlahnya untuk memperoleh kursi dalam pemilihan bebas, dan untuk menjamin kursi parlemen bagi orang-orang ternama, meskipun mereka tidak didukung kelompok politik yang berarti.

Anggota-anggota Eropa dari sidang kelima terdiri atas 11 kelompok politik berbeda, dan yang paling besar di antaranya, diwakili lima anggota, adalah *Vaderlandsche Club*. Kelima anggota ini semua terpilih dan tidak ada yang ditunjuk. Anggota Indonesia juga terbagi di antara 11 kelompok kalau kita menghitung lima orang "independen" sebagai satu kelompok. Partai Nasionalis awalnya berjumlah 10 anggota, tiga di antaranya ditunjuk. Kemudian, dua wakil Budi Utomo keluar dari Fraksi Nasional. Meskipun demikian, kalangan nasionalis adalah yang paling banyak dari semua kelompok parlementer pada 1931. Berikutnya ialah "Persatuan Pegawai Pemerintah Indonesia", dulu bernama *Regentenbond*, dengan enam anggota terpilih dan satu ditunjuk. Tiga kelompok Indonesia kecil diwakili masing-masing satu anggota. Jadi, Fraksi Nasional sejauh itu adalah partai yang paling kuat di Dewan, apalagi karena ia sering mendapatkan dukungan dari wakil-wakil Indonesia yang lain.

Tugas Gubernur Jenderal De Jonge sulit, tapi ketidakberpihakan menuntut bahwa kesulitan ekonomi yang mendera Hindia antara 1931 dan 1935 juga harus dicatat.

J. S. Furnivall berkata bahwa depresi 1929 menandai berakhirnya satu periode dalam sejarah Hindia, periode "yang

mulai dengan pembukaan Terusan Suez, atau bahkan periode 400 tahun dari pendaratan pertama Vasco da Gama di Calicut". Ada banyak kebenaran dalam pernyataan ini. Telah kita tunjukkan berkali-kali dalam uraian sejarah ini bahwa kondisi ekonomi di Hindia tidak pernah sangat stabil karena dalam imperium yang murni pertanian ini nilai eksspornya, dan karena itu kemungkinan impor, bergantung terutama pada harga pasar dari produk seperti kopi pada abad ke-18 dan ke-19 serta gula dan karet mulai dari awal abad ke-20. Harga pasar komoditas-komoditas ini naik turun tidak keruan bagi para produsen dan setiap kali ada anjlokan di pasar, Hindia Belanda menghadapi bencana ekonomi.

Kapan pun ini terjadi, orang Indonesia harus berbalik bergantung pada produksi pangan, mengubah daerah budidaya gula kembali ke sawah dan secara besar-besaran meninggalkan perkebunan, dan komunitas Eropa kembali ke kampung halaman. Produsen Eropa harus bertahan, hidup dari cadangan yang terbangun pada tahun-tahun kemakmuran.

Dunia Kepulauan Indonesia sebelumnya tidak pernah mencapai derajat kemakmuran dan perluasan ekonomi seperti yang terjadi pada dekade ketiga abad ke-20. Akibatnya, negeri itu sebelumnya belum pernah mengalami pembalikan seperti yang dideritanya pada 1930. Semua produk penting Indonesia, kecuali beras, diproduksi untuk ekspor. Dari bensin yang diproduksi kilang minyak dan sumur minyak hanya 10 persen untuk konsumsi dalam negeri; dari karet, praktis tidak ada; dari teh 10 persen; dari gula 20 persen; dari kopra dan kopi 30 persen; dari kina hanya 12 persen; dan terakhir, dari tembakau tidak lebih daripada empat persen. Tiba-tiba bangsa asing berhenti membeli produk-produk itu. Dengan memotong harga sampai minimum, pasar bisa didapatkan kembali untuk sebagian dari produksi, tapi sementara jumlah produk turun 50 persen, nilai ekspor berkurang menjadi 25 persen! Pemerintah sendiri, salah satu produsen pertanian terbesar, mendapatkan untung 54 juta gulden dalam bidang ini pada 1928, tapi pada 1932 perusahaan

pertaniannya mengalami *kerugian* sembilan juta. Perusahaannya yang lain, seperti pertambangan, memasukkan keuntungan 20 juta alih-alih 50 juta. Perusahaan patungan milik orang Eropa dan dikelola orang Eropa melihat keuntungan mereka terpangkas sampai hampir nol. Tidak ada dividen yang dibayarkan, pekerja dipecat, dan kesejahteraan umum penduduk Eropa menurun begitu cepat sehingga pemasukan dari pajak penghasilan, yang hampir semuanya dibayarkan oleh orang Eropa (dan sedikit orang Cina), menyusut 50 persen dari level sebelumnya walaupun ada peningkatan tajam tingkat pajak. Selalu ada surplus besar ekspor atas impor, tapi ketika pelanggan Eropa dan Amerika tidak bisa lagi membeli, Indonesia tidak bisa membeli dari Eropa dan Amerika. Saat inilah Jepang masuk mencari lubang dan sudut tempat mereka bisa berdiam dengan nyaman di antara reruntuhan.

Setelah Perang Dunia Pertama, perdagangan antara Jepang dan Hindia Belanda meningkat, hal yang wajar karena makin pentingnya perdagangan antar-Pasifik.[5] Impor Jepang ke Indonesia meningkat menjadi 14 persen dari keseluruhan, tapi ekspor dari Kepulauan Indonesia ke Jepang tetap tidak berarti, dan hanya sejumlah kecil modal Jepang ditanamkan di wilayah itu. Sekitar 1930 tidak lebih daripada 7.000 orang Jepang tinggal di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Jumlah mereka tidak meningkat pesat selama 10 tahun berikutnya. Orang Jepang, yang jauh lebih tidak tertarik beremigrasi dibandingkan orang Cina, bersikukuh bertahan di kepulauan mereka yang sudah terlalu padat, tempat pertumbuhan cepat industri menyediakan pekerjaan untuk semakin banyak orang dan tempat standar penghidupan, walaupun sangat rendah bila dibandingkan dengan Amerika, jauh di atas negeri-negeri Asia lain.

Suatu organisasi industri dibangun, yang dapat menang bersaing dengan setiap bangsa lain di bumi di segala area perdagangan bebas dalam menyediakan produk massal murah. Tentu saja sistem itu tidak membuka jalan untuk impor ke Jepang selain bahan mentah dan bahan pangan yang paling diperlukan.

Segera sesudah 1930 Jepang mulai membanjiri Indonesia serta seluruh dunia dengan produknya. Daftar produk Jepang yang diimpor ke Indonesia, sebelum dan sesudah depresi, menunjukkan bahwa sebelum depresi hanya 10 jenis barang yang tercatat sudah diimpor, beberapa tahun kemudian daftar itu terdiri atas bola lampu, besi lembaran, sepeda, sampai bir, ikan awetan, permen, dan sabun cuci, sampai kertas, gerabah, dan segala macam barang kelontong. Pada 1934, impor Indonesia dari Jepang melampaui ekspor ke Jepang sebesar 74 juta gulden; atau, dalam angka proporsional, 31 persen impor datang dari Jepang dan hanya lima persen ekspor dikirim ke negeri itu. Van Gelderen mengutip kata-kata seorang pejabat Hindia Belanda yang berkata: "Pintu terbuka telah menjadi gerbang masuk ke rumah Jepang!"

Selain itu, orang Jepang berusaha menguasai semua kaitan dalam rantai ekonomi. Untuk produk mereka sendiri mereka mencoba memonopoli pelayaran, penanganan impor ekspor, penyimpanan barang mereka di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, perdagangan grosir dan eceran. Karena metode perdagangan ini, Jepang menjadi ancaman besar terhadap perantara Indonesia dalam perniagaan. Tapi, sementara industri Jepang dengan begitu mencoba memonopoli pasar Indonesia, ia melindungi produksi gulanya sendiri di Formosa terhadap persaingan gula Jawa. Kalau proses ini terus berlangsung, Indonesia akan sepenuhnya bergantung pada Jepang di bidang ekonomi.

Depresi menyebabkan peningkatan produksi "pribumi"; dengan kata lain, [produksi] yang dihasilkan di tanah milik orang Indonesia tanpa pemanfaatan modal asing. Angka baru yang diberikan Van Gelderen menggambarkan kecenderungan ini. Pada 1890 lahan perkebunan milik asing menyuplai 90 persen produk pertanian ekspor; pada 1913 kontribusi ini menyusut jadi 76 persen, pada 1930 jadi 69 persen, tapi pada tujuh tahun berikutnya jatuh menjadi 54 persen. Pada 1937, lada, jagung, dan rempah diproduksi hanya oleh orang Indonesia. Kopra dan kapuk praktis berada pada kategori sama. Separuh produksi karet

datang dari kebun karet. Pemerintah berharap peralihan produksi ini akan cenderung membentuk suatu kelas menengah Indonesia. Struktur ekonomi masyarakat Indonesia dengan demikian akan menjadi semakin kuat, dan terhampar fondasi bagi pembentukan bisnis dan industri kecil Indonesia. Tapi industri Indonesia akan tertekan habis kalau pengimpor Jepang dibiarkan merajalela. Suatu perubahan kebijakan ekonomi asing diajukan. Keseimbangan antara impor dan ekspor harus dipulihkan, dengan membuka lebih besar pasar impor Indonesia bagi bangsa-bangsa yang mau membeli barang ekspor dalam jumlah seimbang. Stabilitas ekonomi lebih besar juga harus dijamin dengan membangun industri Indonesia yang akan mengakhiri ciri ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini akan membuat marah pemerintah Jepang dan mungkin kelas sosial Belanda tertentu. Rencana pun dibuat untuk membangun industri ringan di daerah paling padat di Jawa, namun tidak banyak yang tercapai sebelum Hindia Belanda mengalami bencana 1941.

Pemerintah mencoba melindungi ekonomi Hindia lewat regulasi impor dan pangsa Jepang dalam impor yang makin meningkat akan dikurangi sampai 25 persen dari total. Untuk memperkuat dan mendukung usaha ekonomi lokal, untuk melanjutkan kolonisasi oleh orang Jawa tak bertanah di daerah berpenduduk jarang di Sumatra bagian selatan, dan untuk mendukung langkah-langkah demi kesejahteraan sosial, pemerintahan Belanda menawarkan "pemberian" kepada pemerintah Hindia Belanda sebesar 25 juta gulden.

Salah satu dasar industri Indonesia adalah manufaktur tekstil. Ada industri tenun tradisional lokal dengan alat tenun tangan sederhana. Dengan memperkenalkan model standar alat tenun tangan yang lebih baik dengan kapasitas 10 kali lebih besar daripada alat tenun model lama, cabang industri pribumi ini sangat meningkat. Pada 1931 hanya 500 alat tenun modern ini yang dipakai, tapi pada 1938 jumlahnya naik jadi 25.000.

Tapi langkah-langkah ini, yang dimaksudkan untuk

merangsang produksi industri, tidak cukup untuk menjamin kondisi ekonomi lebih baik bagi orang banyak. Pengawasan skala gaji mutlak perlu. Pekerja Jawa dan Sumatra sendiri mustahil membentuk serikat buruh yang cukup kuat agar mendapatkan gaji lebih tinggi. Adalah kewajiban penguasa untuk memastikan bahwa standar ekonomi orang banyak yang masih primitif tidak disalahgunakan seperti terjadi di Jepang, dan langkah-langkah untuk hal ini pun diperkenalkan. Krisis ekonomi punya dampak besar atas struktur sosial di Hindia. Ini juga tercermin dalam perkembangan bangsa itu.

Banyak orang Belanda kelahiran Indonesia dan sebagian besar orang Indo-Eropa masih menganut keyakinan bahwa dua masalah itu, masalah otonomi lebih besar bagi Hindia dan masalah mempertahankan posisi kelas terdidik sebagai penguasa, dapat diatasi dengan satu langkah: pemerintahan sendiri untuk Hindia Belanda, dalam kerangka negara Belanda, dan dipercayakan kepada satu kelas warga negara Hindia Belanda. Suatu konstitusi Hindia Belanda, yang memberikan kekuasaan menentukan kepada parlemen yang dipilih oleh kelas warga negara yang makin lama makin luas, akan menyediakan basis yuridis untuk negara baru itu. Hak pilih itu akan diberikan kepada semua penduduk "melek huruf" dan dengan demikian jumlah pemegang hak pilih akan meningkat seiring dengan penyebaran melek huruf. Tapi hasil pemilihan menunjukkan bahwa kecenderungan politik yang ada sangat berlawanan dengan konsepsi ini.

Dalam kenyataan, hanya ada dua kelompok politik di Hindia Belanda yang dapat mengklaim punya dukungan kekuasaan yang nyata. Satu kelompok adalah kelompok orang-orang Belanda, yang sebagian besar bertahan pada konsep konservatif mengenai perkembangan kolonial. Kelompok ini dapat mengandalkan dukungan para manajer perusahaan pertanian dan perusahaan besar dan banyak, jika bukan sebagian besar, pegawai mereka, serta banyak pejabat pemerintah. Ia didukung oleh pemerintah negeri leluhur tempat Dr. Hendrik Colijn dan orang Belanda ternama lain

yang berasal dari Indonesia memegang jabatan kunci dari satu Kabinet ke Kabinet lain antara 1930 dan 1941. Kecenderungan pemikiran para "pendukung" kelompok Belanda-Indonesia ini cukup terlihat dari pernyataan resmi mereka yang berulang-ulang dipermaklumkan bahwa tuntutan apapun untuk "kemerdekaan Indonesia" akan dianggap "makar dan pengkhianatan terhadap pemegang kedaulatan yang sah". Kelompok ini dengan bersikukuh pada keyakinan bahwa mayoritas orang Indonesia, kaum bangsawan dan petani buta huruf, punya kesetiaan membara terhadap Belanda, dan bahwa kaum nasionalis hanyalah "tukang ribut" yang tidak puas dan tidak cukup terpelajar. Kaum tani akan bersandar pada Belanda yang kekuasaannya telah memberikan banyak keuntungan, kecuali dia dihasut oleh agitator profesional.

Kelompok lain, kelompok nasionalis, dapat mengandalkan dukungan diam-diam dari hampir semua orang Indonesia tidak terpelajar dan dukungan penuh dari hampir semua orang Indonesia terpelajar, antara lain guru-guru di sekolah dasar. Ketika mereka dilarang mengeluarkan kata "kemerdekaan", mereka menyesuaikan cara bicara mereka dengan keadaan, dan meminta "perubahan konstitusional menyeluruh dalam kerangka kerajaan Belanda". Ada penguasa Belanda yang tampaknya melihat dalam perubahan gaya pidato ini bukti nyata perubahan jalan pemikiran para nasionalis tersebut. "Kata 'kemerdekaan' tidak pernah diucapkan dalam rapat yang kami adakan," demikian kata Laporan Penyelidikan mengenai keinginan politik rakyat Hindia Belanda, yang dikeluarkan pada hari diserangnya Pearl Harbor.

Peristiwa 1941 dan 1945 menunjukkan betapa berbedanya kenyataan dengan ilusi dalam kepala banyak orang Belanda.

Namun, untuk sementara, prinsip penolakan kerjasama dalam taktik kaum nasionalis tersebut harus disingkirkan dan diganti dengan kerjasama. Gerakan itu tidak punya pilihan lain. Taktik baru itu membuat sayap moderat nasionalisme maju ke depan. Pada 1935, Budi Utomo, yang selama beberapa tahun tidak lagi merupakan organisasi murni Jawa melainkan suatu partai

politik dengan pengikut di berbagai wilayah Kepulauan Indonesia, menggandeng Persatuan Bangsa Indonesia, suatu kelompok yang tumbuh dari Klub Studi Dr. Sutomo. Bersama-sama mereka membentuk Parindra, Partai Indonesia Raya. Sutomo adalah ketua pertamanya. Penguatan tiba-tiba kalangan sayap kanan gerakan itu juga merangsang kalangan sayap kiri untuk bertindak. Berbagai kelompok dan individu nasionalis yang menjadi anggota partai seperti Partindo, yang sudah dibubarkan, membentuk Gerindo, Gerakan Ra'jat Indonesia. Sebagian pemimpinnya kemudian menjadi sangat terkenal pada tahun-tahun konflik Belanda-Indonesia, di antaranya A. K. Gani, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin.

Pemisahan gerakan itu ke dalam kelompok sayap kiri dan sayap kanan membuktikan betapa dekat nasionalisme Indonesia terkait dengan kecenderungan politik internasional. Sekitar 1936 terjadi kemenangan fasisme atas nasional-sosialisme di beberapa negeri Eropa dan pembentukan pemerintahan front populer di negeri lain. Sutomo dan teman-temannya bukanlah fasis tapi mereka terang-terangan antikomunis. Sutomo mengagumi Jepang, dan baginya Kemal Ataturk adalah contoh cemerlang seorang pemimpin nasional. Gerindo secara terbuka sayap kiri, dan berbagai peristiwa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat kriptokomunis (Amir Sharifuddin). Bagi Gerindo, pembelaan terhadap lembaga demokratik di seluruh dunia tidak kurang penting daripada penghancuran "kolonialisme Belanda". Jelas mereka lebih takut pada pemajuan kolonialisme daripada imperialisme Jepang.

Anggota-anggota sidang keenam Dewan Rakyat dipilih pada 1935. Dampak depresi ekonomi yang membuat tawar hati penduduk Eropa jelas terlihat dalam hasil pemilihan. *Vaderlandsche Club* yang ultrakonservatif kehilangan satu dari lima kursi yang dimenanginya pada 1931. Kursi-kursi lain yang diperuntukkan bagi anggota Eropa terbagi menjadi delapan kelompok politik berbeda. Hanya dua di antaranya memenangi

lebih daripada dua kursi: *Indo-Europees Verbond*, partai orang Indo-Eropa (berdarah campuran) menduduki delapan kursi, dan "Klub Ekonomi" empat kursi. Hanya orang Indo-Eropa dan *Vaderlandsche Club* yang memperoleh semua kursi mereka dari hasil pemilihan; keempat anggota Kelompok Ekonomi semuanya duduk di situ karena penunjukan. Empat dari delapan kelompok "Eropa" akan sama sekali tidak terwakili, kalau saja wakil mereka tidak ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Dari 30 anggota Indonesia (terbagi menjadi 12 kelompok, kalau demi singkatnya kita boleh menghitung keenam wakil independen sebagai satu kelompok) tiap dua orang mewakili satu kelompok, menduduki kursi berkat penunjukan "korektif", dan 10 diduduki Fraksi Nasional, terdiri atas empat partai politik berbeda. Hanya satu dari 10 orang nasionalis ditunjuk. Perbandingan Dewan Keenam itu dengan pendahulunya menunjukkan bahwa Fraksi Nasional bertambah kuat, sementara partai "Pejabat Pemerintah Indonesia" kehilangan dua kursi. Empat dari enam anggota independen ditunjuk. Dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus Fraksi Nasional akan mendapatkan dukungan dari paling tidak empat anggota Indonesia lain, dan dalam beberapa kasus bahkan sembilan atau 10 dari mereka. Ini membuat *Fraksi* itu kelompok paling kuat di Dewan. Tapi, mereka tetap tanpa pengaruh menentukan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan karena kekuasaan *Volksraad* yang terbatas.

Pada 1936, seorang Gubernur Jenderal baru menduduki jabatan. Jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer jelas lebih cenderung berpandangan konservatif daripada progresif, tapi dia terutama adalah seorang *gentleman* yang jujur dan berperikemanusiaan. Dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir dan kepribadiannya yang hebat menyebabkan banyak sejarawan Belanda mengabaikan banyak kekurangan pendahulunya yang berjumlah besar itu, yang toh harus dicatat seorang sejarawan netral jika dia mau tetap setia pada profesinya.

Pemilihan dan penunjukan berikut untuk *Volksraad* atau Dewan Rakyat terjadi pada 1939. Hasilnya sekali lagi menunjukkan

bahwa kecenderungan pemilih Indonesia untuk mendukung kaum nasionalis terus bertumbuh. Fraksi Nasional (dibentuk kembali pada 1941 lewat kerjasama empat partai nasionalis) berjumlah 10 orang. Jumlah anggota independen Indonesia meningkat jadi tujuh, enam di antaranya ditunjuk. Kaum nasionalis, dan pendukung mereka di kalangan kelompok lain Indonesia, kini menduduki lebih daripada separuh dari 30 kursi Indonesia. Komposisi Dewan setelah pemilihan 1939 juga menunjukkan bahwa kecenderungan ke arah "segregasi" politik meningkat. Hanya tiga kelompok berhasil dengan agak baik mempertahankan kursi mereka dalam pemilihan 1931, 1935, 1939 berturut-turut: kelompok Indo, kelompok Belanda konservatif, dan kelompok nasionalis Indonesia. Pemilihan itu sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh beberapa pemimpin Belanda paling ternama di Indonesia: bahwa perbedaan rasial di Hindia makin lama makin bertumbuh dan bukan berkurang.

Pada 15 Juli 1936, Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, anggota partai Pejabat Pemerintah Indonesia, dan lima anggota Indonesia sayap kanan lain dari Dewan Rakyat memasukkan rancangan resolusi kepada Ketua Dewan, dengan usulan bahwa Dewan menyampaikan kepada pemerintah Belanda di Eropa, suatu permintaan "untuk suatu konferensi wakil-wakil Belanda dan Hindia Belanda, bertemu atas dasar kesetaraan, yang akan menyusun suatu rencana bagi modifikasi bertahap hubungan antara kedua bagian kerajaan itu yang pada akhirnya akan menghasilkan pengakuan otonomi Hindia Belanda dalam kerangka itu, ditetapkan oleh Artikel Pertama dari Konstitusi Belanda".

Tidak ada yang sangat revolusioner dalam permintaan ini. Sebaliknya, dalam kenyataan ia hanyalah peringatan sopan kepada pemerintah di Eropa bahwa risiko mungkin ada jika reformasi terlalu lama ditunda. Memang, "Konferensi kedua bagian kerajaan" adalah gagasan baru, tapi suatu penjajakan mengenai kemungkinan melaksanakan konferensi seperti itu tidak menuntut komitmen apapun. Bagaimanapun, usulan itu ditentang

kerasoleh banyak anggota "Eropa" dari *Volksraad*, walaupun juru bicara mereka tidaklah terlalu kreatif dalam argumen mereka. Kadang-kadang orang bisa merasa bahwa pastilah terdapat suatu "Perbendaharaan Istilah yang Bermanfaat untuk Menentang Tuntutan Politik" yang ada dalam semua bahasa, karena berbagai penolakan terhadap usulan Sutarjo itu sangat mirip penolakan yang dilakukan politikus lain di banyak negeri lain, bukan hanya untuk menolak pemberian otonomi kepada wilayah jajahan, tapi terhadap segala macam gagasan politik baru. Istilah seperti "... dalam keadaan sekarang" ... "dapat dianggap prematur..." ... "saatnya kurang tepat" ... "hubungan yang ada dan memuaskan di antara berbagai kelompok penduduk bisa terganggu" ... "pada saatnya nanti..." "kemungkinan" ... "pada akhirnya" ... "melakukan sesuatu..." muncul lagi dan lagi dalam perdebatan politik di mana pernyataan-pernyataan yang agak seenak perut ini kadang-kadang dipercaya sebagai argumen yang kuat.

Penjabat Menteri Koloni dari pemerintahan Belanda ketika itu merumuskan penolakannya sebagai berikut:

"Perkembangan harmonis kehidupan politik di Hindia Belanda akan lebih baik terlayani dengan meneruskan langkah desentralisasi dan reformasi administratif, yang kini sedang berlangsung, daripada dengan reformasi radikal seluruh struktur politik. Reformasi administratif dan desentralisasi sistem pemerintahan yang kini sedang berlangsung pada waktunya akan menciptakan suatu dasar bagi otonomi pada level lebih rendah administrasi itu, dan dari situ mungkin muncul kemungkinan membentuk lembaga-lembaga otonomi pada level yang agak tinggi yang pada akhirnya akan berujung pada penyerahan pangsa otonomi yang lebih besar kepada pusat (pemerintahan kolonial)."[6]

Pejabat berwenang perlu waktu tiga tahun untuk merumuskan jawaban akhir mereka terhadap usulan Sutarjo ini.

Menteri Koloni yang menolak usulan Mr. Sutarjo—yang didukung oleh *mayoritas* Dewan Rakyat—dan yang menunjukkan

diri begitu sengit menentang langkah apapun menuju otonomi untuk Hindia Belanda, juga adalah Menteri Koloni dalam kabinet yang mengungsi ke Inggris setelah pendudukan atas Belanda. Sikapnya pada 1941 tidak beda jauh dari posisinya pada 1936, walaupun untuk sementara makin besar jumlah pandangan publik Belanda yang menjadi ragu akan kebijaksanaan jalur yang diambil Menteri ini dan kabinet-kabinet berikut yang mendukungnya. Dalam keadaan ini Gubernur Jenderal baru, Van Starkenborgh, tidak punya banyak kebebasan bertindak. Dia tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan instruksi dari Den Haag yang berarti dia harus meneruskan kebijakan pendahulunya.

Penolakan terhadap permintaan Sutarjo menyebabkan kaum nasionalis Indonesia sekali lagi bersatu di bawah bendera bersama. Begitulah, pemerintah mendapatkan persis kebalikan dari yang ingin mereka capai. Pada Mei 1939, Parindra, Gerindo, Partai Islam Indonesia, Persatuan Partai Katolik Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan dua partai regional, Persatuan Minahasa (sebagian besar Kristen) dan Pasundan (partai orang Jawa Barat) bersatu membentuk Gabungan Politik Indonesia, disingkat GAPI. Gabungan politik baru ini tidak menuntut suatu Indonesia Merdeka. Ada alasan bagus untuk tidak menyebutkan kata "merdeka", karena sampai 27 November 1940 –lebih dari enam bulan setelah pendudukan Belanda oleh pasukan Jerman dan hanya satu tahun sebelum bencana pemuncak–juru bicara pemerintah di Dewan Rakyat menyatakan "bahwa, bila tuntutan akan suatu Perlemen Indonesia dengan kekuasaan parlementer penuh dipakai sebagai cara untuk mewujudkan konsep *Indonesia merdeka*, setiap kesepakatan dengan oposisi nasionalis akan jadi mustahil dan dalam hal itu, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang perlu". Sesaat sebelum pernyataan ini dikeluarkan, pemerintah kolonial telah memutuskan membentuk suatu komisi "untuk orientasi (tentang pembahasan pemerintah atas pokok bahasan itu) dan untuk mengumpulkan bahan, yang akan diperlukan oleh pemerintah untuk merumuskan

pandangannya, apabila saatnya telah tiba bagi pemerintah untuk berbuat demikian". Ia akan terdiri atas satu kecil "orang-orang berkemampuan". Komite itu mengadakan banyak rapat dan menerbitkan laporan yang agak mengecewakan pada hari diserangnya Pearl Harbor.

Pemikiran pemerintah kini tampaknya bergeser ke arah "konsep Indo" atas otonomi Indonesia. Pada hari yang sama pada November 1940, ketika pemerintah menyatakan diri sama sekali menentang suatu *Indonesia Merdeka*, ia mengakui bahwa orang Indonesia berhak atas pangsa yang makin lama makin besar dalam pemerintahan dan administrasi koloni, tapi bahwa pangsa yang lebih besar dari orang Indonesia tersebut tidak boleh mengurangi hak orang Belanda dan "Eropa" lain serta "Asia Asing", yang pengaruhnya pada urusan publik harus "sesuai dengan keandalan sosial dan ekonomi mereka".

Kaum nasionalis Indonesia merumuskan lagi tuntutan mereka pada kongres *Gabungan Politik Indonesia*, yang diselenggarakan pada 31 Januari 1941. Tuntutan itu adalah:

1. Penunjukan seorang Indonesia sebagai Letnan Gubernur Jenderal;
2. Penunjukan orang-orang Indonesia sebagai Asisten Direktur dari Departemen-Departemen pemerintahan;
3. Penunjukan beberapa orang Indonesia untuk duduk di Dewan Hindia;
4. Penciptaan "Dewan Perwakilan Rakyat", yang akan berfungsi sebagai "Parlemen Orang Banyak" sementara "Dewan Rakyat" akan berfungsi sebagai "Senat";
5. Hak pilih universal aktif dan pasif untuk laki-laki dan perempuan; pemilih buta huruf akan melaksanakan hak pilih mereka dengan mewakilkannya kepada para wakil pemilih.

Pemerintah Batavia hampir pasti tidak akan menerima usulan tersebut, tapi setidaknya itu satu langkah maju. Sesaat sebelum

pandangannya, apabila saatnya telah tiba bagi pemerintah untuk berbuat demikian". Ia akan terdiri atas satu kecil "orang-orang berkemampuan". Komite itu mengadakan banyak rapat dan menerbitkan laporan yang agak mengecewakan pada hari diserangnya Pearl Harbor.

Pemikiran pemerintah kini tampaknya bergeser ke arah "konsep Indo" atas otonomi Indonesia. Pada hari yang sama pada November 1940, ketika pemerintah menyatakan diri sama sekali menentang suatu *Indonesia Merdeka*, ia mengakui bahwa orang Indonesia berhak atas pangsa yang makin lama makin besar dalam pemerintahan dan administrasi koloni, tapi bahwa pangsa yang lebih besar dari orang Indonesia tersebut tidak boleh mengurangi hak orang Belanda dan "Eropa" lain serta "Asia Asing", yang pengaruhnya pada urusan publik harus "sesuai dengan keandalan sosial dan ekonomi mereka".

Kaum nasionalis Indonesia merumuskan lagi tuntutan mereka pada kongres *Gabungan Politik Indonesia*, yang diselenggarakan pada 31 Januari 1941. Tuntutan itu adalah:

1. Penunjukan seorang Indonesia sebagai Letnan Gubernur Jenderal;
2. Penunjukan orang-orang Indonesia sebagai Asisten Direktur dari Departemen-Departemen pemerintahan;
3. Penunjukan beberapa orang Indonesia untuk duduk di Dewan Hindia;
4. Penciptaan "Dewan Perwakilan Rakyat", yang akan berfungsi sebagai "Parlemen Orang Banyak" sementara "Dewan Rakyat" akan berfungsi sebagai "Senat";
5. Hak pilih universal aktif dan pasif untuk laki-laki dan perempuan; pemilih buta huruf akan melaksanakan hak pilih mereka dengan mewakilkannya kepada para wakil pemilih.

Pemerintah Batavia hampir pasti tidak akan menerima usulan tersebut, tapi setidaknya itu satu langkah maju. Sesaat sebelum

perang pecah di Eropa, seorang Indonesia anggota Dewan Rakyat, Mr. Wiwoho, mengusulkan bahwa pemerintah Belanda harus mengambil langkah untuk mengganti nama "Hindia Belanda" (dalam teks konstitusi Belanda) dengan nama "Indonesia" dan istilah "*Inlander*" (penduduk pribumi) harus digantikan dengan "orang Indonesia". Pemerintah menganggap perubahan itu suatu inovasi yang agak berbahaya. Tapi pada 16 Juni 1941, pemerintah menyatakan bahwa ia bersedia menyiapkan suatu "konferensi orang-orang ternama, mewakili keempat bagian kerajaan Belanda untuk mempelajari masalah adaptasi struktur Kerajaan sesuai kebutuhan zaman pascaperang".

"Orang-orang ternama" itu (15 dari Belanda, 15 dari Hindia, dan masing-masing enam dari kedua bagian Hindia Barat dari kerajaan itu) tidak pernah bertemu. Enam bulan setelah "konsesi" terakhir ini, bencana besar terjadi di komunitas kolonial kuno Kepulauan Hindia Timur.

Demikianlah, tampaknya tidak mungkin terjadi rekonsiliasi sudut pandang kalangan nasionalis Indonesia dan konservatif Belanda, mungkin terutama karena konservatisme ekstrem Kabinet-Kabinet Menteri Belanda yang terakhir di Den Haag sebelum perang. Tapi harus kita tambahkan bahwa sejak 1938, masalah-masalah lain dan jauh lebih penting mulai menuntut perhatian penuh dari negarawan dan pemimpin politik Belanda. Jerman di bawah Hitler telah menjadi ancaman bagi semua negara kecil tetangganya. Ekspansionisme Jepang menyebabkan perang dengan Cina dan mengancam jajahan Barat di Timur Jauh. Pada 1939 perang pecah di Eropa. Pada 10 Mei 1940 Belanda diserbu pasukan Hitler. Empat hari kemudian negeri itu diduduki. Pemerintahannya mengungsi ke London, tapi tidak ada jaminan sama sekali bahwa Britania akan sanggup menahan serangan Jerman yang akan datang. Pemerintah Hindia Belanda tahu bahwa rencana untuk penaklukan Kepulauan Indonesia sedang dipersiapkan di Tokyo.[7]

Nasib Hindia Belanda bergantung pada kemampuan angkatan darat dan angkatan laut Britania mempertahankan posisi mereka di benteng Singapura. Pemerintah Batavia tidak siap untuk perang skala besar. Tentaranya berjumlah kira-kira 35.000 serdadu profesional, dilatih untuk pertempuran skala kecil dan sama sekali tidak sanggup berhadapan dengan tentara Jepang yang berpengalaman di medan tempur. Angkatan laut tersebut terdiri atas dua kapal penjelajah yang masing-masing sekitar 7.000 ton, dan sedikit kapal yang lebih kecil. Angkatan udara terdiri tidak lebih daripada 100 pesawat terbang, sebagian besar sudah kedaluwarsa dan kalah dalam kecepatan dan persenjataan dari Jepang, musuh mereka.

Pemerintah kolonial berusaha sedapat mungkin membantu sekutu Belanda di Eropa dan Amerika dengan menyediakan bagi mereka bahan mentah penting tertentu. Timah, kina, dan terutama karet, sangat dibutuhkan untuk perlengkapan angkatan bersenjata Amerika. Dalam satu tahun, Hindia Belanda meningkatkan produksi karet mereka sampai menjadi 600.000 ton. Suatu usaha besar dilakukan di ladang produksi, dan melihat berbagai peristiwa yang terjadi pada 1940 dan 1941 tersebut, kejengkelan kelompok penduduk Belanda yang makin bertambah terhadap tuntutan politik nasionalis Indonesia gampang dimengerti. Jika penguasa Belanda bijaksana dan patriotik, mungkin mereka sudah mencoba mencapai saling pengertian dengan kalangan nasionalis sayap kiri yang anti-Jepang karena mereka antifasis dan antikolonial. Tapi, waktu tinggal sedikit. Sebelum terjun dalam perang, Jepang mencoba merayu pemerintah Hindia Belanda, dengan menawarkan "kesepakatan ekonomi" yang akan membuat Indonesia tunduk pada kepentingan ekonomi Jepang. Setelah perang pecah, Tokyo (lewat jalur diplomatik netral) menyarankan netralisasi "*de facto*" Hindia. Tawaran itu ditolak. Begitu Singapura jatuh, nasib Jawa pun terkunci. Pertempuran di Laut Jawa hanyalah epilog dari drama Malaya. Ia adalah upaya perlawanan bersenjata yang heroik namun mungkin agak romantik yang memungkinkan sejarawan

mencatat bahwa penerus-penerus Jan Pieterszoon Coen gugur, dengan pedang di tangan, dalam perjuangan membela warisan Coen melawan kekuatan musuh yangterlalu besar.

CATATAN

Pendahuluan

1 Perbatasan politik yang membagi Papua ke dalam dua bagian yang hampir sama tentu saja tidak punya dasar geografis. Tapi bisalah dikatakan bahwa Papua bagian timur secara geografis menghadap ke timur laut dan selatan, sementara bagian barat berorientasi ke arah barat daya, barat, dan utara. Nama tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Nugini dipertahankan dalam edisi baru *Nusantara* ini untuk alasan praktis semata-mata. Lama kelamaan mereka dapat digantikan dengan nama-nama Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Ini akan dituliskan dalam peta di samping nama tradisional.

2 J. H. van Linschoten, *Itinerario*, ed. oleh H. Kern untuk Linschoten Vereeniging (Den Haag, 1910), I, 74.

3 Untuk alasan gaya dan hanya alasan ini, nama Hindia Timur akan dipakai di samping nama Indonesia.

4 Di sini "sejarah" dimengerti sebagai "catatan orang dan pencapaiannya berdasarkan dokumen tertulis".

5 Makna aslinya adalah "Pulau-pulau lain" sebagaimana dilihat dari Jawa atau Bali, karena itu ia memperoleh makna lebih umum "dunia luar", atau "luar negeri". Dalam makna ini ia dipakai dalam teks Jawa abad ke-15. Setelah diperkenalkan kembali oleh arkeolog Belanda, Brandes, ia diambil oleh E. F. Douwes Dekker pada 1920-an untuk dipakai sebagai nama Indonesia seluruh Hindia, walaupun itu salah, dilihat dari sudut pandang filolog.

Bab 1

1 Lihat Eugene Dubois, *Pithecanthropus erectus, eine menschenähnliche Übergangsform aus Java* (Batavia, 1894). Sebagian dari pembahasan yang lebih awal atas pokok bahasan ini diringkaskan dalam L. J. C. van Es, *The Age of Pithecanthropus* (Den Haag, 1931).

2 Suatu survei sangat baik sebelum perang mengenai periode prasejarah di Indonesia diberikan oleh A. N. J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, "De Praehistorie", dalam *Geschiedenis van Nederlandsch-Indië*, terbit di bawah arahan F. W. Stapel, Amsterdam, 1938 dan kemudian vol. I, 8-111. Suatu survei umum mengenai zaman

prasejarah di *Historia Mundi*, vol. I (Bern, 1952). Lihat juga F. Weidenreich, *Apes, Giants, and Man* (Chicago, 1945).

3 Untuk teori Sarasin bersaudara, lihat P. dan F. Sarasin, *Die Weddas von Ceylon und die sie umgebenden Völkerschaften* (Wiesbaden, 1892-93) dan *Versuch einer Anthropologie der Insel Celebes* (Wiesbaden, 1905). Suatu survei antropologi mengenai Hindia diberikan oleh J. P. Kleiweg de Zwaan, *De rassen van den Indischen Archipel* (Amsterdam, 1925), dan dalam versi bahasa Inggris, *The Anthropology of the Indian Archipelago and Its Problems* (Weltevreden, 1929). Untuk Jawa, lihat D. J. H. Nyessen, *The Races of Java* (Weltevreden, 1929), dan *Somatical Investigations of the Javanese* (Bandung, 1930).

4 Istilah mesolitik tentu saja tidak boleh dimengerti sebagai menunjuk pada periode kronologis spesifik, bagaimanapun besarnya, dalam sejarah umat manusia, tapi hanya sebagai pencirian suatu tipe budaya primitif. Mungkin saja bahwa perkakas yang dibuat dari tulang dan ditemukan di seluruh Asia Tenggara harus ditafsirkan sebagai bukti keberadaan suatu kelompok ketiga pemukim awal. Lihat G. Coedès, Les Etats hindouisés d'Indochine et Indonésie (Histoire du Monde, publiée sous la direction de M. E. Cavaignac, jilid VIII), Paris, 1948, h. 19-20.

5 Untuk kronologi periode neolitik, lihat Thomassen van der Hoop dalam Stapel, *Gesch.* I, 108-111, dan P. van Stein Callenfels, "Bijdrage tot de chronologie van het neolithicum in Zuid Oost Azië", dalam *Oudheidkundig Verslag*, 1926. Lihat juga artikel oleh von Koenigswald dan Thomassen dalam *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap*, vol. LXXV (1935), dan dalam satu volume yang diterbitkan oleh Oudheidkundige Dienst pada 1932, *Hommage du Service archéologique des Indes Néerlandaises au premier congrès des préhistoriens d'Extréme Orient à Hanoi* (Batavia, 1932).

6 Yang menarik dalam kaitan ini adalah pernyataan Jan Huyghen van Linschoten yang dikutip pada Bab 4. Tapi cukup pasti bahwa pemakaian Melayu sebagai bahasa dagang berasal dari jauh sebelum 1400 M, bahkan mungkin dari abad keenam.

7 Johan Hendrik C. Kern (1833-1917) lahir di Purworejo di Hindia dan belajar di Belanda. Setelah lulus dari Universitas Leiden dia mengajar di Gymnasium (Sekolah Latin) Maastricht. Pada usia 29 dia telah memperoleh reputasi besar sebagai ahli Sanskerta sehingga dia diminta ke Queens College di Benares (India) sebagai profesor bahasa itu. Dua tahun kemudian dia menjadi profesor bahasa yang sama di Universitas Leiden. Dia memperluas studinya terhadap bahasa-

bahasa kuno Indonesia, terutama Jawa kuno, dan adalah orang yang pertama menerjemahkan sejumlah prasasti Indonesia kuno. Karyanya dikumpulkan dalam *Verspreide Geschriften* (15 vol. Den Haag, 1913-28). "Taalkundige gegevenster bepaling van het stamland der Maleisch-Polynesische volken", yang disebutkan di dalam teks pertama diterbitkan dalam *Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde*, Derde Reeks, vol. VI, (1889). Ia dicetak ulang dalam Volume VI kumpulan karya Kern. Lihat juga: Coedès, *Les Etats hindouisés*, h. 25-26.

8 *Desa* adalah istilah untuk desa di Jawa, Madura, dan Bali. Di wilayah lain Kepulauan Indonesia berbagai nama berbeda dipakai: *gampong, kuta, nagari*, dst. *Kampong* atau *gampong* dipakai oleh orang Eropa di Indonesia untuk menunjuk pada permukiman Indonesia mana pun.

9 Prinsip ini diadopsi oleh T. S. Raffles (1811-1816), yang mendasarkan sistem pajaknya pada prinsip itu dan sistem ini kemudian diteruskan oleh Belanda. Prinsip itu sendiri ditinggalkan pada 1870 (lihat Bab 12 dan 13).

10 Untuk pembahasan masyarakat Indonesia sebelum penetrasi budaya Hindu, lihat J. C. van Leur, *Eenige Beschouwingen betreffende den ouden Aziatischen handel* (Middelburg, 1934). Kutipan dari terjemahan bahasa Inggris atas karya van Leur, *Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History*, terbit di Den Haag (1955) sebagai volume I dari seri *Selected Studies on Indonesia by Dutch Scholars*. Mengenai masyarakat Indonesia kuno, h. 93-96.

11 George A. Wilken (1847-1891), seorang Belanda yang lahir di Manado, Sulawesi, adalah pejabat pemerintah Hindia dan salah satu etnolog Indonesia terbesar. Pada masa mudanya ia bercita-cita menjadi perwira tapi tidak lulus ujian! Tapi dia berhasil lulus ujian untuk pegawai negeri Hindia dan kemudian menjadi profesor etnologi setelah menerima gelar kehormatan dari Universitas Leiden, suatu penghargaan yang sangat jarang di Belanda, pada usia 37. Karyanya diedit ke dalam empat volume oleh F. D. E. Ossenbruggen (Semarang-Den Haag, 1912).

12 Lihat Albert C. Kruyt, *Het Animisme in den Indischen Archipel*, (Den Haag, 1906), dan artikel oleh pengarang sama dalam *ENI*, vol. II, di bawah judul "Heidendom".

13 Orang Sunda menyebut dialek mereka "bahasa gunung", yang

menunjukkan bahwa mulanya mereka tinggal di daerah pegunungan Priangan (Jawa barat daya), dan dari sana menyebar ke pantai utara, tapi hal ini mungkin tidak terjadi sebelum akhir abad ke-18.

14 Untuk pembahasan mengenai masalah ini dan pandangan Perry lihat N. J. Krom, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis*, h. 40-44 (dari edisi pertama, Den Haag, 1926). Buku Perry, *The Children of the Sun* terbit di New York pada 1923. Suatu pandangan yang lebih baru dalam Coedès, *Etats hindouisés*, h. 21-22. Thomassen dalam Stapel, *Gesch.*, I, h. 98ff. menyatakan bahwa tugu-tugu megalitik masih didirikan sebelum perang terakhir di beberapa daerah Kepulauan Indonesia, misalnya di Kepulauan Nias, Flores, dan Sumba.

15 Wang Mang memerintah Cina, pertama sebagai raja bawahan dan kemudian raja betulan, antara tahun pertama Masehi dan 23 M. Pemerintahannya membentuk periode transisi antara dinasti Han pertama dan kedua.

16 Dalam buku ini ejaan Belanda "Atjeh" [*dalam terjemahan ini disesuaikan menjadi* "Aceh" —*pen.*] akan lebih suka dipakai daripada ejaan Inggris "Achin", untuk membuat acuan pada literatur Belanda lebih mudah dimengerti.

17 Sebagian besar acuan kepada Kepulauan Indonesia dalam sumber Cina telah dihimpun oleh W. P. Groeneveldt dan diterbitkan dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, vol. XXXIX, bagian I (1876). Edisi kedua muncul dalam *Miscellaneous Papers relating to Indo-China and the Indian Archipelago*, seri kedua, vol. I (1887), kemudian ditambahkan dengan beberapa acuan yang terbit dalam majalah *T'oung Pao*, vol. VII (1896).

18 Lihat Krom, *HJG*, h. 59. Profesor Krom menerbitkan edisi kedua bukunya pada 1931 dan menulis seksi mengenai periode Hindu-Jawa dalam *Geschiedenis van Indië* dari F. W. Stapel (I, 119-298). Dalam karyanya kemudian (1933), dia merevisi banyak pandangannya yang terdapat dalam *HJG*. Penafsirannya mengenai prasasti Indonesia kuno dan rekonstruksinya tentang sejarah Jawa dikritik keras oleh pakar-pakar kemudian, di antaranya oleh C. C. Berg, juga dari Universitas Leiden. Sebagian besar penulis bicara tentang abad-abad awal sejarah Indonesia sebagai periode Hindu-Jawa. Istilah Hindu-Indonesia tampaknya lebih tepat.

19 Untuk pengetahuan Yunani dan Romawi akan Asia, lihat studi rinci yang sangat baik dari J. Oliver Thomson, *History of Ancient Geography* (Cambridge, 1948). Catatan mengenai Indonesia, h. 313f.

20 Survei terbaik mengenai pengaruh Hindu di seluruh Asia Tenggara diberikan oleh Coedès dalam karyanya *Etats hindouisés d'Indochine et d'Indonésie.*

21 Saya menerjemahkan dari versi Belanda yang diberikan oleh N. J. Krom dalam *HJG*, 67 (ed. pertama).

22 Prasasti itu sudah diterjemahkan dari versi Belanda oleh N. J. Krom, *HJG*, 75-77.

23 Untuk teori-teori mengenai penyebaran budaya Hindu, lihat F. D. K. Bosch, *Het vraagstuk van de Hindoekolonisatie van den archipel* (Leiden, 1946), di mana diringkaskan teori-teori dari Mookerji (*A History of Indian Shipping and Maritime Activity*, 1912), Moens ("Crivijaya, Yava an Kataha", *TBG* LXXVII, 1937), Krom, dan lain-lain. Pandangan lebih kini dalam Coedès, *o.c.*, pasal II dan III; B. Schrieke, *Ruler and Realm in Early Java (Selected Studies on Indonesia by Dutch Scholars*, Volume III, Den Haag, 1957), h. 99. Argumen Van Leur (*Indonesian Trade and Society*, h. 96) tampaknya terlalu bersemangat dalam usahanya menerapkan metode baru riset historis, dengan membedakan terlalu tajam antara kontak dagang dan budaya. Untuk pandangan berbeda yang lebih kemudian, lihat R. C. Majumdar, *Ancient Indian Colonisation in Southeast Asia* (University of Baroda Press, 1955).

24 Coedès, *Les Etats hindouisés*, h. 59-61.

25 Coedès, *o.c.*, h. 95. Ada yang menempatkan Chö-p'o dan Ho-lo-tan di Semenanjung Malaya.

26 Terjemahan bahasa Inggris oleh J. Takakasu dalam bukunya, *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and in the Malay Archipelago* (Oxford, 1896). Coedès, *Les Etats hindouisés*, h. 142, menuliskan nama kota itu dalam kutipan kedua "Fo-cha" dan menganggapnya sama dengan Che-li-fo-che, transkripsi bahasa Cina untuk Sriwijaya. Untuk identifikasi dengan nama-nama lain, lihat Coedès, h. 143-145. Takakasu mengacu pada Madhyadeca dalam literatur India sebagai "Kerajaan Tengah". C. C. Berg melihat di sini acuan kepada Cina, yang tampaknya bisa jadi.

27 Mengenai Sriwijaya lihat, di samping karya Krom dan J. H. Moens ("Crivijaya, Yawa en Kataha", *TBG*, LXXVII (1937), (317-487), Coedès, *Etats hindouisés*, bab VI, VII, dan VIII serta literatur yang disebutkan di sana. Untuk Sumatra prasejarah lihat F. M. Schnitger, *Forgotten Kingdoms of Sumatra* (Leiden, 1939).

28 Suatu daftar semua peninggalan kuno Hindu di Hindia, dengan daftar pustaka, telah diterbitkan oleh "Oudheidkundige Dienst in

Nederlandsch Indië", di bawah arahan N. J. Krom, dalam Laporan 1914, 1915, dan 1923, terbit di Batavia masing-masing pada 1915, 1918, dan 1923. Untuk deskripsi tugu-tugu Jawa kuno dan pembahasan mengenai masalah yang berkenaan dengan sejarah seni Hindu-Jawa, lihat N. J. Krom, *Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst*, 3 vol. (ed. pertama Den Haag, 1919, ed. kedua *ib.*, 1926). Untuk sejarah seni Bali, lihat W. F. Stutterheim, *Oudheden van Bali* (Singaraja, 1930), dan oleh penulis yang sama, *Indian Influences in Old Balinese art* (London, 1935).

29 Shiwa, "sang penghancur" sering kali ditampilkan sebagai Mahadewa, "Dewa Besar" dengan empat lengan menunggang lembu Nandi. Bhatara Guru ditampilkan sebagai orang tua berjanggut. Pasangan Shiwa ialah Dewi, *sang* dewi, yang juga disebut Durga, yang tak terdekati. Anak mereka ialah Ganeça, manusia gajah, dewa kekayaan. Patung Ganeça banyak terdapat di Hindia. Wishnu, dewa terang, paling sering ditampilkan sedang naik Garuda, manusia elang.

30 Buddhisme terbagi ke dalam dua sekte utama, Hinayana dan Mahayana (Kereta Kecil dan Kereta Besar). Hinayana mencari keselamatan lewat keutamaan dan meditasi, Mahayana melalui pengejaran kekudusan, yang dapat dicapai dengan bantuan Bodhisatwa. Mahayana mewajibkan pengikutnya berusaha menjadi Bodhisatwa dan membantu sesama. Ini menghasilkan kegiatan misioner yang luas, dan ke mana saja misionaris itu tiba, seni Buddhis pun mekar. Pemujaan terhadap orang suci dan terhadap kualitas dan keutamaan Buddha (Dhyani Buddha) menyuburkan seni patung. Perkembangan kemudian menghasilkan Buddhisme Tantris, yang kini terutama ditemukan di Tibet, tempat pengetahuan dan praktik gaib dipakai untuk membuka jalan menuju kesempurnaan. Tantrisme memainkan peran cukup penting di Jawa.

31 Borobudur itu sendiri adalah *stupa* raksasa, sejenis tugu batu massif yang didirikan orang India di titik-titik suci tempat Buddha lewat selama hidupnya di dunia. Stupa-stupa ini juga dipakai sebagai candi untuk menyimpan peninggalan kuno. Stupa selalu punya dasar persegi empat. Di atasnya dibangun setengah bulatan, dan ini kemudian dipuncaki dengan *Payung*, tempat berteduh dari cahaya matahari yang di India menunjukkan kedudukan raja. Borobudur mungkin adalah candi, tapi mungkin ada peninggalan kuno yang dikuburkan di dalam bukit sehingga aman dari segala macam usaha pencemaran untuk memindahkannya.

Monumen itu adalah juga *mandala*, yaitu representasi mistik gaib dari alam semesta. Untuk ini lihat P. Mus dalam *Bulletin de l'Ecole Francaise de l'Extréme Orient*, XXXII (1932), 267f, dan H. Zimmer, *Kunstform und Yoga* (Berlin, 1926). Lihat catatan berikut.

Borobudur telah dibersihkan dari segala tanaman yang tumbuh di atasnya selama berabad-abad. Sebagian sudah menjadi reruntuhan dan sejumlah patung telah dipindahkan untuk ditaruh di museum atau bahkan dipersembahkan kepada raja asing, seperti terjadi ketika Raja Siam berkunjung ke Jawa pada 1896. Banyak studi mengenai Borobudur telah diterbitkan. Karya utama ialah N. J. Krom, *Borobudur, Archeological Description*, 2 vol. (Den Haag, 1927). Untuk daftar kepustakaan sampai 1926, lihat Krom, *IHJK*, I, 39, dan masih harus ditambahkan lagi: "Bahadur Chand Shastri, the identification of the first sixteen reliefs on the second main wall of Barabudur" ("identifikasi 16 relief pertama di dinding utama kedua Borobudur") dalam *BKI*, LXXXIX (1932), 73f.

32 Stupa di puncak kini berisi satu patung Buddha yang tidak seharusnya ada di situ. Tampaknya seorang pemimpin daerah Jawa yang patuh, sambil menunggu sekelompok arkeolog Eropa yang akan mengeksplorasi monumen itu, menaruh patung itu di sana untuk tidak mengecewakan tamu-tamunya. Lihat Krom, *IHJK*, I, 392. Kalau kita memperhitungkan dasar struktural yang tersembunyi (terkubur) dengan reliefnya menggambarkan akibat Karma dan stupa besar di puncak, ada *10 teras* yang sesuai dengan 10 *bhumi* atau tahap dalam perjalanan spiritual Bodhisatwa. Tidak jauh dari Borobudur adalah Candi Mendut, candi dengan arsitektur bagus sekali dan satu patung Buddha raksasa yang mengagumkan.

33 F. D. K. Bosch, "Crivijaya, de Cailendra- en de Sanjayavamca" dalam *BKI*, vol. CVIII, bagian kedua, 1952, h. 113-123. Kesahihan teori ini tentu saja benar atau salah bergantung pada hipotesis serta berbagai kesimpulan tentang teks-teks prasasti yang menjadi landasannya.

34 Ini, kebetulan, akan menjelaskan mengapa monumen Mahayana dibangun di Jawa dan hanya di Jawa, walaupun Sumatra dan kerajaan Sriwijaya jauh lebih terkenal sebagai pusat ilmu Buddhis.

35 Mungkin saja bahwa gelar Shailendra tidak menghilang di Jawa, lihat bab berikut.

36 J. H. Kern, *Verspreide Geschriften*, IX, 273f. C. C. Berg mengatakan bahwa musnahnya teks-teks tertua yang ditulis di Jawa adalah penghancuran yang disengaja oleh raja Airlangga di hari kemudian.

Bab 2

1 Rijklof van Goens' Description of the Kingdom of Mataram (Penggambaran Rijklof van Goens atas Kerajaan Mataram), ed. oleh H. J. De Graaf, h. 182.
2 Lihat W. F. Stutterheim, *Rama-legenden und Rama-reliefs in Indonesien*, 2 vol (München, 1927).
3 Istilah "Jawa bagian timur" di sini mengacu pada wilayah yang di bagian timur dibatasi oleh sungai Brantas hilir dan bukan semenanjung di timur pulau itu. Nama para raja akan diberikan dalam bentuk nama panggilan, bukan nama penuh. Dalam prasasti Sindok disebut Shri Içanavikramana.
4 Lihat studi C. C. Berg mengenai pemerintahan raja Kertanagara, disebut kemudian dalam bab ini.
5 Coedès, *Etats hindouisés*, h. 219-220.
6 Dicatat oleh Ibn-al Fakil. Untuk catatan mengenai Indonesia dalam sumber Arab dan Persia, lihat Gabr. Ferrand, *Relation des voyages et textes géographiques arabes, persanes, et turques relatif à l'extrème Orient du VIIe au XVIIIe siècles*, 2 vol (Paris 1913-1914). Catatan yang dikutip di atas: vol. I, 56.
7 Coedès, *Etats hindouisés*, h. 224.
8 Versi ini terdapat dalam edisi pertama buku ini, h. 29-31.
9 C. C. Berg, "De weg van Oud- naar Niew-Mataram" dalam *Ind.*, X (1957) h. 410-411. Kedua terjemahan itu secara mendasar berbeda. Laut purba adalah massa cair yang menghasilkan hanya hal-hal bermanfaat (terjemahan C. C. Berg). Versi "lautan bencana" (terjemahan pakar Indonesia Poerbatjaraka) menafsirkan kalimat itu sebagai acuan kepada bencana besar, terjemahan yang lain adalah cara memuliakan raja Airlangga, yang menciptakan keteraturan dari kekacauan.
10 Lihat C. C. Berg, *o.c.*, h. 413, yang memberikan nama latinnya: *Hibiscus Rosa-Senensis L.* Ada varietas merah dan putih: warna bendera nasional Indonesia.
11 Coedès, *Etats hindouisés*, h. 239. Penulis ini meragukan kebenaran catatan tentang persinggahan Atisha di Sumatra (h. 243).
12 Imperium Chola terletak di pantai Coromandel yang mendapatkan namanya dari situ (Coromandel = Cholamandala) menurut Coedès, *o.c.*, h. 239 catatan.
13 Bagian wilayah taklukan Sriwijaya ini sudah diserang pada 1007.
14 Perbandingan antara penjarahan India ini dengan serbuan-serbuan

Viking di Eropa pada abad yang sama mungkin lebih bermanfaat. Untuk teori akan adanya perang atau perebutan kekuatan laut, lihat Krom, *HJG*, h. 113-144 dan Coedès, *o.c.*, h. 221 dan 242.

15 Coedès, *o.c.*, h. 267-268. Ketiadaan informasi Cina mungkin juga disebabkan kekacauan di imperium itu sejak awal abad sampai 1069. Patut diperhatikan bahwa untuk pertama kalinya duta dari Kalimantan dicatat (oleh Cina). Ia tiba pada 1082 dan datang dari P'o ni, mungkin terletak di pantai barat pulau itu.

16 Krom, *HJG*, h. 225.

17 Krom, *HJG*, h. 226.

18 Mengenai epik ini dan makna pentingnya, lihat C. C. Berg, "De Arjunawiwaha, Erlangga's levensloop en bruiloftslied", *BKI*, XCIX (1938), 19f. Juga Raden Poerbatjaraka, *BKI*, LXXXII (1926), 181.

19 Wayang adalah hiburan favorit orang Jawa dalam seluruh sejarah mereka. Pertunjukan wayang diberikan oleh dalang profesional yang menyanyikan cerita para pahlawan dengan diiringi orkestra jenis khusus Jawa, gamelan. Wayang Jawa tampaknya asli Indonesia–lihat artikel W. H. Rassers dalam *BKI*, LXXXI (1925), 311, dan LXXXVIII (1931), 317–tapi pakar lain menerima kemungkinan masuknya wayang dari India. Menurut Rassers, wayang adalah bagian dari penyembahan nenek moyang di zaman kuno orang Indonesia. Lihat juga J. Kats, *Het Javaansch tooneel: I. Wajang Poerwa* (Weltevreden, 1923; hanya terbit satu volume). Buku lebih tua mengenai pokok yang sama adalah G. A. J. Hazeu, *Bijdrage tot de kennis van het Javaansch tooneel* (Leiden, 1897).

20 "Ramalan Raja Jayabhaya" dimanfaatkan dan disalahmanfaatkan untuk banyak tujuan, di antaranya, untuk propaganda oleh kedua belah pihak dalam perang terakhir. Untuk versi baru mesianisme Jawa, lihat G. W. Drewes, *Drie Javaansche Goeroe's* (Leiden, 1925).

21 Untuk suatu penjelasan, berdasarkan pengulangan motif partisi dalam tradisi Jawa dan fungsi sosial penulisan historiko-mitologis Jawa, lihat C. C. Berg, "Herkomst, vorm en functie van de middeljavaanse rijksdelingstheorie", dalam *VKAW, afd. Lett. Nieuwe reeks*, vol. LIX (Amsterdam, 1954), h. 1-306.

22 Coedès, *Etats hindouisés*, h. 283, 300, 301, 308-310. Untuk daftar, lihat *o.c.*, h. 308 dan 313. Keandalan catatan-catatan Cina ini dibahas oleh Berg dalam *VKAW, o.c.*, h. 31, 39.

23 Mengenai prasasti ini, lihat P. Ravaisse, "L'Inscription coufique de Léran à Java", *TBG*, LXV (1925), 668f.

24 Kita tidak punya catatan sejarah mengenai pendirian kerajaan Ternate

tapi bisa menduga bahwa perkembangannya analogis dengan daerah lain di Kepulauan Indonesia, tempat situasi serupa ada pada masa historis.

25 Reproduksi patung itu ada dalam Krom, *IHJK*, Vol. III, *plate*54.

Bab 3

1 Kontribusi C. C. Berg mengenai "Javaansche Geschiedschrijving" pada Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch-Indië*, II, h. 7-148, masih tetap merupakan studi mendasar dalam bidang ini. Berg mengembangkan tesisnya ini dalam banyak artikel dan kontribusi ke majalah-majalah ilmiah. Mungkin dia terlalu menekankan ciri mitologis yang disengaja dari sebagian literatur Jawa, tapi sudut pandangnya tampaknya pada intinya bagus. Untuk kritik atas sebagian studinya, terutama yang ditulis sesudah 1950, lihat F. D. K. Bosch, "C. C. Berg and ancient Javanese history" ("C. C. Berg dan sejarah Jawa kuno"), dalam *BKI*, CXII, h. 189.

2 *Pararaton* diedit oleh J. Brandes dalam *VBG*, vol. XLIX (1896) dan dalam edisi revisi kedua oleh N. J. Krom, *VBG*, LXII (1920). J. Brandes juga menerbitkan teks asli *Nagarakertagama* (dalam huruf Bali) dalam *VBG*, vol. LIV (1902). J. H. Kern menerjemahkan syair itu (*BKI*, dicetak ulang dalam karyanya *Verspreide Geschriften*, vol. VII dan VIII). Terjemahan Kern diterbitkan ulang oleh Krom pada 1919 dalam volume terpisah. Lihat juga artikel-artikel C. C. Berg dalam *Ind*: "De Geschiedenis van pril Madjapahit" (IV, h. 481f dan V, h. 193f); "De Sadeng-oorlog en de mythe van Groot-Madjapahit" (V, h. 385f); "Twee nieuwe publicaties betreffende de geschiedenis en de geschiedschrijving van Mataram" (VIII, h. 97f dan h. 231f); "De zin der tweede Babad Tanah Jawi" (VIII, h. 361f); "Kertanagara's Maleise affaire" (IX, h. 386f), dan "Bijdragen tot de kennis der Panji-verhalen" dalam *BKI*, vol. CX, h. 305f. Tanggapannya terhadap kritik F. D. K. Bosch (*BKI*, CXII) dalam *Ind.* (IX, h. 177f). Terbitan lain mengenai pokok yang sama disebutkan dalam catatan kaki artikel-artikel itu.

3 Bahwa sebagian *Pararaton* lebih tua dibanding syair Prapança tidak diterima pada umumnya. Tapi suatu hubungan, yang memungkinkan Prapança mengutip teks yang kemudian terdapat dalam *Pararaton* dalam bentuknya sekarang tampaknya sangat mungkin. Lihat perbandingan teks yang dilakukan Berg pada h. 410 dari artikel dalam *Ind.*, IX, yang disebutkan di bawah.

4 Usul Berg dalam artikelnya "Pril Madjapahit", *Ind.*, IV, h. 484.

5 Raden Ng. Poerbatjaraka, "De inscriptie van het Mahaksobhyabeeld te Simpang", *BKI*, LXXVIII (1922), h. 426f. Lihat juga studi Berg, disebutkan di bawah.

6 Lihat C. C. Berg, "Kertanagara's Maleise affaire", dalam *Ind.*, IX (1956), h. 386f dan beragam penafsiran atas bukti itu dan literatur mengenainya, yang terdapat di situ.

7 Catatan jenderal-jenderal komandan Cina telah disisipkan ke dalam sejarah resmi dinasti Yuan dan dapat ditemukan dalam Catatan Groeneveldt, *VBG*, h. 20f.

8 Lihat, antara lain, artikel C. C. Berg "Een nieuwe redaktie van den roman van Raden Wijaya", *BKL*, LXVIII (1931), h. 1f dan artikel-artikel oleh penulis ini di "Pril Madjapahit", yang sudah dikutip. Semua ini harus diperbandingkan dengan kritik Bosch dan ahli-ahli lain.

9 Marco Polo dengan terang menyatakan bahwa Islam diperkenalkan ke Sumatra oleh saudagar Muslim "yang dalam jumlah besar sering menyinggahi pelabuhan-pelabuhan ini", lihat ed. Yule-Cordier (London, 1903), II, 284.

10 J. P. Moquette, "De eerste vorsten van Samoedra Pase", dalam *Rapport van den Oudheidkundigen Dienst* (1913), h. 1f. Suatu survei mengenai masuknya Islam di Hindia dilakukan R. A. Kern dalam Stapel, *Gesch.* I, 305-365.

11 Untuk perjalanan Odorico, lihat Yule-Cordier, *Cathay and the Way Thither* (Hakluyt Society, London, 1913), II, 146.

12 Sejarah imigrasi orang Cina ke Hindia masih harus dituliskan. Sebagian informasi mungkin terdapat dalam W. J. Cator, *The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies* (Oxford, 1936), sementara P. J. Veth dalam karyanya *Borneo's Westerafdeeling*, 2 vol. (Zalt Bommel, 1854-1856) dan dalam *Java*, ed. kedua, 4 vol. (Haarlem, 1896-1907) memberikan bahan tambahan. Lihat juga V. Purcell, *The Chinese in South East Asia* (London, 1951).

13 Lihat artikel C. C. Berg. dikutip dalam catatan 8, h. 486-494.

14 Satu prasasti Jawa Barat dari 1333 membuktikan keberadaan kerajaan Pajajaran pada masa itu. Sisa-sisa kediaman keluarga kerajaannya telah ditemukan, tidak jauh dari Bogor modern. Lihat H. ten Dam, "Verkenningen rond Padjadjaran" dalam *Ind.*, X, 1957, h. 291 dan 294.

15 Kisah putri Sunda dalam bentuk romantik muncul dalam "Kidung Sunda", diedit oleh C. C. Berg dalam *BKI*, LXXXIII (1927), 1f (teks Jawa dengan terjemahan dan catatan Belanda).

16 Tiga ratus tahun kemudian, pertukaran hadiah masih dalam bentuk seperti ketika VOC Belanda berdagang dengan raja Mataram.

Bab 4

1 Lihat Coedès, *Etats hindouisés*, h. 408-411 dan literatur yang tercatat di situ. Acuan Cina paling awal terhadap Malaka ialah dari 1403.
2 J. H. van Linschoten, *Itinerario*, ed. oleh H. Kern untuk Linschoten Vereniging (Den Haag, 1910), I, 73. Edisi Revisi kedua buku ini terbit pada 1955-1956.
3 Lihat, di samping buku-buku yang sudah disebutkan terdahulu, studi oleh J. L. Duyvendak, "Ma Huan re-examined", dalam *VKAW*, afd. lett. N. R. XXXII, no. 3 (1933), dan "The true dates of the Chinese maritime expedition in the early fifteenth century", *Toung Pao*, XXXIV (1938), h. 341f.
4 Untuk teori lain mengenai hal ini lihat van Leur, *Trade and Society*, h. 112-113, dan Schrieke, *Ruler and Realm in Early Java*, h. 230f.
5 Kata "kafir" dipakai di sini karena ia mengungkapkan cara pikir baik umat Muslim maupun Kristen pada masa itu mengenai pengikut kepercayaan Hindu-Jawa. Kerajaan-kerajaan yang disebutkan dalam teks digambarkan oleh penulis Portugis, Tomé Pires, yang mengunjungi Jawa pada 1513 dalam karyanya *Suma Oriental*, diterbitkan oleh Hakluyt Society (London, 1944) dan dikutip oleh H. J. de Graaf, "Tomé Pires' Suma Oriental en het tijdperk van de godsdienstovergang op Java" dalam *BKI*, CVIII (1952), h. 160.
6 Armada yang terdiri atas 40 kapal dianggap hebat. Lihat De Graaf, *l.c.*, h. 164.
7 Bandingkan Th. Pegeaud, *Javaanse Volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk* (Batavia, 1938), untuk keberlangsungan tradisi budaya kuno sepanjang abad ke-18 dan ke-19.
8 Untuk survei yang lebih tua akan kegiatan orang Portugis di Hindia Timur dan untuk literatur akan pokok itu, lihat P. A. Tiele, "De Europeërs in den Indischen Archipel", dalam *BKI*, 4 ser. I (1877), 321f, berlanjut dalam volume 1879, 1880, 1881, 1882, dan 1884. Pembahasan mengenai literatur Portugis kontemporer atas pokok itu ada dalam G. P. Houffaer, "Vanneer is Madjapahit gevallen?" *BKI*, 6 ser. VI (1899), Appendix I (h. 145-197). Kedua volume F. C. Danvers, *The Portuguese in India* (London, 1894) juga membahas perkara Hindia Timur, tapi didasarkan hampir seluruhnya pada informasi

bahasa Portugis. Penulis tampaknya tidak membaca berbagai publikasi dokumen dari arsip Belanda dan karena itu penjelasannya akan perang Belanda-Portugis pada tahun-tahun antara 1600 dan 1661 tidaklah memuaskan.

Di antara sejarawan kontemporer, terjemahan bahasa Inggris atas buku-buku karangan Duarte Barbosa dan Antonio Galvao, dan baru-baru ini karangan Tomé Pires, telah diterbitkan oleh Hakluyt Society.

9 Untuk suatu kisah catatan saksi mata, lihat Giovanni da Empoli, "Lettera mandata a Lionardo suo padre del viaggio di Malaka", dalam *Archivio storico Italiano, Appendici*, III (1846), h. 19-91.

10 Suatu penggambaran produksi rempah-rempah di kepulauan itu diberikan dalam *ENI*, di bawah "Kruidnagelen", dan "Nootmuskaat". Lihat juga R. H. Crofton, *A Pageant of the Spice Islands* (London, 1936). Saya tidak bisa setuju dengan pandangan yang dikemukakan penulis (.23), yang di sini mengikuti pandangan banyak penulis terdahulu, bahwa di Eropa permintaan akan rempah jauh lebih besar di abad pertengahan daripada di zaman modern. Hanya secara relatif saja rempah memainkan peran lebih penting di Abad Pertengahan, karena terbatasnya diet mereka, daripada sekarang. Van Leur, dalam karyanya *Trade and Society*, tampaknya membuktikan tanpa bisa dibantah lagi bahwa jumlah barang yang ditangani oleh saudagar Asia dan pedagang-pedagang pertama Eropa pada abad ke-16 sangatlah kecil, menurut standar kita.

11 Untuk suatu penggambaran awal Belanda akan produksi rempah-rempah, lihat Linschoten, *Itinerario*, vol. II, bab LXIIf, dan G. Rumphius, *Amboinsch Kruydboeck*, 7 vol., 1741-1755).

12 Survei terbaik mengenai kerumitan yang dialami Portugis akibat peran ganda mereka sebagai pedagang dan misionaris dilakukan oleh C. Wessels S. J., *De Geschiedenis der R. K. Missie in Amboina* (Nijmegen-Utrecht, 1926), yang terjemahan Prancisnya telah terbit sebagai *Histoire de la Mission d'Amboine* (Louvain, 1934). Wessels meneruskan risetnya dalam artikel: "De eerste Franciscaner Missie op Java, 1584-1599", dalam *Studiën*, CXIII (1930), h. 117f; "De Katholieke Missie in Noord Celebes en de Sangi eilanden, 1563-1605", *Studiën*, CXIX (1933), h. 365f; "Eenige aanteekeningen betreffende het bisdom en de bisschoppen van Malakka, 1558-1838", dalam *Historisch Tijdschrift* XII (1933), h. 204f; dan "Uit de missiegeschiedenis van Sumatra en Atjeh in de 16e en 17e eeuw", dalam *Historisch Tijdschrift*, XIX (1939), h. 5f. Artikel-artikel ini menjadi penting karena riset

ekstensif oleh penulis dalam arsip Romawi, di antaranya ada yang tidak bisa diakses umum.

13 Untuk sejarah Aceh, lihat H. Djajadiningrat, "Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat Atjeh", *BKI*, LXV (1911), 135f, yang menyajikan survei tawarikh Melayu yang berkaitan dengan sejarah Aceh.

14 Banyak informasi mengenai sejarah Maluku dalam periode sebelum kedatangan Belanda dapat ditemukan dalam rangkuman besar dari François Valentijn, *Oud en Niew Oost Indiën* (Dordrecht-Amsterdam, 1724-1726), yang karyanya akan dibahas kemudian (Bab 9, catatan 17). Lihat juga buku Heinrich Bokemeyer yang akan kita acu dalam Bab 6, dan artikel F. C. Kamma, "De Verhouding tussen Tidore en de Papoese eilanden", *Ind.*, I, h. 1301f, II, h. 177.

15 Dalam suratnya tertanggal 27 Januari 1545 kepada Romo Rodrigues di Lisbon (dikutip oleh C. Wessels, *Histoire de la Mission d'Amboine*, h. 68).

16 Untuk suatu tawarikh pribumi mengenai kerajaan Ternate (tapi dikarang pada abad ke-19), lihat P. van der Crab, "Geschiedenis van Ternate in het Ternataansch en het Maleisch" (dengan terjemahan Belanda), *BKI*, 2^{e} ser. II (1878), 381-493.

17 Bukti dari sumber Jawa dan Portugis untuk periode ini telah dihimpun dan diperbandingkan oleh H. J. de Graaf, "De Regering van Panembahan Sénapati Ingalaga" dalam *VKI*, vol. XIII (Den Haag, 1954).

18 Lihat Schrieke, *Ruler and Realm in Early Java*, h. 241. Penilaian moral yang diberikan Schrieke atas para ulama itu harus dianggap pandangan pribadinya.

19 Kepentingan faktor politik diperlihatkan dengan sangat baik oleh studi Wessels. Dia juga menunjukkan bahwa beberapa misionaris Jesuit yang paling ternama bukanlah orang Portugis tapi Italia, yang tentu saja tidak punya minat yang sama dalam urusan raja Portugis seperti sejawat Portugis mereka. Sebagian misionaris Jesuit awal adalah orang Flemming.

20 Untuk usaha Prancis memperoleh pangsa dalam perdagangan Hindia Timur, lihat Tiele, *op. cit., passim*. Untuk perjalanan Parmentier, lihat A. Guibon, *Sur les traces des Dieppois à Sumatra* (1529-1934) (Dieppe, 1936).

21 Untuk sumber sejarah awal Filipina lihat *Catàlogo de los Documentos relativos a las Islas Filipinas* karya Pedro Torres y Lanzas, dengan pengantar historis oleh Pable Pastello (Barcelona, 1925 dan

berikutnya), khususnya dua volume pertama.

22 Misi ini adalah asal mula kehadiran koloni Portugis di Timor. Lihat artikel oleh B. C. C. van Suchtelen dan G. P. Rouffaer, "De ruine van het oud-Portugeesche fort op Pouloe Ende", "De Dominikaner Solor-Flores Missie, 1561-1683", "Chronologie van de Dominikaner Missie op de Solor eilanden", dalam *Nederlandsch Indië Oud en Nieuw*, VIII (1923/24), 79f, 121f, 141f, 204f, 256f.

23 Untuk tradisi Jawa lihat J. J. Meinsma, *Babad Tanah Djawi*, 2 vol., Den Haag, 1874-1877, suatu edisi baru dipersiapkan oleh W. L. Olthof (Den Haag, 1941). Lihat buku H. de Graaf, dikutip di atas dan diskusi antara penulis itu dan C. C. Berg (C. C. Berg, "De zin der tweede Babad Tanah Djawi" dalam *Ind.* (1955), h. 361/400. De Graaf menanggapi dalam *BKI*, CXII (1956), h. 55, "De Historische betrouwbaarheid der Javaanse overleving". Lihat juga H. J. de Graaf, *Over het ontstaan der Javaanse Rijkskroniek* (dicetak sendiri, 1953).

24 Lihat J. Noorduyn, "De islamisering van Makasar" dalam *BKI*, vol. CXII (1956), h. 247-266, dan C. Nooteboom, "Aantekeningen over de cultuur der Boeginezen en Makasaren", *IND*, vol. II (1948-1949), h. 244f.

Bab 5

1 Catatan mengenai banyak pelayaran Belanda abad ke-16 dan ke-17 telah dicetak ulang atau diterbitkan dalam volume-volume Linschoten Vereeniging, padanan Belanda untuk Hakluyt Society dari Britania. Mengenai jurnal yang disimpan pada pelayaran pertama ke Hindia Timur, banyak edisi sudah diterbitkan. Yang paling utama ialah G. P. Rouffaer dan J. W. IJzerman, *De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost Indië*, 3 vol. (Den Haag, 1915-1929), yaitu *Linsch. V.*, vol. VII, XXV, dan XXXII. J. C. Mollema, *De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost Indië*, 1595-1597 (Den Haag, 1935), menyajikan narasi lengkap pelayaran itu, didasarkan pada bahan yang diterbitkan Rouffaer dan IJzerman. Kutipan itu berasal dari jurnal Frank van der Does (Rouffaer dan IJzerman, II, 293).

2 Berdiamnya De Houtman di Lisbon biasanya ditafsirkan sebagai tindakan "spionase ekonomi", dilakukan untuk sebagian pedagang yang membentuk perusahaan pertama untuk berdagang di Hindia. F. W. Stapel, dalam kuliahnya atas pokok itu, yang disampaikan pada Kongres Sejarawan Belanda pada 1936 (*Tijdschrift voor Geschiedenis*, 1936, h. 370), menolak teori ini dan, menurut saya, de-

ngan dasar yang kuat. Argumen utamanya adalah bahwa jauh sebelum Houtman pergi ke Lisbon "untuk menemukan rahasia Portugis mengenai perdagangan ke Hindia", sudah banyak pelaut Belanda yang ikut dalam pelayaran Portugis dan karena itu kenal baik dengan masalah-masalah pelayaran ke Asia, dan bahwa sebelum Houtman meninggalkan kota itu, peta-peta Portugis yang akurat telah dicetak ulang dan diperjualbelikan di Amsterdam oleh Cornelis Claes.

3 Dalam bukunya dia menyisipkan di antara informasinya seorang Dirk Gerritsz. Pomp, orang Belanda pertama (sejauh kita tahu) yang berlayar ke Cina dan Jepang (lihat Arthur Wichmann, *Dirck Gerritz. Ein Beitrag zur Entdeckungsgeschichte des 16ten und 17ten Jahrhunderts*, Groningen, 1899).

4 Lihat misalnya studi J. E. Heeres, "Duitschers en Nederlanders op de zeewegen naar Oost-Indië voor 1595", dalam *Gedenkboek van het Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië* (Den Haag. 1926), h. 171f.

5 Himpunan semua perjanjian antara perwakilan Belanda dan raja-raja dan bangsa-bangsa Indonesia bisa ditemukan dalam "Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum" karya J. E. Heeres, dilanjutkan oleh F. W. Stapel, diterbitkan *BKI*, vol. LVII, LXXXVII, XCI, XCIII, dan XCVI (1907-1938). Kutipan itu diterjemahkan dari h. 3 dari vol. I seri itu.

6 Untuk penggambaran rinci reaksi Portugis atas kunjungan pertama Belanda ke Hindia, lihat Tiele, dalam *BKI*, 4 ser. V (1881), 212f.

7 Untuk survei atas ekspedisi-ekspedisi ini, lihat J. K. J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlansch Gezag in Oost-Indië*. Tiga volume pertama (Den Haag, 1862-1865) mencakup periode sampai 1610. Walaupun diterbitkan hampir seabad lalu, karya ini masih tak ternilai karena dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam seksi kedua (dan lebih besar) dari setiap volume. Untuk jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pelayaran-pelayaran awal ke Hindia, mengelilingi Afrika atau pun Amerika, lihat Linsch. V., vol. IX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXVIII, XLII, XLIV, XLVI, XLVIII, L, dan LI. Suatu survei sangat baru dan baik oleh H. Terpstra muncul dalam Stapel, *Gesch.* II, 275-461.

8 Lihat F. C. Wieder, "De reis van Mahu en de Cordes door de straat van Magelhaes naar Zuid Amerika en Japan" (Linsch. V., vol. XXI, XXII, dan XXIV, Den Haag, 1923-1925). Untuk hubungan Belanda-Cina pada abad ke-17, G. Schlegel, "De betrekkingen tusschen Nederland en China volgens Chineesche bronnen", *BKI*, XLII (1893), 1f dan 188f.

Pandangan Schlegel atas pokok itu telah dikoreksi dalam studi W. P. Groenevelt yang jauh lebih lengkap, "De Nederlanders in China", vol. I, 1601-1624, dalam *BKI*, vol. XLVIII (1898). Ini satu-satunya volume yang diterbitkan.

9 Untuk penemuan-penemuan pertama oleh orang Belanda di Australia, lihat J. E. Heeres, *The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765*, teks dalam bahasa Belanda dan Inggris (Leiden-London, 1809).

10 Stapel, *Gesch.* II, 378. Lihat juga H. Terpstra, *Jacob van Neck, Amsterdams Admiraal en Regent* (Amsterdam, 1950). Laporan lengkap atas ekspedisi Van Neck telah diterbitkan oleh Linsch. V., *De Tweede Schipvaart*, 6 vol.

11 Jacob van Heemskerck kepada pedagang kepala di atas kapalnya, De Jonge, *op. cit.*, 11, 210.

12 P.A. Tiele, "Frederik de Houtman in Atjeh", *Indische Gids*, 1881, 1, 146f.

13 J. E. Heeres, CD, I, 12.

14 Kesepakatan 7 Juli 1601 (CD, I, 15). "Untuk menjadi satu" adalah rumusan Indonesia pada masa itu untuk menyatakan persekutuan yang erat. Ungkapan yang sama dipakai oleh raja-raja Mataram pada abad ke-17.

15 De Jonge, *op. cit.*, II, 234.

16 Pelayaran John Davis dalam *Purchas His Pilgrimes* (ed. 1905/07, Glasgow), II, 308. Serangkaian artikel mengenai kondisi yang ada di atas kapal-kapal VOC (yang sedikit lebih baik daripada keadaan selama pelayaran-pelayaran pertama) diterbitkan oleh J. de Hullu dalam *BKI*, vol. LXVII (1913) dan LXIX (1914). Sebagian besar contoh perilaku kasar, atau, sebaliknya, yang sangat beradab diambil dari dokumen-dokumen yang diterbitkan De Jonge, *op. cit.*.

17 Pada 1693 para Direktur VOC memerintahkan penasihat legal mereka, Pieter van Dam, untuk menyusun penggambaran lengkap administrasi dan sistem dagang Kompeni. Van Dam menyelesaikan kerjanya setelah delapan tahun. Dari volume folio tebal yang diapenuhi dengan penggambarannya yang sangat rinci, tujuh masih tersimpan di Arsip Negara di Den Haag. Atas perintah Departemen Pendidikan Belanda, F. W. Stapel mengusahakan penerbitan karya Van Dam *Beschrijvinge* (sejauh ini tiga volume telah diterbitkan Den Haag, 1927-1954). Didasarkan terutama pada karya Van Dam adalah buku G. C. Klerk de Reus, *Geschichtlicher Ueberblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederländischen Ost-Indischen Compagnie* (Batavia, 1894). Ada banyak lagi karya tulis

mengenai pengorganisasian Kompeni, misalnya, S. Van Brakel, *De HollandscheHandelscompagnieën der zeventiendeeeuw* (Den Haag, 1908). Tapi yang paling mencerahkan ialah satu buku kecil oleh W. M. Mansvelt, *Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost Indische Compagnie* (Amsterdam, 1922). F. W. Stapel, dalam volume ketiga dari *Geschiedenisvan Nederl. Indië*, diterbitkan di bawah arahannya, menyajikan penggambaran rinci semua kegiatan komersial Kompeni di Asia. Sebetulnya, volume ini lebih merupakan sejarah VOC daripada sejarah Hindia Timur. Bandingkan dengan buku Mansvelt, H. Dunlop, *De Oost-Indische Compagnie in Perzië* (Den Haag, 1930), yaitu Rijks Geschiedkundige Publicatiën, vol. LXXII, Pendahuluan. Mengenai pendirian Kompeni dan piagamnya, lihat J. A. van der Chijs, *Geschiedenis der Stichting van de Vereenigde Oost Indische Compagnie*, ed. kedua (Leiden, 1857).

18 Heeres, CD, I, 31. Alinea ketiga perjanjian itu menjamin kebebasan agama dan pelaksanaannya di hadapan umum.

Bab 6

1 Perjanjian pertama antara Kompeni dan Aceh, yang membuat Kompeni menerima hak membangun pos dagang berbenteng di ibukota Aceh, disepakati pada 17 Jan. 1607 (CD, I, 48). Kemudian hubungan pecah sampai 6 Nov. 1649, ketika perjanjian baru disepakati, langsung diikuti oleh perjanjian ketiga yang memberikan kepada Kompeni hak-hak yangterumuskan dengan jelasakan pangsa dalam perdagangan timah (CD, I, 529 dan 538).

2 Perjanjian 26 Mei 1607 (CD, I, 51).

3 Mengenai serbuan Belanda atas Filipina, lihat F. Blumentritt, "Holländische Angriffe auf die Philippinen im 16ten und 17ten Jahrhundert", *Jahrbuch der Ober-Realschule Leitmeritz*, 1880, dan, dalam terjemahan Spanyol, *Filipinas. Ataques de los Holandeses en los singlos XVI, XVII, y XVIII* (Madrid, 1882).

4 Kecurigaan kepada semua orang Asia adalah hal biasa pada semua orang Eropa kecuali mungkin beberapa misionaris, terutama karena ketidakpahaman bahasa dan adat istiadat. Sejumlah kutipan yang membuktikan pokok ini dihimpun oleh De Haan dalam karyanya *Priangan*, I, 6, dan catatan pada alinea ini dalam III, 14, 15.

5 Lihat Van der Chijs, *De vestiging van het Nederlandsch Gezag over de Banda eilanden* dan Heinrich Bokemeyer, *Die Molukken. Geschichte und quellenmässige Darstellung der Eroberung und der Verwaltung*

der Ost-Indischen Gewürzinseln durch die Niederländer (Leipzig, 1888). Buku-buku ini yang ditulis pada masa ketika reaksi melawan "ekonomi terencana" abad-abad sebelumnya berada di puncak, sangat kritis terhadap administrasi Belanda di Maluku pada zaman Kompeni. Benar bahwa administrasi ini sebetulnya sulit disebut suatu administrasi dan bahwa catatan keberhasilannya cukup buruk tapi tidaklah tepat secara historis untuk menghakimi apa yang dilakukan pedagang abad ke-17 dengan teori-teori abad ke-19. Lihat juga J. Keuning, "Ambonnezen, Portugezen en Nederlanders. Ambon's geschiedenis tot het einde van de zeventiende eeuw", *Ind.*, IX (1956), h. 135-168.

6 Bahkan sampai 1664 ada protes dari Sultan Jambi bahwa tidak seorang pun pedagang Belanda di posdagang di kerajaannya memahami satu kata Melayu pun. Lihat De Haan, *Priangan*, III, 13.

7 Furnivall, *Netherlands India*, h. 27.

8 Mengenai persaingan Belanda-Britania di kepulauan Banda, lihat penjelajahan William Keeling (1607) dalam *Purchas* (ed. Glasgow), II, 502-549, dan David Middleton (1609), *ibid.*, III, 90f. "Discourse" dari Edmund Scott dalam *Purchas*, ed. sama, II, 438-495. Pernyataannya mengenai persahabatan orang Belanda-Britania walaupun ada persaingan, *ibid.*, h. 473.

9 Kapal-kapal "Denmark" sering disebutkan dalam dokumen-dokumen itu. Ini sering kali hanya berarti bahwa kapal-kapal ini berlayar dengan dokumen-dokumen Denmark dan di bawah bendera Denmark. Raja-raja Denmark berusaha menarik minat kapitalis Belanda dalam perusahaan Denmark dan kapitalis Belanda sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berdagang di bagian dunia tempat perusahaan-perusahaan Belanda berizin resmi memegang monopoli. Jadi, banyak dari yang disebut kapal Denmark sebetulnya kapal Belanda, diawaki orang Belanda, tapi di bawah bendera Denmark. Lihat, untuk pendirian Perusahaan Hindia Timur Denmark pertama, Axel Nielsen, *Dänische Wirtschafts geschichte* (Jena, 1933), h. 276f dan 283f.

10 Untuk penaklukan Kepulauan Solor oleh Ap. Schotte lihat P. A. Tiele, *Bouwstoffen voor de geschiedenis van de Nederlanders in den Maleischen archipel*, 3 vol. (Den Haag, 1886-1890), I, 12f dan 80f. De Jonge menutup koleksi dokumen atas sejarah awal Belanda di Hindia dengan tahun 1610. Dia meneruskan seri itu dengan tujuh volume pada *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java* (Den Haag, 1869-1878). Dengan tiga volume lagi, M. L. van Deventer

membawa narasi itu sampai 1811. Seleksi dokumennya atas periode G. J. Daendels menimbulkan banyak kritik dan akibatnya lebih banyak volume ditambahkan pada seri itu dengan bahan tambahan mengenai periodejabatan Daendels, diterbitkan oleh L. W. G. DeRoo (*Documenten Omtrent Herman Daendels*, 2 vol. Den Haag, 1909). Akhirnya, Van Deventer melanjutkan seri itu sampai abad ke-19; *Het Nederlandsch Gezag over Java sedert 1811*, vol. I, 1811-1820, satu-satunya yang diterbitkan, terbit di Den Haag pada 1891. P. A. Tiele mengusahakan penerbitan dokumen berkenaan dengan kebijakan kolonial Belanda di luar Jawa setelah 1610. Tiga volumenya yang disebut di atas membawa cerita sampai 1649, tapi tidak dilanjutkan.

11 Untuk suatu rekonstruksi tentatif atas peristiwa-peristiwa ini dan seterusnya dari sumber-sumber Jawa, lihat H. J. De Graaf, *De Regering van Panembahan Senapati Ingalaga*, h. 97f dan *plate* 123f.

12 Untuk survei pemerintahan Sultan Agung, lihat H. J. de Graaf, *Geschiedenis van Indonesië* (Den Haag, 1949), h. 107f. Mataram minta Belanda mendukung serangan atas Surabaya, tapi Batavia menolak.

13 Untuk sikap raja-raja Indonesia ini, lihat F. de Haan, *Priangan*, 4 vol. (Batavia, 1910-1912), III, h. 24-25.

14 Tiga gubernur jenderal pertama (Pieter Both, 1610-1614; Gerard Reynst, dan Laurens Reaal, 1616-1618) tidak setuju pemakaian kekerasan untuk memperoleh monopoli praktis atas perdagangan rempah-rempah (Stapel, *Gesch.*, III, 96), tapi kebijakan "berhati lemah" ini sangat ditentang Jan Pieterszoon Coen, ketika itu direktur jenderal perniagaan (lihat biografi Colenbrander mengenai Coen, dikutip dalam catatan 16, di bawah, h. 96).

15 Scott, op. *cit.*, h. 440. Dia mungkin mengacu pada banyak pengikut bangsawan-bangsawan Jawa yang biasanya ada di sekeliling mereka. Adalah perkara prestise untuk punya banyak pengikut. Tampaknya, dia tidak tahu banyak tentang petani Jawa.

16 Tentu saja ada beberapa biografi J. P. Coen. Yang paling baru ialah karya F. W. Stapel, yang menjadikan sejarah abad ke-17 Kompeni sebagai bidang khususnya, dalam *Geschiedenis van Nederl. Indië*, diedit di bawah arahannya, tempat dia mengabdikan 65 halaman besar untuk periode Coen saja (h. 117-182). Himpunan surat dan laporan Coen yang praktis lengkap diterbitkan oleh H. T. Colenbrander (*Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië*, 5 vol. Den Haag, 1919-1923). Dalam enam volume yang terbit pada 1934, penulis

yang sama menyajikan biografi rinci pendiri Batavia itu. "Discourse" ("Discoers aen de E. Heeren Bewinthebberen touscheerende den Nederlantsche Indischen staat") diterbitkan Colenbrander dalam apendiks biografi ini (h. 451-474). Kepada edisi Colenbrander, volume ketujuh ditambahkan (Bagian Pertama, 1952, Bagian Kedua, 1953), diedit dalam seri KI.

17 Keputusan diambil 29 Maret 1626, lihat Colenbrander, VI, 372.

18 Laporan Coen: Colenbrander, I, 55f.

19 Colenbrander, IV, h. 617 dan h. 628, VI, h. 340 dan 337.

20 "Discoers", Colenbrander, VI, 451.

21 Suatu pembahasan menarik aspek-aspek perdagangan Eropa di Asia ini terdapat dalam karya H. Dunlop, *Bronnen tot de Geschiedenis van de Oost-Indische Compagnie in Perzië*, Pendahuluan, h. XXVIIf, lxiiif.

22 Literatur mengenai pendirian Batavia banyak terdapat. J. A. van der Chijs, *De Nederlanders te Jakatra* (Amsterdam, 1860); J. W. IJzerman, "Over de belegering van het fort Jacatra", *BKI*, LXXIII (1917), 558-679; F. de Haan, *Oud Batavia*, vol. I (edisi kedua, Bandung, 1935), bab I.

23 Colenbrander, *op. cit.*, VI, 156.

24 "Batavi" adalah nama suku bangsa Jerman yang disebutkan oleh Tacitus. Pada abad ke-16 "Batavia" sudah dipakai untuk mengindikasikan bagian sebelah utara Negeri-Negeri Rendah sebagai kontras dengan "Belgium" yang ketika itu mengindikasikan Negeri-Negeri Rendah secara keseluruhan (yang kini adalah Belanda dan Belgia bersama-sama).

25 Liewe van Aitzema, *Saken van Staet en Oorlog*, 7 vol. (Den Haag, 1669-1671), vol. I, buku iii, folio 206.

26 Untuk diskusi baru didasarkan pada dokumen-dokumen itu lihat F. W. Stapel, "De Ambonsche 'moord'", *TBG*, vol. LXII (1923).

27 "Verhaal van eenige oorlogen in Indië", dalam *Kroniek van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht*, vol. XXVII (1871), h. 511 dan "Rapport gedaen by verscheyden persoonen comende uyt de Oost-Indien" (1622) dalam volume yang sama, h. 321-339. Upaya E. Gerretson untuk membenarkan kebijakan Coen (*Coens Eerherstel*, Amsterdam, 1944) tetap tidak meyakinkan.

28 Coen mengklaim untuk Kompeni semua wilayah antara kesultanan Banten dan Cirebon serta antara Laut Jawa dan Samudra Hindia, tapi kemudian mengubah pandangannya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa wilayah Jayakarta mulanya adalah milik kesultanan Banten.

Tapi Kompeni dengan caranya sendiri mengakui klaim Mataram dengan mengirimkan duta dan memberikan hadiah kepada rajanya. Sementara itu ia menjalankan hak kedaulatan penuh atasBatavia dan wilayah sekitarnya, yang ia klaim sebagai "hak penaklukan". Sikap mendua ini berakhir setelah Kompeni tahu bahwa ia tidak perlu takut pada kekuatan Mataram. Lihat De Haan, *Priangan*, I, 9-10, III, 19f.

Bab 7

1 *Babad Tanah Djawi* sudah diedit oleh J. J. Melnsma dalam dua volume untuk *Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Nederl. Indië* pada 1874-1877. Edisi ini dicetak ulang dengan tambahan catatan dan terjemahan Belanda untuk lembaga yang sama oleh W. L. Olthoff (Den Haag, 1941).

2 Lihat H. J. de Graaf, *Over het ontstaan der Javaanse Rijkskroniek* (dicetak sendiri, Den Haag, 1953).

3 Kerajaan Surakarta lenyap pada 1950; wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah Jawa berpemerintahan langsung. Keturunan susuhunan terus berdiam di istana mereka, tapi sebagai penduduk biasa. Kesultanan Yogyakarta terus ada sebagai wilayah otonomi daerah. Mengenai pembangunan dan pembangunan kembali kediaman-kediaman raja, lihat C. C. Berg, "Kratonbouw In de wildernis" dalam *Ind.*, X (1957), h. 506-532.

4 Penjelasan C. C. Berg, disampaikan dalam artikelnya, "De zin der tweede Babad Tanah Djawi", dalam *Ind.*, VIII (1955), h. 361f.

5 Hipotesis ini berasal dari C. C. Berg, *l. c.*, Kisah berikut di ambil dari artikel ini.

6 Sebelum serangan itu, Mataram dikunjungi oleh tiga duta Belanda: Gaspar v. Zurck dan Balth. van Eindhoven pada 1614, serta oleh Hendrik de Haen pada 1622 dan 1623.

7 Cerita ini juga terpelihara dalam versi Banten. Untuk kepustakaan lihat C. C. Berg, *l. c.*

8 Di sini saya mengikuti penggambaran H. J. de Graaf dalam pendahuluannya untuk edisi laporan R. van Goens mengenai kunjungannya ke Mataram (*De vijf gezantschappen van Rijklof van Goens naar het hof van Mataram*, 1648-1654, diterbitkan oleh Linsch. Ver., Den Haag, 1956).

9 Laporan De Haen, diterbitkan oleh De Jonge, *Opkomst*, IV, h. 295.

10 Buku terbaik mengenai sejarah lokal Batavia ialah karya F. de Haan, *Oud Batavia* (ed. kedua, Bandung, 1935), 2 vol., satu teks, satu *plate*.

Untuk sejarah Gereja Reformed pada masa kolonial, lihat C. W. van Boetzelaer van Asperen, *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië, haar ontwikkeling van 1629-1939* (Den Haag. 1947. Untuk komentar tentang "pendeta patuh", lihat h. 18. Rapat pertama pendeta Gereja Reformed di Indonesia diadakan pada 1624.

11 Mengenai orang Cina dan sumbangsih mereka dalam pembangunan Batavia, di samping buku De Haan, lihat B. Hoetink, "So Bing Kong, het eerste hoofd der Chineezen te Batavia", *BKI*, LXXIII (1917), 334f, dan, oleh penulis yang sama, "Chineesche officieren te Batavia", *BKI*, LXXVIII (1922), 1-136.

12 Penduduk non-Kristen bebas, khususnya orang Indonesia, hanya "dibolehkan"; Kompeni tidak ingin bertanggungjawab atas kesejahteraan mereka, yang akan ia lakukan kalau mereka dianggap rakyat dalam arti legal. Lihat contoh yang sangat kasar tentang sikap ini dalam De Haan, *Priangan*, I, 5. Pemerintah Batavia biasanya mmeperlunak instruksi-instruksi keras dari para Direktur di Amsterdam. "Mardijker" adalah transformasi bahasa Belanda dari kata "mahardika", yang berarti budak yang sudah merdeka. Mardijk adalah tempat kecil dekat Dunkirk dan, seperti pelabuhan ini, kampung halaman pelaut bersenjata Spanyol, sangat ditakuti pelaut Belanda.

13 Kesaksian orang non-Kristen mulanya tidak diizinkan di pengadilan. Setelah 1633, kesaksian mereka diperbolehkan dalam beberapa kasus yang tidak melibatkan orang Kristen. Dalam praktik biasanya tidak sekeras peraturan legal. Lihat De Haan, *Priangan*, I, 4-5, dan III, 12-14.

14 Serdadu Jepang terakhir menghilang dari Batavia ketika kaisar Jepang memutuskan semua hubungan dengan dunia luar pada 1636. Orang Cina bebas dari wajib militer dengan membayar pajak khusus.

15 Ada buku sangat baik mengenai orang Belanda di Jepang dalam bahasa Inggris: C. R. Boxer, *Jan Compagnie in Japan, 1600-1817* (Den Haag. 1936). Ini didasarkan pada sumber Belanda dan Jepang. Lihat juga Oskar Nachod, *Die Beziehungen der Niederländischen Ost-Indischen Kompagnie zu Japan im siebzehnten Jahrhundert* (Leipzig, 1897). Untuk abad ke-18, lihat J. Feenstra Kuiper, *Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw* (Den Haag, 1921).

16 P. A. Leupe, *Reize van Maarten Gerritszoon de Vries naar het Noorden en Oosten van Japan* (Amsterdam, 1858).

17 Pelayaran Tasman telah diedit ulang oleh R. Posthumus Meyjes dalam seri Linsch. Ver. (vol. XVII, Den Haag, 1919). Terjemahan

Inggris muncul dalam seri Hakluyt Society.

18 Untuk perundingan damai, lihat H. J. de Graaf, *De vijf gezantschapsreizen van Rijklofvan Goens*, h. 25-30.

Bab 8

1 Lihat P. A. Leupe, "De reizen der Nederlandersnaar Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden in de zeventiende en achttiende eeuw", *BKI*, XXII (1875), 1f, 175f., dan XXIII (1876), 160; A. Haga, *Nederlandsch Nieuw Guinea en de Papoesche eilanden, 1517-1583*, 2 vol. (Batavia – Den Haag, 1884).

2 De Haan, *Priangan*, III, 225, mengutip Philippus Baldaeus, *Nauwkeurige Beschrijvinge van Malabar en Coromandel*.

3 Lihat Van der Chijs, *Nederlandsch Indisch Plakaatboek*, I, 472f.

4 Perintah kepada gubernur jenderal (1650) dalam Van der Chijs, *op. cit.*, II, 135f.

5 Bahwa agama adalah salah satu sebab utama pertikaian di Kepulauan Indonesia diyakini kuat oleh orang-orang berpengalaman masa itu seperti Rumphius dan van Goens. Lihat juga Tiele, *Bouwstoffen tot de vestiging van het Nederlandsch Gezag*, II, 105.

6 Biografi Speelman terbaru adalah karya F. W. Stapel, "Cornelis Janszoon Speelman", *BKI*, XCIV (1936), 1-222.

7 Biografi Jonker oleh J. A. van der Chijs dalam *TBG*, XXVIII (1883), 351-473, dan XXX (1885), 1-234. Seperti semua karya historis van der Chijs, biografi ini jauh dari ketidakberpihakan dan berprasangka terhadap pejabat-pejabat Kompeni. Tambahan yang dibutuhkan disajikan oleh De Haan, *Priangan*, vol. I, bagian II, h. 228-231.

8 W. J. A. de Leeuw, *Het Painansch Contract* (Amsterdam, 1926); H. Kroeskamp, *De Westkust en Minangkabau*, 1665-1668 (Utrecht, 1931).

9 Penciptaan Pit akan suatu "kerajaan Minangkabau" tentu saja hanya punya keberadaan sesaat. Tambang emas di pantai barat Sumatra tidak pernah memberikan hasil besar dan akhirnya ditinggalkan. Lihat Elias Hesse, "Gold bergwerke in Sumatra 1680-1683", dalam S. P. L'Honoré Naber, *Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienste der Niederländischen Ost- und West-Indischen Kompagnien*, 1602-1797, vol. X (Den Haag, 1931).

10 Lihat edisi H. J. de Graaf mengenai laporan Van Goens yang sudah dikutip, dan W. M. Ottow, *Rijckloff Volckertsz Van Goens, De carrière*

van en diplomaat, 1619-1655 (Utrecht, 1954). Untuk pemberontakan saudara Amangkurat yang digambarkan di bawah, lihat De Graaf, *op. cit.*, h. 238.

11 Mengenai perang ini, lihat C. R. Boxer, "The Third Dutch War in the East", dalam *TheMariner'sMirror*, XVI (1930), 348f.

12 Hubungan dengan Mekah makin lama makin regular. Lihat juga C. Snouck Hurgronje, "Een Mekkaansch Gezantschap naar Atjeh in 1683", *BKI*, XXXVII (1888), 545f. Untuk Banten, N. MacLeod, "De onderwerping van Bantam" (1680), *IG*, XXIII (1901), 350f.

13 Dari dokumen-dokumen yang diterbitkan De Jonge, De Haan menghimpun bahan mengenai perluasan perkapalan Banten; lihat *Priangan*, III, 238.

14 W. Fruin-Mees, "Een Bantamsch Gezantschap naar Engeland in 1682", *TBG*, LXIV (1924), 207.

15 Tapi tidak ada keraguan tentang kehadiran Trunajaya di Kediri dan usahanya membangun kediaman di sana.

16 De Jonge, *op. cit.*, V, XXXVII.

17 H. J. De Graaf, "Gevangenneming en dood van Raden Truna-Djaja", *TBG*, LXXXV (1952), h. 273-309.

18 De Haan dalam Volume II karyanya *Priangan* mengedit sejumlah laporan mengenai ekspedisi ke pedalaman Jawa Barat dan menyertakan banyak anotasi.

19 P. Wink, "Eenige archiefstukken betreffende de vestiging van de Engelsche factorij teBenkoelen in 1685", *TBG*, LXIV (1924), 461, dan N. MacLeod, "De Oost-Indische Compagnie op Sumatra in de XVII eeuw", *IG*, XXVIII (1906), 777f, 1420f.

20 Mansvelt, *Rechtsvorm en Geldelijk Beheer*, h. 95.

21 Lihat MacLeod, "DeOost-IndischeCompagnieop Sumatra", *IG*, XXIX (1907), 608f, 787f. Sebagaimana biasa De Haan memberikan survei yang sangat bagus tentang fakta yang diketahui dalam *Priangan*, III, 323f.

22 Untuk penggambaran rinci mengenai peristiwa-peristiwa ini, lihat H. J. de Graaf, *De Moord op Kapitein Francois Tack, 8 Februari 1686* (Amsterdam, 1935).

Bab 9

1 Angka-angka yang bisa diandalkan mengenai mortalitas di Batavia selama abad ke-17 dan ke-18 tidak tersedia. De Haan, *Oud Batavia*, h. 685 dan 702, dengan tepat menolak angka-angka fantastik dari

Raffles, *History of Java* (satu juta kematian antara 1730 dan 1752 saja!)

2 "Blijver" adalah orang Eropa yang tinggal permanen di Indonesia, "trekker" adalah mereka yang ingin kembali ke Eropa segera setelah keadaan memungkinkan.

3 Daniel Beeckman, *A Voyage to and from the Island of Borneo and the East Indies* (London, 1718), h. 24.

4 Kerja ini mulanya dilakukan kriminal yang dihukum rodi tapi kemudian oleh petani Jawa dalam *heerendienst* (rodi sebagai ganti pajak). Orang Batavia dengan semacam humor gelap menyebut orang-orang malang ini "Jawa-lumpur" (De Haan, *Priangan*, III, 369-370, dan *Oud Batavia*, h. 197).

5 Untuk kondisi saniter di Batavia, lihat De Haan, *Oud Batavia*, h. 684f. Lihat juga D. Schoute, *De Geneeskunde in den dienst der Oost Indische Compagnie* (Amsterdam, 1928).

6 Woodes Rogers, *A Cruising Voyage around in the World*, ed. G. E. Manwaring (London, 1928), h. 286.

7 James Cook, *Voyages*, 2 vol. (London, 1842). Kutipan itu dari I, 314. Untuk penggambaran Batavia, lihat I, 299f.

8 Cook, *Voyages*, I, 298.

9 Rincian mengenai Cornelis Suythoff, diambil dari arsip notari di *Priangan*, II, 183, c. 1. Pada 1671 atau 1672 Suythoff datang ke Hindia; pada 1682, atas perintah para Direktur, dia didakwa melanggar hak-hak monopoli Kompeni. Tuntutan itu diam-diam dicabut, dan pada 5 Feb. 1683, Suythoff diangkat jadi kepala penjara itu. Dia meninggal pada 1691. Dia kawin dengan putri Rembrandt, Cornelia.

10 De Haan (*Oud Batavia*, h. 406) menyajikan beberapa contoh indah bahasa Portugis Batavia ini. Berikut adalah contoh menarik kebijakan bahasa pada abad ke-17: "Memang pemakaian umum bahasa Belanda alih-alih Portugis akan memperkuat fondasi negara kita di sini, tapi tampaknya sedikit saja kemungkinan untuk mewujudkan perubahan ini, karena orang Portugis telah menancapkan akarnya di sini dan terlalu disukai oleh orang kita sendiri. Kami tidak akan mengabaikan semua cara yang cocok untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ini, seperti yang anda rekomendasikan", (Surat G. J. Maetsuycker kepada para Direktur, 28 Nov. 1676, dalam De Jonge, *op. cit.*, VI, 157).

11 Chastelein, "Invallende Gedachten", *TBG*, III, 74-75.

12 Lekkerkerker, *Land en Volk van Java*, I, 224 dan 505.

13 Lihat I. J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in*

Nederlandsch-Indië(Groningen-Batavia, 1938) h. 22-31.

14 Brugmans, *op. cit.*, h. 37.

15 Mengenai puisi Belandadi Hindia, lihat De Haan, *Priangan*, II, 732f. Untuk buku-buku yang dicetak di Hindia, J. A. van der Chijs, *Proeve eener Nederlandsch Indische Bibliographie* (1659-1870) (Batavia, 1875).

16 Mengenai Steendam sebagai penyair pertama New Netherland, lihat H. C. Murphy, *Jacob Steendam, Noch Vaster, A Memoir* (Den Haag, 1861). Biografi Steendam muncul dalam S. Kalff, "Vroegere Koloniale Poëzie", *IG*, XXIX, 2 (1907), 1459-1476, dan 1624-1635.

17 Valentijn, *Oud en Nieuw Oost Indien* (*Beschrijving van Batavia*) IV, 365-366.

18 Ini adalah kelompok di sekitar Gubernur Jenderal Johannes Camphuijs (1684-1691). Pieter van Hoorn (wafat 1682) menyarankan kolonisasi skala besar; putranya, Johan, di bawah bimbingan Cornelis Speelman, menjadi ahli dalam urusan pribumi. Cornelis Chastelein, teman Camphuijs yang lain, mendirikan permukiman di Depok. Baik Johan van Hoorn maupun Chastelein mengambil bagian penting dalam promosi kultur kopi. Camphuijs menulis sejarah pendirian Batavia dan menyuplai bahan kepada E. Kaempfer untuk karya terkenalnya *Description of Japan*. Dia juga mengusahakan dengan hati-hati agar ada salinan-salinan tulisan Rumphius, *Herbarium*, dan dengan demikian menyelamatkannya dari kehancuran, dan dia melindungi Herbert de Jager, seorang linguis terkenal. Semua orang ini, yang punya minat sangat besar pada urusan Indonesia, adalah pemilik tanah. Johan van Hoorn, Gubernur Jenderal 1704-1709, adalah pemilik tanah terbesar di Batavia. Van Rheede van Drakesteyn bekerja pada periode yang sama. Hendrik Zwaardecroon (Gubernur Jenderal 1718-1725) adalah orang yang menyediakan bagi van Hoorn pohon kopi muda dari pantai Malabar.

19 Impor kopi pertama (dari Arabia) ke Belanda dilakukan pada 1663. Van Hoorn mengirimkan beberapa pohon kopi ke Amsterdam, dan dari situ benih dikirim ke Hindia Barat.

20 Mengenai Nicholas Witsen, lihat J. Fr. Gebhard, *Het Leven van Mr. Nicholaas Cornelisz. Witsen*, 2 vol. (Utrecht, 1881-82).

21 Belanda memberikan penguasa daerah Jawa, yang hampir selalu diambil dari anggota keluarga bangsawan, gelar "*regent*" ("bupati"), yang di Belanda mereka pakai untuk menunjukkan anggota kelas oligarki yang berkuasa.

22 Lihat karya Pieter van Hoorn, "Preparatoire Consideratiën ende

advys wegens de Nederlandsche Colonie in deze Indische Gewesten" (1675), dalam De Jonge, VI, 130-147. Chastelein dalam tulisannya "Invallende Gedachten" mengulangi argumen Van Hoorn.

23 Di Eropa harga kopi pada masa itu dua gulden satu pon (0,45 kg).

24 "Bahwa orang Jawa akan menjadi terlalu kaya" adalah kekhawatiran yang sering kali dikemukakan dalam surat-surat Kompeni. Gagasan ini tidak terbatas pada administrasi kolonial tapi adalah pandangan umum pada masa itu. Lihat De Haan (*Priangan*, I, 431, dan IV, 741), yang antara lain mengutip Voltaire: "*Il me parait essentiel qu'il y ait des gueux ignorants*", suatu sudut pandang yang sepenuhnya disetujui oleh Sultan pertama Yogyakarta, yang menganggap satu prinsip pemerintahan adalah bahwa "orang miskin mudah diperintah" (De Jonge, *op. cit.*, vol. XI, Memoir of J. R. van der Burgh, 1780).

25 "Kuota" adalah upeti yang ditawarkan oleh para bupati kepada Batavia. Untuk ini mereka menerima sejumlah kecil uang sebagai hadiah. "Penyerahan paksa" adalah penjualan produk secara paksa dengan harga yang dipatok. Dalam praktik tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Bab 10

1 Perjanjian dengan suku-suku bangsa Batak di sebelah barat Danau Toba disepakati pada 1694 dan 1698. Pada 1698 komandan Belanda pantai barat memutuskan mengangkat seorang wakil yang tugasnya bermediasi antara orang Batak dan Kompeni (CD, IV, 83 dan 143). Lihat E. B. Kielstra, "Onze kennis van Sumatra's Westkust omstreeks de helft der 18e eeuw", *BKI*, XXXVI (1887), 499. Lihat juga studi atas pranata-pranata pribumi oleh Van Basel, "Radicaale Beschrijving", 1761, sebagian diterbitkan oleh Kielstra dalam artikel yang dikutip di atas dan sebagian dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, vol. IX, dan oleh Coenraad Fr. Hofman (mengenai Minangkabau, sekitar 1715) diterbitkan oleh F. W. Stapel dalam *BKI*, XCII (1935), 450f. Studi-studi ini, dan lain-lain yang mungkin masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip, sudah ada beberapa dekade lebih dahulu daripada karya besar W. Marsden, *The History of Sumatra* (edisi pertama, London, 1783).

Hofman jelas menyatakan bahwa pada masanya Minangkabau hanya terislamisasi secara dangkal. Penyebaran Islam dipupuk oleh hubungan Sumatra dengan India. Saudagar-saudagar Gujerat terus mengunjungi Sumatra, khususnya Aceh. Salah satu barang dagangan

mereka yang paling penting adalah timah dari Malaya.

2 Suatu tawarikh Bangka: F. S. A. de Clercq, "Bijdrage tot de geschiedenis van het eiland Bangka" *BKI*, XLV (1895), 113f dan 381f. Total keluaran timah Bangka terbatas pada 30.000 pikul setahun (1.875 ton). Produksi sebelum perang 40.000 ton setahun.

3 Mengenai Banjarmasin: Johan Paravicini, "Rapport over Bandjermasin" (1756), *BKI*, VIII (1862), 217f. J. A. Baron von Hohnendorff, "Radicale Beschrijving van Banjermassing" (1757), *BKI*, VIII, 151 dan 213f. Suatu studi modern: J. C. Noordmann, *Bandjermasin en de Compagnie in de tweede helft der 18e eeuw* (Leiden, 1935).

4 Salah satu contoh paling mencolok ialah pendirian kesultanan Pontianak sekitar 1770 oleh seorang pengelana Arab. Kesultanan baru itu segera menjadi kekuatan utama di pantai barat Kalimantan. Perjanjian dengan VOC menjamin bahwa kepemilikan para Sultan baru itu atas wilayah mereka tidak terganggu.

5 Mengenai permukiman orang Cina di Kalimantan Barat Laut: P. J. Veth, *Borneo's Westerafdeeling*, vol. (Zalt Bommel, 1854-1856), I, 297f; J. J. M. de Groot, *Het kongsiwezen van Borneo* (Den Haag, 1885); S. H. Schaank, "De Kongsi's van Montrado, Geschiedenis en toestand", *TBG*, XXXV (1893), 498f.

6 Banda setelah penaklukan Coen pada 1621 didiami oleh pemukim yang dipilih di kalangan mantan serdadu, pelayan, dan budak Kompeni yang sudah merdeka, yang menerima status legal sebagai warga negara. Akibatnya mereka diperintah langsung oleh Kompeni dan tunduk pada hukum Belanda. Orang Ambon, kecuali penduduk benteng-benteng Kompeni, secara teknis adalah sekutu Kompeni dan karena itu diperintah menurut hukum mereka sendiri.

7 W. van Hogendorp, "Beschrijving van Timor", *VBG*, I (1781), 273f. J. A. van der Chijs, "Koepang omstreeks 1750", *TBG*, XVIII (1868), 209.

8 R. Padtbrugge, "Beschrijving der zeden en gewoonten van de bewoners van de Minahassa", (1679), *BKI*, XIII (1866), 304, dan "Reis naar Noord Celebes" (1677), *BKI*, XIV (1867), 95.

9 W. IJzerman, "Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602", dalam *Gedenkboek van het Kon. Instituut* (Den Haag, 1926), h. 84f.

10 *TBG* selama abad ke-19 mengeluarkan laporan tahunan mengenai perompakan di perairan Hindia Timur.

11 Mengenai kekhawatiran Batavia bahwa perang saudara mungkin membuat orang Jawa terlatih menjadi serdadu mahir, lihat laporan mengenai pembahasan rahasia Dewan Hindia 20 Mei 1754, dalam De

Jonge, *op. cit.*, X, h. 276.
Raffles, Crawfurd, dan penulis-penulis lain pada awal abad ke-19 dengan keras mengkritik Belanda karena kebijakan Machiavellian mereka, dan tuduhan ini sering diulangi (misalnya, Day, *op. cit.*, h. 48 dan R. Kennedy, dalam bukunya *The Ageless Indies*, New York, 1942, h. 39). Tapi harus dikatakan bahwa Batavia tidak pernah mencoba mengadu domba dua negara Jawa agar saling berperang. Itu akan bertentangan dengan kepentingan komersial mereka.
Pernyataan Raffles sama sekali tidak orisinil. Dalam karya Abbé Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européans dans les les deux Indes*, salah satu buku yang paling banyak dibaca di zaman Raffles, kita baca (I, 273 dari edisi Den Haag, 1774): "(Belanda) mempersenjatai bapak melawan anak dan anak melawan bapak. Klaim si lemah terhadap si kuat, dan si kuat terhadap si lemah, disokong menurut keadaan. Satu hari mereka berpihak pada sang raja, hari berikutnya dengan pemberontak", dst. ~Tapi juga Raynal tidaklah orisinil. Bandingkan dengan kutipan berikut.
"On voyait des villes prendre les armes les unes contre les autres... des voisins se dresser contre leurs voisins; que dis-je, dans la méme maison et dans la mème famille, des frères lutter contre leurs frères, des fils contre leurs parents, et réciproquement." Kutipan ini berasal dari *Libri Historiarum rerum gestarum temporibus Karoli Septimi...*, ditulis pada 1471 oleh Thomas Basin, bishop dan Count of Lisieux, (terjemahan dari edisi Charles Samaran, Tome I, Paris 1933). Kedua kutipan itu tentu saja didasarkan pada Injil Matius 10:21: "Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka."

12 Mengenai perdagangan laut dengan Cina pada awal abad ke-18, lihat J. de Hullu, "Over den Chineeschen handel der Oost Indische Compagnie in de eerste dertig jaren van de 18e eeuw", *BKI*, LXXIII (1917), 32f, dan M. Vigelius, "Stichting der factorij van de Oost Indische Compagnie te Kanton", *TG*, XLVIII (1933), 168f.

13 James Cook, *Voyages*, I, 303.

14 Dr. F. Junghuhn (botanis terkenal) dikutip oleh De Haan, *Oud Batavia*, h. 709.

15 Pada abad ke-18 seorang kapten tentara Hindia Timur menerima 100 gulden setiap bulan serta 50 gulden untuk makan dan tempat tinggal. Seorang serdadu menerima total 10 gulden setiap bulan (Klerk de

Jonge, *op. cit.*, X, h. 276.
Raffles, Crawfurd, dan penulis-penulis lain pada awal abad ke-19 dengan keras mengkritik Belanda karena kebijakan Machiavellian mereka, dan tuduhan ini sering diulangi (misalnya, Day, *op. cit.*, h. 48 dan R. Kennedy, dalam bukunya *The Ageless Indies*, New York, 1942, h. 39). Tapi harus dikatakan bahwa Batavia tidak pernah mencoba mengadu domba dua negara Jawa agar saling berperang. Itu akan bertentangan dengan kepentingan komersial mereka.
Pernyataan Raffles sama sekali tidak orisinil. Dalam karya Abbé Raynal, *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européans dans les les deux Indes*, salah satu buku yang paling banyak dibaca di zaman Raffles, kita baca (I, 273 dari edisi Den Haag, 1774): "(Belanda) mempersenjatai bapak melawan anak dan anak melawan bapak. Klaim si lemah terhadap si kuat, dan si kuat terhadap si lemah, disokong menurut keadaan. Satu hari mereka berpihak pada sang raja, hari berikutnya dengan pemberontak", dst. -Tapi juga Raynal tidaklah orisinil. Bandingkan dengan kutipan berikut.
"On voyait des villes prendre les armes les unes contre les autres... des voisins se dresser contre leurs voisins; que dis-je, dans la même maison et dans la même famille, des frères lutter contre leurs frères, des fils contre leurs parents, et réciproquement." Kutipan ini berasal dari *Libri Historiarum rerum gestarum temporibus Karoli Septimi...*, ditulis pada 1471 oleh Thomas Basin, bishop dan Count of Lisieux, (terjemahan dari edisi Charles Samaran, Tome I, Paris 1933). Kedua kutipan itu tentu saja didasarkan pada Injil Matius 10:21: "Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka."

12 Mengenai perdagangan laut dengan Cina pada awal abad ke-18, lihat J. de Hullu, "Over den Chineeschen handel der Oost Indische Compagnie in de eerste dertig jaren van de 18e eeuw", *BKI*, LXXIII (1917), 32f, dan M. Vigelius, "Stichting der factorij van de Oost Indische Compagnie te Kanton", *TG*, XLVIII (1933), 168f.
13 James Cook, *Voyages*, I, 303.
14 Dr. F. Junghuhn (botanis terkenal) dikutip oleh De Haan, *Oud Batavia*, h. 709.
15 Pada abad ke-18 seorang kapten tentara Hindia Timur menerima 100 gulden setiap bulan serta 50 gulden untuk makan dan tempat tinggal. Seorang serdadu menerima total 10 gulden setiap bulan (Klerk de

Reus, *Geschichtlicher Ueberblick*, dst., h. 110). Seorang gubernur Jawa Timur menerima 2.400 gulden setahun, tapi tunjangan-tunjangan beragam (legal dan ilegal) meningkatkan pendapatannya sampai 100.000 gulden setahun.

16 Mungkin Erberfelt sendiri adalah korban persekongkolan yang mungkin bahkan melibatkan G. J. Zwaardecroon. Lihat L. G. W. de Roo, "De Conspiratie van 1721", *TBG*, XV (1867), 362f dan *Priangan*, I, seksi 2, h. 210.

17 Himpunan baru mengenai semua fakta yang diketahui ada dalam J. Th. Vermeulen, *op. cit.* Untuk dokumen-dokumen, lihat De Jonge, *op. cit.*, IX, 923f. Lihat juga B. Hoetink, "Ni Hoekong Kapitein der Chineezen te Batavia in 1740", *BKI*, LXXIV (1918), 447f.

18 G. J. Valckenier, yang jelas bertanggungjawab untuk fakta bahwa tidak ada upaya yang dilakukan untuk menghentikan pembunuhan massal itu, tidak pernah menerima pengadilan yang adil. Perkara itu berlarut-larut selama sembilan tahun sementara Valckenier ditahan di kastil Batavia dan akhirnya ditutup karena kematian tahanan itu.

19 G. W. van Imhoff, *Consideratiën* (Den Haag, 1763); J. E. Heeres, "De Consideratiën van Van Imhoff", *BKI*, LXVI (1912), 441; A. K. Gijsberti Hodenpijl, "Gustaaf Willem, baron van Imhoff als Gouverneur van Ceylon, 1736-1740", *BKI*, LXXV (1919), 48f. Biografi Van Imhoff: N. J. Krom, *Gouverneur-Generaal Gustaaf Willem van Imhoff* (Amsterdam, 1941).

20 J. A. van der Chijs, "De Bataviasche nouvelles, 1744-1746 en de Bataviasche Koloniale Courant van 1810-1811", *TBG*, XI (1862), 192. Lihat juga M. Schneider, *De Nederlandsche Krant, Van nieuwstijdinghe tot dagblad* (Amsterdam, 1949), h. 188-195.

21 A. K. Gijsberti Hodenpijl, "De mislukte pogingen van G. G. van Imhoff tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen met Spaansch Amerika", *BKI*, LXXIII (1917), 502.

22 Teks perjanjian: De Jonge, X, 298f. Untuk memahami sistem yang diikuti oleh pembagian imperium Mataram, studi G. P. Rouffaer, *De Vorstenlanden*, harusdipelajari.

23 Mulai sekarang para susuhunan menerima gelar "Pakubuwana"–"Porosdunia". Para Sultan menyebut diri sendiri "Amengkubuwana"–"Penguasa dunia". Cabang Surakarta yang lebih muda menyandang gelar "Mangkunegara"–"Pemangku negara". "Paku Alam" punya arti sama dengan "Pakubuwana". Kerajaan Surakarta dimasukkan ke dalam wilayah Jawa oleh Republik Indonesia pada 1950.

24 Dengan perjanjian Salatiga, 17 Maret 1754. Mangkunegara tetap di

bawah kekuasaan susuhunan sebagai penguasa atasan.

25 P. J. Robidè van der Aa, "De groote Bantamsche opstand in het midden van devorige eeuw", *BKI*, XXIX (1881), 1-127.

26 J. de Rovere, "Bantam in 1786", *BKI*, V (1856), 107f dan "Bantam en de Lampongs in 1787", *BKI*, V, 309f.

27 Untuk angka jumlah penduduk: De Jonge, *op. cit.*, XI, lxxvii. Di sini angka berikut diberikan: Batavia dan Dataran Rendah sekitar 1780, 175.000, Priangan, 60.000, Pemerintahan Pantai Timur Laut, 1.435.000, Kerajaan-Kerajaan Mataram, 1.500.000, total, termasuk Banten, dan Madura, 3.450.000.

28 Di sini kita dapatkan salah satu contoh, yang sayangsekali agak jarang, di mana Kompeni mengambil berbagai langkah demi perlindungan penduduk lokal. Tidak ada orang asing, apakah Eropa, Mardijker, Indonesia asing, atau Cina, dibolehkan masuk ke daerah Priangan tanpa izin tertulis dari Pemerintah "karena unsur-unsur asing yang berkeliaran menimbulkan ketidaknyamanan besar dan kerusakan pada orang pribumi" (Resolusi Dewan Hindia 1946?, *Priangan*, III, 437).

29 Untuk kondisi Jawa timur laut, lihat "Memories van Overgave" van Hartingh, Ossenberch, dan lain-lain dalam De Jonge, *op. cit.*, X, XI, dan XII. Setiap gubernur atau residen Kompeni menulis (atau diharuskan menulis) memorandum mengenai kondisi yang ada di daerahnya pada akhir masa jabatannya. "Memoar transfer" ini menyediakan informasi untuk penerusnya. Kutipan berasal dari memorandum J. R. van den Burgh, 19 September 1780 (De Jonge, *op. cit.*, XI, 440). Pernyataan sama dalam "Laporan Singkat" Nic. Hartingh pada 1 Nov. 1756 (De Jonge, *op. cit.*, X, 304).

30 Lihat De Jonge, *op. cit.*, XI, lxxix; E. B. Netscher en J. van der Chijs, *De Munten van Nederlandsch Indië* (Batavia, 1863).

31 Contoh: *Memorandum* van den Burgh, 1780, De Jonge, *op. cit.*, XI, 421.

32 Ordinansi 1708 diterbitkan dalam bentuk singkat dalam van der Chijs, *Plakaatboek*, III, 615-617. Lihat bab mengenai Peradilan dalam karya De Haan *Priangan*, I, 405f dan IV, 613f.

33 Mengenai studi atas hukum adat: C. van Vollenhoven, *De ontdekking van het adatrecht* (Leiden, 1928), juga dalam terjemahan Prancis *Le découverte du droit Indonesien* (Paris, 1933). Mengenai J. F. Gobius: *Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek*, 10 vol. (Leiden, 1910) dengan banyak rincian yang dikumpulkan, sebagian besar diambil dari *Priangan* De Haan. Pembahasan Gobius atas hukum

adat dan Islam telah diterbitkan De Haan (*Priangan*, IV, 645-650). Pemerintahan Batavia menerbitkan beberapa himpunan hukum Jawa (hukum Cirebon pada 1768, hukum Jawa Timur pada 1761) tapi praktis hanya berisi hukum Islam. Himpunan-himpunan ini dikarang untuk membantu pengadilan Belanda, yang diizinkan tapi tidak diharuskan mengikuti peraturan dari hukum itu.

34 Memorandum Nic. Hartingh, De Jonge, *op. cit.*, X, 313.

35 C. Poensen, *BKI*, LII (1901), 223f dan LVIII (1905), 73f, versi bahasa Belanda diterbitkan dan diringkaskan dari salah satu tawarikh utama Yogya dengan judul: *Mangkubumi, Ngayogjakarta's eerste sultan* dan *Amangku Buwono II, Ngayogjakarta's tweede sultan*, dari sini diambil sebagian besar rincian yang disinggung dalam teks.

36 J. C. Baud, Proevevan een geschiedenisvan den handel en het verbruik van opium in Nederlandsch Indië, *BKI*, I (1853), h. 73f; dan De Haan, *Priangan*, IV, h. 14f. Kutipan dari De Jonge, *op. cit.*, X, 313.

Bab 11

1 Bibliografi buku Hindia Timur: J. van der Chijs, "Proeve eener Nederlandsch Indische Bibliographie, 1659-1870", *VBG*, vol. XXXVII (Batavia, 1875), dan sambungannya diterbitkan pada 1879.

2 Buku-buku "berciri merongrong dan menghina" yang diimpor kadang-kadang dibakar atas perintah pemerintah. "Merongrong dan menghina" dalam hal ini berarti: "membahayakan kepentingan Kompeni atau reputasi pejabat-pejabat tingginya". Van der Chijs, *op. cit.*, pada 1766.

3 Edisi pertama Alkitab bahasa Melayu dicetak dalam huruf Amerika Latin_muncul pada 1733 dan dalam huruf Arab pada 1758. Lihat: Boetzelaer, *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië*, h. 121f, h. 248, dan h. 256.

4 Mengenai gerakan *freemason* awal di Batavia, lihat H. Maarschalk, *Geschiedenis van de Orde der Vrijmetselaren in Nederland, onderhoorige Kolonien en Landen* (Breda, 1872), dan J. Hagemann, *Geschiedenis der Vrijmetselarij in de Oostelijke en Zuidelijke deelen des Aardbols* (Surabaya, 1866).

5 P. Bleeker, "Geschiedenis van het Bataviaasch Genootschap", *VBG*, vol. XXV (Batavia, 1853). Radermacher ketika meninggalkan Belanda menyumbangkan sebuah rumah kepada Perkumpulan itu dan menghadiahi institusi kesukaannya sejumlah obyek yang menarik untuk sejarah natural, dengan demikian meletakkan dasar bagi

museum Masyarakat Batavia yang kini terkenal itu. Radermacher dengan seluruh keluarganya terbunuh oleh pemberontak Cina di atas kapal yang sedianya akan membawa dia ke Belanda.

6 Kelompok (*lodge*) pertama didirikan pada 1764 dan bertahan seadanya sampai 1767. Yang kedua dan ketiga didirikan pada 1767 dan 1769 lalu pada 1837 bergabung. Gerakan *Freemasonry* tampaknya telah diperkenalkan dari pos-pos dagang Belanda di hilir sungai Gangga (Benggala) tempat *lodge* Belanda pertama di Asia didirikan, mungkin berkat pengaruh *Lodge* Britania di dekat situ.

7 De Haan, *Oud Batavia*, h. 613.

8 Di Maluku, negosiasi bagi penyerahan koloni kepada Britania pada tahun-tahun setelah 1796 dilakukan dalam bahasa Prancis. Perwira-perwira Belanda bahkan sering kali tidak bisa membaca surat berbahasa Inggris.

9 Pengaruh peristiwa dan gagasan di Amerika terhadap gerakan demokratik Belanda pada seperempat terakhir abad ke-18 bisa diabaikan bila dibandingkan dengan pengaruh Prancis. Lihat F. van Wijk, *De Republiek en Amerika* (Leiden, 1921).

10 Untuk situasi finansial VOC pada masa kejatuhannya, lihat Mansvelt, *Rechtsvorm*, dst., h. 99-111. Sejarawan membahas masalah mengapa Perusahaan India Timur Inggris hidup terus sampai 1858 sementara Kompeni Belanda runtuh pada 1799. Alasan utama ialah bahwa seluruh struktur Republik Belanda lama, yang toh menjadi dasar dari Kompeni, runtuh pada periode Revolusi. Mengenai kekacauan moneter, lihat Surat G. J. Alting pada 31 Des. 1783 (De Jonge, *op. cit.*, XII, 39), serta E. Netscher dan J. van der Chijs, *De Munten van Nederlandsch Indië* (Batavia, 1863).

11 Republik Belanda terus berperang dengan Britania sampai sembilan bulan setelah Prancis dan Amerika Serikat menyepakati perdamaian.

12 J. De Hullu, "De Engelschen op Poeloe Pinang en de tinhandel der Oost Indische Compagnie in 1788", *BKI*, LXXVII (1921), 605. P. A. Leupe, "De Engelschen op Nieuw Guinea, 1792-1793", *BKI*, XXIV (1876), 158.

13 Kapal *Hope*, dengan komandan Kapten Magee, mungkin adalah kapal Amerika pertama yang mengunjungi Batavia. J. De Hullu, "Over den Opkomst van den Indischen handel der Vereenigde Staten an Amerika als mededinger van de Oost Indische Compagnie, 1786-1800", *BKI*, LXXV (1919), 281.

14 Sejak 1747 Pangeran Oranje memegang kedudukan kehormatan

herediter sebagai Direktur Jenderal VOC dan Barat. Lihat: G. J. A. van Berckel, *Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesche opperbestuur over Nederlandsch Indië, 1780-1806* (Leiden, 1880).

15 F. de Haan, "Jacobijnen te Batavia", *TBG*, XLI (1899), 103f. Petisi 5 Des. 1795 dalam De Jonge, *op. cit.*, XII, 359f.

16 Setelah revolusi, nama Republik Belanda Serikat diubah menjadi "Bataafsche Republiek", yang, untuk menghindari kerancuan dengan Batavia dan orang Batavia, saya transkripsikan sebagal "Republlk Batave".

17 Gubernur Cape menyerahkan koloninya kepada Britania.

18 D. van Hogendorp, *Mémoires du général Dirk van Hogendorp, publiés par son petit fils* (Den Haag, 1887). J. A. Sillem, *Dirk van Hogendorp* (Amsterdam, 1890). Untuk memahami hubungan dengan Nederburgh ini pentinglah untuk mengetahui bahwa ayah Nederburgh, yang berpihak pada faksi anti-Oranje, telah dicopot dari kedudukannya di administrasi Rotterdam, dan digantikan oleh saudara Hogendorp (De Haan, *Priangan*, IV, 165, c. 1).

19 D. van Hogendorp, *Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen* (tanpa halaman, 1799).

20 De Jonge, *op. cit.*, XII, 428-429.

21 Hogendorp pernah bekerja pada Perusahaan di Benggala dan mungkin sekali dia mendapatkan sebagian gagasannya dari administrasi Britania di provinsi itu. Lihat catatan kemudian mengenai Raffles dan asal-usul sistem pajaknya.

22 S. C. Nederburgh, "Consideratiën over de Jacatrasche en Preanger Regentschappen", *TBG*, III (1855), 110f. Kutipan di h. 122. Kemudian Nederburgh mengembangkan gagasannya sekali lagi dalam karyanya *Verhandeling over de vragen of en in hoeverre het nuttig en noodzakelijk zou zijn de Oost Indische bezittingen van dezen staat tebrengen op den voel der West Indischevolkplantingen* (Den Haag, 1802).

23 F. W. Stapel, "Uit dewordingsgeschiedenisvan het Charter van 1803", *BKI*, XC (1933), 253f.

24 Piagam itu, dengan "Consideratiën en advijs", dikarang oleh Nederburgh, diterbitkan P. Mijer, *Verzameling van Instructien, Ordonnancien en Reglementen voor deRegering van Nederlandsch Indië* (Batavia, 1848).

25 Mengenai perang di Maluku artikel P. Leupe dalam *BKI*, XII (1864), 262; XVII (1870), 215; XXII (1875), 90; XXVII (1879), 202, dan artikel J. E. Heeres, "Een Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda

en Ambon in 1796 en omtrent den toestand daar", *BKI*, LX (1907), 249f.

26 Perjanjian ini dengan sendirinya membebaskan Pemerintahan Britania dari segala kewajiban yang mungkin telah diembannya terhadap Pangeran Oranje ketika pangeran ini mengeluarkan proklamasi Kew pada 1795.

27 J. Hageman, "Geschiedenis van het Bataafsche en Hollandsche Gouvernement op Java, 1802-1810", *TBG*, IV (1855), 333f dan V (1856), 164f. O. Collet, *L'Ile de Java sous la domination française* (Bruxelles, 1910).

28 Referensi pada perdagangan Amerika dengan Jawa: De Jonge, *op. cit.*, XIII, 35 (surat dari Batavia ke Belanda 31 Jan. 1802), 241 (surat 24 Okt. 1803), 262 (surat 6 Sep. 1805), 286 (surat 15 Nov. 1807), 342 (surat 19 Mar. 1809). Mengenai misi Polanen: *Ibid.*, 356, 471, 489, dan 531. L. W. G. de Roo dalam volume lanjutannya pada De Jonge-Van Deventer, vol. XIII, menerbitkan banyak surat dari dan untuk Van Polanen.

29 Banyak dari kapal yangdisebut milik Denmark mungkin diperlengkapi dengan biaya Negara Belanda, karena kita tahu bahwa Dewan untuk Urusan Asia memakai cara ini untuk mendapatkan paling tidak sebagian dari produk tanah Hindia Timur.

30 Catatan transfer pemerintah kepada Gubernur Jenderal Daendels oleh A. Wiese, De Jonge, *op. cit.*, XIII, 294.

31 Masa jabatan Daendels adalah salah satu periode administrasi Belanda di Hindia yang paling banyak diperdebatkan. Van Deventer, dalam lanjutannya atas seri De Jonge (vol. XIII), mengumpulkan begitu banyak bahan yang memberatkan sehingga L. W. G. de Roo, setelah mengumpulkan bukti lain dari sumber-sumber yang sama, merasa perlu menerbitkan suatu volume tambahan pada seri itu, *Documenten omternt Herman Willem Daendels* (Den Haag, 1909). Daendels sendiri, sebagai pembelaan atas tuduhan-tuduhan itu (dibuat antara lain oleh N. Engelhardt, *Bericht van den Staat der Ned. O. I. Bezittingen* (Den Haag, 1816), menerbitkan tulisannya, *Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen onder het bestuur van den G. G. H. W. Daendels*(Den Haag, 1814), dengan duavolumedokumen. Raffles, yang senang bergaya sebagai pembebas orang Indonesia dari penindasan, merasa enak saja menggambarkan periode jabatan Daendelsdalam warna gelap sehingga catatan sejarahnya sendiri bisa tampak lebih terang.

32 Daendels, *Staat*, h. 39. Harus kita ingat bahwa gubernur pantai timur

laut Jawa adalah Engelhardt, musuh pribadi Daendels. Suatu daftar "tunjangan-tunjangan" muncul di *Staat*, h. 6 catatan.

33 Bandingkan Daendels, *Staat*, h. 15 dengan *Priangan*, I, 417-419, dan IV, 687.

34 J. Van Kan, *Uit derechtsgeschiedenisder Compagnie*, 2 vol. (Batavia, 1930-1935); D. J. Mackay, *Dehandhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het Rechswezen onder Daendels* (Den Haag, 1861). Semua reformasi ini dipersiapkan oleh Komite 1803 dan sudah disinggung dalam Piagam itu, fakta yang amat penting dalam menilai apa yang masing-masing dilakukan Daendels dan Raffles dalam memodernkan administrasi Hindia Timur. Daendels adalah gubernur jenderal pertama yang mengizinkan ibadah publik agama Katolik Roma di Indonesia (Protestan nonkonformis memperoleh kebebasan sama sejak 1766), tapi juga di sini, dia hanya menjalankan artikel 13 dari Instruksi untuk gubernur jenderal pada 1803.

35 Mijer, *op. cit.*, h. 347f.

36 De Jonge, *op. cit.*, XIII, 325-326.

37 De Jonge, *op. cit.*, XIII, 390. Untuk diskusi kebijakan dan prinsip ekonomi Daendels, lihat S. J. Ottow, *De oorsprong der conservatieve richting* (Utrecht, 1937), h. 47f, yang punya pandangan berbeda dari pandangan tradisional yang ditetapkan sejarawan abad ke-19.

38 De Haan, *Priangan*, I, 484f dan IV, 897f. Harus kita ingat bahwa sebagian besar angka kematian yang sangat tinggi di kalangan pekerja Jawa datang dari tulisan-tulisan musuh Daendels, Raffles dan Engelhardt.

39 Surat konfidensial dari Van Overstraten, ketika itu gubernur Jawa, kepada Nederburgh, 9 Mei 1796 (De Jonge, *op. cit.*, XII, 400f).

Bab 12

1 Lihat instruksi Dewan dalam M. L. van Deventer, *Het Nederlandsch Gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811*, vl I, 1811-1820 (Den Haag, 1891). Karya ini direncanakan sebagai lanjutan seri De Jonge, tapi hanya satu volume yang diterbitkan. Instruksi itu ada pada h. 4, catatan 1.

2 "Tampaknya harus dipahami," tulis Lord Minto pada 6 Des. 1811, "bahwa wilayah yang ditaklukkan dari negara Eropa, walaupun secara lokal terletak di dalam batas-batas hak Perusahaan...tetaplah menjadi hak eksklusif Kerajaan." (Van Deventer, *op. cit.*, h. 4).

3 Lord Minto (dari Roxburghshire, Skotlandia), anggota Parlemen

1776-1784 dan 1786-1793, mengusulkan pendakwaan terhadap Sir Elijah Impey. P. E. Roberts (*Cambridge History of India*, V, 246) mengatakan "pendakwaan itu jujur saja dibuat jadi urusan partai." Kutipan pada teks berasal dari volume yang sama, h. 310. Sejarawan cenderung mengabaikan fakta bahwa orang-orang seperti Leyden (yang adalah anak petani dari kampung yang sama di Skotlandia tempat Minto berasal) dan Raffles sepenuhnya bergantung pada gubernur India dan praktis dipaksa menganut bukan hanya pandangan politiknya tapi juga cita-citanya, kalau mereka benar-benar mau mendapatkan kenaikan pangkat. Raffles dalam karyanya *Substance of a Minute* (London, 1814), bicara dengan rasa hormat yang besar mengenai Minto. Lady Raffles, dalam *Memoir*-nya (h. 22) mulai memutarbalikkan perkara dengan mengatakan suaminya adalah promotor orisinil rencana-rencana yang dalam kenyataan berasal dari Lord Minto.

4 Mengenai kehidupannya, lihat W. R. van Hoevell dalam *Tijdschrift van Nederlandsch Indië*, IX (1847), 43f(setelah biografi Walter Scott 1812). Dia adalah asisten dokter bedah yang bekerja pada Perusahaan India Timur, tiba di Madras pada 1803, tinggal dengan Raffles di Pulu Penang pada 1805, dan dari sini mengunjungi Aceh dan bagian lain Sumatra. Tulisan: "On the Languages and Literature of the Indo-Chinese Nations", dalam *Asiatic Researches* (majalah Marsden), X, 1808; *A comparative vocabulary of the Burma, Malayan and Thai languages* (Serampore, 1810); "Sketch of Borneo", *VBG*, vol. VII (1814). Karyanya *Malay Annals*diedit oleh Raffles (London, 1821).

5 T. S. Raffles lahir pada 5 Juli 1781, di atas kapal *Ann* yang dikapteni ayahnya, di Port Morant, Jamaica. Pada 1795 dia mulai bekerja pada Perusahaan India Timur sebagai juru tulis, pada 1805 dia menjadi wakil sekretaris di Penang. Dia meninggal pada 5 Juli 1826, di lahan perdesaan miliknya di Highwood, Middlesex, Inggris. Pada 1809 Lord Minto menunjuknya sebagai "Agen dengan para raja Malaya". Lady Raffles menerbitkan setelah kematian suaminya *Memoir of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles* (London, 1830), yang bermanfaat karena dokumen-dokumen di dalamnya. Pada edisi kedua banyak dokumen penting dihilangkan. Biografi-biografi dari Demetrius Ch. Boulger (London, 1897), Hugh E. Egerton (London, 1900), dan J. A. Bethune Cook (London, 1918), lebih merupakan puja-puji daripada biografi sejarah. R. Coupland dalam biografinya *Raffles, 1781-1826* (Oxford, 1926), mengutip dari banyak sumber Britania yang tidak diterbitkan tapi tampaknya tidak dapat meneliti

buku-buku berbahasa Belanda. Emily Hahn, *Raffles of Singapore. A Biography* (London, 1948) menggambarkan kehidupan pahlawannya dengan penuh simpati dan rinci serta membela reputasinya terhadap beberapa catatan kritis saya dalam edisi pertama buku ini. Tambahan terbaru yang paling bernilai pada literatur Raffles adalah karya J. Bastin, *The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra. An Economic Interpretation* (London, 1957).

6 Raja-raja Jawa tidak membalas surat; tapi yang dari Bali menerima tawaran Raffles (*Memoir*, h. 32-34).

7 Leyden kepada Raffles, *Memoir*, h. 25. Usul Raffles, *Memoir*, h. 71, menurut Bastin, *The Native Policies*, h. 136.

8 Van Deventer, *op. cit.*, h. 5 dan 6.

9 Mengenai serangan 1811: William Thorn, *Memoir of the Conquest of Java* (London, 1815); Bernard, Duke of Saxe-Weimar, *Précis de la campagne de Java, 1811* (Den Haag, 1834); G. B. Hooyer, *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch Indië van 1811 tot 1894*, 3 vol. (Den Haag, 1895-1897).

10 J. C. Baud, "Palembang in 1811 and 1812", *BKI*, I (1853), 7f.

11 Malaka dan pantai barat Sumatra tetap berada di bawah kekuasaan Britania sejak penaklukan pertama pada 1796. Maluku diduduki Britania pada 1810. Dengan demikian, pemerintahan terpisah untuk wilayah-wilayah ini telah terorganisasikan sebelum penaklukan Jawa.

12 Untuk tindakan Raffles melawan perbudakan, lihat H. D. Levyssohn Norman, *De Britsche Heerschappij over Java en de Onderhoorigheden (1811-1816)* (Den Haag, 1857), h. 157f; untuk pandangan Raffles mengenai kondisi budak Batavia, lihat karyanya *History of Java*, I, 84 (ed. kedua).

13 J. C. Baud, "De Bandjermasinsche afschuwelijkheid" *BKI*, VII (1860), 1f. Setelah pengusirannya dari Kalimantan, Hare pindah ke Kepulauan Cocos yang tak berpenghuni, yang setelah beberapa perselisihan sengit dengan Belanda akhirnya diambil Britania pada 1857.

14 Dalam pendahuluan karyanya *History of Java*, I, 4.

15 Th. St. Raffles, *Substance of a Minute... on the introduction of an improved system of internal management and the establishment of a land rental on the island of Java* (London, 1814). Kutipan dari h. 18.

16 Teks perjanjian 1813; van Deventer, *op. cit.*, h. 321 dan 327.

17 Instruksi Lord Minto: *Substance of a Minute*, h. 5-6.

18 Mengenai pokok-pokok ini, lihat buku Bastin, dikutip di catatan 7.

19 *Substance of a Minute*, h. 6.

20 "Revenue instructions of Febr. 11, 1814", dalam *Substance of a Minute*, h. 181f.

21 Lihat memoar Muntinghe 11 Juli 1817, dalam S. Ottow, *De Oorsprong van de conservatieve richting*, h. 75. Buku ini, pada halaman 54-64, memberikan kritik keras, walau agak berlebihan, terhadap kebijakan Raffles. Ini sangat berguna sebagai imbangan terhadap puja-puji yang juga berlebihan terhadap kebijakan itu oleh para penyanjung Raffles.

22 Lihat R. R. Gillespie, *A Memoir* (London, 1816), dan Norman Levyssohn, *op. cit.*, bab viii, h. 301f.

23 Administrasi John Fendall berlangsung dari 11 Maret-19 Agustus 1816.

24 Thomas Horsfield, lahir 12 Mei 1773, di Bethlehem, Pennsylvania, pertama mengunjungi Batavia pada 1800 sebagai dokter bedah di sebuah kapal dagang Amerika. Dua tahun kemudian dia mendapatkan penunjukan dari Gubernur Jenderal Siberg untuk meriset karya di bidang botani farmaseutik. Pada 1818 dia memutuskan bergabung dengan Raffles di Benkulen. Melalui intermediasi Raffles, dia menerima pengangkatan di Museum India. Dia meninggal pada 1850 di London. Karya: artikel-artikel dalam vol. VII dan VIII *VBG*, *Zoological Researches in Java and the Neighboring Islands* (London, 1824) dan lain-lain. Edisi pertama *History of Java* dalam dua volume cetak yang indah muncul di London pada 1817, edisi kedua pada 1830.

25 Karya Crawfurd *History* diterbitkan di Edinburgh pada 1820. Akan menjadi studi menarik untuk melihat bagaimana penulis seperti Hogendorp, Raffles, Crawfurd, dan lain-lain yang berpandangan sama mengenai urusan kolonial, dipengaruhi oleh karya Raynal *Histoire philosophique et politique*. Hogendorp mengutip Raynal sebagai motto untuk *Berigt*-nya pada 1799. Studi Dallas D. Irvine, "The Abbé Raynal and British Humanitarianism", dalam *Journal of Modern History*, III (1933), 564f, tidak banyak menjelaskan masalah ini. Tapi lihat P. J. Platteel, *De Grondslagen der Constitutie van Nederlandsch Indië* (Utrecht, 1936). *Dictionary* diterbitkan pada 1856 di London.

26 Dokumen-dokumen berkenaan dengan negosiasi itu: Van Deventer, *op. cit.*, h. 25f. H. Colenbrander, *Koloniale Geschiedenis* (Den Haag, 1926), vol. II, dan *Willem I, Koning der Nederlanden* (Amsterdam, 1931), I, 304-315. Untuk sejarah lengkap dengan semua rincian, lihat P. H. van der Kemp, *De teruggave der Nederlandsche koloniën*,

1814-1816 (Den Haag, 1810) dan artikel oleh penulis yang sama, *BKI*, XLVII (1897), 239f dan 341f; XLIX (1898) 205f.

27 Studi P. H. van der Kemp, *Oost Indië's herstel in 1816* (Den Haag, 1911), *Het Nederlandsch Bestuur in 1817* (Den Haag, 1913, dengan tiga lanjutannya), *Java's Landelijk Stelsel* (Den Haag, 1916), *Sumatra in 1818* (Den Haag, 1920), harus dicek dengan studi modern, yang dilakukan di bawah pengawasan Prof. C. Gerretson dari Universitas Utrecht: P. J. Patteel, *op. cit.*, D. J. P. Oranje, *Het beleid der Commissie Generaal* (Utrecht, 1936), dan S. Ottow, *op. cit.* Buku paling baru adalah karya D. J. W. van Welderen Rengers, *The Failure of a Liberal Colonial Policy. Netherlands Indies, 1816-1830.* (Den Haag, 1947).

28 Untuk instruksi dan deklarasi prinsip-prinsip oleh Komisaris, lihat Van Welderen, *op. cit.*, h. 54-55.

29 Ottow, *op. cit.*, h. 121. Harus kita ingat bahwa "liberal" dalam kaitan ini selalu dipakai dalam arti sempit "mengikuti teori politik dan ekonomi masa itu", yaitu konsep borjuis awal abad ke-19 atas perkara ini.

30 J. A. van der Chijs, "Geschiedenis van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch Indië", *TBG*, XIV (1864), 212f dan XVI (1867), 1f.

31 Untuk rincian lebih jauh lihat I. J. Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*, h. 63f.

32 "Een school van ronkingsmeiden", Brugmans, *op. cit.*, h. 65.

33 Pertanyaan apakah pendirian Singapura merupakan pelanggaran terhadap perjanjian 1814 dibahas dalam artikel-artikel Van der Kemp, yang menentang pandangan Boulger, *Life of Raffles*. Tanggal pendirian kota itu diberikan menurut Boulger, *op. cit.*, h. 307.

34 Surat 11 Okt. 1824 (Boulger, *op. cit.*, h. 276).

35 Pada 1818 Komisaris menggariskan peraturan untuk administrasi masa mendatang di Hindia dengan Undang-Undang Administrasi ("Regeringsreglement"), yang diterbitkan dalam koleksi P. Mijer (*Verzameling van Instructien*, dst.), h. 399f. Berdasarkan itu mereka menyerahkan roda pemerintahan kepada G. A. Baron van der Capellen sebagai gubernur jenderal.

36 E. B. Kielstra, "Sumatra's Westkust van 1819 tot 1825", *BKI*, XXXVI (1887), 7f, yang pertama dari suatu seri mengenai sejarah daerah Hindia itu sampai 1891 (*BKI*, vol. XXXVII-XLI). Lihat juga artikel J. Keuning "Toba-Bataks en Mandalay Bataks" dalam *Ind.*, VII, h. 80f dan h. 433f.

37 H. A. Idema, "De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817", *BKI*, LXXXIX (1923), 598f.

38 Colenbrander, *Koloniale Geschiedenis*, III, 26f. C. M. Smulders, *Geschiedenis en Verklaring van het tractaat van 17 Maart 1824* (Utrecht, 1856); P.H. van der Kemp, "Geschiedenis van het Londensch tractaat van 1824", *BKI*, LVI (1904), 1f.

Bab 13

1 J. A. Spengler, *De Nederlandsche Oost Indische bezittingen onder het bestuur van de Gouverneur Generaal G. van der Capellen* (Utrecht, 1863); P. H. van der Kemp, "Geschiedenis van het ontstaan van de Nederlandsch Indische lijnwaden verordening van 1824 en het beleid van G. G. van der Capellen, *BKI*, LXI (1908), 419f, dan "Mr. C. T. Elout als Minister van Koloniën – zijn veroordeeling van het beleid van den G. G. van der Capellen", *BKI*, LXII (1909), 1f. Studi-studi ini harus diperbandingkan dengan karya Ottow *Oorsprong der conservatieve richting*, yang membenarkan kebijakan Van der Capellen. Lihat juga C. Th. Elout, *Bijdrage tot de kennis van het koloniaal beleid, getrokken uit de papieren van wijlen Mr. C. Elout* (Den Haag, 1891).

2 H. van der Wijk, *De Nederlandsche Oost Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris General Du Bus de Gisignies* (Den Haag, 1866); W. Th. Coolhaas, *Het Regeeringsreglement van 1827* (Utrecht, 1936).

3 F. Roorda, "Verhaal van den oorsprong en het begin van den opstand van Dipo Negoro volgens een Javaansch handschrift", *BKI*, VII (1860), 137f; P. H. van der Kemp, "Dipanegara, een geschiedkundig Hamlet type", *BKI*, XLVI (1896), 281f. Dalam volume yang sama oleh penulis yang sama, "Brieven van G. G. van der Capellen over Dipanegara's opstand", h. 533f, dan juga "De economische oorzaken van de Java oorlog", *BKI*, XLVII (1897), 1f.

4 H. Merkus de Kock, *De Oorlog op Java van 1825 tot 1830*, 2 vol. (Breda, 1852/53); P. F. J. Louw en E. S. de Klerck, *De Java oorlog van 1825 tot 1830*, 6 vol. (Batavia-Den Haag, 1894/96).

5 Mengenai awal misi van den Bosch ke Hindia, lihat W. A. Knibbe, *De vestiging der monarchie* (Utrecht, 1935). Mengenai karyanya, lihat J. van den Bosch, *Mijne verrichtingen in Indië* (1830-1833) (Amsterdam, 1864).

6 "Sistem Pertanian yang dikontrol Pemerintah" mungkin adalah terjemahan yang lebih baik atas kata Belanda "*Cultuurstelsel*" daripada "*Culture System*" ("Sistem Kultur"), tapi melalui buku Clive Day dan Furnivall, istilah yang disebutkan terakhir ini telah

diperkenalkan. G. McT. Kahin, dalam karyanya *Nationalism and Revolution in Indonesia* memakai terjemahan Inggris yang lebih baik: *Cultivation System* (Sistem Pembudidayaan). Mengenai Sistem ini, lihat D. C. Steyn Parvé, *Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staathuishoudkunde* (Zaltbommel, 1850), yang menjadi yang pertama dari seri panjang kritik tak kenal belas kasihan atas Sistem itu. S. van Deventer, *Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java* (Zaltbommel, 1865), adalah publikasi dokumen-dokumen resmi, dipersiapkan atas perintah Menteri Koloni Fransen van der Putte. N. G. Pierson, *Het Cultuurstelsel* (Amsterdam, 1868), (dalam edisi revisi kemudian *Koloniale Politiek*) adalah buku klasik dari aliran liberal mengenai pokok itu, oleh seorang ekonom utama Belanda. Lihat, lebih jauh, G. H. van Soest, *Geschiedenis van het Kultuurstelsel*, 3 vol. (Rotterdam, 1869-71). Tradisi liberal dihadirkan oleh Clive Day, *The Dutch in Java*, bab vii dan viii. J. S. Furnivall, bab 5, mewakili pandangan lebih luas dan modern. Salah satu pendukung utama Sistem itu ialah J. C. Baud, gubernur jenderal 1833-1836, Menteri Koloni 1840-1848 (lihat P. Mijer, *Jean Chrétien Baud*, Utrecht, 1878). Aturan-aturan administrasi di bawah Sistem itu dirumuskan dalam Undang-Undang Administrasi 1836; lihat P. Mijer, *op. cit.*, h. 497f. Buku terbaru mengenai pokok itu ialah karya R. Reinsma, *Het verval van het Cultuurstelsel* (Den Haag, 1955).

7 Mengenai perkembangan Kepegawainegerian di Hindia, lihat Furnivall, *op. cit.*, h. 87f, 122f, 187f, 237f. Mengenai pelatihan anggota pegawai negeri, A. Vandenbosch, *The Dutch East Indies* (lihat ed., Berkeley, 1941), h. 158f.

8 Pembedaan antara orang "Eropa", "Asia Asing", dan "Pribumi" ("Inlander" atau "inheemschen") dimasukkan ke dalam hukum Hindia Belanda oleh Undang-Undang Administrasi 1854. VOC membedakan orang Kristen (terbagi lagi ke dalam pegawai dan warga negara) dan non-Kristen. Perkembangan pembedaan ini adalah salah satu masalah paling rumit sejarah konstitusional Hindia Timur. Lihat W. E. van Mastenbroek, *De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke indeeling der bevolking van Nederlandsch Indië* (Wageningen, 1934); *ENI*, di bawah "Burger", "Christen-inlander", "Verdeeling der bewoners", "Vreemde Oosterlingen", dst.

9 W. F. M. Mansvelt, *Geschiedenis van de Nederlandsche Handelmaatschappij* (Haarlem, 1824); versi ringkas bahasa Inggris: *A Brief History of the Netherland Trading Society, 1824-1924* (Den Haag, 1924).

10 E. B. Kielstra, "De financiën van Nederlandsch Indië", *Koloniaal Economische Bijdragen*, vol. II (Den Haag, 1904). Juga H. van Kol, "Welk nut trekt Nederland van zijn koloniën?" *IG*, XXIX, 2 (1907), 989f.

11 *Algemen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch Indië* (1833) menyatakan bahwa pada masa itu 1.800 anak-anak bersekolah, tapi dalam angka ini anak-anak Kristen pribumi yang masuk sekolah-sekolah misi dan murid-murid pesantren Muslim tidak termasuk. Laporan berikut adalah dari tahun 1845 dan menyatakan bahwa antara 1833 dan 1845 ada 19 guru yang dikirimkan dari Belanda ke Hindia. Laporan 1849 memberikan ringkasan perkembangan sistem sekolah Hindia Belanda setelah 1816. Untuk berhemat Pemerintah Belanda memerintahkan pembatasan yang sangat ketat terhadap semua kegiatan militer di luar Jawa.

12 Furnivall, *op. cit.*, h. 135. Suatu jajak pendapat atas berbagai penulis mengenai sistem itu ada dalam Reinsma, *Verval van het Cultuurstelsel*, h. 7-10.

13 K. W. van Gorkom, *De Oost Indische Cultures in betrekking tot handel en nijverheid*, ed. ketiga, 3 vol. diedit oleh H. C. Prinsen Geerlings (Amsterdam, 1917/19). Untuk sejarah tanaman-tanaman itu lihat juga artikel masing-masing dalam *ENI*.

14 P. J. Veth, "Het landschap Deli", *Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, vol. II (1877). T. Volker, *From Primeval Forest to Cultivation. A Sketch of the Importance of ... the East Coast of Sumatra* (tanpa halaman, 1928).

15 F. W. Junghuhn lahir di Saxony. Setelah masa muda penuh petualangan (lolos dari benteng Ehrenbreitstein, masuk Legiun Asing Prancis) dia bergabung dengan tentara Hindia Timur Belanda sebagai dokter bedah. Karyanya adalah *Licht und Schattenbildern aus dem Innern Javas* (Leiden dan Amsterdam, 1854/55); *Die Batakländer auf Sumatra*, 2 vol. (Berlin, 1847); *Java, zijn egaante, zijn plantentooi en inwendige bouw*, 4 vol. (Leiden, 1850/54). Biografi: Max. C. P. Schmidt, *Franz Junghuhn* (Leipzig, 1909).

16 J. C. Templer, *The Private Letters of Sir James Brooke* (London, 1853); D. C. Steyn Parvé, *De handelingen van Sir James Brooke op Borneo* (Haarlem, 1859); R. Mundy, *Narrative of Events in Borneo and Celebes during the Occupation of Labuan from the Journals of James Brooke* (London, 1848); Sabine Baring-Could, *A History of Sarawak under its Two White Rajahs* (London, 1909).

17 E. B. Netscher, "De Nederlanders in Djohore en Siak", *VBG*, vol.

XXXV (Batavia, 1870).

18 *Gedenkboek Billiton, 1852-1927*, 2 vol. (Den Haag, 1927).

19 G. Nypels, *De expeditiën naar Bali in 1846, 1848 en 1869* (Haarlem, 1897); M. Th. K. Perelaer, *De Bonische expeditiën, 1859-1860* (Leiden, 1872); W. A. van Rees, *De Bandjermasinsche krijg van 1859-1863* (Arnhem, 1865), dan *Montrado, 1854, naar het dagboek van een Indisch officier* ('s-Hertogenbosch, 1858).

20 H. E. K. Ezerman, "Timor en onze politieke verhouding tot Portugis sedert het herstel van het Nederlandsch Gezag in Oost Indië", *Koloniaal Tijdschrift*, VI, 2 (1917), 865f.

21 E. de Waal, *Nederlandsch Indië in de Staten Generaal sinds 1815*, 3 vol. (Den Haag, 1860/61).

22 W. R. van Hoevell, *Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen (1849-1862)*, 4 vol. (Zaltbommel, 1862/65). Buku lain oleh van Hoevell: *Beschuldiging en Veroordeeling in Indië* (Zaltbommel, 1851); *Dertienjarige beoordeeling van het Kultuurstelsel* (Zaltbommel, 1881); *Reis over Java, Madura en Bali in het midden van 1847*, 3 vol. (Amsterdam, 1849/51).

23 L. W. C. Keuchenius, *De Handelingen der Regeering en Staten-Generaal betreffende het reglement op het beleid der Regeering in Nederlandsch Indië*, 3 vol. (Utrecht, 1857).

24 W. van Hoevell, *De emancipatie der slaven in Nederlandsch Indië* (Groningen, 1848); Artikel "Slavernij", *ENI*.

25 Menyebutkan hanya sedikit dari banyak buku mengenai Douwes Dekker: J. de Gruyter, *Het leven en werken van Ed. Douwes Dekker (Multatuli)*, 2 vol. (Amsterdam, 1920); J. Saks, *Ed. Douwes Dekker. Zijn jeugd en Indische jaren* (Rotterdam, 1937); P. M. S. de Bruyn Prince, *Officieele Bescheiden betreffende den dienst van Multatuli als Oost Indisch Ambtenaar* (ed. kedua, Amersfoort, 1910); C. Th. van Deventer, "Uit Multatuli's dienstjaren", *De Gids*, III (1901), 417f dan II (1910), 223f. Untuk studi baru atas catatan real Douwes Dekker sebagai pejabat kolonial, R. Nieuwenhuys, "De zaak Lebak na honderd jaar" dalam *Ind.*, X (1957), h. 265-289.

26 I. D. Fransen van de Putte, *Parlementaire Redevoeringen 1862-1865* (Schiedam, 1872/73). Seri kedua pidatonya diterbitkan dengan judul *Atjeh, 1873-1885*. W. J. Van Welderen Rengers, *Schets eener parlementaire geschiedenis* (ed. ketiga, Den Haag, 1917); S. L. van de Wal, *De motie Keuchenius. Koloniaal historische studie, 1854-1866* (Groningen, 1934). Lihat juga buku R. Reinsma, dikutip di atas.

27 A. Mijer, *De agrarische verordeningen* (Batavia, 1880), teks undang-undang dan komentar. Lihat A. Vandenbosch, *op. cit.* bab XV.

28 Dengan dekrit 10 Juni 1867, pemerintah memerintahkan penyelidikan mengenai hak-hak kepemilikan atas tanah. Hasilnya diterbitkan dalam: *Eindresumé van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond op Java en Madoera*, 3 vol. (Batavia, 1876-1896).

Bab 14

1 Angka-angka ekspor gula: *ENI*, IV, 177, 179. Ekspor total gula dari Indonesia pada 1885 adalah 420.000 ton, dengan nilai 84 juta gulden (Furnivall, *op. cit.*, h. 207).

2 Furnivall, *op. cit.* h. 207, mengikuti angka-angka yang disajikan oleh *Statistiek* van den Handel.

3 Em. Helfferich, *Die Niederländsch Indischen Kulturbanken* (Jena, 1914); Furnivall, *op. cit.*, h. 196f.

4 C. Gerretson, *Geschiedenis der 'Koninklijke'*, 2 vol. (Utrecht, 1937).

5 Angka-angka dalam *ENI*, di bawah "Geldmiddelen" (II, 750); N. P. van den Berg, *The Financial and Economic Condition of Netherlands India since 1870* (Den Haag, 1895).

6 Angka-angka: Vandenbosch, *op. cit.*, h. 7; statistik juga ada dalam *Report-Visman* (lihat Bab 15), Bagian Pertama, h. 53.

7 J. E. de Sturler, *Het grondgebied van Nederlandsch Oost Indië in verband met de tractaten* met *Spanje, Engeland en Portugis* (Leiden, 1881), yang harus diperbandingkan dengan studi baru A. M. P. Mollema, "De afstand der Nederlandse bezittingen ter kust van Guinea aan Engeland" dalam *Varia Historica, aangeboden aan Prof. Dr. A. W. Byvanck* (Assen, 1954), h. 215f.

8 L. P. Jeekel, *Het Sumatra tractaat* (Leiden, 1881); E. S. de Klerck, *De Atjeh oorlog*, vol. I (satu-satunya volume yang terbit) 283f (Den Haag, 1912).

9 Mengenai negosiasi antara wakil-wakil Aceh dan konsul jenderal Amerika di Singapura, lihat E. S. de Klerck, *op. cit.*, h. 385; dokumen korespondensi antara Batavia dan Den Haag, laporan dari menteri Belanda di Washington, dst.: *Officieele bescheiden betreffende het ontstaan van der oorlog met Atjeh in 1873* (Den Haag, 1881).

10 Pencaplokan Filipina hampir 30 tahun kemudian disetujui Senat dengan mayoritas terkecil yang dimungkinkan. Perjanjian dengan Rusia mengenai penjualan Alaska kepada Amerika Serikat (1867)

pada awalnya ditentang keras. Sekitar 1870, orang Indian di Great Plains dan Barat Daya masih cukup menyibukkan sebagian besar tentara Amerika yang berjumlah kecil itu. Pada masa itu, Amerika sama sekali bukanlah "kekuatan Pasifik", yang baru terjadi 30 tahun kemudian.

11 Studi rinci mengenai urusan ini dilakukan oleh H. P. van Manen berdasarkan riset menyeluruh di arsip di Den Haag dan fotokopi dokumen dari arsip nasional di Washington. Manuskripnya ada di Royal Library, Den Haag.

12 Komunikasi dari menteri Amerika kepada Menteri Luar Negeri Belanda, *Officieele bescheiden*, h. 103.

13 Ada banyak kepustakaan mengenai perang Aceh, tapi dari sudut pandang historis tidak terlalu memuaskan. E. B. Kielstra, *Beschrijving van den Atjeh oorlog*, 3 vol. (1883/85), adalah buku tertua mengenai pokok itu dan wajarlah kalau tidak lengkap. Cerita padat mengenai perang itu dalam *ENI*, I, 78, identis dengan H. T. Damsté, "Atjeh historie", dalam *Koloniaal Tijdschrift*, I (1916), 318f. Untuk artikel dalam majalah-majalah lihat *Repertorium op de literatuur betreffende Nederlandsche Koloniën in tijdschriften*, dst. (Den Haag, 1895f). Mengenai Aceh, lihat C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, 2 vol. (Leiden, 1893/94), terbit dalam bahasa Inggris sebagai *The Achinese*, 2 vol. (London, 1906).

14 Lihat bab pendahuluan buku A. J. Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan* (Den Haag, 1909).

15 Lihat J. M. Somer, *De Korte Verklaring* (Breda, 1934) menggambarkan hubungan Batavia dengan negara-negara Indonesia pada abad ke-19.

16 Lihat I. Brugmans, *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië* (Groningen-Batavia, 1938), dan, khususnya mengenai kebijakan pendidikan pemerintah pada 20 tahun terakhir sebelum invasi Jepang, I. Brugmans dan Mr. Soenarjo, dalam *Report-Visman*, vol. I, bab iii.

17 P. Broshooft, *De ethische koers in de koloniale politiek* (Amsterdam, 1901), A. D. A. de Kat Angelino, *Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië*, 3 vol. (Den Haag, 1929/30), versi bahasa Inggris ringkas berjudul *Colonial Policy*, 2 vol. (Den Haag, 1930).

18 Furnivall, *op. cit.*, h. 311.

19 Furnivall, *op. cit.*, h. 393f; C. Th. van Deventer, *Een overzicht van den economischen toestand der inlandsche bevolking van Java en Madoera* (Den Haag, 1904).

20 H. van Kol, *Nederlandsch Indië in de Staten Generaal, 1897-1909* (Den Haag, 1911).
21 Untuk angka-angka mengenai pendidikan dan sekolah, lihat Centraal Kantoor van Statistiek, *Onderwijsstatistiek* (volume terakhir, Batavia, 1941, mencakup periode 1938/39).

Bab 15

1 G. Gonggrijp, *Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-Indië* (Haarlem, 1928), bab vii; Erich Voigt, *Wirtschaftsgeschichte Niederländisch Indiens* (Leipzig, 1931), bab vii dan viii; Furnivall, *op. cit.*, bab x.
2 Mengenai orang Cina di Hindia Belanda: Colijn-Stibbe, *Nederlandsch Indië*, vol. I, h. 119f; W. J. Cator, *Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies*, h. 25f; V. Purcell, *The Chinese in Southeast Asia*, passim.
3 W. E. van Mastenbroek, *De historische ontwikkeling van de staatsrechtelijke indeeling der bevolking van Nederlandsch Indië* (Wageningen, 1934); J. H. Carpentier Alting, *Grondslagen der rechtsbedeeling in Nederlandsch Indië* (Den Haag, 1926).
4 Lima kriteria tercakup dalam perumusan makna legal istilah orang Eropa: kebangsaan, asal-usul Eropa, prinsip legal dari undang-undang mengenai hubungan antarpribadi, keturunan, dan status yang ada. Perkara ini adalah salah satu yang paling rumit dalam hukum konstitusional Hindia Belanda.
5 Dalam hampir semua perkara hukum perdata, sudah sejak 1855 orang Cina ditempatkan pada status yang sama dengan orang Eropa. Pokok yang paling sulit ialah yang mengatur pewarisan dan adopsi. Kemajuan lebih jauh diperoleh pada 1925, tapi kemudian banyak orang Cina tidak memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan status baru mereka dan, misalnya, tidak menaati peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pendaftaran perkawinan dan perceraian (yang selalu harus diikuti orang Eropa) dan dengan demikian menciptakan kekacauan baru yang sangat membingungkan.
6 Sejarah nasionalisme Indonesia *masih* harus dituliskan, walaupun ada publikasi sejumlah studi berharga pada tahun-tahun sesudah perang. Suatu survei dini (dari sudut pandang Belanda) dapat dilihat dalam Colijn-Stibbe, *o. c.*, h. 339f. J. Th. G. Blumberger, *De nationalistische beweging in Nederlandsch Indië* (Den Haag, 1931)

memberikan banyak rincian tentang dua puluh tahun pertama gerakan itu tapi ditulis hanya dari sudut pandang Belanda yang konservatif. Karena informasi yang terkandung di dalamnya, buku ini dan buku mengenai komunisme di Indonesia oleh pengarang yang sama cukup bernilai. Blumberger juga menulis artikel mengenai nasionalisme dan komunisme dalam *ENI*. Karya Noto Suroto *Van overheersing tot zelfbestuur* (Den Haag, 1931) mencerminkan sikap seorang nasionalis moderat dalam tahun-tahun pertama gerakan itu. Beberapa artikel dalam *Koloniale Studiën, Koloniaal Tijdschrift, Indische Gids*, dan, pada tahun-tahun sesudah perang, juga dalam *Pacific Affairs, Far Eastern Survey* dan dalam *Indonesië* menyajikan sudut pandang beragam. G. McTurnan Kahin mendaftarkan sumber-sumber yang sangat bermanfaat yang diapakai dalam menuliskan *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca N.Y., 1952). Buku-buku berikut oleh penulis-penulis Belanda harus dikaji berdampingan dengan studi-studi Amerika: D. M. G. Koch, *Om de Vrijheid. De Nationalistische beweging in Indonesië* (Jakarta, 1950) dan J. M. Pluvier, *Overzicht van denationalistischebeweging in Indonesia in de jaren 1930-1942* (Den Haag-Bandung, 1-53).

Tulisan-tulisan Sjahrir menyajikan bahan sumber yang berharga. Patutlah memperbandingkan teks-teks bahasa Belanda dan Inggris dari buku-bukunya yang sudah diterjemahkan.

7 G. H. Bousquet, *La Politique musulmane des Pays Bas* (Paris, 1938); versi bahasa Inggris: *Dutch Colonial Policy through French Eyes* (New York, 1940).

8 Lihat artikel "Sarekat Islam", *ENI*, III, 694, dan Aanv. 15, 196, dan 945 (semua oleh Blumberger), dan literatur yang diindikasikan di situ. Lihat juga: F. L. Rutgers, *Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.*

9 A. C. van den Bijllaardt, *Ontstaan en ontwikkeling der staatkundige partijen in Nederlandsch Indië* (Batavia, 1933).

10 Pada musim semi 1942 Sneevliet dieksekusi oleh regu tembak Gestapo di Belanda yang sedang diduduki.

11 Vlekke, "Communism and nationalism in South East Asia" dalam *International Affairs* (R. I. I. A.) vol. XXV (1949) h. 149f.

12 J. Th. P. Blumberger, *De communistische beweging in Nederlandsch Indië* (Haarlem, 1928).

13 J. Kielstra, *Taak en toekomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië* (Utrecht, 1927), dan (oleh penulis yang sama) *Het koloniale vraagstuk van dezetijd* (Haarlem, 1928), D. van der Zee, *De S.D.A.P. en Indonesië* (Amsterdam, 1929). Lihat jilid-jilid De Stuw, majalah

yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok progresif, 1929 dan tahun berikutnya. Suatu retrospek: J. Meijer Ranneft, "Hollands fout in Indie" dalam *De Gids*(1-37), I, 305f.

14 Untuk rinciannya lihat G. McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY. '52) h. 78-88. Untuk pemberontakan di Sumatra: H. Bouman, *Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesisch nationalisme op Sumatra's Westkust*(Groningen, 1949).

15 Lihat Draft perjanjian bertanggal 9 Agustus 1919, J. C. Hurewitz *Diplomacy in the Middle East. A documentary Record*, vol II, Doc. 26.

16 Pernyataan oleh pemerintah Rusia pada 26 Juni 1918, diikuti oleh perjanjian Rusia-Persia 1921.

17 Untuk warna, lihat bab I buku ini. Lambang negara Republik Indonesia menunjukkan suatu perisai, dipegang oleh "Garuda", terbagi dalam lima bidang, dengan lima simbol yang mewakili *Panca Sila*, kepercayaan kepada Tuhan, atau kredo (sebuah bintang), kesadaran nasional (banteng, yakni kepala banteng), kedaulatan rakyat (pohon beringin), keadilan sosial (batang padi), solidaritas kemanusiaan (rantai gelang). Pemilihan simbol-simbol ini dengan mudah dimengerti dari apa yang sudah dibahas dalam bab-bab terdahulu buku Ini.

18 Lagu itu dikarang oleh W. R. Supratman (1903-1948), ketika dia jadi guru di sekolah rakyat. Pada 1936 dia menulis novel *Perawan Desa* yang dilarang pemerintah karena kecenderungan politiknya.

19 A. Neytzell de Wilde dan J. Th. Moll, *The Netherlands Indies during the Depression* (Amsterdam, 1936); Jan O. M. Broek, *Economic Development of the Netherlands Indies*(New York, 1942), seri I. P. R. Inquiry; Furnivall, *op. cit.*, bab X, XI, dan XII.

20 J. M. Pluvier, *Overzicht van de ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch Indië in de jaren 1930 tot 1942* (Den Haag, 1953), h. 38-40.

21 Lihat M. Schneider, *De Nederlandse krant* (Amsterdam, 1949), h. 188-195.

Bab 16

1 Pada 1940, Mr. Thamrin, anggota Indonesia pada Dewan Rakyat, mengajukan usul untuk menyatakan celaan atas sikap polisi. Pemerintah dengan cepat mengakui bahwa peraturannya terlalu keras, dan bahwa ada petugas yang sedang bertugas menafsirkan

instruksi mereka dengan cara yang agak sesuka hati (*Verslagen Volksraad 1939-1940, Onderwerp 140, Doc. 2*). Usul itu disetujui oleh mayoritas anggota.

2 Mengenai "gerakan Taman Siswa", lihat antara lain: S. Mangunsarkoro, "Het Nationalisme in de Taman Siswa beweging", dalam *KS*, XXVI (1937), h. 287f dan oleh penulis yang sama, "Leidende gedachten bij het zg. *Among-systeem* van de Taman Siswa scholen" (*KS*, XXVII, 1938), h. 595f.
3 Untuk perkembangan gerakan nasionalis ini, lihat Pluvier, o. c., bab VI.
4 Lihat "Report-Visman", vol. I, bab IV, h. 81-93.
5 *Verslag van de Commissie tot Bestudeering van Staatsrechterlijke Hervormingen, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 14 september 1940*, ("Visman-report"), vol. II.
6 Pluvier, *o. c.*, h. 125-126.
7 Lihat M. A. Aziz, *Japan's Colonialism and Indonesia* (Diterbitkan oleh Neth. Institute of International Affairs, I, Den Haag, 1-55).

RINGKASAN KRONOLOGIS

I. PERIODE HINDU-INDONESIA

Di luar Kepulauan

Tahun 25-220. Dinasti Han Muda berkuasa di Cina dan membangun hubungan dengan Kepulauan Indonesia dan dunia barat.

200-600. Buddhisme berkembang di Cina. Banyak peziarah Cina pergi ke India.

671-685. Peziarahan I-Tsing melewati Indonesia dan India.

800-900. Perpindahan ibukota imperium Arab ke Baghdad (817) dan pembukaan pelabuhan Kanton untuk perdagangan asing oleh kaisar-kaisar dinasti Sung mengakibatkan hubungan komersial sangat meningkat antara Asia bagian barat dan timur.

±1260. Islam masuk ke Gujarat, pusat dagang utama di India untuk Kepulauan Indonesia.

1260-1295. Cina disatukan di bawah pemerintahan kaisar Mongol, Kublai Khan. Ekspansi Cina pertama ke selatan.
1307-1368. Pemberontakan Cina terhadap Mongol, diikuti pendirian dinasti Ming.
1403. Kaisar-kaisar dinasti Ming memulai kebijakan ekspansi ke selatan.
1498. Vasco Da Gama tiba di India.

Di dalam Kepulauan

±1-700M. Pengaruh Hindu masuk ke Indonesia ke Kepulauan Hindia Timur.
132. Duta Jawadwipa ke Cina.
±160. Ptolemeus dari Alexandria, untuk pertama kali dalam literatur, menggambarkan Kepulauan Hindia Timur.
±400. Prasasti Sanskerta tertua (di Muara Kaman) membuktikan keberadaan negara Hindu-Indonesia di Borneo Timur.
414. Peziarah Cina Fah-hien melaporkan bahwa Brahmanisme adalah agama utama di Jawa dan Sumatra.
424. Raja Gunavarman dari Kashmir mengkhotbahkan Buddhisme di Sumatra.
±670. Catatan pertama mengenai kerajaan Shriwijaya di Sumatra.
±750. Pembangunan candi Shiwais di dataran tinggi Dieng.
±770-800. Buddhisme Mahayana mendominasi Jawa Tengah di antara penguasa. Konstruksi Borobudur.
± 870. Raja-raja Shiwais memerintah di Jawa Tengah (Mataram).
±900. Pembangunan kumpulan candi Lara Jonggrang di Prambanan.
1102. Prasasti Muslim di Leran, Jawa, indikasi pertama Islam di Kepulauan Indonesia.
±1290. Kota pertama di Indonesia (Perlak di Sumatra bagian utara) penduduknya memeluk Islam.
1292. Marco Polo mengunjungi Sumatra.
1293. Ekspedisi Cina melawan Kertanagara tiba di Jawa.
1294. Pangeran Vijaya mengusir tentara Cina dari Jawa dan mendirikan kerajaan Majapahit.
1331-1364. Gajah Mada, patih Majapahit, memperluas kekuasaan raja-rajanya atas banyak pulau.
±1350. Pengungsi dari Jawa mendirikan pelabuhan Malaka.
1405. Cheng-Ho, duta kaisar Cina, mengunjungi Malaya. Duta-duta berikut memaksa semua raja di Sumatra dan Jawa

	mengakui Cina sebagai penguasa atasan.
1414.	Malaka menerima Islam.
1419.	Kuburan Muslim pertama di Gresik, Jawa.
±1475.	Islam menyebar ke Maluku.
1478.	Tahun tradisional kejatuhan Majapahit.

PENGUASA JAWA

±415.	Raja Purnawarman dari Jawa Barat disebutkan dalam prasasti Sanskerta.
732.	Sanjaya, raja Mataram, penguasa Shiwais Jawa Tengah, disebutkan dalam prasasti.
778-870.	Dinasti Shailendra yang Buddhis memerintah Jawa Tengah.
±870.	Dinasti Shailendra berhenti memerintah Jawa tapi terus berkuasa di Shriwijaya.
928-1007.	Dharmawangça, raja di Jawa Timur (?).
1019-1049.	Airlangga, raja Jawa Timur.
1135-1160.	Jayabhaya, raja Kediri, memerintahkan penulisan *Bharatayudha*.
1190-1222.	Kertajaya, raja terakhir Kadiri, dikalahkan Arok (?).

Raja-raja Singasari

1222-1227.	Rajasa (Arok) (?).
1227-1248.	Anusapati.
1248-1268.	Wisnuwarddhana.
1268-1292.	Kertanagara.

Raja-raja Majapahit

1294-1309.	Kertarajasa (Vijaya).
1309-1328.	Jayanagara.
1329-1350.	Tribhuwana.
1350-1389.	Rajasanagara (Hayam Wuruk).
1389-1429.	Wikramarwaddhana.1429. Suhita (?).
1447-1451.	Bhre Tumapel (?).
1451-1453.	Bhre Pamotan (?).
1456-1466.	Bhre Vengker (?).
1466-1478.	Bhre Pandan Salar (?).

II. PERIODE ISLAM-PORTUGIS

Di luar Kepulauan

1519-1522.	Pelayaran pertama mengelilingi dunia.
1529.	Usaha Prancis pertama untuk membuka hubungan dagang dengan Hindia Timur.
1571.	Orang Spanyol dari Meksiko menduduki Filipina dan mendirikan Manila.
1579.	Francis Drake mengunjungi Kepulauan Indonesia.
1580.	Portugal dipaksa menerima Felipe II dari Spanyol sebagai raja.

Di dalam Kepulauan

1509.	Kapal Portugis pertama tiba di Malaka.
1511.	Portugis di bawah Albuquerque menaklukkan Malaka. D'Abreu mengunjungi Maluku.
± 1515-1530.	Ali Mughajat Shah mendirikan kesultanan Aceh.
1521.	Orang Spanyol di atas kapal Magellan *Victoria* melewati Maluku.
1522.	Antonio de Brito membangun benteng di Ternate.
1526.	Banten dan Jayakarta masuk Islam.
1536-1540.	Antonio Galvao memantapkan kekuasaan Portugis di Maluku.
1546.	Franciscus Xaverius mengunjungi Maluku.
1570.	Sultan Hairun dari Ternate dibunuh oleh Portugis. Pemberontakan umum dipimpin putranya Baabullah (1570-1584).
1574.	Portugis terusir dari Ternate tapi bertahan di Ambon. Empat tahun kemudian mereka membangun benteng di Tidore.

Penguasa Jawa

Sultan-Sultan Demak

1511.	Patih Yunus menaklukkan Japara dan menjadi Sultan pertama Demak.

Sultan-Sultan Banten

1526-1552.	Faletahan (Sunan Gunung Jati), Sultan pertama Banten.
1552-1570.	Hasanuddin, Sultan kedua Banten.

1570-1580.	Maulana Jusup, Sultan ketiga Banten.
1580-1596.	Maulana Muhammad, Sultan keempat Banten.

III. VOC (KOMPENI HINDIA TIMUR BELANDA)

DI LUAR KEPULAUAN

1595.	Cornelis de Houtman berlayar ke Hindia, tiba pada 23 Juni 1596.
1602.	VOC didirikan.
1619.	17 Juli, VOC dan Perusahaan India Timur Inggris menyepakati perjanjian persahabatan dan kerjasama.
1641.	Republik Belanda dan Portugal menyepakati gencetan senjata 10 tahun.
1648.	Perdamaian dengan Spanyol.
1651.	Perang dengan Portugal dimulai lagi.
1661.	Perdamaian dengan Portugal.
1672.	Republik Belanda, diserang oleh Prancis, Britania, dan lain-lain, berada di pinggir jurang kehancuran.
1795.	Republik Belanda menaklukkan tentara Prancis. Revolusi demokratik mengakhiri sistem pemerintahan oligarki, berikut VOC.
1799.	31 Desember, VOC dibubarkan.
1802.	Perjanjian damai Amiens memulihkan semua wilayah di Kepulauan kepada pemerintahan Belanda.
1803.	Perang dengan Britania pecah lagi.
1804.	"Piagam untuk Hindia Timur" disetujui oleh parlemen Belanda (direvisi pada 1806).
1810.	Belanda dicaplok oleh Napoleon Bonaparte.

DI DALAM KEPULAUAN

1596.	Perjanjian pertama antara Belanda dan raja Indonesia (Banten).
1599.	Kapal-kapal Belanda pertama tiba di Maluku.
1605.	Orang Ambon menerima kedaulatan Kompeni Belanda. Portugis meninggalkan Maluku.
1606.	Orang Spanyol dari Filipina menduduki benteng Portugis yang ditinggalkan di Tidore.
1607.	Persekutuan antara Belanda dan Sultan Ternate.

1609-1636.	Iskandar Muda, Sultan Aceh, mengancam kedudukan Portugis di Malaka.
1619.	Persaingan Belanda-Inggris berujung pada perang sesungguhnya. 30 Mei, benteng Belanda di Jayakarta dikepung Banten. Pendirian Batavia.
1621.	Coen menaklukkan Kepulauan Banda, pusat produksi pala.
1623.	"Pembantaian Ambon" menyebabkan kerjasama Britania-Belanda berakhir.
1629.	Pengepungan kedua terhadap Batavia.
1635-1638.	Perang pertama di Maluku untuk memaksakan pembatasan produksi rempah-rempah.
1641.	Penaklukan Malaka.
1642.	"Statuta Batavia" diundangkan.
1650-1656.	Perang kedua di Maluku.
1651-1683.	Sultan Abulfath Abulfatah (Agung) dari Banten menjadikan ibukotanya suatu pusat dagang internasional.
1662.	Perjanjian Painan mendobrak kekuasaan Aceh di pantai barat Sumatra.
1663.	Spanyol meninggalkan Maluku.
1667.	Speelman memaksa Sultan-Sultan Ternate dan Tidore berdamai. Perjanjian Bongaya memastikan penyerahan Makasar.
1674.	Pemberontakan Trunajaya dari Madura mematahkan kekuasaan Sultan Mataram.
1677.	Perjanjian antara Mataram dan Batavia yang membuat Sultan mengakui Belanda sebagai penguasa atasan.
1679-1683.	Perang ketiga di Maluku berakhir dengan penyerahan total Ternate.
1682-1684.	Perang suksesi di Banten yang berakhir dengan hilangnya kemerdekaan.
±1696.	Pohon kopi dimasukkan ke Jawa dari India.
1704-1708.	Pemberontakan di antara taklukan-taklukan Sultan Mataram, perang suksesi pertama di Jawa.
1717-1723.	Perang suksesi kedua.
1740.	Pemberontakan orang Cina di Batavia, dan pembantaian orang Cina yang terjadi kemudian. Ini menimbulkan perang baru dengan Mataram.
1743. 11 Nov.,	perjanjian antara Batavia dan Susuhunan, yang menjadi bawahan Kompeni dan menyerahkan daerah bagian utara

	dan timur wilayahnya.
1747.	Upaya pertama membuka hubungan dagang langsung antara Batavia dan Amerika.
1749-1755.	Perang suksesi Jawa ketiga, berakhir dengan pembagian Mataram menjadi negara Surakarta dan Yogyakarta.
1757.	Di dalam wilayah Surakarta, negara bawahan Mangkunegara diciptakan.
1778.	Masyarakat Sains Batavia dibentuk.
1796.	Semua pos dagang dan wilayah jatuh ke tangan Britania, kecuali Jawa dan wilayah-wilayah di timur.
1800-1808.	Hubungan dagang yang kerap dengan Amerika Serikat.
1803.	Semua wilayah kecuali Jawa, Makasar, Timor, dan Palembang. (?)
	Jawa menjadi wilayah Prancis. Serbuan Britania dengan cepat mengakhiri keadaan ini.
1813.	Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah.

Gubernur Jenderal

1609-1614.	Pieter Both.
1614-1616.	Gerard Reynst.
1616-1618.	Laurens Reaal.
1618-1623.	Jan Pieterszoon Coen.
1623-1627.	Pieter de Carpentier.
1627-1629.	Jan Pieterszoon Coen.
1629-1632.	Jacques Specx, penjabat gubernur jenderal.
1632-1636.	Hendrik Brouwer.
1636-1645.	Anthony van Diemen.
1645-1650.	Cornelisvan deLijn.
1650-1653.	Carel Reyniersz.
1653-1678.	Johan Maetsuycker.
1678-1681.	Rijklof van Goens.
1681-1684.	Cornelis Speelman.
1684-1691.	Johannes Camphuijs.
1691-1704.	Willem van Outhoorn.
1704-1709.	Johan van Hoorn.
1709-1713.	Abraham van Riebeeck.
1713-1718.	Christoffel van Swoll.
1718-1725.	Henricus Zwaardecroon.
1725-1729.	Matheus de Haan.
1729-1732.	Dirk Durven.

1732-1735. Dirk van Cloon.
1735-1737. Abraham Patras.
1737-1741. Adriaan Valckenier.
1741-1743. Johannes Thedens.
1743-1750. Gustaaf W. van Imhoff.
1750-1761. Jacob Mossel.
1761-1775. P. A. van der Parra.
1775-1777. Jeremias van Riemsdijk.
1777-1780. Reinier de Klerk.
1780-1796. Willem A. Alting.
1796-1801. Pieter van Overstraten.
1801-1805. Johannes Silberg.
1805-1808. Albert H. Wiese.
1808-1811. Herman W. Daendels.
1811. Jan Willem Janssens.
1811-1816. Thomas S. Raffles (Letnan Gubernur untuk Perusahaan India Timur Inggris).

Sultan-Sultan Mataram

1582-1601. Senopati.
1613-1645. Cakrakusuma Ngabdurrahman (Sultan Agung), setelah 1625 dengan gelar Susuhunan.
1645-1677. Prabu Amangkurat I (Sunan Tegalwangi).
1677-1703. Amangkurat II.
1703-1705. Amangkurat III (Sunan Mas).
1705-1719. Pakubuwana I (Sunan Puger).
1719-1725. Amangkurat IV.
1725-1749. Pakubuwana II.

Sultan-Sultan Mataram

1749-1788. Pakubuwana III.
1788-1820. Pakubuwana IV.

Sultan-Sultan Yogyakarta

1755-1792. Abdurrahman Amangkubuwana I (Mangkubumi).
1792-1810. A. Amangkubuwana II (Sultan Sepuh).
1810-1814. A. Amangkubuwana III.
1814-1822. A. Amangkubuwana IV.

IV. HINDIA DI BAWAH KERAJAAN BELANDA

Di luar Kepulauan

1813.	Kemerdekaan Belanda dipulihkan.
1814.	Perjanjian London menjamin restitusi wilayah-wilayah luar negeri.
1824.	Perjanjian London mengenai Singapura dan Sumatra.
1830.	Revolusi di Belgium melawan pemerintahan Raja Willem dari Belanda.
1848.	Konsitusi liberal diperkenalkan di Belanda.
1860.	Douwes Dekker menerbitkan bukunya *Max Havelaar*.
1870.	Undang-Undang Agraria diundangkan.
1871.	Britania Raya dan Belanda merevisi perjanjiannya mengenai Singapura.
1929.	Awal depresi ekonomi.
1939.	Perang pecah di Eropa.
1940.	10 Mei, Invasi atas Belanda.
1941.	7 Desember, Serangan terhadap Pearl Harbor.

Di dalam Kepulauan

1813.	Kesultanan Banten berakhir. Kerajaan bawahan Paku Alam didirikan di dalam wilayah kesultanan Yogyakarta.
1819.	Raffles, kembali di Hindia, mendirikan Singapura.
1825-1830.	Pemberontakan Dipanegara, pangeran Yogyakarta.
1830.	Sistem Kultur diperkenalkan.
1840.	James Brooke berdiam di pantai bagian utara Borneo (Sarawak).
1845-1860.	Campur tangan Britania di Borneo bagian utara menyebabkan kebijakan ekspansi yang lebih kuat dari Batavia.
1863.	Awai kultur tembakau di Sumatra bagian utara, langkah pertama ke arah pembangunan di pulau-pulau luar.
1870-1880.	Perusahaan swasta ambil bagian dalam pertanian yang dikontrol pemerintah. Gula menjadi hasil tanaman ekspor utama Jawa.
1873.	Perang dipermaklumkan terhadap Aceh. Perang ini berlangsung sampai 1904.
1900-1910.	Tindakan menggebu-gebu untuk memperluas administrasi efektif atas seluruh Kepulauan.

1908.	"Budi Utomo" didirikan oleh intelektual Jawa.
1912.	"Sarekat Islam", gerakan massa Muslim, didirikan di Surakarta.
1916.	Pembentukan Dewan Rakyat; sidang pertama 18 Mei 1918.
1922.	Awal agitasi Komunis.
1925.	"Konstitusi Hindia Timur" diundangkan (direvisi pada 1927 untuk menjamin mayoritas di Dewan Rakyat dipegang orang Indonesia).
1926.	Agitasi Komunis berujung pada pecahnya kekerasan di Jawa Barat dan Sumatra Barat.
1930.	Depresi menimbulkan kerugian besar di Hindia. Jepang memanfaatkan keadaan untuk mencoba memperoleh kontrol ekonomi.
1941.	8 Desember (sebelah barat garis tanggal internasional): Belanda mengumumkan perang dengan Jepang; kapal-kapal skuadron Hindia Timur menyerang konvoi Jepang.
1942.	10 Januari, pendaratan Jepang pertama di tanah Hindia Belanda (Tarakan).
1942.	28 Februari, Pertempuran Laut Jawa.
1942.	8 Maret, Bandung jatuh.

Gubernur Jenderal

1816.	John Fendall (Lt. Gub.).
1816-1818.	Komisaris Jenderal Raja Willem I dari Belanda.
1818-1826.	G. A. Baron van der Capellen.
1826-1830.	L. P. J. Viscount Du Bus de Ghisignies (Komisaris Jenderal).
1830-1833.	J. Count van den Bosch.
1833-1836.	J. C. Baud.
1836-1840.	D. J. de Eerens.
1840-1844.	P. Merkus.
1844-1845.	J. C. Reynst.
1845-1851.	J. J. Rochussen.
1851-1856.	A. J. Duymaer van Twist.
1856-1861.	C. F. Pahud.
1861-1866.	L. A. J. W. Baron Sloet van den Beele.
1866-1872.	P. Mijer.
1872-1875.	J. Loudon.
1875-1881.	J. W. van Lansberge.
1881-1884.	F. 'sJacob.

1884-1888. O. van Rees.
1888-1893. C. Pijnacker Hordijk.
1893-1899. C. H. J. van der Wijck.
1899-1904. W. Rooseboom.
1904-1909. J. B. van Heutsz.
1909-1916. A. F. van Idenburg.
1916-1921. J. P. Count of Limburg Stirum.
1921-1926. D. Fock.
1926-1931. A. C. D. de Graeff.
1931-1936. B. C. de Jonge.
1936-1942/
1946. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.

Raja-raja Surakarta

1820-1823. Pakubuwana V.
1823-1830. Pakubuwana VI.
1830-1858. Pakubuwana VII.
1858-1861. Pakubuwana VIII.
1861-1893. Pakubuwana IX.
1893. Pakubuwana X.

Raja-raja Yogyakarta

1822-1855. Amangkubuwana V.
1855-1877. Amangkubuwana VI.
1877-1921. Amangkubuwana VII.
1921. Amangkubuwana VIII.

INDEKS

E

F

I

R

S

W

X

Y

Z

Nusantara merupakan salah satu karya tentang sejarah Indonesia yang ditulis dengan perspektif komprehensif. Kurun waktu yang dibahas sejak zaman pra-kolonial sampai 1941. "Buku ini dirancang sebagai sejarah Indonesia dan bukan perluasan perusahaan dan koloni Belanda di luar negeri," tulis Vlekke, sang penulis, dalam prakatanya. Karena itu, sejarah negara-negara dan pranata-pranata di Indonesia pra-kolonial mendapat porsi pembahasan lebih besar.

Uraiannya tentang sejarah Indonesia pra-kolonial itu sangat penting dan kaya ilustrasi. Tentang Majapahit, misalnya. Menurut Vlekke, kejayaan Majapahit runtuh bukan disebabkan oleh kerajaan Islam.

Vlekke juga punya penjelasan menarik tentang mengapa masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam, tapi pada saat yang sama begitu bersahabat dengan tradisi lokal (sinkretis). Para raja Jawa, menurut Vlekke, memilih Islam bukan karena mereka suka dengan agama itu, melainkan karena situasi politik mendorong mereka untuk bertindak demikian. Mereka dihadapkan pilihan sulit antara memilih bersekutu dengan Portugis atau bekerjasama dengan Johor dan Demak, yang berarti harus memilih antara Kristen dan Islam.

Membaca *Nusantara* seperti membaca dongeng karena kaya ilustrasi. Inilah kelebihan lain karya ini dibandingkan kebanyakan buku sejarah tentang Indonesia.

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
JL. PERMATA HIJAU RAYA BLOK A-18 JAKARTA 12210
Telp. (021) 530 9170 (hunting) Fax. (021) 530 9294
E-Mail:kpg@penerbit-kpg.com,
Website: http://www.penerbit-kpg.com

Pemesanan Langsung:
E-mail: pesanan@penerbit-kpg.com, SMS: 0815 9080660

ISBN 13: 978-979-91-0107-5